



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1
Bandung 40117
Telp.: (022) 4230031
Fax.: (022) 4203342
Website: www.kai.id
e-mail: usd@kai.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024

PROSPEKTUS

INDIKASI JADWAL			
Tanggal Efektif	: 13 November 2024	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 19 November 2024
Masa Penawaran Umum Obligasi	: 15 November 2024	Tanggal Distribusi Secara Elektronik	: 19 November 2024
Tanggal Penjualan	: 18 November 2024	Tanggal Pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Bursa Efek Indonesia	: 20 November 2024

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Perkeretaapian dan Jasa Penunjang Lainnya terkait Perkeretaapian Berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Indonesia

Kantor Pusat :
Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1
Bandung 40117
Telp.: (022) 4230031
Fax.: (022) 4203342
Website: www.kai.id
e-mail: usd@kai.id

Kantor Perwakilan/DAOP:
Jl. Pegangsaan Timur No. 6
Stasiun Cikini, Jakarta Pusat
Telp.: (021) 6928261
Fax.: (021) 6912275
Website: www.kai.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI") DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp437.800.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp446.360.000.000,- (empat ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp13.840.000.000,- (enam ratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 19 November 2027 untuk Obligasi Seri A, 19 November 2029 untuk Obligasi Seri B dan 19 November 2031 untuk Obligasi Seri C.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp116.540.000.000,- (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.808.180.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp83.135.000.000,- (delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.813.450.000,- (lima miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp70.000.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp300.325.000.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.323.075.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp71.000.000.000,- (tujuh puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, Sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 19 November 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 19 November 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B dan 19 November 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas imbalan yang diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah.

Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIPREFERENSIKAN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KEJUJUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN DAPAT MEMBELI KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH BAIK SELURUHNYA MAUPUN SEBAGIAN DITUJUKAN SEBAGIAN PEMBAYARAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH PERSEROAN TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENYEBABKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMATUHI KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH. PERJANJIAN PERWALIAMANATAN SUKUK IJARAH. PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH HANYA DAPAT DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DARI PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI. RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH WAJIB DILAPORKAN KEPADA OJK OLEH PERSEROAN PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KERJA SEBELUM PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH TERSEBUT DI SURAT KABAR. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH, BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEAMANAN DAN KESELAMATAN OPERASIONAL KERETA API. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN II, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

^{us}AAA (Triple A)
^{us}AAA_{sy} (Triple A Syariah)

Pencatatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia Penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment) PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



WALI AMANAT OBLIGASI
PT Bank Mega Tbk
WALI AMANAT SUKUK IJARAH
PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 15 November 2024

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dengan nilai pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan target dana yang dihimpun sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dengan sisa imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan target dana sisa imbalan Ijarah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat KL.504/IX/1/KA-2024 tanggal 2 September 2024 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan berencana untuk mencatatkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada PT Bursa Efek Indonesia ("Bursa Efek") berdasarkan persetujuan prinsip yang diterbitkan oleh BEI sebagaimana termaktub dalam Surat No. S-10365/BEI.PP3/10-2024 tanggal 2 Oktober 2024 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Emisi Sukuk Ijarah yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Prospektus ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam Undang-Undang Pasar Modal. Keterangan lebih lanjut mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan saham Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. PT CIMB Niaga Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Keterangan lebih lanjut mengenai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab X tentang Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN.....	xvii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM....	42
III. PERNYATAAN UTANG.....	47
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	70
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	75
VI. FAKTOR RISIKO	97
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	102
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	103
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	103
2. STRUKTUR MODAL DAN PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN..	106
3. PERIZINAN.....	108
4. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	111
5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	143
6. ASURANSI	152
7. KETERANGAN MENGENAI ASET.....	154
8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN	157
9. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN.....	158
10. SUMBER DAYA MANUSIA.....	204
11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	215
12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI.....	216
13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	223
14. PERKARA HUKUM	226
15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN.....	228
16. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI	246
17. PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN	247
18. TEKNOLOGI INFORMASI.....	253
19. RISET DAN PENGEMBANGAN	254
20. PERSAINGAN DAN PROSPEK USAHA.....	256
21. STRATEGI BISNIS PERSEROAN	258
22. PERSETUJUAN LINGKUNGAN	261
23. TANGGUNG JAWAB SOSIAL.....	262

IX. PERPAJAKAN.....	265
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH	267
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	269
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI	273
XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT SUKUK IJARAH.....	283
XIV. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH	291
XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN.....	297
XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	299
XVII. LAPORAN KEUANGAN.....	341

DEFINISI DAN SINGKATAN

Afiliasi	<p>Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK pasal 1 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:<ol style="list-style-type: none">1. suami atau istri;2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ol style="list-style-type: none">1. orang tua dan anak;2. kakek dan nenek serta cucu; atau3. saudara dari orang yang bersangkutan.c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; ataug. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	<p>Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi dan/ atau Pokok Obligasi termasuk Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran.</p>
Akad Ijarah I	<p>Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Perseroan dengan Pemegang Sukuk Ijarah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad Ijarah Nomor: KL.705/VIII/21/KA-2024 seluruhnya dibuat di bawah tangan, dan bermeterai cukup.</p>
Akad Ijarah II	<p>Berarti perjanjian atau kontrak tertulis antara Pemegang Sukuk Ijarah dengan Perseroan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, sebagaimana dituangkan dalam Akad Ijarah Nomor: KL.705/VIII/22/KA-2024 seluruhnya dibuat di bawah tangan, dan bermeterai cukup.</p>

Balai Yasa	Berarti tempat perawatan sarana perkeretaapian untuk 2 (dua) tahunan atau Semi Perawatan Akhir (SPA), Perawatan 4 (empat) tahunan atau Perawatan Akhir (PA), dan rehabilitasi atau modifikasi.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Bapepam dan LK	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Bursa Efek atau BEI	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 UUP2SK, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	Berarti tingkat bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Cicilan Imbalan Ijarah	Berarti bagian dari Imbalan Sukuk Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan dari pihak ketiga, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
DAOP	Berarti daerah Operasional yang terletak di wilayah Pulau Jawa yang terdiri dari 9 (sembilan) wilayah Daerah Operasi dimana dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya saling terhubung di antara seluruh wilayah tersebut.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Denda Keterlambatan	<p>Berarti sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh Perseroan sebagai akibat dari kelalaian dan keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran atau terlambat membayar sehubungan dengan keterlambatan Cicilan Imbalan Ijarah dan keterlambatan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah</p> <p>Batasan besarnya Denda Keterlambatan tersebut akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah.</p> <p>Dana dari Denda keterlambatan tersebut setelah dikurangi dengan kerugian riil (jika ada) yang dialami Pemegang Sukuk Ijarah, apabila terdapat kelebihan akan digunakan sebagai dana sosial dan jika terjadi kekurangan bayar maka harus dibayarkan sesuai dengan jumlah kekurangan bayar yang dimaksud dengan memperhatikan Prinsip Syariah di Pasar Modal.</p>
DIVRE	<p>Berarti Divisi Regional yang terletak di wilayah Pulau Sumatera yang terdiri dari 4 (empat) wilayah Divisi Regional dimana dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya tidak saling terhubung diantara seluruh wilayah tersebut, kecuali untuk wilayah Sumatera Selatan yaitu Divre 3 Palembang dan Divre 4 Tanjung Karang.</p>
Dokumen Emisi	<p>Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah Di KSEI, Persetujuan Prinsip dari BEI, Prospektus dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.</p>
Double Track	<p>Berarti 2 (dua) jalan rel atau jalur yang diperuntukan untuk lalu lintas Kereta Api.</p>
Efek	<p>Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.</p>
Efektif	<p>Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan UUP2SK, yaitu Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p>
Emisi	<p>Berarti kegiatan penawaran dan/atau Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat pada pasar perdana melalui Penawaran Umum dan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.</p>
Emplasemen	<p>Berarti halaman muka/depan di sekitar Stasiun atau terminal bongkar muat yang terdiri dari beberapa jalur atau jalan rel Kereta Api.</p>
Entitas Asosiasi	<p>Berarti perusahaan di mana Perseroan mempunyai pengaruh yang signifikan, namun tidak mempunyai pengendalian atau pengendalian bersama, melalui partisipasi dalam pengambilan keputusan atas kebijakan finansial dan operasional <i>investee</i>.</p>

FKP	Berarti Formulir Konfirmasi Penjatahan yaitu formulir hasil penjatahan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi dan/atau Sukuk Ijarah kepada pemesan melalui Penjamin Emisi dan/atau Sukuk Ijarah.
FPPO	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
FPPI	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Ijarah.
GD	Berarti Gerbong Datar yang digunakan untuk angkutan barang seperti angkutan peti kemas dan semen.
Grup	Berarti KAI dan Perusahaan anaknya.
Harga Penawaran	Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok dan/atau dari jumlah Sisa Imbalan Sukuk Ijarah.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hutang	Berarti hutang-hutang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
Imbalan Ijarah	Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi berdasarkan Dokumen Emisi, yang berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Denda Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
IMO	Berarti Prasarana Perkeretaapian Milik Negara.
Jaminan	Berarti Obligasi dan Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah Terhutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang dan/atau Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tapi tidak terbatas Pokok Obligasi, jumlah sisa Imbalan Sukuk Ijarah Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
Kemenkumham	Berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KKBW	Berarti Gerbong pengangkut batu bara dengan 2 gandar.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo dan/atau Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang dan/atau Sukuk Ijarah dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang dan/atau Sukuk Ijarah untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, cicilan imbalan Ijarah pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran sisa Imbalan Sukuk Ijarah hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KRD	Berarti Kereta Rel Diesel dimana kereta hanya dapat dioperasikan dengan tenaga diesel.
KRL	Berarti Kereta Rel Listrik dimana kereta hanya dapat dioperasikan dengan tenaga listrik khususnya Listrik Aliran Atas.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang dalam Emisi dan/atau Sukuk Ijarah bertugas mengadministrasikan dan/atau Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Pendaftaran dan/atau Sukuk Ijarah di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUP2SK.
LAA	Berarti Listrik Aliran Atas, jaringan listrik yang digunakan oleh Kereta Rel Listrik.
Manajer Penjatahan	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan dan/atau Sukuk Ijarah menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum. Dalam penawaran umum Obligasi ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.
Masa Penawaran	Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan dan/atau Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian dan/atau Sukuk Ijarah.

Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Mu'jir	Berarti Perseroan yang mengalihkan hak manfaat atas gerbong datar angkutan kereta api barang batubara milik Perseroan.
Musta'jir	Berarti Pemegang Sukuk yang menerima pengalihan hak manfaat atas gerbong datar angkutan kereta api barang batubara milik Perseroan.
Objek Ijarah	Berarti aset sukuk yang digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk berupa nilai manfaat atas aset berwujud yang dalam Penerbitan Sukuk Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 adalah Hak Guna (manfaat) atas Angkutan Kereta Api berupa gerbong khusus mengangkut batu bara milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Obligasi	<p>Berarti surat berharga bersifat utang, sesuai dengan Seri Obligasi dengan nama Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dalam jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Obligasi Seri A sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah pokok Rp437.800.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah)- Obligasi Seri B sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah pokok sebesar Rp448.360.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah)); dan- Obligasi Seri C sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah pokok sebesar Rp613.840.000.000,- (enam ratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah). <p>yang merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.</p> <p>Jumlah pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembelian kembali sebagai pelunasan pokok obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No.21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No.21/2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU No.21/2011.

Pefindo atau Pemingkat	Berarti PT Pemingkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan kegiatan usaha pemingkatan atas: a. Suatu Efek; dan/atau b. Pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI; atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
Pengakuan Utang	Berarti Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 21 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No. 5 tanggal 18 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II No. 5 tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan III No. 9 tanggal 11 November 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah	Berarti Akta Pengakuan atas Kewajiban dalam Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 24 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I No. 8 tanggal 18 September 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan II No. 8 tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan III No. 12 tanggal 11 November 2024 yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
Penawaran Awal	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas dan/atau Sukuk Ijarah yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran dan tingkat Bunga dan/atau cicilan imbalan Ijarah.
Penawaran Umum	Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Obligasi yang tidak terjual, yang dalam hal ini adalah adalah PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas serta pihak lainnya (jika ada), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Sukuk Ijarah atas nama Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Imbalan Sukuk Ijarah yang tidak terjual, yang dalam hal ini adalah adalah PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas serta pihak lainnya (jika ada), sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang seluruhnya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas yang seluruhnya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 19/2020	Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
Peraturan OJK No. 20/2020	Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 49/2020	Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 3/2018	Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 26 Maret 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
Peraturan OJK No. 07/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2014 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 9/ 2017	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2014 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
Peraturan OJK No. 18/2015	Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
Peraturan OJK No. 30/2015	Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 33/2017	Berarti Peraturan OJK No: 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.36/2014	Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 55/ 2015	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No.26 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No.27 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Efektif	Berarti Pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sehingga Perseroan melalui Penjamin Emisi Efek berhak menawarkan dan menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi	Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 di KSEI No.SP-088/OBL/KSEI/0824 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah	Berarti Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 di KSEI No.SP-023/SKK/KSEI/0824 tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 22 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 6 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 6 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 10 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 25 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 9 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 9 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 13 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 20 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 4 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 4 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 8 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 23 tanggal 30 Agustus 2024 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 7 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 7 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 11 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah	Berarti pernyataan yang dibuat oleh Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia No. 19 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia No. 3 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia No. 3 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia No. 7 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.
Pernyataan Pendaftaran	Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Perseroan	Berarti PT Kereta Api Indonesia (Persero), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Bandung atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia	<p>Berarti badan atau badan hukum yang mempunyai hubungan Afiliasi karena:</p> <ol style="list-style-type: none">kepemilikan atau penyertaan modal Negara Republik Indonesia baik langsung maupun tidak langsung; ataudikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia; tidak termasuk Perusahaan Anak.
Perusahaan Anak	<p>Berarti Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.</p>
Pokok Obligasi	<p>Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum, berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp437.800.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah);Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp448.360.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah); danObligasi Seri C dalam jumlah pokok sebesar Rp613.840.000.000,- (enam ratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah); <p>Jumlah Pokok masing-masing seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan pokok masing-masing seri Obligasi yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 Perjanjian Perwaliamantan.</p>
Prasarana	<p>Berarti jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api agar kereta api dapat dioperasikan, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.</p>
Prasarana Pendukung	<p>Berarti sumber daya yang dimiliki Perseroan dan dipergunakan untuk mendukung operasional perkeretaapian seperti namun tidak terbatas pada Gedung perkantoran, stasiun, Balai Yasa dan Dipo perawatan sarana kereta api, fasilitas alat kerja pendukung perawatan infrastruktur perkeretaapian, Rumah Dinas, Griya Karya, Mess/Wisma, Gudang penyimpanan <i>spare part</i> dan tidak terbatas pada supervisi pelaksanaan pengerjaan prasarana pendukung operasional perkeretaapian.</p>
Prospektus	<p>Berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah.</p>
Prospektus Awal	<p>Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, tingkat suku bunga obligasi, cicilan imbalan Ijarah atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.</p>
Prospektus Ringkas	<p>Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.</p>
Public Service Obligation (PSO) atau Kewajiban Pelayanan Publik	<p>Berarti Kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api.</p>

RCHSEMS	Berarti <i>Railway Contractor Health Safety Environment Management System</i> .
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi dan/atau Sukuk Ijarah dan/ atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dengan Pemegang Rekening.
RTS	Berarti <i>Rail Ticketing System</i> yaitu aplikasi penjualan tiket kereta api.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPSI	Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
RUPST	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
Sarana	Berarti kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dapat dipindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah	Berarti bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Sisa Imbalan Ijarah	Berarti jumlah bagian dari pengalihan hak manfaat yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Sukuk Ijarah yang diterbitkan dan ditawarkan melalui Penawaran Umum, dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">- Sukuk Ijarah Seri A dalam jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp116.540.000.000,- (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah);- Sukuk Ijarah Seri B dalam jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp83.135.000.000,- (delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah);- Sukuk Ijarah Seri C dalam jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp300.325.000.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah).
SMKP	Berarti Sistem Manajemen Keselamatan Perkeretaapian.

SRI	Berarti <i>Safety Railway Information</i> .
Sukuk	Berarti sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (<i>syuyu/undivided share</i>), atas aset yang mendasarinya.
Sukuk Ijarah	<p>Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, yang ditawarkan sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp116.540.000.000,- (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.808.180.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;- Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp83.135.000.000,- (delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.819.450.000,- (lima miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi; dan- Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp300.325.000.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.323.075.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. <p>yang merupakan surat berharga syariah yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.</p> <p>Jumlah Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah masing-masing Seri Sukuk Ijarah dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwalianan Sukuk Ijarah.</p>
Sukuk Ijarah Berkelanjutan	Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Efek Sukuk Ijarah kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).

Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• Seri A: 19 November 2027• Seri B: 19 November 2029• Seri C: 19 November 2031
Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Sukuk Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, yaitu: <ul style="list-style-type: none">• Seri A: 19 November 2027• Seri B: 19 November 2029• Seri C: 19 November 2031
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah	Berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak, yang ditentukan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Penjatahan	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam addendum Perjanjian Perwaliamanatan.
UU	Berarti Undang-Undang.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah sebagian dengan UUP2SK.
UUPT	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
UUP2SK	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.
Wali Amanat Obligasi	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Wali Amanat Sukuk Ijarah	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK yang dalam hal ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

SINGKATAN PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

BPRSB	PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka
KALOG	PT Kereta Api Logistik
KAWIS	PT Kereta Api Pariwisata
KAPM	PT KA Properti Manajemen
KCI	PT Kereta Commuter Indonesia
KCIC	PT Kereta Cepat Indonesia China
MITJ	PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek
PSBI	PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
Railink	PT Railink
RMU	PT Reska Multi Usaha
TBIS	PT Terminal Batu Bara Internasional Srengsem
Finarya	PT Fintek Karya Nusantara

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan berdasarkan laporan keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Berkedudukan di Bandung dan didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 2 tanggal 1 Juni 1999 sebagaimana diubah dengan Akta Perbaikan No. 14 tanggal 13 September 1999, yang seluruhnya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini dikenal dengan Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C-17171.HT.01.01.TH.99. tanggal 1 Oktober 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 101166000151 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Bandung No. 1104/BH.10.11/XI/99, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 2000, Tambahan No. 240 (**"Akta Pendirian Perseroan"**).

Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 24 tanggal 5 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0175387 tanggal 24 Juli 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151267.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 26 Juli 2024, Tambahan No. 22447 (**"Akta No. 24/2024"**) (selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar"**)

2. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan Dana Moneter Internasional (IMF) pada 10 Oktober 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan mencapai sebesar 2,9%, turun 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang mencapai sebesar 3%. Upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 yang terus berlanjut pada 2024 masih akan dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global, mulai dari konflik geopolitik yang tak kunjung usai, pertumbuhan ekonomi China dan Amerika Serikat yang melemah, volatilitas harga komoditas, hingga ancaman perubahan iklim. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

Mengutip kajian keuangan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagian besar dollar memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih tetap stabil di kisaran 5%. Proyeksi World Bank sebesar 4,9%, Asian Development Bank (ADB) dan IMF sebesar 5,0% serta The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebesar 5,2%. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%. Inflasi Indonesia diproyeksikan sebesar 2,8% dengan nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp15.000 per Dollar AS.

Mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global yang turut berdampak pada perekonomian nasional, arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas (*pro-stability*) khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Strategi Tahun 2024 Berdasarkan asumsi proyeksi makroekonomi di atas, KAI telah menetapkan strategi untuk tahun 2024 mendatang. Strategi tersebut berfokus pada:

1. Meningkatkan peran angkutan barang dalam logistik nasional dan peran angkutan penumpang, serta menyusun *road map* pengembangan pengelolaan aset;
2. Mengoptimalkan operasi layanan kereta api yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas angkut serta penambahan frekuensi KA dan pengurangan waktu tempuh perjalanan kereta api dengan menerapkan basis digitalisasi;
3. Mendukung peningkatan angkutan penumpang dan angkutan barang dengan menghilangkan *backlog*, serta inovasi berkelanjutan dengan penerapan proses digitalisasi dalam perawatan dalam mendukung efisiensi biaya;
4. Meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api melalui penguatan kultur dan budaya dari patuh menjadi proaktif dengan mengimplementasikan program strategis sebagai berikut:
 - Pelatihan *basic safety*
 - Pelatihan *safety leadership*
 - *Safety Champion*
 - *Workload Analysis* SDM Safety
 - Penetapan KPI Keselamatan
 - Penetapan *Training Need Analysis* Keselamatan
 - Peningkatan Pemenuhan Implementasi SMKP
 - Kebijakan *Just Culture*
 - Pedoman RCHSEMS
 - *Safety Observation Card*
 - Revitalisasi SRI
 - Penguatan Program 5 Kunci Keselamatan
 - Perluasan Akses Informasi Keselamatan
 - Sistem *Reward* KeselamatanImplementasi program strategi budaya keselamatan proaktif oleh seluruh *stakeholder* sebagai pencegahan kecelakaan dan insiden yang dapat mengancam keselamatan pegawai, pihak ketiga, mitra, tamu dan penumpang serta operasional perkeretaapian.
5. Meningkatkan kompetensi SDM untuk menghadapi perubahan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai;
6. Melakukan kajian pengembangan bisnis dan implementasinya serta menjalin kerjasamanya dengan seluruh *stakeholders* untuk mendukung pendapatan;
7. Penguatan manajemen risiko, optimalisasi penugasan pemerintah dan optimalisasi pendanaan proses bisnis perusahaan;
8. Menjalankan efisiensi yang terukur, dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api melalui penguatan kultur dan budaya.

Secara umum, prospek angkutan penumpang masih cukup menjanjikan dengan berbagai inovasi produk dan layanan KAI yang dapat memperkaya pengalaman penumpang. Kereta api masih menjadi transportasi andalan masyarakat untuk bepergian antar kota di Jawa dan Sumatera.

Sementara prospek angkutan barang masih sangat menarik seiring tumbuhnya pasar. Hingga beberapa tahun mendatang, KAI masih akan berinvestasi pada pengembangan bisnis angkutan batubara di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sesuai dengan rencana kenaikan kapasitas angkut hingga 105 MTPA mulai tahun 2030. Permintaan batubara dari negara-negara Asia sebagai bagian bauran energi dunia hingga tahun 2050 masih cukup tinggi, meskipun disertai sederet regulasi dan kebijakan dalam rangka mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Kami pun menyadari, portofolio bisnis Perusahaan masih sangat bergantung pada pendapatan dari angkutan Batubara di Sumbagsel. Oleh karena itu, KAI perlu untuk mencari alternatif bisnis lain yang sesuai dengan rencana Pemerintah dalam hal pengembangan transportasi di bidang perkeretaapian.

Selain itu, transformasi digital yang dijalankan KAI telah mengembangkan model bisnis angkutan barang yang semula bersifat *business to business* (B2B) menjadi bisnis pengembangan dan pengelolaan terminal. KAI juga akan melanjutkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan *customer experience*. Layanan pada *Access by KAI* akan dioptimalkan untuk meningkatkan *new revenue stream*. Selain itu, KAI akan terus berkolaborasi dengan banyak pihak dalam pemetaan pasar serta pemasaran terintegrasi.

KAI juga akan lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar, serta beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global dan lokal.

3. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Potensi peningkatan permintaan pasar transportasi kereta api baik angkutan penumpang maupun angkutan barang harus diantisipasi Perseroan dengan pengembangan sarana dan prasarana serta kualitas layanan perkeretaapian.

A. Strategi Angkutan Penumpang

Di segmen angkutan penumpang, strategi Perseroan di tahun 2024 mencakup aspek-aspek pengembangan sebagai berikut:

1. *Revenue Growth*

a. *Pricing Strategy*

- Implementasi RMS (*Revenue Management System*), Aplikasi untuk optimalisasi penentuan tarif dan *inventory* serta meningkatkan *agility* dan respon terhadap perubahan pasar untuk mencapai pendapatan terbaik

b. *Routes Optimization*

- Rute Baru atau Perpanjangan Relasi
 - 1) KA Papandayan relasi Gambir - Garut PP (sudah beroperasi terhitung mulai tanggal 24 Januari 2024)
 - 2) KA Pangandaran relasi Gambir - Banjar PP (sudah beroperasi terhitung mulai tanggal 24 Januari 2024)
 - 3) KA Batavia relasi Solo - Gambir PP dijalankan sebagai KA tambahan (Jalan pada saat kondisi *long weekend* yang disesuaikan dengan ketersediaan sarana)
 - 4) KA Malioboro Ekspres relasi Purwokerto - Malang PP (sudah jalan reguler setelah angkutan lebaran 2024)
 - 5) KA Bandung - Ketapang PP (belum diusulkan perijinannya)
 - 6) KA Malang-Ketapang PP (sedang proses usulan perijinan, target beroperasi di tahun 2025)
 - 7) KA Baturaden Ekspres semula relasi Bandung-Purwokerto menjadi Pasar senin - Purwokerto (sedang proses perijinan operasi)
 - 8) KA Blambangan Ekspres semula relasi Ketapang-Semarang tawang menjadi Ketapang – Pasar senin (sudah dioperasikan mulai 24 Juli 2024)
- Penambahan Frekuensi
 - 1) KA Malabar 2 Relasi Bd-MI PP (sudah beroperasi terhitung mulai tanggal 24 Januari 2024)
 - 2) Sembrani tambahan Relasi Gambir-Sbi PP
 - 3) Argo Parahyangan relasi Gambir-Bandung PP dengan pemanfaatan idle KA :
 - Gajayana
 - Harina
 - Argo Wilis
 - Pandalungan
 - Turangga
 - 4) Perubahan pola operasi KA Sawunggalih menjadi pola N-slagh

- Intermoda dan *Bundling*
 - 1) Inisiasi untuk memperluas rute layanan Damri sebagai angkutan terusan/*feeder*.
 - 2) Inisiasi untuk memperluas titik layanan Taksi Bluebird di stasiun sebagai angkutan *first* dan *last mile*.
 - 3) Inisiasi layanan transportasi *online* yang terintegrasi pada *platform Access*.
 - 4) Inisiasi Kerjasama dengan TJ layanan Royal Trans sebagai angkutan lanjutan.
 - 5) Kerjasama dengan Hotel, *rental car*, tempat wisata untuk membuat *bundling* tiket.
- 2. *Data Driven Marketing*
 - a. *Targeted Campaigns*: implementasi *marketing automation* and *Customer Relationship Management*
 - *Marketing Automation*

Implementasi *Marketing Automation* tingkat lanjutan sebagai *platform* analitik untuk proses analisa data pelanggan untuk meningkatkan LTV (*Lifetime Train Value*), menurunkan CAC (*Customer Acquisition Cost*), Meningkatkan *User Engagement* dan pembelian berulang melalui serangkaian program marketing yang dipersonalisasi dan diotomatisasi
 - *Customer Relationship Management*

Implementasi CRM (*Customer Relationship Management*) tingkat lanjutan dengan penambahan fitur dan fungsi untuk mengelola dan membangun hubungan, memahami, memelihara, dan meningkatkan interaksi perusahaan dengan pelanggan dengan melibatkan semua aspek interaksi termasuk pemasaran dan layanan pelanggan.
 - b. *Partnerships*: Kolaborasi dengan Dinas Pariwisata, pelaku industri pariwisata dan akomodasi hotel
 - Bekerja sama dengan Pemerintah atau instansi terkait untuk mendapatkan dukungan terutama terkait kebijakan yang menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan angkutan kereta api
 - Bekerjasama dengan penyedia jasa transportasi yang bisa saling melengkapi dengan angkutan kereta api agar dapat tercipta layanan transportasi yang terintegrasi dari *first mile* dan *last mile*
 - Bekerjasama dengan Hotel atau tempat wisata sebagai pelengkap layanan dan dapat dibuat suatu *bundle package* yang terdiri dari layanan transportasi, akomodasi dan wisata sehingga memudahkan pelanggan mendapatkan layanan dalam satu paket lengkap
 - c. *Loyalty Programs*: implementasi *loyalty programs* dengan beragam *benefit*
 - d. *Branding Strengthening*: *Sponsorship*, *Promotional Event* & *Co-Branding*
- 3. *Winning Customer Experience*
 - a. *Improved Comfort*: Upgrade interior KA untuk meningkatkan kenyamanan
 - b. *Onboard Services*: Meningkatkan kualitas layanan Wi-Fi, *entertainment*, menu makanan
 - c. *Accessibility*: Memastikan bahwa Stasiun dan Kereta api ramah disabilitas, Penambahan fasilitas *FR Boarding gate*
 - d. *Community Engagement* : *Gathering* dengan *customer*, komunitas dan mitra kerja
 - e. *improve Customer Satisfaction Index* , *improve cleanliness* SLA

B. Strategis Angkutan Barang

Di segmen angkutan barang, strategi Perseroan di tahun 2024 mencakup aspek-aspek pengembangan sebagai berikut:

1. *Optimalisasi dan Pengembangan Mitra Existing*

Meningkatkan angkutan barang dengan pengembangan angkutan barang, optimalisasi alat kerja dan efisiensi pola kerja dengan mitra.
2. *Peningkatan Kapasitas*

Menangkap peluang dan potensi angkutan barang dengan meningkatkan kapasitas angkut sarana maupun prasarana.
3. *Pengoperasian KA Mitra Baru*

Ekspansi angkutan baru dan mitra baru dengan pendekatan optimalisasi atau investasi sarana.

4. Restrukturisasi Tarif
Strategi yang dilakukan untuk mendongkrak pendapatan, ketertarikan calon mitra supaya menggunakan Kereta dan menaikan kapasitas angkutan barang bagi mitra.
5. Digitalisasi *Rail Cargo System*
Pengembangan Sistem Komunikasi Informasi untuk menghilangkan faktor error manusia, mempermudah *monitoring*, evaluasi dan menentukan strategi yang akan diambil dengan menggunakan data *real time*.

C. Strategis Non Angkutan

Di segmen non angkutan barang, strategi Perseroan di tahun 2024 mencakup aspek-aspek pengembangan sebagai berikut:

1. Digitalisasi Bisnis Non Angkutan
 - a. Peningkatan basis data melalui pengembangan fitur Portal Aset
Portal Aset yang sebelumnya hanya dipergunakan untuk inputing data kontrak, pada periode 2024 ini Perseroan mengembangkan agar calon mitra potensial dapat mengetahui proses bisnis kerja sama aset mulai dari penyampaian minat kerja sama, negosiasi, *drafting* dan finalisasi kontrak, serta pemantauan pelaksanaan kerja sama.
 - b. Pemasaran Digital aset potensial melalui pengembangan aplikasi Portal yang dapat diakses oleh calon mitra dengan ruang lingkup katalog aset, nilai sewa, pengajuan minat/sewa, negosiasi dan *Monitoring* kontrak.
 - c. Rencana implementasi ini akan diberlakukan kepada para calon mitra potensial, diantaranya PT Sebastian Citra, PT Reska Multi Usaha dan PT Budi Karya Raharja.
2. Peningkatan nilai jual aset melalui perbaikan/renovasi aset strategis yang sudah tidak layak sehingga diharapkan dapat menarik minat calon mitra.
Berdasarkan hasil evaluasi internal proses bisnis non angkutan Perseroan, kondisi aset yang saat ini dipasarkan Perseroan kurang layak apabila dibandingkan dengan usaha sejenis di sekitarnya, dimana kondisi bisnis pengelolaan aset Perseroan baik di area stasiun maupun diluar stasiun hanya sebatas menyewakan aset berupa tanah dan/atau bangunan dengan kondisi sesuai dengan pada saat aset tersebut diminati oleh para mitra. Perseroan hingga saat ini belum menyediakan aset yang siap pakai. Perseroan di tahun 2024 mengalokasikan biaya perbaikan/renovasi untuk meningkatkan nilai jual yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang lebih tinggi. Contoh pelaksanaan yang saat ini dalam telah diperbaiki adalah aset Perusahaan di wilayah Daerah Operasi 5 Purwokerto dan aset dimaksud telah dikerjasamakan dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai minimum yang ditetapkan Perseroan. Calon mitra potensial yang saat ini berproses dengan menggunakan pendekatan rencana strategis ini antara lain PT Kereta Api Properti Manajemen.
3. Membangun *engagement* dengan *customer* melalui *Customer Gathering*, *Customer Dashboard*, *Customer Reward and Appreciation* (*additonal Benefit*, Diskon, *give away*, etc)
4. Peningkatan kapabilitas SDM melalui *Training* terkait dengan non *Farebox* dan bisnis properti, *Training Sales Projection and Negotiation*, dan *Benchmark NFB*

Perseroan bekerja sama dengan IPMI International Business School untuk meningkatkan kapabilitas SDM segmen non angkutan.

Terdapat kecenderungan dalam pendapatan usaha KAI, khususnya pendapatan dari angkutan barang, yang didominasi oleh angkutan batu bara sekitar 85%. Pada saat musim hujan, secara teknis kondisi cuaca basah dapat mengganggu kegiatan eksplorasi atau eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik tambang. Akibatnya, menghentikan sementara kegiatan operasional produksi karena medan tambang yang sulit demi keselamatan pekerja. Hal ini berdampak pada tidak terealisasinya angkutan batu bara sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Kegiatan usaha Perseroan tidak memiliki sifat musiman.

Terdapat ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah, dimana Perseroan telah menandatangani berbagai perjanjian dengan Pemerintah dan entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah dan diperkirakan akan terus melakukan transaksi sejenis di masa mendatang. Pemerintah sebagai satu-satunya pemegang saham Perseroan memberikan dukungan kepada Perseroan dalam bentuk subsidi untuk menutup selisih biaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk subsidi PSO dan menjaga keselamatan perjalanan kereta api dengan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara dalam bentuk subsidi IMO.

Subsidi IMO diperoleh melalui penugasan setiap tahunnya dari Pemerintah dalam hal ini Kemenhub kepada KAI untuk melaksanakan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) namun ada keterbatasan alokasi DIPA yang dianggarkan oleh Kemenhub untuk kontrak IMO antara KAI dengan DJKA Kemenhub. Realisasi biaya IMO yang dikeluarkan oleh KAI untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api agar prasarana laik operasi lebih tinggi dibandingkan nilai kontrak IMO yaitu sebesar Rp579.762.502 ribu untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024. Untuk mengakomodir selisih kurang tersebut telah terbit Perpres 33/2024 bahwa BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah dapat mengajukan usulan kekurangan pembayaran kepada Menteri.

Perseroan telah dan akan terus melakukan transaksi dari waktu ke waktu dengan badan usaha lain yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah, yaitu Pertamina yang merupakan pemasok BBM Perseroan.

4. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG AKAN DITERBITKAN

Ringkasan Penawaran Umum Obligasi adalah sebagai berikut:

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024
Target Dana PUB Obligasi I	: Sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi Tahap I	: Sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu: <ul style="list-style-type: none">• Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp437.800.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah);• Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp448.360.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah); dan• Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp613.840.000.000,- (enam ratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah).
Jangka Waktu	: • Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; • Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan • Obligasi Seri C dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Obligasi.

Tingkat Bunga Obligasi : • Obligasi Seri A sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun;
• Obligasi Seri B sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun; dan
• Obligasi Seri C sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bunga Obligasi dibayarkan setiap Triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dilakukan bersamaan dengan Pelunasan Pokok masing-masing seri Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini.

Pembelian Kembali (*Buy Back*) : Perseroan dapat membeli kembali Obligasi baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) atas Obligasi dimulai.

Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peringkat : idAAA (*Triple A*) dari Pefindo

Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk.

Ringkasan Penawaran Umum Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

- Nama Sukuk Ijarah : Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024
- Target Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan : Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
- Target Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari 3 (tiga) seri yaitu:
- Sukuk Ijarah Seri A dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp116.540.000.000,- (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah)
 - Sukuk Ijarah Seri B dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp83.135.000.000,- (delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah); dan
 - Sukuk Ijarah Seri C dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp300.325.000.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah).
- Jangka Waktu : • Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi;
• Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
• Sukuk Ijarah Seri C dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi
- Harga Penawaran : 100% dari nilai Sukuk Ijarah.
- Cicilan Imbalan Ijarah : • Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.808.180.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A,;
• Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.819.450.000,- (lima miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B; dan
• Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.323.075.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C.
- Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Jumlah Cicilan Imbalan Ijarah tersebut merupakan persentase per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Jumlah Minimum Pemesanan : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
- Penyisihan Dana (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini.

Pembelian Kembali (Buy Back) : Perseroan dapat membeli kembali Sukuk Ijarah baik seluruhnya maupun sebagian ditujukan sebagai pembayaran kembali Sukuk Ijarah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. Pembelian kembali (*buy back*) Obligasi Perseroan tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali (*buy back*) Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali (*buy back*) atas Sukuk Ijarah dimulai.

Jaminan : Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peringkat : $idAAA_{(sy)}$ (*Triple A Syariah*) dari Pefindo

Wali Amanat : PT Bank Syariah Indonesia Tbk

5. EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH DITERBITKAN DAN MASIH TERUTANG HINGGA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN

Nama Obligasi atau Sukuk	Seri	Tanggal Penerbitan	Jangka Waktu	Tingkat Sukuk Bunga / Cicilan Ijarah	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp ribuan)
1 Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017	B	21-Nov-17	7 tahun	8,25%	21-Nov-24	1.000.000.000
2 Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019	A	16-Dec-19	5 tahun	7,75%	16-Dec-24	900.000.000
	B	16-Dec-19	7 tahun	8,20%	16-Dec-26	1.100.000.000
3 Obligasi Berkelanjutan I KAI tahap I Tahun 2022	A	5-Aug-22	5 tahun	7,10%	5-Aug-27	634.000.000
	B	5-Aug-22	7 tahun	8,00%	5-Aug-29	866.000.000
	A	5-Aug-22	5 tahun	7,10%	5-Aug-27	117.350.000
4 Berkelanjutan I KAI tahap I Tahun 2022	B	5-Aug-22	7 tahun	8,00%	5-Aug-29	382.650.000
	A	9-Aug-24	3 tahun	6,90%	9-Aug-27	67.000.000
5 Obligasi Berkelanjutan I KAI Tahap II Tahun 2024	B	9-Aug-24	5 tahun	7,20%	9-Aug-29	295.500.000
	C	9-Aug-24	7 tahun	7,30%	9-Aug-31	337.500.000
	A	9-Aug-24	3 tahun	6,90%	9-Aug-27	62.500.000
6 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I KAI tahap II Tahun 2024	B	9-Aug-24	5 tahun	7,20%	9-Aug-29	127.270.000
	C	9-Aug-24	7 tahun	7,30%	9-Aug-31	110.230.000
Total Obligasi dan Sukuk yang belum dilunasi						6.000.000.000

Perseroan akan menggunakan hasil Penerbitan Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini untuk melunasi Efek bersifat utang dan Sukuk yang jatuh tempo di tahun 2024 yaitu Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B dan Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A.

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) Obligasi Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B
2. Sisanya akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagian Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A

Sukuk Ijarah

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagian Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A
2. Sisanya akan digunakan untuk pengadaan prasarana dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan berupa penataan bangunan stasiun, pembangunan rel jalur ganda, dan penataan emplasemen di Stasiun Kramasan serta prasarana pendukung lainnya.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana tersebut dapat dilihat dalam Bab II tentang Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum.

7. STRUKTUR PERMODALAN

Atas dasar perubahan terakhir atas Anggaran Dasar Perseroan tersebut, maka pada saat Prospektus ini diterbitkan komposisi dan struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

	Nilai Nominal Rp.1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Biasa	40.000.000	40.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	40.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
- Negara Republik Indonesia	22.368.743	22.368.743.000.000	100%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	22.368.743	22.368.743.000.000	100%
Saham Dalam Portepel			
Saham Biasa	17.631.257	17.631.257.000.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel	17.631.257	17.631.257.000.000	

8. KEUANGAN

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 beserta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, dalam No. 01095/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0645 dan penyajian informasi keuangan Konsolidasi Interim untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 tidak diaudit atau direviu.

Informasi berikut harus dibaca berkaitan pada Bab IV mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dan secara keseluruhan mengacu pada laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini pada Bab XVI mengenai Laporan Keuangan.

Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	14.788.639.582	13.023.841.719		15.337.947.951
Jumlah Aset Tidak Lancar	74.760.566.391	68.350.471.654		56.243.281.772
JUMLAH ASET	89.549.205.973	81.374.313.373		71.581.229.723
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.878.802.122	17.921.316.180		9.958.123.860
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	43.498.238.983	32.546.859.952		32.542.921.558
JUMLAH LIABILITAS	57.377.041.105	50.468.176.132		42.501.045.418
JUMLAH EKUITAS	32.172.164.868	30.906.137.241		29.080.184.305

Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Jumlah Pendapatan	14.028.539.088	10.951.579.731	35.106.535.574	25.577.639.010
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	(8.738.930.637)	(7.537.500.213)	(27.018.520.240)	(18.540.861.021)
Laba Bruto	5.289.608.451	3.414.079.518	8.088.015.334	7.036.777.989
Beban Usaha	(1.510.526.028)	(1.434.857.643)	(4.227.212.786)	(3.664.532.070)
Laba Usaha	3.779.082.423	1.979.221.875	3.860.802.548	3.372.245.919
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.454.604.637	1.397.715.159	2.247.487.167	2.210.588.300
Beban Pajak Penghasilan	(256.749.899)	(299.341.130)	(375.939.030)	(524.599.080)
Laba (Periode) Tahun Berjalan	1.197.854.738	1.098.374.029	1.871.548.137	1.685.989.220
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak	68.172.889	(43.306.945)	(45.146.736)	580.840.557
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan	1.266.027.627	1.055.067.084	1.826.401.401	2.266.829.777

Rasio Keuangan Penting

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Rasio Pertumbuhan				
Jumlah Aset	10,05%	0,98%	13,68%	14,13%
Jumlah Liabilitas	13,69%	-1,84%	18,75%	8,65%
Jumlah Ekuitas	4,10%	5,11%	6,28%	23,23%
Laba Tahun Berjalan	9,06%	85,79%	11,01%	496,52%
EBITDA	35,81%	38,71%	14,18%	178,03%
Rasio Usaha				
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan ⁽¹²⁾	10,47%	13,17%	8,09%	9,63%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset	1,34%	1,52%	2,30%	2,36%

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas	3,72%	3,59%	6,06%	5,80%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Pendapatan ⁽¹²⁾	8,62%	10,35%	6,74%	7,34%
Rasio Keuangan				
Rasio Kas ⁽¹⁾	0,33x	0,59x	0,29x	0,57x
Rasio Lancar ⁽²⁾	1,07x	1,51x	0,73x	1,54x
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas ⁽³⁾	1,78x	1,37x	1,63x	1,46x
Rasio Pinjaman berbunga terhadap Ekuitas ⁽⁴⁾	1,32x	0,96x	1,00x	1,02x
Rasio Liabilitas terhadap Aset ⁽⁵⁾	0,64x	0,58x	0,62x	0,59x
Interest Coverage Ratio ⁽⁶⁾	2,67x	3,72x	2,84x	4,04x
Debt Service Coverage Ratio ⁽⁷⁾	1,25x	1,39x	1,01x	1,73x
Rasio Imbal Hasil Aset (ROA) ⁽⁸⁾	1,34%	1,52%	2,30%	2,36%
Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE) ⁽⁹⁾	3,72%	3,59%	6,06%	5,80%
Rasio Marjin Kotor ⁽¹⁰⁾ ⁽¹²⁾	38,07%	32,17%	29,13%	30,64%
Rasio Marjin Bersih ⁽¹¹⁾ ⁽¹²⁾	8,62%	10,35%	6,74%	7,34%

Keterangan:

1. Total kas dan setara kas dibagi dengan total liabilitas lancar
2. Total aset lancar dibagi dengan total liabilitas lancar
3. Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas
4. Pinjaman berbunga dibagi dengan total ekuitas
5. Total liabilitas dibagi dengan total aset
6. Laba sebelum pajak dikurangi jumlah beban dan penghasilan bunga ditambah beban amortisasi dan penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah beban bunga
7. Laba sebelum pajak dikurangi jumlah beban dan penghasilan bunga ditambah beban amortisasi dan penyusutan kemudian dibagi dengan penjumlahan beban bunga dan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
8. Laba tahun berjalan dibagi dengan total aset
9. Laba tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas
10. Laba bruto tahun berjalan dibagi dengan pendapatan
11. Laba tahun berjalan dibagi dengan pendapatan
12. Pendapatan yang diperhitungkan hanya pendapatan angkutan dan usaha lainnya, tidak termasuk pendapatan konstruksi sesuai dengan penerapan PSAK 16

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024
Total Liabilities to Assets Ratio	Maksimum 0,85x	0,64x
Current Ratio	Minimum 1x	1,07x
Cash Flow Operational (ribuan Rupiah)	Positif	Rp1.459.239.876
Debt to Equity Ratio ⁽¹⁾	Maksimum 3x	1,32x
Debt to Service Coverage Ratio ⁽²⁾	Minimum 1,25x	1,25x
EBITDA to Interest Ratio	Minimum 1,5x	3,18x
Indikator Pembayaran Bunga ⁽³⁾	Minimum lebih dari 1x	3,18x
Indikator Pembayaran Pokok ⁽⁴⁾	Debt/Arus Kas Operasi Induk > 0x dan < 10x	1,95x

Keterangan:

1. Debt to Equity Ratio menggunakan perhitungan pinjaman berbunga dibagi dengan total ekuitas.
2. Debt to Service Coverage Ratio merupakan rasio untuk mengukur kekuatan perusahaan selama satu tahun untuk melakukan pembayaran pinjaman yang akan jatuh tempo. DSCR tidak tercapai dikarenakan perhitungan EBITDA hanya sampai dengan 31 Mei 2024 (5 bulan) yang seharusnya dihitung diakhir tahun (12 bulan).
3. Laba sebelum pajak dikurangi jumlah beban dan penghasilan bunga ditambah beban amortisasi dan penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah beban bunga
4. Jumlah pokok hutang PEN dibagi dengan arus kas dari operasional

PENYERTAAN PERSEROAN PADA PERUSAHAAN ANAK

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Perusahaan Anak langsung yang dikonsolidasi saat prospektus diterbitkan:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1.	PT Kereta Api Logistik	Bidang Layanan Distribusi Logistik berbasis Kereta	99,90%	2009	Operasional
2.	PT Kereta Api Pariwisata	Bidang Pariwisata Kereta	99,90%	2010	Operasional
3.	PT KA Properti Manajemen	Bidang Pengelolaan Aset/ Properti Perkeretaapian	99,90%	2009	Operasional
4.	PT KAI Commuter Jabodetabek	Pengusahaan Kereta Api Jabodetabek	99,78%	2008	Operasional
5.	PT Railink	Pengusahaan Kereta Api Bandara	60,00%	2006	Operasional
6.	PT Reska Multi Usaha	Restoran Kereta Api dan Pengelolaan Lahan Parkir	99,74%	2003	Operasional

9. FAKTOR RISIKO

RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Keamanan dan Keselamatan Operasional Kereta Api

RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN EMITEN

1. Risiko Strategis
2. Risiko Proyek
3. Risiko Operasional
4. Risiko Finansial
5. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
6. Risiko Lingkungan
7. Risiko Perubahan Teknologi
8. Risiko Pengadaan
9. Risiko Reputasi

II. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian
2. Risiko Kebijakan Pemerintah
3. Risiko Regulasi
4. Risiko Kepatuhan

Di bawah ini adalah beberapa risiko Anak Perseroan yang berbeda dengan risiko Induk terkait perbedaan proses bisnis Perseroan khususnya pada PT Reska Multi Usaha ("RMU") yang bergerak di bidang parkir dan jasa restoran di atas Kereta Api:

- i. Risiko Kehilangan Potensi Pendapatan
- ii. Risiko Kehilangan Kendaraan di Lahan Parkir
- iii. Risiko Suplai Bahan Makanan
- iv. Risiko Kualitas Bahan Makanan

III. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko usaha material yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan. Penjelasan mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat dalam Bab VI tentang Faktor Risiko.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp2.000.000.000.000,-
(DUA TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN
MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000,-
(SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

DAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN
MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:**

**SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR Rp500.000.000.000,-
(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK IJARAH")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp437.800.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp448.360.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp613.840.000.000,- (enam ratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 19 November 2027 untuk Obligasi Seri A, 19 November 2029 untuk Obligasi Seri B dan 19 November 2031 untuk Obligasi Seri C.

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp116.540.000.000,- (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.808.180.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp83.135.000.000,- (delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.819.450.000,- (lima miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp300.325.000.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.323.075.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, Sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 19 November 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 19 November 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B dan 19 November 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas imbalan yang diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah.



PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Kegiatan Usaha Utama:

Jasa Perkeretaapian dan Jasa Penunjang Lainnya terkait Perkeretaapian

Berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, Indonesia

Kantor Pusat :

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1
Bandung 40117
Telp.: (022) 4230031
Fax.: (022) 4203342
Website: www.kai.id
e-mail: usd@kai.id

Kantor Perwakilan/DAOP:

Jl. Pegangsaan Timur No. 6
Stasiun Cikini, Jakarta Pusat
Telp.: (021) 6928261
Fax.: (021) 6912275
Website: www.kai.id

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG (OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH) DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

AAA
id
(Triple A Plus)

AAA
id (sy)
(Triple A Plus Syariah)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KEAMANAN DAN KESELAMATAN OPERASIONAL KERETA API. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MELAKUKAN PEMOTONGAN ZAKAT ATAS SISA IMBALAN IJARAH DAN CICILAN IMBALAN IJARAH.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014:

1. Telah menjadi Perseroan atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia I Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia I Tahun 2024;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke-2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia I Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia I Tahun 2024 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan pada tanggal 30 Agustus 2024 dan laporan praktisi independen atas perikatan asuransi terbatas dengan No. 3980824/DSN/11211 pada tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh akuntan atas surat pernyataan Perseroan tersebut;
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

2. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.

Mata Uang Obligasi

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp437.800.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,70% (enam koma tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp448.360.000.000,- (empat ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp613.840.000.000,- (enam ratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,10% (tujuh koma satu nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 19 November 2027 untuk Obligasi Seri A, 19 November 2029 untuk Obligasi Seri B dan 19 November 2031 untuk Obligasi Seri C.

Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	19 Februari 2025	19 Februari 2025	19 Februari 2025
2	19 Mei 2025	19 Mei 2025	19 Mei 2025
3	19 Agustus 2025	19 Agustus 2025	19 Agustus 2025
4	19 November 2025	19 November 2025	19 November 2025
5	19 Februari 2026	19 Februari 2026	19 Februari 2026
6	19 Mei 2026	19 Mei 2026	19 Mei 2026
7	19 Agustus 2026	19 Agustus 2026	19 Agustus 2026
8	19 November 2026	19 November 2026	19 November 2026
9	19 Februari 2027	19 Februari 2027	19 Februari 2027
10	19 Mei 2027	19 Mei 2027	19 Mei 2027
11	19 Agustus 2027	19 Agustus 2027	19 Agustus 2027
12	19 November 2027	19 November 2027	19 November 2027
13		19 Februari 2028	19 Februari 2028
14		19 Mei 2028	19 Mei 2028
15		19 Agustus 2028	19 Agustus 2028
16		19 November 2029	19 November 2029
17		19 Februari 2029	19 Februari 2029
18		19 Mei 2029	19 Mei 2029
19		19 Agustus 2029	19 Agustus 2029
20		19 November 2029	19 November 2029

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi		
	Seri A	Seri B	Seri C
21			19 Februari 2030
22			19 Mei 2030
23			19 Agustus 2030
24			19 November 2030
25			19 Februari 2031
26			19 Mei 2031
27			19 Agustus 2031
28			19 November 2031

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Harga Penawaran

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Penarikan Obligasi

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

Pengalihan Obligasi

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin dengan jaminan khusus (preferen) dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**Pefindo**”) atas Obligasi, sesuai dengan surat No. RC-1026/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia, hasil pemeringkatan atas Obligasi Perseroan adalah:

^{id}AAA (Triple A)

Hasil pemeringkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 30 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal hal sebagai berikut:
 - a) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan kecuali:
 - i) Jaminan Perusahaan tersebut diberikan sebelum ditandatangani Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi
 - ii) Jaminan Perusahaan tersebut diberikan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau kegiatan usaha pendukung Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, atau;

- iii) Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar; atau
 - iv) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) tersebut dilakukan berdasarkan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia.
 - b) Melaksanakan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan
 - c) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan, kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.
 - d) Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) dilakukan atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - ii) semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
 - e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya/melebihi 50% dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali:
 - i) Penjualan atau pengalihan aset tetap yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan atau kegiatan usaha Perusahaan Anak. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi adalah kegiatan usaha utama sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau Perusahaan Anak.
 - ii) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi dan/atau divestasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
 - iii) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian
 - f) Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kecuali apabila:
 - i) transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak-ketiga yang bukan Afiliasi dalam transaksi yang lazim; atau
 - ii) transaksi tersebut dilakukan Perseroan untuk menunjang kegiatan usahanya berdasarkan Anggaran Dasarnya.
 - g) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan kepada Perusahaan Anak, perusahaan asosiasi, perusahaan afiliasi atau dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang-usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.
 - h) membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Pengakuan utang, kecuali pembayaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional sehari-hari dan belanja modal Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a) Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b) Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c) Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:

- a) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- b) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI untuk keperluan tersebut, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- c) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan Denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
- e) Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i) Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5: 1 (lima berbanding satu).
 - ii) Yang dimaksud dengan *debt to equity ratio* adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas;
 - iii) Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu).
 - iv) Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.
 - v) Yang dimaksud Beban bunga pinjaman adalah biaya bunga pinjaman setelah dikurangi pendapatan bunga tahun berjalan.
- f) Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i) salinan dari laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut masing-masing perubahan-perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK dan/atau Bursa Efek sehubungan Obligasi.
 - ii) laporan keuangan tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan-keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK.
 - iii) laporan keuangan tengah tahunan Perseroan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau

- 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
- pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK;
- iv) Laporan mengenai jumlah aktiva yang tidak dijadikan jaminan utang Perseroan dengan hak keutamaan atau preferen, sebagaimana dimaksud dalam angka 3 poin 18) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, pada setiap akhir tahun periode pembukuan yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan.
- g) Menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Obligasi.
- h) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
- i) Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49 yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan tersebut dan menyerahkan hasil pemeringkatan tersebut kepada Wali Amanat.
- j) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau laporan tentang perubahan-perubahan mana yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- k) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan *copynya* diserahkan kepada Wali Amanat.
- l) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.
- m) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha Perseroan.
- n) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- o) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dan/atau Denda (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- p) Memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta Wali Amanat sehubungan dengan melaksanakan tugas Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

- q) Menjaga aktiva Perseroan agar tidak dijaminan dengan jaminan keutamaan atau Preferen dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh utang Perseroan yang tidak dijaminan dengan jaminan keutamaan atau Preferen termasuk utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi, dan Perseroan berkewajiban untuk melaporkan kepada Wali Amanat sesuai dengan ketentuan pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan angka 3 angka 6) huruf d.
- r) Dalam hal Obligasi telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pelunasan keseluruhan atas Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi.
- s) Memastikan bahwa ijin usaha Perseroan tidak dicabut oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- t) Mempertahankan agar tidak membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun;
- u) Mempertahankan agar tidak terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht);
- v) Mempertahankan agar Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang tidak menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau mengambil tindakan yang dapat menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga berpengaruh secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- w) Memastikan tidak ada perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) yang mengharuskan Perseroan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan berpengaruh secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- x) Mempertahankan agar tidak menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*).

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 20;
 - b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi
 - d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam Peraturan OJK Nomor: 20; dan
 - e) mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk didalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah
 - b) Peseroan
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a), b) dan d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan fotokopi KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - (i) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (ii) agenda RUPO;
 - (iii) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (iv) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO;
 - (v) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO
 - e) RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - c) Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi (termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.

- d) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - e) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - f) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - g) dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - h) Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g) diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO;
 - i) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI;
 - j) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan KTUR kepada Wali Amanat;
 - k) seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO; setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - l) suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
- 7) Kuorum dan Pengambilan Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 1) Rapat Umum Pemegang Obligasi diatur sebagai berikut:
 - (1). Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan);
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;

- (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- (2). Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan);
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan);
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- (3). Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan);
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan);
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan).
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan);
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh dan/atau Afiliasi);
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - (7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi (termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (5).

- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK.
- 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan Obligasi yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.
- 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya -antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Obligasi menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 14) Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor: 16"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16.
- 15) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan -perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Kelalaian (Cidera Janji) Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (cross default) dalam jumlah utang melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
 - c. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - e. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi (selain huruf a, b dan c).

2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:

 - a. Angka 1 huruf a dan b bagian Kelalaian (Cidera Janji) Perseroan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Angka 1 huruf c dan e bagian Kelalaian (Cidera Janji) Perseroan (selain pelanggaran terkait dengan ketentuan terkait pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan huruf s sampai dengan x), dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan, dan Wali Amanat berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.
Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.
 - c. Angka 1 huruf d dan e bagian Kelalaian (Cidera Janji) Perseroan (pelanggaran terkait dengan ketentuan terkait pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan huruf s sampai dengan x) maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Hak Pemegang Obligasi

1. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku
3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar.
Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan Denda yang harus dibayar tersebut di atas dilunasi.
Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp 1,00,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) Oleh Perseroan

- a) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - 8) pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;

- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
 - 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan (kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia); dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
 - d. dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
 - 14) pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan Perseroan;
 - 15) pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
 - 16) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi; dan
 - 17) pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
- b) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPO.
- c) Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf f dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.

- d) Pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan h ayat ini wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:
Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:
- situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- e) Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m ayat ini, paling sedikit:
- jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi

Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIV Prospektus ini.

Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, PT Bank Mega Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7990 720
E-mail: waliamanat@bankmega.com

3. KETERANGAN RINGKAS MENGENAI SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.

Mata Uang Sukuk Ijarah

Mata uang Sukuk Ijarah ini adalah Rupiah.

Jenis Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp116.540.000.000,- (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.808.180.000,- (tujuh miliar delapan ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.000.000,- (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp83.135.000.000,- (delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.819.450.000,- (lima miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp300.325.000.000,- (tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.323.075.000,- (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp71.000.000,- (tujuh puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, Sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Cicilan Imbalan Ijarah. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 19 Februari 2025 sedangkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah adalah pada tanggal 19 November 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 19 November 2029 untuk Sukuk Ijarah Seri B dan 19 November 2031 untuk Sukuk Ijarah Seri C. Perseroan tidak berencana untuk melakukan pemnotongan zakat atas imbalan yang diterima oleh Pemegang Sukuk Ijarah.

Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Imbalan Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah		
	Seri A	Seri B	Seri C
1	19 Februari 2025	19 Februari 2025	19 Februari 2025
2	19 Mei 2025	19 Mei 2025	19 Mei 2025
3	19 Agustus 2025	19 Agustus 2025	19 Agustus 2025
4	19 November 2025	19 November 2025	19 November 2025
5	19 Februari 2026	19 Februari 2026	19 Februari 2026
6	19 Mei 2026	19 Mei 2026	19 Mei 2026
7	19 Agustus 2026	19 Agustus 2026	19 Agustus 2026
8	19 November 2026	19 November 2026	19 November 2026
9	19 Februari 2027	19 Februari 2027	19 Februari 2027
10	19 Mei 2027	19 Mei 2027	19 Mei 2027
11	19 Agustus 2027	19 Agustus 2027	19 Agustus 2027
12	19 November 2027	19 November 2027	19 November 2027
13		19 Februari 2028	19 Februari 2028

Cicilan Imbalan Ke-	Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah		
	Seri A	Seri B	Seri C
14		19 Mei 2028	19 Mei 2028
15		19 Agustus 2028	19 Agustus 2028
16		19 November 2029	19 November 2029
17		19 Februari 2029	19 Februari 2029
18		19 Mei 2029	19 Mei 2029
19		19 Agustus 2029	19 Agustus 2029
20		19 November 2029	19 November 2029
21			19 Februari 2030
22			19 Mei 2030
23			19 Agustus 2030
24			19 November 2030
25			19 Februari 2031
26			19 Mei 2031
27			19 Agustus 2031
28			19 November 2031

Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Harga Penawaran

Sukuk Ijarah ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah.

Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah

Satuan pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1,00,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah

Perdagangan Sukuk Ijarah dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Cara dan Tempat Pembayaran Sisa Imbalan Sukuk Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah

Pembayaran Sisa Imbalan Sukuk Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Penarikan Sukuk Ijarah

Penarikan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Ijarah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSI.

Pengalihan Sukuk Ijarah

Hak kepemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Sukuk Ijarah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah dan/atau pembayaran keseluruhan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah dan hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.

Hak Senioritas Atas Utang

Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin dengan jaminan khusus (preferen) dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Hasil Pemeringkatan Sukuk Ijarah

Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“**Pefindo**”) atas Sukuk Ijarah, sesuai dengan surat No. RC-1027/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Sukuk Ijarah, hasil pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Perseroan adalah:

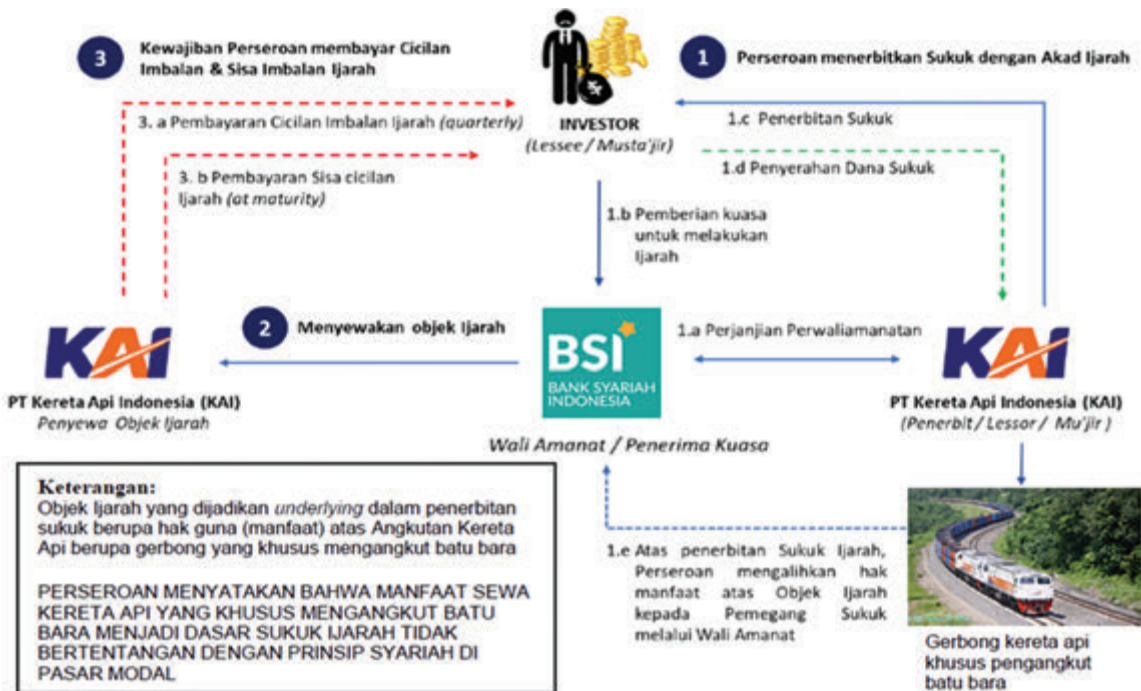
AAA_(sy) (Triple A Syariah)

Hasil pemeringkatan Sukuk Ijarah diatas berlaku untuk periode 30 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025.

Lembaga Pemeringkat Efek dalam hal ini Pefindo tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUP2SK.

Perseroan wajib menyampaikan peringkat tahunan atas Sukuk Ijarah kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Sukuk Ijarah yang diterbitkan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Skema Sukuk Ijarah



Penjelasan Skema Sukuk Ijarah:

1. PT Kereta Api Indonesia (Persero), selaku Emiten melakukan penerbitan Sukuk menggunakan akad Ijarah dengan aset sukuk berupa hak guna (manfaat) atas Angkutan Kereta Api berupa gerbong khusus mengangkut batu bara milik PT Kereta Api Indonesia (Persero).
 - a. Untuk melakukan penerbitan tersebut, PT Kereta Api Indonesia melakukan Perjanjian Perwaliamanatan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, selaku Wali Amanat yang bertindak sebagai pihak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk;
 - b. PT Bank Syariah Indonesia Tbk menerima kuasa (*by law*) dari pemberi kuasa yang dalam hal ini adalah Investor, untuk melakukan hal-hal yang diperlukan mewakili kepentingan Pemberi Kuasa dalam melakukan Akad Ijarah bersama emiten;
 - c. PT Kereta Api Indonesia (Persero), selaku Emiten dalam kaitan penerbitan Sukuk Ijarah ini sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah miliknya, kepada Pemegang Sukuk Ijarah (investor) sebagai penyewa (*musta'jir*) melalui wakilnya (Penerima Kuasa) PT Bank Syariah Indonesia Tbk, selaku Wali Amanat;
 - d. Investor selaku pemegang sukuk Ijarah menyerahkan dana Sukuk Ijarah kepada Perseroan atas Sukuk Ijarah yang ditawarkan Perseroan;
 - e. Setelah dana Sukuk diterima Perseroan mengalihkan hak manfaat atas objek Ijarah kepada Pemegang Sukuk melalui Wali Amanat atau Penerima Kuasa dalam hal ini adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
2. Setelah Objek Ijarah dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, selanjutnya Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat mengalihkan hak guna (manfaat) atas objek ijarah kepada Emiten untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun secara bertahap sesuai dengan kategorinya terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah.
3. Emiten, selaku penyewa, selanjutnya wajib membayar cicilan ijarah dan sisa imbalan ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah (investor) sesuai waktu yang diperjanjikan.
 - a. Cicilan imbalan ijarah, yang nilainya akan ditentukan saat *bookbuilding*; dan akan dibayarkan secara tiga bulanan/triwulan.
 - b. Sisa Imbalan Ijarah yang pembayarannya akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah yang disepakati. Setelah Sisa Imbalan Ijarah dibayarkan penuh sesuai perjanjian, maka akad ijarah berakhir dan hak guna (manfaat) atas objek ijarah akan kembali kepada pemilik objek Ijarah.

Penjelasan Objek Ijarah

Objek Ijarah atau aset yang menjadi dasar (*underlying asset*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini adalah hak guna (manfaat) atas Angkutan Kereta Api berupa gerbong khusus yang mengangkut batu bara dengan rincian bahwa gerbong yang menjadi objek ijarah berjumlah 100 gerbong yang keseluruhannya adalah milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan kapasitas angkut dari setiap gerbong seberat 54 ton. Lokasi operasional keseluruhan gerbong berada pada wilayah Divre III Palembang, dengan rincian setiap gerbong telah dicantumkan dan dinyatakan dalam lampiran Akad Ijarah.

Objek Ijarah sebagaimana yang disebutkan di atas, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal berdasarkan Fatwa-Fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah ini tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan kerusakan atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkannya Objek Ijarah maka Perseroan akan mengganti dan/atau menambahkan Objek Ijarah dengan manfaat atas barang dan/atau jasa lain yang dimiliki oleh Emiten yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan hak manfaat Objek Ijarah. Penggantian/penambahan Objek Ijarah memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 6 Akad Ijarah tentang Penggantian dan/atau Penambahan Objek Ijarah.

Opini Tim Ahli Syariah

1. Akad yang digunakan dalam rangka penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 adalah:
 - a. Akad Ijarah, dimana PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku Emiten dalam kaitan penerbitan Sukuk Ijarah ini sebagai pemberi sewa (*mu'jir*) mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah miliknya, sebagaimana yang akan dirinci dibawah ini, kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penyewa (*musta'jir*) melalui wakilnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk, selaku Wali Amanat;
 - b. Objek Ijarah (*Ma'jur*) dalam penerbitan Sukuk Ijarah ini adalah hak guna (manfaat) atas Angkutan Kereta Api berupa gerbong yang khusus untuk mengangkut batu bara milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan perincian, spesifikasi dan keterangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran; dan Sisa imbalan ijarah (*ujrah*) atas sewa objek ijarah dari Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat sebesar Rp 500.000.000.000,00 (Lima ratus miliar Rupiah) dengan kategori jangka waktu sebagai berikut:
 - 1) Sukuk Ijarah Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi
 - 2) Sukuk Ijarah Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
 - 3) Sukuk Ijarah Seri C dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi;
 - c. Perjanjian (akad) ijarah yang akan disepakati dan ditandatangani para pihak (*ijab dan qabul*) pada tanggal 6 Rabi' uts Tsani 1446 H / 10 Oktober 2024 M.
2. Setelah Objek Ijarah dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah, selanjutnya Pemegang Sukuk Ijarah melalui Wali Amanat akan menyewakan objek ijarah sebagaimana disebutkan pada angka 1 huruf b di atas kepada Emiten untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun sesuai dengan kategorinya terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah, dengan imbalan ijarah (*ujrah*) yang terdiri dari:
 - a. Cicilan imbalan ijarah, yang nilainya sebagaimana yang telah ditentukan saat *book building* dan akan dibayarkan secara tiga bulanan/triwulan.
 - b. Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus miliar Rupiah), yang pembayarannya akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah yang disepakati.
 - c. Sebagian dari denda keterlambatan yang mengakibatkan kerugaian (apabila ada).Pengalihan manfaat ijarah yang menjadi underlying aset Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 ini dilakukan secara bertahap (*tadrijiy*) dengan ketentuan dapat diperpanjang secara otomatis dan akan berakhir pada tahun periode sukuk berakhir, hal tersebut menjadikan Sukuk Ijarah ini dimungkinkan untuk diperdagangkan dan tidak termasuk dalam kategori jual beli utang piutang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
3. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya proses emisi, sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagai Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A dan sisanya akan digunakan untuk pengadaan prasarana dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan berupa penataan bangunan stasiun, pembangunan rel jalur ganda, dan penataan emplasemen di Stasiun Kramasan serta prasarana pendukung lainnya. Tujuan penggunaan dana sukuk sebagaimana yang disebutkan, tidak bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, serta telah sesuai dengan POJK No: 18/POJK.04/2015, BAB IV, tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
4. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hal ini diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah sepanjang dimengerti, dipahami, dan disepakati pemegang sukuk dengan Emiten berdasarkan prinsip *at-tafahum* (kesepahaman) dan *'antaradhin* (kerelaan para pihak).

5. Denda (*Ta`zir*) akibat dari kelalaian atau keterlambatan Emiten dalam memenuhi kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dimana dana dari denda yang diterima Pemegang Sukuk Ijarah setelah dikurangi dengan kerugian rill yang dialami Pemegang Sukuk, akan digunakan sebagai dana sosial dengan memperhatikan Prinsip Syariah sebagaimana yang ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*ta`widh*) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Ta`widh Akibat Wanprestasi (*at-Takalif al-Fi'liyah an-Nasyiáh án an-Nukul*).
6. Penjaminan emisi dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, menggunakan prinsip *wa`d mulzim* (janji yang mengikat), Dimana PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas berjanji kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), sebagai Emiten. Penjaminan emisi berdasarkan prinsip janji yang mengikat (*wa`ad mulzim*) ini sesuai dengan Fatwa DSN-Mui No. 85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (*Wa`d*) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah.
7. *Ujrah* yang didapatkan oleh penjamin emisi adalah imbalan jasa manajemen (*management fee*) yang dialokasikan hanya kepada Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah yang dihitung berdasarkan dana hasil Emisi yang diterima Emiten, dan Imbalan jasa penjualan (*selling fee*) atas jumlah yang dijual atau dibeli oleh masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang akan dihitung berdasarkan dana hasil Emisi yang diterima Emiten. Pengenaan imbalan jasa manajemen (*management fee*) ini telah sesuai dengan prinsip syariah didasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.
8. Emiten dapat melakukan pelunasan kewajiban sebagian atau seluruhnya sebelum jatuh tempo dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh Emiten dan Pemegang Sukuk Ijarah. Pelunasan kewajiban sebagian atau seluruhnya dalam nomenklatur dokumen penerbitan "obligasi/sukuk" menggunakan istilah "*buy back*", istilah tersebut secara substantif tidak dimaksudkan menjadikan akad penerbitan sukuk ijarah menjadi akad jual beli (*al-bai`*).

Hak-Hak Pemegang Sukuk Dalam Hal Terdapat Perubahan Jenis Akad/Underlying Aset Atau Hal Lain Yang Tidak Disetujui Oleh Pemegang Sukuk

Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan jenis akad/underlying aset atau hal lain adalah pelunasan Sukuk.

Syarat dan Ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah Jenis Akad Syariah, Isi Akad Syariah, dan/atau Aset yang menjadi dasar Sukuk Syariah

1. Perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSI
2. Mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Sukuk Ijarah
3. Perubahan hanya dapat dilakukan jika terdapat pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSI

Penggantian Aset yang menjadi dasar Sukuk jika terjadi Hal-Hal yang menyebabkan Nilainya tidak lagi sesuai dengan Nilai Sukuk yang diterbitkan

- 1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu kecelakaan kereta api, banjir, pemadaman listrik, gempa bumi, gunung Meletus, kebakaran, perang, atau bom, huru-hara atau wabah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerusakan atau tidak dapat digunakan/dimanfaatkannya Objek Ijarah, dalam hal mana dapat mengakibatkan:
 - a. Terhambatnya pengalihan dan penerimaan hak manfaat Objek Ijarah dari Mu'jir kepada Musta'jir pada Tanggal Emisi Sukuk Ijarah; dan
 - b. Kerugian di pihak Musta'jir atas turunnya nilai Objek Ijarah menjadi kurang dari nilai pengalihan hak manfaat Objek Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam Akad Ijarah selama jangka waktu Sukuk Ijarah,Maka Mu'jir akan mengganti dan/atau menambahkan Objek Ijarah dengan manfaat atas barang dan/atau jasa lain yang dimiliki oleh Mu'jir sampai dengan jumlah yang sesuai dengan nilai pengalihan hak manfaat Objek Ijarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) akad Ijarah atas permintaan Musta'jir kepada Mu'jir (selanjutnya disebut "Objek Ijarah Pengganti/Tambahan")
- 2) Penggantian/penambahan Objek Ijarah memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI")
- 3) Dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 1), maka:
 - a. Mu'jir wajib melaporkan kepada Musta'jir atas peristiwa-peristiwa dimaksud selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya peristiwa tersebut.
 - b. Mu'jir wajib mengajukan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kerja setelah diterimanya permintaan tertulis penggantian/penambahan Objek Ijarah dari Musta'jir
 - c. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan dari Mu'jir tersebut, Musta'jir wajib menyelenggarakan RUPSI dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah
- 4) Nilai Objek Ijarah Pengganti/Tambahan yang ditetapkan paling sedikit sama dengan nilai penurunan Objek Ijarah, sehingga nilai Objek Ijarah akan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dalam Akad Ijarah.
- 5) Setelah disetujuinya penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan, para pihak wajib menandatangani Lampiran Spesifikasi Objek Ijarah Pengganti/Tambahan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal persetujuan RUPSI atas penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan
- 6) Penutupan kekurangan nilai Objek Ijarah dengan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan akan berlaku efektif setelah ditandatanganinya penetapan Objek Ijarah Pengganti/Tambahan.

Perubahan Akad Ijarah

- 1) Para pihak menegaskan bahwa setiap perubahan atas Akad Ijarah harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan otoritas Jasa keuangan Nomor: 3/POJK.04/2018 tentang perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk dan hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah, disetujui oleh Musta'jir serta wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam suatu perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari Akad Ijarah, tanpa adanya hal yang demikian perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Dalam hal salah satu pihak digantikan kedudukan oleh pihak lain, maka pihak yang menggantikan pihak yang dimaksud serta merta tunduk pada dan karenanya mengikatkan diri untuk memenuhi setiap dan semua kewajiban-kewajiban pihak yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Akad Ijarah. Dalam hal diperlukan suatu perjanjian dan/atau dokumen untuk menyempurnakan penggantian kedudukan tersebut, maka pihak yang menggantikan salah satu pihak dimaksud wajib menandatangani dan melangsungkan perjanjian dan/atau dokumen dimaksud.

- 3) Dalam hal satu ketentuan dari Akad Ijarah tidak berlaku atau melanggar suatu ketentuan hukum yang berlaku, maka ketidakberlakuan dari ketentuan dimaksud tidak menyebabkan batalnya atau tidak berlakunya ketentuan lain dari Akad Ijarah. Selanjutnya Para Pihak dengan ini sepakat untuk dan mengikatkan diri untuk mengganti ketentuan yang tidak berlaku dimaksud dengan suatu ketentuan lain yang memiliki nilai ekonomis yang setara
- 4) Akad Ijarah dan lampiran-lampirannya, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Akad Ijarah, merupakan suatu pernyataan yang lengkap dan eksklusif atau syarat-syarat kesepakatan di antara Para Pihak sehubungan dengan Objek Ijarah serta menggantikan semua perjanjian kesepahaman, kesepakatan, atau pernyataan sebelumnya dari atau di antara Para Pihak, baik tertulis maupun lisan sepanjang hal tersebut terkait dengan hal yang diperjanjikan dalam Akad Ijarah.

Penyisihan Dana Pelunasan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah.

Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Mengenai perpajakan diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini.

Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah paripassu tanpa preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Selama jangka waktu Sukuk Ijarah dan seluruh jumlah Sisa Imbalan Ijarah belum seluruhnya dibayar kembali dan/atau seluruh jumlah Cicilan Imbalan Ijarah serta kewajiban pembayaran lainnya (jika ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri:

1. Bahwa Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) Memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas Perseroan, kecuali:
 - i) Jaminan Perusahaan tersebut diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - ii) Jaminan Perusahaan tersebut diberikan berkaitan dengan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan/atau kegiatan usaha pendukung Perseroan dan/atau Perusahaan Anak; atau
 - iii) Jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar.
 - iv) Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) tersebut dilakukan berdasarkan penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia.
 - b) Melakukan perubahan bidang usaha utama kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.

- c) Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan, kecuali atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham Perseroan.
 - d) Mengadakan penggabungan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilakukan atas permintaan Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - b. semua syarat dan kondisi Sukuk Ijarah dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroanbukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban dalam Sukuk Ijarah telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Sukuk Ijarah
 - e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya/melebihi 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan, kecuali:
 - 1) Penjualan atau pengalihan aset tetap yang merupakan kegiatan usaha utama Perseroan atau kegiatan usaha Perusahaan Anak. Yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini adalah kegiatan usaha utama sesuai dengan anggaran dasar Perseroan atau Perusahaan Anak.
 - 2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau privatisasi dan/atau divestasi yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
 - 3) Penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian.
 - f) Melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kecuali apabila:
 - 1) transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan (dan/atau tidak merugikan) Perseroan atau setidaknya tidak sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari pihak-ketiga yang bukan Afiliasi dalam transaksi yang lazim; atau
 - 2) transaksi tersebut dilakukan Perseroan untuk menunjang kegiatan usahanya berdasarkan Anggaran Dasarnya
 - g) Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, kecuali dilakukan kepada Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, perusahaan afiliasi atau dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan -pembangunan fasilitas usaha Perseroan dan pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan.
 - h) membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah, kecuali pembayaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan operasional sehari-hari dan belanja modal Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:
- 1) Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lain yang -berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - 2) Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/ atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening yang ditunjuk oleh KSEI untuk keperluan tersebut, dan salinan bukti transfer harus disampaikan kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
 - 3) Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Denda Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus -enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan Denda Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali. Denda Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya.
 - 4) Segera memberitahukan kepada Wali Amanat keterangan-keterangan tentang setiap kejadian atau keadaan yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha atas usaha-usaha atau operasi Perseroan.
 - 5) Selama Perseroan masih mempunyai kewajiban pembayaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah, Perseroan diwajibkan memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tahunan terakhir yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i. Memelihara perbandingan total Pinjaman dengan Total Ekuitas (*debt to equity ratio*) tidak lebih dari 5:1 (lima berbanding satu).
Yang dimaksud dengan *debt to equity ratio* adalah total utang Perseroan yang menimbulkan beban bunga dan/atau bagi hasil (syariah) dibagi total ekuitas;
 - ii. Memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1 :1 (satu berbanding satu);
Yang dimaksud EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi.
 - 6) Menyampaikan kepada Wali Amanat :
 - a. salinan dari laporan-laporan, akta-akta, dan perjanjian-perjanjian, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan, akta-akta dan perjanjian-perjanjian berikut-masing-masing perubahan perubahannya tersebut diserahkan kepada OJK dan/atau Bursa Efek sehubungan Sukuk Ijarah.
 - b. laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK disampaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau dalam jangka waktu yang lebih lama apabila ditetapkan lain oleh OJK atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK.
 - c. laporan keuangan tengah tahunan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
 - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik ; atau
 - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
 - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau
 - pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK;

- d. Laporan mengenai jumlah aktiva yang tidak dijadikan jaminan utang Perseroan dengan hak keutamaan atau preferen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.3.18 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, pada setiap akhir tahun periode pembukuan yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan laporan keuangan.
- 7) Menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan pada tanggal laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini dan perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah.
 - 8) Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, pada saat jam kerja untuk melakukan peninjauan lapangan dan meminta dokumen dan informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam rangka menjalankan tugas pemantauan perkembangan pengelolaan perusahaan dan pengawasan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang wajib dipenuhi Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan Wali Amanat terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya tentang maksudnya tersebut.
 - 9) Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49 yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
 - 10) Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat, setiap perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris Perseroan, perubahan-perubahan mana telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didaftarkan pada Daftar Perusahaan serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
 - 11) Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah dengan tujuan untuk pembayaran kembali Sukuk Ijarah dan *copynya* diserahkan kepada Wali Amanat.
 - 12) Memberitahukan kepada Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya utang baru yang dibuat Perseroan, kecuali utang yang terjadi dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.
 - 13) Segera memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah mengenai perkara pidana, perdata, tata usaha negara, dan hubungan industrial yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap serta yang dapat memberikan dampak material kepada kegiatan usaha Perseroan.
 - 14) Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
 - 15) Menyampaikan kepada Wali Amanat mengenai laporan kesiapan Perseroan untuk membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Denda Keterlambatan (jika ada) selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.
 - 16) Memberikan data, keterangan dan penjelasan yang sewaktu-waktu diminta Wali Amanat sehubungan dengan pelaksanaan tugas Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - 17) Menjaga aktiva Perseroan agar tidak dijaminkan dengan jaminan keutamaan atau Preferen dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar 100% (seratus persen) dari seluruh utang Perseroan yang tidak dijaminkan dengan jaminan keutamaan atau Preferen termasuk utang Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah, dan Perseroan berkewajiban untuk melaporkan kepada Wali Amanat sesuai dengan ketentuan Pasal 6.3 ayat 6) huruf d Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

- 18) Dalam hal Sisa Imbalan Ijarah telah jatuh tempo, maka Perseroan bersedia dan diwajibkan untuk bertanggung jawab secara finansial dan hukum mengenai pembayaran kembali keseluruhan atas Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah.
- 19) Memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal dan semua syarat dan ketentuan dalam Dokumen Emisi sehubungan dengan penerbitan Sukuk Ijarah;
- 20) Menyampaikan pernyataan kepada Wali Amanat, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Tanggal Emisi yang menyatakan bahwa:
 - a. Perseroan selalu memenuhi ketentuan Akad Syariah;
 - b. Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- 21) Menyampaikan laporan daftar Objek Ijarah kepada Wali Amanat per tahun yang disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal akhir periode laporan tersebut.
- 22) Dalam hal terjadi kondisi dimana Sukuk Ijarah menjadi utang Piutang sebagaimana diatur dalam ketentuan syarat-syarat Sukuk Ijarah angka 11 huruf F Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib menyelesaikan kewajibannya atas utang piutang kepada Pemegang Sukuk Ijarah.
- 23) Memastikan bahwa ijin usaha Perseroan tidak dicabut oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 24) Mempertahankan agar tidak membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau dibubarkan karena sebab apapun.
- 25) Mempertahankan agar tidak terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht);
- 26) Mempertahankan agar Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang tidak menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau mengambil tindakan yang dapat menghalangi untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga berpengaruh secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah
- 27) Memastikan tidak ada perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht) yang mengharuskan Perseroan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan berpengaruh secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- 28) Mempertahankan agar tidak menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*).

Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (RUPSI)

Untuk penyelenggaraan RUPSI, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek

1) RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain:

- a) mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 20.
- b) menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c) memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- d) mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan dalam POJK Nomor: 20; dan

- e) mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah untuk melakukan perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Ijarah, dan/atau aset tertentu yang mendasari penerbitan Sukuk Ijarah.
- 2) RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a) Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum di bayar kembali (termasuk didalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan)
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat ; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a), b) dan d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dengan melampirkan KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI, dengan ketentuan sebagai berikut.
- a) Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) pemanggilan RUPSI dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c) pemanggilan untuk RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d) panggilan harus memuat rencana RUPSI dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - (i) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI;
 - (ii) agenda RUPSI;
 - (iii) pihak yang mengajukan usulan RUPSI;
 - (iv) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan
 - (v) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI .
 - e) RUPSI kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lama 21 (dua puluh satu) Hari Kalender terhitung sejak RUPSI sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPSI, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya;
 - b) Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;

- c) Sebelum pelaksanaan RUPSI:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan Daftar Pemegang Sukuk Ijarah yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat, (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya (tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
 - Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah (termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi (tidak termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dengan Perseroan.
 - d) RUPSI dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - e) RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat.
 - f) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI;
 - g) dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau pemegang Sukuk Ijarah RUPSI, RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut;
 - h) Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g) diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI;
 - i) Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI kecuali ditentukan lain oleh KSEI;
 - j) Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan KTUR kepada Wali Amanat;
 - k) seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSI;
 - l) setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya;
 - m) suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
- 7) Kuorum dan Pengambilan Keputusan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam angka 1) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali (termasuk Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi dan/atau Perseroan).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih

- belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- (2) Apabila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).

- (3) Apabila RUPSI dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang kedua.
 - (c) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.
 - (e) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
- b) RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua.
 - (3) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi).
 - (4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI yang ketiga.

- (5) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dibayar kembali kewajiban (termasuk di dalamnya jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi) dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSI yang keempat;
 - (7) RUPSI keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSI keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5) Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat
 - 9) Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - 10) Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Ijarah. Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah yang baru dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Atas Kewajiban Dalam Sukuk Ijarah dengan menambahkan pengakuan atas kewajiban dalam sukuk ijarah yang baru.
 - 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 - 12) Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan tingkat Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan perjanjian perwaliamanatan sukuk ijarah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Imbalan Ijarah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI.
 - 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 - 14) Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor: 16"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Selain RUPSI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPSI secara elektronik menggunakan e-RUPSI yang disediakan oleh penyedia e-RUPSI sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16.

- 15) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

Kelalaian (Cidera Janji) Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah; atau
 - b. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - c. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dimana jumlah atau nilai yang harus dibayarkan akibat kelalaian tersebut melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari dan karenanya mengakibatkan jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali).
 - d. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) oleh badan peradilan yang berwenang;
 - e. Apabila Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain poin a, b, dan c).
2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

 - a. Angka 1 huruf a dan b Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Angka 1 huruf c, dan e Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (selain pelanggaran terkait dengan ketentuan pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan angka 23 sampai dengan 28 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah) dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau -peristiwa itu kepada Pemegang Sukuk Ijarah dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan, dan Wali Amanat berhak memanggil RUPSI menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Dalam RUPSI tersebut, Wali Amanat Sukuk Ijarah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPSI tersebut memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Sukuk Ijarah sesuai dengan keputusan RUPSI menjadi jatuh tempo dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- c. Angka 1 huruf d dan e Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah (pelanggaran terkait dengan ketentuan pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban Perseroan angka 23 sampai dengan 28 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSI bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Ijarah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Ijarah Dalam hal ini Sukuk Ijarah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Hak Pemegang Sukuk Ijarah

1. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah
2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku
3. Apabila sampai Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut di atas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan wajib membayar Denda Keterlambatan atas jumlah dana yang wajib dibayar. Jumlah Denda Keterlambatan tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat yang dihitung sejak tidak dibayarnya dana tersebut atau menurut ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus -enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan jumlah dana dan Denda Keterlambatan yang harus dibayar tersebut di atas dibayar kembali. Denda Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya
4. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut
5. Melalui keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk Ijarah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat Sukuk, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Sukuk, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian.
 - b. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
 - c. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan POJK No.20/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk .
 - d. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, jumlah Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian Perwaliamanatan.

- e. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - f. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
6. setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.

Pembelian Kembali Sukuk Ijarah (*Buy Back*) Oleh Perseroan

- (1). Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - 2) pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - 3) pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
 - 4) pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal -tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - 5) pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - 6) pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi.
 - 7) rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
 - 8) pembelian kembali Sukuk Ijarah, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - 9) rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah.
 - 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali.
 - 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah;
 - 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing Sukuk Ijarah yang beredar (*outstanding*) dalam periode satu tahun setelah tanggal penjatahan;
 - b. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan

- c. Sukuk Ijarah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali,
dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - 13) Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Efek Sukuk Ijarah kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah;
 - 14) pembelian kembali Efek Sukuk Ijarah dilakukan dengan mendahulukan sukuk ijarah yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang diterbitkan Perseroan.
 - 15) pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu sukuk ijarah yang tidak dijamin;
 - 16) pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh sukuk ijarah; dan
 - 17) pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ayat e ayat ini dikecualikan jika telah memperoleh persetujuan RUPSI.
 - (3). Ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf f Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah dikecualikan pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah.
 - (4). Pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dan huruf h wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa efek paling sedikit melalui:

 - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris; dan
 - ii. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Dalam hal Perseroan menjadi perusahaan terbuka maka tunduk pada Peraturan Pasar Modal.
 - (5). Informasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf m Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah paling sedikit:
 - i. jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - ii. rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pembayaran kembali atau disimpan untuk dijual kembali;
 - iii. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - iv. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah.

Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah

Persyaratan Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

Wali Amanat

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, PT Bank Syariah Indonesia Tbk. telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah ini. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kantor Pusat Gedung The Tower
The Tower Building Lt.25
Jl Gatot Subroto No.27
Jakarta 12930
Telp.: (021)3040 5999 3042 1888
Up. Capital Market Services Department - FIG
E-mail: maillist_capitalmarketbusiness@bankbsi.co.id

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Obligasi

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B, dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Surat Utang : Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B
- Jumlah utang saat ini : Rp1.000.000.000.000,-
- Jangka waktu (tenor) : 7 (tujuh) tahun
- Jatuh tempo : 21 November 2024
- Penggunaan dana : Penyelesaian proyek KA Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) dan pembelian kereta
- Suku bunga : 8,25% p.a
- Jumlah utang yang akan dibayarkan : Sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah)
- Sisa saldo utang setelah pembayaran : Sebesar Rp0,- (nol Rupiah)
- Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur : Tidak ada
- Riwayat utang : Pada tanggal 21 November 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.
- Prosedur dan persyaratan pembayaran utang :
 1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi.
 2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.

2. Sisanya akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagian Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Surat Utang : Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A
- Jumlah utang saat ini : Rp900.000.000.000,-
- Jangka waktu (tenor) : 5 (lima) tahun
- Jatuh tempo : 13 Desember 2024
- Tujuan penggunaan : Pembayaran sebagian saldo pokok pinjaman terutang pada PT Bank HSBC Indonesia (tidak terafiliasi)
- Suku bunga : 7,75% p.a
- Jumlah utang yang akan dibayarkan : Sekitar Rp492.468.104.078,- (empat ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus empat ribu tujuh puluh delapan Rupiah).

Adapun Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A tersebut akan dibayarkan menggunakan dana yang diperoleh dari Obligasi ini dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 serta kas internal Perseroan.

- Sisa saldo utang setelah pembayaran : Sekitar Rp407.531.895.922,- (empat ratus tujuh miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua Rupiah).

Adapun Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A tersebut akan dibayarkan menggunakan dana yang diperoleh dari Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 ini serta kas internal Perseroan, sehingga sisa saldo utang setelah pembayaran adalah sebesar Rp0,- (nol Rupiah).

- Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur : Tidak ada
- Riwayat utang : Pada tanggal 13 Desember 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
- Prosedur dan persyaratan pembayaran utang :
 1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi.
 2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran bunga obligasi adalah berasal dari pendapatan operasional Perseroan.

Sukuk Ijarah

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagian Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A, dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Surat Utang : Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A
- Jumlah utang saat ini : Rp900.000.000.000,-
- Jangka waktu (tenor) : 5 (lima) tahun
- Jatuh tempo : 13 Desember 2024
- Tujuan penggunaan : Pembayaran sebagian saldo pokok pinjaman terutang pada PT Bank HSBC Indonesia (tidak terafiliasi)
- Suku bunga : 7,75% p.a
- Jumlah utang yang akan dibayarkan : Sebesar Rp400.000.000.000,- (empat ratus miliar Rupiah) dari Penawaran umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi total biaya emisi Sukuk Ijarah
- Sisa saldo utang setelah pembayaran : Sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Adapun Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A tersebut akan dibayarkan menggunakan dana yang diperoleh dari Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah ini serta kas internal Perseroan, sehingga sisa saldo utang setelah pembayaran adalah sebesar Rp0,- (nol Rupiah).

- Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur : Tidak ada
- Riwayat utang : Pada tanggal 13 Desember 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000,- (sembilan ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
- Prosedur dan persyaratan pembayaran utang :
 1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi.
 2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.

2. Sisanya akan digunakan untuk pengadaan prasarana dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan berupa penataan bangunan stasiun, pembangunan rel jalur ganda, dan penataan Emplasemen di Stasiun Kramasan serta prasarana pendukung lainnya.

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran cicilan imbalah ijarah adalah berasal dari pendapatan operasional Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dari kas internal yang dimiliki Perseroan atau melakukan pendanaan eksternal lainnya guna melaksanakan pembayaran sebagian fasilitas pinjaman dan rencana pengembangan sebagaimana disebutkan di atas.

Perseroan wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan ini untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal dan wajib menyampaikan kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat melalui BEI, informasi bahwa: (1) seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan telah diterima oleh Perseroan; dan/atau (2) dana yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan tujuan penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan sesuai Peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah Di Pasar Modal.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Adapun Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam POJK No. 30/2015, dengan mengisi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO dan/atau RUPSI sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO dan/atau RUPSI wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara 0,5021% (nol koma lima nol dua satu persen) dari nilai Emisi Obligasi, yang meliputi:

Biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	:	0,0736%
Biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	:	0,0200%
Biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	:	0,0200%

Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- Biaya Jasa Akuntan Publik	:	0,1738%
- Biaya jasa Konsultan Hukum	:	0,0265%
- Biaya jasa Notaris	:	0,0050%

Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- Biaya jasa Wali Amanat	:	0,0053%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	:	0,0410%

Biaya lain-lain antara lain KSEI, BEI, audit penjabatan, pencetakan Prospektus dan formulir pemesanan Obligasi. : 0,1369%

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,5228% (nol koma lima dua dua delapan persen) dari nilai Emisi Sukuk Ijarah, yang meliputi:

Biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	:	0,0736%
Biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	:	0,0200%
Biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	:	0,0200%

Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- Biaya jasa Akuntan Publik	:	0,1738%
- Biaya jasa Konsultan Hukum	:	0,0265%
- Biaya jasa Notaris	:	0,0150%
- Biaya Tim Ahli Syariah	:	0,0200%

Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:

- Biaya jasa Wali Amanat	:	0,0160%
- Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	:	0,0410%

Biaya lain-lain antara lain KSEI, BEI, audit penjatahan, pencetakan Prospektus dan formulir pemesanan Sukuk Ijarah. : 0,1169%

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 telah terealisasi, sebagai mana Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 per 31 Desember 2023 dengan surat nomor KF.601/I/1/KA-2024 dan KF.601/I/2/KA-2024 tertanggal 8 Januari 2024.

Hingga Prospektus ini diterbitkan, sisa realisasi dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 adalah sebesar Rp310 miliar yang akan digunakan untuk penyelesaian pada pekerjaan prasarana seperti penataan Emplasemen stasiun kramasan, pekerjaan prasarana lainnya seperti pembangunan/penataan stasiun, serta Double Track dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan. Sehubungan dengan pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan, Perseroan memproyeksikan kebutuhan dana hingga paruh pertama 2025 adalah sekitar Rp600 miliar.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian interim Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, dalam laporannya No. 01095/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0645 dan penyajian informasi keuangan Konsolidasi Interim untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 tidak diaudit atau direviu.

Pada tanggal 31 Mei 2024, Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp57.377.041.105 ribu Rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Saldo utang usaha pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp1.927.494.722 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Utang Usaha	
Pihak Berelasi (Catatan 41)	965.653.310
Pihak Ketiga	961.841.412
Jumlah	1.927.494.722

Berdasarkan mata uang:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Rupiah	1.821.983.878
Yen Jepang	58.386.763
Euro	47.124.081
Dolar Amerika Serikat	
Jumlah	1.927.494.722

Pada tanggal 9 Juli 2024 telah terbit Surat Direktorat Jenderal Perkeretaapian No. KU.102/7/13/K2/DJKA/2024 tentang Persetujuan atas Permohonan Keringanan PNBPN TAC Perseroan Tahun 2023. Berdasarkan surat tersebut, Kementerian Keuangan memberikan persetujuan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Perseroan sebesar Rp639.092.119 yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp401.470.990 dan denda TAC sebesar Rp237.621.129. Perseroan mencatat denda TAC sebagai bagian dari utang usaha kepada Kementerian Perhubungan (Catatan 41). Pada tanggal 16 Juli 2024, Perseroan telah melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban TAC tahun 2023.

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha.

2. Beban Akruwal

Saldo beban akruwal dan provisi pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp2.494.483.189 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Biaya Operasi Langsung	945.600.544
Biaya Umum dan Administrasi	857.445.477
Biaya Operasi Tidak Langsung	691.437.168
Jumlah	2.494.483.189

Biaya operasi langsung yang masih harus dibayar merupakan biaya pemeliharaan sarana di lintas dan balai yasa, biaya pendukung operasi dan biaya pendukung angkutan dan lainnya. Biaya operasi tidak langsung yang masih harus dibayar diantaranya merupakan biaya pemeliharaan prasarana pokok Grup, biaya penggunaan prasarana milik Pemerintah (TAC), dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja. Biaya umum dan administrasi yang masih harus dibayar merupakan biaya pemasaran, biaya perlengkapan dan operasional kantor, dan biaya administrasi.

3. Pendapatan Diterima di Muka

Saldo pendapatan diterima di muka jangka pendek dan jangka panjang per 31 Mei 2024 masing-masing sebesar Rp1.310.581.012 ribu dan Rp808.576.891 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Non Angkutan	874.189.504
Angkutan Penumpang	403.965.936
Angkutan Barang	32.425.572
Jumlah	1.310.581.012
Jangka Panjang Lebih dari Satu Tahun	
Non Angkutan	808.675.891
Jumlah	808.675.891

Pendapatan diterima di muka atas pendapatan non angkutan merupakan penerimaan sewa properti di dalam dan di luar stasiun. Pendapatan diterima di muka angkutan penumpang merupakan pendapatan atas jasa angkutan penumpang pengguna kereta api yang realisasi kedatangan pada periode berikutnya. Pendapatan diterima di muka angkutan barang merupakan pendapatan atas jasa angkutan barang yang terdiri dari angkutan peti kemas, batu bara, parcel, barang curah dan barang jenis lain yang realisasi keberangkatannya pada periode berikutnya.

4. Pinjaman Bank Jangka Pendek

Saldo pinjaman jangka pendek per 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp1.942.426.859 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Pihak Berelasi (Catatan 41)	1.718.972.781
Pihak Ketiga	
PT Bank Central Asia Tbk	96.727.039
PT Bank HSBC Indonesia	96.727.039
PT Bank Permata	30.000.000
Subjumlah	223.454.078
Jumlah	

Informasi lain mengenai Pinjaman Bank Jangka Pendek pada 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Kreditur	Nama Fasilitas	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pemenuhan Batasan yang Diwajibkan
Perseroan					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berulang	14 Juni 2025	6,55%	-	<i>Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Berulang	24 Februari 2025	6,70%	-	<i>Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif</i>
Perjanjian Transaksi Khusus Light Rail Transit (LRT)/ Light Rail Transit (LRT) Special Transaction Loans					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berulang	31 Agustus 2024	5,29%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Berulang	31 Agustus 2024	5,29%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Berulang	31 Agustus 2024	5,29%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
PT Bank Central Asia Tbk	Berulang	31 Agustus 2024	5,29%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
Perusahaan Anak/Subsidiaries - PT Reksa Multi Usaha					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berulang	08-Sep-24	7,75%	-	<i>Debt to Equity Ratio Max 200% Debt Service Coverage Ratio min 1.25x</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Berulang	29 Agustus 2024	7,00%	-	<i>Debt to Equity Ratio Max 300%</i>
PT Bank Permata Tbk	Berulang	20-Apr-25	8,90%	-	<i>Debt Service Coverage Ratio min 1.25x</i>
Perusahaan Anak/Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berulang	6 Februari 2025	7,00%	-	<i>Debt to Equity Ratio Max 200% Debt Service Coverage Ratio min 1.25x</i>
Perusahaan Anak/Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen					
PT Bank Permata Tbk	Berulang	20-Apr-23	8,25%	-	<i>Debt to Equity Ratio Max 300%</i>

Berdasarkan perhitungan interim, Perseroan telah memenuhi kepatuhan *financial covenant*.

5. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

Saldo liabilitas jangka pendek lainnya per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp97.079.698 ribu dengan rincian berikut:

KETERANGAN	(dalam ribuan Rupiah)	
	31 Mei	
	2024	
Titipan Pegawai	59.628.023	
Uang Jaminan	5.488.000	
Lain-lain	31.963.675	
Jumlah	97.079.698	

Titipan pegawai merupakan potongan gaji karyawan yang belum disetorkan sesuai dengan tujuannya. Uang jaminan terdiri dari penerimaan uang jaminan yang berasal dari pelanggan atas jaminan pemasangan iklan di kereta dan jaminan tiket harian dari penumpang commuter line. Utang lain-lain diantaranya merupakan utang atas penerimaan uang jaminan optimalisasi aset dari pelanggan sebagai jaminan atas aset yang disewa.

6. Liabilitas Imbalan Kerja

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif lebih banyak pada instrumen properti dibandingkan dengan instrumen lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai aset program dapat terpulihkan.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program tersebut. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghitung beban dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Mei 2024, Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei	
	2024	
Tingkat Diskonto	5,89% - 7,10%	
Tingkat Kenaikan Gaji per Tahun	6,00% - 9,00%	
Usia Pensiun Normal	56 tahun/ years	
Tingkat Mortalitas	TMI IV/2019	
Tingkat Cacat per Tahun	1%-10% dari Tingkat Kematian/	
Tingkat Pengunduran Diri:		
Umur Dibawah 20-29 Tahun	5,00% - 6,00%	
Umur Diatas 30 Tahun	Menurun secara linear hingga mencapai 0% saat usia pensiun normal	

a) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang jatuh tempo dalam satu tahun sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Program Pensiun Eks PNS	156.195.973
Tantiem dan Bonus	1.553.984.439
Jumlah	1.710.180.412

b) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Program Pensiun Eks PNS	1.298.956.937
Program Pensiun Eks Perum & Persero	4.386.036.353
Imbalan Kerja Lain	83.805.478
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	5.768.798.768

Total liabilitas imbalan kerja yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang timbul dari program pensiun imbalan pasti, jaminan kesehatan pensiun, pesangon dan imbalan kerja jangka panjang lainnya sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Program Pensiun Eks PNS	1.455.152.910
Program Pensiun Eks Perum & Persero	4.386.036.353
Tantiem dan Bonus	1.553.984.439
Imbalan Kerja Lain	83.805.478
Jumlah	7.478.979.180

Program Pensiun Imbalan Pasti

Karyawan Eks Pegawai Negeri Sipil (Eks-PNS)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian Pensiun Eks-PNS Departemen Perhubungan pada Perseroan No. 64 tanggal 29 November 2007, Eks-PNS tersebut berhak memperoleh pensiun pokok yang besarnya disesuaikan sama dengan pensiun pokok yang diterima oleh penerima pensiun PNS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.02.2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks-PNS Departemen Perhubungan Perusahaan pada Pasal 3, sumber pendanaan pembayaran pensiun pegawai berasal dari: iuran pegawai, Perseroan untuk kontribusi pendanaan bersama, past service liability yang dibayarkan oleh Perseroan, hasil investasi dari akumulasi dana pensiun pegawai Perseroan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Perseroan diharuskan membayar past service liability sebesar Rp79.500.000 setiap tahun sampai dengan tahun 2024 kepada PT Taspen (Persero) yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pembayaran pensiun pegawai sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyelenggaraan pembayaran pensiun karyawan Eks-PNS.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-927/MK.02/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Penetapan Pendanaan Bersama Pembayaran Manfaat Pensiun antara APBN dan Perseroan menetapkan bahwa kontribusi pendanaan Perseroan dan Pemerintah dalam Pendanaan Bersama masing-masing sebesar 22% dan 78%. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan tidak terdapat perubahan persentase Penetapan Pendanaan Bersama Pembayaran Manfaat Pensiun. Detail beban pensiun Eks-PNS yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Biaya Jasa Kini	557.493
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti	155.186.631
Jumlah	155.744.124
Bagian Pemerintah	(121.480.417)
Bagian Perseroan	34.263.707

Liabilitas sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Nilai Kini Kewajiban	7.739.035.032
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun	(1.124.703.623)
Jumlah Liabilitas Bersih	6.614.331.409
Bagian Pemerintah	(5.159.178.499)
Bagian Perseroan	1.455.152.910
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	156.195.973
Bagian Jangka Panjang	1.298.956.937

Mutasi liabilitas sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Awal Periode/Tahun	5.883.853.300
Beban Laba Rugi	155.744.124
Pembayaran Manfaat	(378.323.136)
Penghasilan Komprehensif Lain	953.057.121
Akhir Periode/Tahun	6.614.331.409
Bagian Pemerintah	(5.159.178.499)
Bagian Perseroan	1.455.152.910
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	156.195.973
Bagian Jangka Pendek	1.298.956.937

Mutasi nilai wajar aset program dana pensiun sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Nilai Wajar Aset Program	
Dana Pensiun Awal Periode/Tahun	1.108.093.198
Pengembalian Aset	
Dana yang Diharapkan	29.225.958
Imbal Hasil Aset Program	
Non Bunga-Neto	(12.615.533)
Akhir Periode/Tahun	1.124.703.623
Bagian Pemerintah	(877.268.826)
Bagian Perseroan	247.434.797

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Saldo Awal	1.208.354.060
Periode/Tahun Berjalan	953.057.121
Saldo Akhir	2.161.411.181
Bagian Pemerintah	(1.685.900.721)
Bagian Perseroan	475.510.460

Komposisi penempatan dilakukan atas aset program adalah sebagai berikut:

(dalam %)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Deposito	38,33
Surat Utang Negara	39,37
Sukuk	22,30
Jumlah	100,00

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Analisa Sensitivitas	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Akhir Tahun	
Tingkat Diskonto + 1%	1.702.538.287
Tingkat Diskonto – 1%	1.702.638.437
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	1.702.623.778
Tingkat Kenaikan Gaji – 1%	1.702.551.774

Program Pensiun Eks Perum dan Persero

Perseroan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan Eks-Perum yang direkrut sebelum Agustus 2009. Manfaat pensiun dihitung berdasarkan TDPIP tahun 2012 dengan ketentuan perhitungan tanpa kenaikan Gaji Dasar Program yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berdasarkan Perjanjian No. 161/HK/UM/2003 dan 099.SJ.U.0903 serta perjanjian No. 162/HK/UM/2003 dan No. 100.SJ.U.0903 tanggal 28 September 2003 tentang Pengelolaan program Anuitas Pensiun Bagi Pensiunan dan Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai Perseroan. Sedangkan untuk karyawan Persero yang direkrut setelah Agustus 2009 diberikan pesangon sesuai ketentuan Undang- Undang. Pada 2 Juni 2021 terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2026 Perseroan mengalihkan polis asuransi kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Rincian beban pensiun karyawan Eks-Perum dan Persero yang diakui pada laba rugi konsolidasian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Biaya Jasa Kini	169.331.087
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti	133.505.059
Biaya Jasa Lalu	-
Jumlah	302.836.146

Liabilitas sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Nilai Kini Kewajiban	6.841.942.133
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun	(2.455.905.780)
Jumlah Liabilitas Bersih	4.386.036.353

Mutasi liabilitas sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Awal Periode/Tahun	4.401.673.427
Beban Laba Rugi	302.836.146
Penghasilan Komprehensif Lain	(295.329.812)
Iuran Dibayar Perseroan	(23.143.408)
Akhir Periode/Tahun	4.386.036.353
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	
Bagian Jangka Panjang	4.386.036.353

Mutasi nilai wajar aset program dana pensiun sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Nilai Wajar Aset	
Program Dana Pensiun	
Awal Periode/Tahun	2.570.850.933
Iuran Dibayar Perseroan	23.143.408
Manfaat Dibayar Pihak Ketiga	(228.814.083)
Pendapatan Bunga	70.441.278
Imbal Hasil Aset Program	
Non Bunga-Neto	20.284.244
Akhir Periode/Tahun	2.455.905.780

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Saldo Awal	1.067.380.849
Periode/Tahun Berjalan	(295.329.812)
Saldo Akhir	772.051.037

Komposisi penempatan investasi dilakukan atas aset program adalah sebagai berikut:

(dalam %)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Saham	73,37
Properti	11,26
Obligasi	0,87
Deposito	12,40
Lain-lain	2,10
Jumlah	100,00

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Analisa Sensitivitas	
Nilai Kini Kewajiban	
Imbalan Pasti Akhir Tahun	
Tingkat Diskonto + 1%	6.419.539.643
Tingkat Diskonto - 1%	7.318.615.403
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	7.318.272.806
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	6.412.303.422

Imbalan Kerja Lainnya

Grup juga memberikan imbalan kerja lainnya berupa uang pesangon, penghargaan masa bakti, tunjangan masa persiapan pensiun dan tunjangan cuti besar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Grup. Imbalan program ini tidak didanai dan ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan.

Detail beban imbalan kerja lainnya yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Biaya Jasa Kini	7.242.337
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti	1.790.132
Biaya Jasa Lalu	-
Jumlah	9.032.469

Liabilitas sehubungan dengan imbalan kerja lain sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Nilai Kini Kewajiban	142.133.750
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun	(91.886.453)
Surplus	50.247.297
Lain-lain	33.558.181
Jumlah	83.805.478

Mutasi liabilitas sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Awal Periode/Tahun	78.591.696
Beban Laba Rugi	9.032.469
Pembayaran Manfaat	(199.759)
Penghasilan Komprehensif Lain	3.555.093
Iuran Dibayar Perseroan	(7.174.021)
Akhir Periode/Tahun	83.805.478

Mutasi nilai wajar aset program liabilitas imbalan kerja lainnya sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2023
Nilai Wajar Aset	
Program Dana Pensiun	
Awal Periode/Tahun	82.396.323
Pengembalian Aset Dana	
yang Diharapkan	2.684.820
Imbalan Hasil atas Aset	
Program yang tidak Termasuk	
dalam Bunga Neto	
Iuran Dibayar Perseroan	7.174.023
Iuran Dibayar Pihak Ketiga	(368.713)
Akhir Periode/Tahun	91.886.453

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Saldo Awal	35.710.816
Periode/Tahun Berjalan	3.555.093
Saldo Akhir	39.265.909

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2024
Analisa Sensitivitas	
Nilai Kini Kewajiban	
Imbalan Pasti Akhir Tahun	
Tingkat Diskonto + 1%	127.977.577
Tingkat Diskonto – 1%	157.324.073
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	157.047.489
Tingkat Kenaikan Gaji – 1%	127.967.201

7. Pinjaman Program PEN

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei
	2023
Pokok Pinjaman (Catatan 41)	2.843.750.000
Penyesuaian Nilai Wajar	(421.067.944)
Nilai Wajar Pinjaman	2.422.662.056
Pendapatan Hubah Ditangguhkan	421.067.944
Jumlah	2.843.750.000
Jumlah Bagian Pinjaman Program PEN yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	437.500.000
Bagian Jangka Panjang	2.406.250.000

Perseroan menandatangani perjanjian pemberian dana investasi Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam bentuk pinjaman dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dengan Akta No.17 tanggal 30 November 2020 yang di hadapan Pratiwi Handayani, Notaris di Jakarta. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 531/KMK.06/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai Pelaksana Investasi Untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor.118/PMK.06/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Investasi Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN.

Informasi lain mengenai Program PEN pada 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Kreditur	Nama Fasilitas	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pemenuhan Batasan yang Diwajibkan
Perseroan					
Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	31 Oktober 2030	Sampai dengan 31 Desember 2027 <i>Repo rate</i> – 100 BPS	-	Indikator pembayaran bunga: <i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i> >1,0 kali Indikator Pembayaran pokok: <i>Debt to CFO</i> >0 kali dan <10 kali/

8. Pinjaman Jangka Panjang

Saldo pinjaman jangka panjang per tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp 31.189.538.038 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Pihak Berelasi	15.471.147.857
Pihak Ketiga	
China Development Bank	7.214.834.232
PT Bank Central Asia Tbk	3.395.290.643
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.500.469.973
PT BPD Sumatera Utara	583.259.211
PT Bank KEB Hana Indonesia	575.555.748
PT Bank DKI	575.555.748
PT Bank Mega Tbk	575.555.748
PT Bank Permata Tbk	500.000.000
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	349.852.113
PT BPD Papua	300.000.000
PT Bank Shinhan Indonesia	287.777.875
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	200.000.000
Export-Import Bank of United States	61.296.873
Subjumlah	17.119.448.164
Jumlah	32.590.596.021
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Pihak Berelasi	
Pihak Ketiga	1.007.145.098
PT Bank Central Asia Tbk	255.101.087
Export-Import Bank of United States	61.296.873
PT Bank CIMB Niaga Tbk	37.650.106
PT Bank KEB Hana Indonesia	8.666.265
PT Bank DKI	8.666.265
PT Bank Mega Tbk	8.666.265
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	5.283.183
PT Bank Shinhan Indonesia	4.333.132
PT BPD Sumatera Utara	4.249.709
Subjumlah	393.912.885
Jumlah Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.401.057.983
Bagian Jangka Panjang	31.189.538.038

Berdasarkan mata uang:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Berdasarkan Mata Uang:	
Rupiah	25.314.464.916
Dolar Amerika Serikat	3.815.658.608
Yuan Tiongkok	3.460.472.497
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang	32.590.596.021
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Rupiah	1.339.761.110
Dolar Amerika Serikat	61.296.873
Jumlah Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.401.057.983
Rupiah	23.974.703.806
Dolar Amerika Serikat	3.754.361.735
Yuan Tiongkok	3.460.472.497
Bagian Jangka Panjang	31.189.538.038

Informasi lain mengenai Pinjaman Bank Jangka Panjang pada 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Kreditur	Nama Fasilitas	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pemenuhan Batasan yang Diwajibkan
Perusahaan					
Pinjaman Sindikasi Proyek Pengadaan 144 unit lokomotif, 1.200 unit gerbong (KKBW) dan 1.200 unit gerbong (PPCW)					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi	Tahap I : 25 Juli 2025 Tahap II : 8 Agustus 2026	6,05% - 11,12%	Asset sarana yang dibiayai	<i>Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi	Tahap I : 25 Juli 2025 Tahap II : 8 Agustus 2026	6,05% - 11,12%	Asset sarana yang dibiayai	<i>Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif</i>
Proyek Pengadaan 10 Set KRL Komuter Jabodetabek					
Kementerian Keuangan	<i>Term Loan II Berulang</i>	1 Desember 2047	7,50% - 8,38%	-	-
Proyek Pengadaan 600 KKBW, 600 PPCW dan 1.213 KKBW					
PT Bank Central Asia Tbk	<i>Term Loan II Berulang</i>	Tahap I & II : 25 November 2026 Tahap III : 4 Maret 2028	6,00% - 10,26%	Asset sarana yang dibiayai	<i>Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x</i>
Pinjaman Sindikasi Commuterline (Jabodetabek)					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi	Tahap I : 10 Mei 2028 Tahap II : 25 Juni 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan	<i>Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi	Tahap I : 10 Mei 2028 Tahap II : 25 Juni 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan	<i>Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi	Tahap I : 10 Mei 2028 Tahap II : 25 Juni 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan	<i>Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif</i>
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi	Tahap I : 10 Mei 2028 Tahap II : 25 Juni 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan	<i>Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif</i>
Proyek Pengadaan 50 Lokomotif General Electric					
Export-Import Bank of United States	<i>Term Loan II Berulang</i>	Tarikan I : 15 Maret 2024 Tarikan II : 15 Juni 2024 Tarikan II : 15 Maret 2025	2,54%	Asset sarana yang dibiayai	-

Kreditur	Nama Fasilitas	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pemenuhan Batasan yang Diwajibkan
Perjanjian Sindikasi Bandara Soekarno Hatta (Basoetta)					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi	31 Oktober 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi	31 Oktober 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi	31 Oktober 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi	31 Oktober 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
Pinjaman Transaksi Khusus					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi	26 Desember 2026	7,25% - 10,15%	Negative Pledge	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Current Ratio min 100%
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	Sindikasi	26 Desember 2026	7,25% - 10,15%	Negative Pledge	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Current Ratio min 100%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Sindikasi	26 Desember 2026	7,25% - 10,15%	Negative Pledge	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Current Ratio min 100%
Perjanjian Pinjaman Sindikasi Proyek Light Rail Transit (LRT)					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	Debt to Equity Ratio Max 500%

Kreditur	Nama Fasilitas	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pemenuhan Batasan yang Diwajibkan
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd.	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
PT Bank Shinhan Indonesia	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
PT Bank KEB Hana Indonesia	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
PT Bank DKI	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
PT Bank Mega Tbk	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
PT BPD Sumatera Utara	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
PT BPD Pembangunan Daerah Papua	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
PT Bank Permata Tbk	Sindikasi	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah	<i>Debt to Equity Ratio Max 500%</i>
Perjanjian Pinjaman CDB					
China Development Bank	Fasilitas A	25-Apr-69	3,20%	Jaminan Pemerintah	<i>Total Liabilities to Asset Ratio Max 85%</i>
China Development Bank	Fasilitas B	25-Apr-69	3,10%	Jaminan Pemerintah	<i>Total Liabilities to Asset Ratio Max 85%</i>

Kreditur	Nama Fasilitas	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit	Suku Bunga per Tahun	Agunan	Pemenuhan Batasan yang Diwajibkan
Perusahaan Anak - PT Kereta Commuter Indonesia					
Proyek Pengembangan Commuterline Jabodetabek					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi	25 Desember 2027	9,38-9,77%	-Fiduciary of movable assets -Fiduciary on bills -Fiduciary over bank accounts -Company Guarantee -Fiduciary of movable assets	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi	25 Desember 2027	9,38-9,77%	-Fiduciary on bills -Fiduciary over bank accounts -Company Guarantee -Fiduciary of movable assets	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi	25 Desember 2027	9,38-9,77%	-Fiduciary on bills -Fiduciary over bank accounts -Company Guarantee -Fiduciary of movable assets	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi	25 Desember 2027	9,38-9,77%	-Fiduciary on bills -Fiduciary over bank accounts -Company Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
Perusahaan Anak/Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia					
Proyek Pengadaan 10 Unit Rangkaian Kereta					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi	19 Januari 2031	9,38-9,77%	Sarana KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi	19 Januari 2031	9,38-9,77%	Sarana KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi	19 Januari 2031	9,38-9,77%	Sarana KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi	19 Januari 2031	9,38-9,77%	Sarana KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x

Berdasarkan perhitungan interim, Perseroan telah memenuhi kepatuhan *financial covenant*.

9. Utang Obligasi

Saldo utang obligasi per tanggal 31 Mei 2024 adalah Rp 2.595.044.282 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Obligasi I Kereta Api Indonesia:	
Seri B	1.000.000.000
Subjumlah	1.000.000.000
Obligasi II Kereta Api Indonesia:	
Seri A	900.000.000
Seri B	1.100.000.000
Subjumlah	2.000.000.000
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022:	
Seri A	634.000.000
Seri B	866.000.000
Subjumlah	1.500.000.000
Jumlah	4.500.000.000
Biaya Penerbitan Obligasi yang belum Diamortisasi	(5.609.887)
Jumlah Utang Obligasi	4.494.390.113
Bagian Utang Obligasi yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Obligasi I kereta Api Indonesia:	
Seri B	1.000.000.000
Obligasi II Kereta Api Indonesia:	
Seri A	900.000.000
Biaya penerbitan Obligasi yang Belum Diamortisasi	(654.169)
Jumlah Bagian Obligasi yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.899.345.831
Bagian Jangka Panjang	2.595.044.282

Jumlah pembayaran kembali untuk utang obligasi menurut tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Tahun Jatuh Tempo	Jumlah
2024	1.900.000.000
2026	1.100.000.000
2027	634.000.000
2029	866.000.000
Total	4.500.000.000

a. Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017

Pada tanggal 13 November 2017, Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I Kereta Api Indonesia tahun 2017 dengan 2 (dua) seri yaitu:

- a. Seri A senilai Rp1.000.000.000 dengan suku bunga 7,75% per tahun. Pada tanggal 18 November 2022, Perseroan telah melunasi Obligasi I seri A Kereta Api Indonesia Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000 sesuai jadwal.
- b. Seri B senilai Rp1.000.000.000 dengan suku bunga 8,25% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 21 November 2024.

Total dana yang diterima Perseroan pada tanggal 21 November 2017, dari hasil penerbitan perdana Obligasi I tahun 2017 adalah sebesar Rp2.000.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Grup, sekitar 55% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk penyelesaian proyek KA Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) dan sekitar 45% akan digunakan untuk pembelian kereta.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi I Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat “AAA” untuk penerbitan obligasi dari PT Perneringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

Perseroan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- a. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1
- b. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1

Pada 3 April 2024, Obligasi I Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat “AAA” dari PEFINDO untuk periode 2 April 2024 hingga 1 April 2025

b. Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi II Kereta Api Indonesia tahun 2019 dengan 2 (dua) seri yaitu:

- a. Seri A senilai Rp900.000.000 dengan suku bunga 7,75% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 16 Desember 2024.
- b. Seri B senilai Rp1.100.000.000 dengan suku bunga 8,20% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 16 Desember 2026.

Total dana yang diterima Perseroan pada tanggal 13 Desember 2019, dari hasil penerbitan perdana Obligasi II tahun 2019 adalah sebesar Rp2.000.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Grup, sekitar Rp1.200.000.000 akan digunakan untuk refinancing fasilitas pada PT Bank HSBC Indonesia dan sisanya akan digunakan untuk pengadaan/perbaikan sarana.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi II Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat “AAA” untuk penerbitan obligasi dari PEFINDO. Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

Perseroan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- a. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1.
- b. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1.

Pada 3 April 2024, Obligasi II Grup mendapatkan peringkat “AAA” dari PEFINDO untuk periode 2 April 2024 hingga 1 April 2025.

c. Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia tahun 2022 dengan 2 (dua) seri yaitu:

- a. Seri A senilai Rp634.000.000 dengan suku bunga 7,10% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2027.
- b. Seri B senilai Rp866.000.000 dengan suku bunga 8,00% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2029.

Total dana yang diterima Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2022, dari hasil penerbitan perdana Obligasi Berkelanjutan I tahun 2022 adalah sebesar Rp1.500.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Grup, sekitar Rp1.000.000.000 digunakan untuk pembayaran utang pokok Kereta Api Indonesia tahun 2017 Seri A sisanya akan digunakan untuk pengembangan angkutan perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan yang berupa prasarana perkeretaapian.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi Berkelanjutan I Perseroan mendapatkan peringkat “AA+” untuk penerbitan obligasi dari PEFINDO. Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

Perseroan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1.
- Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1.

Berdasarkan perhitungan interim, Perseroan telah memenuhi kepatuhan *financial covenant*.

Pada 3 April 2024, Obligasi Berkelanjutan I Perseroan mendapatkan peringkat “AAA” dari PEFINDO untuk periode 2 April 2024 hingga 1 April 2025.

10. Sukuk Ijarah

KETERANGAN	(dalam ribuan Rupiah)
	31 Mei 2024
Sukuk Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022:	
Seri A	117.350.000
Seri B	382.650.000
Jumlah	500.000.000
Biaya Penerbitan Sukuk yang belum Diamortisasi	(1.297.522)
Jumlah Sukuk	498.702.478

Jumlah pembayaran kembali untuk sukuk ijarah menurut tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

Tahun Jatuh Tempo	(dalam ribuan Rupiah)
	Jumlah (Rp)
2027	117.350.000
2029	382.650.000
Total	500.000.000

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 dengan 2 (dua) seri yaitu:

- Seri A senilai Rp117.350.000 dengan dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp8.331.850 per tahun, akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2027.
- Seri B senilai Rp382.650.000 dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp30.612.000 per tahun, akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2029.

Total dana yang diterima Perseroan pada tanggal 5 Agustus 2022, dari hasil penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 adalah sebesar Rp500.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus obligasi berkelanjutan I dan sukuk ijarah berkelanjutan I Kereta Api Indonesia, sekitar 78% akan digunakan untuk pengembangan angkutan perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan yang berupa prasarana perkeretaapian dan sisanya akan digunakan untuk pengadaan sarana KA Bandara International Adi Soemarmo yang berupa sarana trainset KRDE.

Sukuk ijarah ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat “AA+” atas Sukuk dari PEFINDO. Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan cicilan imbalan ijarah setiap triwulan.

Perseroan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu selama periode sukuk ijarah sebagai berikut:

- a. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1.
- b. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1.

Berdasarkan perhitungan interim, Perseroan memenuhi kepatuhan *financial covenant*.

Pada 3 April 2024, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perseroan mendapatkan peringkat “AAA” dari PEFINDO untuk periode 2 April 2024 hingga 1 April 2025.

11. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka panjang lainnya merupakan dana titipan dari iuran pensiun dana tambahan dari Pemerintah Republik Indonesia dan PT Taspen (Persero) sebagai pembayaran manfaat masa lalu para karyawan eks- Pegawai Negeri Sipil. Dana titipan ini termasuk titipan dana kesehatan pegawai akan dibayarkan sesuai perjanjian dengan pihak pengelola dana. Dana titipan disimpan dalam bentuk rekening bank dan deposito. Rincian liabilitas jangka panjang lainnya sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei 2024
Titipan Dana Iuran Pensiun	
Saldo Awal	91.258.933
Penerimaan:	
Penerimaan Dana luaran Pensiun	202.933.958
Pengembangan Dana	889.515
Subjumlah	203.823.473
Pembayaran	
BPS Ketenagakerjaan	83.262.963
PT Taspen (Persero)	56.777.203
PT Asuransi Jiwa IFG (Life)	53.339.465
Subjumlah	193.379.631
Saldo Akhir	101.702.775
Titipan Dana Kesehatan Pegawai	61.354.623
Tantiem Direksi	7.640.255
Jumlah	170.697.653

Kisaran suku bunga per tahun dan jangka waktu deposito berjangka adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei 2024
Rupiah	6,00% - 12,00%
Jangka Waktu	1 Bulan

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Perusahaan merupakan tergugat 1 (satu) dalam gugatan yang diajukan oleh Tengku Hamdy Osman Delikhan melalui Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam perkara 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn pada tanggal 5 Februari 2021. Inti dari gugatan tersebut adalah Tengku Hamdy Osman Delikhan menggugat KAI karena tahun 1868 terjadi perjanjian konsesi antara Sultan Deli dan DSM selama 90 tahun yang seharusnya berakhir tahun 2002 dan aset tersebut dikembalikan ke Tengku Hamdy Osman Delikhan. Penggugat mengklaim bahwa Perusahaan merugikan penggugat dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp707.340.000.

Pada tanggal 23 November 2021, Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan putusan atas perkara No. 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn yang pada menyatakan menolak tuntutan penggugat.

Pada tanggal 14 Desember 2022, Tengku Hamdy Osman Delikhan Al Haj gelar Tengku Raja Muda Deli mengajukan banding dengan nomor perkara 381/Pdt/2023/PT MDN. Pada tanggal 25 Juli 2023, putusan banding adalah menguatkan putusan PN Medan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 23 November 2021.

Sehubungan pelaksanaan Upaya eksekusi kepada Tengku Hamdy Osman Delikhan, sampai dengan diterbitkan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan berupaya untuk memperoleh informasi atau penelusuran terhadap aset/harta kekayaan yang tercatat atau terdaftar sebagai milik/atas nama Tengku Hamdy Osman Delikhan yang nantinya akan dijadikan sebagai objek eksekusi.

Pada tanggal 29 Agustus 2023, Tengku Hamdy Osman Delikhan al-Haj gelar Tengku Raja Muda Deli mengajukan Kasasi. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses pengajuan Kasasi.

KEWAJIBAN KEUANGAN PERSEROAN

Kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan adalah sebagai berikut:

No.	Bank	Outstanding per 31 Mei 2024	Jatuh Tempo	Suku Bunga	Jaminan	Penggunaan Dana
Mata uang IDR						
1	BNI	200.000.000	29 Jul 2024	6,70%	Tidak Ada	Modal Kerja Perusahaan
2	Mandiri	1.000.000.000	4 Jul 2024	6.45%	Tidak Ada	Modal Kerja Perusahaan
3	Sindikasi BNI & BRI	602.854.962	25 Aug 2026	9.23%	Ada	Pengadaaan 144 Lok & 2.400 Gerbong
4	BCA	174.932.352	25 Sep 2026	9.03%	Ada	Pengadaan 1.200 Gerbong
5	Sindikasi BNI, BRI, Mandiri, BCA	371.888.986	25 Jun 2029	9.93%	Ada	Pembiayaan Prasarana KA Commuter Jabodetabek
6	Sindikasi BNI, BRI, Mandiri, BCA	940.030.556	31 Oct 2030	9.93%	Ada	Pembiayaan Prasarana KA Bandara Soekarno Hatta
7	BCA	255.749.225	4 Mar 2028	9.03%	Ada	Pengadaan 1.213 Gerbong
8	SLA kfw – Kemenkeu	22.916.397	1 Dec 2048	7.125%	Tidak Ada	Pengadaan 10 TS KA Commuter Jabodetabek
9	PTK Mandiri	584.582.000	25 Dec 2026	8.40%	Tidak Ada	Pengembangan Usaha Perusahaan
10	IP – PEN	2.843.750.000	31 Oct 2030	5.25%	Tidak Ada	Mendukung Likuiditas dan SOLvabilitas

No.	Bank		Outstanding per 31 Mei 2024	Jatuh Tempo	Suku Bunga	Jaminan	Penggunaan Dana
11	Sindikasi Jabodebek	LRT	17.650.376.281	25 Dec 2036	5.80%	Ada	Pembiayaan Proyek LRT Jabodebek
12	Sindikasi Jabodebek	LRT	4.169.128.801	25 Dec 2036	5.80%	Ada	Pembiayaan Proyek LRT Jabodebek
Jumlah IDR			28.816.209.560				
Mata Uang USD*							
1	US Exim (Tranche 2)		1.331.089	15 Jun 2024	2.39%	Tidak Ada	Pengadaan 50 Unit Lokomotif
2	US Exim (Tranche 3)		2.440.330	15 Mar 2025	2.07%	Tidak Ada	Pengadaan 50 Unit Lokomotif
3	CDB		230.995.000	25 Apr 2069	3.20%	Ada	Pendanaan Cost Overrun Proyek KCJB
Jumlah USD*			233.435.330				
Mata uang CNY*							
1	CDB		1.542.787.560	25 Apr 2069	3.10%	Ada	Pendanaan Cost Overrun Proyek KCJB

*ditulis dalam satuan penuh

Kewajiban Keuangan Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan kedepan adalah sebagai berikut:

No.	Bank		Outstanding per 31 Mei 2024	Jatuh Tempo	Suku Bunga	Jaminan	Penggunaan Dana
PT Reska Multi Usaha							
1	Bank Permata		30.000.000	03 Juni 2024	8.25%	Tidak ada	Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka operasional usaha
2	Bank Mandiri		55.000.000	8 Sep 2024	7.75%	Tidak ada	Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dalam rangka operasional usaha
PT Kereta Commuter Indonesia							
1	Penjaminan Sindikasi Jabodetabek		155.658.161	25 Dec 2027	JIBOR + 3%	KRL	Investasi Sarana KRL Bukan Baru
2	Penjaminan Sindikasi Basoetta		388.500.000	25 Mar 2031	JIBOR + 3%	KRL	Investasi Sarana KRL Basoetta
3	Pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK)		137.000.000	5 Feb 2025	7%	Piutang PSO	Untuk Pembiayaan Kebutuhan Modal Kerja atas dasar PSO
PT Railink							
Tidak ada							
PT Kereta Api Pariwisata							
Tidak Ada							
PT Kereta Api Logistik							
Tidak Ada							
PT KA Properti Manajemen							
Tidak Ada							

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN

DARI TANGGAL 31 MEI 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MENYELESAIKAN PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini adalah informasi keuangan Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, dalam laporannya No. 01095/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0645 dan penyajian informasi keuangan Konsolidasi Interim untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 tidak diaudit atau direviu.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4.549.819.332	5.138.571.482	5.695.720.193
Dana Dibatasi Penggunaannya	2.720.219.288	2.587.812.673	5.610.385.976
Piutang Usaha			
Pihak Berelasi	1.522.305.765	1.253.114.802	934.629.745
Pihak Ketiga	466.832.688	616.479.973	471.708.322
Piutang Lain-lain			
Pihak Berelasi	8.183.000	8.183.000	-
Pihak Ketiga	39.823.498	53.403.990	90.003.063
Persediaan	1.310.706.580	1.528.349.171	1.145.313.941
Pendapatan Masih akan Diterima			
Pihak Berelasi	2.624.275.207	439.036.344	719.566.683
Pihak Ketiga	422.667.435	324.703.696	220.050.288
Uang Muka	64.240.770	92.819.225	57.650.571
Biaya Dibayar di Muka	252.647.774	167.365.297	62.652.603
Pajak Dibayar di Muka	795.925.807	690.300.423	303.896.017
Aset Lancar Lainnya	10.992.438	123.701.643	26.370.549
JUMLAH ASET LANCAR	14.788.639.582	13.023.841.719	15.337.947.951
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Lain-lain	7.214.834.232	-	-
Uang Muka Jangka Panjang	2.965.912.058	3.093.767.915	20.640.157
Investasi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	4.301.935.804	5.808.370.149	6.315.362.037
Investasi Jangka Panjang	35.747.769	35.747.769	24.176.000
Aset Pajak Tangguhan	1.204.709.241	1.216.932.650	1.432.778.568
Aset Tetap	27.090.722.780	26.370.631.004	23.924.692.897
Properti Investasi	266.259.362	246.905.669	126.085.555
Hak Pengoperasian Aset Prasarana	30.617.492.459	30.697.675.664	23.736.944.016
Aset Takberwujud	752.552.410	576.231.411	422.760.902
Aset Hak Guna	84.899.422	92.152.320	53.116.074
Aset Tidak Lancar Lainnya	225.500.854	212.057.103	186.725.566
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	74.760.566.391	68.350.471.654	56.243.281.772
JUMLAH ASET	89.549.205.973	81.374.313.373	71.581.229.723

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2022	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				
Pihak Berelasi	965.653.310	4.976.299.233	880.714.681	
Pihak Ketiga	961.841.412	2.394.977.405	1.578.171.487	
Beban Akrua	2.494.483.189	2.203.317.939	1.572.961.926	
Utang Pajak	625.421.368	621.745.503	309.332.730	
Pendapatan Diterima di Muka	1.310.581.012	1.281.637.698	1.144.639.451	
Liabilitas Imbalan Kerja	1.710.180.412	1.295.541.970	962.743.057	
Pinjaman Bank Jangka Pendek	1.942.426.859	1.388.523.138	1.760.000.000	
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				
Liabilitas Sewa	33.231.048	36.504.861	16.563.637	
Pinjaman Jangka Panjang	1.401.057.983	1.294.613.508	1.196.958.601	
Pinjaman Program PEN	437.500.000	437.500.000	437.500.000	
Utang Obligasi	1.899.345.831	1.898.852.925	-	
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	97.079.698	91.802.000	98.538.290	
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	13.878.802.122	17.921.316.180	9.958.123.860	
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Pendapatan Diterima di Muka	808.675.891	834.563.297	837.174.293	
Liabilitas Imbalan Kerja	5.768.798.768	5.618.516.876	5.197.151.974	
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				
Liabilitas Sewa	60.531.873	74.166.028	44.599.263	
Pinjaman Jangka Panjang	31.189.538.038	20.142.027.462	18.282.631.817	
Pinjaman Program PEN	2.406.250.000	2.625.000.000	3.062.500.000	
Utang Obligasi	2.595.044.282	2.594.469.619	4.490.760.381	
Sukuk Ijarah	498.702.478	498.586.194	498.307.111	
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	170.697.653	159.530.476	129.796.719	
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	43.498.238.983	32.546.859.952	32.542.921.558	
JUMLAH LIABILITAS	57.377.041.105	50.468.176.132	42.501.045.418	
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk				
Modal Saham				
Nilai Nominal Rp1.000 per Saham				
Modal Dasar Sebesar 40.000.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh pada 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 sebesar 22.368.743, dan 31 Desember 2022 sebesar 19.168.743 saham	22.368.743.000	22.368.743.000	19.168.743.000	
Tambahan Penyertaan Modal Negara	-	-	3.200.000.000	
Saldo Laba				
Ditentukan penggunaannya	9.476.398.277	9.476.398.277	7.694.357.800	
Belum ditentukan penggunaannya	1.266.852.084	76.609.318	(15.271.506)	
Komponen Ekuitas Lainnya	(1.306.899.053)	(1.105.074.666)	(1.060.098.895)	
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	32.075.094.308	30.816.675.929	28.987.730.399	
Kepentingan Non-pengendali	97.070.560	89.461.312	92.453.906	
JUMLAH EKUITAS	32.172.164.868	30.906.137.241	29.080.184.305	
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	89.549.205.973	81.374.313.373	71.581.229.723	

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
PENDAPATAN				
Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya	13.893.126.717	10.612.558.415	27.764.287.041	22.967.071.664
Pendapatan Konstruksi	135.412.371	339.021.316	7.342.248.533	2.610.567.346
Jumlah Pendapatan	14.028.539.088	10.951.579.731	35.106.535.574	25.577.639.010
BEBAN POKOK PENDAPATAN				
Beban Angkutan dan Usaha Lainnya	(8.603.518.266)	(7.198.478.897)	(19.676.271.707)	(15.930.293.675)
Beban Konstruksi	(135.412.371)	(339.021.316)	(7.342.248.533)	(2.610.567.346)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	(8.738.930.637)	(7.537.500.213)	(27.018.520.240)	(18.540.861.021)
LABA BRUTO	5.289.608.451	3.414.079.518	8.088.015.334	7.036.777.989
Beban Usaha	(1.510.526.028)	(1.434.857.643)	(4.227.212.786)	(3.664.532.070)
LABA USAHA	3.779.082.423	1.979.221.875	3.860.802.548	3.372.245.919
Penghasilan Keuangan	186.290.476	133.375.545	301.722.909	139.514.944
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(1.505.375.882)	(141.716.712)	(507.073.954)	(267.504.227)
Beban Keuangan	(1.012.661.453)	(502.413.649)	(1.507.438.966)	(980.572.153)
Selisih Kurs	170.527.630	(90.088.052)	(57.275.927)	42.673.710
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain - Bersih	(163.258.557)	19.336.152	156.750.557	(95.769.893)
LABA SEBELUM PAJAK	1.454.604.637	1.397.715.159	2.247.487.167	2.210.588.300
Beban Pajak Penghasilan	(256.749.899)	(299.341.130)	(375.939.030)	(524.599.080)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.197.854.738	1.098.374.029	1.871.548.137	1.685.989.220
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi pada Periode Berikutnya:				
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti	87.723.281	(55.521.724)	(56.850.198)	746.347.332
Efek Pajak Penghasilan Terkait	(19.550.392)	12.214.779	11.703.462	(165.506.775)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak	68.172.889	(43.306.945)	(45.146.736)	580.840.557
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.266.027.627	1.055.067.084	1.826.401.401	2.266.829.777
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	1.190.242.766	1.098.423.405	1.873.921.301	1.782.040.477
Kepentingan Non-pengendali	7.611.972	(49.376)	(2.373.164)	(96.051.257)
JUMLAH	1.197.854.738	1.098.374.029	1.871.548.137	1.685.989.220
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	1.258.418.379	1.055.116.460	1.828.945.530	2.362.914.534
Kepentingan Non-pengendali	7.609.248	(49.376)	(2.544.129)	(96.084.757)
JUMLAH	1.266.027.627	1.055.067.084	1.826.401.401	2.266.829.777
Laba per Saham Dasar	53	49	84	93

Rasio Keuangan Penting

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Rasio Pertumbuhan				
Jumlah Aset	10,05%	0,98%	13,68%	14,13%
Jumlah Liabilitas	13,69%	-1,84%	18,75%	8,65%
Jumlah Ekuitas	4,10%	5,11%	6,28%	23,23%
Laba Tahun Berjalan	9,06%	85,79%	11,01%	496,52%
EBITDA	35,81%	38,71%	14,18%	178,03%
Rasio Usaha				
Laba Sebelum Pajak Penghasilan / Pendapatan ⁽¹²⁾	10,47%	13,17%	8,09%	9,63%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Aset	1,34%	1,52%	2,30%	2,36%
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan / Total Ekuitas	3,72%	3,59%	6,06%	5,80%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan / Pendapatan ⁽¹²⁾	8,62%	10,35%	6,74%	7,34%
Rasio Keuangan				
Rasio Kas ⁽¹⁾	0,33x	0,59x	0,29x	0,57x
Rasio Lancar ⁽²⁾	1,07x	1,51x	0,73x	1,54x
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas ⁽³⁾	1,78x	1,37x	1,63x	1,46x
Rasio Pinjaman berbunga terhadap Ekuitas ⁽⁴⁾	1,32x	0,96x	1,00x	1,02x
Rasio Liabilitas terhadap Aset ⁽⁵⁾	0,64x	0,58x	0,62x	0,59x
<i>Interest Coverage Ratio</i> ⁽⁶⁾	2,67x	3,72x	2,84x	4,03x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽⁷⁾	1,25x	1,39x	1,01x	1,73x
Rasio Imbal Hasil Aset (ROA) ⁽⁸⁾	1,34%	1,52%	2,30%	2,36%
Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE) ⁽⁹⁾	3,72%	3,59%	6,06%	5,80%
Rasio Marjin Kotor ^{(10) (12)}	38,07%	32,17%	29,13%	30,64%
Rasio Marjin Bersih ^{(11) (12)}	8,62%	10,35%	6,74%	7,34%

Keterangan:

1. Total kas dan setara kas dibagi dengan total liabilitas lancar
2. Total aset lancar dibagi dengan total liabilitas lancar
3. Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas
4. Pinjaman berbunga dibagi dengan total ekuitas
5. Total liabilitas dibagi dengan total aset
6. Laba sebelum pajak dikurangi jumlah beban dan penghasilan bunga ditambah beban amortisasi dan penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah beban bunga
7. Laba sebelum pajak dikurangi jumlah beban dan penghasilan bunga ditambah beban amortisasi dan penyusutan kemudian dibagi dengan penjumlahan beban bunga dan pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
8. Laba tahun berjalan dibagi dengan total aset
9. Laba tahun berjalan dibagi dengan total ekuitas
10. Laba bruto tahun berjalan dibagi dengan pendapatan
11. Laba tahun berjalan dibagi dengan pendapatan
12. Pendapatan yang diperhitungkan hanya pendapatan angkutan dan usaha lainnya, tidak termasuk pendapatan konstruksi sesuai dengan penerapan PSAK 16

RASIO KEUANGAN DI PERJANJIAN KREDIT ATAU LIABILITAS LAINNYA DAN PEMENUHANNYA

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Liabilitas Lainnya	Pembatasan	Rasio Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024
<i>Total Liabilities to Assets Ratio</i>	Maksimum 0,85x	0,64x
<i>Current Ratio</i>	Minimum 1x	1,07x
<i>Cash Flow Operational (ribuan Rupiah)</i>	Positif	Rp1.459.239.876
<i>Debt to Equity Ratio</i> ⁽¹⁾	Maksimum 3x	1,32x
<i>Debt to Service Coverage Ratio</i> ⁽²⁾	Minimum 1,25x	1,25x
<i>EBITDA to Interest Ratio</i>	Minimum 1,5x	3,18x
Indikator Pembayaran Bunga ⁽³⁾	Minimum lebih dari 1x	3,18x
Indikator Pembayaran Pokok ⁽⁴⁾	Debt/Arus Kas Operasi Induk > 0x dan < 10x	1,95x

Keterangan:

- Debt to Equity Ratio* menggunakan perhitungan pinjaman berbunga dibagi dengan total ekuitas.
- Debt to Service Coverage Ratio* merupakan rasio untuk mengukur kekuatan perusahaan selama satu tahun untuk melakukan pembayaran pinjaman yang akan jatuh tempo. DSCR tidak tercapai dikarenakan perhitungan EBITDA hanya sampai dengan 31 Mei 2024 (5 bulan) yang seharusnya dihitung diakhir tahun (12 bulan).
- Laba sebelum pajak dikurangi jumlah beban dan penghasilan bunga ditambah beban amortisasi dan penyusutan kemudian dibagi dengan jumlah beban bunga
- Jumlah pokok hutang PEN dibagi dengan arus kas dari operasional

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2024 (dengan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagai komparatif), yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan audit posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 dan laporan audit laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan audit arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Mei 2024 dan 31 Mei 2023 (dengan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan sebagai komparatif) serta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi, dalam laporannya No. 01095/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0645 dan penyajian informasi keuangan Konsolidasi Interim untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 tidak diaudit atau direviu.

1. Umum

Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perkeretaapian dan jasa penunjang lainnya terkait perkeretaapian. Bidang usaha Perseroan terbagi dalam tiga kategori berbeda yaitu (i) angkutan penumpang yang melayani angkutan jarak jauh, jarak menengah dan jarak dekat. (ii) angkutan barang yang melayani angkutan peti kemas, batubara, semen, parcel, barang curah dan lain-lain, serta (iii) non angkutan yang mengelola stasiun, persewaan, iklan dan lain-lain. Kompetensi utama Perseroan dalam bisnis perkeretaapian pada pengoperasian angkutan penumpang dan barang lebih nyaman, aman dan lebih tepat waktu dibandingkan moda transportasi lainnya.

Total Pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp3.076.959.357 atau sebesar 28,10% dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dari sebesar Rp10.951.579.731 menjadi sebesar Rp14.028.539.088.

Sedangkan untuk Laba periode berjalan pada tanggal 31 Mei 2024, Perseroan mencatatkan laba sebesar Rp 1.197.854.738 ribu, terjadi kenaikan kinerja sebesar 9,06% atau setara Rp99.480.709 ribu dari sebelumnya sebesar Rp1.098.374.029 ribu pada tanggal 31 Mei 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pendapatan jasa angkutan dan usaha lainnya terutama pada jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan barang.

Pada posisi 31 Mei 2024, Perseroan mampu mencatatkan pertumbuhan total aset sebesar 10,05%, pertumbuhan total liabilitas sebesar 13,69% dan pertumbuhan total ekuitas sebesar 4,10%.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha Dan Operasi Perseroan

Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan kegiatan usaha dan operasi Perseroan:

- a. **Kehandalan prasarana dan sarana untuk mendukung angkutan usaha Perseroan baik angkutan penumpang maupun angkutan barang.**
Prasarana dan sarana angkutan yang handal akan berdampak pada keselamatan, peningkatan pelayanan dan ketercapaian target operasi Perseroan.
- b. **Ketersediaan suku cadang dalam mendukung program perawatan prasarana dan sarana agar tetap handal.**
Ketersediaan suku cadang merupakan unsur penting dalam mendukung perawatan dalam menjaga ketersediaan Sarana siap operasi untuk mencapai target operasi.
- c. **Ketersediaan bahan bakar untuk menggerakkan sarana yang digunakan dalam rangka proses bisnis Perseroan.**
Bahan bakar merupakan faktor penting yang menjadi dasar pergerakan sarana. Ketersediaan bahan bakar akan berdampak pada kelancaran operasi sarana sehingga pencapaian target pendapatan baik dari angkutan penumpang maupun angkutan barang dapat tercapai.
- d. **Dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi Pemerintah serta mekanisme pembayaran angkutan keberintisan untuk beberapa angkutan penumpang.**
Perseroan sebagai perusahaan yang menyediakan jasa transportasi umum mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah dalam bentuk PSO dan mekanisme angkutan keberintisan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kereta api, khususnya bagi kalangan menengah kebawah. Hal ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum, sehingga penggunaan kendaraan pribadi dapat diminimalisir. Terkait dengan IMO, Pemerintah juga memberikan penugasan kepada Perseroan untuk melaksanakan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian yang merupakan milik negara. Atas perawatan tersebut pemerintah memberikan penggantian perawatan yang tertuang dalam Kontrak Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) tiap tahun anggaran.
- e. **Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pengoperasian bisnis perusahaan dan manajemen Perseroan.**
Sumber daya manusia yang handal dan kompeten merupakan salah satu faktor penting demi menjaga keselamatan dan kelancaran baik dari angkutan penumpang maupun angkutan barang.
- f. **Pengembangan aplikasi yang memudahkan pelanggan untuk dapat mengakses layanan jasa kereta api.**
Seiring dengan perkembangan teknologi. Perseroan telah mengembangkan beberapa aplikasi berbasis web dan bekerjasama dengan agen-agen penjualan tiket secara online untuk memudahkan pembelian tiket seperti pembuatan aplikasi KAI-Access. pembelian tiket melalui website Perseroan. dan kerjasama dengan agen-agen penjualan secara online.
- g. **Pengembangan aplikasi yang mendukung proses bisnis Perseroan.**
Seiring dengan perkembangan teknologi. Perseroan telah mengembangkan beberapa aplikasi berbasis IT untuk mempermudah kelancaran operasional Perseroan dan meminimalisir *human-error*. Selain itu, pengembangan teknologi juga diperlukan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas operasi Perseroan.

- h. Kemampuan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik.**
Dengan meningkatnya kinerja Perseroan serta usaha Perseroan untuk menjaga hasil pemeringkatan yang telah diperoleh. Mampu meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur untuk menanamkan dan atau mendanai proyek-proyek Perseroan sehingga mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik.
- i. Perubahan Perilaku Konsumen.**
Untuk mengantisipasi perubahan perilaku konsumen yang selalu menginginkan pelayanan yang terus meningkat, Perseroan perlu meningkatkan kualitas pelayanannya di berbagai aspek untuk memenuhi harapan konsumen. Sebagai contoh *loyalty program*, pengembangan aplikasi pemesanan, pembatalan, dan *reschedule* tiket, dan lainnya.
- j. Perkembangan Aktivitas Pemasaran**
Perseroan telah mengembangkan sistem pemasaran yang lebih efektif diantaranya KAI Travel Fair Channel eksternal. Penambahan rute dan kereta baru, promo-promo (*bundling*) yang bekerjasama dengan beberapa hotel, restoran, *fashion store* dan lain-lain dimana hal ini dapat mendorong penjualan Perseroan.
- k. Kondisi Persaingan dan Perubahan pada Kompetitor**
Kondisi saat ini Perseroan merupakan satu-satunya operator kereta api di Indonesia. Meskipun demikian, secara regulasi yang ada sangat dimungkinkan adanya operator lain selain Perseroan, sehingga diperlukan strategi dan inovasi dalam berkompetisi. Adapun kompetitor yang dihadapi Perseroan saat ini adalah pesawat terbang dan jalan tol yang juga dapat memberikan tarif yang bersaing serta waktu tempuh relatif singkat. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa meningkatkan layanan untuk menjaga loyalitas pelanggan dan juga menarik pelanggan baru.
- l. Perubahan dalam tingkat suku bunga nilai tukar valuta asing**
Fluktuasi nilai tukar valuta asing dan perubahan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi kinerja Perseroan mengingat pendanaan Perseroan dilakukan dengan pinjaman bank dalam mata uang asing serta pendanaan yang berasal dari pinjaman perbankan. Untuk saat ini kebutuhan valuta asing Perseroan masih dapat tercukupi melalui pendapatan valuta asing (*natural hedging*).

Langkah-Langkah Yang Dilakukan Perseroan Untuk Meningkatkan Kinerja

Dalam meningkatkan kinerja Perseroan, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan diantaranya:

- Meningkatkan porsi pendapatan secara agresif dari angkutan barang dari Jawa dan Sumatera dengan menawarkan konsep *total logistic solution* kepada konsumen untuk memberikan layanan angkutan barang *pick up and delivery* secara *door to door services*;
- Mengembangkan angkutan penumpang jarak jauh dan menengah, *commuter* Jabodetabek, KA Bandara, dan angkutan penumpang lainnya untuk memperluas layanan angkutan penumpang;
- Mengembangkan usaha properti dengan komersialisasi di wilayah sekitar dan terhubung dengan stasiun besar;
- Meningkatkan *safety level operational* kereta api mencapai *zero accident* dengan teknologi keselamatan yang tepat sasaran dan handal;
- Peningkatan peran SDM dan teknologi informasi dalam kerangka efektifitas sistem informasi manajemen;
- Meningkatkan pelayanan angkutan berdasarkan *customer oriented* yang *focus* pada kualitas, keamanan, kenyamanan dan nilai tambah bagi pengguna jasa angkutan kereta api.

3. Kebijakan Pemerintah

Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dapat memengaruhi kondisi keuangan Perseroan:

- a. Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2024 merupakan dasar hukum dalam rangka pelaksanaan PSO, IMO dan TAC, serta Angkutan Perintis bagi Perseroan, di mana saat ini Perseroan merupakan satu-satunya penyelenggara perkeretaapian yang diberikan penugasan secara langsung oleh Pemerintah untuk melaksanakan PSO, IMO dan Angkutan Perintis. Atas penugasan tersebut, Perseroan memperoleh pendapatan yang berasal dari APBN. Pengaturan TAC merupakan mekanisme pengenaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara bagi setiap penyelenggara sarana perkeretaapian, salah satunya Perseroan.
- b. Peraturan Presiden No. 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 memberikan kemudahan dalam pengambilan langkah-langkah strategis terhadap melaksanakan berbagai proyek di bidang perkeretaapian yang dilakukan oleh Perseroan, di antaranya *High Speed Train* Jakarta Bandung, Jabodetabek *Circular Line*, *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di wilayah Jabodebek, *Light Rail Transit* (LRT) Sumatera Selatan, kereta api Makassar – Parepare, kereta api Prabumulih – Kertapati, dan sebagainya.
- c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 merupakan dasar penugasan bagi Perseroan dalam melaksanakan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan Sarana perkeretaapian termasuk pendanaan prasarana perkeretaapian *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jabodebek.
- d. Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2012 Tentang Subsidi Angkutan Orang Dengan Kereta Api sebagaimana diubah dengan Peraturan menteri Perhubungan Nomor PM No. 26 tahun 2018 merupakan dasar dan pedoman bagi Perseroan untuk berinvestasi Sarana perkeretaapian baru dalam rangka melaksanakan penugasan penyelenggaraan subsidi angkutan perintis.
- e. Keputusan Menteri Keuangan No. 598/KMK.08/2017 tentang Penetapan Cara Pembayaran atas Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta Bogor Depok dan Bekasi oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan dasar bagi Perseroan untuk melaksanakan pembayaran pembangunan prasarana perkeretaapian *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek sehingga memberikan peluang bagi Perseroan untuk memperoleh penugasan pengoperasian, perawatan dan perusahaan prasarana *Light Rail Transit* (LRT).
- f. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
- g. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi merupakan penugasan kepada Perseroan untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana perkeretaapian Bandar Udara Soekarno-Hatta via Kota Tangerang dan prasarana dan sarana perkeretaapian Jalur Lingkar (Circular Line) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) yang meliputi kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan perusahaan atas prasarana kereta api, serta pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan perusahaan atas sarana kereta api.
- h. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2024 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta API Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2024 merupakan penugasan kepada Perseroan untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan public/*Public Service Obligation* untuk angkutan kereta api kelas ekonomi.

- i. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 5 Tahun 2024 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Menyelenggarakan Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian Tahun Anggaran 2024 merupakan penugasan untuk menyelenggarakan angkutan perintis bidang perkeretaapian terdiri atas:
 - (i). KA Amir Hamzah
 - (ii). KA Bathara Kresna
 - (iii). KA Cut Meutia
 - (iv). KA Lembah Anai
 - (v). LRT Sumatera Selatan
 - (vi). KA Nurmala.
- j. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2024 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara Tahun Anggaran Tahun 2024 merupakan penugasan dalam rangka penyelenggaraan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara untuk: merawat dan mengoperasikan prasarana perkeretaapian milik negara sesuai standar dan tata cara yang telah ditetapkan, melaporkan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada Menteri, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.
- k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.197 Tahun 2015 tentang Komponen Biaya Yang Dapat Diperhitungkan Dalam Penyelenggaraan Angkutan Perintis Perkeretaapian sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.32 Tahun 2018 merupakan peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai komponen biaya yang diperhitungkan dalam rangka angkutan perintis perkeretaapian dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektifitas, efesiansi, kewajaran dan akuntabilitas.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan merupakan peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur ketentuan jenis penerimaan negara bukan pajak yang salah satunya mengatur terkait biaya penggunaan prasarana perkeretaapian pada jasa transportasi perkeretaapian.
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan ketentuan yang mengatur mengenai jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada direktorat jenderal perkeretaapian meliputi sertifikasi, pelayanan penerbitan izin, penggunaan sarana, pelayanan persetujuan spesifikasi teknis sarana dan *Track Access Charge*.
- n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara merupakan ketentuan yang mengatur pedoman sebagai acuan dengan ruang lingkup perencanaan, pelaksanaan, komponen dan formulasi biaya, pembiayaan dan pengawasan dalam rangka perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara.
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian merupakan ketentuan yang mengatur bahwa setiap badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang menggunakan prasarana perkeretaapian milik negara harus membayar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian, atas biaya tersebut disetorkan kepada Kas Negara sebagai PNBP.
- p. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi merupakan penugasan kepada Perseroan dalam penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi.

4. Analisa Keuangan

Analisa dan pembahasan di bawah ini mengacu kepada Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2024 dan 31 Mei 2023 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Laporan Posisi Keuangan

Aset

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember	
	2024	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4.549.819.332	5.138.571.482	5.695.720.193
Dana Dibatasi Penggunaannya	2.720.219.288	2.587.812.673	5.610.385.976
Piutang Usaha			
Pihak Berelasi	1.522.305.765	1.253.114.802	934.629.745
Pihak Ketiga	466.832.688	616.479.973	471.708.322
Piutang Lain-lain			
Pihak Berelasi	8.183.000	8.183.000	-
Pihak Ketiga	39.823.498	53.403.990	90.003.063
Persediaan	1.310.706.580	1.528.349.171	1.145.313.941
Pendapatan Masih akan Diterima			
Pihak Berelasi	2.624.275.207	439.036.344	719.566.683
Pihak Ketiga	422.667.435	324.703.696	220.050.288
Uang Muka	64.240.770	92.819.225	57.650.571
Biaya Dibayar di Muka	252.647.774	167.365.297	62.652.603
Pajak Dibayar di Muka	795.925.807	690.300.423	303.896.017
Aset Lancar Lainnya	10.992.438	123.701.643	26.370.549
JUMLAH ASET LANCAR	14.788.639.582	13.023.841.719	15.337.947.951
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang Lain-lain	7.214.834.232	-	-
Uang Muka Jangka Panjang	2.965.912.058	3.093.767.915	20.640.157
Investasi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	4.301.935.804	5.808.370.149	6.315.362.037
Investasi Jangka Panjang	35.747.769	35.747.769	24.176.000
Aset Pajak Tangguhan	1.204.709.241	1.216.932.650	1.432.778.568
Aset Tetap	27.090.722.780	26.370.631.004	23.924.692.897
Properti Investasi	266.259.362	246.905.669	126.085.555
Hak Pengoperasian Aset Prasarana	30.617.492.459	30.697.675.664	23.736.944.016
Aset Takberwujud	752.552.410	576.231.411	422.760.902
Aset Hak Guna	84.899.422	92.152.320	53.116.074
Aset Tidak Lancar Lainnya	225.500.854	212.057.103	186.725.566
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	74.760.566.391	68.350.471.654	56.243.281.772
JUMLAH ASET	89.549.205.973	81.374.313.373	71.581.229.723

Total Aset

Tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Total aset meningkat sebesar Rp8.174.892.600 ribu atau setara 10,05% dari sebelumnya sebesar Rp81.374.313.373 ribu menjadi sebesar Rp89.549.205.973 ribu. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah aset lancar sebesar Rp1.764.797.863 ribu atau setara dengan 13,55% dan aset tidak lancar sebesar Rp6.410.094.737 ribu atau setara dengan 9,38%.

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Total aset meningkat sebesar Rp9.793.083.650 ribu atau setara 13,68% dari sebelumnya sebesar Rp71.581.229.723 ribu menjadi sebesar Rp81.374.313.373 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah aset tidak lancar sebesar Rp12.107.189.882 ribu atau setara dengan 21,53%.

- **Aset Lancar**

Tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset lancar meningkat sebesar Rp 1.764.797.863 ribu atau setara 13,55% dari sebelumnya sebesar Rp13.023.841.719 ribu menjadi sebesar Rp14.788.639.582 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan masih akan diterima sebesar Rp2.283.202.602 ribu atau setara dengan 298,95% dari sebelumnya Rp763.740.040 ribu menjadi sebesar Rp3.046.942.642 ribu, hal ini terutama dikarenakan peningkatan Pendapatan yang masih harus Diterima dari Pihak Berelasi (Pemerintah) berupa kompensasi atas Kewajiban Pelayanan Publik angkutan kereta api dan perawatan infrastruktur milik pemerintah yang belum terealisasi tagihannya. Hal tersebut berdampak pada kenaikan likuiditas Perusahaan. Perusahaan selalu berusaha untuk menjaga likuiditasnya.

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset lancar menurun sebesar Rp2.314.106.232 ribu atau setara -15,09% dari sebelumnya sebesar Rp15.337.947.951 ribu menjadi Rp13.023.841.719 ribu. Penurunan pada aset lancar terutama disebabkan oleh menurunnya nilai dana dibatasi penggunaannya sebesar Rp3.022.573.303 ribu atau setara dengan 53,87% dari sebelumnya Rp 5.610.385.976 ribu menjadi sebesar Rp 2.587.812.673 ribu, hal ini terutama sehubungan dengan telah selesai proyek LRT Jabodebek dan Proyek KCJB. Hal tersebut berdampak pada penurunan likuiditas Perusahaan. Perusahaan selalu berusaha untuk menjaga likuiditasnya. Hal tersebut juga menunjukkan dukungan Perusahaan terhadap program Pemerintah.

- **Aset Tidak Lancar**

Tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset tidak lancar meningkat sebesar Rp6.410.094.737 ribu atau setara 9,38% dari sebelumnya sebesar Rp68.350.471.654 ribu menjadi sebesar Rp74.760.566.391 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Meningkatnya piutang lain-lain tidak lancar pihak berelasi sebesar Rp7.214.834.232 ribu atau setara 100% dari sebelumnya sebesar Rp0,- menjadi Rp7.214.834.232 ribu, hal ini sehubungan dengan meningkatnya piutang tidak lancar kepada ventura bersama PSBI. Peningkatan aset tidak lancar berdampak pada upaya Perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan bisnis dengan cara melakukan penambahan dan pemeliharaan aset sarana dan prasarana.

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah aset tidak lancar meningkat sebesar Rp12.107.189.882 ribu atau setara 21,53% dari sebelumnya sebesar Rp56.243.281.772 ribu menjadi sebesar Rp68.350.471.654 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Penambahan aset Hak Pengoperasian Aset Prasarana sebesar Rp6.960.731.648 ribu atau setara dengan 29,32% dari sebelumnya Rp23.736.944.016 ribu menjadi Rp 30.697.675.664 ribu, hal ini sehubungan dengan penyelesaian tahap konstruksi Proyek LRT Jabodebek dan juga penambahan investasi aset tetap berupa sarana dan prasarana. Peningkatan aset tidak lancar berdampak pada upaya Perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Perusahaan selalu berupaya untuk meningkatkan pelayan dan pengembangan bisnis dengan cara melakukan penambahan dan peremajaan aset sarana dan prasarana.

Liabilitas

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember	
	2024	2023	2022
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak Berelasi	965.653.310	4.976.299.233	880.714.681
Pihak Ketiga	961.841.412	2.394.977.405	1.578.171.487
Beban Akrual	2.494.483.189	2.203.317.939	1.572.961.926
Utang Pajak	625.421.368	621.745.503	309.332.730
Pendapatan Diterima di Muka	1.310.581.012	1.281.637.698	1.144.639.451
Liabilitas Imbalan Kerja	1.710.180.412	1.295.541.970	962.743.057
Pinjaman Bank Jangka Pendek	1.942.426.859	1.388.523.138	1.760.000.000
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			
Liabilitas Sewa	33.231.048	36.504.861	16.563.637
Pinjaman Jangka Panjang	1.401.057.983	1.294.613.508	1.196.958.601
Pinjaman Program PEN	437.500.000	437.500.000	437.500.000
Utang Obligasi	1.899.345.831	1.898.852.925	-
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	97.079.698	91.802.000	98.538.290
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	13.878.802.122	17.921.316.180	9.958.123.860
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima di Muka	808.675.891	834.563.297	837.174.293
Liabilitas Imbalan Kerja	5.768.798.768	5.618.516.876	5.197.151.974
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun			
Liabilitas Sewa	60.531.873	74.166.028	44.599.263
Pinjaman Jangka Panjang	31.189.538.038	20.142.027.462	18.282.631.817
Pinjaman Program PEN	2.406.250.000	2.625.000.000	3.062.500.000
Utang Obligasi	2.595.044.282	2.594.469.619	4.490.760.381
Sukuk Ijarah	498.702.478	498.586.194	498.307.111
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	170.697.653	159.530.476	129.796.719
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	43.498.238.983	32.546.859.952	32.542.921.558
JUMLAH LIABILITAS	57.377.041.105	50.468.176.132	42.501.045.418

Jumlah Liabilitas

Tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Total liabilitas meningkat sebesar Rp6.908.864.973 ribu atau setara 13,69% dari sebelumnya sebesar Rp50.468.176.132 ribu menjadi sebesar Rp57.377.041.105 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada jumlah liabilitas jangka panjang sebesar Rp10.951.379.031 ribu atau setara dengan 33,65% yang diimbangi dengan penurunan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp4.042.514.058 ribu atau setara dengan 22,56%

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Total liabilitas meningkat sebesar Rp7.967.130.714 ribu atau setara 18,75% dari sebelumnya sebesar Rp42.501.045.418 ribu menjadi sebesar Rp50.468.176.132 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp7.963.192.320 ribu atau setara dengan 79,97%.

- **Liabilitas Jangka Pendek**

Tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas jangka pendek menurun sebesar Rp4.042.514.058 ribu atau setara 22,56% dari sebelumnya sebesar Rp17.921.316.180 ribu menjadi sebesar Rp13.878.802.122 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang usaha pihak berelasi sebesar Rp4.010.645.923 ribu atau setara dengan 80,59% dari sebelumnya sebesar Rp4.976.299.233 ribu menjadi sebesar Rp965.653.310 ribu, hal ini sehubungan dengan pembayaran utang usaha kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk terkait penyelesaian proyek LRT Jabodebek. Penurunan tersebut berdampak pada meningkatnya rasio lancar perusahaan. Perusahaan terus berupaya untuk menjaga likuiditasnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas jangka pendek meningkat sebesar Rp7.963.19.320 ribu atau setara 79,97% dari sebelumnya sebesar Rp9.958.123.860 ribu menjadi sebesar Rp17.921.316.180 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang usaha pihak berelasi sebesar Rp4.095.584.552 ribu atau setara dengan 465,03% dari sebelumnya Rp880.714.681 ribu menjadi Rp4.976.299.233 ribu, hal ini sehubungan dengan penambahan utang usaha kepada PT Adhi Karya (Persero) terkait penyelesaian proyek konstruksi LRT Jabodebek serta utang atas pembelian sarana kepada PT Industri Kereta Api (Persero). Hal tersebut dikarenakan adanya tagihan yang timbul pada akhir periode pelaporan. Peningkatan tersebut berdampak pada menurunnya rasio lancar perusahaan. Perusahaan memenuhi kewajiban tersebut dengan menggunakan kredit investasi sehingga likuiditas perusahaan tetap terjaga.

- **Liabilitas Jangka Panjang**

Tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp10.951.379.031 ribu atau setara 33,65% dari sebelumnya sebesar Rp32.546.859.952 ribu menjadi sebesar Rp43.498.238.983 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pinjaman jangka panjang yang meningkat sebesar Rp11.047.510.576 ribu dari sebelumnya Rp20.142.027.462 ribu menjadi Rp31.189.538.038 ribu, hal ini disebabkan penambahan pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga berupa pemberian fasilitas pinjaman untuk pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung. Peningkatan Liabilitas Jangka Panjang berdampak pada meningkatnya rasio solvabilitas perusahaan. Perusahaan berupaya untuk terus menjaga tingkat rasio solvabilitas pada tingkat yang wajar.

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah liabilitas jangka panjang meningkat sebesar Rp3.938.394 ribu atau setara 0,01% dari sebelumnya sebesar Rp32.542.921.558 ribu menjadi sebesar Rp32.546.859.952 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pinjaman jangka panjang sebesar Rp1.895.395.645 ribu atau setara dengan 10,17% dari sebelumnya Rp18.282.631.817 ribu menjadi Rp20.142.027.462 ribu, hal ini disebabkan oleh meningkatnya pinjaman jangka panjang kepada pihak berelasi yang memberikan pinjaman sindikasi untuk penyelesaian proyek *Light Rail Transit* (LRT). Yang diimbangi dengan penurunan utang obligasi bagian jangka panjang sebesar Rp1.896.290.762 ribu atau setara 42,23% dari sebelumnya Rp4.490.760.381 ribu menjadi Rp2.594.469.619 ribu dikarenakan adanya reklasifikasi ke utang obligasi yang jatuh tempo dalam satu tahun. Peningkatan Liabilitas Jangka Panjang berdampak pada meningkatnya rasio solvabilitas perusahaan. Perusahaan berupaya untuk terus menjaga tingkat rasio solvabilitas pada tingkat yang wajar.

Ekuitas

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
EKUITAS				
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk				
Modal Saham				
Nilai Nominal Rp1.000 per Saham				
Modal Dasar Sebesar 40.000.000 Saham				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh pada 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 sebesar 22.368.743, dan 31 Desember 2022 sebesar 19.168.743 saham				
	22.368.743.000	22.368.743.000		19.168.743.000
Tambahan Penyertaan Modal Negara	-	-		3.200.000.000
Saldo Laba				
Ditentukan penggunaannya	9.476.398.277	9.476.398.277		7.694.357.800
Belum ditentukan penggunaannya	1.266.852.084	76.609.318		(15.271.506)
Komponen Ekuitas Lainnya	(1.036.899.053)	(1.105.074.666)		(1.060.098.895)
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	32.075.094.308	30.816.675.929		28.987.730.399
Kepentingan Non-pengendali	97.070.560	89.461.312		92.453.906
JUMLAH EKUITAS	32.172.164.868	30.906.137.241		29.080.184.305

Jumlah Ekuitas

Tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp1.266.027.627 ribu atau setara 4,10% dari sebesar Rp30.906.137.241 ribu menjadi sebesar Rp 32.172.164.868 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada saldo laba sebesar Rp1.190.242.766 ribu atau setara 1.553,65% dari sebelumnya Rp76.609.318 ribu menjadi Rp1.266.852.084 ribu.

Tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2022

Jumlah ekuitas meningkat sebesar Rp1.825.952.936 ribu atau setara 6,28% dari sebelumnya sebesar Rp29.080.184.305 ribu menjadi sebesar Rp30.906.137.241 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada saldo laba sebesar Rp1.782.040.477 ribu atau setara 23,16% dari sebelumnya Rp7.694.357.800 ribu menjadi Rp9.476.398.277 ribu.

Analisa Laporan Laba Rugi

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
PENDAPATAN				
Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya	13.893.126.717	10.612.558.415	27.764.287.041	22.967.071.664
Pendapatan Konstruksi	135.412.371	339.021.316	7.342.248.533	2.610.567.346
Jumlah Pendapatan	14.028.539.088	10.951.579.731	35.106.535.574	25.577.639.010
BEBAN POKOK PENDAPATAN				
Beban Angkutan dan Usaha Lainnya	(8.603.518.266)	(7.198.478.897)	(19.676.271.707)	(15.930.293.675)
Beban Konstruksi	(135.412.371)	(339.021.316)	(7.342.248.533)	(2.610.567.346)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	(8.738.930.637)	(7.537.500.213)	(27.018.520.240)	(18.540.861.021)
LABA BRUTO	5.289.608.451	3.414.079.518	8.088.015.334	7.036.777.989
Beban Usaha	(1.510.526.028)	(1.434.857.643)	(4.227.212.786)	(3.664.532.070)
LABA USAHA	3.779.082.423	1.979.221.875	3.860.802.548	3.372.245.919

(dalam ribuan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Penghasilan Keuangan	186.290.476	133.375.545	301.722.909	139.514.944
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(1.505.375.882)	(141.716.712)	(507.073.954)	(267.504.227)
Beban Keuangan	(1.012.661.453)	(502.413.649)	(1.507.438.966)	(980.572.153)
Selisih Kurs	170.527.630	(90.088.052)	(57.275.927)	42.673.710
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain - Bersih	(163.258.557)	19.336.152	156.750.557	(95.769.893)
LABA SEBELUM PAJAK	1.454.604.637	1.397.715.159	2.247.487.167	2.210.588.300
Beban Pajak Penghasilan	(256.749.899)	(299.341.130)	(375.939.030)	(524.599.080)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.197.854.738	1.098.374.029	1.871.548.137	1.685.989.220
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi pada Periode Berikutnya:				
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti	87.723.281	(55.521.724)	(56.850.198)	746.347.332
Efek Pajak Penghasilan Terkait	(19.550.392)	12.214.779	11.703.462	(165.506.775)
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak	68.172.889	(43.306.945)	(45.146.736)	580.840.557
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.266.027.627	1.055.067.084	1.826.401.401	2.266.829.777
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	1.190.242.766	1.098.423.405	1.873.921.301	1.782.040.477
Kepentingan Non-pengendali	7.611.972	(49.376)	(2.373.164)	(96.051.257)
JUMLAH	1.197.854.738	1.098.374.029	1.871.548.137	1.685.989.220
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik Entitas Induk	1.258.418.379	1.055.116.460	1.828.945.530	2.362.914.534
Kepentingan Non-pengendali	7.609.248	(49.376)	(2.544.129)	(96.084.757)
JUMLAH	1.266.027.627	1.055.067.084	1.826.401.401	2.266.829.777
Laba per Saham Dasar	53	49	84	93

a. Pendapatan

Untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2023

Pendapatan meningkat sebesar Rp3.076.959.357 ribu atau setara 28,10% dari sebelumnya sebesar Rp10.951.579.731 ribu menjadi sebesar Rp14.028.539.088 ribu. Peningkatan ini terutama dikontribusikan oleh pendapatan angkutan dan usaha lainnya sebesar Rp3.280.568.302 ribu atau setara 30,91% dari sebelumnya sebesar Rp10.612.558.415 ribu menjadi sebesar Rp13.893.126.717 ribu hal ini dikarenakan adanya peningkatan atas pendapatan angkutan penumpang. Peningkatan pendapatan berdampak pada meningkatnya laba perusahaan. Perusahaan berusaha untuk terus melakukan pengembangan dengan cara melakukan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan meningkat sebesar Rp9.528.896.564 ribu atau setara 37,25% dari sebelumnya sebesar Rp25.577.639.010 ribu menjadi sebesar Rp35.106.535.574 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan angkutan dan usaha lainnya yang didorong dengan meningkatnya pendapatan Angkutan Penumpang sebesar Rp2.977.330.337 ribu atau setara dengan 42,75% dari sebelumnya Rp6.964.495.288 ribu menjadi Rp9.941.825.625 ribu hal ini dikarenakan adanya peningkatan atas pendapatan angkutan penumpang. Peningkatan pendapatan berdampak pada meningkatnya laba perusahaan. Perusahaan berusaha untuk terus melakukan pengembangan dengan cara melakukan pengembangan sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan pendapatan.

• **Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya**

(dalam Ribuan Rupiah)

Rincian Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Angkutan Penumpang	4.680.559.077	3.688.108.583	9.941.825.625	6.964.495.288
Angkutan Barang	5.118.255.222	4.355.979.232	11.646.062.369	9.833.032.265
Pendukung Angkutan KA	425.009.219	363.207.818	869.775.827	713.611.038
Non Angkutan	790.103.057	507.927.807	1.780.153.295	1.575.688.040
Kompensasi Pemerintah	2.879.200.142	1.697.334.975	3.526.469.925	3.880.245.033
Jumlah	13.893.126.717	10.612.558.415	27.764.287.041	22.967.071.664

Untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2023

Pendapatan angkutan dan usaha lainnya meningkat sebesar Rp3.280.568.302 ribu atau setara 30,91% dari sebelumnya sebesar Rp10.612.558.415 ribu menjadi sebesar Rp13.893.126.717 ribu. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan Angkutan Penumpang sebesar Rp992.450.494 atau setara 26,91% dari sebelumnya Rp3.688.108.583 ribu menjadi Rp4.680.559.077 ribu terutama melalui peningkatan Kelas Eksekutif dan Kelas Ekonomi serta kompensasi pemerintah sebesar Rp1.181.865.167 ribu atau setara 69,63% hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan pendapatan PSO atas Angkutan LRT Jabodebek.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Pendapatan angkutan dan usaha lainnya meningkat sebesar Rp4.797.215.377 ribu atau setara 20,89% dari sebelumnya sebesar Rp22.967.071.664 ribu menjadi sebesar Rp27.764.287.041 ribu. Peningkatan ini terutama didorong oleh peningkatan pendapatan Angkutan Penumpang sebesar Rp 2.977.330.337 atau setara 42,75% dari sebelumnya Rp6.964.495.288 ribu menjadi Rp 9.941.825.625 ribu hal ini dikarenakan peningkatan atas pendapatan angkutan penumpang Eksekutif dan Ekonomi.

b. Beban Pokok Pendapatan

(dalam ribuan Rupiah)

Rincian Beban Pendapatan	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2024	2023
Beban Angkutan dan Usaha Lainnya	(8.603.518.266)	(7.198.478.897)	(19.676.271.707)	(15.930.293.675)
Beban Konstruksi	(135.412.371)	(339.021.316)	(7.342.248.533)	(2.610.567.346)
Jumlah Beban Pokok Pendapatan	(8.738.930.637)	(7.537.500.213)	(27.018.520.240)	(18.540.861.021)

Untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2023

Beban pokok pendapatan meningkat sebesar Rp1.201.430.424 ribu atau setara 15,94% dari sebelumnya sebesar Rp7.537.500.213 ribu menjadi sebesar Rp8.738.930.637 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban angkutan dan usaha lainnya yang meningkat sebesar Rp1.405.039.369 ribu atau setara 19,52% dari yang sebelumnya Rp7.198.478.897 ribu menjadi Rp8.603.518.266 ribu seiring dengan peningkatan pendapatan angkutan dan usaha lainnya. Peningkatan beban pokok pendapatan seiring dengan usaha perusahaan untuk meningkatkan perolehan pendapatan. Perusahaan berupaya untuk terus melakukan efisiensi biaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Beban pokok pendapatan meningkat sebesar Rp8.477.659.219 ribu atau setara 45,72% dari sebelumnya sebesar Rp18.540.861.021 ribu menjadi sebesar Rp27.018.520.240 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban angkutan dan usaha lainnya yang meningkat sebesar Rp3.745.978.032 ribu atau setara 23,51% dari yang sebelumnya Rp15.930.293.675 ribu menjadi Rp19.676.271.707 ribu seiring dengan peningkatan pendapatan angkutan dan usaha lainnya. Peningkatan beban pokok pendapatan seiring dengan usaha perusahaan untuk meningkatkan perolehan pendapatan. Perusahaan berupaya untuk terus melakukan efisiensi biaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan pelanggan.

c. Laba Bruto

Untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2023

Laba bruto meningkat sebesar Rp1.875.528.933 ribu atau setara 54,94% dari sebelumnya sebesar Rp3.414.079.518 ribu menjadi sebesar Rp5.289.608.451 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan terutama pendapatan angkutan penumpang, angkutan barang yg didominasi angkutan batu bara, dan kompensasi pemerintah sehingga kenaikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan beban pokok pendapatan. Peningkatan laba bruto seiring dengan usaha perusahaan untuk meningkatkan perolehan pendapatan. Perusahaan berupaya untuk terus melakukan efisiensi biaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kenyamanan pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba bruto meningkat sebesar Rp1.051.237.345 ribu atau setara 14,94% dari sebelumnya sebesar Rp7.036.777.989 ribu menjadi sebesar Rp8.088.015.334 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan terutama pendapatan angkutan penumpang eksekutif dan ekonomi, angkutan barang yg didominasi angkutan batu bara sehingga kenaikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan beban pokok pendapatan. Peningkatan laba bruto berdampak pada meningkatnya laba berjalan Perusahaan. Perusahaan terus melakukan investasi untuk menjaga peningkatan laba bruto Perusahaan.

d. Laba Usaha

Untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2023

Laba usaha meningkat sebesar Rp1.799.860.548 ribu atau setara 90,94% dari sebelumnya sebesar Rp1.979.221.875 ribu menjadi sebesar Rp3.779.082.423 ribu. Kenaikan atas laba usaha tersebut selaras dengan kenaikan pada pos Pendapatan Usaha, peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba bruto yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan beban usaha yang hanya meningkat sebesar Rp75.668.385 ribu atau setara 5,27%. Peningkatan laba usaha berdampak pada meningkatnya laba berjalan Perusahaan. Perusahaan terus melakukan investasi untuk menjaga peningkatan laba usaha Perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba usaha meningkat sebesar Rp448.556.629 ribu atau setara 14,49% dari sebelumnya sebesar Rp3.372.245.919 ribu menjadi sebesar Rp3.860.802.548 ribu. Kenaikan atas laba usaha tersebut selaras dengan kenaikan pada pos Pendapatan Usaha, Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba bruto Perseroan. Peningkatan laba usaha berdampak pada meningkatnya laba berjalan Perusahaan. Perusahaan terus melakukan investasi untuk menjaga peningkatan laba usaha Perusahaan.

e. Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan***Untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2023***

Laba periode berjalan meningkat sebesar Rp99.480.709 ribu atau setara 9,06% dari sebelumnya sebesar Rp1.098.374.029 ribu menjadi sebesar Rp1.197.854.738 ribu. Kenaikan tersebut selaras dengan pos pendapatan yang mengalami peningkatan, peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba usaha yang jauh lebih tinggi Hal ini menunjukkan kemampuan Perseroan yang baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Peningkatan laba usaha berdampak pada meningkatnya kinerja Perusahaan. Perusahaan terus melakukan investasi untuk menjaga peningkatan laba berjalan Perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laba tahun berjalan meningkat sebesar Rp 185.558.917 ribu atau setara 11,01% dari sebelumnya sebesar Rp1.685.989.220 ribu menjadi sebesar sebesar Rp1.871.548.137 ribu. Kenaikan tersebut selaras dengan pos pendapatan yang mengalami peningkatan, peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya laba usaha. Peningkatan laba usaha berdampak pada meningkatnya kinerja Perusahaan. Perusahaan terus melakukan investasi untuk menjaga peningkatan laba berjalan Perusahaan.

f. Jumlah penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain – Setelah Pajak***Untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2023***

Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 meningkat sebesar Rp111.479.834 ribu atau setara 257,42% dari sebelumnya sebesar -Rp43.306.945 ribu menjadi sebesar Rp68.172.889 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya peningkatan pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti sebesar Rp143.245.005 ribu atau setara dengan 258% yang disebabkan adanya perubahan pada asumsi aktuarial, perubahan asumsi tersebut menyebabkan penyesuaian pada nilai imbalan pasca kerja dan berdampak pada OCI dan adanya perubahan jumlah pegawai. Peningkatan tersebut berdampak pada meningkatnya kewajiban imbalan pasca kerja perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Setelah pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menurun sebesar Rp 625.987.293 ribu atau setara 107,77% dari sebelumnya sebesar Rp580.840.557 ribu menjadi sebesar -Rp45.146.736 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti yang menurun sebesar Rp803.197.530 ribu atau setara dengan 107,62% yang disebabkan adanya edaran DSAK yang merupakan interpretasi IFRS dan penyesuaian atas UU cipta kerja, pengaturan imbalan pasca kerja dihitung sejak pegawai berumur 32 tahun. Mengingat demografi karyawan KAI yang berusia dibawah 32 tahun cukup signifikan maka terjadi pemulihan atas cadangan yang selama ini sudah dibentuk oleh Perusahaan. Penurunan tersebut berdampak pada menurunnya kewajiban imbalan pasca kerja perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya.

g. Jumlah Laba Komprehensif (Periode) Tahun Berjalan

Untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2023

Jumlah Laba Komprehensif untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 meningkat sebesar Rp210.960.543 ribu atau setara 19,99% dari sebelumnya sebesar Rp1.055.067.084 ribu menjadi sebesar Rp1.266.027.627 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba periode berjalan serta tambahan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti. Peningkatan laba usaha berdampak pada meningkatnya kinerja Perusahaan dan meningkatnya kewajiban imbalan pasca kerja perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya. Perusahaan terus melakukan investasi untuk menjaga peningkatan laba berjalan dan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Jumlah Laba Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 menurun sebesar Rp 440.428.376 ribu atau setara 19,43% dari sebelumnya sebesar Rp2.266.829.777 ribu menjadi sebesar Rp 1.826.401.401 ribu. Penurunan ini didorong oleh peningkatan pada laba tahun berjalan yang lebih kecil dibandingkan dengan penurunan pada pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti. Peningkatan laba usaha berdampak pada meningkatnya kinerja Perusahaan dan menurunnya kewajiban imbalan pasca kerja perusahaan. Perusahaan terus melakukan investasi untuk menjaga peningkatan laba berjalan Perusahaan dan berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya.

Analisa Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2024	2023
Arus kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	1.459.239.876	616.676.812	4.718.034.952	5.161.260.697
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(13.472.299.301)	(503.528.804)	(6.340.840.442)	(8.319.191.885)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	11.253.779.645	(587.524.332)	1.122.932.706	5.002.773.735
Kenaikan (Penurunan) bersih kas dan setara kas	(759.279.780)	(474.376.324)	(499.872.784)	1.844.842.547
Kas dan setara kas awal periode/tahun	5.138.571.482	5.695.720.193	5.695.720.193	3.808.203.932
Selisih kurs kas dan setara kas	170.527.630	(90.088.052)	(57.275.927)	42.673.714
Kas dan setara kas akhir periode/tahun	4.549.819.332	5.131.255.817	5.138.571.482	5.695.720.193

Untuk periode 5 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Mei 2023

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat sebesar Rp842.563.064 ribu atau setara 136,63% dari sebelumnya sebesar Rp616.676.812 ribu menjadi sebesar Rp 1.459.239.876 ribu. Peningkatan ini terutama didorong oleh penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat sebesar Rp1.916.458.692 ribu atau setara 21,39% yang diimbangi dengan peningkatan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp1.431.600.918 ribu atau setara 30,64%. Peningkatan tersebut berdampak pada peningkatan likuiditas perusahaan. Perusahaan terus berupaya untuk menjaga likuiditasnya

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi meningkat sebesar Rp12.968.770.497 ribu atau setara 2.576,58% dari sebesar Rp503.528.804 ribu menjadi sebesar Rp13.472.299.301 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya investasi berupa pinjaman yang diberikan kepada entitas ventura bersama sebesar Rp7.009.384.829 ribu yang sebagian besar diberikan kepada PSBI serta peningkatan perolehan hak pengoperasian aset prasarana sebesar Rp3.899.184.615 ribu atau setara 841,53%. Peningkatan arus kas investasi berdampak pada usaha Perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan investasi untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan meningkat sebesar Rp11.841.303.977 ribu atau setara 2.015,46% dari sebelumnya digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp587.524.332 ribu menjadi sebesar Rp11.253.779.645 ribu yang diperoleh dari aktivitas pendanaan. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank jangka panjang dari China Development Bank untuk pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung serta adanya penambahan pinjaman jangka Panjang atas penyelesaian proyek LRT Jabodebek. Peningkatan tersebut berdampak pada peningkatan investasi perusahaan. Perusahaan berkomitmen untuk terus melakukan investasi untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun sebesar Rp 443.225.745 ribu atau setara 8,59% dari sebelumnya sebesar Rp5.161.260.697 ribu menjadi sebesar Rp4.718.034.952 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada penerimaan dari Pemerintah sebesar Rp1.150.375.007 ribu karena menurunnya nilai kontrak *Public Service Obligation* (PSO) tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi menurun sebesar Rp1.978.351.443 ribu atau setara 23,78% dari sebesar Rp8.319.191.885 ribu menjadi sebesar Rp6.340.840.442 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pencairan uang muka setoran modal pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia berasal dari Dana Dibatasi Penggunaannya.

Arus Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan menurun sebesar Rp3.879.841.029 ribu atau setara 77,55% dari sebesar Rp5.002.773.735 ribu menjadi sebesar Rp1.122.932.706 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak adanya penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk maupun penerimaan PMN yang sebelumnya telah diterbitkan dan/atau diterima pada tahun 2022.

Pola Arus Kas Sesuai Dengan Karakteristik dan Siklus Bisnis Perseroan

Arus kas masuk untuk kegiatan usaha Perseroan sebagian besar didanai oleh penerimaan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional, pinjaman bank dari dalam negeri, penerbitan surat utang, serta setoran modal dari pemegang saham. Perseroan pada dasarnya menggunakan dana (arus kas keluar) untuk kegiatan utama Perseroan yaitu kegiatan operasi dan investasi pada bidang perkeretaapian. Perseroan selalu berupaya mempertahankan cadangan likuiditas untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya serta untuk memenuhi kebutuhan penyaluran pembiayaan.

5. Analisa Operasi per Segmen Usaha

Segmen operasi Grup dapat digambarkan sebagai berikut dengan pembagian per masing-masing entitas dimana penjelasan operasional masing-masing entitas dapat dilihat pada informasi umum. Berikut ini adalah informasi berdasarkan segmen operasi:

(dalam ribuan Rupiah)

Rincian Pendapatan	31 Mei				31 Desember			
	2024	%*	2023	%*	2023	%*	2022	%*
Jasa Angkutan	13.103.023.661	94,31	10.104.630.610	95,21	25.984.133.746	93,59	21.391.383.626	93,14
Jasa Non Angkutan	790.103.056	5,69	507.927.805	4,79	1.780.153.295	6,41	1.575.688.038	6,86
Jumlah Pendapatan angkutan dan usaha lainnya	13.893.126.717	100,00	10.612.558.415	100,00	27.764.287.041	100,00	22.967.071.664	100,00

*catatan: merupakan % terhadap Jumlah Pendapatan angkutan dan usaha lainnya

a. Segmen Operasi – Jasa Angkutan

Pendapatan segmen jasa angkutan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp13.103.023.661 ribu yang memberikan kontribusi sebesar 94,31% terhadap jumlah pendapatan angkutan dan usaha lainnya, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp2.998.392.890 ribu atau setara dengan 29,67% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp10.104.630.610 ribu yang memberikan kontribusi sebesar 95,21% terhadap jumlah pendapatan angkutan dan usaha lainnya. Hal tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan kelas Eksekutif (Kelas 1) yang meningkat sebesar Rp362.127.995 ribu atau setara dengan 21,90% dari sebelumnya Rp1.653.635.958 ribu menjadi Rp2.015.763.953 ribu yang disebabkan adanya dan peningkatan pendapatan Kelas Ekonomi (Kelas 3) sebesar Rp598.733.562 ribu atau setara dengan 31,18% dari sebelumnya Rp1.920.417.663 ribu menjadi Rp2.519.151.225 ribu yang disebabkan oleh adanya peningkatan volume penumpang kelas Eksekutif (Kelas 1), kelas Bisnis dan kelas Ekonomi (Kelas 3) yang meningkat sebesar 30,7 juta penumpang atau setara dengan 17,18% dari sebelumnya 148 juta penumpang menjadi 178,7 juta penumpang. Selain itu, dari jasa angkutan barang terdapat peningkatan atas pengangkutan batubara sebesar Rp755.338.237 atau setara dengan 19,91% dari sebelumnya Rp3.794.363.388 ribu menjadi Rp4.549.701.625 ribu yang disebabkan oleh adanya peningkatan volume angkutan batu bara terutama angkutan batu bara PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Pendapatan segmen jasa angkutan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.984.133.746 ribu yang memberikan kontribusi sebesar 93,59% terhadap jumlah pendapatan angkutan dan usaha lainnya, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp4.592.750.122 ribu atau setara dengan 21,47% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp21.391.383.624 ribu yang memberikan kontribusi sebesar 93,14% terhadap jumlah pendapatan angkutan dan usaha lainnya. Hal tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan kelas Eksekutif (Kelas 1) yang meningkat sebesar Rp1.177.513.833 ribu atau setara dengan 35,38% dari sebelumnya Rp3.327.981.793 ribu menjadi Rp4.505.495.626 ribu dan peningkatan pendapatan Kelas Ekonomi (Kelas 3) sebesar Rp1.696.132.564 ribu atau setara dengan 49,22% dari sebelumnya Rp3.446.297.950 ribu menjadi Rp5.142.430.514 ribu yang disebabkan oleh adanya peningkatan volume penumpang kelas Eksekutif (Kelas 1), kelas Bisnis dan kelas Ekonomi (Kelas 3) yang meningkat sebesar 54,4 juta penumpang atau setara dengan 19,13% dari sebelumnya 284,4 juta penumpang menjadi 338,8 juta penumpang. Selain itu, dari jasa angkutan barang terdapat peningkatan atas pengangkutan batubara sebesar Rp1.786.309.409 ribu atau setara dengan 21,25% dari sebelumnya Rp8.404.397.301 ribu menjadi Rp10.190.706.710 ribu yang disebabkan oleh adanya peningkatan volume angkutan batu bara yang meningkat sebesar 6 juta ton atau setara dengan 13,33% dari sebelumnya 45 juta ton menjadi 51 juta ton .

b. Segmen Operasi – Jasa Non Angkutan

Pendapatan segmen jasa non angkutan Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp790.103.056 ribu yang memberikan kontribusi sebesar 5,69% terhadap jumlah pendapatan angkutan dan usaha lainnya, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp282.175.250 ribu atau setara dengan 55,55% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 sebesar Rp507.927.805 ribu yang memberikan kontribusi sebesar 4,79% terhadap jumlah pendapatan angkutan dan usaha lainnya. Hal tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan non angkutan lainnya sebesar Rp141.125.337 ribu atau setara dengan 124,45% dari sebelumnya Rp113.403.127 ribu menjadi Rp254.528.464 ribu yang disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan atas usaha lahan parkir, restoran kereta api, café, sewa kereta wisata dan pengelolaan area.

Pendapatan segmen jasa non angkutan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 1.780.153.295 ribu yang memberikan kontribusi sebesar 6,41% terhadap jumlah pendapatan angkutan dan usaha lainnya, dimana terjadi peningkatan sebesar Rp204.465.255 ribu atau setara dengan 12,98% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.575.688.040 ribu yang memberikan kontribusi sebesar 6,86% terhadap jumlah pendapatan angkutan dan usaha lainnya. Hal tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan non angkutan lainnya sebesar Rp119.912.686 ribu atau setara dengan 29,67% dari sebelumnya Rp404.166.635 ribu menjadi Rp524.079.321 ribu yang disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan atas usaha lahan parkir, restoran kereta api, café, sewa kereta wisata dan pengelolaan area.

6. Rasio Keuangan Perseroan

Berikut adalah tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan terkait rasio Likuiditas, Profitabilitas dan Solvabilitas:

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<u>Likuiditas</u>				
Rasio Lancar (x)	1,07	1,51	0,73	1,54
Rasio Kas (x)	0,33	0,59	0,29	0,57
<u>Profitabilitas</u>				
Rasio Imbal Hasil Aset (ROA) (%)	1,34	1,52	2,30	2,36
Rasio Imbal Hasil Ekuitas (ROE) (%)	3,72	3,59	6,06	5,80
<u>Solvabilitas</u>				
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	1,78	1,37	1,63	1,46
Rasio Pinjaman Berbunga terhadap Ekuitas (DER) (x)	1,32	0,96	1,00	1,02
Rasio <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (x)	1,25	1,39	1,01	1,73

a. Likuiditas

Sumber likuiditas internal Perseroan yaitu pendapatan angkutan penumpang dan angkutan barang, hal ini dapat dilihat dari rasio lancar Perseroan yang tercatat 1,07x pada 31 Mei 2024, 1,51x pada 31 Mei 2023, 0,73x pada 31 Desember 2023, dan 1,54x pada 31 Desember 2022. Tidak Terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari fasilitas kredit investasi pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Mei 2023, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp32.590.596.021 ribu, Rp19.315.185.582 ribu, Rp21.436.640.970 ribu dan Rp19.479.590.418 ribu. Perseroan juga memiliki Pinjaman Obligasi pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Mei 2023, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp4.494.390.113 ribu, Rp4.491.827.949 ribu, Rp4.493.322.544 ribu dan Rp4.490.760.381 ribu dan Pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Mei 2023, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing – masing sebesar Rp2.843.750.000 ribu, Rp3.281.250.000 ribu, Rp3.031.969.619 ribu dan Rp3.500.000.000 ribu.

Likuiditas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek yang dapat dihitung menggunakan rasio lancar, yaitu membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek. Rasio kas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Mei 2023, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing 0,33x, 0,59x, 0,29x dan 0,57x.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Namun risiko-risiko yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan secara material telah dijabarkan lebih lanjut pada Bab VI dalam Prospektus ini.

Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki kecukupan dana untuk modal kerja. Namun, apabila dana untuk modal kerja tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan dari eksternal seperti pinjaman bank dan/atau pasar modal.

b. Profitabilitas

Rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Mei 2023, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 1,34%, 1,52%, 2,30% dan 2,36%. Penurunan rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 disebabkan oleh ROA 31 Mei 2024 menggunakan laba 5 bulan sedangkan ROA 31 Desember 2023 menggunakan laba selama 1 tahun. Rasio imbal hasil aset (ROA) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 tidak mengalami perubahan karena kenaikan laba bersih lebih kecil dibandingkan kenaikan total aset.

Rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Mei 2023, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 3,72%, 3,59%, 6,06%, dan 5,80%. Penurunan rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 disebabkan ROE 31 Mei 2024 menggunakan laba 5 bulan sedangkan ROE 31 Desember 2024 menggunakan laba 1 tahun. Kenaikan rasio imbal hasil ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 disebabkan oleh kenaikan laba bersih.

c. Solvabilitas

Rasio liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Mei 2023, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 1,78x, 1,37x, 1,63x dan 1,46x. Kenaikan rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Mei 2023 disebabkan kenaikan Liabilitas lebih besar dibandingkan dengan kenaikan ekuitas. Kenaikan rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 disebabkan kenaikan Liabilitas lebih besar dibandingkan dengan kenaikan ekuitas.

Rasio pinjaman berbunga terhadap ekuitas (DER) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Mei 2023, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 1,32x, 0,96x, 1,00x, dan 1,02x. Kenaikan pinjaman berbunga terhadap ekuitas (DER) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Mei 2023 disebabkan kenaikan pinjaman lebih besar dibandingkan dengan kenaikan ekuitas. Penurunan pinjaman berbunga terhadap ekuitas (DER) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 disebabkan oleh kenaikan atas pinjaman lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan ekuitas.

Rasio *debt service coverage ratio* (DSCR) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Mei 2023, 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar 1,25x, 1,39x, 1,01x, dan 1,73x. Penurunan rasio *debt service coverage ratio* (DSCR) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2024 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Mei 2023 disebabkan DSCR 31 Mei 2024 menggunakan EBITDA 5 bulan sedangkan DSCR 31 Desember 2023 menggunakan laba 1 tahun. Penurunan rasio *debt service coverage ratio* (DSCR) Perseroan pada tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2022 disebabkan oleh kenaikan pinjaman jatuh tempo dalam satu tahun dan juga kenaikan utang usaha lebih besar dibandingkan dengan kenaikan EBITDA.

7. Komitmen Investasi Pembelanjaan Modal

Jumlah pembelanjaan modal Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 sebesar Rp1.322.261.807 ribu dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp3.462.327.294 ribu dan Rp2.810.244.158 ribu.

(dalam ribuan rupiah)

Biaya Perolehan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Sarana:			
Lokomotif	-	-	578.661.640
Kereta	770.821.196	1.021.902.779	166.049.585
Gerbong	-	-	629.851.194
Prasarana:			
Tanah	-	35.682.701	-
Bangunan	34.860.406	268.615.872	32.951.717
Prasarana dan Instalasi	2.600.580	142.102.140	17.016.806
Fasilitas:			
Mesin dan Peralatan	54.363.454	510.299.590	373.285.448
Kendaraan	-	7.220.030	4.903.269
Inventaris	367.729	2.275.354	6.677.713
Aset Tetap dalam Penyelesaian	459.248.442	1.474.228.828	1.000.846.786
Jumlah	1.322.261.807	3.462.327.294	2.810.244.158

Pihak yang terkait dalam perjanjian atas belanja modal adalah PT Industri Kereta Api (INKA), PT Adhi Karya, CRRC Qingdao Sifang, HegenScheidt MFD GMBH, Plasser & Theurer.

Tujuan investasi barang modal tersebut adalah untuk mendukung pertumbuhan Perseroan, peningkatan daya saing, dan nilai Perseroan. Pembelanjaan investasi sebagian besar merupakan pembelian sarana berupa kereta, pembangunan prasarana, pembelian fasilitas berupa mesin dan peralatan.

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal sebagian besar berasal dari Kredit Investasi. Mata uang denominasi dalam hal sumber dana yang berasal dari kredit investasi adalah mata uang rupiah sehingga tidak terdapat risiko akibat perubahan mata uang asing atas investasi tersebut.

Melalui investasi barang modal tersebut, Perseroan mengharapkan dapat mendukung peningkatan kapasitas pengangkutan 5,4 juta ton atau sebesar 10,78%.

Komitmen investasi barang modal yang diungkapkan oleh Perseroan untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2024 dan 31 Mei 2023 serta untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 bukan merupakan komitmen investasi barang modal yang material.

8. Manajemen Risiko Fluktuasi Mata Uang dan Suku Bunga Acuan Pinjaman

Untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko fluktuasi kurs terhadap Dolar AS. Perseroan mengusahakan, di mana memungkinkan, untuk memastikan bahwa sebagian besar pembelian dan penjualan dilakukan dalam mata uang yang sama serta dilakukan pada saat yang hampir bersamaan dan mengimplementasikan kebijakan dimana hutang dalam mata uang asing yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dilakukan dalam mata uang yang sama (lindung nilai alami). Manajemen juga memantau untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan semaksimal mungkin.

Perseroan mengelola biaya bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan variabel. Perseroan mengevaluasi rasio suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang dari utang pinjaman dan utang obligasi sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar keuangan. Berdasarkan penilaian manajemen, pembiayaan baru akan ditentukan berdasarkan suku bunga tetap atau mengambang.

Selain itu, Perseroan juga mengelola eksposur atas tingkat suku bunga yang berasal dari utang pinjaman dan utang obligasi dengan menandatangani kontrak swap tingkat suku bunga ditandatangani ditujukan untuk lindung nilai suku bunga mengambang pinjaman dalam Dolar Amerika Serikat.

9. Kejadian Atau Transaksi yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

10. Pembatasan Kemampuan Perusahaan Anak untuk Mengalihkan Dana Kepada Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

11. Peningkatan Material dari Penjualan atau Pendapatan Bersih

Pendapatan segmen angkutan penumpang Perseroan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar Rp4.680.559.077 ribu dimana terjadi peningkatan sebesar Rp992.450.494 ribu atau setara dengan 26,91% dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 yaitu sebesar Rp 3.688.108.583. Hal disebabkan oleh peningkatan volume penumpang kelas Eksekutif (Kelas 1), kelas Bisnis dan kelas Ekonomi (Kelas 3) yang meningkat sebesar 30,7 juta penumpang atau setara dengan 17,18% dari sebelumnya 148 juta penumpang menjadi 178,7 juta penumpang.

12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan dan Pendapatan Bersih Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan.

13. Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang

Berdasarkan Laporan Keuangan per tanggal 31 Mei 2024, Perseroan memiliki pinjaman yang masih terutang adalah sebesar Rp 42.369.865.471 ribu. Adapun detil pinjaman Perseroan yang masih terutang adalah sebagai berikut:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)	
	31 Mei	2024
Pinjaman Bagian Jangka Pendek		
Pinjaman Bank Jangka Pendek		1.942.426.859
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun		
Pinjaman Bank Jangka Panjang		1.401.057.983
Pinjaman Program PEN		437.500.000
Utang obligasi		1.899.345.831
Jumlah Pinjaman Bagian Jangka Pendek		5.680.330.673
Pinjaman Bagian Jangka Panjang		
Utang bank dan lembaga keuangan lainnya jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun		
Pinjaman Bank Jangka Panjang		31.189.538.038
Pinjaman Program PEN		2.406.250.000
Utang obligasi		2.595.044.282
Sukuk Ijarah		498.702.478
Pinjaman Bagian Jangka Panjang		36.689.534.798
Jumlah Pinjaman yang Masih Terutang		42.369.865.471

Berdasarkan jenis pinjamannya, seluruh pinjaman bank jangka pendek baik kepada Perseroan, Perusahaan Anak dan Perjanjian Transaksi Khusus Light Rail Transit (LRT) bersifat revolving dan dikenakan tingkat suku bunga tetap yang berkisar antara 5,29% - 8,25%. Sedangkan, Pinjaman Program PEN seluruhnya dikenakan suku bunga Repo rate sebesar 100 BPS. Pinjaman Bank Jangka Panjang seluruhnya dikenakan tingkat suku bunga tetap yang berkisar antara 2,54% - 11,69%. Selain itu, Utang Obligasi juga dikenakan suku bunga tetap yang berkisar antara 7,10% sampai dengan 8,20%.

Berdasarkan mata jenis mata uangnya, sebanyak 82,83% dalam Rupiah, 9,00% dalam Dolar Amerika Serikat dan 8,17% dalam Yuan Tiongkok.

Atas pinjaman Perseroan yang masih terutang tersebut, terdapat beberapa pinjaman yang akan jatuh tempo pada tahun 2024, 2025, 2026, 2027 dan 2028 secara berturut-turut adalah, Rp5.106.306.749 ribu, Rp2.226.789.023 ribu, Rp3.257.271.184 ribu, Rp2.558.698.726 dan Rp2.006.376.177 ribu.

Sumber dana yang akan digunakan untuk pembayaran jumlah pinjaman yang masih terutang akan dilunasi oleh Perseroan melalui pendapatan dari aktivitas operasi Perseroan, pendanaan dari eksternal Perseroan, penerbitan efek.

14. Investasi Barang Modal yang dikeluarkan Dalam Rangka Pemenuhan Persyaratan Regulasi dan Isu Lingkungan Hidup

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan sebagai persyaratan dan isu lingkungan hidup.

15. Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir

Berikut adalah amandemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 adalah:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Kewajiban Diklasifikasikan Sebagai Lancar atau Tidak Lancar
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan
- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa– Balik
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 104: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 104: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 104 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 104: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK109: Instrumen Keuangan
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 207: Laporan Arus Kas
- PSAK 216: Aset Tetap
- PSAK 219: Imbalan Kerja
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 232: Instrumen Keuangan Penyajian
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi
- PSAK 238: Aset Takberwujud
- PSAK 240: Properti Investasi

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian interim ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen atas standar tersebut.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan laba Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Beberapa risiko usaha dan risiko umum di bawah ini dapat mempengaruhi kinerja usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah, adalah sebagai berikut:

I. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Keamanan dan Keselamatan Operasional Kereta Api

Risiko-risiko yang dihadapi Perseroan di bidang keamanan dan keselamatan operasional kereta api meliputi risiko keselamatan perjalanan kereta api misalnya risiko kereta api mengalami anjlok dari rel, risiko tabrakan kereta api (baik dengan kereta api, dengan orang, maupun dengan kendaraan umum), risiko kebakaran aset Sarana perkeretaapian, risiko kecelakaan di peron, (karena tidak tersedianya *underpass/skybridge*), risiko kecelakaan di perlintasan sebidang yang dapat mengakibatkan kereta dapat menabrak pengguna jalan, risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang menyebabkan terganggunya perjalanan kereta api, risiko kerusakan aset Sarana dan Prasarana perkeretaapian (lokomotif, kereta, rel, atau jembatan), risiko vandalisme atau sabotase dari masyarakat sekitar, risiko terjadinya *backlog* perawatan Sarana perkeretaapian, dan keterbatasan *stabling*. Ketika risiko tersebut muncul akan berdampak pada kelancaran operasional perjalanan KA yang berimbas pada pelayanan kepada pengguna jasa Perseroan. Hal ini juga berpengaruh pada pencapaian pendapatan perusahaan yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian laba perusahaan.

II. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Strategis

Risiko Strategis merupakan risiko yang berhubungan dengan strategi Perusahaan mencakup tidak terbatas pada risiko bisnis yaitu risiko kegagalan Perseroan dalam **menerapkan strategi perusahaan** yang dapat berdampak pada kerugian material, finansial, dan keberlangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang.

Risiko strategis juga berhubungan dengan pengendalian dan pengelolaan risiko-risiko yang melekat pada inisiatif strategis dan tujuan perusahaan termasuk di dalamnya adalah aspek internal dan eksternal, peluang, ancaman, kelemahan dan kekuatan perusahaan, serta citra perusahaan misalnya risiko yang terkait dengan politik dan ekonomi nasional, regulasi, kepemimpinan, dan perubahan perilaku pelanggan.

Risiko persaingan yang dihadapi perusahaan adalah persaingan antar moda transportasi seperti persaingan dengan pesawat udara maupun persaingan dengan bus, travel, truck serta transportasi lainnya yang dapat diperoleh dengan cara aplikasi *online*. Perseroan juga menghadapi persaingan dengan jalan tol. Keberadaan jalan tol juga akan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan mobil pribadi maupun bus dan travel sehingga dapat berpotensi menurunkan tingkat okupansi penumpang kereta api. Dengan tingkat persaingan yang sangat kompetitif tersebut, Perseroan menghadapi risiko dalam persaingan untuk meraih pangsa pasar angkutan penumpang. Risiko tersebut dapat berdampak pada ketercapaian volume pencapaian angkutan baik penumpang maupun barang sehingga berpengaruh pada pencapaian pendapatan Perseroan.

2. Risiko Proyek

Risiko proyek adalah risiko yang berhubungan langsung dengan berbagai aspek pelaksanaan proyek investasi/pengadaan barang dan jasa terkait daftar investasi.

Risiko tersebut mencakup kesulitan pembebasan lahan, ketidaksesuaian design konstruksi proyek, ketidaksesuaian RAB dan lain-lain. Risiko proyek dapat berdampak pada keterlambatan penyelesaian pekerjaan, gagalnya pengoperasian proyek, yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan Perseroan.

3. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang berhubungan dengan sistem penyelenggaraan organisasi Perusahaan, termasuk didalamnya penyelenggaraan pengoperasian Prasarana dan Sarana perkeretaapian meliputi risiko pengaturan perjalanan kereta api, risiko persinyalan dan telekomunikasi, risiko terkait perawatan lokomotif, risiko terkait perawatan kereta, risiko terkait perawatan gerbong, terlambatnya informasi kepada penumpang, risiko antrian penumpang, risiko keterlambatan perjalanan, risiko keterbatasan prasarana jalan rel misalnya penggunaan jalan rel eksisting bersama-sama antara KRL, KA Barang, KA Intercity dan KA Bandara Soeta, risiko terkait pemeliharaan jalan rel dan jembatan, risiko sumber daya manusia yang terkait dengan operasional perjalanan kereta api seperti masinis dan kru kereta. Risiko operasional dapat berdampak pada terganggunya operasional perjalanan kereta api dan pelayanan kepada penumpang. Risiko operasional dapat berdampak pada terganggunya operasional perjalanan kereta api dan pelayanan kepada pelanggan.

4. Risiko Finansial

Risiko finansial adalah risiko yang berhubungan dengan aspek keuangan dan berdampak pada kemampuan keuangan perusahaan yang meliputi likuiditas keuangan, solvabilitas (hutang), dan profitabilitas termasuk di dalamnya risiko kurangnya pendanaan investasi, risiko keterlambatan pembayaran PSO; risiko kurangnya pembayaran PSO; risiko pengembalian PSO kepada pemerintah; risiko *demurrage* dan risiko kemampuan pengembalian pinjaman. Jenis risiko finansial yang dapat dihadapi Perseroan antara lain:

a) Risiko Pasar

1) Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing (Valas)

Sebagian besar investasi dari Perseroan seperti pengadaan Sarana dan Prasarana perkeretaapian merupakan barang impor sehingga Perseroan memiliki eksposur terhadap fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Risiko ini berdampak pada meningkatnya nilai pengadaan suku cadang sarana dan prasarana Perseroan yang diperoleh melalui impor sehingga berdampak pada tingginya biaya Perseroan.

2) Risiko Suku Bunga

Risiko bunga atas arus kas adalah risiko di mana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Kenaikan dan penurunan suku bunga secara tidak stabil berdampak pada keputusan jangka pendek maupun jangka panjang dalam penggunaan instrumen keuangan.

b) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi kewajibannya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan. Risiko kredit Perseroan adalah penerimaan pendapatan atas angkutan barang, sewa aset, dimana ketika pelanggan tidak mampu melakukan pembayaran atas piutang pendapatan tersebut, maka akan berdampak pada likuiditas Perseroan.

c) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (juga dikenal risiko pendanaan) adalah risiko dimana Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas dapat berdampak terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya.

- d) Nilai Wajar
Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada tanggal Laporan Keuangan Audited 31 Mei 2024 tanggal 2 Agustus 2024. Dampak atas pencatatan ketidakwajaran nilai buku dari aset dan liabilitas keuangan akan berdampak pada penyajian *overstated* atau *understated* laporan posisi keuangan Perseroan.
- e) Pengelolaan Modal
Dalam mengelola permodalannya, Perseroan harus senantiasa mempertahankan keberlangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko. Ketika Perseroan tidak mampu melakukan pengelolaan modal dengan optimal dapat berdampak pada kemampuan Perseroan dalam memberikan tingkat pengembalian kepada pemangku kepentingan.

5. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Risiko investasi adalah risiko yang berhubungan dengan perencanaan/keputusan investasi yang bersifat pengeluaran modal (*capital expenditure*) yang telah ditetapkan dalam buku anggaran resmi (RKAP).

Risiko investasi dapat berdampak pada tidak kembalinya dana yang telah diinvestasikan, inefisiensi biaya akibat adanya pembuatan fasilitas pemeliharaan yang kurang perlu, risiko keterlambatan investasi antara lain berdampak pada penyerapan anggaran investasi yang terkait dengan PSO, risiko tidak sesuainya proses investasi contoh prasarana belum ada tetapi sarana sudah ada atau sarana sudah ada tetapi SDM belum tersedia untuk mengoperasikannya, risiko aksi korporasi yang dihadapi perusahaan adalah risiko yang terkait dengan distribusi bunga dan pelunasan pokok hutang. Kenaikan suku bunga pinjaman dapat berpengaruh pada kemampuan perusahaan untuk melunasi bunga pinjaman. Pelunasan pokok hutang yang bersamaan jatuh tempo pembayarannya dapat mempengaruhi *cash flow* perusahaan.

Dampak atas risiko investasi ini adalah menurunnya tingkat pengembalian yang diperoleh oleh Perseroan atas investasi.

6. Risiko Lingkungan

Risiko lingkungan adalah risiko yang berhubungan dengan masalah lingkungan. Risiko ini berupa sisa pembubutan roda, sisa pembakaran mesin, sisa pengecatan sarana dan lain-lain. Risiko lingkungan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, klaim lingkungan sekitar akibat polusi udara, air dan limbah yang ditimbulkan dari kegiatan operasional Perseroan.

7. Risiko Perubahan Teknologi

Risiko perubahan teknologi adalah risiko yang dihadapi perusahaan terkait kemajuan teknologi dalam Sarana dan Prasarana perkeretaapian, termasuk di dalamnya risiko ketertinggalan teknologi untuk lokomotif dan kereta, risiko ketertinggalan teknologi dalam hal teknologi persinyalan, risiko alih teknologi dari loket ke mesin (*CVIM, Fare Adjustment, Gate*), risiko transisi pengelolaan sistem *e-ticketing* risiko ketertinggalan teknologi dalam perawatan Sarana dan Prasarana perkeretaapian (teknologi yang digunakan untuk perawatan lokomotif, kereta, jalan rel dan jembatan).

Risiko perubahan teknologi akan membawa dampak menurunnya reputasi perusahaan karena teknologi Sarana Prasarana perkeretaapian yang digunakan sudah usang sehingga berpengaruh terhadap pelayanan kepada penumpang. Risiko ketertinggalan teknologi yang digunakan untuk perawatan lokomotif, kereta, jalan rel dan jembatan juga berdampak pada kehandalan Sarana dan Prasarana yang dihasilkan sehingga berpengaruh terhadap pelayanan dan keandalan operasional perjalanan kereta api.

8. Risiko Pengadaan

Risiko pengadaan adalah risiko yang dihadapi perusahaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Risiko pengadaan barang dan jasa yang seringkali terjadi antara lain risiko kesalahan dalam menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena tidak tersedianya informasi harga di pasaran, risiko pengadaan barang dan jasa yang belum sesuai dengan spek yang diinginkan *user*, risiko pelaksanaan tender tidak berhasil karena jumlah peserta tender yang memasukkan dokumen penawaran tidak memenuhi kuota. Risiko tersebut berdampak pada efektifitas dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

9. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perseroan seperti keselamatan perjalanan kereta, turunnya kinerja Perseroan, praktek-praktek Perseroan yang tidak sesuai dengan GCG. Risiko tersebut jika terjadi akan berdampak pada citra negative Perseroan.

III. RISIKO UMUM

1. Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian

Risiko perubahan kondisi perekonomian adalah risiko yang dihadapi perusahaan akibat adanya kondisi perekonomian dan pasar global seperti inflasi. Peningkatan inflasi akan mengurangi kekuatan daya beli Rupiah. Nilai tukar Rupiah terhadap dolar maupun mata uang asing lainnya yang terus mengalami pelemahan dapat membebani biaya operasional perusahaan seperti biaya BBM. Dengan adanya pelemahan nilai Rupiah akibat inflasi juga akan berpengaruh terhadap pengadaan suku cadang kereta api yang sebagian besar merupakan barang impor. Risiko tersebut berdampak pada realisasi biaya Perseroan.

2. Risiko Kebijakan Pemerintah

Risiko kebijakan pemerintah merupakan risiko yang dihadapi perusahaan akibat adanya kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan. Risiko kebijakan pemerintah merupakan risiko yang bersifat *uncontrollable* sehingga upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah dengan meminimalisir dampaknya namun tidak mengurangi penyebabnya karena kebijakan pemerintah merupakan hal yang bersifat *mandatory*. Risiko kebijakan pemerintah yang dihadapi perusahaan misalnya risiko perubahan peraturan perundang-undangan perkeretaapian, risiko perubahan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perusahaan, dan risiko penugasan dari pemerintah kepada perusahaan.

Atas risiko penugasan Pemerintah atas proyek-proyek yang kurang *bankable*, maka menyebabkan proyek memiliki tingkat pengembalian yang kurang dan atas hal tersebut Perseroan dapat mengupayakan skema-skema keperintisan kepada Pemerintah. Terlebih atas kebijakan Pemerintah terkait dengan pembatasan penerimaan Perseroan dari Pemerintah dapat berdampak kepada likuiditas dan laba Perseroan.

3. Risiko Regulasi

Risiko regulasi adalah risiko yang berhubungan dengan ketentuan hukum/perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku secara universal (*regional/nasional/internasional*). Dampak atas risiko tersebut berupa potensi risiko litigasi atau tuntutan pengadilan yang timbul dari sebuah kegiatan perencanaan dan implementasi investasi, dan potensi risiko yang timbul dari penyusunan perjanjian kerja (*legal drafting*) dengan pihak ketiga/partner bisnis.

4. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang berhubungan dengan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan/prosedur tetap internal Perseroan, maupun kepatuhan terhadap peraturan-perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia seperti risiko keterlambatan sertifikasi sarana dan risiko sertifikasi masinis. Dampak dari risiko kepatuhan tersebut dapat berupa tuntutan dan sanksi terhadap Perseroan, pencabutan izin pengoperasian sarana dan risiko pencabutan izin sertifikasi awak KA dan lain-lain.

Di bawah ini adalah beberapa risiko Anak Perseroan yang berbeda dengan risiko Induk terkait perbedaan proses bisnis Perseroan khususnya pada PT Reska Multi Usaha (“RMU”) yang bergerak di bidang perparkiran dan jasa restoran di atas Kereta Api:

1. Risiko Kehilangan Potensi Pendapatan

Risiko Kehilangan Potensi Pendapatan adalah risiko atas kehilangan lahan parkir yang dapat disewa dan diusahakan oleh RMU atas rencana pengembangan TOD Perseroan dengan Mitra Perseroan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya proses bisnis yang dijalankan oleh RMU dan kemudian berdampak juga pada turunnya potensi pendapatan.

2. Risiko Kehilangan Kendaraan di Lahan Parkir

Risiko Kehilangan Kendaraan di Lahan Parkir adalah risiko yang terjadi atas pencurian atau kehilangan kendaraan pelanggan di lahan parkir yang diusahakan oleh RMU. Hal ini berdampak pada kepercayaan pelanggan untuk menitipkan kendaraannya pada lahan parkir tersebut berkurang dan berpotensi terhadap penurunan citra serta pendapatan Perusahaan Anak.

3. Risiko Suplai Bahan Makanan

Risiko Suplai Bahan Makanan adalah risiko ketersediaan suplai bahan makanan oleh Mitra RMU, dimana bahan makanan tersebut menjadi produk unggulan Anak Perseroan di atas Kereta untuk mencapai target pendapatannya. Suplai bahan makanan yang kurang lancar akan berdampak pada ketidakterediaan variasi bahan makanan yang akan diujakan oleh RMU diatas Kereta.

4. Risiko Kualitas Bahan Makanan

Risiko Kualitas Bahan Makanan adalah risiko atas kualitas rasa makanan yang tidak sesuai dengan selera pelanggan dan makanan yang basi. Dampak atas resiko ini adalah menurunnya volume penjualan yang berdampak pada pendapatan penjualan, disamping itu juga dapat berpengaruh terhadap citra RMU.

IV. RISIKO BAGI INVESTOR

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi dan Sukuk Ijarah yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA RISIKO-RISIKO DI ATAS ADALAH RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA. MANAJEMEN PERSEROAN YANG MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran ini dinyatakan efektif, Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian dan transaksi penting yang telah terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 14 Oktober 2024, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang dapat berdampak material terhadap posisi keuangan konsolidasian dan hasil usaha Perseroan.

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian, dalam laporannya No. 01095/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0645 dan penyajian informasi keuangan Konsolidasi Interim untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 tidak diaudit atau direviu.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Industri transportasi perkeretaapian dimulai pada tahun 1864 ketika Namlooze Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij membangun jalan kereta api dari Semarang ke Surakarta, Jawa Tengah. Setelah itu, tiga perusahaan lainnya ikut membangun jalur-jalur kereta api, baik di Jawa, maupun di luar Jawa. Ketiga perusahaan tersebut adalah Staatsspoorwegen (SS), Verenigde Spoorwegbedrijf, dan Deli Spoorwegen Maatschappij. Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambil alihan Kantor Pusat Kereta Api Bandung tanggal 28 September 1945, pada tanggal ini juga didirikan Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).

Pada tanggal 25 Mei 1963, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 tentang Perusahaan Negara Kereta Api untuk membentuk Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Selanjutnya, pada 15 September 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), PNKA diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Dengan status sebagai Perusahaan Negara dan Perusahaan Jawatan, saat itu Perusahaan beroperasi melayani masyarakat dengan dana subsidi dari Pemerintah.

Pada tanggal 30 Oktober 1990, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api. Untuk mendorong Perumka menjadi perusahaan bisnis jasa, pada tanggal 3 Februari 1998 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia. Berkedudukan di Bandung dan didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 2 tanggal 1 Juni 1999 sebagaimana diubah dengan Akta Perbaikan No. 14 tanggal 13 September 1999, yang seluruhnya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini dikenal dengan Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C-17171.HT.01.01.TH.99. tanggal 1 Oktober 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 101166000151 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Bandung No. 1104/BH.10.11/XI/99, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 2000, Tambahan No. 240 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 24 tanggal 5 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0175387 tanggal 24 Juli 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151267.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 26 Juli 2024, Tambahan No. 22447 (“**Akta No. 24/2024**”) (selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar**”)

Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah untuk melakukan penyelenggaraan perkeretaapian, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusaha prasarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan usaha:
 - 1) Kontruksi gedung lainnya;
 - 2) Kontruksi jalan rel;
 - 3) Kontruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass;
 - 4) Konstruksi terowongan;
 - 5) Kontruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi;
 - 6) Instalasi listrik;
 - 7) Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api;
 - 8) Aktivitas stasiun kereta api.
- b. Melakukan penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang meliputi pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusaha sarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan usaha:
 - 1) Reparasi lokomotif dan gerbong kereta;
 - 2) Angkutan jalan rel untuk penumpang;
 - 3) Angkutan jalan rel untuk barang;
 - 4) Angkutan jalan rel perkotaan;
 - 5) Angkutan jalan rel wisata.
- c. perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya) suku cadang dan perlengkapannya.
- d. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap).
- e. Aktivitas konsultasi transportasi.
- f. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
- g. Kegiatan penunjang Pendidikan.
- h. Penanganan kargo (bongkar muat barang).
- i. Ativitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD).
- j. Angkutan multimoda.
- k. Aktivitas agen perjalanan lainnya.
- l. Pendidikan lainnya swasta.
- m. Pendidikan Kesehatan swasta.
- n. Pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian.
- o. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.
- p. Usaha jasa pertambangan.
- q. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.
- r. Kerjasama peningkatan akses stasiun kereta api yang bersinggungan dengan lahan milik pihak lain untuk dikembangkan dengan konsep terhubung dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan dan mendukung peningkatan pelayanan penumpang.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- a. pergudangan dan penyimpanan.
- b. aktivitas cold storage.
- c. Aktivitas bounded warehousing atau wilayah Kawasan berikat.
- d. Pergudangan dan penyimpanan lainnya.
- e. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut.
- f. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau.
- g. Angkutan melalui saluran pipa.

- h. Konstruksi sentral telekomunikasi.
- i. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya.
- j. Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri.
- k. Aktivitas pengolahan data.
- l. Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.
- m. Konstruksi gedung hunian.
- n. Konstruksi gedung perkantoran.
- o. Konstruksi gedung perbelanjaan.
- p. Konstruksi gedung penginapan.
- q. Instalasi mekanikal.
- r. Instalasi konstruksi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
- s. Periklanan.
- t. Aktivitas klinik swasta.
- u. Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi.
- v. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik.
- w. Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan.
- x. Konstruksi gedung kesehatan.
- y. Penyiapan lahan.
- z. Museum yang dikelola swasta.
- aa. Aktivitas biro perjalanan wisata.
- bb. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain dalam rangka mengembangkan proses bisnis Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah kegiatan usaha jasa perkeretaapian dan jasa penunjang lainnya terkait perkeretaapian.

Kegiatan penunjang perkeretaapian yang dilakukan oleh Perseroan antara lain yaitu:

1. Aktivitas penyewaan aset dan properti, dimana Perseroan melakukan kegiatan perusahaan/ penyewaan aset dan properti seperti perusahaan aset tanah, bangunan dan aset lainnya untuk dikomersialkan sebagai pendapatan perusahaan;
2. Penyewaan sarana, dimana Perseroan melakukan kegiatan persewaan sarana kereta kepada anak usaha diantaranya yaitu :
 - a. Persewaan KA Wisata kepada PT KAI Wisata
 - a. Persewaan Kereta Makan kepada PT KAI Service
 - b. Persewaan Gerbong barang ke PT KAI Logistik
3. Periklanan, dimana Perseroan melakukan kegiatan usaha periklanan di wilayah stasiun maupun di kereta untuk meningkatkan pendapatan usaha;
4. Aktivitas pelayanan kesehatan, dimana Perseroan memiliki klinik Kesehatan (Mediska) yang memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat umum yang tersebar di seluruh wilayah kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero)
5. Serta jasa pekerjaan teknis perkeretaapian, jasa penunjang angkutan peti kemas, dan aktivitas biro perjalanan wisata. Selain kegiatan usaha utama, Perseroan juga menjalankan beberapa kegiatan usaha penunjang lainnya yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan.

Selain kegiatan usaha utama, Perseroan juga menjalankan beberapa kegiatan usaha penunjang lainnya yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan.

Investasi Perseroan dalam bentuk penyertaan modal dilakukan pada sebagaimana diungkapkan pada tabulasi di atas. Perseroan telah melakukan investasi pada Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang (i) distribusi logistik melalui KALOG; (ii) penyedia jasa dan/atau barang di bidang kepariwisataan berbasis kereta api melalui KAWIS; (iii) pengelolaan aset/properti perkeretaapian melalui KAPM; (iv) jasa angkutan dengan sarana Kerela Rel Listrik melalui KCI; (v) angkutan kereta api bandara melalui Railink, dan (vi) usaha pendukung kegiatan kereta api melalui RMU.

2. STRUKTUR MODAL DAN PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

2.1 Struktur Permodalan Perseroan pada saat pendirian sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu) saham.
- Modal Disetor : Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar Rupiah)

Susunan Pemegang Saham berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase (%)
Modal Dasar	3.500.000	Rp3.500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Negara Republik Indonesia	2.200.000	Rp2.200.000.000.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Saham Dalam Portepel	2.200.000	Rp2.200.000.000.000,00	100,00
	1.300.000	Rp1.300.000.000.000,00	

100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tersebut telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia yang berasal dari penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

2.2 Struktur Permodalan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 122 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan anggaran dasar telah diterima dan di catat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010132.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 006 tanggal 20 Januari 2023, Tambahan No. 001881 ("Akta No. 122/2023"). Dalam Akta No. 122/2023, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui:

- pengeluaran saham dalam simpanan sebanyak 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu) saham, masing-masing saham dengan nominal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sehingga seluruhnya seharga Rp3.200.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah) yang seluruhnya diambil bagian oleh Negara Republik Indonesia;
- penambahan modal ditempatkan dan modal di setor pada Perseroan sebesar Rp3.200.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah) sehingga modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp19.168.743.000.000,00 (sembilan belas triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta Rupiah) menjadi sebesar Rp22.368.743.000.000,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta Rupiah) yang bersumber dari Penambahan Penyertaan Modal Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 62 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia;
- Mengubah Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan adanya pengeluaran saham dalam simpanan dan penambahan modal ditempatkan dan disetor pada Perseroan, maka susunan permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).
- Modal Ditempatkan : Rp22.368.743.000.000,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta Rupiah) yang terbagi atas 22.368.743 (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga) saham.
- Modal Disetor : Rp22.368.743.000.000,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta Rupiah)

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang saham Perseroan telah melakukan penysetoran modal ke dalam Perseroan sebesar:

- a. Penysetoran sebesar Rp19.168.743.000.000,00 (sembilan belas triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta) merupakan setoran modal sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 278 tanggal 31 Desember 2021, dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. AHU-AH.01.03 0494898 tanggal 31 Desember 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235656.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 06 tanggal 1 April 2022, Tambahan No. 011620, yang diperoleh dari penyertaan modal oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api;
 - ii. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - iii. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - iv. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan
 - vi. Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Setoran tersebut berupa pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, dan 2021.

- b. Rp3.200.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 62 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, sebagaimana penysetoran dibuktikan dengan bukti setor dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, No. Account 0005-01-004107-30-5 tanggal 31 Desember 2022.

3. PERIZINAN

No.	Izin	Masa Berlaku
1.	Nomor Induk Berusaha No. 9120004201095 yang diterbitkan pada tanggal 19 Februari 2019 oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, dan dicetak tanggal 13 Agustus 2024	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
2.	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 220/1/IU/ESDM/PMDN/2020 tanggal 14 Mei 2020 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 62/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2022 dan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman No. 19/1/IU-PB/ESDM/PMDN/2023 tanggal 19 Januari 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 220/IU/ESDM/PMDN tanggal 14 Mei 2020 tentang Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi PT Kereta Api Indonesia (Persero)	5 (lima) tahun
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.000.016.4-093.000, Perseroan dengan alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Kota Bandung, Jawa Barat terdaftar pada KPP Madya Bandung sejak 5 November 1992	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.000.016.4-441.001, Perseroan dengan alamat Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Kota Bandung, Jawa Barat terdaftar pada KPP Madya Bandung	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
5.	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00143/WPJ.19/KP.0403/2012 tanggal 4 April 2012, Perseroan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak No. 01.000.016.4-093.000	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00147/WPJ.19/KP.0403/2012 tanggal 4 April 2012	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
7.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.217 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha
8.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 158 Tahun 2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 37 Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 158 Tahun 2020 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak 24 April 2020 dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun
9.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 141 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 141 Tahun 2019 dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun

Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum atas nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 141 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019, sedang dalam proses permohonan perpanjangan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Surat Perseroan No. KT.101/VIII/1/RH/KA-224 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Permohonan Penambahan Pengoperasian Kereta Api pada Lintas Pelayanan Berbeda, Penambahan Frekuensi KA pada Lintas Pelayanan Sama dan Perpanjangan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum. Tidak terdapat konsekuensi yuridis sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan Izin Operasi Sarana ini mengingat dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 141 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019, diatur bahwa Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.

No.	Izin	Masa Berlaku
10.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 266 Tahun 2019 tanggal 28 Desember 2019 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 266 Tahun 2019 dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun
11.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 90 Tahun 2020 tanggal 22 April 2020 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 90 Tahun 2020 dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun
12.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 243 Tahun 2020 tanggal 18 September 2020 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 243 Tahun 2020 dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun
13.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 38 Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 431 Tahun 2017 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-
14.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 191 Tahun 2021 tanggal 16 Agustus 2021 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Perseroan Pada Lintas Pelayanan Yogyakarta-Yogyakarta International Airport	Berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 191 Tahun 2021 dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun
15.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 59 Tahun 2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Persetujuan Penambahan Pengoperasian Kereta Api Pada Lintas Pelayanan Yang Berbeda Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) tanggal 22 Juni 2023	Berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 59 Tahun 2023 dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun
16.	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KP-DJKA 76 Tahun 2023 tentang Persetujuan Penambahan Pengoperasian Pada Lintas Pelayanan Yang Berbeda Angkutan Sepeda Motor Gratis Dengan Kereta Api Pada Masa Angkutan Lebaran Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
17.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 99 Tahun 2023 tanggal 24 Agustus 2023 tentang Pemberian Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum Kereta Api Ringan / <i>Light Rail Transit</i> Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
18.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.219 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pelaksana Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Yang Ada Saat Ini Oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku selama belum ada dan/atau terbentuknya badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum dan setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian
19.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.221 Tahun 2010 tanggal 23 April 2010 tentang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku sesuai dengan batas waktu pemberian penugasan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum yang ada saat ini dan setiap tahun dilakukan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian
20.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1083 Tahun 2017 tanggal 14 Desember 2017 tentang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun
21.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 989 Tahun 2017 tentang Penetapan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Sebagai Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Kereta Api Ringan / <i>Light Rail Transit</i> Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi	Berlaku sampai dengan masa penyelenggaraan berakhir
22.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1105 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Kereta Api Ringan / <i>Light Rail Transit</i> Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), dengan lintas pelayanan Cawang – Kuningan – Dukuh Atas, lintas pelayanan Cawang – Bekasi Timur, lintas pelayanan Dukuh Atas – Palmerah – Senayan, lintas pelayanan Cibubur – Bogor	Berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun
23.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 101 Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Pemberian Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Kereta Api Ringan / <i>Light Rail Transit</i> Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku sesuai dengan batas pemberian konsesi yang diatur dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum antara Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Perseroan

No.	Izin	Masa Berlaku
24.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 1105 Tahun 2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Kereta Api Ringan / <i>Light Rail Transit</i> Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun dan diperpanjang selama 20 (dua puluh) tahun
25.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 101 Tahun 2023 tanggal 25 Agustus 2023 tentang Pemberian Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum Kereta Api Ringan / <i>Light Rail Transit</i> Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku sesuai dengan batas pemberian konsesi yang diatur dalam perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum
26.	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KP. 551 Tahun 2020 tentang Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Berupa Jalur Bongkar Muat, Longsiding, dan Fasilitas Operasi Kereta Api di Emplasemen Stasiun Sukacinta dan Stasiun Serdang Lintas Muara Enim – Lahat di Wilayah Sumatera Bagian Selatan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sekali atas permohonan dari pemegang izin pembangunan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang disertai dengan alasan dan data pendukung yang lengkap
27.	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KP – DJKA 151 Tahun 2024 tanggal 22 Juli 2024 tentang Pemberian Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum Segmen I Lintas Lahat – Kertapati Sumatera Selatan Kepada PT Kereta Api Indonesia	berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
28.	Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KP.405/SK.6/DJKA/4/13 tanggal 19 April 2023 tentang Pengesahan dan Sertifikasi Uji Pertama Prasarana Perkeretaapian pada Lintas Prabumulih - Lahat Berupa Jalur Kereta Api Antara Stasiun X6 – Penimur - Niru, Stasiun Talang Padang, Dan Stasiun Tanjung Terang, Serta Prasarana Perkeretaapian Pada Lintas Prabumulih - Tarahan berupa Emplasemen Dan Longsiding Rejosari, Longsiding Tanjung Karang, Stasiun Sukamenanti Dan Longsiding, Stasiun Candi Mas dan Longsiding, Stasiun Tanjung Rajo Dan Longsiding, serta Stasiun Way Pisang dan Longsiding Hasil Pembangunan PT Kereta Api Indonesia (Persero)	-
29.	Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Lintas Cibatubaru – Garut sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 117 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 50 Tahun 2020 tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Lintas Cibatubaru – Garut	-
30.	Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 160/SKDP/2017-Kec Surban tanggal 30 Oktober 2017, dimana diterangkan bahwa Perseroan berdomisili di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	-
31.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-321708-25082023-001 tanggal 25 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan
32.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-321708-25082023-002 tanggal 25 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan
33.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-321708-25082023-003 tanggal 25 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan
34.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-321708-25082023-004 tanggal 25 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan
35.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-321708-25082023-005 tanggal 25 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan
36.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-321708-25082023-006 tanggal 25 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan
37.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-321708-25082023-007 tanggal 25 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPSTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan

No.	Izin	Masa Berlaku
38.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-321708-28082023-001 tanggal 28 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan
39.	Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. SK-SLF-321708-28082023-002 tanggal 28 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkan
40.	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-321708-29082023-013 tanggal 29 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku sejak diterbitkan.
41.	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-321708-29082023-014 tanggal 29 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku sejak diterbitkan.
42.	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-321708-29082023-017 tanggal 29 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku sejak diterbitkan.
43.	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-321708-29082023-016 tanggal 29 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku sejak diterbitkan.
44.	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-321708-29082023-018 tanggal 29 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku sejak diterbitkan.
45.	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-321708-29082023-011 tanggal 29 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku sejak diterbitkan.
46.	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-321708-29082023-019 tanggal 29 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku sejak diterbitkan.
47.	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-321708-29082023-012 tanggal 29 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku sejak diterbitkan.
48.	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-321708-29082023-015 tanggal 29 Agustus 2023 diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku sejak diterbitkan.
49.	Persetujuan Bangunan Gedung No. SK-PBG-327312-01092023-002 tanggal 1 September 2023 diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Bandung Barat	Berlaku sejak diterbitkan.
50.	Tanda Daftar Penyelenggaraan Sistem Elektronik No. 000297.01/DJAI. PSE/06/2022 tanggal 8 Juni 2022	

4. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

4.1 Perjanjian Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Investasi
1.	Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perseroan tentang Penyelenggaraan Prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi No. HK.201/A.566/DJKA/12/17 dan No. KL.705/XII/10/KA-2017 tanggal 19 Desember 2017	Direktorat Jenderal Perkeretaapian memberikan Hak Penyelenggaraan kepada Perseroan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Hak Penyelenggaraan Prasarana meliputi: pembangunan Prasarana, pengoperasian Prasarana, perawatan Prasarana, dan perusahaan Prasarana. Hak Penyelenggaraan Prasarana meliputi: pengadaan Sarana, pengoperasian Sarana, perawatan Sarana, dan perusahaan Sarana. 	Masa Penyelenggaraan diberikan untuk jangka waktu 50 tahun sejak Tanggal Operasi yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Tanggal Operasi oleh Para Pihak yang dilakukan paling lambat 5 hari kerja sejak penerbitan Izin Operasi Sarana.	Nilai Investasi untuk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana adalah sebesar Rp29.901.436.301.432,00 sudah termasuk PPN, yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Aset Prasarana (jalur dan fasilitas Pengoperasian), aset Sarana, aset Perawatan Prasarana sebesar Rp25.732.307.500.000,00 (dua puluh lima triliun tujuh ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) sudah termasuk PPN; dan Aset Prasarana (17 stasiun) dan aset Depo sebesar Rp4.169.128.801.432,00 sudah termasuk PPN.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Investasi
2.	Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perseroan tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Bandar Udara Soekarno Hatta Melalui Kota Tangerang No. HK.201/A.263/DJKA/7/14 dan No. HK.222/VII/2/KA-2014 tanggal 10 Juli 2014	Direktorat Jenderal Perkeretaapian memberikan Hak Penyelenggaraan kepada Perseroan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Hak untuk merancang, membangun, membiayai, mengelola, mengoperasikan, mengusahakan, dan memelihara Prasarana KA Bandara; dan. Hak untuk membebankan biaya atau tarif sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam KA Bandara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 	Masa Penyelenggaraan diberikan untuk jangka waktu 30 tahun sejak ditetapkannya Tarif dan diketahui biaya Pengoperasian dan Perawatan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Bandara.	Nilai investasi yang akan dibiayai oleh Perseroan adalah untuk penyelenggaraan perkeretaapian KA Bandara sebesar Rp2.509.047.000.000,00 sebagaimana diuraikan dalam Dokumen Studi Kelayakan.
3.	Perjanjian Konsesi tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum pada Segmen I Wilayah Lahat sampai Kertapati di Provinsi Sumatera Selatan Nomor: HK.201/1/24/DJKA/2023 dan Nomor: KL.705/IX/26/KA-2023 tanggal 29 September 2023, oleh dan antara Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI dan Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Pembangunan jalur ganda antara Merapi – Muara Enim dan Tanjungenim Baru – Prabumulih; Pengembangan emplasemen stasiun Sukacinta, Stasiun Merapi, Stasiun Bandarsari, Stasiun Muaralawai, Stasiun Muaraenim, Stasiun Tanjungenim Baru, Stasiun Muara Gula, Stasiun Dipo Muara Gula, Stasiun Ujanmas, Stasiun Penanggiran, Stasiun Gunungmegang, Stasiun Tanjungterang, Stasiun Belimbingpendopo, Stasiun Talangpadang, Stasiun Tebatagung, Stasiun Niru, Stasiun Penimur, Stasiun Patihgalung, Stasiun X6, Stasiun Prabumulih, Stasiun Simpang, Stasiun Kramasan, Stasiun Kertapati. Pembangunan fasilitas operasi berupa sinyal elektrik dan intermediate block lintas antara Stasiun Tanjungenimbaru – Stasiun Prabumulih dan Stasiun Prabumulih – Stasiun Kertapati, sinyal elektrik di Stasiun Lahat, Stasiun Sukacinta, Stasiun Merapi, Stasiun Banjarsari, Stasiun Muaralawai, dan Stasiun Muaraenim, Centralized Traffic Control di Muaraenim untuk pelayanan pada lintas Stasiun Lahat – Muaraenim, Stasiun Tanjungenimbaru – Stasiun Prabumulih, dan Stasiun Prabumulih – Stasiun Kertapati. 	Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penyelenggaraan, yaitu 35 tahun sejak ditandatanganinya Berita Acara Tanggal Operasi.	Rp5.074.314.930.237,00 sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Investasi
		<ul style="list-style-type: none"> o Pembangunan jembatan kereta api yaitu jembatan (BH) 915 lintas Muaraenim – Muaralawai, dan jembatan (BH) 935 lintas Muaraenim – Muaralawai. o pengoperasian Prasarana, perawatan Prasarana, dan pengusaha Prasarana. • Serah terima Sarana Perkeretaapian. 		
4.	Perjanjian Konsesi Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Pada Lintas Pelayanan Stasiun Cibatu sampai Dengan Stasiun Garut No. HK.201/1/25/DJKA/2023 dan No. KL.705/IX/27/KA-2023 tanggal 29 September 2023, oleh dan antara Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI dan Perseroan	<p>Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum berupa jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum; 2) Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Umum; 3) Perawatan Prasarana Perkeretaapian Umum; 4) Pengusahaan Prasarana Perkeretaapian Umum 	Sejak Tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penyelenggaraan (45 tahun sejak ditandatanganinya Berita Acara Tanggal Operasi)	Rp352.628.113.140,00
5.	Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perseroan tentang Perjanjian Konsesi tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Di Stasiun Sukacinta dan Stasiun Serdang Dalam Rangka Mendukung Angkutan Batubara Nomor: HK.201/A.35/DJKA/20 dan Nomor: KL.705/II/5/KA-2020 tanggal 31 Januari 2020	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian meliputi: pembangunan Prasarana, pengoperasian Prasarana, perawatan Prasarana, dan pengusaha Prasarana. b. Serah terima Sarana Perkeretaapian. <p>Direktorat Jenderal Perkeretaapian memberikan Hak Penyelenggaraan kepada Perseroan yang meliputi hak untuk merancang, membangun, membiayai, mengelola, mengoperasikan, mengusahakan, dan memelihara Prasarana Perkeretaapian Umum pada Stasiun Sukacinta dan Stasiun Serdang.</p>	20 (dua puluh) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian	Rp260.397.980.000,00

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu	Nilai Investasi
6.	Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Perseroan tentang Perjanjian Konsesi tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Stasiun Bru di KM 36+700 s.d KM 37+200 antara Cicayur – parung Panjang Lintas Tanah Abang – Merak Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Nomor: HK.201/2/4/DJKA/2021 dan Nomor: KL.702/XII/20/KA-2021 tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Konsesi tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Stasiun Bru di KM 36+700 s.d KM 37+200 antara Cicayur – parung Panjang Lintas Tanah Abang – Merak Desa Jatake Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang Nomor: HK.201/2/3/DJKA/2022 dan Nomor: KL.702/VII/20/KA-2022 tanggal 29 Juli 2022	<p>a. Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian meliputi: pembangunan Prasarana, pengoperasian Prasarana, perawatan Prasarana, dan pengusaha Prasarana.</p> <p>b. Serah terima Sarana Perkeretaapian.</p> <p>Direktorat Jenderal Perkeretaapian memberikan Hak Penyelenggaraan kepada Perseroan yang meliputi hak untuk merancang, membangun, membiayai, mengelola, mengoperasikan, mengusahakan, dan memelihara Prasarana Perkeretaapian Umum.</p>	16 (enam belas) tahun sejak ditandatanganinya Berita Acara Tanggal Operasi	Rp68.185.000.000,00

4.2 Perjanjian Kredit

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
1.	Akta Perjanjian Kredit Investasi Pengadaan 144 Unit Lokomotif dan 2.400 Unit Gerbong (PPCW dan KKBW Kap 50 ton) No. 13 tanggal 9 Maret 2011, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Perubahan V Perjanjian Kredit Sindikasi No. 5 (13) tanggal 8 Juli 2021, dibuat di bawah tangan dengan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan	<p><u>Jumlah dan Tujuan</u> Rp4.024.835.000.000,00 untuk keperluan pembiayaan 85% dari biaya investasi untuk pembelian 144 unit lokomotif, 1.200 unit gerbong (KKBW) dengan kapasitas 50 ton, dan 1.200 unit gerbong datar (PPCW), dimana 15% dari biaya proyek tersebut dibiayai oleh modal Perseroan sendiri.</p> <p><u>Sifat</u> Menurun (aplofend)</p>	<p><u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> Kredit Tahap I: 25 Juli 2025</p> <p>Kredit Tahap II: 8 Agustus 2026</p> <p><u>Suku Bunga</u> JIBOR 3 bulan + margin sebesar 2,3%.</p> <p>Besaran bunga di-review setiap 3 bulanan.</p> <p><u>Jumlah Outstanding Per 19 Agustus 2024</u> Rp541.605.000.000,00</p>	<p>Selama hutang belum dinyatakan lunas oleh para kreditur melalui Agen Fasilitas, tanpa persetujuan tertulis dari para kreditur terlebih dahulu, Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman dalam bentuk apapun dari bank dan/atau lembaga keuangan non bank untuk keperluan proyek baru dengan jaminan di luar obyek pembiayaan yang diberikan berdasarkan perjanjian, kecuali menurut perhitungan para kreditur, Perseroan memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Debt Equity Ratio</i> (DER): maksimal sebesar 3 kali, cashflow operational positif • <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR): minimal 125% (EBITDA/bunga-angsuran pokok) • <i>Days receivable</i> serta <i>days inventory</i> masing-masing maksimal 90 hari dan 60 hari. <p>Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Mei 2024, Perseroan masih memenuhi seluruh rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian. Oleh karenanya, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Berkelanjutan II, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari para kreditur.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
2.	Perjanjian Penerusan Pinjaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT Kereta Api (Persero) atas Dana Pinjaman yang Berasal dari <i>Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Loan and Financing Agreement</i> tanggal 19 Januari 2005), untuk Pembiayaan Proyek Jabodetabek <i>Commuter Railways</i> No: SLA-1209/DP3/2007 tanggal 19 April 2007, dibuat di bawah tangan dengan meterai secukupnya, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No: S-786/MK.5/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Perubahan (Amandemen) Perjanjian Penerusan Pinjaman No. SLA-1209/DP3/2007 tanggal 19 April 2007, oleh dan antara Pemerintah dan Perseroan	<u>Jumlah dan Tujuan</u> Rp36.600.000.000,00 untuk pembiayaan proyek Jabodetabek <i>Commuter Railways</i>	<u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> 14 Januari 2045 <u>Suku Bunga</u> Tingkat bunga SBI jangka waktu 3 bulan rata-rata selama 6 bulan yang berakhir 3 bulan sebelum hari pertama periode bunga berlaku + 1% per tahun, termasuk jasa perbankan 0,25% per tahun. <u>Jumlah Outstanding Per 19 Agustus 2024</u> Rp22.916.000.000,00	Tidak terdapat pembatasan sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Berkelanjutan II.
3.	Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 6 November 2012, dibuat di hadapan Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Bandung, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Perubahan Kedelapan atas Perjanjian Kredit No. 374/Add-KCK/2022 ditandatangani terakhir kali tanggal 18 Oktober 2022, dibuat di bawah tangan dengan meterai secukupnya, oleh dan antara PT Bank Central Asia Tbk dan Perseroan	<u>Jumlah dan Tujuan</u> Kredit Multi: Rp1.000.000.000.000,00 Kredit Investasi I: Rp383.612.000.000,00 Kredit Investasi II: Rp281.277.000.000,00 Kredit Investasi III: Rp637.498.000.000,00 Untuk membiayai pembelian dan pengadaan 120 unit gerbong terbuka/ <i>coal-carrier wagon</i> (KKBW) dari Baotou Beifang Chuangyue Co., LTB dan PT Petrotama Internasional <u>Sifat</u> Tidak mengikat (<i>uncommitted</i>)	<u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> Kredit Investasi I: 25 September 2026 Kredit Investasi II: 25 September 2026 Kredit Investasi III: 4 Maret 2028 <u>Suku Bunga</u> JIBOR 3 + 2,1% atau Min. Suku Bunga LPS+2,5% <u>Jumlah Outstanding Per 19 Agustus 2024</u> 600KKBW & 600 PPCW: Rp157.439.000.000,00 1.213 PPCW: Rp239.765.000.000,00	Perseroan tidak diperkenankan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA, memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, termasuk untuk keperluan proyek baru dengan agunan selain obyek yang dibiayai dengan fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit, kecuali Perseroan dapat memenuhi perjanjian, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Debt to Equity Ratio</i> (DER) maksimal 3 kali • <i>Debt Service Coverage Ratio (EBITDA to Principal + Interest)</i> minimal 1,25 kali Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Mei 2024, Perseroan masih memenuhi seluruh rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian. Oleh karenanya, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Berkelanjutan II, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari para kreditor.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
4.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 15 tanggal 10 November 2014, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Perubahan IV Perjanjian Kredit Sindikasi No. 04 (15) tanggal 25 Juni 2021, dibuat di bawah tangan dengan meterai secukupnya, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan Perseroan	<u>Jumlah dan Tujuan</u> Rp2.800.589.568.000,00 untuk pengembangan prasarana jalur, stasiun, dan fasilitas operasi kereta api untuk proyek Kereta Api <i>Commuter</i> Jabodetabek 2013-2018 dan Kereta Api yang menuju Bandara Soekarno-Hatta	<u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> Kredit Investasi I: 10 Mei 2028 Kredit Investasi II: 25 Juni 2029 <u>Suku Bunga</u> JIBOR + margin 3% per annum <u>Jumlah Outstanding Per 19 Agustus 2024</u> Rp351.926.000.000,00	Selama Perseroan belum membayar lunas utang, Perseroan tidak diperkenankan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur sindikasi, memperoleh pinjaman, utang, atau fasilitas kredit baru, dan/atau fasilitas sewa guna usaha (<i>leasing</i>) maupun pembiayaan lainnya dari pihak lain, kecuali <i>Financial Covenant</i> yang disyaratkan di dalam Dokumen Transaksi terpenuhi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 1,25 kali • Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 3 kali • Kas operasional positif <p>Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Mei 2024, Perseroan masih memenuhi seluruh rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian. Oleh karenanya, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Berkelanjutan II, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari para kreditur, namun Perseroan diwajibkan untuk melakukan pemberitahuan kepada Bank BNI selaku Agen Fasilitas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal emisi Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Berkelanjutan II.</p> <p>Sehubungan dengan terlewatnya ketentuan financial covenant sebagaimana diatur di atas, Perseroan telah menerima Surat Pengesampingan (Waiver) atas Financial Covenants tersebut, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank BNI No. SSF/5.1/860 tanggal 28 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Tanggapan Para Kreditur atas Permohonan Pengecualian atas Financial Covenant PT Kereta Api Indonesia (Persero) Posisi 31 Desember 2023 yang menyatakan Perseroan telah memenuhi financial covenant yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit;

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
				<p>ii. Bank BRI No. B.121-SJK/SYN/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Tanggapan atas Permohonan Pengesampingan (Waiver) Financial Covenants Fasilitas Kredit Proyek KA Bandara Soekarno Hatta atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyatakan memberi persetujuan atas pengesampingan ketentuan pada Financial Covenants yaitu Debt Service Coverage Rasio (DSCR) untuk kebutuhan audit laporan keuangan Perseroan periode 31 Desember 2023; dan</p> <p>iii. Bank BCA No. 20038/GBK/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Tanggapan atas pemenuhan Financial Covenant PT Kereta Api Indonesia (Persero) posisi 31 Desember 2023 yang menyatakan berdasarkan formula financial covenant yang tercantum dalam PK yaitu EBITDA/(kewajiban pokok dan bunga) minimal 1,25x, tidak terdapat pelanggaran financial covenant sehingga tidak diperlukan pengecualian atas pemenuhan financial covenant PT KAI (Persero) tahun 2023.</p>
5.	Perjanjian Kredit tertanggal 15 Oktober 2014 Transaksi No. AP087413XX, dibuat di bawah tangan dengan meterai secukupnya, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 26 Januari 2015, dibuat di bawah tangan dengan meterai secukupnya, oleh dan antara HSBC Bank USA, National Association, Export-Import Bank of the United States, dan Perseroan	<u>Jumlah dan Tujuan</u> US\$94.285.480,00 untuk pembelian barang dan jasa dan pembayaran biaya resiko terkait.	<u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> 14 Maret 2033 <u>Suku Bunga</u> Ditentukan saat penarikan <u>Jumlah Outstanding Per 19 Agustus 2024</u> Rp1.830.247.290.000,00	Selama Perseroan belum membayar lunas utang, Perseroan tidak diperkenankan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur sindikasi, memperoleh pinjaman, utang, atau fasilitas kredit baru, dan/atau fasilitas sewa guna usaha (<i>leasing</i>) maupun pembiayaan lainnya dari pihak lain, kecuali <i>Financial Covenant</i> yang disyaratkan di dalam Dokumen Transaksi terpenuhi, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Current Ratio minimal 100%; • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 125%; • Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 300%.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
				<p>Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Mei 2024, Perseroan masih memenuhi seluruh rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian. Oleh karenanya, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Berkelanjutan II, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari para kreditur.</p>
6.	<p>Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 04 tanggal 20 April 2015, dibuat di hadapan Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 1 tanggal 8 November 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, dan Perseroan</p>	<p><u>Jumlah dan Tujuan</u> Rp1.449.096.152.000,00 untuk melaksanakan pengadaan dan pembangunan prasarana jalur, stasiun, dan fasilitas operasi kereta api untuk proyek Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta</p>	<p><u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> 31 Oktober 2030</p> <p><u>Suku Bunga</u> JIBOR + 3% per annum</p> <p><u>Jumlah Outstanding Per 19 Agustus 2024</u> Rp905.215.000.000,00</p>	<p>Selama Perseroan belum membayar lunas utang, Perseroan tidak diperkenankan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur sindikasi, memperoleh pinjaman, utang, atau fasilitas kredit baru, dan/atau fasilitas sewa guna usaha (<i>leasing</i>) maupun pembiayaan lainnya dari pihak lain, kecuali <i>Financial Covenant</i> yang disyaratkan di dalam Dokumen Transaksi terpenuhi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cashflow operational positif • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 1,25 kali • Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 3 kali <p>Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Mei 2024, Perseroan masih memenuhi seluruh rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian. Oleh karenanya, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Berkelanjutan II, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari para kreditur.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
				<p>Sehubungan dengan terlewatinya ketentuan financial covenant sebagaimana diatur di atas, Perseroan telah menerima Surat Pengesampingan (Waiver) atas Financial Covenants tersebut, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Bank BNI No. SSF/5.1/860 tanggal 28 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Tanggapan Para Kreditur atas Permohonan Pengecualian atas Financial Covenant PT Kereta Api Indonesia (Persero) Posisi 31 Desember 2023 yang menyatakan Perseroan telah memenuhi financial covenant yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit; ii. Bank BRI No. B.121-SJK/SYN/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Tanggapan atas Permohonan Pengesampingan (Waiver) Financial Covenants Fasilitas Kredit Proyek KA Bandara Soekarno Hatta atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyatakan memberi persetujuan atas pengesampingan ketentuan pada Financial Covenants yaitu Debt Service Coverage Ratio (DSCR) untuk kebutuhan audit laporan keuangan Perseroan periode 31 Desember 2023; dan iii. Bank BCA No. 20038/GBK/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Tanggapan atas pemenuhan Financial Covenant PT Kereta Api Indonesia (Persero) posisi 31 Desember 2023 yang menyatakan berdasarkan formula financial covenant yang tercantum dalam PK yaitu EBITDA/(kewajiban pokok dan bunga) minimal 1,25x, tidak terdapat pelanggaran financial covenant sehingga tidak diperlukan pengecualian atas pemenuhan financial covenant PT KAI (Persero) tahun 2023.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
7.	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 34 tanggal 27 Desember 2016, dibuat di hadapan Aliah, S.H., Notaris pengganti dari Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Addendum V (Kelima) atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 34 tanggal 27 Desember 2016, dibuat di hadapan Aliah, S.H., Notaris pengganti dari Julius Purnawan, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, dibuat di bawah tangan dengan meterai secukupnya pada tanggal 23 April 2021, oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), dan Perseroan	<p><u>Jumlah dan Tujuan</u> Rp1.200.000.000.000,00 untuk tujuan pengembangan usaha Perseroan.</p> <p><u>Sifat</u> Non-revolving</p>	<p><u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> 26 Desember 2026</p> <p><u>Suku Bunga</u> 8,40% per tahun</p> <p><u>Jumlah Outstanding Per 19 Agustus 2024</u> Rp546.796.000.000,00</p>	<p>Selama Perseroan belum membayar lunas utang, Perseroan tidak diperkenankan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur Sindikasi, dimana persetujuan Kreditur Sindikasi tersebut tidak dapat ditahan tanpa alasan yang wajar, memperoleh pinjaman, utang, atau fasilitas kredit baru, dan/atau fasilitas sewa guna usaha (<i>leasing</i>) maupun pembiayaan lainnya dari pihak lain, kecuali <i>Financial Covenant</i> yang disyaratkan di dalam Dokumen Transaksi terpenuhi, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Current Ratio minimal 100% • Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 125% • Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 300% <p>Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Mei 2024, Perseroan masih memenuhi seluruh rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian. Oleh karenanya, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Berkelanjutan II, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari para kreditur, namun Perseroan diwajibkan melakukan pemberitahuan kepada Bank Mandiri selaku agen fasilitas sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Berkelanjutan II. Sehubungan dengan terlewatnya ketentuan financial covenant sebagaimana diatur di atas, Perseroan telah menerima Surat Pengesampingan (Waiver) atas Financial Covenants tersebut, sebagai berikut:</p> <p>i. Bank BNI No. SSF/5.1/860 tanggal 28 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Tanggapan Para Kreditur atas Permohonan Pengecualian atas Financial Covenant PT Kereta Api Indonesia (Persero) Posisi 31 Desember 2023 yang menyatakan Perseroan telah memenuhi financial covenant yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit;</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
				ii. Bank BRI No. B.121-SJK/SYN/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Tanggapan atas Permohonan Pengesampingan (Waiver) Financial Covenants Fasilitas Kredit Proyek KA Bandara Soekarno Hatta atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyatakan memberi persetujuan atas pengesampingan ketentuan pada Financial Covenants yaitu Debt Service Coverage Rasio (DSCR) untuk kebutuhan audit laporan keuangan Perseroan periode 31 Desember 2023; dan
				iii. Bank BCA No. 20038/GBK/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Tanggapan atas pemenuhan Financial Covenant PT Kereta Api Indonesia (Persero) posisi 31 Desember 2023 yang menyatakan berdasarkan formula financial covenant yang tercantum dalam PK yaitu EBITDA/(kewajiban pokok dan bunga) minimal 1,25x, tidak terdapat pelanggaran financial covenant sehingga tidak diperlukan pengecualian atas pemenuhan financial covenant PT KAI (Persero) tahun 2023.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
8.	<p>Akta Perjanjian Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 22 tanggal 18 September 2020, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Addendum IV (Keempat) Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kredit Sindikasi No. 22 tanggal 18 September 2020, dibuat di bawah tangan dengan meterai secukupnya pada tanggal 20 Desember 2023, oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bank Pembangunan Daerah Papua, PT Bank Shinhan Indonesia, PT Bank KEB Hana Indonesia, PT Bank DKI, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT Bank Permata Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, dan Perseroan</p>	<p>Fasilitas kredit investasi bersifat <i>non-revolving</i> sebesar Rp16.790.567.000.000,00;</p> <p>Fasilitas kredit investasi bunga bersifat <i>non-revolving</i> sebesar Rp1.309.433.000.000,00; dan</p> <p>Fasilitas pinjaman transaksi khusus bersifat <i>revolving</i> sebesar Rp1.150.000.000.000,00</p>	<p><u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> 23 Maret 2033</p> <p><u>Suku Bunga</u> <i>Reference Rate + Margin</i></p>	<p>Selama Perseroan belum membayar lunas utang, Perseroan tidak diperkenankan, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur Sindikasi, memperoleh pinjaman, utang, atau fasilitas kredit baru, dan/atau fasilitas sewa guna usaha (<i>leasing</i>) maupun pembiayaan lainnya dari pihak lain, kecuali <i>Financial Covenant</i> yang disyaratkan di dalam Dokumen Transaksi terpenuhi, yakni Debt to Equity Ratio (DER) maksimal 500%.</p> <p>Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Mei 2024, Perseroan masih memenuhi seluruh rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian. Oleh karenanya, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Berkelanjutan II, Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari para kreditur.</p> <p>Sehubungan dengan terlewatinya ketentuan financial covenant sebagaimana diatur di atas, Perseroan telah menerima Surat Pengesampingan (Waiver) atas Financial Covenants tersebut, sebagai berikut:</p> <p>i. Bank BNI No. SSF/5.1/860 tanggal 28 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Tanggapan Para Kreditur atas Permohonan Pengecualian atas Financial Covenant PT Kereta Api Indonesia (Persero) Posisi 31 Desember 2023 yang menyatakan Perseroan telah memenuhi financial covenant yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Kredit;</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
				<p>ii. Bank BRI No. B.121-SJK/SYN/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal Tanggapan atas Permohonan Pengesampingan (Waiver) Financial Covenants Fasilitas Kredit Proyek KA Bandara Soekarno Hatta atas nama PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menyatakan memberi persetujuan atas pengesampingan ketentuan pada Financial Covenants yaitu Debt Service Coverage Rasio (DSCR) untuk kebutuhan audit laporan keuangan Perseroan periode 31 Desember 2023; dan</p> <p>iii. Bank BCA No. 20038/GBK/2024 tanggal 5 Februari 2024 perihal Tanggapan atas pemenuhan Financial Covenant PT Kereta Api Indonesia (Persero) posisi 31 Desember 2023 yang menyatakan berdasarkan formula financial covenant yang tercantum dalam PK yaitu EBITDA/(kewajiban pokok dan bunga) minimal 1,25x, tidak terdapat pelanggaran financial covenant sehingga tidak diperlukan pengecualian atas pemenuhan financial covenant PT KAI (Persero) tahun 2023.</p>
9.	Perjanjian Fasilitas Perbankan tertanggal 29 Desember 2023, dibuat di bawah tangan dengan meterai secukupnya, oleh dan antara China Development Bank dan Perseroan	<p>Total Komitmen Fasilitas A berarti keseluruhan dari Komitmen Fasilitas A, yaitu US\$325.620.000 pada tanggal Perjanjian ini.</p> <p>Total Komitmen Fasilitas B berarti keseluruhan dari Komitmen Fasilitas B, yaitu setara dengan RMB sebesar US\$217,080,000</p>	<p><u>Suku Bunga</u> Fasilitas A: 3,20% per tahun Fasilitas B: 3,10% per tahun</p> <p><u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> 540 (lima ratus empat puluh) bulan setelah tanggal penggunaan Pertama yaitu akan berakhir pada tanggal 25 April 2069.</p>	Penerima Pinjaman tidak akan (dan akan memastikan bahwa tidak ada anggota lain di Grup yang akan) menimbulkan atau mengizinkan untuk tetap terutang Utang Finansial apa pun, antara lain, jumlah apa pun yang dikumpulkan berdasarkan setiap fasilitas pembelian surat utang (note) atau penerbitan obligasi, surat utang (note), debenture, saham pinjaman atau instrumen serupa apa pun, jika hal ini mengakibatkan persyaratan apa pun dari Kalusul 18 (Janji Finansial) tidak dipenuhi.

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
				Janji Finansial yang harus dipenuhi, antara lain, kondisi keuangan Penerima Pinjaman dimana berkenaan dengan setiap Periode Yang Relevan, Total Kewajiban dari Grup tidak boleh melebihi 85 persen dari Total Aset Grup.
10.	Akta Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Dalam Bentuk Pinjaman Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional No. 17 tanggal 30 November 2020, dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Perjanjian Perubahan Pertama terhadap Perjanjian Pemberian Dana Investasi Perj-076/SMI/0623, dibuat di bawah tangan dengan meterai secukupnya, oleh dan antara PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("PT SMI") dan Perseroan	<p><u>Jumlah dan Tujuan</u> Rp3.500.000.000.000,00 mendukung likuiditas dan solvabilitas Perseroan, khususnya digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional (tidak termasuk biaya konsultan yang digunakan oleh Perseroan terkait dengan persiapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pencairan dana investasi bagi Perseroan) Perseroan yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</p>	<p><u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> 29 November 2030</p> <p><u>Suku Bunga</u> Repo Rate - 100 bps</p> <p><u>Jumlah Outstanding Per 19 Agustus 2024</u> Rp2.843.750.000.000,00</p>	Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari PT SMI, namun Perseroan diwajibkan untuk memberitahukan kepada PT SMI sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dan Sukuk Berkelanjutan II.
11.	Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek No: CRO.KP/0083/KJP/2017 Akta No. 03 tanggal 15 Juni 2017, dibuat di hadapan Doktor Darwin Ginting, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Bandung Barat, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum VII (Ketujuh) Perjanjian Kredit Jangka Pendek Nomor: CRO.KP/0083/KJP/2017 tanggal 7 Juni 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dan Perseroan	<p><u>Jumlah dan Tujuan</u> Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka operasional usaha.</p> <p><u>Sifat</u> <i>Uncommitted, advised, dan revolving</i></p>	<p><u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> 14 Juni 2025</p> <p><u>Suku Bunga</u> Ditetapkan pada saat penarikan yakni sebesar 6,50% p.a</p> <p><u>Jumlah Outstanding Per 19 Agustus 2024</u> Rp1.600.000.000,00</p>	<p>Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2025.</p> <p>Selama seluruh utang yang timbul dan wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit belum dinyatakan lunas oleh Mandiri, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Mandiri, Perseroan tidak diperbolehkan (<i>negative covenant</i>) untuk memperoleh pinjaman utang atau fasilitas kredit baru dan/atau fasilitas sewa guna usaha (<i>leasing</i>) maupun pembiayaan lainnya dari pihak lain, kecuali atas perolehan pinjaman, utang atau fasilitas kredit baru dan/atau fasilitas sewa guna usaha (<i>leasing</i>) maupun pembiayaan lainnya dari pihak lain tersebut, <i>Financial Covenant (Casflow</i> operasional positif, DER (<i>Total debt (interest bearing/Equity) ≤300%, DSCR ≥125%</i>) yang disyaratkan tetap terpenuhi.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
				<p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, mempertimbangkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Audited per 31 Mei 2024 yang diaudit dan diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, financial covenant sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian masih terpenuhi oleh Perseroan, maka Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.</p>
12.	<p>Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas <i>Non Cash Loan</i> PT Kereta Api Indonesia (Persero) No: CRO.KP/346/NCL/2019 Akta No. 08 tanggal 5 September 2019, dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Addendum VI (Keenam) Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan PT Kereta Api Nomor: CRO.KP/346/NCL/2019 tanggal 7 Juni 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dan Perseroan</p>	<p><u>Limit Kredit</u></p> <p>a. Fasilitas Non Cash Loan Tranche I Limit Fasilitas Non Cash Loan Tranche I sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), (switchable dengan Fasilitas Non Cash Loan Tranche II);</p> <p>b. Fasilitas Non Cash Loan Tranche II Limit Fasilitas Non Cash Loan Tranche II sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), (switchable dengan Fasilitas Non Cash Loan Tranche II).</p> <p><u>Sifat dan Tujuan</u></p> <p>a. Fasilitas Non Cash Loan Tranche I dan Fasilitas Non Cash Loan Tranche II dalam Perjanjian bersifat uncommitted, advised, dan revolving.</p> <p>b. Perjanjian ini dibuat sehubungan dengan fasilitas kredit oleh Bank Mandiri kepada Perseroan untuk keperluan sebagai berikut:</p>	<p><u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> 14 Juni 2025</p> <p><u>Suku Bunga</u> Bank Garansi sebesar 0,15% dan LC/SKBDN sebesar 0,015%</p> <p><u>Jumlah Outstanding Per 19 Agustus 2024</u> Rp1.600.000.000,00</p>	<p>Jangka waktu Fasilitas <i>Non Cash Loan</i> Tranche I dan Fasilitas <i>Non Cash Loan</i> Tranche II berlaku sampai dengan tanggal 14 Juni 2025.</p> <p>Selama kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari Mandiri, Perseroan tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman, utang atau fasilitas kredit baru dan/ atau fasilitas sewa guna usaha (<i>leasing</i>) maupun pembiayaan lainnya dari pihak lain, kecuali atas perolehan pinjaman, utang atau fasilitas kredit baru dan/ atau fasilitas sewa guna usaha (<i>leasing</i>) maupun pembiayaan lainnya dari pihak lain tersebut, <i>Financial Covenant (Casflow</i> operasional positif, DER (<i>Total debt (interest bearing/Equity)</i> ≤300%, DSCR ≥125%) yang disyaratkan tetap terpenuhi.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
		<ul style="list-style-type: none"> i. Fasilitas Non Cash Loan Tranche I <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembukaan Letter of Credit/ Surat Kredit berdokumen Dalam Negeri ("LC/SKBDN") sebagai sarana pembelian gerbong, kereta, dan pembelian lainnya yang membutuhkan penerbitan LC/ SKBDN. 2) Bank Garansi ("BG"). 3) Fasilitas hanya dapat dipergunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dalam KAI Group sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a) PT Kereta Commuter Indonesia ("KCI") b) PT Reska Multi Usaha ("RMU") c) PT Kereta Api Logistik ("KALOG") d) PT Kereta Api Properti Manajemen ("KAPM") e) PT Kereta Api Wisata ("KAWIS") ii. Fasilitas Non Cash Loan Tranche II <ul style="list-style-type: none"> 1) LC/SKBDN sebagai sarana pembelian gerbong, kereta atau lokomotif, sparepart, dan pembelian lainnya yang membutuhkan penerbitan LC/SKBDN untuk Proyek Pengadaan Sarana Sumatera Bagian Selatan. 2) Bank Garansi untuk Proyek Pengadaan Sarana Sumatera Bagian Selatan. 		<p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, mempertimbangkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Audited per 31 Mei 2024 yang diaudit dan diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, financial covenant sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian masih terpenuhi oleh Perseroan, maka Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
13.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 10 tanggal 13 April 2010, dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Addendum ke-17 Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 06 tanggal 13 September 2024, dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Perseroan	<p><u>Jumlah dan Tujuan</u> fasilitas kredit kepada Perseroan berupa Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek dalam bentuk Pseudo Rekening Koran (R/K), dengan Plafond Kredit sebesar Rp1.500.000.000.000,00</p> <p><u>Sifat</u> <i>Uncommitted Line</i></p>	<p><u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> 13 Juli 2025</p> <p><u>Suku Bunga</u> Kredit Modal Kerja: 9,00% per annum Kredit Jangka Pendek: Sesuai rekomendasi Bank berdasarkan hasil negosiasi</p> <p><u>Sisa Plafond Per 19 Agustus 2024</u> Rp1.500.000.000,00</p>	<p>Tanpa terlebih memperoleh ijin secara tertulis dari BRI, Perseroan tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas untuk menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya yang menyebabkan rasio melebihi DER 500%.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, mempertimbangkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Audited per 31 Mei 2024 yang diaudit dan diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, financial covenant sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian masih terpenuhi oleh Perseroan, maka Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari BRI terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.</p>
14.	Akta Perjanjian Fasilitas Penanguhan Jaminan Impor (PJI) No. 11 tanggal 13 April 2010, dibuat di hadapan Vestina Ria Kartika, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Addendum Ke-16 Perjanjian Fasilitas <i>Import Line</i> PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. 07 tanggal 13 September 2024, dibuat di hadapan Fessy Farizqoh Alwi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, oleh dan antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Perseroan	<p>BRI dengan ini setuju untuk memberikan kepada Perseroan fasilitas kredit fasilitas Non Cash Loan, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Plafond untuk Fasilitas Bank Garansi sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). Plafond untuk Fasilitas LC/SKBDN Line sebesar Rp3.300.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus miliar Rupiah). Plafond untuk Fasilitas KMK Buyer sebesar Rp3.300.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus miliar Rupiah). <p>Total penggunaan Bank Garansi dan KMK Buyer/ LC/SKBDN Line tidak boleh melebihi plafond sebesar Rp3.300.000.000.000,00 (tiga triliun tiga ratus miliar Rupiah).</p> <p><u>Sifat:</u> <i>interchangeable</i></p>	<p><u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> 13 Juli 2025</p> <p><u>Suku Bunga</u> LC/SKBDN Line: 5,00% untuk valuta asing dan 8,50% untuk Rupiah Kredit Modal Kerja Buyer: 9% setiap tanggal 23</p> <p><u>Sisa Plafond Per 19 Agustus 2024</u> Rp1.500.000.000,00</p>	<p>Tanpa terlebih memperoleh ijin secara tertulis dari BRI, Perseroan tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas untuk menerima pinjaman baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya yang menyebabkan rasio melebihi DER 500%.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, mempertimbangkan bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Audited per 31 Mei 2024 yang diaudit dan diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, financial covenant sebagaimana dipersyaratkan dalam Perjanjian masih terpenuhi oleh Perseroan, maka Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari BRI terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
15.	Perjanjian Kredit KMK Line No. 43 tanggal 25 Februari 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helimi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Modal Kerja Line No. (16) 43 Maksimum Rp200.000.000.000 tanggal 28 Februari 2024, dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dan Perseroan	<p><u>Jumlah dan Tujuan</u> Rp200.000.000.000,00 untuk tambahan modal kerja operasional Perseroan.</p> <p><u>Sifat</u> <i>Revolving</i></p>	<p><u>Jangka Waktu Jatuh</u> <u>Tempo</u> 24 Februari 2025</p> <p><u>Suku Bunga</u> 8,50% per annum</p> <p><u>Jumlah Outstanding Per 19 Agustus 2024</u> Rp200.000.000.000,00</p>	<p>Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2025.</p> <p>Perseroan harus memberitahukan kepada BNI jika menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun dari LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) serta kewajiban lainnya. Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BNI setelah menerima dana sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.</p>
16.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. 42 tanggal 25 Februari 2010, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Tidak Langsung No. (8) 001/BIN/PPFKTL/2017 Maksimum Rp1.700.000.000.000 tanggal 28 Februari 2024, dibuat di bawah tangan dan bermetrai cukup, oleh dan antara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") dan Perseroan	<p><u>Jumlah dan Tujuan</u> Rp1.700.000.000.000,00 untuk pengadaan sarana gerak/spareparts usaha transportasi kereta api yang dibeli di dalam maupun luar negeri serta jaminan/garansi terkait dengan kontrak/proyek yang diikuti/diterima serta kebutuhan operasional lainnya oleh Perseroan.</p> <p><u>Sifat</u> <i>Plafond/Uncommitted</i></p>	<p><u>Jangka Waktu Jatuh</u> <u>Tempo</u> 24 Februari 2025</p> <p><u>Jumlah Outstanding Per 19 Agustus 2024</u> Rp200.000.000.000,00</p>	<p>Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 24 Februari 2025.</p> <p>Perseroan harus memberitahukan kepada BNI jika menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun dari LKBB (Lembaga Keuangan Bukan Bank) serta kewajiban lainnya.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BNI setelah menerima dana sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.</p>

No.	Nama Perjanjian	Isi Pokok Perjanjian	Jangka Waktu, Suku Bunga, dan Jumlah Outstanding	Keterangan
17.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No HSBC: JAK/210105/U/200704 No KAI: KL.705/III/4/KA-2021, dibuat di bawah tangan dengan meterai secukupnya, yang terakhir kali diubah dengan Perubahan 1 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No HSBC: JAK/211460/U/220511 No KAI: KL.705/IX/52/KA-2022, dibuat di bawah tangan dengan meterai secukupnya, oleh dan antara PT Bank HSBC Indonesia dan Perseroan	<p><u>Jumlah dan Tujuan</u> Rp2.000.000.000.000,00: Pinjaman Berulang: Rp2.000.000.000.000,00 untuk membiayai kebutuhan operasional Perseroan; Pinjaman Impor terhadap Rekan Tagihan: Rp700.000.000.000,00 untuk membiayai pembelian luar dan/atau dalam negeri; Pinjaman Impor: Rp700.000.000.000,00 untuk membiayai pembelian luar dan/atau dalam negeri; Pinjaman Ekspor: Rp700.000.000.000,00 untuk membiayai piutang Perseroan dari pembeli.</p> <p><u>Sifat</u> <i>Uncommitted</i></p>	<p><u>Jangka Waktu Jatuh Tempo</u> Terus berlaku kecuali HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan Perseroan selaku Debitur dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lain yang berkaitan dengannya.</p> <p><u>Sisa Plafond Per 19 Agustus 2024</u> Rp2.400.000.000.000,00</p>	<p>Selama seluruh utang yang timbul dan wajib dibayarkan oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Perseroan tidak diperbolehkan untuk memperoleh pinjaman utang atau fasilitas kredit baru dan/atau fasilitas guna atau pembiayaan lainnya dari lembaga keuangan/ bank lainnya, kecuali apabila Perseroan tetap memenuhi <i>financial covenant</i> (CR lebih besar atau sama dengan 100%, DER lebih kecil atau sama dengan 300%, DSCR lebih besar atau sama dengan 150%) yang disyaratkan terpenuhi.</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kredit di atas, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari HSBC terkait Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.</p>

4.3 Perjanjian-Perjanjian Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk dengan Pihak yang Tidak

No.	Nama Perjanjian	Nilai Obligasi	Penggunaan Dana
Penawaran Umum Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017			
1.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 No. 18 tanggal 8 September 2017, dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., Candidat Notaris, Notaris Pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 No. 3 tanggal 6 November 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank Mega Tbk. (Wali Amanat) dan Perseroan (Emiten)	<p>Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.000.000.000.000,00, yang terdiri dari Seri Obligasi, dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00. Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00. 	<p>Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sekitar 55% akan digunakan untuk pembangunan Prasarana perkeretaapian Bandara Soekarno Hatta diantaranya pembangunan sebagian jalan rel antara Stasiun Batu Ceper Basoetta, persinyalan, penyelesaian pekerjaan jembatan, pembangunan stasiun yang belum selesai dan pengadaan lahan. Sekitar 45% akan digunakan untuk pengadaan kereta, antara lain: kereta penumpang kelas eksekutif dan ekonomi, kereta makan serta kereta pembangkit yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penumpang dan optimalisasi pendapatan Kereta Api penumpang yang akan beroperasi di wilayah operasional Emiten.

No.	Nama Perjanjian	Nilai Obligasi	Penggunaan Dana
Penawaran Umum Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019			
2.	<p>Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 No. 16 tanggal 18 September 2019, dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 No. 3 tanggal 14 Oktober 2019, dibuat di hadapan Dina Chozie, S.H., pengganti dari Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta; dan</p> <p>Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 No. 40 tanggal 28 November 2019, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank Mega Tbk. (Wali Amanat) dan Perseroan (Emiten)</p>	<p>Emiten dengan ini mengakui bahwa Emiten benar-benar dan secara sah berutang kepada Pemegang Obligasi yang diwakili oleh Wali Amanat.</p>	<p>Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman pada PT Bank HSBC Indonesia (tidak terafiliasi). Sisanya akan digunakan untuk pengadaan sarana baru dan pembaruan sarana
Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022			
3.	<p>Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 31 tanggal 27 April 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 No. 36 tanggal 25 Juli 2022, oleh dan antara PT Bank Mega Tbk. (Wali Amanat) dan Perseroan (Emiten)</p>	<p>Penunjukan Wali Amanat oleh Perseroan untuk menjalankan tugas selaku wali amanat sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 yang seluruhnya berjumlah pokok sebesar Rp2.200.000.000.000,00 dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang terdiri dari beberapa tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk Obligasi Tahap I (Obligasi Berkelanjutan I) dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.500.000.000.000,00 dengan jangka waktu terlama 7 tahun sejak Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> o Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp634.000.000.000,00 dengan jangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga sebesar 7,10% dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A. o Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp866.000.000.000,00 dengan jangka waktu 7 tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga sebesar 8,0% dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B. 	<p>Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk- Jjarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekitar 78% (tujuh puluh delapan persen) akan digunakan untuk pengembangan angkutan perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan, yang berupa prasarana perkeretaapian. Sisanya akan digunakan untuk pengadaan sarana Kereta Api Bandara International Adi Soemarmo yang berupa sarana trainset KRDE (Kereta Rel Diesel) yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan dana internal dan /atau dana dari pihak ketiga

No.	Nama Perjanjian	Nilai Obligasi	Penggunaan Dana
		<ul style="list-style-type: none"> Obligasi Tahap II dan/atau Tahap Selanjutnya (jika ada) akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan dikurangi dengan jumlah Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022, yang kepastian jumlah setiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam perjanjian perwaliamanatan tahap II dan/atau untuk tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan perjanjian perwaliamanatan masing-masing tahap. 	

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024

4.	Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 No. 12 tanggal 24 Juli 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank Mega Tbk. (Wali Amanat) dan Perseroan (Emiten)	<p>Penunjukan Wali Amanat oleh Perseroan untuk menjalankan tugas selaku wali amanat sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp700.000.000.000,00 dengan jangka waktu terlama 7 tahun sejak Tanggal Emisi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp67.000.000.000,00 dengan jangka waktu 3 tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga sebesar 6,90% per tahun dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A. Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp295.500.000.000,00 dengan jangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga sebesar 7,20% per tahun dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B. Obligasi Seri C dengan jumlah pokok sebesar Rp337.500.000.000,00 dengan jangka waktu 7 tahun sejak Tanggal Emisi, dengan tingkat bunga sebesar 7,30% per tahun dan pembayaran Obligasi Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi Seri C pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri C. 	<p>Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Emiten untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebesar Rp500.000.000.000,00 digunakan untuk sebagian pembayaran atas pengadaan 54 Lokomotif untuk pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan merujuk pada perjanjian No KL.702/II/15/KA-2024 tertanggal 15 Februari 2024 seperti yang telah diungkapkan pada Informasi Tambahan Bab VII.4 Transaksi dan Perjanjian Material dengan Pihak Ketiga. Sisanya digunakan untuk namun tidak terbatas atas sebagian penyelesaian pada pekerjaan prasarana seperti penataan Emplasemen stasiun kramasan, pekerjaan prasarana lainnya seperti pembangunan/penataan stasiun, serta <i>Double Track</i> dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan
----	---	--	--

No.	Nama Perjanjian	Nilai Obligasi	Penggunaan Dana
5.	<p>Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 Nomor 15 tanggal 24 Juli 2024 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara PT Bank Mega Tbk. (Wali Amanat) dan Perseroan (Emiten)</p>	<p>Penunjukan Wali Amanat oleh Perseroan untuk menjalankan tugas selaku wali amanat sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 kepada masyarakat, yang dikeluarkan oleh Emiten kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Penawaran Umum Tahap II/tahap terakhir dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan dalam jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp300.000.000.000 yang terdiri dari Seri Sukuk Ijarah dengan jangka waktu terlama 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sukuk Ijarah Seri A dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp62.350.000.000 dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.312.500.000,00 per tahun atau sebesar Rp69.000.000 per tahun dari Sisa Imbalan Ijarah Seri A dan pembayaran Sukuk Ijarah Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah untuk Sukuk Ijarah Seri A. • Sukuk Ijarah Seri B dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp127.270.000.000 dengan jangka waktu 5 tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp9.163.440.000,00 per tahun atau sebesar Rp72.000.000 per tahun per Rp1.000.000.000 dari Sisa Imbalan Ijarah Seri B dan pembayaran Sukuk Ijarah Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah untuk Sukuk Ijarah Seri B. • Sukuk Ijarah Seri C dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp110.230.000.000 dengan jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp8.046.790.000,00 per tahun atau sebesar Rp73.000.000 per tahun per Rp1.000.000.000 per tahun dari Sisa Imbalan Ijarah Seri C dan pembayaran Sukuk Ijarah Seri C tersebut akan dilakukan secara penuh atau bullet payment sebesar 100% dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah untuk Sukuk Ijarah Seri C. 	<p>Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk pengadaan Prasarana dan Sarana Lainnya dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan.</p>

4.4 Perjanjian Material Lainnya

No.	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian	Nilai dan Jangka Waktu
Perjanjian Kerja Sama Terkait Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi			
1.	Perjanjian Kerja Sama Integrasi Aksesibilitas Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi No. 112- 1/10/ADCP/II/2024 dan No. 031-2/2024/018 tanggal 4 Maret 2024, oleh dan antara PT Adhi Commuter Properti Tbk, Perseroan, dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk	<p>Kerja sama antara para pihak yang mencakup:</p> <p>Kerja Sama Aksesibilitas, yang meliputi pembangunan aksesibilitas ke Stasiun LRT Jabodebek oleh ADCP serta komersialisasi terhadap Aksesibilitas yang dapat berupa pemasangan iklan, brand activation dan/atau komersialisasi lain yang berada dalam area Aksesibilitas dimana KAI akan mendapatkan marketing fee atas komersialisasi terhadap Aksesibilitas yang direferensikan oleh KAI atau diperoleh dari KAI;</p> <p>Proyek Kerja Sama Aksesibilitas meliputi proyek yang sudah dimiliki dan dikembangkan oleh ADCP, yang meliputi: RT City Bekasi – Green Avenue; LRT City Cikunir; LRT City Jatibening; LRT City Ciracas; LRT City Cibubur;</p> <p>Kerja Sama Lanjutan, yang meliputi kerja sama sehubungan dengan: Kerja Sama Non- Transit Oriented Development, Kerja Sama Transit Oriented Development, sesuai dengan peraturan yang berlaku yang akan dituangkan dalam Perjanjian Lanjutan</p> <p>Proyek yang Kerja Sama Lanjutan meliputi proyek yang sudah dan/atau akan dimiliki dikembangkan oleh ADCP yang berada pada Kawasan yang berada berdekatan dengan stasiun LRT Jabodebek antara lain sebagai berikut: LRT City Bekasi - Green Avenue; LRT City Cikunir; LRT City Jatibening; LRT City Ciracas; LRT City Cibubur; dan LRT City MTH</p>	<p>Nilai</p> <p>Nilai kerja sama dalam Perjanjian ini akan ditentukan dan diatur kemudian dalam masing-masing Perjanjian Lanjutan yang relevan.</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Efektif Perjanjian sampai dengan 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan diserahkannya aksesibilitas ke Stasiun LRT Jabodebek yang telah dibangun oleh ADCP terkait kepada pemerintah daerah terkait.</p>
2.	Perjanjian Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran atas Pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor Depok dan Bekasi No. KL.702/XII/42/KA-2017 tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum No2 No. KL.702/VIII/13/KA-2023 tanggal 14 Agustus 2023, oleh dan antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan Perseroan	<p>Pengaturan tata cara pembayaran kepada Pihak Kedua oleh Pihak Pertama melalui Pihak Ketiga atas pembangunan: prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor Depok dan Bekasi yang meliputi jalur (termasuk konstruksi jalur layang), stasiun dan fasilitas operasi; dan fasilitas perawatan sarana yang menunjang pelaksanaan perawatan sarana, yang meliputi fungsi sebagai bangunan depo dan bangunan balai yasa (heavy maintenance building)</p>	<p>Nilai</p> <p>Rp23.310.373.268.439,80</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Berlaku hingga Para Pihak menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.</p>

No.	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian	Nilai dan Jangka Waktu
Perjanjian dengan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek			
3.	Perjanjian Pemberian Dana Pinjaman Pemegang Saham No. KL.705/III/2/KA-2023 dan No. Con/058/BOD- MIT/ XII/2023 tanggal 1 Maret 2023, oleh dan antara Perseroan (Pihak Pertama) dan PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (Pihak Kedua)	Pedoman pemberian pinjaman dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk pembayaran kewajiban-kewajiban Pihak Kedua dalam memenuhi kewajiban usaha sesuai anggaran biaya yang telah disetujui oleh pemegang saham Pihak Kedua dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk Anggaran Dasar masing-masing Pihak.	<p>Nilai Pinjaman senilai Rp8.183.000.000,00 dengan bunga sejumlah 6,65% per tahun.</p> <p>Jangka Waktu Berlaku sejak ditandatangani sampai seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dipenuhi.</p> <p>Jangka waktu pelunasan pinjaman dan bunga oleh Pihak Kedua paling lambat tanggal 28 Desember 2024.</p>
Perjanjian sehubungan dengan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (“KCJB”)			
4.	Perjanjian Uang Muka Setoran Modal No.KAI KL.705/III/5/KA-2023 dan No. 02/KONTRAK-PSBI/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	<p>Pemberian tambahan modal oleh KAI di PSBI sebesar Rp2.030.804.000.000,00 yang untuk sementara akan dicatat sebagai Uang Muka Setoran Modal (“UMSM”).</p> <p>UMSM akan digunakan PSBI untuk tambahan modal PSBI di PT Kereta Cepat Indonesia China (“KCIC”) dalam rangka pemenuhan kewajiban setoran modal tambahan PSBI kepada KCIC atas kondisi funding shortfall di KCIC akibat adanya kenaikan dan/atau perubahan biaya proyek KCJB sesuai surat cost overrun.</p>	<p>Nilai Rp2.030.804.000.000,00</p> <p>Jangka Waktu Berlaku sejak ditandatangani</p>
5.	Perjanjian Uang Muka Setoran Modal No. KAI KL.702/IV/8/KA-2023 dan No. 03/KONTRAK-PSBI/IV/2023 tanggal 23 Mei 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	<p>Pemberian tambahan modal oleh KAI di PSBI sebesar Rp14.630.310.586,00 yang untuk sementara akan dicatat sebagai Uang Muka Setoran Modal (“UMSM”).</p> <p>UMSM akan digunakan PSBI sebagai pemenuhan biaya usaha PSBI tahun 2022.</p>	<p>Nilai Rp14.630.310.586,00</p> <p>Jangka Waktu Berlaku sejak ditandatangani</p>
6.	Perjanjian Uang Muka Setoran Modal No. KAI KL.705/VI/13/KA-2023 dan No. 04/ KONTRAK-PSBI/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	<p>Pemberian tambahan modal oleh KAI di PSBI sebesar Rp682.619.000.000,00 yang untuk sementara akan dicatat sebagai Uang Muka Setoran Modal (“UMSM”).</p> <p>UMSM akan digunakan PSBI untuk pemenuhan kewajiban pimpinan konsorsium BUMN akibat kenaikan dan/ atau perubahan (cost overrun) proyek KCJB.</p>	<p>Nilai Rp682.619.000.000,00</p> <p>Jangka Waktu Berlaku sejak ditandatangani</p>
7.	Perjanjian Uang Muka Setoran Modal No. KAI KL.705/III/7/KA-2024 dan No. 05/KONTRAK-PSBI/III/2024 tanggal 13 Maret 2024, oleh dan antara Perseroan dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	<p>Pemberian tambahan modal oleh KAI di PSBI sebesar Rp15.199.072.703,00 yang untuk sementara akan dicatat sebagai Uang Muka Setoran Modal (“UMSM”).</p> <p>UMSM akan digunakan PSBI sebagai pemenuhan biaya usaha PSBI tahun 2023.</p>	<p>Nilai Rp15.199.072.703,00</p> <p>Jangka Waktu Berlaku sejak ditandatangani</p>

No.	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian	Nilai dan Jangka Waktu
8.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dalam Rangka Pembiayaan Kelebihan Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung No. KL.702/I/33/KA-2024 dan No. 02/Kontrak-PBSI/I/2024 tanggal 31 Januari 2024, oleh dan antara Perseroan dan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Pemberi Pinjaman menyediakan kepada Penerima Pinjaman: Fasilitas pinjaman berjangka Dolar AS dalam keseluruhan jumlah yang sama dengan Total Komitmen Fasilitas A (USD 325.620.000); Fasilitas pinjaman berjangka RMB dalam keseluruhan jumlah yang sama dengan Total Komitmen Fasilitas B (jumlah RMB yang setara dengan USD 217.080.000). Penerima Pinjaman akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya untuk pendanaan kepada PT Kereta Cepat Indonesia China melalui Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PSBI dengan cara yang sesuai dengan Dokumen-Dokumen Pembiayaan dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mendanai Jumlah Kelebihan Biaya.	Nilai USD 542.700.000 Jangka Waktu Sampai dengan berakhirnya Periode Ketersediaan
9.	Perjanjian Kerja Sama Konsorsium Penyelenggaraan Pengoperasian dan Perawatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung No. KAI: KI.705/III/3/KA-2023 dan No. TJEC: ZXJ20230ZH018 tertanggal 20 Februari 2023, oleh dan antara Perseroan dan Tianyou Jingtie Engineering Consulting Co., Ltd.	Melakukan kerja sama dengan nama Operation and Maintenance Consortium Kereta Cepat Jakarta-Bandung ("O&M-KCJB") untuk menyediakan layanan pengoperasian dan perawatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung ("KCJB"). Perjanjian ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya para pihak dan untuk menyelenggarakan persiapan dan pelaksanaan O&M KCJB yang mengutamakan keselamatan. Kerja sama ini meliputi: Penyediaan jasa konsultasi teknis O&M KCJB Penyediaan layanan teknis O&M KCJB Pengurusan perizinan sehubungan dengan penyediaan SDM untuk O&M KCJB Partisipasi dan menyelenggarakan pelatihan bagi pekerja Indonesia Penyediaan tenaga penerjemah	Jangka Waktu Berakhir setelah 1 (satu) tahun pertama pengoperasian O&M-KCJB pada bulan Januari 2025
Perjanjian Angkutan Batu Bara			
10.	Perjanjian Angkutan Batu Bara dengan Kereta Api Relasi Tanjungenimbaru-Tarahan dan Tanjungenimbaru-Kertapati No. 011/T/PJJ/0100/HK.03/X/2023 dan No. KL.701/X/13/KA-2023 tanggal 12 Oktober 2023, oleh dan antara PT Bukit Asam Tbk ("PTBA") dan Perseroan	Pedoman pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan angkutan batu bara dengan menggunakan sarana dan prasarana milik PT KAI dengan tujuan relasi Tanjungenimbaru- Tarahan dan Tanjungenimbaru- Kertapati.	Nilai Tarif Angkutan Batu Bara tahun 2023-2027 ditentukan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Pasal 9 Perjanjian ini dengan penyesuaian USD 1,5/Ton dan Dynamic Pricing Jangka Waktu 1 Januari 2023 –31 Desember 2027
Perjanjian Angkutan Barang			
11.	Pokok-Pokok Perjanjian Pengangkutan BBM/BBK antar Fuel/Integrated Terminal dengan Gerbong Ketel No. SP-003/R00000/2020-SO tanggal 1 April 2020, oleh dan antara PT Pertamina (Persero) dan Perseroan	Kerja sama pengangkutan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Khusus milik Pihak Pertama antara Fuel/Integrated Terminal di wilayah Sumatera dan Jawa menggunakan Gerbong Ketel oleh Pihak Kedua, dengan Pihak Pertama setuju untuk membayar sejumlah biaya kepada Pihak	Nilai Rp1.291.447.203,00 Jangka Waktu Jangka waktu pekerjaan: 60 bulan terhitung sejak tanggal tanggal kontrak (1 April 2020) Jangka waktu perjanjian: sejak tanggal kontrak hingga 6 bulan setelah masa penyelesaian

No.	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian	Nilai dan Jangka Waktu
12.	Perjanjian tentang Angkutan Batubara dengan Kereta Api Relasi Sukacinta – Kertapati No. PT KAI (Persero): HK.221/IV/11/KA -2012 No. PT BMSS: 075/LEG- BMSS/IV/2012 tanggal 17 April 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Addendum V No. PT KAI (Persero) KL.701/XI/14/KA-2019 tanggal 19 November 2019, oleh dan antara Perseroan (“Pihak Pertama”) dan PT Baramulti Sugih Sentosa (“Pihak Kedua”)	Kerjasama Angkutan Batubara milik Pihak Kedua dengan menggunakan Gerbong Datar dengan Relasi Sukacinta – Kertapati dan/atau Sukacinta – Simpang milik Pihak Pertama, dengan Pihak Kedua setuju untuk membayar sejumlah biaya kepada Pihak Pertama.	<p>Nilai</p> <p>Tarif akan dievaluasi dan tidak terbatas pada: tingkat inflasi yang akan berlaku di tahun berikutnya berdasarkan prediksi Pemerintah di bulan Oktober tahun berjalan dan setiap tanggal.</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>20 tahun, terhitung mulai tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2032</p>
13.	Perjanjian tentang Angkutan Batubara dengan Kereta Api Relasi Sukacinta Kertapati No. PT KAI (Persero) HK.221/XII/19/KA-2012 No. PT BAU: 001/BAU-KAI/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Addendum VI No. PT KAI: KL.701/VII/2/KA-2024 No. PT BAU: 043/BAU- KAI/ADD/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, oleh dan antara Perseroan (“Pihak Pertama”) PT Bara Alam Utama (“Pihak Kedua”)	Angkutan Batubara milik Pihak Kedua yang diangkut oleh Pihak Pertama dengan menggunakan Gerbong Datar untuk Relasi Sukacinta – Kertapati dan Sukacinta – Simpang.	<p>Nilai</p> <p>Tarif Angkutan Batubara adalah sebagai berikut:</p> <p>Relasi Sukacinta Kertapati: Tanggal 1 September 2021 – 13 Desember 2032 sebesar Rp660,00 per ton-km berdasarkan Harga Dasar BBM Rp4.814,00 /liter.</p> <p>Relasi Sukacinta – Simpang: Tanggal 1 September 2021 – 13 Desember 2032 sebesar Rp665,00 per ton-km berdasarkan Harga Dasar BBM Rp4.814,00 /liter.</p> <p>Tarif Angkutan Batubara dapat berubah akibat terjadinya perubahan atas faktor-faktor berikut: (i) Kenaikan Tingkat inflasi dari tahun berjalan, yang akan berlaku di tahun berikutnya berdasarkan prediksi Pemerintah di bulan Oktober pada tahun berjalan; (ii) Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara drastis mempengaruhi perekonomian makro; (iii) Harga Batubara Acuan melampaui 70 USDper ton; (iv) Tingkat kurs Dollar (USD) terhadap Rupiah (IDR)</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>20 tahun terhitung mulai tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2032.</p>
14.	Perjanjian tentang Angkutan Batubara dengan Kereta Api Relasi Sukacinta – Kertapati No. PT KAI (Persero): HK.221/IV/11/KA -2012 No. PT BMSS: 075/LEG- BMSS/IV/2012 tanggal 17 April 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Addendum V No. PT KAI (Persero) KL.701/XI/14/KA-2019 tanggal 19 November 2019, oleh dan antara Perseroan (“Pihak Pertama”) dan PT Baramulti Sugih Sentosa (“Pihak Kedua”)	Kerjasama Angkutan Batubara milik Pihak Kedua dengan menggunakan Gerbong Datar dengan Relasi Sukacinta – Kertapati dan/atau Sukacinta – Simpang milik Pihak Pertama, dengan Pihak Kedua setuju untuk membayar sejumlah biaya kepada Pihak Pertama.	<p>Nilai</p> <p>Tarif akan dievaluasi dan tidak terbatas pada: tingkat inflasi yang akan berlaku di tahun berikutnya berdasarkan prediksi Pemerintah di bulan Oktober tahun berjalan dan setiap tanggal.</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>20 tahun, terhitung mulai tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2032</p>

No.	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian	Nilai dan Jangka Waktu
Perjanjian Pendayagunaan atau Pemanfaatan Aset Tanah			
15.	Perjanjian Kerja Sama Pendayagunaan Aset Tanah KAI di Jalan Cihampelas Nomor 91 Bandung Dengan Skema Bangun Guna Serah No. KAI: KL.705/VII/2/KA-2023 tertanggal 4 Juli 2023, oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dan PT KA Properti Manajemen ("Pihak Kedua")	Pendayagunaan tanah dan bangunan di atas Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 197 atas nama Pihak Pertama yang terletak di Jalan Cihampelas No. 91, 91A, dan 91B, Bandung) ("Tanah dan Bangunan" atau "Objek Kerja Sama") melalui skema Bangun Guna Serah ("BGS") untuk memberikan nilai tambah terbaik dan melaksanakan pembangunan/pengelolaan atas Tanah dan Bangunan sesuai dengan rancang bangun yang disiapkan oleh Pihak Kedua.	<p>Nilai</p> <p>Biaya kompensasi tidak disebutkan secara eksplisit. Pembayaran kompensasi atas kerjasama pendayagunaan tanah diatur dalam pasal 6 berupa:</p> <p>Bagi hasil dari pendapatan kotor pengelolaan bangunan sebesar 4% selama jangka waktu bangun guna serah; 50% dari selisih lebih atas laba, setelah break even point atau paling lambat setelah tahun ke-10 masa pengelolaan bangunan (jika kinerja Pihak Kedua melampaui target laba.</p> <p>Jangka Waktu Perjanjian 4 Juli 2023 hingga penandatanganan berita acara pengakhiran Perjanjian (setelah pemenuhan seluruh kewajiban).</p> <p>Jangka waktu pemanfaatan Objek Kerja 30 tahun sejak berakhirnya masa pembangunan atau selambat-lambatnya sejak 1 November 2024.</p>
16.	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Lahan Dalam Rangka Penyelesaian Permasalahan Aset yang Terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan No. KAI: KL.701/IV/3/KA-2024 dan No. PT ACK: 001/PKS- ACKH /V/2024 tertanggal 13 Mei 2024, oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dan PT Arga Citra Kharisma ("Pihak Kedua")	Penyelesaian permasalahan aset tanah berupa: (i) tanah seluas 12.722; dan (ii) tanah seluas 19.194 m2 yang diuraikan dalam Eigendom Verponding No. 9 dan No. 33 dan keduanya terdaftar atas nama Pihak Pertama terletak di Kel. Gang Buntu, Medan (bersama-sama sebagai "Aset Tanah") dan pemanfaatan lahan milik Pihak Pertama yang merupakan bagian dari Aset Tanah. Perjanjian ini bertujuan untuk menyelesaikan Permasalahan asset dan meningkatkan potensi masing-masing Pihak dengan prinsip saling menguntungkan.	<p>Nilai</p> <p>Rp204.600.000.000,00 belum termasuk pajak.</p> <p>Jangka Waktu 30 tahun, jika tidak terdapat kesepakatan Nilai Kompensasi untuk 20 tahun selanjutnya; atau 50 tahun, jika terdapat kesepakatan atas Nilai Kompensasi Perjanjian berlaku efektif sejak dipenuhinya syarat efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3).</p>
Perjanjian Sewa Jangka Panjang			
17.	Perjanjian Kerjasama Usaha dalam rangka Pemanfaatan Lahan Milik PT KAI (Persero) di Lokasi Laswi, Bandung No. PT KAI (Persero): KL.701/X/31/KA- 2017 No. PT WIKA (Persero) Tbk: TP.01.03/A.DIR. 13154/2017 tanggal 10 Oktober 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perubahan dan Penyusunan Kembali Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Pendayagunaan Aset Milik PT KAI (Persero) di Laswi, Bandung dengan Skema Bangun Guna Serah No. PT KAI (Persero): KL.705/VIII/3/KA- 2020 No. PT WIKA (Persero) Tbk: TP.01.03/A. DIR/ 63978/2020 tanggal 27 Agustus 2020, oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Pihak Kedua")	<p>Kerja sama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua melalui skema Bangun Guna Serah ("BGS") dimana Pihak Kedua berperan untuk melakukan pendayagunaan lahan milik Pihak Pertama yang berlokasi di Jalan Laswi, Kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung ("Lahan yang Dikerjasamakan").</p> <p>Objek kerja sama adalah Lahan yang Dikerjasamakan dan Bangunan beserta Fasilitas di atasnya, meliputi pemanfaatan dan pengelolaan Lahan yang Dikerjasamakan serta pembangunan, pemasaran, dan pengelolaan bangunan di atas Lahan yang Dikerjasamakan berdasarkan pengertian dalam perjanjian ini.</p>	<p>Nilai</p> <p>Kompensasi terhadap Pihak Pertama berupa: Pembayaran di muka oleh Pihak Kedua sejumlah Rp361.111.111.111,00 Pembagian profit sharing yang akan dilakukan Pihak Kedua setelah adanya hasil audit Kantor Akuntan Publik yang menyatakan bahwa Proyek telah menghasilkan NPV kumulatif laba bersih melebihi Proyeksi Profit Tahunan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian, dengan pembagian untuk WIKA sebesar 66,4% dan KAI sebesar 33,6%.</p> <p>Jangka Waktu Sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini melalui penandatanganan profit sharing Berita Acara Pengakhiran Perjanjian oleh Para Pihak.</p>

No.	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian	Nilai dan Jangka Waktu
18.	Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Usaha dalam rangka Pemanfaatan Lahan Milik PT KAI (Persero) di Kawasan Stasiun Cisauk No. PT Adhi Karya Persero) Tbk: 031-2/2022/026 No. PT KAI (Persero): KL.705/VI/31/KA-2022 tanggal 20 Juni 2022, oleh dan antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk / PT Adhi Commuter Properti ("ADHI") dan Perseroan	Kerjasama dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan Para Pihak terkait dengan pemanfaatan lahan milik Pihak Kedua di Kawasan Stasiun Cisauk. Pemanfaatan Lahan milik Pihak Kedua dilakukan dengan melakukan Pembangunan kawasan Hunian dan/atau Komersial di area Stasiun Kereta Api di Cisauk. Objek Kerjasama adalah Lahan kerjasama beserta Bangunan di atasnya meliputi pemanfaatan, pengelolaan Lahan, Pembangunan, Pemasaran, penjualan dan pengelolaan Bangunan di atas Lahan Kerjasama	<p>Nilai</p> <p>a. Para Pihak sepakat bahwa dalam pelaksanaan kerja sama ini, Para Pihak akan melakukan a. Partisipasi (Equity Sharing) sebagai berikut: Partisipasi (Equity Sharing) Pihak Pertama adalah menyediakan dana untuk pemanfaatan Lahan Kerjasama seluas 16.500 m² (enam belas ribu lima ratus meter persegi) sebesar Rp63.000.000.000,00 (enam puluh tiga miliar Rupiah) yang dibayarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan operasional.</p> <p>b. Partisipasi Pihak Kedua adalah menyediakan Lahan Kerjasama seluas 16.500 m² (enam belas ribu lima ratus meter persegi) dengan status tanah bersertipikat Hak Pengelolaan (HPL) dan dalam kondisi tanah clean and clear yang digunakan untuk pembangunan properti di atas Lahan Kerjasama dengan nilai kompensasi atas Lahan Kerjasama yaitu sebesar Rp73.976.000.000,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen).</p> <p>c. Para Pihak menyepakati persentase bagi hasil dari laba Pendapatan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Pihak Pertama dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Pihak Kedua, setelah dikurangi biaya operasional dan pajak-pajak</p> <p>Jangka Waktu 50 tahun terhitung sejak dipenuhinya seluruh persyaratan di bawah ini:</p> <p>a. Diperolehnya Persetujuan tertulis internal masing-masing Pihak tentang pelaksanaan Kerjasama Usaha;</p> <p>b. Diterbitkannya Sertifikat Hak Pengelolaan atas Lahan oleh Pihak Kedua; dan</p> <p>c. Diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan atas Lahan Kerjasama di atas Hak Pengelolaan Lahan milik Pihak Kedua oleh Pihak Pertama</p>
Perjanjian Keperantaraan Produk Asuransi			
19.	Perjanjian Induk Kerja Sama tentang Keperantaraan Produk Asuransi No. KAI KL.702/VI/12/KA-2024 dan No. MJP 17020534/ID/PA/IP/IV/2023 tertanggal 7 Mei 2024, oleh dan antara Perseroan dan PT Mitra Jasa Pratama ("PT MJP")	Menyediakan jasa pialang asuransi di Indonesia yang dibutuhkan oleh Perseroan untuk calon penumpang atau penumpang jasa kereta api dengan menggunakan atau melalui platform digital	Perjanjian ini berlaku 2 (dua) tahun sejak penandatanganan, yaitu 7 Mei 2024 hingga 7 Mei 2026, dan dapat diperpanjang apabila Para Pihak bersepakat untuk perpanjangan
	Perjanjian Produk Asuransi Pembatalan Perjalanan No. KAI KL.705/VI/7/KA-2024 dan No. PT MJP 17020535/ID/PA/IP/IV/2023 tanggal 8 Mei 2024, oleh dan antara Perseroan dan PT Mitra Jasa Pratama	Merupakan perjanjian yang menjelaskan mengenai produk asuransi berdasarkan Perjanjian Induk 7 Mei 2024.	Jangka Waktu Tunduk pada Perjanjian Induk 7 Mei 2024. Sehingga, jangka waktu Perjanjian ini adalah 2 tahun sejak penandatanganan, yaitu 7 Mei 2024 hingga 7 Mei 2026.

No.	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian	Nilai dan Jangka Waktu
Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Kereta Api			
20.	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang KA Bandara Yogyakarta International Airport No. KAI KL.705/IV/7/KA-2022 dan No. PT Railink RL/DIR/PKS/022/IV/2022 Tertanggal 1 April 2022 sebagaimana diubah dengan Adendum dan Pernyataan kembali penyelenggaraan angkutan penumpang KA Bandara Yogyakarta International Airport No. KAI KL/705/X/37/KA-2022 dan No. PT Railink RL/DIR/PKS/070/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, oleh dan antara Perseroan dan PT Railink	Merupakan kerja sama penyelenggaraan angkutan penumpang kereta api bandara, meliputi kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian dan pengelolaan kegiatan pendukung.	<p>Nilai</p> <p>Biaya penyediaan sarana perkeretaapian yang disepakati Para Pihak sebagaimana diatur di Lampiran III Perjanjian ini adalah: Biaya atas pemanfaatan sarana siap operasi sebesar Rp21.507.829.750,00 selama 5 tahun; dan Biaya perawatan sarana guna keperluan sarana siap operasi sesuai dengan realisasi perawatan sarana.</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>31 Oktober 2022 hingga 31 Desember 2026.</p>
21.	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Kereta Api Srelelawangsa No. KAI KL.705/VIII/16/KA-2023 dan No. PT Railink RL/DIR/PKS/-46/VIII/2023 tertanggal 24 Agustus 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT Railink	Merupakan kerja sama penyelenggaraan angkutan penumpang kereta api Srelelawangsa ("KA Srelelawangsa"), meliputi kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian dan pengelolaan kegiatan pendukung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penumpang dan kinerja Para Pihak dalam menyelenggarakan angkutan penumpang KA Srelelawangsa.	<p>Nilai</p> <p>Biaya penyediaan sarana perkeretaapian yang disepakati Para Pihak sebagaimana diatur di Lampiran III Perjanjian ini adalah: Biaya atas pemanfaatan sarana siap operasi sebesar Rp4.875.396.138,50 selama 5 tahun; dan Biaya perawatan Sarana guna keperluan sarana siap operasi sesuai dengan realisasi perawatan sarana.</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Sejak izin operasi KA Srelelawangsa terbit sampai dengan 31 Desember 2027.</p>
22.	Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang KA Lokal Daerah Operasi 2 Bandung dan Daerah Operasi 8 Surabaya No.KAI KL.705/XI/3/KA-2022 dan No. PT KCI 259/AL.101/KCI/XI 2022 Tertanggal 2 November 2022, oleh dan antara Perseroan dan PT Kereta Commuter Indonesia	Merupakan kerja sama penyelenggaraan angkutan penumpang Kereta Api Kelas Ekonomi Perkotaan Daerah Operasi 2 Bandung dan Daerah Operasi 8 Surabaya ("KA Lokal"), meliputi kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian dan pengelolaan kegiatan pendudukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penumpang dan kinerja Para Pihak dalam menyelenggarakan angkutan penumpang KA Lokal.	<p>Nilai</p> <p>Biaya penyediaan sarana perkeretaapian yang disepakati Para Pihak sebagaimana diatur di Lampiran III Perjanjian ini adalah: Biaya atas pemanfaatan Sarana Siap Operasi sebesar Rp32.639.711.055,00 selama 5 tahun; dan Biaya perawatan sarana guna keperluan Sarana Siap Operasi sesuai dengan realisasi perawatan sarana.</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>2 November 2022 hingga 31 Desember 2026</p>
23.	Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang KA Lokal Daerah Operasi 1 Jakarta dan Daerah Operasi 6 Yogyakarta No. KAI KI. 705/X/6/KA-2023 dan No. PT KCI 273/CL/201/KCI/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023	Merupakan kerja sama penyelenggaraan angkutan penumpang KA Lokal yang beroperasi di wilayah Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta dan 6 Yogyakarta milik Pihak Pertama dengan perincian (a) KA Prameks, (b) KA Lokal Merak, dan (c) KRL Palur-Yogyakarta ("KA Lokal"), meliputi kegiatan penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian dan pengelolaan kegiatan pendukung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penumpang dan kinerja Para Pihak dalam menyelenggarakan angkutan penumpang KA Lokal.	<p>Nilai</p> <p>Biaya penyediaan sarana perkeretaapian yang disepakati Para Pihak sebagaimana diatur di Lampiran III Perjanjian ini adalah: Biaya atas pemanfaatan sarana siap operasi sebesar Rp18.485.321.100,00 selama 5 tahun; dan Biaya perawatan Sarana guna keperluan sarana siap operasi sesuai dengan realisasi perawatan sarana.</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027</p>

No.	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian	Nilai dan Jangka Waktu
Perjanjian Layanan Penjualan Tiket Kereta Api dan/atau Penerimaan Pembayaran Tiket Kereta Api			
24.	Perjanjian Layanan Penjualan Tiket Kereta Api dan/atau Penerimaan Pembayaran Tiket Kereta Api No. KAI KL.705/III/12/KA-2023 dan No. PT Darmawisata Indonesia 039/M.ADM.DI/SDA/III/2023 tertanggal 17 Maret 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT Darmawisata Indonesia	Penjualan tiket kereta api secara host to host dengan mekanisme deposit dan penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama. Penyelenggaraan penjualan tiket kereta api dan/atau penerimaan pembayaran tiket kereta api dilakukan oleh Pihak Kedua dengan menyediakan fasilitas layanan penjualan dan/atau penerimaan pembayaran tiket kereta api melalui media yang dikembangkan oleh Pihak Kedua atau pihak ketiga lainnya	<p>Nilai</p> <p>Nilai kontrak tidak dijelaskan secara rinci karena pembayaran yang Didapatkan PT Darmawisata Indonesia adalah: Convenience Fee (\leqRp7.500/transaksi) Fee transaksi penerimaan pembayaran tiket kereta api yang akan tercermin dalam invoice kepada KAI.</p> <p>Target minimum penjualan PT Darmawisata Indonesia: Rp10.000.000.000,00</p> <p>Jangka Waktu 18 Maret 2023 hingga 17 Maret 2025</p>
25.	Perjanjian Layanan Penjualan Tiket Kereta Api dan/atau Penerimaan Pembayaran Tiket Kereta Api No. KAI KL.705/IX/9/KA-2023 dan No. PT MNC Aladin Indonesia 031/MA-OPS/IX/2023 tertanggal 8 September 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT MNC Aladin Indonesia	<p>Penjualan tiket kereta api secara host to host dengan mekanisme deposit dan penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama.</p> <p>Penyelenggaraan penjualan tiket kereta api dan/atau penerimaan pembayaran tiket kereta api dilakukan oleh Pihak Kedua dengan menyediakan fasilitas layanan penjualan dan/atau penerimaan pembayaran tiket kereta api melalui media yang dikembangkan oleh Pihak Kedua atau pihak ketiga lainnya.</p>	<p>Nilai</p> <p>Nilai kontrak tidak dijelaskan secara rinci karena pembayaran yang didapatkan PT MNC Aladin Indonesia adalah: Convenience Fee (\leqRp7.500/transaksi) Fee transaksi penerimaan pembayaran tiket kereta api yang akan tercermin dalam invoice kepada KAI.</p> <p>Target minimum penjualan PT MNC Aladin Indonesia: Rp10.000.000.000,00</p> <p>Jangka Waktu 1 April 2023 hingga 31 Maret 2025</p>
26.	Perjanjian Layanan Penjualan Tiket Kereta Api dan/atau Penerimaan Pembayaran Tiket Kereta Api No. KAI KL.705/XI/27/KA-2022 dan No. PT Klik Indomaret Sukses 407/CLG/XI/2022 tertanggal 1 November 2022, oleh dan antara PT Klik Indomaret Sukses	<p>Penjualan tiket kereta api secara host to host dengan mekanisme deposit dan penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama.</p> <p>Penyelenggaraan penjualan tiket kereta api dan/atau penerimaan pembayaran tiket kereta api dilakukan oleh Pihak Kedua dengan menyediakan fasilitas layanan penjualan dan/atau penerimaan pembayaran tiket kereta api melalui media yang dikembangkan oleh Pihak Kedua atau pihak ketiga lainnya.</p>	<p>Nilai</p> <p>Nilai kontrak tidak dijelaskan secara rinci karena pembayaran yang didapatkan PT Klik Indomaret Sukses adalah: Convenience Fee (\leqRp7.500/transaksi) Fee transaksi penerimaan pembayaran tiket kereta api yang akan tercermin dalam invoice kepada KAI.</p> <p>Target minimum penjualan PT Klik Indomaret Sukses: Rp10.000.000.000,00</p> <p>Jangka Waktu 2 Oktober 2022 hingga 1 Oktober 2024</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus, Perjanjian masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan jangka waktu perjanjian, meskipun jangka waktu dalam perjanjian telah habis berlaku, namun demikian Para Pihak masih mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Dengan adanya kondisi tersebut, maka PT Klik Indomaret Sukses dan Perseroan melakukan persetujuan diam-diam sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 tentang Persetujuan Diam-Diam.</p>

No.	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian	Nilai dan Jangka Waktu
27.	Perjanjian Layanan Penjualan Tiket Kereta Api dan/atau Penerimaan Pembayaran Tiket Kereta Api No. Pihak Pertama KL.705/XI/28/KA-2022 dan No. Pihak Kedua MIDI- KAI/ BUSDEV/TIKET/XI/2022/023 tertanggal 10 November 2022, oleh dan antara Perseroan dan PT Midi Utama Indonesia Tbk	Penjualan tiket kereta api secara host to host dengan mekanisme deposit dan penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama. Penyelenggaraan penjualan tiket kereta api dan/atau penerimaan pembayaran tiket kereta api dilakukan oleh Pihak Kedua dengan menyediakan fasilitas layanan penjualan dan/atau penerimaan pembayaran tiket kereta api melalui media yang dikembangkan oleh Pihak Kedua atau pihak ketiga lainnya.	<p>Nilai</p> <p>Nilai kontrak tidak dijelaskan secara rinci karena pembayaran yang didapatkan PT Midi Utama Indonesia Tbk adalah: Convenience Fee (≤Rp7.500/transaksi) Fee transaksi penerimaan pembayaran tiket kereta api yang akan tercermin dalam invoice kepada KAI. Target minimum penjualan PT Midi Utama Indonesia Tbk: Rp10.000.000.000,00</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>10 November 2022 hingga 9 November 2024</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus, Perjanjian masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan jangka waktu perjanjian, meskipun jangka waktu dalam perjanjian telah habis berlaku, namun demikian Para Pihak masih mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Dengan adanya kondisi tersebut, maka PT Midi Utama Indonesia Tbk dan Perseroan melakukan persetujuan diam-diam sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 tentang Persetujuan Diam-Diam.</p>
28.	Perjanjian Layanan Penjualan Tiket Kereta Api dan/atau Penerimaan Pembayaran Tiket Kereta Api No. KAI KL.705/X/41/KA-2022 dan No. PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk SAT-KAI/ES/LAYANAN PENJUALAN TIKET KERETA API/X/2022/CM1-203A tertanggal 3 Oktober 2022, oleh dan antara Perseroan dan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk	<p>Penjualan tiket kereta api secara host to host dengan mekanisme deposit dan penerimaan pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Pertama.</p> <p>Penyelenggaraan penjualan tiket kereta api dan/atau penerimaan pembayaran tiket kereta api dilakukan oleh Pihak Kedua dengan menyediakan fasilitas layanan penjualan dan/atau penerimaan pembayaran tiket kereta api melalui media yang dikembangkan oleh Pihak Kedua atau pihak ketiga lainnya.</p>	<p>Nilai</p> <p>Nilai kontrak tidak dijelaskan secara rinci karena pembayaran yang didapatkan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk adalah: Convenience Fee (≤Rp7.500/transaksi) Fee transaksi penerimaan pembayaran tiket kereta api yang akan tercermin dalam invoice kepada KAI. Target minimum penjualan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk: Rp10.000.000.000,00</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>2 Oktober 2022 hingga 1 Oktober 2024</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus, Perjanjian masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan jangka waktu perjanjian, meskipun jangka waktu dalam perjanjian telah habis berlaku, namun demikian Para Pihak masih mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Dengan adanya kondisi tersebut, maka PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan Perseroan melakukan persetujuan diam-diam sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 tentang Persetujuan Diam-Diam.</p>

No.	Nama Perjanjian	Objek Perjanjian	Nilai dan Jangka Waktu
Perjanjian Kerja Sama terkait Aplikasi KAI			
29.	Perjanjian Kerja Sama tentang Penyediaan Fitur Layanan Pemesanan Tiket Kereta Api Railink Dalam Mobile Application KAI No. KAI KL.705/XI/4/KA-2023 dan No. PT Railink RL/DIR/ PKS/062/XI/2023 tertanggal 6 November 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT Railink	Penyediaan layanan pemesanan tiket kereta api yang dijual oleh Railink bagi pelanggan KAI melalui mobile application KAI. Setiap pembayaran non-tunai mobile application KAI akan menggunakan payment gateway yang ada di mobile application KAI.	<p>Nilai</p> <p>Biaya yang perlu dibayarkan oleh Para Pihak tergantung pada tagihan yang disampaikan setiap bulannya. Untuk MDR, perhitungan pembayarannya diatur dalam Lampiran I.</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>10 Agustus 2023 hingga 9 Agustus 2028</p>
30.	Perjanjian Kerja Sama tentang Reservasi Akomodasi pada Aplikasi Mobile Penjualan Tiket Kereta Api Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. Traveloka Accom- AFF/ ID02/V/2023/1 dan No. KAI KL.705/V/12/KA-2023 tertanggal 24 Mei 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT Trinusa Travelindo	Perjanjian kerja sama dalam rangka pemasaran produk dan layanan perjalanan berupa reservasi akomodasi oleh KAI yang dapat ditawarkan untuk pemesanan Traveloka.	<p>Nilai</p> <p>Nilai pembayaran dari KAI ke Traveloka tergantung pada Laporan Transaksi yang disampaikan oleh Traveloka.</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>3 tahun sejak tanggal penandatanganan</p>
31.	Perjanjian Pengembangan Frontend Mobile Application KAI Access dan Website KAI.ID antara Perusahaan dengan PT Pulau Pulau Media No.KAI KL.705/XI/1/KA-2019 dan 051/PKS-PPM-KAI/XI/2019 tanggal 11 November 2019, sebagaimana diubah beberapa kali dengan: (i) Addendum Perjanjian Nomor KL.705/XII/1/KA-2021 dan 051/PKS/PPM-KAI/XI/2019/P1 tanggal 13 Desember 2021; dan (ii) Addendum II Perjanjian Pengembangan Frontend Mobile Application KAI Access dan Website KAI.ID No. Pihak Pertama KL.705/XII/24/KA-2023 dan No. Pihak Kedua 051/PLS/PPM-KAI/XI/2019/P2 tertanggal 4 Desember 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT Pulau Pulau Media	Kerja sama ini meliputi pekerjaan-pekerjaan berupa: (i) pengembangan dan/ atau penambahan konten bisnis pada mobile application yang diinisiasi oleh PPM; dan (ii) pengelolaan space iklan pada mobile application yang diinisiasi oleh PPM.	<p>Nilai</p> <p>Nilai kontrak tidak dirincikan, tetapi terdiri atas:</p> <p>Penggunaan space iklan yang dikelola PPM</p> <p>Hasil pengembangan dan/penambahan konten bisnis pada Fitur mobile application (setelah dipotong pajak)</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Mulai berlaku sejak 10 Agustus 2023</p>

5. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan menandatangani perjanjian dengan pihak afiliasi yang dalam hal ini merupakan anak perusahaan milik Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama, Tanggal, dan Para Pihak Perjanjian	Maksud & Tujuan	Nilai & Jangka Waktu
I. PT Reska Multi Usaha			
1.	Perjanjian No. KL.701/IX/14/KA-2019 tanggal 30 September 2019 tentang Persewaan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Jalan Stasiun Timur No. 6 Bandung yang di buat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT RMU	Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah melakukan sewa menyewa kepada Perseroan berupa aset milik Perseroan yang terletak di Jalan Stasiun Timur No. 6 Bandung dan seluas 1.128 m ² (seribu seratus dua puluh ribu meter persegi)	<p>Nilai:</p> <p>Rp2.199.395.505,00</p> <p>Jangka Waktu:</p> <p>Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2024.</p>

No.	Nama, Tanggal, dan Para Pihak Perjanjian	Maksud & Tujuan	Nilai & Jangka Waktu
2.	Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.701/II/18/KA-2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT RMU	sewa menyewa kepada Perseroan berupa aset milik Perseroan yang terletak di Jalan Anggrek No. 2 Surabaya untuk keperluan Loko Cafe, Outdoor Amphitheater, Teras, Parkir, dan Taman dengan total luas 2.075,462 m ² (dua ribu tujuh puluh lima koma empat puluh enam meter persegi)	<u>Nilai:</u> Rp2.378.529.208,00 <u>Jangka Waktu:</u> Jangka waktu perjanjian adalah sejak 28 Februari 2020 sampai 28 Februari 2025
3.	Perjanjian No. KL.701/XI/339/DO.9-2020 tanggal 18 November 2020 tentang Sewa Rumah Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Branch Office 9 Jember di Jalan Wijaya Kusuma KM.197 +285 Empl. Stasiun Jember Lintas Surabaya, Panuruan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT RMU	Sewa menyewa kepada Perseroan berupa aset milik Perseroan yang terletak di Jalan Wijaya Kusuma KM 197 +285 Emplasemen stasiun Jember Lintas Surabaya, Panarukan, untuk keperluan Kantor Office Jember dengan total luas 508,10m ² (lima ratus delapan koma satu nol meter persegi)	<u>Nilai:</u> Rp453.844.673,00 <u>Jangka Waktu:</u> Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 September 2024. Sampai dengan tanggal Prospektus, Perjanjian masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan jangka waktu perjanjian, meskipun jangka waktu dalam perjanjian telah habis berlaku, namun demikian Para Pihak masih mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Dengan adanya kondisi tersebut, maka PT RMU dan Perseroan melakukan persetujuan diam-diam sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 tentang Persetujuan Diam-Diam.
4.	Perjanjian No. KL.701/VII/134/DI.6-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Persewaan Aset Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di RD No. 23 Jalan Mongindisi Surakarta untuk Kantor yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT RMU	sewa menyewa kepada Perseroan berupa aset milik Perseroan yang terletak di JRD No. 23 Jalan Monginsidi Surakarta, untuk keperluan Kantor dengan total luas 1.656,402m ² (seribu enam ratus lima puluh enam koma empat nol meter persegi).	<u>Nilai:</u> Rp157.731.415,00 <u>Jangka Waktu:</u> Jangka waktu perjanjian adalah sejak 9 November 2020 sampai dengan 8 November 2025.
5.	Perjanjian No. KL.701/VI/4/KA-2023 dan No. KH.605/V/22/RMU-2023 tanggal 11 Mei 2023 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Stasiun Perseroan yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan PT RMU	Kerja sama penataan dan pengelolaan area/kawasan parkir di stasiun milik Perseroan untuk memberikan pelayanan bagi penumpang Kerat Api.	<u>Jangka Waktu:</u> Jangka waktu perjanjian adalah sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025

II. PT Railink

1.	Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Assessment dan Feedback Hasil Assessment No. KL.705/1/6/KA-2024 dan No. RL/DIR/PKS/003A/1/2024 tanggal 23 Januari 2024, dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Railink ("Pihak Kedua")	Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai pedoman dan landasan bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Assessment Potensi, Assessment Kompetensi, dan/atau Feedback Hasil Assessment yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama.	<u>Nilai</u> a. Biaya Assessment Potensi yang disepakati oleh Para Pihak adalah sebagai berikut: i. Laporan Rekomendasi (Memenuhi Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat) sebesar Rp200.000,00 per Testee; ii. Laporan Lengkap (Rekomendasi, Psikogram, Kelebihan dan Kekurangan) sebesar Rp400.000,00 per Testee.
----	---	---	--

No.	Nama, Tanggal, dan Para Pihak Perjanjian	Maksud & Tujuan	Nilai & Jangka Waktu
			<p>b. Biaya Assessment Kompetensi yang disepakati oleh Para Pihak adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Laporan Rekomendasi (Disarankan, Dipertimbangkan dan Belum Dapat Disarankan) sebesar Rp800.000,00 per Testee; ii. Laporan Lengkap (Rekomendasi, Uraian setiap kompetensi, Kekuatan, Kelemahan dan Saran Pengembangan) sebesar Rp1.600.000,00 per Testee. <p>c. Biaya Feedback Hasil Assessment yang disepakati oleh Para Pihak adalah sebesar Rp300.000.00 per Testee.</p> <p><u>Jangka waktu</u> Jangka waktu perjanjian kerjasama ini sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.</p>
2.	Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan No. KL.701/V/5/KA-2024 dan No. Railink RL/DIR/PKS/026/V/2024 tanggal 22 Mei 2024, dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Railink ("Pihak Kedua")	Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama Pendidikan dan Pelatihan bagi Pekerja Pihak Kedua pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan milik Pihak Pertama dan bertujuan untuk mewujudkan kerjasama Pendidikan dan dengan segala kemampuan dan sumber daya yang dimiliki Para Pihak berdasarkan prinsip saling memberi manfaat serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p><u>Nilai</u></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh biaya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama terhadap Pekerja Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. b. Biaya pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk fasilitas Pendidikan dan Pelatihan yang diterima Pekerja Pihak Kedua <p><u>Jangka waktu</u> Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima tahun) terhitung sejak tanggal Perjanjian ditandatangani.</p>
3.	Perjanjian Kerja Sama Antara Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Kereta Api Srelelawangsa No. KL.705/VIII/16/14A-2023 dan No. RL/DIR/PK51046/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023, dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT Railink ("Pihak Kedua")	Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar kerja sama penyelenggaraan angkutan penumpang KA Srelelawangsa antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dan Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penumpang dan kinerja Para Pihak dalam menyelenggarakan angkutan Penumpang KA Srelelawangsa.	<p><u>Nilai</u> Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan penumpang KA Srelelawangsa atas kegiatan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian dan pengelolaan kegiatan pendukung yang dilakukan dan menjadi beban Pihak Pertama yang terkait penggunaannya oleh Pihak Kedua berdasarkan ketentuan Perjanjian ini akan dilakukan penggantian oleh Pihak Kedua melalui perhitungan atas nilai PSO KA Srelelawangsa yang dikerjasamakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.</p> <p><u>Jangka waktu</u> Perjanjian ini berlaku sejak tanggal izin operasi KA Srelelawangsa terbit kepada Pihak Kedua sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.</p>

No.	Nama, Tanggal, dan Para Pihak Perjanjian	Maksud & Tujuan	Nilai & Jangka Waktu
III. PT KCI			
1.	Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang KA Lokal Daerah Operasi 1 Jakarta Dan Daerah Operasi 6 Yogyakarta No. Perseroan: KL.705/X/6/KA-2023 dan No. PT KCI: 273/CL.201/KCI/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023, dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT KCI ("Pihak Kedua")	Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar kerja sama penyelenggaraan angkutan penumpang KA Lokal antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penumpang dan kinerja Para Pihak dalam menyelenggarakan angkutan Penumpang KA Lokal.	<p><u>Nilai</u></p> <p>a. Biaya atas pemanfaatan Sarana Siap Operasi sebesar Rp18.485.321.100,00 selama 5 tahun;</p> <p>b. Biaya perawatan Sarana guna keperluan Sarana Siap Operasi Para Pihak sepakat akan dibayarkan sesuai dengan realisasi perawatan sarana.</p> <p><u>Jangka waktu</u> Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2026.</p>
2.	Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang KA Lokal Daerah Operasi 2 Bandung Dan Daerah Operasi 8 Surabaya No. Perseroan: KL.705/XI/3/KA-2022 dan No. PT KCI: 259/AL.101/KCI/XI/2022 tanggal 2 November 2022, dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT KCI ("Pihak Kedua")	Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar kerja sama penyelenggaraan angkutan penumpang KA Lokal antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pelayanan penumpang dan kinerja Para Pihak dalam menyelenggarakan angkutan Penumpang KA Lokal.	<p><u>Nilai</u></p> <p>a. Biaya atas pemanfaatan Sarana Siap Operasi sebesar Rp32.639.711.055,00 selama 5 tahun;</p> <p>b. Biaya perawatan Sarana guna keperluan Sarana Siap Operasi Para Pihak sepakat akan dibayarkan sesuai dengan realisasi perawatan sarana.</p> <p><u>Jangka waktu</u> Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.</p>
3.	Perjanjian Tentang Persewaan Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) Di <i>City Railways Station</i> (CRS) Dan Stasiun Pemberhentian Commuter Line Basoetta No. Perseroan: KL.701/XI/19/KA-2023 dan No. PT KCI: 347/CL.201/KCI/XI/2023 tanggal 23 November 2023, dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT KCI ("Pihak Kedua")	Maksud dari Perjanjian ini adalah untuk mengoptimalkan Objek Sewa milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua dimana pada saat berakhirnya Perjanjian Pihak Kedua menyerahkan kembali Objek Sewa tersebut kepada Pihak Pertama sekurang-kurangnya seperti keadaan semula, baik, terawat dan bebas dari segala macam hak dan kewajiban serta tanggung jawab dari Pihak lain. Tujuan dari Perjanjian ini adalah meningkatkan pemanfaatan atas Objek Sewa Pihak Pertama unuk memperoleh hasil yang optimal bagi Para Pihak.	<p><u>Nilai</u> Total harga sewa terhadap penggunaan Objek Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar Rp124.928.561.941,00</p> <p><u>Jangka waktu</u> Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027.</p>
4.	Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (<i>Public Service Obligation/PSO</i>) Untuk Kereta Rel Listrik <i>Air Conditioner</i> (KRL AC) dan KA Lokal Tahun Anggaran 2024 No. Perseroan: KL.701/II/21/KA-2024 dan No. PT KCI: 23/CL.201/KCI/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT KCI ("Pihak Kedua")	Penyelenggaraan PSO angkutan KRL dan KA Lokal dengan lintas pelayanan dan tarif sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.	<p><u>Nilai</u></p> <p>1. Nilai untuk Penyelenggaraan PSO berdasarkan Kontrak PSO 2024 adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Untuk KRL Jabodetabek sebesar Rp1.631.936.583.000,00;</p> <p>b. Untuk KRL Yogyakarta sebesar Rp77.228.543.000,00;</p> <p>c. Untuk KA Lokal Jarak Dekat adalah sebesar Rp184.877.064.000,00</p> <p>d. Untuk KA Lokal KRd adalah sebesar Rp56.158.986.000,00.</p> <p><u>Jangka waktu</u> Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.</p>

No.	Nama, Tanggal, dan Para Pihak Perjanjian	Maksud & Tujuan	Nilai & Jangka Waktu
IV. PT KAWIS			
1.	Perjanjian Pengelolaan Kawasan Indonesian Railway Museum dan Historic Building Lawang Sewu No. KL.701/VII/90/KA-2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT KAWIS ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua diberikan kuasa dan kewenangan dalam melakukan Pengelolaan serta pemanfaatan atas Kawasan Historic Building Lawang Sewu dan Kawasan Indonesia Railway Museum guna optimalisasi aset milik Pihak Pertama.	<p><u>Nilai</u> Kompensasi bagi hasil akan diperhitungkan dari Laba Bersih Pengelolaan Objek Kerja Sama dengan ketentuan Pihak Pertama mendapat kompensasi 65% dari laba bersih setelah dilakukan rekonsiliasi dan Pihak Kedua mendapat 35% dari laba bersih setelah dilakukan rekonsiliasi.</p> <p><u>Jangka Waktu</u> Perjanjian berlaku sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 16 Januari 2025.</p>
2.	Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.701/XI/13/KA-2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan ("Pemberi Sewa") dengan PT KAWIS ("Penyewa")	KAI selaku pemilik aset berupa bangunan seluas 924 m2 (sembilan ratus dua puluh empat meter persegi) yang berada di Stasiun Gondangdia sepakat untuk menyewakan aset tersebut kepada KAWIS.	<p><u>Nilai</u> Rp2.530.225.036,00 untuk 3 tahun kontrak</p> <p><u>Jangka Waktu</u> Perjanjian berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan 7 Oktober 2024.</p> <p>Sampai dengan tanggal Prospektus, perjanjian ini masih dalam proses perpanjangan. Sehubungan dengan jangka waktu perjanjian, meskipun jangka waktu dalam perjanjian telah habis berlaku, namun demikian Para Pihak masih mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Dengan adanya kondisi tersebut, maka PT KAWIS dan Perseroan melakukan persetujuan diam-diam sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 tentang Persetujuan Diam-Diam.</p>
V. PT KALOG			
1.	Perjanjian Angkutan Barang Angkutan Multikomoditi No. KL.701/XII/29/KA-2022 tanggal 30 Desember 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT KALOG ("Pihak Kedua")	Perjanjian ini dimaksudkan untuk melakukan kerjasama angkutan barang dari stasiun.	<p><u>Nilai</u> Nilai Biaya Minimum Angkutan: a. Relasi Sungailagoa – Kalimas: - Biaya minimum per termin Rp931.500.000,00. - Biaya minimum per bulan Rp1.863.000.000,00. b. Relasi Kalimas Sungailagoa: - Biaya minimum per termin Rp830.250.000,00; - Biaya minimum per bulan Rp1.660.500.000,00.</p> <p><u>Jangka waktu</u> Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak 30 Desember 2022 sampai dengan 31 Desember 2027.</p>
2.	Perjanjian Angkutan Multikomoditi No. KL.701/XI/30/KA-2022 tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Angkutan Barang Angkutan Multikomoditi No. KL.701/XI/31/KA-2023 tanggal 30 November 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT KALOG ("Pihak Kedua")	Untuk melakukan kerjasama angkutan barang dari Stasiun Pemberangkatan atau Stasiun Awal ke Stasiun Tujuan dengan menggunakan sarana dan prasarana perkeretaapian milik Pihak Pertama.	<p><u>Nilai</u> Jika penambahan KA 2 Trip, biaya angkutan sebesar Rp350.000.000,00 dan jika penambahan KA 1 Trip, biaya angkutan sebesar Rp300.000.000,00.</p> <p><u>Jangka waktu</u> Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027.</p>

No.	Nama, Tanggal, dan Para Pihak Perjanjian	Maksud & Tujuan	Nilai & Jangka Waktu
3.	Perjanjian Tentang Persewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Di Jalan Petek Emplasemen Stasiun Semarang Poncol Untuk Terminal Angkutan Barang No. KL.701/IV/4/KA-2020 tanggal 13 April 2020 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Addendum Atas Perjanjian No. KL.701/IV/4/KA-2020 Tentang Persewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Di Jalan Petek Emplasemen Stasiun Semarang Poncol Untuk Terminal Angkutan Barang No. KL.701.IV/8/KA-2022 tanggal 7 April 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT KALOG ("Pihak Kedua")	Bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan atas aset tanah Pihak Pertama untuk memperoleh hasil yang optimal bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua.	<u>Nilai</u> Sebesar Rp7.370.618.183,00 belum termasuk PPN. <u>Jangka waktu</u> Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan 8 Februari 2025.
4.	Perjanjian Tentang Persewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) Di Emplasemen Stasiun Kalimas Untuk Container Yard No. KL.701/VIII/9/KA-2020 tanggal 31 Agustus 2020 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT KALOG ("Pihak Kedua")	Bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan atas aset tanah Pihak Pertama untuk memperoleh hasil yang optimal bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua.	<u>Nilai</u> Sebesar Rp22.012.356.643,00 termasuk PPN 10% (sepuluh persen). <u>Jangka waktu</u> Jangka waktu perjanjian berlaku sejak 4 Mei 2020 sampai dengan 3 Mei 2025.
5.	Perjanjian Tentang Persewaan Tanah Milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Emplasemen Stasiun Klari (Klari II) Untuk Container Yard dan Pengelolaan Storage Multikomoditi No. KL.701/IX/11/KA-2022 tanggal 15 September 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT KALOG ("Pihak Kedua")	Bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan atas aset tanah Pihak Pertama untuk memperoleh hasil yang optimal bagi Pihak Pertama dan Pihak Kedua.	<u>Nilai</u> Sebesar Rp15.610.106.643,00 termasuk PPN. <u>Jangka waktu</u> Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2027.
6.	Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero No. KL.701/II/93/DO.1-2024 tanggal 22 Februari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT KALOG ("Pihak Kedua")	Untuk menyewakan aset kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua dapat memanfaatkan objek sewa setelah perjanjian berlaku.	<u>Nilai</u> Sebesar Rp1.283.355.360,00 <u>Jangka waktu</u> Jangka waktu perjanjian berlaku sejak 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Januari 2029.
7.	Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.701/XI/25/KA-2023 tanggal 29 November 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan ("Pihak Pertama") dengan PT KALOG ("Pihak Kedua")	Untuk menyewakan aset kepada Pihak Kedua. Pihak Kedua dapat memanfaatkan objek sewa setelah perjanjian berlaku.	<u>Nilai</u> Sebesar Rp1.283.355.360,00 <u>Jangka waktu</u> Jangka waktu perjanjian berlaku sejak 1 September 2023 sampai dengan 31 Agustus 2028.
VI. PT KAPM			
1.	Perjanjian tentang Pekerjaan Pembangunan Jalur V, VI, dan Badug Serta Bangunan Pendukung Depo Simpang Tahap 3 Wilayah Divre III Palembang No. KL.702/XII/29/KA-2022 dan No. 026/PL.905/KAPM/XIII/2022 tanggal 16 Desember 2022 ("Perjanjian Awal") sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum atas Perjanjian Awal No. PT KAI KL.702/XI/62/KA-2023 dan No. KAPM 050/PL.905/KAPM/XI/2023 tanggal 28 November 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT KAPM	Untuk kegiatan pengadaan jasa konstruksi, yaitu Pekerjaan Pembangunan Jalur V, VI, dan Badug serta Bangunan Pendukung Depo Simpang Tahap 3 Wilayah Divre III Palembang	<u>Nilai</u> Rp39.043.696.333,00 <u>Jangka waktu</u> Sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga selesainya Pekerjaan. Tanggal Batas Waktu Akhir adalah paling lambat 378 hari sejak diterbitkannya SPMK termasuk masa pengujian sampai denan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Hasil Pekerjaan 100%

No.	Nama, Tanggal, dan Para Pihak Perjanjian	Maksud & Tujuan	Nilai & Jangka Waktu
2.	Perjanjian Pekerjaan Penataan Emplasemen Kramasan Wilayah Divre III Palembang No. KL.702/XIII/27/KA-2022 dan No. 025/PL.905/KAPM/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 ("Perjanjian Awal") sebagaimana diubah terakhir kali dengan Addendum atas Perjanjian Awal No. KL.702/VI/KA-2023 dan No. 023/PL.905/KAPM/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT KAPM	Untuk melakukan Pekerjaan Penataan Emplasemen Kramasan Wilayah Divre III Palembang	<u>Nilai</u> Rp227.764.624.593,00 <u>Jangka waktu</u> Sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hingga selesainya Pekerjaan
3.	Perjanjian Pembangunan Jalur I dan Overcapping Mesin Bubut Depo Simpang Tahap 3 Wilayah Divre III Palembang No. KL.702/VIII/4/KA-2022 dan No. 013/PL.905/KAPM/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 ("Perjanjian Awal") sebagaimana diubah terakhir kali dengan Adendum Atas Perjanjian Awal No. KL.702/IV/16/KA-2023 dan No. 036/PL.905/KAPM/IV/2023 tanggal 27 April 2023 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT KAPM	Untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan Jalur I Dan Overcapping Mesin Bubut Depo Simpang Tahap 3 wilayah divre III Palembang	<u>Nilai</u> Rp42.023.216.083,00 <u>Jangka waktu</u> Sejak Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian
4.	Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi tentang Pekerjaan Penataan Emplasemen di Stasiun Banjarsari dan Penataan Emplasemen Stasiun Merapi Wilayah Divre III Palembang No. KL.702/II/2/KA-2024 dan No. 002/PL.905/KAPM/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT KAPM	Untuk melakukan Pekerjaan Penataan Emplasemen di Stasiun Banjarsari dan Penataan Emplasemen Stasiun Merapi Wilayah Divre III Palembang	<u>Nilai</u> Rp81.550.825.307,00 <u>Jangka waktu</u> Sejak Perjanjian ditandatangani sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian
5.	Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi tentang Pekerjaan Pengembangan Depo Lokomotif Kertapati Wilayah Divre III Palembang No. KL.702/VI/32/KA-2024 dan No. 040/PL.905/KAPM/VI/2024 tanggal 30 Mei 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT KAPM	Untuk melakukan Pekerjaan Pengembangan Depo Lokomotif Kertapati Divre III Palembang	<u>Nilai</u> Rp47.047.558.326,00 <u>Jangka waktu</u> Sejak penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian
6.	Perjanjian tentang Pekerjaan Perpanjangan 1 Jalur SF 60 di Emplasemen Stasiun Lahat dan Fasopka Wilayah Divre III Palembang No. KL.702/III/3/KA-2024 dan No. 003/PL.905/KAPM/III/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT KAPM	Untuk melakukan Pekerjaan Perpanjangan 1 Jalur SF 60 di Emplasemen Stasiun Lahat dan Fasopka Wilayah Divre III Palembang	<u>Nilai</u> Rp66.459.306.253,00 <u>Jangka waktu</u> Sejak Perjanjian ditandatangani sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian
7.	Perjanjian Pengadaan jasa Konstruksi tentang Pekerjaan Beautifikasi Stasiun Yogyakarta No. KL.702/IV/13/KA-2024 dan No. 020/PL.905/KAPM/IV/2024 tanggal 5 April 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT KAPM	Untuk melakukan Pekerjaan Beautifikasi Stasiun Yogyakarta	<u>Nilai</u> Setinggi - tingginya sebesar Rp40.500.394.741,00 <u>Jangka waktu</u> Sejak penerbitan SPMK sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian

No.	Nama, Tanggal, dan Para Pihak Perjanjian	Maksud & Tujuan	Nilai & Jangka Waktu
8.	Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi tentang Pekerjaan Pembangunan Kantor Baru Balai Yasa Lahat Wilayah Divre III Palembang No. KL.702/III/23/KA-2024 dan No. 029/PL.905/KAPM/III/2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT KAPM	Untuk melakukan Pekerjaan Penggunaan Kantor Baru Balai Yasa Lahat Wilayah Divre III Palembang	<u>Nilai</u> Rp14.434.800.532,00 <u>Jangka waktu</u> Sejak Perjanjian ditandatangani sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian
9.	Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengadaan Fasilitas Pendukung Gedung Record Center No. KL.702/I/29/KA-2024 dan No. 053/PL.905/KAPM/I/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT KAPM	Untuk melakukan Pekerjaan Pembangunan dan Pengadaan Fasilitas Pendukung Gedung Record Center	<u>Nilai</u> Rp26.659.271.591,00 <u>Jangka waktu</u> Sejak Perjanjian ditandatangani sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian
10.	Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi tentang Pemasangan Jaringan Transmisi Serta Optik Lintas Ciawi – Banjar Wilayah Daop 2 Bandung No. KL.702/I/17/KA-2024 dan No. 043/PL.905/KAPM/I/2024 tanggal 25 Januari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT KAPM	Untuk melakukan Pemasangan Jaringan Transmisi Serat Optik Lintas Ciawi – Banjar Wilayah Daop 2 Bandung	<u>Nilai</u> Rp11.016.791.065,00 <u>Jangka waktu</u> Sejak diterbitkan SPMK sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian
VII. PT PSBI			
1.	Indonesia <i>Sponsors Support Agreement</i> tanggal 27 April 2018, oleh dan antara PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Perseroan, PT Perkebunan Nusantara VIII, PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Para Sponsor Indonesia Awal”) dan PT PSBI, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT PSBI	<p>a. Setiap Sponsor Indonesia akan memberikan Kontribusi Modal kepada Pemegang Saham Indonesia melalui pinjaman dan/ atau penempatan saham yang dibayar penuh di Pemegang Saham Indonesia.</p> <p>b. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dari perjanjian ini, jika karena alasan apa pun:</p> <p>(i) setiap Sponsor Indonesia tidak dapat melakukan penempatan saham di Pemegang Saham Indonesia; atau</p> <p>(ii) Pemegang Saham Indonesia tidak dapat menerima penempatan saham,</p> <p>c. Para Sponsor Indonesia akan memberikan Kontribusi Modal tersebut dengan cara memberikan pinjaman kepada Pemegang Saham Indonesia.</p> <p>d. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dari perjanjian ini, jika karena alasan apa pun:</p> <p>(i) setiap Sponsor Indonesia tidak dapat meminjamkan jumlah apa pun dengan cara pinjaman kepada Pemegang Saham Indonesia; atau</p> <p>(ii) Pemegang Saham Indonesia tidak dapat menerima pinjaman,</p> <p>Para Sponsor Indonesia akan memberikan Kontribusi Modal tersebut dengan cara penempatan saham di Pemegang Saham Indonesia.</p>	<u>Nilai</u> - <u>Jangka waktu</u> Pemegang Saham Indonesia membuat pernyataan dan jaminan yang dinyatakan kan diberikan kepada Agen Jaminan Luar Negeri selama jangka waktu sampai dengan dan termasuk Tanggal Pelunasan Akhir.

No.	Nama, Tanggal, dan Para Pihak Perjanjian	Maksud & Tujuan	Nilai & Jangka Waktu
2.	Perjanjian Uang Muka Setoran Modal No. KL.705/III/5/KA-2023, No. PSBI: 02/KONTRAK-PSBI/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT PSBI, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT PSBI	Pemberian UMMSM dari Perseroan kepada PT PSBI.	<p><u>Nilai</u> Perseroan telah memberikan tambahan modal di PT PSBI dengan jumlah Rp2.030.804.000.000,00.</p> <p><u>Jangka waktu</u> Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak, yaitu sejak tanggal disebutkan dalam awal Perjanjian.</p>
3.	Perjanjian Uang Muka Setoran Modal No. KL.702/IV/8/KA-2023, No. PSBI: 03/KONTRAK-PSBI/IV/2023 tanggal 23 Mei 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT PSBI, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT PSBI	Pemberian UMMSM dari Perseroan kepada PT PSBI.	<p><u>Nilai</u> Perseroan telah memberikan tambahan modal di PT PSBI dengan jumlah Rp14.630.310.586,00.</p> <p><u>Jangka waktu</u> Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak, yaitu sejak tanggal disebutkan dalam awal Perjanjian.</p>
4.	Perjanjian Uang Muka Setoran Modal No. KL.705/VI/13/KA-2023, No. PSBI: 04/KONTRAK-PSBI/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, oleh dan antara Perseroan dan PT PSBI, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT PSBI	Pemberian UMMSM dari Perseroan kepada PT PSBI.	<p><u>Nilai</u> Perseroan telah memberikan tambahan modal di PSBI dengan jumlah Rp682.619.000.000,00.</p> <p><u>Jangka waktu</u> Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak, yaitu sejak tanggal disebutkan dalam awal Perjanjian.</p>
5.	Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham Dalam Rangka Pembiayaan Kelebihan Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Nomor: KL.702/II/33/KA-2024 Nomor: 02/KONTRAK-PSBI/II/2024 tanggal 31 Januari 2024, yang dibuat di bawah tangan, oleh dan antara Perseroan dengan PT PSBI	PT PSBI akan menggunakan semua jumlah yang dipinjam olehnya berdasarkan Fasilitas untuk memberikan pendanaan kepada PT KCIC melalui Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT PSBI dengan cara yang sesuai dengan Dokumen-Dokumen Pembiayaan dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mendanai Jumlah Kelebihan Biaya	<p><u>Nilai</u> Adapun Total Komitmen berarti keseluruhan dari Total Komitmen Fasilitas A dan Total Komitmen Fasilitas B, yaitu senilai US\$542.700.000 pada tanggal Perjanjian ini. Total Komitmen Fasilitas A berarti keseluruhan dari Komitmen Fasilitas A, yaitu US\$325.620.000 pada tanggal Perjanjian ini. Total Komitmen Fasilitas B berarti keseluruhan dari Komitmen Fasilitas B, yaitu setara dengan RMB senilai US\$217.080.000 pada tanggal Perjanjian ini.</p> <p><u>Jangka Waktu</u> Berlaku sampai tanggal pembayaran akhir (540 bulan setelah tanggal penggunaan pertama).</p>

6. ASURANSI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, terkait dengan risiko-risiko usaha terkait dengan pengangkutan, aset sarana dan/atau prasarana, serta asuransi lain untuk menunjang kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi, Nomor, dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
1.	Asuransi Inland Transit Insurance No. 103000307122200017 tanggal 22 Desember 2023 dengan jangka waktu sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungan angkutan barang dengan komoditi batubara - Pertanggungan angkutan barang dengan komoditi general cargo (ons parcel & BHP) - Pertanggungan angkutan barang dengan komoditi BBM - Pertanggungan angkutan barang dengan komoditi peti kemas - Pertanggungan angkutan barang dengan komoditi Semen dan Klinker - Pertanggungan angkutan barang dengan komoditi hasil Perkebunan - Pertanggungan angkutan barang dengan komoditi pupuk - Pertanggungan angkutan barang dengan komoditi Aqua 	<p>Angkutan Batubara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk setiap kejadian Rp3.000.000.000,00 - Untuk peti kemas per kejadian Rp1.000.000.000,00 - Jumlah ganti rugi selama periode pertanggungan per tahun Rp15.000.000.000,00 <p>Pertanggungan Angkutan barang menggunakan kereta api non peti kemas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk setiap kejadian Rp500.000.000,00 - Jumlah ganti rugi selama periode petanggunga per tahun Rp6.000.000.000,00 <p>Pertanggungan angkutan barang menggunakan kereta api menggunakan peti kemas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk setiap kejadian Rp500.000.000,00 - Untuk peti kemas per kejadian Rp150.000.000,00 - Jumlah maksimal ganti rugi selama periode petanggungan per tahun Rp6.000.000.000,00 <p>Pertanggungan Angkutan BBM&CPO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk angkutan CPO dan BBM setiap kejadian Rp600.000.000,00 - Jumlah ganti rugi selama periode pertanggungan per tahun Rp6.000.000.000,00 <p>Pertanggungan angkutan barang menggunakan kereta api non peti kemas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk setiap kejadian Rp500.000.000,00 - Jumlah ganti rugi selama periode pertanggungan per tahun Rp6.000.000.000,00 <p>Pertanggungan angkutan barang menggunakan kereta api non peti kemas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk setiap kejadian Rp500.000.000,00 - Jumlah ganti rugi selama periode pertanggungan per tahun Rp6.000.000.000,00 	Perseroan	Rp1.233.645.370,14	PT Asuransi Jasaraharja Putera

No.	Jenis Asuransi, Nomor, dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung	
			<p>Pertanggungan angkutan barang menggunakan kereta api non peti kemas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk setiap kejadian Rp500.000.000,00 - Jumlah ganti rugi selama periode pertanggungan per tahun Rp6.000.000.000,00 <p>Pertanggungan angkutan barang menggunakan kereta api non peti kemas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk setiap kejadian Rp500.000.000,00 - Jumlah ganti rugi selama periode pertanggungan per tahun Rp6.000.000.000,00 				
2.	Property All Risk Insurance No. 011.1050.201.2023.001261.00 tanggal 12 Desember 2023 dengan jangka waktu sejak 30 November 2023 sampai dengan 30 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana LRT Jabodebek; - Prasarana LRT Jabodebek; - Fasilitas LRT Jabodebek; dan - Kendaraan Bermotor 	Rp4.102.660.654.838,00	Perseroan Divisi LRT Jabodetabek	Rp7.217.531.415,50	PT Asuransi Wahana Tata	
3.	Asuransi Gempa Bumi No. 011.1050.202.2023.000160.00 tanggal 12 Desember 2023 dengan jangka waktu sejak 30 November 2023 sampai dengan 30 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana LRT Jabodebek; - Prasarana LRT Jabodebek; - Fasilitas LRT Jabodebek; dan - Kendaraan Bermotor 	Rp4.102.660.654.838,00	Perseroan Divisi LRT Jabodetabek	Rp3.989.427.220,76	PT Asuransi Wahana Tata	
4.	Asuransi Terorisme dan Sabotase No. 011.1050.203.2023.000040.00 tanggal 12 Desember 2023 dengan jangka waktu sejak 30 November 2023 sampai dengan 30 November 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana LRT Jabodebek; - Prasarana LRT Jabodebek; - Fasilitas LRT Jabodebek; dan - Kendaraan Bermotor 	Rp4.102.660.654.838,00	Perseroan Divisi LRT Jabodetabek	Rp7.217.513.415,50	PT Asuransi Wahana Tata	
5.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 011.1050.301.2023.005352.00 tanggal 12 Desember 2023 dengan jangka waktu sejak 30 November 2023 sampai dengan 30 November 2024	Kendaraan Bermotor	Rp82.011.257,74	Perseroan Divisi LRT Jabodetabek	Rp109.348.344,00	PT Asuransi Wahana Tata	
6.	Property All Risk & Earthquake Insurance, Terrorism and Sabotage	Berdasarkan covernote No. 440/CN-MKTBDG/X/2024 PT Kereta Api Indonesia (Persero) Property All Risk- Rolling Stock Insurance Policy tanggal 31 Oktober 2024 dengan jangka waktu sejak 31 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2025	Sarana perkeretaapian berupa lokomotif, gerbong, Kereta, dan KRD	Rp8.747.865.745.301,00 dan USD776.421.368,750	Perseroan	Rp78.543.631.494,29	PT Asuransi Wahana Tata
7.	Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang/Pengguna Jasa Moda Transportasi (Sigap) Kereta Api No. 103000920012400019 tanggal 2 Januari 2024 yang berlaku 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026	Awak sarana kereta api barang dan penumpang (masinis, asisten masinis, kondektur, kondektur pembantu, manajer kereta api, teknisi kereta api, petugas restorasi, petugas keamanan, dan petugas lainnya)	Rp10.386.753.261	Perseroan	Rp10.383.697.001,00	PT Asuransi Jasaraharja Putera	
8.	Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang/Pengguna Jasa Moda Transportasi (Sigap) Kereta Api No. 103000920012400021 tanggal 2 Januari 2024 yang berlaku 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026	Awak sarana kereta api barang dan penumpang (masinis, asisten masinis, kondektur, kondektur pembantu, manajer kereta api, teknisi kereta api, petugas restorasi, petugas keamanan, dan petugas lainnya)	Rp149.271.000,00	Perseroan	Rp149.271.000,00	PT Asuransi Jasaraharja Putera	

No.	Jenis Asuransi, Nomor, dan Jangka Waktu	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rp)	Tertanggung	Premi/ Kontribusi (Rp)	Penanggung
9.	Director and Officer Liability Insurance No. 703.777.110.24.00114/000/000 tanggal 8 Maret 2024 yang berlaku 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2025	Risiko liability para direktur dan officers termasuk Dewan Komisaris	Rp1.700.000.000,00	Perseroan	Rp1.700.000.000,00	PT Asuransi Jasa Indonesia

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Asuransi Jasa Indonesia dan PT Asuransi Jasa Raharja Putera. Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Asuransi Jasa Indonesia dan PT Asuransi Jasa Raharja Putera dikarenakan adanya kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah.

Jumlah pertanggungan atas obyek yang diasuransikan adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Direksi tanggal 22 Agustus 2024. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap aset dimana Perseroan melangsungkan kegiatan usaha. Asuransi yang melindungi harta kekayaan Perseroan masih berlaku sampai dengan tanggal Prospektus ini.

Uang muka setoran modal di PT PSBI akan dilakukan peningkatan menjadi setoran modal setelah terpenuhinya persetujuan internal masing-masing pemegang saham PSBI. Saat ini proses peningkatan modal menunggu proses persetujuan internal masing-masing pemegang saham. Adapun dari Perseroan memperoleh persetujuan internal dan hingga Prospektus ini diterbitkan pemegang saham lainnya masih dalam proses persetujuan internal.

Perseroan akan melakukan peningkatan modal secara bertahap:

- a. Tahap pertama, dilakukan untuk mengkonversi UMSM menjadi setoran modal yang bersumber dari PMN TA 2022 sebesar Rp2,7 Triliun
- b. Tahap kedua, dilakukan untuk mengkonversi UMSM menjadi setoran modal untuk pemenuhan biaya usaha PSBI tahun 2022-2023. Hal ini dilakukan dikarenakan seluruh pemegang saham belum melaksanakan setoran modal kepada PSBI untuk biaya usaha PSBI.

Perkiraan presentase kepemilikan Perseroan dalam PSBI akan menjadi sebagai berikut:

- a. Tahap Pertama, dengan konversi UMSM PMN TA 2022 maka perkiraan persentase saham Persroan di PSBI menjadi sebesar 58,53% (lima puluh delapan koma lima tiga persen).
- b. Tahap Kedua, dengan konversi UMSM untuk pemenuhan opex PSBI tahun 2022 dan 2023 maka perkiraan persentase saham Perseroan di PSBI menjadi sebesar 58,54% (lima puluh delapan koma lima empat persen).

7. KETERANGAN MENGENAI ASET

Perseroan memiliki harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan antara lain berupa Prasarana berupa tanah , bangunan, dan instalasi yang digunakan diantaranya sebagai kantor Perseroan, stasiun kereta api, pemberhentian dengan layanan, emplasemen dan balai yasa, Sarana berupa lokomotif, kereta, dan gerbong yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha Perseroan, Fasilitas berupa mesin dan peralatan, kendaraan, dan inventaris, dan hak kekayaan intelektual sebagai penunjang kegiatan usaha Perseroan, dan Perseroan telah melindungi harta kekayaannya dengan asuransi, dengan penjelasan di bawah ini:

7.1 Aset Tetap

Aset tetap Perseroan terdiri dari Prasarana berupa tanah, bangunan, dan instalasi, Sarana berupa lokomotif, kereta, dan gerbong, dan Fasilitas berupa mesin dan peralatan, kendaraan, dan inventaris. Berdasarkan Daftar Aset Tetap Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan pada tanggal 20 Agustus 2024.

Aset tetap yang saat ini dimiliki oleh Perseroan diperoleh dari penyertaan modal oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);

7.0.1. Prasarana (Tanah, Bangunan, dan Instalasi)

Prasarana yang dimiliki oleh Perseroan berdiri di atas tanah yang tersebar di 9 (sembilan) Daerah Operasi dan 4 (empat) Divisi Regional dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Kereta Api Indonesia, Sertifikat Hak Guna Bangunan, dan Sertifikat Hak Pengelolaan. Tanah tersebut umumnya digunakan untuk, antara lain, kantor Perseroan, stasiun kereta api, pemberhentian dengan layanan, emplasemen dan balai yasa.

Seluruh sertipikat hak atas tanah terdaftar atas nama Perseroan, masih berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prasarana berupa tanah beserta bangunan tersebut tidak sedang dibebani hak tanggungan, dan tidak dalam status sengketa atau perkara. Pemilikan dan/atau penguasaan prasarana berupa tanah beserta bangunan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

7.0.2. Sarana (Lokomotif, Kereta, dan Gerbong)

Pada tanggal Prospekus, Perseroan memiliki sarana berupa (i) 5 (lima) unit Lokomotif Uap, (ii) 582 (lima ratus delapan puluh dua) unit Lokomotif Diesel, (iii) 2.467 (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh) unit kereta penumpang, (iv) 213 (dua ratus tiga belas) unit kereta rel diesel dimana 6 (enam) unit di antaranya difungsikan sebagai *rail clinic*, (v) 203 (dua ratus tiga) unit kereta rel listrik, (vi) 198 (seratus sembilan puluh delapan) unit *light rail transit*, dan (vii) 9.957 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) Gerbong.

Kepemilikan Sarana oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana tersebut bebas dari sengketa dan tidak sedang menjadi agunan kecuali terhadap:

- a. 600 unit Gerbong Buka, 600 unit Gerbong Datar, dan 1.213 unit Gerbong Datar, dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 6 November 2012, dibuat di hadapan Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Bandung, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedelapan atas Perjanjian Kredit No: 374/Add-KCK/2022;
- b. 1.200 unit Gerbong Buka, 1.200 unit Gerbong Datar dan 144 unit Lokomotif Diesel, dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi Pengadaan 144 Unit Lokomotif dan 2.400 Unit Gerbong (PPCW dan KKBW Kap 50 ton) No. 13 tanggal 9 Maret 2011, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Perubahan V Perjanjian Kredit Sindikasi No. 5 (13) tanggal 8 Juli 2021; dan
- c. 50 unit Lokomotif Diesel, dijaminkan kepada HSBC Bank USA, National Association dan Export-Import Bank of the United State sehubungan dengan Perjanjian Kredit No. AP087413XX tertanggal 15 Oktober 2014, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. 1 tanggal 26 Januari 2015.

Penjaminan atas sebagian Sarana milik Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi gagal bayar dan jaminan berupa sebagian Sarana milik Perseroan dieksekusi, maka hal tersebut akan berdampak material terhadap Perseroan.

7.0.3. Fasilitas (Mesin dan Peralatan, Kendaraan, dan Inventaris)

a. Mesin, Peralatan, dan Inventaris

Pada tanggal Prospektus, Perseroan memiliki aset berupa mesin, peralatan, dan inventaris untuk menunjang kegiatan usaha.

b. Kendaraan Bermotor

Pada tanggal Prospektus, Perseroan memiliki kendaraan bermotor sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) unit terdiri dari 183 (seratus delapan puluh tiga) unit kendaraan roda dua, 4 (empat) unit kendaraan roda tiga, dan 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) unit kendaraan roda empat.

Fasilitas berupa mesin dan peralatan, kendaraan, dan inventaris yang dimiliki Perseroan tidak sedang dibebani gadai atau jaminan fidusia, dan tidak dalam status sengketa atau perkara. Pemilikan dan/atau penguasaan fasilitas berupa mesin dan peralatan, kendaraan, dan inventaris telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

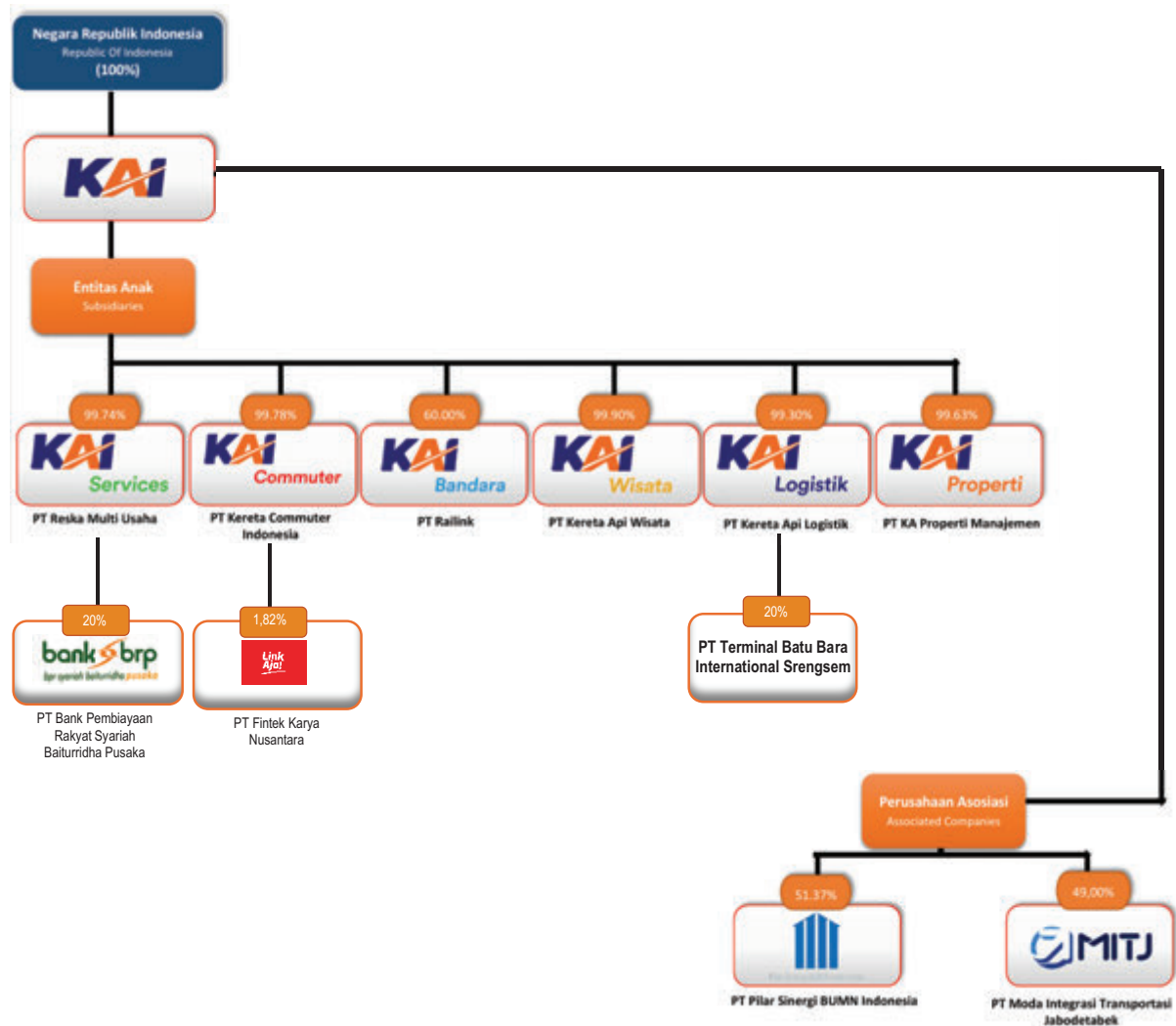
7.2 Deposito

Perseroan memiliki 1 (satu) deposito pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka yang dibuktikan dengan Nota Warkat Deposito No. 2200205 tanggal 22 Juli 2024 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) atas nama Perseroan, yang jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2025.

Deposito Bank yang dimiliki oleh Perseroan yang terdaftar atas nama Perseroan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

8. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ASOSIASI

Diagram Kepemilikan Perseroan Dengan Perusahaan Anak, Entitas Asosiasi, Perusahaan Terafiliasi, dan Pemegang Saham Perseroan.



Sumber: Perseroan

Pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sebagai pemilik 100% (seratus persen) saham pada Perseroan dan merupakan pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan termasuk memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No. 13/2018"), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang bukan perorangan.

Perseroan telah melaporkan Pemilik Manfaat Perseroan yaitu Direktur Utama Perseroan atas nama Didiek Hartantyo. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direktur Utama atau Direksi Perseroan sehingga apabila Didiek Hartantyo tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru.

9. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	:	Said Aqil Siroj
Komisaris	:	Sri Paduka Mangkoenagoro X
Komisaris	:	Diah Natalisa
Komisaris	:	Chairul Anwar
Komisaris	:	Mohamad Risal Wasal
Komisaris Independen	:	Rochadi
Komisaris Independen	:	Endang Tirtana
Komisaris Independen	:	Johan Bakti Porsea Sirait

Dewan Komisaris yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

0.1. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-417/MBU/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 277 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0494849 tanggal 31 Desember 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-023559.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, sehubungan dengan pengangkatan Endang Tirtana selaku Komisaris Independen Perseroan.

0.2. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-64/MBU/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 94 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.-1.03-0178368 tanggal 19 Maret 2021 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051827.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021, sehubungan dengan pengangkatan Said Aqil Siroj selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Rochadi selaku Komisaris Independen, Diah Natalisa selaku Komisaris, dan Chairul Anwar selaku Komisaris Perseroan.

0.3. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-173/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-174/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 30 tanggal 5 September 2022 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0052983 tanggal 9 September 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178648.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 September 2022, sehubungan dengan pengangkatan Johan Bakti Porsea Sirait selaku Komisaris Independen dan Sri Paduka Mangkoenagoro X selaku Komisaris Perseroan.

0.4. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-207/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 383 tanggal 30 September 2022 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0063053 tanggal 7 Oktober 2022 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022, sehubungan dengan pengangkatan Mohamad Risal Wasal selaku Komisaris Perseroan.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan Dewan Komisaris telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir untuk Dewan Komisaris. Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris Perseroan:



Said Aqil Siroj

Komisaris Utama dan Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 71 Tahun, Lahir di Cirebon pada tahun 1953.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Usuludin dan Dakwah, Fakultas Syari'ah dari Universitas King Abdul Aziz Cabang Mekkah tahun 1982, memperoleh gelar Master Bidang Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin dari Universitas Umm Al-Qura Mekkah tahun 1987, dan memperoleh gelar Doktor Bidang Aqidah/Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dari Universitas Umma Al-Qura Mekkah tahun 1987. Selain itu, beliau mendapatkan gelar Guru Besar bidang Tasawuf dai IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2014.

Diangkat menjadi Komisaris Utama Perseroan pada Tahun 2021.

Pengalaman Kerja :

Periode	Nama Institusi	Posisi
1995 – Sekarang	UI, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Islam Malang	Dosen Pasca Sarjana
1999 – 2003	Universitas Islam Malang	Direktur Pasca Sarjana
1999 – 2004	MPR – RI	Anggota MPR – RI Utusan Golongan
2010 – 2021	PBNU	Ketua Umum PBNU
2012 - 2015	Universitas Indonesia	Ketua Majelis Wali Amanat UI
2012 – 2019	Pelindo II Group	Komisaris Independen PT Pelabuhan Tanjung Priok
2019 – 2020	Pelindo II Group	Komisaris Independen PT Rumah Sakit Pelabuhan
2017 – Sekarang	Badan Pengkajian Ideologi Pancasila RI	Anggota BPIP
2019 – Sekarang	Religions for Peace	Vice President Religions for Peace
2022 – Sekarang	PBNU	Mustasyar
2021 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Komisaris Utama/Komisaris Independen



Rochadi

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 62 Tahun, Lahir di Jakarta pada 1962.

Menyelesaikan pendidikan Akademi Militer di TNI Angkatan Darat tahun 1986, menyelesaikan pendidikan Sussarcab Infanteri di TNI Angkatan Darat tahun 1986, menyelesaikan pendidikan Suslapa I di TNI Angkatan Darat tahun 1991, menyelesaikan pendidikan Suslapa II di TNI Angkatan Darat tahun 1995 dan menyelesaikan Seskoad di TNI Angkatan Darat Tahun 2000.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan Perseroan pada tahun 2021.

Pengalaman kerja:

Periode	Nama Institusi	Posisi
2003	TNI Angkatan Darat	Dandim 0616/Indramayu
2007	TNI Angkatan Darat	Waasops Kasdam III/Siliwangi
2010	TNI Angkatan Darat	Danbrigif 19/ KT Dam XII/TPR
2011	TNI Angkatan Darat	Aster Kasdam III/Siliwangi
2013	TNI Angkatan Darat	Danrem 044/Gapo Dam II/Sriwijaya
2014	TNI Angkatan Darat	Irdam III/Sriwijaya
2015	TNI Angkatan Darat	Paban Sahli Kasad Bidang Orkes Sahli Kasad
2016	TNI Angkatan Darat	Danpusdikter Pusterad
2018	TNI Angkatan Darat	Direktur A BAIS TNI
2019	TNI Angkatan Darat	Dankoopasus TNI
2021 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Komisaris Independen



Endang Tirtana

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 43 Tahun, Lahir di Padang Balai pada 1981.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Aqidah Filsafat dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padang tahun 2000 dan memperoleh gelar Magister Ilmu Administrasi dari Universitas Krisnadwipayana tahun 2021.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2021.

Pengalaman kerja:

Periode	Nama Institusi	Posisi
2010 – 2015	Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik	Pimpinan Pusat Muhammadiyah
2017 – Sekarang	Indonesia Watch for Democracy	Direktur
2019 – Sekarang	Maarif Institute For Culture and Humanity	Peneliti Senior
2020 – 2021	PT Semen Baturaja	Komisaris Independen
2021 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Komisaris Independen



Johan Bakti Porsea Sirait

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 48 Tahun, Lahir di Jakarta pada 1976.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya tahun 1996.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2022.

Pengalaman Kerja :

Periode	Nama Institusi	Posisi
2005 – 2009	Kewiraswastaan Dalam Industri Film Indonesia	Produser Eksekutif
2009 – Sekarang	PT Menara Medika Pratama	Co- Founder & Komisaris
2022 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Komisaris Independen



Diah Natalisa
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 61 Tahun, Lahir di Palembang pada 1963.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Sriwijaya tahun 1987, memperoleh gelar Master of Management dari University of Kentucky tahun 1992, dan memperoleh gelar Doktor Program Studi Ilmu Ekonomi di Universitas Airlangga tahun 1999.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2021.

Pengalaman Kerja:

Periode	Nama Institusi	Posisi
2005 – 2008	Universitas Sriwijaya	Ketua Program Studi Magister Manajemen
2008 – Sekarang	Universitas Sriwijaya	Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi
2016 – Sekarang	Kementerian PAN & RB	Deputi Bidang Pelayanan Publik
2021 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Komisaris



Chairul Anwar
Komisaris

Warga Negara Indonesia, 63 Tahun, Lahir di Jakarta pada 1961.

Menyelesaikan pendidikan AKPOL pada tahun 1986, PTIK pada tahun 1995, SESPIMPOL pada tahun 2001, dan SESPATI POLRI pada tahun 2009 di Kepolisian Republik Indonesia serta Pendidikan LEMHANAS pada Tahun 2013 di LEMHANAS Republik Indonesia.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2021.

Pengalaman Kerja:

Periode	Nama Institusi	Posisi
2010	Kepolisian Republik Indonesia	Penyidik Utama Tk. I, DIT III
2011	Kepolisian Republik Indonesia	Penyidik Utama Tk. I, Rowassidik
2013	Kepolisian Republik Indonesia	Analisis Kebijakan Dittipidum
2013 – 2016	Kepolisian Republik Indonesia	Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa
2019	Kepolisian Republik Indonesia	Ketua Pelaksana Harian Satgas Penanganan Pengungsi dari Luar Negri
2020 – 2021	PT Angkasa Pura Solusi	Komisaris
2021 - Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Komisaris



Sri Paduka Mangkoenagoro X

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 27 Tahun, Lahir di Surakarta pada 1997.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2019.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2022.

Pengalaman Kerja:

Periode	Nama Institusi	Posisi
2019 – 2022	Hendra Soenardi <i>Law Firm</i>	Associate
2022 - Sekarang	Pura Mangkunegaran Surakarta	Pengageng Puro Mangkunegaran Surakarta
2022 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Komisaris



Mohamad Risal Wasal

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 57 Tahun, Lahir di Jakarta pada 1967.

Menyelesaikan pendidikan D3 LLAJR di Balai Diklat LLAJ tahun 1989, D4 Lalu Lintas Angkutan Jalan di Sekolah Tinggi Transportasi Darat tahun 1997 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen tahun 2000.

Diangkat menjadi Komisaris Perseroan pada tahun 2022.

Pengalaman kerja:

Periode	Nama Institusi	Posisi
2018 – 2019	Kementerian Perhubungan	Direktur Pembinaan Keselamatan
2019 – 2020	Kementerian Perhubungan	Direktur Prasarana Transportasi Jalan
2020 – 2021	Kementerian Perhubungan	Direktur Sarana Transportasi Jalan
2021 – 2022	Kementerian Perhubungan	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
2022 - Sekarang	Kementerian Perhubungan	Direktur Jenderal Perkeretaapian
2022 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Komisaris

Pelaksanaan Tugas

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang (RJP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Dewan Komisaris diatur dalam Panduan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*), sebagai berikut:

1. Menyusun program kerja tahunan dan memasukkannya ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
2. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan setelah tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
3. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;
4. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki masalah yang terjadi;

5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepentingan Perusahaan
6. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada RUPS mengenai laporan apabila diminta;
7. Mengajukan usulan indikator pencapaian kinerja Dewan Komisaris Individu dan Kumulatif untuk diterapkan oleh RUPS;
8. Menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi indikator pencapaian kinerja kepada pemegang saham;
9. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP
10. Menandatangani Laporan Manajemen dan Laporan Tahunan. Dalam hal terdapat Anggota Dekom tidak bersedia menandatangani Laporan Tahunan maka harus disebutkan alasannya secara tertulis.
11. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;
12. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan RJPP, RKAP serta ketentuan Anggaran Dasar dan RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Kinerja Dewan Komisaris baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan maupun fungsi penasihat, termasuk berbagai kegiatan yang meliputi surat menyurat, rapat koordinasi maupun kunjungan ke obyek pengawasan, dilaporkan setiap bulan, triwulanan dan tahunan kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Perusahaan. Laporan Kinerja Dewan Komisaris bulanan, triwulanan dan tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penasihat kepada manajemen Perseroan yang mencakup ringkasan eksekutif laporan Dewan Komisaris Bulanan, daftar kehadiran Dewan Komisaris, surat menyurat, kegiatan Dewan Komisaris di luar kegiatan rutin; lampiran-lampiran seperti risalah rapat, surat keluar Dewan Komisaris, surat keluar Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Prosedur Penetapan Dan Remunerasi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2013 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN telah ditetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang mencakup gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan tantiem Kriteria penetapan remunerasi tersebut adalah:

- a. Penetapan Penghasilan yang berupa Gaji atau Honorarium, Tunjangan, dan Fasilitas yang bersifat tetap dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, dan faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Penetapan Penghasilan yang berupa Tantiem/Insentif Kinerja/LTI yang bersifat variabel (merit rating) dilakukan dengan mempertimbangkan faktor kinerja dan kemampuan keuangan perusahaan, serta faktor lain yang relevan.

Sesuai dengan Penetapan Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris serta Tantiem/Insentif Kerja melalui Surat Nomor: SR-4/Wk.MBU.11/07/2023 yang merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN dan SK Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN Tahun 2023 nilai remunerasi yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris 31 Mei 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp9.720.000 ribu dan Rp24.596.468 ribu.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, telah diselenggarakan 17 kali Rapat Dewan Komisaris dengan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris rata-rata 71,0%. Setiap Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama dan semua keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Setiap keputusan rapat didokumentasikan dan dipantau pelaksanaannya.

Berikut adalah rekapitulasi kehadiran Tingkat kehadiran rapat internal Dewan Komisaris tahun 2024:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dihadiri (X)	Persentase Kehadiran (%)
Said Aqil Siroj	Komisaris Utama	10	60
Rochadi	Anggota Komisaris	15	88
Endang Tirtana	Anggota Komisaris	16	88
Johan Bakti Porsea Sirait	Anggota Komisaris	12	71
Elen Setiadi*	Anggota Komisaris	10	91
Diah Natalisa	Anggota Komisaris	14	82
Chairul Anwar	Anggota Komisaris	17	100
Sri Paduka Mangkoenagoro X	Anggota Komisaris	10	59
Mohamad Risal Wasal	Anggota Komisaris	12	71

**telah selesai masa jabatannya pada 2 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Nomor: SK-192/MBU/08/2024 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.*

Manfaat tambahan lain bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah Asuransi Purna Jabatan, sesuai peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor PER-3/MBU/03/2023, bahwa Asuransi Purna Jabatan diberikan selama menjabat (mulai diangkat sampai berhenti), di mana premi yang ditanggung oleh Perseroan paling banyak 25% dari gaji dalam setahun. Pemilihan program untuk asuransi tersebut ditetapkan oleh masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Direksi

Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Didiek Hartantyo
Direktur Niaga	: Hadis Surya Palapa
Direktur Operasi	: Awan Hermawan Purwadinata
Direktur Pengelolaan Prasarana	: Heru Kuswanto
Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana	: John Robertho
Direktur Keselamatan dan Keamanan	: Dadan Rudiansyah
Direktur SDM dan Umum	: Rosma Handayani
Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan	: Rudi As Aturridha
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Salusra Wijaya

Direksi Perseroan diangkan berdasarkan:

- 2.1 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-236/MBU/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 84 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0297832 tanggal 21 Juli 2020 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116960.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020, sehubungan dengan pengangkatan Salusra Wijaya selaku Direktur Keuangan Perseroan.
- 2.2 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 01 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075399 tanggal 5 Februari 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0022844.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021, sehubungan dengan pengangkatan Didiek Hartantyo selaku Direktur Utama.

- 2.3 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-48/MBU/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 132 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0143714 tanggal 5 Maret 2021 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041950.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021, sehubungan dengan pengangkatan Heru Kuswanto selaku Direktur Operasi.
- 2.4 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Kereta Api Indonesia No. 15 tanggal 6 April 2022 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0003262 tanggal 11 April 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071077.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022, sehubungan dengan pengalihan penugasan Anwan Hermawan yang semula Direktur Pengelolaan Prasarana menjadi Direktur Operasi, Heru Kuswanto yang semula Direktur Operasi menjadi Direktur Pengelolaan Prasarana, Hadis Surya Palapa selaku Direktur Niaga.
- 2.5 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-322/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Danggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 50 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0195208 tanggal 12 Desember 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0251244.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, sehubungan dengan perubahan nomenklatur yang semula Direktur Pengelolaan Sarana menjadi Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana, pengalihan penugasan John Robertho yang semula Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana Perseroan, dan pengangkatan Rudi As Aturridha selaku Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perseroan.
- 2.6 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-62/MBU/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 104 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan

No. AHU-AH.01.09-0113858 tanggal 21 Maret 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059392.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024, sehubungan dengan pengangkatan Rosma Handayani selaku Direktur SDM dan Umum, Dadan Rudiansyah selaku Direktur Keselamatan dan Keamanan Perseroan.

- 2.7 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 191/MBU/08/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 47 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0241626 tanggal 20 Agustus 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173945.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024, sehubungan dengan pengangkatan Awan Hermawan selaku Direktur Operasi dan John Robertho selaku Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan masing-masing Direktur ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pengangkatan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja berakhir untuk Direksi. Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Direksi Perseroan:

Masa jabatan masing-masing Direksi adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.



Didiek Hartantyo
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 63 Tahun, Lahir di Surakarta pada 1961.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sebelas Maret, Surakarta tahun 1985 dan memperoleh gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Daniel School of Business, University of Denver, USA tahun 1995.

Diangkat menjadi Direktur Perseroan pada tahun 2021.

Pengalaman kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
2010 – 2011	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Group Head Financial Institution
2011 – 2014	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Group Head Corporate Banking II
2014 – 2016	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Group Head Corporate Real Estate
2016 – 2020	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur Keuangan
2020 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur Utama



Hadis Surya Palapa
Direktur Niaga

Warga Negara Indonesia, 59 Tahun, Lahir di Yogyakarta pada 1965.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Kristen Maranatha tahun 1992 dan memperoleh gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Brunel University London, Inggris tahun 2007.

Diangkat menjadi Direktur pada tahun 2022.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
Agustus 2009 – Desember 2016	PT Bukit Asam Tbk	Project Manager
Desember 2016 – Desember 2017	PT Satria Bahana Sarana	Direktur Utama
Januari 2018 – Januari 2020	PT Bukit Asam Tbk	GM Pelabuhan Tarahan
Januari 2020 – Juni 2020	PT Bukit Asam Tbk	Sekretaris Perusahaan
Juni 2020 – April 2021	PT Bukit Asam Tbk	Direktur Operasi
Maret 2022 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur Niaga



Awan Hermawan Purwadinata
Direktur Operasi

Warga Negara Indonesia, 58 Tahun, Lahir di Bandung pada 1966.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung tahun 1990 dan memperoleh gelar Master Teknik Perkeretaapian dari Institut Teknologi Bandung tahun 2000.

Diangkat menjadi Direktur pada tahun 2019.

Pengalaman Kerja :

Periode	Perusahaan	Posisi
September 2012 – April 2014	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Vice President Technical Engineering of Infrastructure
April 2014 – November 2014	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Executive Vice President Track and Bridge
November 2014 – Maret 2015	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Executive Vice President Divisi Regional III Sumatera Selatan
Maret 2015 – Agustus 2015	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Deputy EVP II Daop 1 Jakarta Bidang Pelayanan dan Komersial
Agustus 2015 – Mei 2017	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Corporate Deputy Director of Freight Marketing and Sales
Mei 2017 – Agustus 2019	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Corporate Deputy Director of Infrastructure Maintenance and Infrastructure Assets
Agustus 2019 – Desember 2019	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur Operasi
Desember 2019 – Maret 2022	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur Pengelolaan Prasarana
Maret 2022 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur Operasi



Heru Kuswanto
Direktur Pengelolaan Prasarana

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun, Lahir di Grobogan pada 1971.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gajah Mada tahun 1999.

Diangkat menjadi Direktur pada tahun 2022.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
2000 – 2004	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Kasubsi Pengembangan Organisasi
2004 – 2007	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Kepala Stasiun Besar Bandung
2007 – 2008	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Wassi Opsar 6B Solo Daop 6 Yk
2008 – 2009	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Wasiop 8B Surabaya Daop 8 Sby
2009 – 2010	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Manager Operasi
2011 – 2012	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Senior Manager Operasi 1 Jakarta PT KAI
2012 – 2012	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Deputy Eksekutif Vice President 1 Daop 1 Jakarta PT KAI
2012 – 2012	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Deputy Vice President Daerah Operasi 4 Semarang PT KAI
2013 – 2015	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Vice President Sub Divre III.2 Tanjungkarang PT KAI
2015 – 2019	PT Railink	Direktur Utama
2019 – 2019	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Plt. Executive Vice President National dan Corporate Strategic Projects
2019 – 2019	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	PYMT. EVP Medium and High Speed Train
2019 – 2020	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	PYMT. EVP LRT Jabodebek
2019 – 2020	PT Kereta Api Indonesia (Persero) PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Corporate Deputy Director of New Business Development and Strategic Projects
2020 - 2021	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Corporate Deputy Director of Assets Development
2021 – Sekarang	PT KAI Wisata	Plt. Komisaris Utama
2021 – 2022	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur Operasi
2022 - Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur Pengelolaan Prasarana



John Robertho

Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana

Warga Negara Indonesia, 61 Tahun, Lahir di Martebing pada 1963.

Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tebing Tinggi Deli Sumatera Utara tahun 1982 dan memperoleh gelar Sarjana Teknik Mesin dari Universitas HKBP Nommensen tahun 1989.

Diangkat menjadi Direktur pada tahun 2019.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
Mei 2017 – Sept 2017	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Corporate Deputy Director Of Freight Marketing And Sales
Sept 2017 – Mar 2019	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Executive Vice President Light Transit Jabodebek
Mar 2019 – Aug 2019	PT KAI Commuter Jabotabek	PLT Technical Director PT KAI Commuter
Aug 2019 – Oct 2022	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Managing Director of Safety and Security
Oct 2022 – Nov 2023	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Managing Director of Strategic Planning and Business Development
Nov 2023 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Managing Director of Strategic Planning and Rollingstock



Dadan Rudiansyah

Direktur Keselamatan dan Keamanan

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun, Lahir di Tasikmalaya pada 1972.

Menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Tasikmalaya tahun 1991 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung tahun 1996.

Diangkat menjadi Direktur pada tahun 2024.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
2013 – 2017	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Executive Vice President Legal
2017 – 2017	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Executive Vice President Daop 8 Surabaya
2017 – 2020	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Executive Vice President Daop 1 Jakarta
2020 – 2021	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Executive Vice President Corporate Secretary
2021 – 2022	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur Niaga
2022 – Maret 2024	Perum DAMRI	Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha
Maret 2024 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur Keselamatan dan Keamanan



Rosma Handayani
Direktur SDM dan Umum

Warga Negara Indonesia, 55 Tahun, Lahir di Jakarta pada 1969.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia tahun 1993 dan memperoleh gelar Magister Management dari Universitas Gadjah Mada tahun 2004.

Diangkat menjadi Direktur pada tahun 2024.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
2020	PT Bank Syariah Mandiri	Direktur Compliance & Human Capital
2020 – 2021	PT Bank Syariah Mandiri	SEVP Human Capital Bank Syariah Mandiri
2021 – 2024	PT Bank Syariah Indonesia	SEVP Human Capital Bank Syariah Indonesia
2024 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur SDM dan Umum



Rudi As Aturridha
Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan

Warga Negara Indonesia, 52 Tahun, Lahir di Jakarta pada 1972.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti tahun 1996 dan sedang menempuh pendidikan S2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti sejak tahun 2022.

Diangkat menjadi Direktur pada tahun 2023.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
2017 – 2018	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Area Head Yogyakarta – Region VII/ Jawa 2
2018 – 2018	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Department Head Internal Audit Channel Alignment – Consumer Loan Group
2018 – 2019	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Department Head Public & Private Company Relationship – Consumer Loans Group
2019 – 2020	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Department Head Corporate Communication – Corporate Secretary Group
2020 – 2023	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Group Head Corporate Secretary Group
2023 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan



Salusra Wijaya
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Warga Negara Indonesia, 61 Tahun, Lahir di Padang pada 1963.

Menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 1988 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari University of Birmingham tahun 1997.

Diangkat menjadi Direktur pada tahun 2020.

Pengalaman Kerja:

Periode	Perusahaan	Posisi
1986 – 1988	Prasetio Utomo (Arthur Andersen – E&Y Ernst and Young)	Public Accountant
1988 – 1990	PT McDermott Ind	Project Accountant
1990 – 1999	PT Bank Niaga	Finance Planning & Accounting Division
2000 – 2004	PT Holdiko Perkasa	Finance Director
2005 – 2010	PT Surya Citra Televisi (SCTV)	Finance & Operator Director
2010 – 2011	PT Surya Citra Media (SCM)	Finance & Operator Director
2013 – 2018	PT PLN (Batam)	Finance & Human Resource Director
2018 – 2019	PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (PT Pelabuhan Indonesia II Group)	President Director
2019 – 2020	PT Pelabuhan Tanjung Priok (PT Pelabuhan Indonesia II Group)	Finance & Human Resource Director
2020 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Perseroan melakukan pemenuhan atas kualifikasi tertentu oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Kementerian BUMN. Tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung Jawab

Direksi melaksanakan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab kepada RUPS. Direksi bertanggung jawab dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG. Direksi melakukan pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi mengacu pada Board Manual Direksi yang antara lain mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat Direksi. Tugas dan tanggung jawab Direksi meliputi:

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
2. Direksi dalam melaksanakan tugasnya harus dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan;

4. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapatrapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN;
5. Direksi wajib melaporkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;
6. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
7. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi;
8. Memelihara Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan, dan dokumen Perseroan lainnya;
9. Menyimpan di tempat kedudukan Perseroan; Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan dokumen keuangan Perseroan serta dokumen Perseroan lainnya;
10. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
11. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham;
12. Menyiapkan susunan organisasi Perseroan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
13. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham;
14. Menyusun dan menyiapkan blue print organisasi Perseroan;
15. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang datur dalam Anggaran Dasar dan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan peraturan perundang-undangan;
16. Menerapkan good corporate governance secara konsisten;
17. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi memiliki wewenang sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual*, meliputi:

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perseroan;
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan
4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian, Perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS;
5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan;
7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal, dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Remunerasi Dewan Direksi

Gaji pokok, tantiem, dan tunjangan hari raya keagamaan yang dibayarkan kepada Direksi 31 Mei 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp21.060.000 ribu dan Rp47.978.465 ribu.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Selama tahun 2024, telah diselenggarakan 20 kali Rapat Direksi dengan tingkat kehadiran anggota Direksi rata-rata 86,5%. Setiap Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan semua keputusan rapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Setiap keputusan rapat didokumentasikan dan dipantau pelaksanaannya.

Berikut adalah rekapitulasi kehadiran Anggota Direksi dalam Rapat Internal Direksi Tahun 2024 :

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat Dihadiri (X)	Persentase Kehadiran (%)
Didiek Hartantyo	Direktur Utama	20	100
Hadis Surya Palapa	Direktur	20	100
Awan Hermawan Purwadinata	Direktur	20	100
Heru Kuswanto	Direktur	19	95
John Robertho	Direktur	18	90
Dadan Rudiansyah	Direktur	12	95
Rosma Handayani	Direktur	13	100
Rudi As Aturridha	Direktur	17	85
Salusra Wijaya	Direktur	20	100

Saat ini Direksi Perseroan hanya mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Sinergi Solusi tentang *Safety Leadership*.

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Perusahaan Anak

Nama	Perseroan	KALOG	KAWIS	KAPM	KCI	Railink	RMU
Said Aqil Siroj	KU & KI	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Sri Paduka Mangkoenagoro X	K	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Mohamad Risal Wasal	K	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Diah Natalisa	K	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Chairul Anwar	K	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Johan Bakti Porsea Sirait	KI						
Rochadi	KI	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Endang Tirtana	KI	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Didiek Hartantyo	DU	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Heru Kuswanto	D	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Awan Hermawan Purwadinata	D	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Hadis Surya Palapa	D	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Rudi As Aturridha	D	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Rosma Handayani	D	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Dadan Rudiansyah	D	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Salusra Wijaya	D	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
John Robertho	D	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Keterangan:

KU	:	Komisaris Utama
KI	:	Komisaris Independen
K	:	Komisaris
DU	:	Direktur Utama
D	:	Direktur
Plt	:	Pelaksana Tugas

Sampai dengan saat Prospektus ini diterbitkan tidak ada sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan.

3. Tata Kelola Perusahaan

Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai alat untuk menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan serta memperkuat daya saing Perseroan. Perusahaan telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG secara bertahap dan berkelanjutan. Perseroan juga senantiasa mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik yang disesuaikan dengan kebutuhan praktik bagi Perseroan.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di lingkungan Perseroan bertujuan untuk keberhasilan pencapaian visi dan misi Perseroan melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) nilai utama yaitu Integritas, Profesional, Keselamatan, Inovasi dan Pelayanan Prima. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) dalam setiap aktivitas bisnisnya. Perseroan telah mengembangkan sistem, struktur dan kebijakan pendukung GCG sebagai upaya meningkatkan nilai Perseroan dan menunjang pencapaian kinerja Perseroan di masa depan.

a. Tujuan Penerapan Prinsip-Prinsip GCG

Dengan menerapkan lima prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, serta kewajaran, Perseroan ingin mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat, mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan perusahaan;
2. Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan;
3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan;
4. Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional;
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

b. Pedoman dan Kebijakan Dasar GCG

Sebagai wujud dari komitmen KAI untuk mengimplementasikan GCG yang baik secara penuh, Perusahaan memberlakukan berbagai kebijakan dan panduan seperti Pedoman GCG, Kode Etik, Panduan Dewan (Board Manual), Piagam Komite Dewan Komisaris, Piagam Audit Internal, serta kebijakan turunan lainnya yang dibuat untuk mendukung penerapan GCG secara konsisten dan berkesinambungan. Kebijakan-kebijakan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Pedoman GCG
Pedoman GCG ditetapkan melalui Surat Keputusan ("SK") Direksi Nomor: KEP.U/HK.215/ VIII/1/ KA-2005 tanggal 19 Agustus 2005 tentang Panduan *Good Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan yang kemudian dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan melalui SK Direksi Nomor: KEP.U/ HK.215/IV/1/KA-2006 tanggal 12 April 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan *Good Corporate Governance* di lingkungan Perusahaan. Pedoman GCG tersebut telah disesuaikan dan diperbaharui melalui SK Direksi Nomor: KEP.U/ OT.104/X/4/ KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*). Selanjutnya disesuaikan dan diperbaharui melalui Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/XII/1/KA-2020 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*)

2. **Pedoman Perilaku & Kode Etik**
Pedoman Perilaku ditetapkan melalui SK Direksi Nomor: KEP.U/ HK.215/V/1/KA-2009 tanggal 12 Mei 2009 tentang Kode Etik Perusahaan yang telah diperbaharui dengan SK Direksi Nomor: KEP.U/ HK.215/X/3/KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014. Selanjutnya disesuaikan dan diperbaharui melalui Peraturan Direksi No PER.U/KC.202/II/1/KA-2022 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
3. **Board Manual**
Board Manual sebagai acuan kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi pada bulan Februari 2013. Untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas Dewan Komisaris, pada tahun 2017 Dewan Komisaris dan Direksi telah menyepakati pembedaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat khusus sebagaimana dijabarkan dalam keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi Nomor: 04/ CH/KOM/III/2017 dan Nomor: KEP.U/KO.101/ III/15/KA-2017 tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) PT KAI.
4. **Sistem Pelaporan Pelanggaran**
Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) ditetapkan dalam SK Direksi Nomor: KEP.U/HK.215/ II/2/KA-2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero). Selanjutnya disesuaikan dan diperbaharui melalui Peraturan Direksi Nomor PER.U/KL.104/II/1/KA-2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*).
5. **Pedoman Pengendalian Gratifikasi**
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Perusahaan diatur dalam SK Direksi Nomor: KEP.U/KC.202/IX/1/KA-2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Pedoman ini dibuat untuk membentuk pemahaman yang sama tentang perlakuan terhadap gratifikasi serta membantu insan KAI untuk tidak terjerat ke dalam praktik gratifikasi yang termasuk tindak pidana suap. Selanjutnya disesuaikan dan diperbaharui melalui Peraturan Direksi Nomor PER.U/KC.202/XI/1/KA-2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi.
6. **Pedoman Benturan Kepentingan**
Pedoman Benturan Kepentingan diatur melalui SK Direksi Nomor: KEP.U/OT.104/X/3/KA-2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*). Sebagai tindak lanjut atas penyusunan pedoman tersebut, Perusahaan mewajibkan insan KAI yang berpotensi dan atau telah berada dalam kondisi benturan kepentingan untuk menandatangani surat pernyataan potensi benturan kepentingan.
7. **Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)**
Pengelolaan kepatuhan penyampaian LHKPN diselenggarakan oleh unit QA & GCG sesuai dengan SK Direksi Nomor: KEP.U/KP.402/II/1/KA- 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KP.402/V/1/ KA-2016 tentang Tata Cara Pelaporan, Pengumuman & Pengelolaan LHKPN. Merupakan penyempurnaan Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KP.402/V/1/KA-2016 tentang Tata Cara Pelaporan, Pengumuman & Pengelolaan LHKPN. Pedoman tersebut mengatur tentang wajib lapor, tata cara penyampaian, pengumuman, pengelolaan LHKPN, dan sanksi pelanggaran. *Monitoring* penyampaian LHKPN telah diselenggarakan secara komputerisasi. *Monitoring* dapat dilakukan secara *real time* baik oleh pengelola maupun oleh wajib lapor dan atasan langsungnya. Selanjutnya disesuaikan dan diperbaharui melalui Peraturan Direksi Nomor PER.U/KP.402/XII/1/ KA-2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Direksi Nomor: PER.U/KP.402/IV/1/KA-2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

8. Piagam Komite Dewan Komisaris
Piagam Komite Dewan Komisaris yang merupakan acuan pelaksanaan tugas bagi organ-organ pendukung Dewan Komisaris yang terdiri dari:
 - Piagam Komite Audit berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor 01A/CIA/KOM/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017
 - Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: 01/SK/KPMR/ IV/2014 tanggal 15 April 2014 tentang Pedoman Kerja Komite Pemantau Manajemen Risiko yang telah diperbaharui berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor: 06/KPMR/XI/2015. Selanjutnya disesuaikan dan diperbaharui melalui SK Dewan Komisaris Nomor: 82A/KPMR/VIII/2019 Tentang Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko. Kemudian telah disesuaikan dan diperbaharui melalui SK Dewan Komisaris Nomor: 27/KPMR/XI/2021 tentang Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko.
 - Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan SK Dewan Komisaris No 05/CH/DEKOM/III/2021 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
9. Piagam Audit Internal
Piagam Audit Internal ditetapkan melalui SK Direksi Nomor KEP.U/OT.104/VII/1/KA-2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Internal Audit Charter (Piagam Pengawasan Internal) Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PT KAI (Persero). Pada tanggal 24 Januari 2017 telah dilakukan pemutakhiran Piagam Audit Internal melalui SK Direksi Nomor: KEP.U/ KG.210/II/1/ KA-2017 tentang *Internal Audit Charter* (Piagam Pengawasan Internal di lingkungan KAI). Selanjutnya disesuaikan dan diperbaharui melalui SK.U/KG.210/II/1/KA-2024 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter).
10. Standar Prosedur Operasional Keterbukaan Informasi Publik
Untuk memenuhi dan melayani kebutuhan publik mengenai informasi laporan kinerja keuangan dan non keuangan, Perusahaan telah menyusun Standar Prosedur Operasional Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan SK Direksi Nomor: KEP.U/ HK.003/XII/1/KA- 2010 tanggal 6 Desember 2010, dan telah diperbaharui dengan Peraturan Direksi Nomor : PER.U/KL.104/VI/1/KA-2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik sebagai acuan penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan Perusahaan.
11. Tata Kelola IT (*IT Governance*)
Perusahaan telah menetapkan pedoman utama pengelolaan teknologi informasi melalui Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KK.101/IV/1/KA-2023 tanggal 04 April 2023 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance). Kebijakan tersebut merupakan dasar pengelolaan Teknologi Informasi dan memberikan kerangka pengaturan yang komprehensif bagi seluruh unit yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

c. Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.U/KH.608/V/47/SAP/KA-2023 tanggal 29 Mei 2023, Perseroan telah mengangkat Raden Agus Dwinanto Budiadji sebagai Sekretaris Perusahaan. Berikut adalah keterangan singkat mengenai Sekretaris Perusahaan:

Raden Agus Dwinanto Budiadji

Kewarganegaraan Indonesia.

Usia 42 tahun per 31 Juli 2024.

Menyelesaikan Sarjana Ekonomi di Universitas Gadjah Mada tahun 2006.

Pengalaman Pekerjaan

Periode	Perusahaan	Posisi
Februari 2018 – Januari 2019	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Vice President Passanger Marketing
Januari 2019 – Februari 2020	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Deputy Vice President Daerah Operasi 3 Cirebon
Februari 2020 – Juli 2020	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Deputy Executive Vice President Daerah Operasi 4 Semarang
Juli 2020 – Maret 2021	PT KAI Wisata	Managing Director of Operation
Maret 2021 – Januari 2023	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Corporate Deputy Director of Passenger Transport Marketing and Sales

Alamat Sekretaris Perusahaan saat ini berada di:

Kantor Pusat
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1
Bandung 40117
Telpon: 022-4230031, 022-4230039, 022-4230054, 022-42141121
Email: sekretaris.sekper@kai.id

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan diatur melalui SK Direksi Nomor PER.U/KO.104/II/3/KA-2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KO.104/II/2/KA-2019 mengenai Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan. Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab sebagai unit pendukung penyelenggara fungsi pengelolaan informasi dan dokumen Perseroan, Corporate Social Responsibility, Corporate Public Information and Communication, Corporate Culture, Corporate Office, Board of Directors administration & Protocol, memastikan kepatuhan atas pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) melalui penerapan sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblowing System – WBS), memastikan perseroan mematuhi ketentuan tentang persyaratan keterbukaan dan pengungkapan dalam laporan tahunan, memastikan penerapan kebijakan manajemen mutu dan pemantauan implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN di lingkungan Perusahaan, mengkoordinasikan pengelolaan sarana telekomunikasi dan penatausahaan warta dinas (WAD), memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, memastikan tersedianya keterbukaan informasi kepada masyarakat, memfasilitasi hubungan antara Perusahaan dengan Investor, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mengintegrasikan dan mengkonsolidasi unit organisasi di bawahnya.

SK Direksi Nomor PER.U/KO.104/II/3/KA-2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER.U/KO.104/II/2/KA-2019 mengenai Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Perusahaan menyatakan bahwa EVP Corporate Secretary membawahi lima VP (Vice President) dengan masing-masing tugasnya sebagai berikut:

- a. *Vice President Corporate Document Management* mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menyelenggarakan penatausahaan arsip surat-menyurat, dokumen kepemilikan aset, dokumen legal dan dokumen Perseroan lainnya, menyelenggarakan pengelolaan sarana telekomunikasi dan penatausahaan warta dinas (WAD) serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan pengarsipan/dokumentasi di Daerah Operasi, Divisi Regional dan UPT Balai Yasa PT Kereta Api Indonesia (Persero). *VP Corporate Document Management* dibantu oleh tiga manajer;
- b. *Vice President Public Relation* mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab merumuskan dan menyusun program pembentukan citra Perseroan, hubungan masyarakat dan melaksanakan penyuluhan baik internal maupun eksternal Perusahaan, serta pengelolaan informasi publik yang mencakup penyediaan dan/atau pelayanan informasi terhadap pengguna informasi publik, dan penyusunan konsep, desain dan konten komunikasi multimedia untuk keperluan komersial dan non komersial. *Vice President Public Relation* dibantu oleh lima manajer;

- c. *Vice President Quality Assurance* and GCG mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab menyusun kebijakan manajemen mutu yang meliputi standard dan sistem penjaminan mutu berdasarkan standar ISO, mengevaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan mengelola peningkatan mutu berkelanjutan (quality improvement), memastikan kepatuhan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) melalui penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System - WBS*), serta pemantauan implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN di lingkungan Perusahaan. *Vice President Quality Assurance* and GCG dibantu oleh empat manager;
- d. *Vice President Corporate Culture and General Facilities* mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengelola kegiatan penyusunan rancangan budaya Perusahaan, penerapan budaya Perusahaan di seluruh wilayah Perusahaan, evaluasi budaya Perusahaan, mengelola office facilities kantor pusat, mengelola kegiatan umum dan kerumahtanggaan kantor pusat, mengelola perawatan bangunan dinas dan Mekanikal Elektrikal kantor pusat, menyelenggarakan kerumahtanggaan dan umum, pengelolaan kegiatan protokol kantor pusat, serta pengeloaan kegiatan kesekretariatan Direksi dan Dewan Komisaris. *Vice President Corporate Culture and General Facilities* dibantu oleh tiga manager;
- e. *Vice President Corporate Social Responsibility* mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta Community Relations, baik internal maupun eksternal Perusahaan di seluruh aktivitas Perusahaan. *Vice President Corporate Culture and General Facilities* dibantu oleh dua manager.

d. Komite Audit

Landasan Hukum Pengangkatan Komite

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023**"), Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 06/CH/DEKOM/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan.

Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER 2/MBU/03/2023, Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 55/POJK.04/2015. Perseroan telah memiliki piagam komite audit sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Komite Audit No. 01A/CIA/KOM/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017, yang mengatur pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Audit, yaitu tujuan dan fungsi Komite Audit, kewenangan, keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, program kerja tahunan, sistem pelaporan dan evaluasi. Piagam Komite Audit telah dimuat dalam website Perseroan yaitu pada https://ppid.Kereta Api Indonesia.id/media/konten/110_piagam_audit_2017.pdf.

Dalam melaksanakan fungsi dan perannya, Komite Audit Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: 01A/CIA/KOM/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 yang mengatur pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Audit, yaitu tujuan dan fungsi Komite Audit, kewenangan, keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, program kerja tahunan, sistem pelaporan dan evaluasi.

Susunan dan Profil Anggota Komite Audit

Susunan anggota Komite Audit Perseroan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 06/CH/DEKOM/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Audit adalah:

- Rochadi/ Komisaris Independen : Ketua (merangkap Anggota). Profil beliau disajikan dalam Profile Dewan Komisaris pada Prospektus ini.
- Johan Sirait/ Komisaris Independen : Anggota. Profil beliau disajikan dalam Profile Dewan Komisaris pada Prospektus ini.
- Endang Tirtana/Komisaris Independen : Anggota. Profil beliau disajikan dalam Profile Dewan Komisaris pada Prospektus ini.
- Ernesto : Anggota.
Kewarganegaraan : Indonesia, Usia 64 tahun per 31 Mei 2024, Lahir di Bukittinggi, berdomisili di Bandung. Menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi di STIEB Bandung tahun 1987 dan Magister Manajemen Akuntansi Universitas Padjajaran tahun 2001.

Pengalaman Pekerjaan

Periode	Perusahaan	Posisi
April 2009 – Mei 2009	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Vice President Pajak, PSO, IMO dan TAC
Mei 2009 – Februari 2012	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Vice President Revenue Verification
Februari 2012 – Juni 2014	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Executive Vice President Internal Audit
Juli 2014 – Desember 2017	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Kepala Satuan Pengawasan Intern PT.Pelni

- Amalia Setyanti Lestari : Anggota.
Kewarganegaraan : Indonesia, Usia 60 tahun per 31 Mei 2024. Lahir di Bandung, berdomisili di Tangerang. Menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia tahun 1988.

Pengalaman Pekerjaan

Periode	Perusahaan	Posisi
1998	KPMG Hanadi, Sujendro & Rekan	Assistant Manager Audit Division
November 1998 – Desember 2005	PT Bank Rabobank International Indonesia	Internal Audit Manager
2008 – 2009	PT Bank Rabobank International Indonesia	Internal Audit manager for Wholesale Banking
2010 – 2011	PT Bank Rabobank International Indonesia	Head of Compliance – Advisory & Assurance
Januari 2012 – Februari 2013	PT Bank Rabobank International Indonesia	Head of Compliance
Maret 2013 – November 2015	JP Morgan Chase Bank – Jakarta Branch	Money Laundering Reporting Officer (MLRO)
September 2016 – Agustus 2018	PT Bank Rabobank International Indonesia	Independent member of the Audit Committee and Independent member of the Risk Monitoring Committee
2016 – Sekarang	PT Bank JTrust Indonesia Tbk	Secretary to the Board of Commissioners
Februari 2020 - Sekarang	University of Indonesia	Head of Internal Audit

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Adapun tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi Perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan;
3. Memberikan pendapat independent dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan auditor eksternal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko oleh Direksi sepanjang belum dibentuknya komite yang berfungsi sebagai pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan serta tidak menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan Perusahaan;
10. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal;
11. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
12. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
13. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan;
14. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas Dewan Komisaris;
15. Sebelum tahun buku berjalan Komite Audit wajib menyusun menyampaikan program kerja Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.

Dewan Komisaris memberikan kewenangan kepada Komite Audit dengan surat penugasan dari Dewan Komisaris untuk mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perseroan yang diperlukan, baik dari Direksi, pejabat dan pekerja, maupun pihak eksternal. Melalui Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta kehadiran Direksi, pejabat, pekerja ataupun akuntan publik/auditor eksternal dalam rapat Komite Audit.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Komite Audit bekerja sama dengan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan fungsi manajemen Perseroan. Berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta masukan, penjelasan dan pendapat profesional, baik dari pihak intern Perseroan maupun dari pihak ketiga seperti akuntan publik, konsultan hukum dan profesi lainnya atas beban Perseroan, terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Komite Audit memberi pendapat dan rekomendasi dalam pemilihan Kepala SPI dan merekomendasikan penetapan auditor eksternal. Apabila diperlukan, melalui Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta pihak internal atau eksternal untuk melakukan audit investigasi.

Anggota Komite Audit harus memiliki integritas yang baik serta kemampuan, pengetahuan dan latar belakang pengalaman kerja yang memadai untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit secara profesional. Sekurang-kurangnya salah seorang anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan.

Untuk menjamin independensi dalam menjalankan tugasnya, anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
2. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
3. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan;
4. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah rekapitulasi kehadiran dalam Rapat Komite Audit Tahun 2024

Nama	Jumlah Rapat	Persentase Kehadiran (%)
Rochadi	11	85
Johan Sirait	7	54
Endang Tirtana	8	62
Ernesto	13	100
Amalia Setyanti Lestari	13	100

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan seluruh komite Audit telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta melaksanakan dan menghadiri rapat yang telah diadakan.

e. Komite Pemantau Manajemen Risiko

Landasan Hukum Pengangkatan Komite

Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 09/CH/DEKOM/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan.

Pengangkatan Komite Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER 2/MBU/03/2023. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan setiap saat berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Perseroan memiliki Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagaimana dibuktikan dengan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko No. 27/KPMR/XI/2021 tanggal 8 November 2021, yang diantaranya mengatur keanggotaan, tugas fungsi, dan masa jabatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko.

Susunan dan Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko

Chairul Anwar	Ketua (merangkap anggota) KPMR. Profil beliau disajikan pada bagian profil Dewan Komisaris dalam Prospektus ini.
Mohamad Risal Wasal	Anggota KPMR. Profil beliau disajikan pada bagian profil Dewan Komisaris dalam Prospektus ini.
Elen Setiadi	Anggota KPMR Profil beliau disajikan pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam Prospektus ini.

Handy Purnama

Anggota KPMR.

Kewarganegaraan Indonesia, Usia 57 tahun per 31 Mei 2024, Lahir di Jakarta, domisili di Bandung. Handy Purnama mendapatkan gelar Sarjana Teknik Fisika di Institut Teknologi Bandung tahun 1996 dan Magister Teknik Perkeretaapian di Institut Teknologi Bandung tahun 2000.

Pengalaman Pekerjaan

Periode	Perusahaan	Posisi
2015 – 2017	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	VP Pajak, PSO, IMO Dan TAC
Agustus 2017 – Juli 2018	PT Reska Multi Usaha	Director of Parking and Information Technology Business
2018 – Sekarang	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Corporate Deputy Director of Revenue and Cost Consolidation

Miranti Gani

Anggota KPMR.

Kewarganegaraan Indonesia, Usia 61 tahun per 31 Mei 2024, Lahir di Jakarta, domisili di Jakarta. Miranti Gani mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi –Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tahun 1988.

Pengalaman Pekerjaan

Periode	Perusahaan	Posisi
1988 – 1989	Procter and Gamble (PnG)	Human Resources Management Trainee
1996 – 1997	Lembaga Management Universitas Indonesia	Senior Consultant
1997 – 2007	Standard Chartered Bank	Head of Quality Assurance and Risk Control – Retail Banking
2007 – 2010	ABN – AMRO Bank	Head of Process and Control
2010	ANZ Bank	Head of Process and Control
2010 – 2015	Standard Chartered Bank	Operational Risk Management Head – Retail Banking and support functions
2018 – Sekarang	Sumberdaya Sewatama (Trakindo Group)	Independent Commissioner
2018 – 2020	Lembaga Penjamin Simpanan	Audit Committee

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan, Tugas KPMR adalah sebagai berikut:

1. Menelaah dan merekomendasikan efektifitas pelaksanaan manajemen risiko perusahaan melalui pertemuan secara berkala maupun cara lainnya untuk membahas progress dari tahapan-tahapan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko;
2. Menelaah atas penilaian risiko oleh satuan kerja manajemen risiko terhadap rencana investasi perusahaan yang material;
3. Menelaah proses manajemen risiko atas usulan aksi korporasi;
4. Mengawasi kegiatan satuan kerja manajemen risiko dalam memantau pelaksanaan mitigasi risiko oleh unit-unit kerja terkait;
5. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi yang terkait dengan manajemen risiko;
6. Menganalisa dan merekomendasikan usulan rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP) dan menelaah secara tahunan atas rencana jangka panjang perusahaan (RJPP) yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah informasi risiko dan proses manajemen risiko perusahaan dalam laporan berkala (triwulan dan tahunan) yang akan disampaikan kepada pemegang saham melalui proses:
 - i. Diskusi bersama dengan manajemen.
 - ii. Menelaah atas konsep dari laporan yang akan disampaikan.
8. Memantau pembahasan risiko-risiko penting pada unit-unit dilingkungan perusahaan, sesuai kebutuhan;

9. Dalam hal perusahaan menganggap perlu menggunakan konsultan manajemen risiko independen untuk melakukan penelaahan kembali atas proses manajemen risiko yang telah ditetapkan perusahaan, maka tugas KPMR adalah:
- Memberikan masukan tentang kinerja dan kompetensi konsultan
 - Melakukan monitoring pekerjaan konsultan melalui satuan kerja manajemen risiko.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPMR dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris. Masa jabatan anggota KPMR yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris PT KAI paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2(dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah rekapitulasi kehadiran dalam Rapat KPMR Tahun 2024

Nama	Jumlah Rapat	Persentase Kehadiran (%)
Chairul Anwar	13	93
Mohammad Risal Wasal	7	50
Handy Purnama	14	100
Miranti Gani	13	93

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan seluruh Komite Pemantau Manajemen Risiko telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta melaksanakan dan menghadiri rapat yang telah diadakan.

f. Komite Nominasi dan Remunerasi

Landasan Hukum Pengangkatan Komite

Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**"), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 10/CH/DEKOM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Said Aqil Siroj	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Profil beliau disajikan pada bagian profil Dewan Komisaris pada Prospektus ini.
Diah Natalisa	Anggota. Profil beliau disajikan pada bagian profil Dewan Komisaris pada Prospektus ini.
Sri Paduka Mangkoenagoro X	Anggota. Profil beliau disajikan pada bagian profil Dewan Komisaris pada Prospektus ini.

Corina D. Riantoputro

Anggota.

Kewarganegaraan Indonesia. Usia 55 tahun per 31 Mei 2024. Lahir di Bandung, berdomisili di Tangerang Selatan. Menyelesaikan pendidikan S1: Psikologi Universitas Indonesia tahun 1992, S2: Organizational Study, University of New South Wales – Australia tahun 2000 dan S3: Organizational Behavior, University of New South Wales – Australia tahun 2010.

Pengalaman Pekerjaan

Periode	Perusahaan	Posisi
Oktober 2021 – Februari 2022	Institute for Global Leadership – Ochanomizu University Jepang	Specially Appointed Professor
2021 – 2024	Universitas Indonesia	Majelis Wali Amanat
2012 – 2014 dan 2019 – 2024	Universitas Indonesia	Anggota Majelis Wali Amanat
2014 – 2018	Universitas Indonesia	Wakil Dekan Bidang Pengelolaan SDM dan Keuangan Fakultas Psikologi
2019 – 2020	Asosiasi Psikologi Industri dan Organisasi	Ketua Bidang Riset dan Pengembangan Ilmu
2021 – 2023	-	Anggota Board Editor – Human Resource Development Review
2020 – 2021	-	Anggota Tim Riset GLOBE (<i>Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness</i>)
2018 – 2019	-	Anggota Tim Riset Global Work Design
2013 – 2014	SKK Migas	Ketua Tim National Capacity Building
1992 – Sekarang	Universitas Indonesia	Dosen Fakultas Psikologi

Satia Indrarini

Anggota.

Kewarganegaraan Indonesia. Usia 62 tahun per 31 Juli 2024 . Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Trisakti tahun 1986, dan Master of Strategic Management di Binus University tahun 2014.

Pengalaman Pekerjaan

Periode	Perusahaan	Posisi
1990 – 2004	The Chase Manhattan Bank Indonesia	Supervisor and Subsequently Human Resource Manager
Juni 2000 – Februari 2005	PT Syngenta Indonesia	Human Resource Head
2005 – 2020	PT Bank DBS Indonesia	Human Resources Director
Mei 2021 – Sekarang	-	Member of the Remuneration – Nomination & GCG Committee
Januari 2021 – Sekarang	PT Sedyia Abiwara Inggil	Senior Consultant

Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER 3/MBU/03/2023 dan POJK No. 34/POJK.04/2014. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah selama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 05/CH/DEKOM/III/2021 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 10 Maret 2021. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi telah dimuat dalam website Perseroan yaitu pada https://ppid.Kereta Api Indonesia.id/media/konten/110_piagamkomite.pdf.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi No 05/CH/DEKOM/III/2021t melaksanakan tugas sebagai berikut: Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Nomor: 05/CH/DEKOM/III/2021 bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan fungsi nominasi sebagai berikut:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi bagi Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta Organ Pendukung Dewan Komisaris;
 2. Membantu Dewan komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan komisaris, serta anggota Organ Pendukung berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; maupun anggota BOD-1 (Pejabat Satu Tingkat di bawah Direksi);
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
 5. Membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengevaluasi program pengembangan kemampuan BOD-1 (Pejabat Satu Tingkat di bawah Direksi), yang dilakukan oleh Direktorat SDM, demi mempersiapkan mereka sebagai anggota Direksi.
- b. Melaksanakan fungsi remunerasi sebagai berikut:
 1. Membantu Dewan Komisaris untuk menelaah bahwa Remunerasi yang diterima masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 2. Membantu Dewan Komisaris untuk menelaah bahwa Remunerasi yang diterima sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris serta anggota Komite Dewan Komisaris telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran

Berikut adalah rekapitulasi kehadiran dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Nama	Jumlah Rapat	Persentase Kehadiran (%)
Said Aqil Siroj	2	40
Diah Natalisa	5	100
Sri Paduka Mangkoenagoro X	2	40
Corina D. Riantoputro	5	100
Satia Indrarini	0	0

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan seluruh komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta melaksanakan dan menghadiri rapat yang telah diadakan.

g. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal Perseroan diimplementasikan melalui pengendalian Lingkungan, Risiko, Keuangan, dan Operasional, Untuk memastikan terlaksananya sistem pengendalian internal tersebut, di Perseroan dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal dan Manajemen Risiko yang berkoordinasi dengan Komite di bawah Dewan Komisaris (Komite Audit). Divisi Internal Audit menyusun Laporan Hasil Kegiatan Implementasi sebagai bagian pertanggungjawabannya dan mempresentasikannya pada Direksi sebagai penanggungjawab pengelolaan risiko dan pengendalian internal. Pengendalian internal Perseroan merujuk kepada sistem Pengendalian Internal berbasis COSO.

Penjelasan Kesesuaian Sistem Pengendalian Intern

Model pengendalian intern yang digunakan sebagai acuan kerangka konseptual dalam pengembangan pengendalian intern adalah kerangka kerja pengendalian intern yang terintegrasi (Internal Control-Integrated Framework) oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO) yang terdiri dari 5 organisasi akuntansi dan internal audit profesional yaitu American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), American Accounting Association (AAA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), dan The Institute of Management Accountants (IMA).

Evaluasi Sistem Pengendalian Intern / Evaluasi Atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Keuangan Dan Operasional

Manajemen bertanggung jawab dan konsisten untuk menerapkan dan melaksanakan Sistem Pengendalian Internal secara memadai sehingga dapat memberikan keyakinan atas penyajian laporan keuangan dan laporan kegiatan. Pelaksanaan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal dilakukan oleh Departemen Audit Internal berdasarkan pada 5 (lima) aspek pengendalian yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta pemantauan. Disamping itu, KAP dalam pemeriksaannya juga melakukan audit dan memberikan pendapat atas kepatuhan terhadap sistem pengendalian internal.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian menjadi salah satu pertimbangan manajemen untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengendalian internal secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penilaian internal Audit sampai pada saat Prospektus ini diterbitkan sebagaimana telah dilaporkan kepada Komite Audit dan Dewan Komisaris, sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dinilai secara umum memadai dan efektif berjalan sesuai dengan SOP dan kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh Perseroan.

h. Unit Audit Internal

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal (“**POJK No. 56/POJK.04/2015**”), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal dibawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Direksi Perseroan No. SK.U/KG.210/III/1/KA-2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. SK.U/KH.608/I/153/SAP/KA-2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pengukuhan Jabatan di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), Direksi Perseroan telah melakukan pengukuhan jabatan Dwi Erni Ratnawati sebagai *Executive Vice President of Internal Audit*.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. SK.U/KH.608/I/67/SAP/KA-2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Mutasi Di Lingkungan Perseroan, Keputusan Direksi No. SK.U/KH.608/III/41/SAP/KA-2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Mutasi Di Lingkungan Perseroan, Keputusan Direksi No. SK.U/KH.608/IV/8/SAP/KA-2024 tanggal 5 April 2024 tentang Pengukuhan Jabatan Di Lingkungan Perseroan, dan Keputusan Direksi No. SK.U/KH.608/I/156/SAP/KA-2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pengukuhan Jabatan Di Lingkungan Perseroan, susunan satuan pengawas internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Executive Vice President Internal Audit / Kepala SPI	: Dwi Erni Ratnawati
Vice President General Audit 1	: Bambang Purwadi Nugroho
Vice President General Audit 2	: Bambang Purwanto Atmadji
Vice President of Evaluation, Monitoring and Administration	: Andi Gumilar
Vice President of Special Audit	: Abdul Karim

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit (Satuan Pengawasan Intern):

- a. Memastikan fungsi pengawasan intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik audit intern;
 - b. Melakukan pemilihan sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas unit internal audit;
 - c. Melakukan penyusunan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
 - d. Memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesuai dengan rencana;
 - e. Melakukan penyusunan dan pengkajian piagam audit intern secara periodik;
 - f. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
 - g. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
 - h. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Dewan Komisaris dan Direktur Utama;
 - i. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern, kecuali diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan;
 - j. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa yang eksternal untuk aktivitas pengawasan intern:
 - 1) Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada personil unit internal audit, mengingat penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara;
 - 2) Penggunaan jasa pihak eksternal tidak mempengaruhi independensi dan objektivitas fungsi unit internal audit;
 - 3) Pihak eksternal mematuhi piagam internal audit (*Internal Audit Charter*).
 - l. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
 - m. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, komersial, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya
 - n. Melaporkan secara periodik atas aktivitas audit internal kepada dekom, komdit dan/atau direksi
 - o. Mengembangkan *quality assurance and improvement program* (QAIP) sebagai evaluasi kesesuaian aktivitas audit internal terhadap standar dan kode etik yang ditetapkan oleh *Internal Auditing and Assurance Standard board* (IAASB) dan *The Institute of Internal Auditors* (IIA).
- i. Manajemen Risiko

Risiko Keamanan dan Keselamatan Operasional Kereta Api

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan atas risiko-risiko yang mungkin dapat terjadi dan berdampak pada aspek keselamatan operasional KA yaitu dengan fokus pada perbaikan prosedur dan sosialisasi implementasi *safety policy*, *safety risk management* dan *level of safety*, peningkatan kemampuan SDM serta pemantapan implementasi ISSMS (*Integrated Safety and Security and Management System*). Oleh karena itu sejalan dengan penerimaan biaya perawatan pengoperasian prasarana perkeretaapian (IMO) dari Pemerintah, maka; Perseroan secara konsisten berperan melakukan pemeliharaan prasarana jalan rel kereta api untuk menjadi kondisi handal, juga dalam peningkatan keselamatan perjalanan, Perseroan -secara rutin melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala untuk kehandalan Sarana dan bila Sarana yang sudah tidak layak karena sudah mencapai umur teknisnya akan direncanakan untuk penggantian dengan Sarana baru.

Risiko Strategi Bisnis dan Persaingan

Upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu pematangan perencanaan bisnis strategis/teknis (*business plan*).

Risiko Proyek

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan meliputi percepatan perizinan, penyiapan desain dan persetujuan teknis, AMDAL, penyiapan lokasi/site, pembebasan lahan/*resettlement*, perencanaan dan persetujuan biaya/sumber dana dan penajaman schedule (*risk corrected schedule*), perkuatan manajemen/*staffing* proyek, memastikan kecukupan pengawasan/supervisi proyek, pemantauan dan evaluasi progress proyek secara berjenjang, serta memastikan kualifikasi dan seleksi penyedia barang/jasa dan supervisi serta pengujian mutu secara ketat.

Risiko Operasional

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu pematangan/penajaman rencana operasi sarana, prasarana dan/atau pemeliharaan alat produksi, penyediaan/penyiapan kompetensi SDM operator/perawatan alat, plant layout/perancangan proses kerja, memastikan adanya prosedur kerja/operasi/perawatan yang baku (SOP), memastikan ada backup sistem (prosedur kerja alternatif/contingency plan) dan memastikan adanya slot waktu kerja (yang bebas dari konflik/gangguan antar unit).

Risiko Finansial

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu penyediaan sebagian valuta asing lebih awal dari pembayaran atau penerapan mekanisme lindung nilai (*hedging*), penajaman perencanaan/simulasi arus kas Perseroan, pencarian sumber dana alternatif/pinjaman (modal kerja/modal investasi), koordinasi antar unit pengadaan dan keuangan, dan memastikan studi kelayakan yang bankable dibuat oleh konsultan independen yang kredibel dan bereputasi baik di kalangan bisnis internasional.

1. Risiko Pasar

- Risiko Mata Uang Asing
Perseroan melakukan perikatan kontrak forward pembelian USD untuk melindungi beban operasi di masa mendatang dalam mata uang USD.
- Risiko Suku Bunga
Eksposur terhadap suku bunga Perseroan dinilai rendah apabila ditinjau dari sisi laporan posisi keuangan, namun Perseroan terus memonitor hal ini untuk meminimalkan dampak negatif terhadap Perseroan. Pinjaman yang dikeluarkan pada tingkat suku bunga variabel mengekspos Perseroan terhadap arus kas dari risiko tingkat suku bunga.

2. Risiko Kredit

Kebijakan umum Perseroan untuk penjualan ke pelanggan baru dan yang sudah ada adalah menyeleksi pelanggan-pelanggan yang memiliki kondisi keuangan yang kuat serta reputasi yang baik. Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengontrol dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Perseroan memiliki kebijaksanaan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, menggunakan perjanjian yang berkekuatan hukum pada saat melakukan transaksi penjualan, dan sejarah tingkat kredit macet yang rendah.

3. Risiko Likuiditas

Perseroan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

4. Nilai Wajar

Manajemen berpendapat bahwa nilai buku dari aset dan liabilitas keuangannya mendekati nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan tersebut pada akhir tahun.

5. Pengelolaan Modal

Dalam mengelola permodalannya, Perseroan senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko. Perseroan menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan Perseroan lain dalam industri, Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio pinjaman terhadap modal yang disesuaikan. Perseroan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

Risiko Investasi dan aksi korporasi

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu scenario analysis, penajaman studi kelayakan (Feasibility Study) atau benefit-cost analysis dengan membandingkan terhadap alternatif skenario do nothing, sensitivity analysis.

Risiko Lingkungan

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu antisipasi dini melalui sosialisasi, kehumasan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, koordinasi dengan instansi terkait dan komunikasi awal dengan publik/masyarakat sekitar, program CSR, dan sebagainya termasuk melakukan analisis lingkungan terkait pencemaran (AMDAL).

Risiko Perubahan Teknologi

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu Perseroan melakukan inovasi-inovasi dalam bidang teknologi. Khususnya pengembangan teknologi yang dapat memudahkan konsumen dalam hal kemudahan bertransaksi dan kenyamanan dalam perjalanan. Salah satu contohnya adalah dengan menerapkan sistem pembelian tiket melalui online, travel agent, ataupun vending machine yang terdapat di stasiun-stasiun. Inovasi yang terbaru dari Perseroan adalah dengan menerapkan sistem Pre-Order Meal yang dapat dipesan secara online terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi KAI Access, sehingga makanan dan minuman sudah tersedia dalam perjalanan. Dalam hal kemajuan teknologi persinyalan, teknologi lokomotif dan kereta, serta kemajuan teknologi dalam bidang operasional lainnya, Perseroan senantiasa melaksanakan pelatihan khususnya bagi karyawan yang bertugas di bidang-bidang tersebut agar senantiasa mengikuti perkembangan dan teknologi yang ada.

Risiko Pengadaan

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh Perseroan atas Pengadaan diantara lain adalah penerapan sistem e-procurement, dimana calon vendor dapat mengakses pengadaan-pengadaan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan mengikuti proses administrasi pengadaan secara online. Hal ini dapat mempermudah penyaringan data administrasi awal sehingga mempercepat proses pengadaan. Selain itu Perseroan juga melakukan pemantauan harga pasar secara berkala sebagai dasar penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Risiko Reputasi

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan penggunaan website, majalah KA, media sosial, contact center, media cetak dan televisi untuk mempublikasikan kegiatan, program kerja dan pengembangan usaha, inovasi, pelayanan, penghargaan dan lainnya yang dapat mengangkat citra Perseroan, menyelenggarakan pameran-pameran budaya berbasis kereta dan travel fair untuk meningkatkan benefit dan citra Perseroan, menggalakkan program CSR dan donasi kemanusiaan lainnya dan terus berupaya mempertahankan kinerja dan peringkat Perseroan.

Risiko Perubahan Kondisi Perekonomian

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat asumsi-asumsi keuangan yang tepat sesuai dengan kondisi mikro dan makro sehingga dapat meminimalisasi kesalahan proyeksi, dan mengkaji kembali program Perseroan mengikuti kondisi terkini perekonomian dan Perseroan.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan update atas perubahan kebijakan pemerintah dan mensosialisasikannya kepada internal Perseroan, menindaklanjuti perubahan kebijakan Pemerintah tersebut dalam Kebijakan Internal Perseroan sebagai dasar pelaksanaan proses bisnis Perseroan, selanjutnya dapat juga dilakukan dengan mengkaji kebijakan pemerintah tersebut dan menginventarisir dampak kebijakan tersebut terhadap Perseroan dan apabila diperlukan melakukan diskusi lebih lanjut kepada Pemerintah.

Risiko Regulasi

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu percepatan pengurusan perijinan/approval (bidang usaha/dokumen teknis), dan koordinasi dengan instansi regulator, pemenuhan prasyarat perijinan, pencantuman pasal-pasal yang diperlukan sebagai pengaman risiko (garansi/penalti/denda) dalam naskah kontrak/perjanjian dengan pihak luar/mitra kerja sama, sertifikasi kepemilikan aset Perseroan.

Risiko Kepatuhan

Upaya-upaya mitigasi yang dapat dilakukan yaitu memastikan bahwa proses-proses tidak menyimpang dari ketentuan/prosedur/peraturan/ kode etik internal yang sesuai dan berlaku di Perseroan, termasuk juga justifikasi teknis/ operasional atau kebutuhan bisnis yang spesifik/ mendesak disertai dukungan analisis yang bisa dipertanggungjawabkan.

Terkait dengan mitigasi risiko Anak Perseroan khususnya pada PT Reska Multi Usaha yang bergerak di bidang perpajakan dan jasa restorasi diatas Kereta, diantaranya:

Risiko Kehilangan Potensi Pendapatan

Upaya-upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan yaitu dengan menyediakan tempat parkir sementara kepada RMU karena dampak pengurangan lahan parkir yang diusahakan sebagai pengembangan TOD oleh Perseroan dan pemberian hak pengusahaan perpajakan kepada RMU pada lahan TOD yang diusahakan oleh Perseroan dengan Mitra Perseroan.

Risiko Kehilangan Kendaraan di Lahan Parkir

Upaya-upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan yaitu dengan mengasuransikan kendaraan yang hilang di lokasi parkir RMU, hal ini dilakukan untuk meminimalisasi komplain dan kerugian oleh pelanggan.

Risiko Suplai Bahan Makanan

Upaya-upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah dengan membuat perjanjian kerjasama dengan beberapa Mitra atau supplier bahan makanan yang berkualitas, hal ini ditujukan untuk memperbanyak variasi makanan yang dapat dijual oleh Anak Perseroan dalam mendukung proses bisnisnya. Semakin banyak variasi makanan yang ditawarkan oleh Anak Perseroan, maka semakin tinggi daya beli penumpang atas produk-produk yang ditawarkan.

Risiko Kualitas Makanan

Upaya-upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah meningkatkan quality control atas suplai bahan makanan dan kualitas bahan makanan dan dapat bekerjasama dengan Mitra yang berkualitas dan bereputasi baik.

j. Komite Keselamatan

Perseroan telah membentuk Komite Keselamatan Tingkat Pusat dan Daerah sebagai berikut:

1. Pusat

Keputusan Direksi Perseroan No. SK.U/KO.101/IV/1/KA-2020 tanggal 1 April 2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan Tingkat Pusat sebagaimana diubah oleh Keputusan Direksi Perseroan No. SK.U/KO.101/II/2/KA-2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi No. SK.U/KO.101/IV/1/KA/2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan Tingkat Pusat, dengan susunan sebagai berikut:

Pembina	:	Direktur Utama
Ketua	:	Direktur Keselamatan dan Keamanan
Wakil Ketua	:	Direktur SDM dan Umum
Sekretaris 1	:	<i>Vice President of Safety</i>
Sekretaris 2	:	<i>Vice President of Safety Standard</i>
Anggota	:	Direktur Niaga
Anggota	:	Direktur Operasi
Anggota	:	Direktur Pengelolaan Prasarana
Anggota	:	Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana
Anggota	:	Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan
Anggota	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Anggota Bidang Niaga	:	<i>Executive Vice President of Freight Marketing and Sales</i>
Anggota Bidang Niaga	:	<i>Executive Vice President of Passenger Transport Marketing and Sales</i>
Anggota Bidang Operasi	:	<i>Executive Vice President of Operation Management</i>
Anggota Bidang Operasi	:	<i>Executive Vice President of Operation Personnel</i>
Anggota Bidang Sintelis	:	<i>Executive Vice President of Signalling, Telecommunication, and Electricity</i>
Anggota Bidang Jalan Rel dan Jembatan	:	<i>Executive Vice President of Track and Bridge</i>
Anggota Bidang Sarana	:	<i>Executive Vice President of Rollingstock Maintenance</i>
Anggota Bidang Sarana	:	<i>Executive Vice President of Technical Engineering and Rollingstock Asset</i>
Anggota Bidang Keamanan	:	<i>Executive Vice President of Security</i>

2. Daerah Operasi 1

Keputusan Kepala Daerah Operasi 1 Jakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.EVP.DO.1/KO.101/VI/1/DO.1-2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Komite Keselamatan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Deputy Executive Vice President 1 Daerah Operasi 1 Jakarta Bidang Teknis dan Operasional
Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian	:	Quality Controller Operasi 1.A Jakarta
Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja	:	Junior Manager Kesehatan Kerja
Sekretaris Bidang Keamanan	:	Junior Manager Administrasi Pengamanan
Anggota	:	Senior Manager Operasi
Anggota	:	Senior Manager Sarana
Anggota	:	Senior Manager Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik
Anggota	:	Senior Manager Listrik Aliran Atas

Anggota	:	Senior Manager Jalan Rel dan Jembatan
Anggota	:	Senior Manaher Kesehatan
Anggota	:	Senior Manager Pengamanan
Anggota	:	Senior Manager Sumber Daya Manusia dan Umum
Anggota	:	Senior Manager Bangunan
Anggota	:	Senior Manager Fasilitas Penumpang
Anggota	:	Quality Controller Operasi Crew KA Jakarta
Anggota	:	Quality Controller Operasi Sarana Jakarta
Anggota	:	Quality Controller Operasi 1.B Jatinegara
Anggota	:	Quality Controller Operasi 1.C Tanahabang
Anggota	:	Quality Controller Operasi 1.D Rangkasbitung
Anggota	:	Quality Controller Operasi 1.E Bogor
Anggota	:	Quality Controller Operasi 1.C Tanahabang
Anggota	:	Quality Controller Operasi Jalan Rel dan Jembatan 1.A Jakartakota
Anggota	:	Quality Controller Operasi Jalan Rel dan Jembatan 1.B Cikampek
Anggota	:	Quality Controller Operasi Jalan Rel dan Jembatan 1.C Bogor
Anggota	:	Quality Controller Operasi Jalan Rel dan Jembatan 1.D Tanahabang
Anggota	:	Quality Controller Sintelis 1.A Rangkasbitung
Anggota	:	Quality Controller Sintelis 1.B Tanahabang
Anggota	:	Quality Controller Sintelis 1.C Manggarai
Anggota	:	Quality Controller Sintelis 1.D Bekasi
Anggota	:	Quality Controller Sintelis 1.E Bogor
Anggota	:	Quality Controller LAA 1.A Rangkasbitung
Anggota	:	Quality Controller LAA 1.B Duri
Anggota	:	Quality Controller LAA 1.C Jatinegara
Anggota	:	Quality Controller LAA 1.D Bogor
Anggota	:	Quality Controller Sarana 1.A
Anggota	:	Quality Controller Sarana 1.B
Anggota	:	Quality Controller Sarana 1.C

3. Daerah Operasi 2

Keputusan Kepala Daerah Operasi 2 Bandung PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.EVP. DO.2/KO.101/V/1/DO.2-2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan Daerah Operasi 2 Bandung, dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	Executive Vice President
Ketua	:	Deputy Vice President
Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian	:	Quality Controller Operasi 2.A Bandung
Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	:	Assistant Manager Pelayanan, Klaim dan Kepesertaan
Sekretaris Bidang Keamanan	:	Manager Pengamanan Operasi Kereta Api
Koordinator Bidang Keamanan	:	Senior Manager Pengamanan
Koordinator Bidang Operasi	:	Manager Operasi
Koordinator Bidang Sarana	:	Manager Sarana
Koordinator Bidang Sinyal, Telekomunikasi, dan Listrik	:	Manager Sintelis
Koordinator Bidang Rel dan Jembatan	:	Manager Jalan Rel dan Jembatan

Koordinator Bidang Kesehatan	: Manager Kesehatan
Koordinator Bidang Keselamatan Perkantoran, Pengembangan Pekerja dan Pelatihan Kerja	: Manager SDM dan Umum
Koordinator Bidang Bangunan	: Manager Bangunan
Koordinator Bidang Anggaran	: Manager Keuangan
Koordinator Bidang Fasilitas Penumpang	: Manager Fasilitas Penumpang
Koordinator Bidang Angkutan Barang	: Manager Angkutan Barang
Koordinator Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	: Manager Pengadaan Barang dan Jasa
Anggota	: Para Quality Controller

4. Daerah Operasi 3

Keputusan Kepala Daerah Operasi 3 Cirebon PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.VP. DO.3/KL.102/V/1/DO.3-2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Perubahan dan Tambah (P&T) Pembentukan Komite Keselamatan di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 3 Cirebon, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah	: <i>Vice President</i>
Ketua	: Deputy Vice President
Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian	: 1. Quality Controller Operasi 3.A Cirebon 2. Senior Supervisor Dokumen
Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	: Assistant Manager Kesehatan Kerja
Sekretaris Bidang Keamanan	: Junior Manager Pengamanan
Anggota	: Senior Manager Pengamanan
Anggota	: Manager Sumber Daya Manusia dan Umum
Anggota	: Manager Operas Manager Saranai
Anggota	: Manager Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik
Anggota	: Manager Jalan Rel dan Jembatan
Anggota	: Manager Bangunan
Anggota	: Manager Fasilitas Penumpang
Anggota	: Manager Kesehatan
Anggota	: Manager Hykum
Anggota	: Manager Hubungan Masyarakat Daerah
Anggota	: Manager Aset
Anggota	: Manager Komersialisasi Non Angkutan
Anggota	: Manager Sistem Informasi
Anggota	: Manager Angkutan Barang
Anggota	: Manager Angkutan Penumpang
Anggota	: Manager Keuangan
Anggota	: Manager Pengamanan Objek Vital dan Aset
Anggota	: Manager Pengadaan Barang dan Jasa
Anggota	: Seluruh Quality Controller di Daop 3 Cirebon selain Quality Controller Operasi 3.A Cirebon

5. Daerah Operasi 4

Keputusan Kepala Daerah Operasi 4 Semarang PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KO.101/V/1/DO.4-2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan di Lingkungan Daerah Operasi 4 Semarang, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Deputy EVP Daop 4 Semarang
Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian	: Quality Controller Operasi 4.A Semarang Tawang
Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	: Nikmatul Anisah NIPP. 66494 Paramedis Klinik Pratama Semarang
Sekretaris Bidang Keamanan	: Junior Manager Administrasi Pengamanan
Anggota	: Senior Manager Pengamanan
Anggota	: Manager Operasi
Anggota	: Manager Sarana
Anggota	: Manager Sintelis
Anggota	: Manager Jalan Rel dan Jembatan
Anggota	: Manager Kesehatan
Anggota	: Manager SDM dan Umum
Anggota	: Manager Bangunan
Anggota	: Manager Fasilitas Penumpang
Anggota	: Quality Controller Operasi Crew KA Semarang
Anggota	: Quality Controller Operasi Sarana Semarang
Anggota	: Quality Controller Operasi 4.B Tegal
Anggota	: Quality Controller Operasi 4.C Cepu
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 4.A Pekalongan
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 4.B Semarangponcol
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 4.C Gambringan
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 4.D Cepu
Anggota	: Quality Controller Sintelis 4.A Pekalongan
Anggota	: Quality Controller Sintelis 4.B Semarangtawang
Anggota	: Quality Controller Sintelis 4.C Cepu
Anggota	: Quality Controller Sarana 4.A
Anggota	: Quality Controller Sarana 4.B

6. Daerah Operasi 5

Keputusan Kepala Daerah Operasi 5 Purwokerto PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.VO.DO.5/KL.102/VI/1/DO.5-2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan Daerah Operasi 5 Purwokerto, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Deputy Vice President
Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian	: Quality Controller Operasi 5.A Purwokerto
Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	: Dian Sarani Setiawan, NIPP. 64190/ Dokter Fungsional
Sekretaris Bidang Keamanan	: Junior Manager Administrasi Pengamanan
Anggota	: Manager Operasi
Anggota	: Manager Sarana
Anggota	: Manager Siyal, Telekomunikasi dan Listrik
Anggota	: Manager Jalan Rel dan Jembatan

Anggota	: Manager Kesehatan
Anggota	: Manager SDM dan Umum
Anggota	: Manager Bangunan
Anggota	: Manager Pengamanan
Anggota	: Manager Fasilitas Penumpang
Anggota	: Quality Controller Sarana 5.A
Anggota	: Quality Controller Sarana 5.B
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 5.A Purwokerto
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 5.B Kroya
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 5.C Kebumen
Anggota	: Quality Controller Sintelis 5.A Purwokerto
Anggota	: Quality Controller Sintelis 5.B Maos
Anggota	: Quality Controller Sintelis 5.C Kutoarjo
Anggota	: Quality Controller Operasi 5.B Kutoarjo
Anggota	: Quality Controller Operasi 5.C Kroya
Anggota	: Quality Controller Operasi Sarana Purwokerto
Anggota	: Quality Controller Operasi Crew KA Purwokerto

7. Daerah Operasi 6

Keputusan Kepala Daerah Operasi 6 Yogyakarta PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.EVP.DO.6/KO.101.VI/2/DO.6-2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Tim Komite Keselamatan Daerah Operasi 6 Yogyakarta, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Deputy Vice President
Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian	: Quality Controller Operasi 6.A Yogyakarta
Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	: Assistant Manager Pelayanan, Klain dan Kepesertaan
Sekretaris Bidang Keamanan	: Junior Manager Administrasi Pengamanan
Anggota	: Manager Pengamanan
Anggota	: Manager Operasi
Anggota	: Manager Sarana
Anggota	: Manager Jalan Rel dan Jembatan
Anggota	: Manager Siyal, Telekomunikasi dan Listrik
Anggota	: Manager SDM dan Umum
Anggota	: Manager Kesehatan
Anggota	: Manager Bangunan
Anggota	: Manager Fasilitas Penumpang
Anggota	: Quality Controller Sarana 6.A
Anggota	: Quality Controller Sarana 6.B
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 6.A Yogyakarta
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 6.B Solobalapan
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 6.C Sragen
Anggota	: Quality Controller Sintelis 6.A Yogyakarta
Anggota	: Quality Controller Sintelis 6.B Solobalapan
Anggota	: Quality Controller Sintelis 6.C Sragen
Anggota	: Quality Controller Operasi 6.B Solobalapan
Anggota	: Quality Controller Operasi Sarana Yogyakarta
Anggota	: Quality Controller Operasi Crew KA Yogyakarta

8. Daerah Operasi 7

Keputusan Kepala Daerah Operasi 7 Madiun PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.UP.DO.7/KO.101/V/2/DO.7-2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan Daerah Operasi 7 Madiun sebagaimana diubah dengan Keputusan Kepala Daerah Operasi 7 Madiun PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.VP.DO.7/KO.101/VI/4/DO.7-2020 tanggal 15 Juni 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah	: <i>Vice President</i>
Ketua	: Deputy Vice President
Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian	: Quality Controller Operasi 7.A Madiun
Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	: Endra Budi Setyawan NIPP. 73169
Sekretaris Bidang Keamanan	: Manager Pengamanan Operasi Kereta Api
Anggota	: Senior Manager Pengamanan
Anggota	: Manager Operasi
Anggota	: Manager Sarana
Anggota	: Manager Sintelis
Anggota	: Manager Jalan Rel dan Jembatan
Anggota	: Manager Kesehatan
Anggota	: Manager SDM dan Umum
Anggota	: Manager Bangunan
Anggota	: Manager Pengamanan Objek Vital dan Aset
Anggota	: Manager Fasilitas Penumpang
Anggota	: Quality Controller Operasi Sarana Madiun
Anggota	: Quality Controller Operasi 7.B Kediri
Anggota	: Quality Controller Sarana 7.A
Anggota	: Quality Controller Sarana 7.B
Anggota	: Quality Controller Sintelis 7.A Madiun
Anggota	: Quality Controller Sintelis 7.B Kertosono
Anggota	: Quality Controller Sintelis 7.C Kediri
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 7.A Madiun
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 7.B Kertosono

9. Daerah Operasi 8

Keputusan Kepala Daerah Operasi 8 Surabaya PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.EVP.DO.8/KO.101/V/2/DO.8-2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Komite Keselamatan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Deputy Vice President
Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian	: Quality Controller Operasi 8A Surabaya Gubeng
Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	: Aditiya Tino Saputra
Sekretaris Bidang Keamanan	: Junior Manager Administrasi Pengamanan
Anggota	: Manager Operasi
Anggota	: Manager Sarana
Anggota	: Manager Sintelis
Anggota	: Manager Jalan Rel dan Jembatan
Anggota	: Manager Kesehatan
Anggota	: Manager SDM dan Umum

Anggota	: Manager Bangunan
Anggota	: Manager Pengamanan
Anggota	: Manager Fasilitas Penumpang
Anggota	: Quality Controller Operasi
Anggota	: Quality Controller Sarana
Anggota	: Quality Controller Sintelis
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan

10. Daerah Operasi 9

Keputusan Kepala Daerah Operasi 9 Jember PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.VP. DO.9/KO.101/IV/1/DO.9-2024 tanggal 12 April 2024 tentang Komite Keselamatan di Wilayah Daerah Operasi 9 Jember, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: <i>Vice President</i>
Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian	: Quality Controller Operasi 9.B Banyuwangi
Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	: Paramedis Pos Kesehatan/Pos Pemeriksaan Kesehatan Stasiun Jember
Sekretaris Bidang Keamanan	: Deputy Pengamanan Objek Vital, Aset, dan Operasi Kereta Api
Anggota	: Manager Pengamanan
Anggota	: Manager Operasi
Anggota	: Manager Sarana
Anggota	: Manager Jalan Rel dan Jembatan
Anggota	: Manager Kesehatan
Anggota	: Manager SDM dan Umum
Anggota	: Manager Bangunan
Anggota	: Manager Sintelis
Anggota	: Manager Angkutan dan Fasilitas Penumpang
Anggota	: Quality Controller Operasi 9.A. Jember
Anggota	: Quality Controller Operasi Sarana Jember
Anggota	: Quality Controller Sarana 9.A
Anggota	: Quality Controller Sarana 9.B
Anggota	: Quality Controller Sintelis 9. Jember
Anggota	: Quality Controller Sintelis 9.B Banyuwangi
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 9.A Jember
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan 9.B Probolinggo

11. Divisi Regional I

Keputusan Kepala Divisi Regional I Sumatera Utara PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.VP.DV.I/KL.501/V/1/DV.I-2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan Divisi Regional I Sumatera Utara, dengan susunan sebagai berikut:

Pengarah	: <i>Vice President</i>
Ketua	: <i>Deputy Vice President</i>
Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian	: Quality Controller Operasi I.A Medan
Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	: Assistant Manager Kesehatan Kerja
Sekretaris Bidang Keamanan	: Junior Manager Administrasi Pengamanan

Anggota	: Vice President Sub Divisi Regional I.1 Aceh
Anggota	: Senior Manager Pengamanan
Anggota	: Manager Operasi
Anggota	: Manager Sarana
Anggota	: Manager Sinyal Telekomunikasi dan Listrik
Anggota	: Manager Jalan Rel dan Jembatan
Anggota	: Manager Kesehatan
Anggota	: Manager Sumber Daya Manusia dan Umum
Anggota	: Manager Bangunan
Anggota	: Manager Fasilitas Penumpang
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan I.A Medan
Anggota	: Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan I.B Tebingtinggi
Anggota	: Quality Controller Operasi I.B Rantauprapat
Anggota	: Quality Controller Operasi Sarana Medan
Anggota	: Quality Controller Operasi Crew KA Medan
Anggota	: Quality Controller Sarana I.A Medan
Anggota	: Quality Controller Sintelis I.B Tebingtinggi
Anggota	: Quality Controller Sintelis I.C Kisaran

12. Divisi Regional II

Keputusan Kepala Divisi Regional II Sumatera Barat PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.VP.DV.II/KO.101/VI/DV.2-2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan Daerah di Wilayah PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Vice President
Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian	: Quality Controller Operasi dan Pengendalian Opka
Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	: Agnes Tri Novin Tampubolon/72568
Sekretaris Bidang Keamanan	: Assistant Manager Administrasi Pengamanan
Anggota	: Manager Prasarana
Anggota	: Manager Sarana
Anggota	: Manager UPT Balai Yasa Padang
Anggota	: Manager Penjagaan Aset dan Komersialisasi Non Angkutan
Anggota	: Manager Kesehatan
Anggota	: Manager Keuangan dan Sumber Daya Manusia
Anggota	: Manager Pengamanan
Anggota	: Manager Operasi, Fasilitas dan Angkutan Penumpang
Anggota	: Safety Inspector Penugasan di Drive II Sumatera Barat
Anggota	: Wigantara Abadi / 72297

13. Divisi Regional III

Keputusan Kepala Divisi Regional II Palembang PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.EVP.DV.III/KO.101/V/2/DV.3-2020 tanggal 31 Mei 2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan Divisi Regional II Palembang, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Perusahaan	Jabatan Dalam Organisasi
1.	Waroso	Deputy Executive Vice President Divisi Regional III Palembang	Ketua
2.	Sofan Hidayah	General Manager Light Rail Transit Sumatera Selatan	Anggota
3.	Dudi Hadiwijaya	Senior Manager Pengamanan Divre III Palembang	Sekretaris Bidang Keamanan
4.	Agus Laksana Susanto	Senior Manager Operasi Divre III Palembang	Anggota
5.	Agus Nadi	Senior Manager Sarana Divre III Palembang	Anggota
6.	Edi Triadi	PLT Senior Manager Jalan Rel dan Jembatan Divre III Palembang	Anggota
7.	Salas Martian	Manager Kesehatan Divre III Palembang	Anggota
8.	Wahono	Manager Kesehatan Divre III Palembang	Anggota
9.	Nursanti	Manager Sumber Daya Manusia dan Umum	Anggota
10.	Harmianto	Manager Bangunan	Anggota
11.	Firmansyah	Manager Angkutan dan Fasilitas Penumpang	Anggota
12.	Dermawanta	Manager Pengamanan Objek Vital dan Aset	Anggota
13.	Ermono	Manager Pengamanan Operasi Kereta Api	Anggota
14.	Suradi	Quality Controller Operasi III.A Kertapati	Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian
15.	Joko Sulistyono	Wuality Controller III.B Tanjungenim	Anggota
16.	Mochamad Ridwan Subarkah	Quality Controller III.C Lubuklinggau	Anggota
17.	Farid Sugianto	Quality Contoller Crew KA Kertapati	Anggota
18.	Deddy Hariyanto	Quality Contoller Operasi Sarana Kertapati	Anggota
19.	Ahmad Syarbani	Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan III.A Kertapati	Anggota
20.	Agus Edi	Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan III.B Prabumulih	Anggota
21.	Safiudin	Quality Contoller Jalan Rel dan Jembatan III.C Niru	Anggota
22.	Baridin Saleh	Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan III.D Muaraenim	Anggota
23.	Alpian	Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan III.E Lahat	Anggota
24.	Rusli	Quality Controller Jalan Rel dan Jembatan III. F Lubuklinggau	Anggota
25.	Rismanto	Quality Controller Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik III.A Kertapati	Anggota
26.	Jana Djiwajana	Quality Controller Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik III. B Prabumulih	Anggota
27.	Muhammad Syarifuddin	Quality Controller Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik III. C Tanjungenim Baru	Anggota
28.		Quality Controller Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik III. D Lahat	Anggota
29.	Sutejo	Quality Controller Sarana III.A	Anggota
30.	R. Usman	Quality Controller Sarana III.B	Anggota

14. Divisi Regional IV

Keputusan Kepala Divisi Regional IV Tanjungkarang PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.EVP.DV.IV/KO.101/V/1/DV.4-2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan Daerah di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional IV Tanjungkarang, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Deputy Executive Vice President
 Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian : Quality Controller Operasi IV.A
 Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan : Dokter Fungsional 3

Sekretaris Bidang Keamanan	: Manager Pengamanan Operasi Kereta Api
Anggota	: Seluruh Quality Controller
Anggota	: Senior Manager Operasi
Anggota	: Senior Manager Sarana
Anggota	: Senior Manager Sinyal, Telekomunikasi dan Listrik
Anggota	: Senior Manager Jalan Rel dan Jembatan
Anggota	: Senior Manager Pengamanan
Anggota	: Manager Kesehatan
Anggota	: Manager Sumber Daya Manusia dan Umum
Anggota	: Manager Bangunan
Anggota	: Manager Angkutan dan Fasilitas Penumpang
Fasilitator	: <i>Safety Inspector</i> Penugasan di Divre IV Tanjungkarang
Sekretariat	: Arief Bachtiar Putra

15. UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng

Keputusan General Manager UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.GM.BYSGU/KO.101/VI/1/BY.SGU-2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Perusahaan	Jabatan Dalam Organisasi
1.	Idrus Fauzi	General Manager UPT Balai Yasa Surabaya Gubeng	Penanggung Jawab
2.	Acep Rahadian Firdaos	Manager Perencanaan	Ketua
3.	Tri Kuswandi Wibowo	Manager Quality Control	Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian
4.	Irma Devina	Manager Keuangan, SDM, dan Teknologi Informasi	Sekretaris Bidang Keamanan
5.	Elis Nur Fitriana	Supervisor Evaluasi Distribusi	Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
6.	Ariyanto	Junior Supervisor Evaluasi Distribusi Kereta	Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
7.	Afriyani Ilmi	Junior Supervisor Desain dan Modifikasi	Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
8.	Anas Akhmadi	Junior Supervisor Instruksi Gambar	Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
9.	Kukuh Tri Prasetyo	Manager Produksi	Anggota
10.	Moh. Lukman	Manager Logistik	Anggota
11.	Bekti Wiyono	Assistant Manager Fasilitas Kerja	Anggota
12.	Muhamad Abdurrochman	Assistant Manager Perencanaan	Anggota
13.	Zainal Fanani	Assistant Manager Kelangsungan Kerja dan Evaluasi	Anggota
14.	Royan	Assistant Manager Pergudangan dan Distribusi	Anggota
15.	Wisnu Subrantas	Assistant Manager Perencanaan Logistik	Anggota
16.	Wagiyanto	Assistant Manager Bogie	Anggota
17.	Arifin	Assistant Manager Logam	Anggota
18.	Ahmad Fahmi Mubarak	Assistant Manager Rangka Atas	Anggota
19.	Moch. Ridwan	Assistant Manager Rangka Bawah	Anggota
20.	Eko Puji Santoso	Assistant Manager Final Test	Anggota
21.	Hendrik Waskito	Assistant Manager Komponen	Anggota
22.	Rony Koesdarmanto	Assistant Manager Perangkat Tukar	Anggota
23.	Taqwim Ismail	Assistant Manager Listrik dan AC Kereta	Anggota
24.	Ahmad Mujtahid	Supervisor Infrastructure Support	Anggota
25.	Maya Evayani Gurning	Supervisor Anggota Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
26.	Radius Suroso	SupervisorKomponen Ekterior dan Interior	Anggota

No.	Nama	Jabatan Dalam Perusahaan	Jabatan Dalam Organisasi
27.	Dwi Setia Handoko	Supervisor Pengecekan Kereta dan Gerbong	Anggota
28.	Taukhid	Supervisor Perangkat Tukar Kereta	Anggota
29.	Yoga Paripurna	Supervisor Final Test Kereta	Anggota
30.	Fidatul Mas Ulah	Supervisor Dokumen	Anggota
31.	Kurniawan	Junior Supervisor Fasilitas Bangunan	Anggota
32.	M. Rifki Juhdi	Pelaksana SDM, Kerumahtangaan, dan Protokoler	Anggota
33.	Prajabna Eka Pratama	Pelaksana Pergudangan dan Distribusi	Anggota
34.	Azis Suryo Simanjuntak	Pelaksana Roda Kereta dan Gerbong	Anggota
35.	Bidara Yale Dwi Mayasari	Pelaksana Rencana Kereta	Anggota
36.	Rizal Wicaksono	Pelaksana Fasilitas Listrik	Anggota
37.	Luki Yuli Krisdianto	Pelaksana Body Eksterior	Anggota
38.	Hendra Gian Perdana	Pelaksana Komponen Bogie Gerbong	Anggota
39.	Roni Faisal	Pelaksana Perangkat Tukar Kereta Untuk Balai Yasa	Anggota
40.	Devit Hari Firmanto	Pelaksana Pengetesan Gerbong	Anggota
41.	Yulius Handoyo Saputra	Pelaksana Instalasi Listrik Kereta	Anggota

16. UPT Balai Yasa Manggarai

Keputusan Executive Vice President UPT Balai Yasa Manggarai PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.EVP.BYMRI/KO.101/VII/1/BY.MRI-2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan UPT Balai Yasa Manggarai, dengan susunan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Dalam Perusahaan	Jabatan Dalam Organisasi
1.	Irwansyah	Executive Vice President	Penanggung Jawab
2.	Kholis Hermawwan	Manager Perencanaan	Ketua
3.	Surono	Manager Quality Control	Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian
4.	Dyah Ayu Pitra Wardani	Manager Keuangan, SDM, dan TI	Sekretaris Bidang Keamanan
5.	Muhammad Yaul Akbar	Assistant Manager Perencanaan	Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
6.	Toto Permana	Supervisor Anggota Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
7.	Irwan Maulana	Junior Supervisor Rencana	Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
8.	Laksmono Retno Rahayu	Manager Produksi	Anggota
9.	Saefudin Juhri	Manager Logistik	Anggota
10.	Didit Dwi Sugiharto	Manager Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
11.	Aan Hermawan	Assistant Manager Bogie	Anggota
12.	Ali Nurdin	Assistant Manager Kereta dan Gerbong	Anggota
13.	Nanang Surahman	Assistant Manager Listrik Kereta	Anggota
14.	Agus Nan Waloya	Assitant Manager Logam	Anggota
15.	Taufik Trenggono	Assistant Manager Final Test	Anggota
16.	Agustin Gumilar	Assistant Manager Komponen	Anggota
17.	Didik Kristianto	Assistant Manager Perangkat Tukar	Anggota
18.	Alfian Aditama	Assistant Manager Fasilitas Kerja	Anggota
19.	Sugianto	Assistant Manager Kelangsungan Kerja dan Evaluasi	Anggota
20.	Dwi Suhartono	Assistant Manager Sekretaris Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota
21.	Usia Rachawati	Assistant Manager Pergudangan dan Distribusi	Anggota
22.	Dimas Avior Resan Deny	Assistant Manager Perencanaan Logistik	Anggota
23.	Danny	Assistant Manager Sistem Informasi	Anggota
24.		Assistant Manager SDM, Kerumahtangaan dan Protokoler	Anggota

No.	Nama	Jabatan Dalam Perusahaan	Jabatan Dalam Organisasi
25.	Kusmiyati Andayani	Supervisor Dokumen	Anggota
26.	Budi Ukanda	Supervisor Kereta 3	Anggota
27.	Kerid	Supervisor Kereta 6	Anggota
28.	Ajat Sudrajat	Supervisor Bogir	Anggota
29.	Sugeng Suyanto	Supervisor Perangkat Tukar Komponen	Anggota
30.	Choeril Mahbub	JS Pemeriksaan Kualitas Komponen Safety Bogie dan Angin	Anggota
31.	Arief Budiawan	Junior Supervisor Final Test Pelayanan	Anggota
32.	Syarip Munajatullah	Pelaksana Perangkat Tukar Safety Bogie dan Angin	Anggota
33.	Kukuh Aji Prasetyo	Pelaksana Rangka Dasar 5	Anggota
34.	Muhammad Faizal	Pelaksana Bongkar Pasang Mekanik Bogie	Anggota
35.	Iqbal Faizal	Pelaksana Pengereman	Anggota
36.	Eka Purnama Cahya	Pelaksana Pengelasan	Anggota
37.	Sugeng Yuli Purwanto	JS Perawatan dan Perbaikan Mesin Tenaga	Anggota
38.	Uria Suci Rahayu	Pelaksana Kelangsungan Kerja Suku Cadang	Anggota
39.	Ragil Apriyanto	Pelaksana Assembly dan Disassembly Pesawat AC Kereta	Anggota

17. UPT Balai Yasa Tegal

Keputusan General Manager UPT Balai Yasa Tegal PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.GM.BY.TG/KO.101/VI/4/BYTG-2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan UPT Balai Yasa Tegal, dengan susunan sebagai berikut:

Penanggungjawab	: GM UPT BY Tegal
Ketua	: Manager Perencanaan
Sekretaris Bidang Keselamatan Perkeretaapian	: Manager Quality Control
Sekretaris Bidang Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan	: Ahli K3
Sekretaris Bidang Keamanan	: Manager Keu, SDM, dan TI
Anggota	: Manager Produksi
Anggota	: Manager Logistik
Anggota	: Asman Perangkat Tukar
Anggota	: Asman Final Test
Anggota	: Asman Komponen
Anggota	: Asman Bogie
Anggota	: Asman Rangka Bawah
Anggota	: Asman Fasilitas Kerja
Anggota	: Asman Perencanaan
Anggota	: Asman Rangka Atas
Anggota	: Asman Logam
Anggota	: Asman Listrik dan AC
Anggota	: Asman Perencanaan Logistik
Anggota	: Asman Pergudangan dan Distribusi
Anggota	: Asman Anggaran
Anggota	: Asman SDM
Anggota	: Asman Keuangan dan Pajak
Anggota	: Asman IT
Anggota	: Asman PBJ

10. SUMBER DAYA MANUSIA

A. Rincian Jumlah Pegawai

Pada tanggal 31 Mei 2024 jumlah seluruh karyawan (tidak termasuk Direksi) Perusahaan dan entitas anak sejumlah 54.015 pegawai. Dimana Perseroan (Kantor Pusat dan DAOP) memiliki 27.917 karyawan. Berikut adalah gambaran profil dan komposisi karyawan Perseroan.

Menurut Tingkat Jabatan

Keterangan	<i>(jumlah orang)</i>		
	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EVP	35	36	32
VP/GM	129	134	131
SM/Manager	728	719	640
Assistant Manager	1968	1962	1969
Supervisor	10134	10074	3060
Pelaksana	14649	14402	20741
PKM/Calon Pekerja	271	843	784
Cuti Diluar Tanggungan	3	2	2
Jumlah	27.917	28.172	27.359

Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	<i>(jumlah orang)</i>		
	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
SD	260	288	367
SMP	451	480	576
SMA	23887	24.111	23532
D3	1239	1.240	1000
S1	1999	1.982	1824
S2	81	71	60
Jumlah	27.917	28.172	27.359

Menurut Jenjang Usia

Keterangan	<i>(jumlah orang)</i>		
	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<30 tahun	7327	7927	7620
31 – 40 tahun	12364	11893	11054
41 – 50 tahun	5606	5808	6225
51 – 56 tahun	2620	2544	2460
Jumlah	27.917	28.172	27.359

Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	<i>(jumlah orang)</i>		
	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
DU - Direktorat Utama	662	651	684
D1 - Direktorat Komersial	1520	1508	1480
D2 - Direktorat Operasi	9741	9.596	9201
D3 - Direktorat Pengelolaan Prasarana	6005	5.921	5819
D4 – Direktorat Sarana	5961	5.943	5737
D5 - Direktorat Keselamatan dan Keamanan	1516	1.523	1630
D6 - Direktorat SDM dan Umum	1341	1.300	974
D7 - Direktorat Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha	362	364	339
D8 - Direktorat Keuangan dan Manajemen Resiko	809	771	1051
Jumlah	27.917	28.172	27.359

Menurut Wilayah Kerja

(jumlah orang)

Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kantor Pusat	2024	2.016	1866
DAOP I Jakarta	2983	3.024	3044
DAOP II Bandung	1868	1.899	1887
DAOP III Cirebon	1315	1.329	1334
DAOP IV Semarang	1807	1.831	1811
DAOP V Purwokerto	1788	1.797	1788
DAOP VI Yogyakarta	1957	1.976	1939
DAOP VII Madiun	1263	1.270	1265
DAOP VIII Surabaya	2401	2.423	2381
DAOP IX Jember	973	970	984
DIVRE I Sumatera Utara	1451	1.462	1411
SUBDIVRE I.1 Aceh	18	19	17
DIVRE II Sumatera Barat	554	560	541
DIVRE III Palembang	3019	3.110	2880
DIVRE IV Tanjungkarang	2180	2.228	2080
Balai Yasa Manggarai	324	317	322
Balai Yasa Tegal	247	247	255
Balai Yasa Yogyakarta	416	391	377
Balai Yasa Surabaya Gubeng	281	268	265
Balai Yasa Lahat	359	347	335
Balai Yasa Pulubrayan	91	93	95
LRT Jabodetabek	597	595	482
Jumlah	27.917	28.172	27.359

Menurut Status Tetap dan Kontrak

(jumlah orang)

Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pegawai Tetap	27.917	28.172	27.359
PKWT	86	79	6
Jumlah	28.003	28.251	27.365

Jumlah Pegawai Anak Perusahaan

KALOG

(dalam jumlah orang)

Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Menurut Tingkat Jabatan</u>			
Vice President/General Manager/Senior Manager	10	10	11
Manager	28	28	28
Junior & Assistant Manager	60	62	57
Senior Supervisor	15	15	8
Supervisor	60	58	66
Junior Supervisor dan officer	7	8	4
Pelaksana	115	101	74
Kontrak Magang	-	-	-
Jumlah	295	282	248
<u>Menurut Jenjang Pendidikan</u>			
SMP	-	-	-
SMA	111	106	88
D3	63	60	58
S1	115	110	96
S2	6	6	6
S3	-	-	-
Jumlah	295	282	248

KALOG			
<i>(dalam jumlah orang)</i>			
Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Menurut Jenjang Usia</u>			
<30 tahun	90	79	76
31 – 40 tahun	140	138	111
41 – 50 tahun	58	57	54
51 – 56 tahun	7	8	7
Jumlah	295	282	248
<u>Menurut Aktivitas Utama</u>			
Direktorat Utama	198	189	169
Direktorat keuangan & HR	37	39	35
Direktorat Operasi & Pemasaran	49	44	33
Direktorat Pengembangan Usaha	11	10	11
Jumlah	295	282	248
<u>Menurut Status Tetap dan Kontrak</u>			
Tetap (Organik)	295	282	248
PKWT	-	-	-
Jumlah	295	282	248
<u>Menurut Lokasi</u>			
Kantor Pusat	122	117	102
Wilayah Barat	52	50	44
Wilayah Tengah	31	29	25
Wilayah Timur	30	29	31
Wilayah Sumatera	60	57	46
Jumlah	295	282	248
KAWIS			
<i>(dalam jumlah orang)</i>			
Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Menurut Tingkat Jabatan</u>			
Executive Vice President	-	-	-
Vice President/General Manager/Senior Manager	6	5	6
Manager	12	11	11
Junior Manager	-	1	1
Assistant Manager	21	8	7
<u>Senior Supervisor</u>	-	3	3
Supervisor	11	3	4
Junior Supervisor	-	2	2
Pelaksana	20	5	5
PKWT	100	58	62
Jumlah	170	96	101
<u>Menurut Jenjang Pendidikan</u>			
SMA	116	66	74
D3	9	4	3
S1	45	26	24
S2	-	-	-
Jumlah	170	96	101
<u>Menurut Jenjang Usia</u>			
<30 tahun	67	31	43
31 – 40 tahun	70	39	32
41 – 50 tahun	27	20	22
51 – 56 tahun	6	6	4
Jumlah	170	96	101

KAWIS			
<i>(dalam jumlah orang)</i>			
Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Menurut Aktivitas Utama</u>			
Direktorat Utama	12	14	11
Direktorat Operasi	129	71	79
Direktorat Keuangan dan Administrasi	29	11	11
Jumlah	170	96	101
<u>Menurut Status Tetap dan Kontrak</u>			
Tetap (Organik)	70	58	62
Tidak Tetap (PKWT)	100	38	39
Jumlah	170	96	101
<u>Menurut Lokasi</u>			
Area 1	11	7	3
Kantor Pusat	130	66	65
Area 2	18	11	19
Area 3	5	6	7
Area 4	6	6	7
Jumlah	170	96	101
KAPM			
<i>(dalam jumlah orang)</i>			
Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Menurut Tingkat Jabatan</u>			
VP	15	15	15
SM/M	39	37	34
JM/AM	28	28	24
JS/S/SS	35	34	28
Pelaksana	47	15	13
PKWT	37	88	106
Jumlah	201	217	220
<u>Menurut Jenjang Pendidikan</u>			
SMA	45	58	66
D3	39	45	44
S1	105	103	95
S2	12	11	15
Jumlah	201	217	220
<u>Menurut Jenjang Usia</u>			
<30 tahun	51	69	78
31 – 40 tahun	75	66	58
41 – 50 tahun	51	56	50
51 – 56 tahun	24	26	34
Jumlah	201	217	220
<u>Menurut Aktivitas Utama</u>			
Optimalisasi Aset	78	138	163
Umum	123	79	57
Jumlah	201	217	220
<u>Menurut Lokasi</u>			
Kantor Pusat KAPM	136	158	160
Area Bandung	7	8	7
Area Cirebon	1	2	2
Area Semarang	1	4	4
Area Purwokerto	2	1	2
Area Yogyakarta	10	2	1
Area Madiun	1	1	1
Area Surabaya	3	2	2

KAPM			
<i>(dalam jumlah orang)</i>			
Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Area Jember	1	1	1
Area Medan	1	1	2
Area Padang	1	1	1
Area Palembang	35	34	32
Area Tanjungkarang	2	2	5
Jumlah	201	217	220

KCI			
<i>(dalam jumlah orang)</i>			
Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Menurut Tingkat Jabatan</u>			
<i>Vice President</i>	6	8	8
<i>Senior Manager/Manager</i>	13	11	11
<i>Junior Manager-Assistant Manager</i>	48	34	31
<i>Senior Supervisor-Junior Supervisor</i>	389	210	217
<i>Staff</i>	794	1047	1052
PKWT	16	37	41
Jumlah	1266	1347	1360
<u>Menurut Jenjang Pendidikan</u>			
SD	1	1	1
SMP	1	1	1
SMA	871	919	924
D3	142	175	180
S1	246	245	247
S2	5	6	7
Jumlah	1266	1347	1360
<u>Menurut Jenjang Usia</u>			
<30 tahun	486	895	1011
31 – 40 tahun	700	404	310
41 – 50 tahun	67	31	25
51 – 56 tahun	13	17	14
Jumlah	1266	1347	1360
<u>Menurut Aktivitas Utama (d disesuaikan dengan kegiatan bisnis)</u>			
Direktorat Utama	121	111	108
Direktorat Keuangan dan Administrasi	125	152	156
Direktorat Teknik	268	229	230
Direktorat Operasi dan Pemasaran	752	855	866
Jumlah	1266	1347	1360
<u>Menurut Status Tetap dan Kontrak</u>			
Tetap (Organik)	1250	1310	1319
<i>Probation</i>	-	-	-
PKWT	16	37	41
External Employee	-	-	-
Jumlah	1266	1347	1360
<u>Menurut Lokasi</u>			
Kantor Pusat	1117	1318	1339
Wilayah Lokal 1 Merak	4	4	4
Wilayah Lokal 2 Bandung	62	-	-
Wilayah Lokal 6 Yogyakarta	40	25	17
Wilayah Lokal 8 Surabaya	32	-	-
KA Basoetta	11	-	-
Jumlah	1266	1347	1360

RAILINK			
<i>(dalam jumlah orang)</i>			
Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Menurut Tingkat Jabatan</u>			
Executive Vice President	-	-	-
Vice President/General Manager/Senior Manager	6	4	6
Manager	15	10	15
Junior & Assistant Manager	16	17	18
Senior Supervisor	17	13	16
Supervisor	5	4	7
Junior Supervisor dan officer	13	13	13
Pelaksana	32	17	35
PKWT	16	20	22
Masa Persiapan Pensiun (MPP)	-	-	-
Jumlah	120	98	132
<u>Menurut Jenjang Pendidikan</u>			
SMA	60	46	75
D3	7	9	10
S1	52	40	46
S2	1	3	1
Jumlah	120	98	132
<u>Menurut Jenjang Usia</u>			
<30 tahun	52	37	68
31 – 40 tahun	42	39	39
41 – 50 tahun	18	18	21
51 – 56 tahun	8	4	4
Jumlah	120	98	132
<u>Menurut Aktivitas Utama</u>			
Direktorat Utama	23	13	20
Direktorat Komersial	26	22	
Direktorat Operasi, Teknik & IT	52	46	84
Direktorat Administrasi & Keuangan	19	17	28
Jumlah	120	98	132
<u>Menurut Status Tetap dan Kontrak</u>			
Tetap (Organik)	104	78	110
Kontrak (Pekerja Kontrak Magang)	16	20	22
Jumlah	120	98	132
<u>Menurut Lokasi</u>			
Kantor Pusat	63	37	42
Kantor Cabang Medan	41	39	38
Kantor Cabang Yogyakarta/ Jakarta	16	22	52
Jumlah	120	98	132

RMU			
<i>(dalam jumlah orang)</i>			
Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Menurut Tingkat Jabatan</u>			
Vice President/General Manager/Senior Manager	14	12	11
Manager	36	37	38
Junior & Assistant Manager	97	92	98
Senior Supervisor	14	13	12
Supervisor	93	95	93
Junior Supervisor dan officer	56	41	47
Pelaksana	23.650	10.174	11.723
Jumlah	23.960	10.464	12.022

RMU			
	<i>(dalam jumlah orang)</i>		
Keterangan	31 Mei 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<u>Menurut Jenjang Pendidikan</u>			
SD			31
SMP			140
SMA	23.813	10.107	11.512
D3	27	82	86
S1	108	259	238
S2	12	16	15
Jumlah	23.960	10.464	12.022
<u>Menurut Jenjang Usia</u>			
<30 tahun	15.162	4.736	6.582
31 – 40 tahun	6.233	4.155	3.502
41 – 50 tahun	2.163	1.250	1.493
51 – 56 tahun	402	323	445
Jumlah	23.960	10.464	12.022
<u>Menurut Aktivitas Utama</u>			
Direktorat Utama	280	192	163
Direktorat Operasi	21.749	9.406	10.545
Direktorat Komersil	1.366	711	1.155
Direktorat Keuangan dan Administrasi	565	155	159
Jumlah	23.960	10.464	12.022
<u>Menurut Status Tetap dan Kontrak</u>			
Perbantuan	37	44	49
Pegawai Tetap	318	313	318
PKWT	23.605	10.107	11.655
Jumlah	23.960	10.464	12.022
<u>Menurut Lokasi</u>			
RMU Head Office	4.017	280	277
Wilayah 1 Jakarta	5.648	2.327	1773
Wilayah 2 Bandung	2.144	1.111	1.380
Wilayah 3 Cirebon	713	332	652
Wilayah 4 Semarang	1.406	744	828
Wilayah 5 Purwokerto	1.148	582	1.008
Wilayah 6 Yogyakarta	2.037	1.036	1.075
Wilayah 7 Madiun	631	356	604
Wilayah 8 Surabaya	2.177	1.082	1.229
Wilayah 9 Jember	513	291	475
Wilayah 10 Medan	990	572	622
Wilayah 11 Palembang	2.536	1.751	2.149
Jumlah	23.960	10.464	12.022
<i>Outsourcing</i>	20.676	8.708	9.922
Jumlah	20.676	8.708	9.922

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang memiliki keahlian khusus dibidangnya dan tenaga kerja asing yang dipekerjakan.

Dalam mewujudkan adanya kepastian hukum bagi pekerja dan perseroan dalam pelaksanaan hubungan kerja perusahaan, maka dibuatkan perjanjian kerja Bersama yang tertuang di dalam Keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan sosial tenaga kerja No KEP.4/HI.00.01/00.0000.240701012/B/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api.

Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit sesuai Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung Nomor : KT.03.02.03/2223-Disnaker/XI/2022 tanggal 18 November 2022 tentang Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit PT Keeta Api Indonseia (Persero)

Perseroan telah membuat Perjanjian Kerja Bersama berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Kereta Api Periode 2024 – 2026 tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/HI.00.01/00.0000.240701012/B/VIII/2024 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api tanggal 7 Agustus 2024, yang berlaku terhitung sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2026.

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

a. Program Pendidikan dan Pelatihan

Dengan berkembangnya peran Sumber Daya Manusia (SDM) dan perubahan tantangan yang dihadapi, Perseroan telah melakukan penyesuaian terhadap model kompetensi yang diterapkan bagi pegawai KAI. Penyesuaian ini dilakukan secara mendasar untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan, sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2020-2024. Selain itu, penyesuaian ini juga bertujuan untuk mengakomodasi kapabilitas baru dalam struktur organisasi Perseroan. Model Kompetensi KAI ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Direksi PER.U/KH.503/IX/1/KA-2021 tentang Kamus dan Profil Kompetensi.

Lebih lanjut, Model Kompetensi KAI terdiri dari kompetensi non-teknis (*soft-competency*) dan kompetensi teknis (*hard-competency*). Kompetensi non-teknis berkaitan dengan kemampuan mengelola proses pekerjaan, hubungan antarmanusia, serta interaksi dengan orang lain, yang terdiri dari Basic, Core, dan Leadership. Sementara itu, kompetensi teknis adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk profesi atau posisi tertentu, yang mencakup Technical, Business, Digital, dan Management. Penjelasan mengenai Model Kompetensi KAI dapat dilihat melalui ilustrasi berikut:



Model kompetensi ini menjadi dasar untuk menyusun profil kompetensi jabatan, di mana setiap profil kompetensi jabatan terdiri dari 7 bagian kompetensi, yaitu Core, Basic, Technical, Business, Digital, Management, dan Leadership.

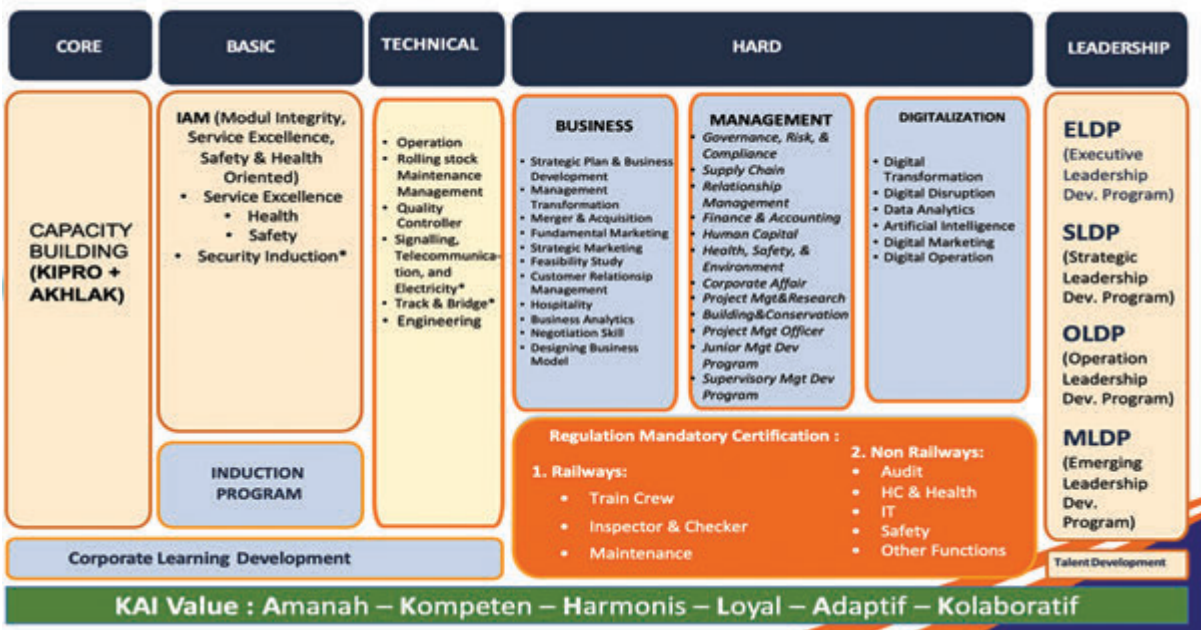
KAI menerapkan model pengembangan dengan Prinsip 70:20:10, yang dijelaskan sebagai berikut:

- Prinsip 70: pekerja akan mendapatkan pengembangan melalui pembelajaran dari pengalaman (*experiential learning*), seperti rotasi, penugasan proyek, dan magang.
- Prinsip 20: pekerja akan mendapatkan pengembangan melalui pembelajaran sosial (*social learning*), seperti mendapatkan pendampingan dari coach internal dan eksternal.
- Prinsip 10: pekerja akan diberikan pelatihan dan pengembangan sesuai dengan Sistem Pengembangan Pembelajaran (*Learning Development System*).

Secara umum, pekerja akan mendapatkan program pengembangan terintegrasi sesuai Model Kompetensi KAI melalui program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) maupun Non-Diklat.

Program Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat)

KAI melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai dengan mengacu pada Learning Development System and Program yang telah disesuaikan dengan kompetensi baru KAI dengan penjelasan sebagai berikut:



No	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan
1	CORE	Program pengembangan utama untuk membentuk karakter seluruh insan KAI yang Kolaboratif, Inovatif, dan Proaktif
2	BASIC	Program pengembangan untuk membekali pekerja terkait dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh seluruh insan KAI (Integritas, Adiguna Layanan, Mengutamakan Keselamatan)
3	TECHNICAL	Program pengembangan untuk meningkatkan keahlian melalui pemenuhan kompetensi teknik Railway dan ekosistemnya
4	MANAGEMENT	Program pengembangan untuk memaksimalkan fungsi jabatan melalui pemenuhan kompetensi yang mendukung fungsi pekerjaannya atau jabatan
5	BUSINESS	Program pengembangan untuk mendukung bisnis perusahaan dalam mewujudkan visi misi perusahaan melalui pemenuhan kompetensi teknik terkait bisnis
6	DIGITAL	Program pengembangan dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi melalui pemenuhan kompetensi digitalisasi
7	LEADERSHIP	Program pengembangan untuk menyiapkan pimpinan perusahaan yang bisa bersaing dengan BUMN lain melalui pemenuhan kompetensi leadership bagi para pimpinan

Program Non Diklat

Selain melakukan pengembangan melalui program Diklat, Perusahaan juga melakukan program pengembangan pekerja melalui kegiatan Non Diklat, diantaranya :

- **Coaching – Mentoring**, yaitu proses pendampingan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja, menggali potensi dan mengidentifikasi langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pekerja dengan Atasan atau Bawahan atau *Profesional Coach*.
- **Tugas Belajar** melalui Program Beasiswa diberikan kepada Pekerja melalui seleksi internal dan eksternal, di dalam dan luar negeri bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan ternama.
- **Talent Secondment**, yaitu Program magang di Kementerian BUMN melalui seleksi internal dan eksternal

- **Sharing Session** yang rutin dilakukan di lingkungan internal KAI dan menjadi komponen Nilai Kinerja Individu Non Reguler. Tidak hanya di lingkungan internal, *sharing session* dilakukan juga di lingkungan eksternal baik dengan pengguna kereta api, akademisi dan mahasiswa
- **Job Assignment Program**, berupa penyelesaian studi kasus dengan topik/proyek tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi pada jabatannya.
- **Benchmark**, KAI telah melakukan beberapa *Benchmark* baik ke perusahaan BUMN lain (Semen Indonesia, Telkom, Bank Mandiri, dll) maupun perusahaan luar negeri (Microsoft Asia, KTMB, dll) guna mempelajari inovasi yang dilakukan perusahaan tersebut

b. Sarana Kesejahteraan

Kesejahteraan SDM senantiasa selalu menjadi fokus Perseroan dalam menunjang program pengembangan pekerja Perseroan. Salah satu bentuk perhatian Perseroan terhadap kesejahteraan pekerja adalah pemberian kompensasi berupa penyediaan paket remunerasi yang kompetitif sesuai peraturan yang berlaku dan harga pasar, yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan, bonus serta fasilitas lain.

Fasilitas pelayanan kesehatan diberikan kepada pekerja termasuk yang telah pensiun melalui klinik kesehatan Perseroan yang tersedia di seluruh daerah operasi. Perseroan juga telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Kesehatan (BPJS). Di samping itu, Perseroan memiliki unit kesehatan yang memberikan fasilitas kesehatan primer bagi karyawan berupa JPK (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan) yang dapat digunakan di klinik-klinik kesehatan Perseroan. Tujuan dari pemberian ini adalah untuk mempertahankan keberadaan pekerja dalam jangka panjang dan tercapainya tujuan Perseroan yang efektif.

c. Serikat Pekerja

Serikat pekerja Kereta Api (SPKA) merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja, di Perseroan jasa Transportasi Perseroan. SPKA mempunyai tujuan memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya. Untuk selanjutnya serikat pekerja ini menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha yang berisi syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Perseroan memberikan kebebasan bagi pekerja dalam memenuhi haknya untuk bergabung dalam organisasi serikat pekerja. Hal ini merefleksikan kepatuhan Perseroan pada ketentuan perundang-undangan tentang Ketenagakerjaan maupun tentang Serikat Pekerja yang menjamin kebebasan semua pekerja untuk masuk dalam organisasi pekerja yang dikelola profesional sebagai sarana penghubung antara pekerja dan Manajemen.

Pekerja Perseroan telah membentuk serikat pekerja yang dinamakan Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) pada tanggal 14 September 1999 melalui Musyawarah Nasional (Munas) pertama di Bandung. Keanggotaan SPKA menganut stelsel aktif, demokratis, bebas dan bertanggung jawab.

Keanggotaan Serikat Pekerja adalah Pekerja PKWTT Perusahaan yang terdiri dari:

1. Pekerja eks PNS;
2. Pekerja eks Perumka;
3. Pekerja Perseroan;
4. PKWTT Perseroan yang diperbantukan pada anak,cucu maupun afiliasi perusahaan.

Hubungan industrial dikelola bersama dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit yang dibentuk mengacu pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2024-2026 Bab XI Pasal 72 tentang Lembaga Kerja Sama Bipartit.

Hubungan industrial semakin membaik, pada tingkat manajemen baik pusat maupun di daerah bersama-sama melaksanakan komunikasi Hubungan Industrial secara rutin maupun situasional sesuai kebutuhan untuk menyelesaikan isu ketenagakerjaan pekerja. Kebijakan strategis yang dilakukan Perseroan diinformasikan secara berkesinambungan kepada serikat. Hubungan spka dan management berjalan jauh lebih baik ditandai dengan (i) kebersamaan dalam kepatuhan menjalankan Perjanjian Kerja Bersama; (ii) silaturahmi Dewan Pengurus Pusat dan Daerah SPKA dengan Direksi Perusahaan yang berjalan lancar dan harmonis; (iii) setiap kegiatan SPKA didukung penuh oleh management begitupun sebaliknya; (iv) kegiatan SPKA yang selaras dengan kegiatan manajemen; kegiatan dalam artian kampanye yang dilakukan SPKA dilakukan untuk mendukung kampanye manajemen seperti halnya kampanye keselamatan di pintu perlintasan, keselamatan dan kesehatan kerja di Dipo, penghentian adanya pelemparan batu, keberlangsungan usaha perusahaan dan sebagainya.

11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



12. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

a. Perusahaan Anak

Berikut adalah tabel berisi informasi tentang kontribusi aset, liabilitas, pendapatan dan laba Perusahaan Anak terhadap Perseroan per 31 Mei 2024:

(ikhtisar keuangan dalam miliar, kontribusi dalam %)

Nama	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyer-taan	Tahun Op-erasional	Ikhtisar Keuangan Perusahaan Anak				Kontribusi Terhadap Perseroan			
					Aset	Liabili-tas	Pendapa-tan	Laba	Aset	Liabili-tas	Pendapa-tan	Laba
RMU	Restoran Kereta Api dan Penge-lolaan Lahan Parkir	99,74%	2003	2003	784	530	994	43	0,88%	0,92%	7,16%	3,63%
Railink	Pengusahaan Kereta Api Bandara	60,00%	2005	2014	473	267	181	18	0,53%	0,47%	1,30%	1,50%
KCI	Transportasi Kereta Com-muter	99,78%	2008	2008	3.539	1.969	1.480	88	3,95%	3,43%	10,65%	7,31%
KAWIS	Bidang Pariwisata Kereta	99,90%	2009	2010	297	212	220	12	0,33%	0,37%	1,59%	0,97%
KALOG	Distribusi Lo-gistik berbasis Kereta Api	99,30%	2009	2009	884	253	408	10	0,99%	0,44%	2,94%	0,86%
KAPM	Bidang Pengelolaan Aset/Properti Perkereta-apian	99,63%	2009	2009	927	375	453	12	1,03%	0,65%	3,26%	1,00%

b. Entitas Asosiasi

Perseroan melakukan investasi di bidang infrastruktur kepada perusahaan di bawah ini:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyer-taan	Tahun Operasional	Status
PSBI	Pengangkutan darat, perdagangan, jasa, industri, pembangunan	51,37%	2015	2015	Operasional
MITJ	Bidang transportasi Kereta Api	49%	2020	2021	Operasional

c. Perusahaan Terafiliasi

Perseroan, melalui Perusahaan Anak, melakukan investasi kepada perusahaan di bawah ini:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Presentase Kepemilikan	Pemegang Saham	Status
BPRSB	Perbankan Syariah	20%	RMU	Operasional
Finarya	Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran	1,82%	KCI	Operasional
PT Terminal Batu Bara International Srengsem	Pelayanan Jasa Angkutan Batu Bara	20%	KALOG	Operasional

Tidak terdapat perbedaan antara proporsi jumlah hak suara yang dimiliki dan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan terhadap Perusahaan Anak.

Berikut adalah keterangan mengenai Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi:

KCI



1. Pendirian dan Kegiatan Usaha

KCI adalah Perusahaan Anak yang awalnya bernama PT Kereta Commuter Jabodetabek dan berganti nama sejak 19 September 2017 yang didirikan berdasarkan Akta No. 457 tanggal 15 September 2008 oleh Notaris Ilmiawan Dekrit S. S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-74707.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0097249.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008, sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 30 Juni 2009, Tambahan No. 17112 (**"Akta Pendirian KCI"**). Akta Pendirian KCI telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagai berikut:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT KAI Commuter Jabodetabek No. 73 tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-08975.40.21.2014 tanggal 28 November 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124272.40.80.2014 tanggal 28 November 2014 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, Tambahan No. 1190/L (**"Akta No. 73/2014"**).
- b. Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham PT KAI Commuter Jabodetabek No. 85 tanggal 19 September 2017 yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0019228.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116459.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 19 September 2017 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65, Tambahan No. 12491 (**"Akta No. 85/2017"**).
- c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia No. 01 tanggal 7 Januari 2019 yang dibuat di hadapan Tri Mulyahati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-002753.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009001.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81, Tambahan No. 038240 (**"Akta No. 01/2019"**).
- d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia No. 12 tanggal 13 November 2020 yang dibuat di hadapan Tri Mulyahati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0077290.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 19 November 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193687.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 November 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93, Tambahan No. 043942 (**"Akta No. 12/2020"**).

2. Kegiatan Usaha

Sesuai Pasal 3 Anggaran Dasar KCI, kegiatan usaha KCI adalah:

- a. Kegiatan usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dan belum terlayani dalam trayek AKAP/ AKDP;
- b. Kegiatan usaha pengangkutan penumpang dengan berbagai moda angkutan jalan rel perkotaan, seperti trem, monorel, kereta listrik, kereta bawah tanah, kereta layang dan lain-lain yang juga mencakup pengoperasian kereta gantung, kereta api bukit, kereta kabel (gondola) dan lainnya apabila merupakan bagian dari sistem trayek perkotaan termasuk angkutan rel dengan jurusan kota ke bandara atau kota ke stasiun;
- c. Kegiatan usaha stasiun kereta api, seperti pelayanan parkir, penjadwalan keberangkatan kereta api dan pelayanan naik turun penumpang;
- d. Kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) semua jenis alat transportasi darat bukan kendaraan bermotor roda empat atau lebih (mobil, bis, truk dan sejenisnya) tanpa operatornya, seperti sepeda motor, caravan, camper, railroad vehicle dan sejenisnya, dan juga mencakup usaha persewaan peti kemas (container);
- e. Kegiatan usaha jasa reparasi dan perawatan lokomotif dan gerbong kereta api dan kendaraan jalan rel lainnya (kecuali industri pembangunan kembali dan pengubahan) dalam golongan 302;
- f. Kegiatan usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan) meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media, penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis - poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (directmail), konsultasi pemasaran;
- g. Kegiatan usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya;
- h. Kegiatan usaha perdagangan eceran khusus barang baru lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti kegiatan perdagangan eceran bahan pembersih, senjata dan amunisi, perangkai dan uang logam dan produk bukan makanan ytdl;
- i. Kegiatan pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut termasuk situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services;

- j. Kegiatan usaha yang berkaitan dengan penyediaan jasa pembayaran kepada pengguna akhir (end user) jasa layanan Sistem Pembayaran (SP) pada sisi front end, yang mencakup aktivitas antara lain: menampilkan informasi sumber dana; menginisiasi transaksi/acquiring (dompet elektronik, acquirer dan payment gateway); menerbitkan instrumen/akun pembayaran; layanan remitansi/transfer dana.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama KCI adalah Angkutan Jalan Rel Jarak Jauh Untuk Penumpang.

3. Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham KCI sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 73/2014, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	542.000	542.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	230.500	230.500.000.000	
- Perseroan	230.000	230.000.000.000	99,78
- Yayasan Pusaka	500	500.000.000	0,22
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	230.500	230.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	311.500	311.500.000.000	

4. Perizinan

Dalam menjalankan usahanya, KCI telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

- Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 1020 Tahun 2018 tanggal 9 Juli 2018, berlaku selama KCI menjalankan kegiatan usahanya;
- Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 124 Tahun 2019 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum KCI sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 124 Tahun 2019 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum KCI, tanggal 10 Februari 2021 berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;
- Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 134 Tahun 2020 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum KCI sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 40 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 134 Tahun 2020 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum KCI, tanggal 10 Februari 2021 berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;
- Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lintas Pelayanan Yang Sama berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KA.005/SK.46/DJKA/VII/19 tanggal 8 Juli 2019, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;
- Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik No. 003126.01/DJAI.PSE/06/2022 tanggal 15 Juni 2022;
- Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) No. 812000290008700000001 tertanggal 15 Juni 2022;
- Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. HK.209/3/18/DJKA/2022 tentang Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api pada Lintas Pelayanan Yang Sama kepada KCI tertanggal 9 Juni 2022, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;
- Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KA.005/1/4/DJKA/2022 tentang Persetujuan Penambahan Pengoperasian pada Lintas Pelayanan Manggarai – Bandar Udara Soekarno-Hatta kepada KCI tertanggal 29 Juli 2022;

- i. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KP – DJKA 92 Tahun 2023 Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api pada Lintas Pelayanan Yang Sama kepada KCI tertanggal 31 Mei 2023, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;
- j. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KP – DJKA 93 Tahun 2023 Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api pada Lintas Pelayanan Yang Sama kepada KCI tertanggal 31 Mei 2023, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;
- k. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KP – DJKA 104 Tahun 2024 Persetujuan Penambahan Frekuensi Perjalanan Kereta Api pada Lintas Pelayanan Yang Sama kepada KCI tertanggal 7 Mei 2024, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;
- l. Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KP – DJKA 63 Tahun 2022 tentang Pemberian Persetujuan Penambahan Pengoperasian pada Lintas Pelayanan di Daerah Operasi 2 Bandung dan Daerah Operasi 8 Surabaya kepada KCI tertanggal 9 November 2022, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;
- m. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP–PHB 249 Tahun 2024 tentang Pemberian Persetujuan Penambahan Pengoperasian Kereta Api pada Lintas Pelayanan yang Berbeda kepada KCI tertanggal 7 Mei 2024, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;
- n. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KP–DJKA 1 Tahun 2022 tentang Pemberian Persetujuan Penambahan Pengoperasian pada Lintas Pelayanan Palur – Yogyakarta kepada KCI tertanggal 11 Agustus 2022, berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan;

5. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi KCI yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Januar Parlindungan
Komisaris : Yan Setiadi

Direksi

Direktur Utama : Asdo Artriviyanto
Direktur Operasi dan Pemasaran : Broer Rizal
Direktur Keuangan : Adang Sujana
Direktur Teknik : Denny Haryanto

Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan:

- a. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia No. 15 tanggal 18 Maret 2024 dibuat di hadapan Tri Mulyahati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0113266 tanggal 21 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059031. AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024, yang mengangkat Januar Parlindungan sebagai Komisaris Utama PT KCI dan Yan Setiadi sebagai Komisaris PT KCI.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia No. 1 tanggal 9 Mei 2022 yang dibuat di hadapan Tri Mulyahati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-012792 tanggal 17 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091004.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 17 Mei 2022, yang mengangkat Denny Haryanto sebagai Direktur Teknik PT KCI dan Adang Sujana sebagai Direktur Keuangan PT KCI.

- c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia No. 01 tanggal 5 Juni 2023 yang dibuat di hadapan Tri Mulyahati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0125145 tanggal 9 Juni 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0106009.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 9 Juni 2023, yang mengangkat Broer Rizal sebagai Direktur Operasi dan Pemasaran PT KCI.
- d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia No. 26 tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat di hadapan Tri Mulyahati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Surat No. AHU-AH.01.09-0037223 tanggal 26 Januari 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019451. AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 26 Januari 2024, yang mengangkat Asdo Artriviyanto sebagai Direktur Utama PT KCI.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting KCI yang angka-angkanya dikutip dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan KCI untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 di audit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, dalam laporan keuangan yang telah ditandatangani oleh Dedy Sukrisnadi tertanggal 2 Agustus 2024. Dan untuk periode yang berakhir pada 31 Mei 2023 (tidak diaudit) serta tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dan telah di tandatangi oleh Dedy Sukrisnadi.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023*)	2023	2022
Laporan Laba Rugi				
Pendapatan Usaha	14.028.539.088	10.951.579.731	35.106.535.574	25.577.639.010
Laba Usaha	3.779.082.423	1.979.221.875	3.860.802.548	3.372.245.919
Laba Bersih Tahun Berjalan	1.197.854.738	1.098.374.029	1.871.548.137	1.685.989.220

(dalam ribuan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	31 Mei		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Jumlah Aset Lancar	14.788.639.582	13.023.841.719		15.337.947.951
Jumlah Aset Tidak Lancar	74.760.566.391	68.350.471.654		56.243.281.772
Jumlah Aset	89.549.205.973	81.374.313.373		71.581.229.723
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.878.802.122	17.921.316.180		9.958.123.860
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	43.498.238.983	32.546.859.952		32.542.921.558
Jumlah Liabilitas	57.377.041.105	50.468.176.132		42.501.045.418
Jumlah Ekuitas	32.172.164.868	30.906.137.241		29.080.184.305

*) tidak diaudit

Laporan Laba Rugi

Untuk perbandingan tanggal 31 Mei 2024 dan 31 Mei 2023, Terjadi peningkatan pada laba bersih tahun berjalan sebesar Rp99.480.709 ribu atau sebesar 9,06% dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023 dari sebesar Rp1.098.374.029 ribu menjadi sebesar Rp1.197.854.738 ribu. Kenaikan tersebut selaras dengan pos pendapatan yang mengalami peningkatan, peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba usaha. Hal ini menunjukan kemampuan Perseroan yang baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Untuk perbandingan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Terjadi peningkatan pada laba bersih tahun berjalan sebesar Rp185.558.917 ribu atau sebesar 11,01% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dari sebesar Rp1.685.989.220 ribu menjadi sebesar Rp1.871.548.137 ribu. Kenaikan tersebut selaras dengan pos pendapatan yang mengalami peningkatan.

Laporan Posisi Keuangan

Untuk perbandingan Aset Perseroan tanggal 31 Mei 2024 dan 31 Desember 2023, terjadi peningkatan sebesar Rp8.174.892.600 ribu atau sebesar 10,05% dari sebesar Rp81.374.313.373 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp89.549.205.973 ribu pada tanggal 31 Mei 2024. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan yang masih harus Diterima dari Pihak Berelasi (Pemerintah) berupa kompensasi atas Kewajiban Pelayanan Publik angkutan kereta api dan perawatan infrastruktur milik pemerintah yang belum terealisasi tagihannya dan meningkatnya piutang tidak lancar kepada ventura bersama PSBI.

Liabilitas juga terjadi peningkatan sebesar sebesar Rp6.908.864.973 ribu atau sebesar 13,69% dari sebesar Rp50.468.176.132 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp57.377.041.105 ribu pada tanggal 31 Mei 2024. Hal ini mayoritas dikarenakan adanya hal ini disebabkan penambahan pinjaman jangka panjang dari pihak ketiga berupa pemberian fasilitas pinjaman untuk pendanaan proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung.

Ekuitas terjadi peningkatan sebesar Rp1.266.027.627 ribu atau sebesar 4,10% dari sebesar Rp30.906.137.241 ribu pada tanggal 31 Desember 2023 menjadi Rp32.172.164.868 ribu pada tanggal 31 Mei 2024. Hal ini dikarenakan adanya oleh peningkatan pada saldo laba sebesar Rp1.190.242.766 ribu atau setara 1.553,65% dari sebelumnya Rp76.609.318 ribu menjadi Rp1.266.852.084 ribu

Untuk perbandingan tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Terjadi peningkatan aset sebesar Rp9.793.083.650 ribu atau sebesar 13,68% dari sebesar Rp71.581.229.723 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp81.374.313.373 ribu pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini mayoritas dikarenakan adanya penambahan aset Hak Pengoperasian Aset Prasarana, hal ini sehubungan dengan penyelesaian tahap konstruksi Proyek LRT Jabodebek dan juga penambahan investasi asset tetap berupa sarana dan prasarana.

Liabilitas juga terjadi peningkatan sebesar Rp7.967.130.714 ribu atau sebesar 18,75% dari sebesar Rp42.501.045.418 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp50.468.176.132 ribu pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya hal ini sehubungan dengan penambahan utang usaha kepada PT Adhi Karya (Persero) terkait penyelesaian proyek konstruksi LRT Jabodebek serta utang atas pembelian sarana kepada PT Industri Kereta Api (Persero), meningkatnya pinjaman jangka panjang kepada pihak berelasi yang memberikan pinjaman sindikasi untuk penyelesaian proyek *Light Rail Transit* (LRT).

Ekuitas terjadi peningkatan sebesar Rp1.825.952.936 ribu atau sebesar 6,28% dari sebesar Rp29.080.184.305 ribu pada tanggal 31 Desember 2022 menjadi Rp30.906.137.241 ribu pada tanggal 31 Desember 2023. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan pada saldo laba sebesar Rp1.782.040.447 ribu atau setara 23,16% dari sebelumnya Rp7.694.357.800 ribu menjadi Rp9.476.398.277 ribu.

13. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Merek


Merek yang sudah didaftarkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Merek yang dilindungi	No. dan Tanggal Pendaftaran	Tanggal berakhir perlindungan	Kode Kelas / Jenis Barang/Jasa
1.	"Kereta Api Indonesia Logo" 	IDM000921743 Tanggal 15 November 2021	7 Desember 2030	Kelas 37: perbaikan atau pemeliharaan sarana KA kereta api, pemasangan, perawatan dan perbaikan peralatan untuk pengiriman barang, pemasangan, perawatan dan perbaikan rel kereta api, perbaikan atau pemeliharaan rolling stock kereta api, perbaikan atau pemeliharaan sarana kereta api dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan kereta api, perbaikan dan pemeliharaan kontainer transportasi, Pusat layanan kendaraan untuk pengisian bahan bakar dan perawatan kendaraan.
2.		IDM000921754 Tanggal 15 November 2021	7 Desember 2030	Kelas 39: Informasi Logistik Transportasi melalui Jaringan Komunikasi Komputer, informasi transportasi, jasa konsultasi yang berkaitan dengan transportasi, jasa logistik yang terdiri dari penyimpanan, pengangkutan dan pengiriman barang, Jasa pemesanan langsung, pemesanan tiket, dan pemesanan dini transportasi, Jasa Penyedia Transportasi, Jasa transportasi, jasa transportasi dan penyimpanan yang berkaitan dengan logistik penyimpanan, logistik distribusi, dan pengembalian logistik, layanan check-in transportasi, layanan informasi transportasi terkomputerisasi, logistik transportasi, memberikan informasi terkait transportasi kereta api, memberikan informasi transportasi melalui situs web, memberikan informasi yang berkaitan dengan tarif, jadwal dan metode transportasi untuk barang dan orang, menyediakan informasi on-line di bidang transportasi, pengemasan dan penyimpanan barang, pemesanan transportasi, pengaturan transportasi, pengoperasian jaringan transportasi kereta api, penjemputan, transportasi, dan pengiriman paket dan surat dengan berbagai moda transportasi, sewa transportasi kereta api, transportasi barang melalui jalan darat atau kereta api, transportasi darat, transportasi kendaraan, transportasi kereta api, transportasi kereta api dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya, transportasi penumpang dan barang, transportasi penumpang dengan kereta api, transportasi, pengiriman, pengemasan, dan penyimpanan barang.

No.	Merek yang dilindungi	No. dan Tanggal Pendaftaran	Tanggal berakhir perlindungan	Kode Kelas / Jenis Barang/Jasa
3.		IDM000921744 Tanggal 15 November 2021	7 Desember 2030	Kelas 41: jasa hiburan dalam bentuk objek wisata taman hiburan, yaitu area yang mempunyai tema tertentu, Jasa pelatihan secara online; Jasa-jasa pendidikan, penyediaan kursus pelatihan dan pendidikan tentang otomisasi komputer, otomisasi data, monitoring dan control komunikasi antara komputer dan sistem sistem mesin otomat, pengembangan perangkat lunak, peralatan otomisasi perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrasi database, sistem komputer dan pengembangan aplikasi, dan manajemen, pengujian perangkat lunak dan otomisasi, pemeliharaan dan pengoprasi sistem komputer, perangkat lunak untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer, perangkat lunak robotika dan perangkat lunak artificial intelligence.; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen bisnis; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen proyek; Menyediakan kursus pelatihan online di bidang manajemen strategis; Menyediakan kursus pelatihan secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi, akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Pendidikan menyelam; Penyediaan pelatihan secara online; akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI;; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi, pemasaran dan bisnis; kursus pelatihan guru yoga; melakukan kursus pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; mengatur dan melakukan kursus pelatihan menyelam; mengatur dan melakukan kursus pendidikan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya [pelatihan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan di bidang manajemen bisnis; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan;

No.	Merek yang dilindungi	No. dan Tanggal Pendaftaran	Tanggal berakhir perlindungan	Kode Kelas / Jenis Barang/Jasa
				<p>menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus pelatihan selama berkelanjutan; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; organisasi kursus pelatihan; pelatihan (training) atlet sepatu roda; pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut diving dan snorkeling; pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung, jasa pemandu wisata untuk tujuan rekreasi, pendidikan atau budaya, Jasa-jasa informasi, pemberian nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa hiburan, olah raga, dan pendidikan, termasuk yang disediakan secara online dari database komputer atau dari Internet, konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan keterampilan kejuruan, konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan, layanan instruksi dan pelatihan, layanan pelatihan berkelanjutan, Layanan pelatihan dan pendidikan, layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan, Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan pariwisata, media dan telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan, Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line, memberikan informasi on-line di bidang pelatihan, mengatur dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan, mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah, mengatur kursus pelatihan, menyediakan fasilitas untuk pelatihan pendidikan, menyediakan video on-line, tidak dapat diunduh, di bidang transportasi, pelatihan praktis [demonstrasi], penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan, publikasi panduan pendidikan dan pelatihan.</p>
4.		IDM000921746 Tanggal 15 November 2021	7 Desember 2030	Kelas 43: jasa restoran dan catering, layanan kafe dan bar makanan ringan, layanan kafe, bistro, dan restoran, layanan kantin swalayan, Layanan catering termasuk layanan catering keliling dan layanan catering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet, layanan makanan dan minuman dibawa pulang, layanan restoran swalayan, menyediakan makanan dan minuman di restoran, penyediaan fasilitas restoran, penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet, penyediaan informasi mengenai jasa restoran, catering dan bar melalui informasi dan suatu situs web, restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang, restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam

Merek yang sudah dimohonkan:

No.	Merek yang dilindungi	No. dan Tanggal Permohonan	No. dan Tanggal Pengumuman	Kode Kelas / Jenis Barang/Jasa
1.	“Kereta Api IndonesiaPay Logo” 	JID2023122100 Tanggal 22 Desember 2023	BRM2401A Tanggal 3 Januari 2024	Kelas 36: Jasa pembayaran melalui uang elektronik secara online, Layanan pertukaran uang elektronik, Layanan transaksi pertukaran mata uang digital untuk yang setara dengan uang elektronik yang memiliki nilai tertentu dan dapat dipindahkan, Layanan uang elektronik, Manajemen uang, seperti memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik, memfasilitasi pemindahan yang setara dengan uang elektronik, Transfer uang elektronik.

Berdasarkan hasil penelusuran dalam Penelusuran Data Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sampai dengan tanggal Prospektus, merek KAIPay dan Logo sedang dalam tahap Pemeriksaan Substantif.

Hak Cipta

No.	Hak Cipta Yang Dilindungi	No. dan Tanggal Pendaftaran	Tanggal Pertama Kali Diumumkan	Tanggal berakhir Perlindungan	Pemegang	Pencipta
1.	Karya Tulis “Kereta Api Indonesia”	C00201203049 tanggal 22 Juni 2012	26 April 2012	-	Perseroan	Farid Stevy Asta

Hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Perseroan seluruhnya telah terdaftar atas nama Perseroan dan memperoleh perlindungan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hak atas kekayaan intelektual tersebut bebas dari jaminan, pertanggunggaan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.

14. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA PERKARA PADA PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS

Pada tanggal Prospektus, Perseroan sedang terlibat 59 (lima puluh sembilan) Perkara Perdata, 13 (tiga belas) Perkara Tata Usaha Negara, 5 (lima) Perkara Hubungan Industrial, 1 (satu) Perkara Pajak, dan 48 (empat puluh delapan) perkara pidana. Sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.

Terhadap perkara perdata sehubungan dengan aset yang sedang dihadapi oleh Perseroan, tidak memiliki dampak material terhadap Perseroan, sehingga apabila putusan tersebut tidak dimenangkan oleh Perseroan maka tidak terdapat dampak keuangan dan tidak terdapat gangguan atau hambatan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

Perkara yang sedang dihadapi Perseroan tidak memberikan dampak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.

PT KCI tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan maupun perusahaan anak, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

A. Gambaran Umum Kegiatan Usaha

Perseroan memiliki bisnis utama sebagai penyedia jasa transportasi transportasi perkeretaapian utama yang lengkap, mulai dari bidang angkutan penumpang, angkutan barang dan pengusahaan aset. Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki 9 (Sembilan) Daerah Operasi (DAOP), 4 (empat) Divisi Regional (DIVRE), 1 (satu) Sub Divisi Regional (SUBDIVRE) dan 6 (enam) Balai Yasa.

Berikut adalah skema kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan.



Bidang usaha Perseroan terbagi dalam tiga kategori berbeda yaitu (i) angkutan penumpang, yang melayani angkutan jarak jauh, jarak menengah, dan jarak dekat, (ii) angkutan barang yang melayani angkutan peti kemas, batubara, semen, parsel, barang curah dan lain-lain, serta (iii) non angkutan yang mengelola stasiun, persewaan, iklan dan lain-lain.

i. Angkutan Penumpang

Angkutan penumpang menggunakan kereta api mencakup angkutan rute jarak jauh, jarak menengah, dan jarak dekat. Untuk jasa angkutan penumpang jarak jauh dibagi menjadi angkutan penumpang kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Angkutan komuter di wilayah Jabodetabek termasuk jasa angkutan penumpang Perseroan.

Perseroan mengoperasikan kereta api penumpang, baik Kereta Api Utama (komersial dan non komersial), maupun KA Lokal di Jawa dan Sumatera, terdiri dari KA Eksekutif, KA Ekonomi AC, KA Bisnis, KA Ekonomi, KA Campuran, KA Lokal dan KRL

Dalam kereta dioperasikan sebagai angkutan penumpang, terdapat tim pelayanan penumpang yang terdiri dari Restorasi, Kru kereta api, *Manager On Duty* dan *On Train Cleaning*.

Pada tahun 2016 s.d sekarang Perseroan melakukan penambahan dan pengoperasionalan kereta seperti berikut:

- a. Kereta ekonomi baru relasi Cirebon – Bandung (*round trip*);
- b. Kereta ekonomi baru Solobalapan – Purwokerto (*round trip*);
- c. Kereta ekonomi baru Purwokerto – Semarang Tawang (*round trip*);
- d. Kereta ekonomi baru relasi Semarang Poncol – Surabaya Pasar turi (*round trip*);
- e. Kereta eksekutif baru Ranggajati relasi Cirebon – Jember (*round trip*);
- f. Perpanjangan relasi KA Ciremai semula Cirebon – Bandung menjadi Bandung – Semarang (*round trip*);
- g. Perpanjangan relasi Ka Mutiara Selatan semula Bandung – Surabaya menjadi Gambir – Malang (*round trip*);
- h. Perpanjangan relasi Ka Bima semula Gambir – Surabaya menjadi Gambir – Malang (*round trip*);
- i. Perpanjangan relasi Ka Argo Willis semula Bandung – Surabaya menjadi Gambir – Surabaya (*round trip*);
- j. Perpanjangan relasi Ka Turangga semula Bandung – Surabaya menjadi Gambir – Surabaya (*round trip*);
- k. Perpanjangan relasi Ka Malabar semula Bandung – Malang menjadi Pasarsenen – Malang (*round trip*);
- l. Kereta Api Perintis dengan relasi sebagai berikut:
 - Mojokerto – Tarik – Tulangan – Sidoarjo (sdh menjadi KA PSO)
 - Purwosari – Sukoharjo – Wonogiri;
 - Kertapati – Indralaya;
 - Cianjur – Sukabumi; (sdh menjadi KA PSO)
 - Lubuk Alung – Kayutanam;
 - Krueng Geukeuh – Bungkah – Krueng Mane.
- m. Kereta Api Sembrani, Gajayana, Argo Muria, Argo Lawu, Argo Dwipangga, Argo Anggrek dan Bima dioperasikan dengan rangkaian baru/*replacement*;
- n. Kereta Argo Parahyangan, Cirebon Ekspres, Menoreh, Ambarawa Ekspres, Kaligung dan Sancaka dioperasikan dengan rangkaian K3 (ekonomi baru).
- o. Pengoperasian 1 Rangkaian KRL dengan stamformasi 12
- p. Kereta Eksekutif Ekonomi baru relasi Cilacap – Ketapang (*round trip*);
- q. Kereta Eksekutif Ekonomi baru relasi Banjar – Gambir (*round trip*);
- r. Kereta Ekonomi baru relasi Tanjungkarang – Baturaja (*round trip*);
- s. Kereta Eksekutif Ekonomi baru relasi Jombang – Pasarsenen (*round trip*);
- t. Kereta Eksekutif baru relasi Malang – Gambir (*round trip*);
- u. Kereta Eksekutif Ekonomi baru relasi Surabaya Pasarturi – Pasarsenen (*round trip*);
- v. Kereta Ekonomi baru relasi Pasarsenen – Surabaya Pasarturi (*round trip*);
- w. Perpanjangan relasi KA Mutiara Timur semula Ketapang – Surabaya Gubeng menjadi relasi Ketapang – Yogyakarta (*round trip*);
- x. Perpanjangan relasi KA Malioboro Ekspres semula Malang – Yogyakarta menjadi Malang – Purwokerto (*round trip*);
- y. Kereta Bandara baru relasi Padang – Bandara Minangkabau;
- z. Kereta Bandara baru relasi Solobalapan – Bandara Adi Soemarmo;
- aa. Kereta Bandara baru relasi Yogyakarta – Bandara YIA;

Pentarifan Angkutan Penumpang

Dalam menjalankan bisnis angkutan penumpang yang dioperasikan melalui kereta komuter, Perseroan memiliki dua kebijakan pentarifan yang ditetapkan oleh Perseroan itu sendiri dan pentarifan yaitu pentarifan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam bentuk *Public Service Obligation* (PSO). Selisih antara tarif pemerintah dan tarif yang ditetapkan oleh Perseroan merupakan nilai PSO yang akan dibayarkan pemerintah. Penyesuaian rata-rata tarif KA komersial dilakukan dengan mempertimbangkan biaya operasional, tingkat elastisitas permintaan, dan inflasi.

Pentarifan dengan skema PSO oleh Perseroan ditentukan melalui Biaya operasi ditambah dengan margin 10%. Komponen yang termasuk dalam perhitungan biaya operasi diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (“PM”) 17 Tahun 2018. Penentuan tarif Perseroan ini dihitung dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Tarif yang ditanda tangani oleh Direktur Utama untuk selanjutnya diajukan kepada Pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan.

Public Service Obligation (PSO) adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau. Perseroan sebagai Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian ditugaskan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik, dengan menjalankan kereta api sesuai dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah. Pentarifan yang ditetapkan oleh Pemerintah ini **tertuang** dalam (“Keputusan Menteri”) KM 98 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas KM 240 tahun 2022 tentang tarif angkutan PSO.

ii. Angkutan Barang

Perseroan juga memiliki bisnis angkutan barang menggunakan kereta api yang mencakup angkutan peti kemas, batu bara, parsel, barang curah, dan barang jenis lain. Perseroan menyediakan layanan angkutan barang yang menawarkan banyak sekali kemudahan untuk mengangkut beberapa komoditi, yaitu:

1. Peti kemas
Paletisasi, *insulated and refrigerated containers, standard containers, hard-top containers, open-top containers, flatracks, platforms (plats), ventilated containers, bulk containers, dan tank containers.*
2. Barang Curah Likuid/ Cair
BBM, CPO, semua bahan kimia cair yang tidak korosif, minyak goreng, air mineral dan lain-lain.
3. Barang Curah
Batubara, pasir, semen, gula pasir, pupuk, beras, kricak, aspal, klinker dan lain-lain.
4. Barang Retail
Barang elektronik, hasil produksi pabrik yang sudah terpaket, barang kiriman hantaran, barang potongan, dan kendaraan bermotor.
5. Barang *Packaging*
Semen, pupuk, gula pasir, beras, dan paletisasi.

Dalam menjalankan bisnis angkutan barang, Perseroan melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Modifikasi kontainer menjadi bukaan samping untuk angkutan Batubara menggunakan Gerbong Datar 54 ton untuk menambah kapasitas angkutan Batubara
- b. Penggunaan gerbong datar 54 Ton di lintas utara Jawa untuk meningkatkan kapasitas angkutan barang melalui lintas utara Jawa
- c. Penggunaan *Jumbo Bag* untuk angkutan pasir kuarsa, tepung, pasir dan bijih plastik guna mempercepat proses *loading/unloading* pada pengangkutan pasir kuarsa, gypsum, pasir dan bijih plastik sehingga dapat diangkut menggunakan Gerbong Datar (“GD”)
- d. Penggunaan timbangan elektronik untuk memantau berat muatan sesuai dengan kapasitas daya angkut sarana yang diijinkan sehingga keamanan perjalanan kereta api terjamin.
- e. Penambahan berbagai KA angkutan barang baru guna mendukung tercapainya pendapatan Perseroan.
- f. Pembangunan jalur baru/ganda KA guna meningkatkan kapasitas lintas KA.
- g. Memaksimalkan KA pada angkutan batu bara dengan mengoptimalkan rangkaian menjadi 60 gerbong.
- h. Rencana pengaplikasian Sistem Angkutan Barang Kereta Api (Sibarka) yang bertujuan untuk mempermudah proses administrasi dalam proses pengangkutan barang.

iii. Non Angkutan

Usaha Non Angkutan yang dilakukan Perseroan terdiri dari optimalisasi aset, penjualan jasa pekerjaan teknis, Pengusahaan aset seperti tanah, bangunan dan aset lainnya dikomersialkan untuk meningkatkan pendapatan Perseroan. Bentuk-bentuk pengusahaannya seperti untuk *tower*, *stockpile*, *container yard*, pipa, *fiber optic*, toko, hotel, kantor, rumah, ruang iklan dan sebagainya.

1. *Optimalisasi Aset*

Optimalisasi aset dilakukan terdiri sebagai berikut

- a) Stasiun
Aset berupa *space*, ruangan, bangunan, gedung, gudang, tanah atau lahan dan pengelolaan parkir di Wilayah stasiun
- b) ROW
Aset di sepanjang jalur kereta api aktif yang disewakan untuk *tower*, *stockpile*, *container yard*, pipa, *fiber optic* dan lain lain
- c) NON ROW
Aset di luar wilayah stasiun dan ROW, termasuk di dalamnya rumah perusahaan, bangunan dan lahan di jalur kereta api non aktif
- d) Sarana
Aset sarana kereta makan, kereta wisata, dan fasilitas seperti mesin perawatan jalan rel & prasarana penunjang
- e) *Advertising*
Aset berupa *space* di stasiun, ROW, non stasiun, sarana, termasuk di dalamnya pengelolaan *entertainment on board*, Wifi (*advertising slot*), dan kegiatan *shooting / Pemotretan*, *event / activation* serta *naming rights* (stasiun)
- f) Wisata/Museum
Aset berupa museum, *historic building (heritage)*, termasuk di dalamnya perjalanan kereta wisata

2. *Penjualan Jasa Teknis*

Penjualan jasa pekerjaan teknis yang telah dilakukan antara lain penjualan jasa pekerjaan teknis atas jasa perawatan sarana dan prasarana milik pihak ketiga di Balai Yasa, Dipo, dan Laboratorium mektan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan yang terus lebih baik, Perseroan juga melakukan pengembangan aset properti melalui kerjasama pemanfaatan tanah melalui mekanisme kerjasama jangka panjang maupun mekanisme sewa jangka pendek sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-04/MBU/09/2017.

Infrastructure Maintenance Operation

Dalam rangka peningkatan pelayanan yang terus lebih baik, Perseroan juga melakukan pengembangan aset properti melalui kerjasama pemanfaatan tanah melalui mekanisme kerjasama jangka panjang maupun mekanisme sewa jangka pendek sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tatakelola dan kegiatan korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara.

IMO dan PSO merupakan komitmen Pemerintah yang turut berkontribusi pada pendapatan usaha Perseroan

Perseroan megalami lonjakan permintaan angkutan penumpang menjelang hari raya Lebaran dan Tahun Baru. Perseroan menambah armada untuk mengantisipasi lonjakan permintaan ini.

B. Pengadaan Kereta dan Gerbong

Sarana perkeretaapian yang digunakan Perseroan dipasok oleh mitra dari dalam negeri seperti PT Industri Kereta Api (Persero) dan luar negeri seperti Amerika Serikat, China dan Jerman. Perseroan melakukan proses pengadaan untuk kebutuhan Perseroan akan sarana tersebut untuk memenuhi spesifikasi produk yang diinginkan oleh Perseroan.

Proses pengadaan dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mengedepankan pada efisiensi, efektif, kompetitif, transparan, wajar, fairness dan akuntabel didukung prosedur yang jelas, dan jaminan penyelesaian pembayaran pada pemasok. Pengembangan sistem untuk mempermudah proses pencatatan dan pelaksanaan pengadaan juga dilaksanakan oleh Perseroan, diantaranya :

1. Pengembangan aplikasi web logistik untuk informasi kelogistikan yang lebih andal;
2. Pengembangan aplikasi SAP BBM VHS dengan *web service*;
3. *Planning, Purchasing and Inventory Management*;
4. Implementasi *E-Procurement* dengan tujuan memudahkan dalam proses pengadaan;
5. Implementasi SAP MMPM untuk pengelolaan seluruh kegiatan logistik mulai dari perencanaan, persediaan, pergudangan dan pengadaan, termasuk kegiatan perawatan baik sarana maupun prasarana.

Disamping itu Perseroan juga mengupayakan pengadaan barang persediaan secara lebih tepat guna dengan restrukturisasi di bidang logistik antara lain :

1. Perencanaan kebutuhan mengarah pada "*Just In Time*" dimana pengadaan persediaan barang akan dipenuhi secara tepat waktu sehingga Perseroan tidak perlu melakukan penimbunan persediaan. Persediaan akan di order pada saat memang dibutuhkan. Selanjutnya untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan stok barang di pemasok pada saat barang di butuhkan, di dalam kontrak kerja sama telah di ungkapkan bahwa pemasok harus terus menjaga persediaan barang selama dalam kurun waktu tertentu.
2. Percepatan proses pengadaan, antara lain penyederhanaan mekanisme pengadaan;
3. Melakukan "*Repeat Order*" untuk barang-barang impor dan Sistem Kontrak Kinerja dan *Call of Order*;
4. Percepatan penerimaan barang dengan delivery langsung kepada *user*;
5. Penyusunan rencana pengadaan barang persediaan dengan memperhatikan :
 - a. Persediaan di gudang atau unit penyimpanan;
 - b. Barang dalam perjalanan;
 - c. Barang dalam proses lelang.
6. Implementasi *Material Management dan Plant Maintenance (MMPM), Payroll, Cash Management* berbasis SAP;
7. Pembuatan aplikasi *web service* sebagai fasilitas pengambilan/penerimaan *database* Siloka dari server daerah (Daop/Divre.BY) ke server Kantor Pusat;
8. Pembuatan aplikasi *website* logistik untuk menyajikan informasi tentang nilai dan kualitas persediaan barang/pelumas sarana dan prasarana dari *database* Siloka;
9. Pembuatan aplikasi *website* untuk mendukung pelaksanaan BBM VHS dalam operasional permintaan pengisian BBM, realisasi pengisian BBM sampai dengan pelaporan pemakaian BBM.

C. Sarana, Prasarana dan Fasilitas

Hingga saat prospektus diterbitkan, Perseroan memiliki 609 stasiun yang tersebar di Sumatera sebanyak 167 stasiun dan di Jawa sebanyak 442 stasiun. Perseroan mengoperasikan hingga 6.141 kmsp rel kereta api, yaitu sepanjang 1.554 kmsp di Sumatera dan sepanjang 4.595 kmsp di Jawa. Dalam menjalankan usahanya, Perseroan juga memiliki sarana yang siap dioperasikan sebanyak 505 unit lokomotif, 103 unit Kereta Rel Diesel ("KRD"), 1.088 unit Kereta Rel Listrik ("KRL"), 1.972 unit kereta, 8.302 unit gerbong, 24 unit Light Rail Transit ("LRT") Palembang, 174 unit Light Rail Transit ("LRT") Jabodebek dan 82 unit Peralatan Khusus seperti kereta inspeksi penolong, kereta inspeksi, kereta penolong, kereta penolong medis, *railway crane, rail clinic*, kereta rumah sakit, kereta kru penolong, dan lain-lain.

i. Sarana



Lokomotif



KRD



Kereta



KRL



Gerbong

Sarana pada Perseroan merupakan aset yang bergerak. Berdasarkan daftar aset Perseroan per 31 Mei 2024, Perseroan tercatat memiliki sarana dalam bentuk (i) Lokomotif, (ii) KRDE/I, (iii) KRL, (iv) Kereta, (v) Gerbong, (vi) LRT Jabodebek. Sarana yang dimiliki Perseroan diperoleh dari: (i) Negara berdasarkan PP 57/1990, PP 56/2000, PP 76/2012 dan PP 52/2016 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) ataupun, (ii) dibiayai sendiri oleh Perseroan melalui Kredit Investasi melalui lembaga pembiayaan. Adapun Sarana yang siap beroperasi, antara lain 461 Lokomotif, 90 KRDE/I, 1.162 KRL, 1.792 kereta, 7.552 gerbong, 144 LRT Jabodebek, sehingga per 31 Mei 2024 jumlah sarana yang siap beroperasi adalah sebanyak 11.201 unit.

ii. Prasarana

Prasarana pada Perseroan merupakan aset tidak bergerak. Secara umum, berdasarkan Daftar Rekapitulasi Aset Rumah Perusahaan Perseroan per 31 Mei 2024, Perseroan tercatat memiliki total Unit/Bidang sebanyak 16.463 unit dengan total luas tanah sebesar 3.094.135 m² dan total luas bangunan sebesar 902.885 m². Sedangkan Aset Bangunan Dinas total Unit/Bidang sebesar 3.881 unit dengan total luas tanah sebesar 3.286.997 m² dan total luas bangunan dinas sebesar 1.509.201 m² yang tersebar di 9 DAOP, 4 DIVRE, serta wilayah Aceh dan Madura. Berdasarkan keterangan Perseroan, hingga saat ini tidak ada aset tanah Perseroan yang sifatnya material yang sedang dalam sengketa dengan pihak ketiga ataupun dijaminkan kepada pihak manapun.

Perseroan juga memiliki dan mengoperasikan 767 stasiun dimana 609 diantaranya dalam keadaan aktif dan 158 lainnya dalam keadaan tidak aktif. Menurut keterangan Perseroan, 158 stasiun yang saat ini tidak aktif dikarenakan beberapa faktor antara lain, (i) adanya pembangunan double track sehingga beberapa stasiun tidak lagi diperlukan keberadaannya, (ii) dilakukannya revitalisasi untuk beberapa stasiun, dan (iii) beberapa stasiun secara komersial sudah lagi tidak menguntungkan sehingga untuk sementara waktu dinon-aktifkan. Namun demikian Perseroan mengkonfirmasi bahwa tidak aktifnya 158 stasiun tersebut tidak mengganggu kegiatan operasional dari Perseroan. Berdasarkan Data Aset Prasarana Fasilitas Operasi Kereta Api (Fasopka) Sintel & Listrik Aliran Atas Pekerjaan Investasi PT KAI, Perseroan memiliki dan mengoperasikan fasopka sinyal, telekomunikasi (sintel) & listrik aliran atas di sebanyak 315 unit stasiun dengan interlocking elektrik, 212 unit stasiun dengan interlocking mekanik, 66 Gardu traksi listrik aliran atas, 622,1 Km Jalur terelektifikasi dan 880 Km sistem Katenari listrik aliran atas.

iii. Fasilitas

Standar Pelayanan Minimum (SPM) sarana dan prasarana perkeretaapian mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api yang mana standar pelayanan minimum (SPM) merupakan acuan bagi penyelenggara prasarana perkeretaapian dan/atau penyelenggara sarana perkeretaapian dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa KA.

Standar pelayanan minimum (SPM) pelayanan penumpang kereta api terdiri atas standar pelayanan minimum (SPM) di stasiun kereta api dan dalam perjalanan. Standar pelayanan minimum (SPM) di stasiun kereta api berdasarkan pada:

1. Kelas stasiun untuk pelayanan kereta api antar kota dan perkotaan, kereta api jarak dekat, dan kereta rel diesel;
2. Jumlah rata – rata penumpang yang dilayani setiap hari untuk pelayanan kereta rel listrik, LRT, MRT dan kereta api bandara.

Sedangkan Standar pelayanan minimum (SPM) dalam perjalanan berdasarkan pada :

1. Perkeretaapian antar kota;
2. Perkeretaapian perkotaan
 - a. Kereta api jarak dekat;
 - b. Kereta rel diesel;
 - c. Kereta rel listrik;
 - d. LRT;
 - e. MRT.
3. Kereta Api Bandara

Adapun standar pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- I. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Stasiun terdiri dari:
 1. Aspek Keselamatan
 - a. Stasiun Besar
 - 1) Ketersediaan Informasi dan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan, atau bencana alam) Informasi dan peralatan keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain:
 - Alat pemadam kebakaran (APAR) ukuran kecil (APAR) dan ukuran besar, yang dilengkapi informasi masa kadaluwarsa, dan tersedia di:
 - Ruang tidak bertiket dalam stasiun minimal 2 (dua) unit APAR ukuran 3 kg;
 - Area Bertiket minimal 4 (empat) unit Alat Pemadam Api ukuran 10 kg
 - Petunjuk jalur dan prosedur evakuasi;
 - Nomor-nomor telepon darurat (*emergency call*);
 - Tombol alarm untuk kondisi darurat; dan
 - Sistem pemadaman kebakaran untuk bangunan fasilitas umum (*smoke detector, springkler, hydrant, fire alarm*).
 - 2) Informasi ketersediaan dan fasilitas kesehatan untuk penanganan keadaan darurat, Informasi dan fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dan terjangkau, antara lain:
 - Pos kesehatan (Poskes) beserta fasilitas obat-obatan, petugas paramedis, dan fasilitas kerja (stetoskop, Tensi Meter, Tempat tidur pasien)
 - Minimal 3 (tiga) unit kursi roda layak pakai
 - Minimal 2 (dua) unit tandu layak pakai
 - Minimal 3 (tiga) tabung oksigen berat minimal 0,5 m³
 - 3) Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux sebagai penerangan wesel.

- 4) Celah (gap) antara tepi peron dengan badan kereta tidak membahayakan anak di bawah umur serta penumpang yang menggunakan kursi roda serta:
 - Selisih Ketinggian lantai peron stasiun 20 cm dengan lantai kereta;
 - Lantai Peron stasiun bebas dari kegiatan komersial, tidak licin dan tidak tergenang air, serta dilengkapi dengan:
 - Marka petunjuk/pembatas antrean naik/turun penumpang.
 - Marka/guiding block untuk penunjuk jalan bagi penumpang tuna netra.
 - Tersedia Safety line dari tepi peron atau PSD (*platform screen door*).
 - 5) Tersedia kanopi peron dengan panjang menyesuaikan panjang peron stasiun, yang bisa melindungi penumpang dari panas dan hujan, dengan kondisi terang pada siang dan malam hari.
 - 6) Tersedia minimal 1 (satu) *assembly point* area di tiap stasiun yang ditunjukkan dengan penanda/signage.
- b. Stasiun Sedang
- 1) Ketersediaan Informasi dan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan, atau bencana alam) Informasi dan peralatan keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain:
 - Alat pemadam kebakaran (APAR) ukuran kecil (APAR) dan ukuran besar, yang dilengkapi informasi masa kadaluwarsa, dan tersedia di:
 - Ruang tidak bertiket dalam stasiun minimal 2 (dua) unit APAR ukuran 3 Kg;
 - Area Bertiket minimal 3 (tiga) unit Alat Pemadam Api ukuran 10 Kg
 - Petunjuk jalur dan prosedur evakuasi;
 - Nomor-nomor telepon darurat (emergency call);
 - Tombol alarm untuk kondisi darurat
 - 2) Informasi ketersediaan dan fasilitas kesehatan untuk penanganan keadaan darurat, Informasi dan fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dan terjangkau, antara lain:
 - Pos kesehatan (Poskes) beserta fasilitas obat-obatan, petugas paramedis, dan fasilitas kerja (stetoskop, Tensi Meter, Tempat tidur pasien)
 - Minimal 2 (dua) unit Kursi Roda layak pakai
 - Minimal 2 (dua) unit Tandu layak pakai
 - Minimal 2 (dua) Tabung Oksigen berat minimal 0,5 m3
 - 3) Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux sebagai penerangan wesel.
 - 4) Celah (gap) antara tepi peron dengan badan kereta tidak membahayakan anak di bawah umur serta penumpang yang menggunakan kursi roda serta;
 - Selisih Ketinggian lantai peron stasiun 20 cm dengan lantai kereta;
 - Lantai Peron stasiun bebas dari kegiatan komersial, tidak licin dan tidak tergenang air, serta dilengkapi dengan:
 - Marka petunjuk/pembatas antrean naik/turun penumpang.
 - Marka/guiding block untuk penunjuk jalan bagi penumpang tuna netra.
 - Tersedia Safety line dari tepi peron atau PSD (*platform screen door*).
 - 5) Tersedia kanopi peron dengan panjang menyesuaikan panjang peron stasiun, yang bisa melindungi penumpang dari panas dan hujan, dengan kondisi terang pada siang dan malam hari.
 - 6) Tersedia minimal 1 (satu) *assembly point* area di tiap stasiun yang ditunjukkan dengan penanda/signage.

- c. Stasiun Kecil
 - 1) Ketersediaan Informasi dan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan, atau bencana alam) Informasi dan peralatan keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain:
 - Alat pemadam kebakaran (APAR) ukuran kecil (APAR) dan ukuran besar, yang dilengkapi informasi masa kadaluwarsa, dan tersedia di:
 - Ruang tidak bertiket dalam stasiun minimal 1 (satu) unit APAR ukuran 3 Kg;
 - Area Bertiket minimal 2 (dua) unit Alat Pemadam Api ukuran 10 Kg
 - Petunjuk jalur dan prosedur evakuasi;
 - Nomor-nomor telepon darurat (emergency call).
 - 2) Informasi ketersediaan dan fasilitas kesehatan untuk penanganan keadaan darurat, Informasi dan fasilitas kesehatan yang mudah terlihat dan terjangkau, antara lain:
 - Fasilitas obat-obatan
 - Minimal 1 (satu) unit Kursi Roda layak pakai
 - Minimal 1 (satu) unit Tandu layak pakai
 - Minimal 1 (satu) Tabung Oksigen berat minimal 0,5 m³
 - 3) Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux sebagai penerangan wesel.
 - 4) Celah (gap) antara tepi peron dengan badan kereta tidak membahayakan anak di bawah umur serta penumpang yang menggunakan kursi roda serta;
 - Selisih Ketinggian lantai peron stasiun 20 cm dengan lantai kereta;
 - Lantai Peron stasiun bebas dari kegiatan komersial, tidak licin dan tidak tergenang air, serta dilengkapi dengan:
 - Marka petunjuk/pembatas antrean naik/turun penumpang.
 - Marka/guiding block untuk petunjuk jalan bagi penumpang tuna netra.
 - Tersedia Safety line dari tepi peron atau PSD (platform screen door).
 - 5) Tersedia minimal 1 (satu) assembly point area di tiap stasiun yang ditunjukkan dengan penanda/signage.
2. Aspek Keamanan
 - a. Stasiun Besar
 - 1) Tersedianya CCTV yang merekam:
 - Proses naik/turun penumpang di peron.
 - Proses penumpang masuk/keluar stasiun.
 - Pergerakan orang di Area Tidak bertiket;
 - Pergerakan orang di Area Bertiket
 - 2) Orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di stasiun, serta membantu penumpang dengan kebutuhan khusus
 - Tersedia petugas berseragam dan mudah dilihat
 - Minimal 9 (sembilan) orang dan penempatan disesuaikan dengan kondisi stasiun.
 - 3) Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun, yang berisi informasi tentang No Telp/HP:
 - Polsek/Polres setempat dan/atau
 - Call center
 - 4) Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux. untuk area public
 - b. Stasiun Sedang
 - 1) Tersedianya CCTV yang merekam:
 - Proses naik/turun penumpang di peron.
 - Proses penumpang masuk/keluar stasiun.
 - Pergerakan orang di Area Tidak bertiket;
 - Pergerakan orang di Area Bertiket

- 2) Orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di stasiun, serta membantu penumpang dengan kebutuhan khusus
 - Tersedia petugas berseragam dan mudah dilihat
 - Minimal 6 (enam) orang dan penempatan disesuaikan dengan kondisi stasiun.
 - 3) Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun, yang berisi informasi tentang No Telp/HP:
 - Polsek/Polres setempat dan/atau
 - Call center
 - 4) Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux. untuk area public
- c. Stasiun Kecil
- 1) Tersedianya CCTV yang merekam:
 - Proses naik/turun penumpang di peron.
 - Proses penumpang masuk/keluar stasiun.
 - Pergerakan orang di Area Tidak bertiket;
 - Pergerakan orang di Area Bertiket
 - 2) Orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di stasiun, serta membantu penumpang dengan kebutuhan khusus
 - Tersedia petugas berseragam dan mudah dilihat
 - Minimal 1 (satu) orang dan penempatan disesuaikan dengan kondisi stasiun.
 - 3) Tersedia stiker yang mudah terlihat dan jelas terbaca dengan penyebaran menyesuaikan luas stasiun, yang berisi informasi tentang No Telp/HP:
 - Polsek/Polres setempat dan/atau
 - Call center
 - 4) Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux. untuk area public
3. Aspek Keandalan/Keteraturan
- a. Stasiun Besar
- 1) Layanan Fasilitas Loket
 - Tersedia loket tiket manual dan/atau vending machine serta papan informasi tata cara pembelian dan top-up.
 - Layanan penjualan manual tiket maksimum 180 detik per transaksi
 - 2) Tersedia informasi ada/tidak adanya tempat duduk untuk seluruh kelas KA
 - Tersedia Peta Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api, yang mudah terbaca;
 - Peta terpasang di area tidak bertiket dan area bertiket
 - 3) Tersedia informasi dengan display dan/atau Running Text, yang berisi informasi kedatangan Kereta api berikutnya serta gangguan perjalanan yang terjadi.
 - 4) Tersedia informasi dengan pengeras suara di peron stasiun untuk informasi informasi kedatangan Kereta api berikutnya serta gangguan perjalanan yang terjadi, dengan intensitas suara yang bisa didengar oleh Penumpang di stasiun.
- b. Stasiun Sedang
- 1) Layanan Fasilitas Loket
 - Tersedia loket tiket manual dan/atau vending machine serta papan informasi tata cara pembelian dan top-up.
 - Layanan penjualan manual tiket maksimum 180 detik per transaksi
 - 2) Tersedia informasi ada/tidak adanya tempat duduk untuk seluruh kelas KA
 - Tersedia Peta Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api, yang mudah terbaca;
 - Peta terpasang di area tidak bertiket dan area bertiket
 - 3) Tersedia informasi dengan pengeras suara di peron stasiun untuk informasi informasi kedatangan Kereta api berikutnya serta gangguan perjalanan yang terjadi, dengan intensitas suara yang bisa didengar oleh Penumpang di stasiun.

- c. Stasiun Kecil
 - 1) Layanan Fasilitas Locket
 - Tersedia loket tiket manual dan/atau vending machine serta papan informasi tata cara pembelian dan top-up.
 - Layanan penjualan manual tiket maksimum 180 detik per transaksi
 - 2) Tersedia informasi ada/tidak adanya tempat duduk untuk seluruh kelas KA
 - Tersedia Peta Jadwal Operasi dan Peta Jaringan Pelayanan Kereta Api, yang mudah terbaca;
 - Peta terpasang di area tidak bertiket dan area bertiket
 - 3) Tersedia informasi dengan pengeras suara di peron stasiun untuk informasi informasi kedatangan Kereta api berikutnya serta gangguan perjalanan yang terjadi, dengan intensitas suara yang bisa didengar oleh Penumpang di stasiun.

4. Aspek Kenyamanan
 - a. Stasiun Besar
 - 1) Tersedianya Area Tunggu pada area bertiket yang dilengkapi dengan Tempat Duduk Prioritas.
Kepadatan penumpang di area tunggu maksimal 0,6 M2 per orang
 - 2) Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m2 dan dilengkapi tempat duduk
Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun
 - 3) Tersedianya toilet masing-masing untuk pria dan wanita, dengan persyaratan:
 - Pria (4 urinoir, 3 WC, 2 wastafel)
 - Wanita (6 WC, 2 wastafel)
 - Tersedia 1 (satu) toilet untuk penumpang difable
 - Terdapat penandaan toilet untuk Pria, Wanita dan penumpang dengan kebutuhan khusus
 - Area bersih, terawat, lantai tidak licin dan tidak tergenang air. serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan tidak berbau;
 - Terdapat lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux yang berfungsi dengan baik
 - Tersedia urinoir dengan ketinggian yang dapat dijangkau oleh anak-anak
 - 4) Fasilitas tempat wudhu/musala
 - Pria (11 normal dan 2 penyandang disabilitas)
 - Wanita (9 normal dan 2 penyandang disabilitas)Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun
 - 5) Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.
 - 6) Suhu dalam ruangan maksimal 27°C
 - 7) Kondisi stasiun selalu bersih dan terkontrol selama jam operasi Kereta api.
 - 8) Tersedianya tempat sampah dengan 2 pembagian (organik dan anorganik).
 - 9) Penanda informasi dilarang merokok di seluruh ruang publik stasiun

 - b. Stasiun Sedang
 - 1) Tersedianya Area Tunggu pada area bertiket yang dilengkapi dengan Tempat Duduk Prioritas.
Kepadatan penumpang di area tunggu maksimal 0,6 M2 per orang
 - 2) Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m2 dan dilengkapi tempat duduk
Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun
 - 3) Tersedianya toilet masing-masing untuk pria dan wanita, dengan persyaratan:
 - Pria (2 urinoir, 2 WC, 1 wastafel)
 - Wanita (4 WC, 1 wastafel)
 - Tersedia 1 (satu) toilet untuk penumpang difable
 - Terdapat penandaan toilet untuk Pria, Wanita dan penumpang dengan kebutuhan khusus
 - Area bersih, terawat, lantai tidak licin dan tidak tergenang air. serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan tidak berbau;

- Terdapat lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux yang berfungsi dengan baik
 - Tersedia urionir dengan ketinggian yang dapat dijangkau oleh anak-anak
- 4) Fasilitas tempat wudhu/musala
 - Pria (7 orang)
 - Wanita (5 orang)Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun
 - 5) Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.
 - 6) Suhu dalam ruangan maksimal 27°C
 - 7) Kondisi stasiun selalu bersih dan terkontrol selama jam operasi Kereta api.
 - 8) Tersedianya tempat sampah dengan 2 pembagian (organik dan anorganik).
 - 9) Penanda informasi dilarang merokok di seluruh ruang publik stasiun
- c. Stasiun Kecil
- 1) Tersedianya Area Tunggu pada area bertiket yang dilengkapi dengan Tempat Duduk Prioritas.
Kepadatan penumpang di area tunggu maksimal 0,6 M2 per orang
 - 2) Untuk 1 (satu) orang minimum 0,6 m2 dan dilengkapi tempat duduk
Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun
 - 3) Tersedianya toilet masing-masing untuk pria dan wanita, dengan persyaratan:
 - Pria (1 WC, 1 wastafel)
 - Wanita (1 WC, 1 wastafel)
 - Tersedia 1 (satu) toilet untuk penumpang difable
 - Terdapat penandaan toilet untuk Pria, Wanita dan penumpang dengan kebutuhan khusus
 - Area bersih, terawat, lantai tidak licin dan tidak tergenang air. serta sirkulasi udara berfungsi dengan baik dan tidak berbau;
 - Terdapat lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 150 lux yang berfungsi dengan baik
 - Tersedia urionir dengan ketinggian yang dapat dijangkau oleh anak-anak
 - 4) Fasilitas tempat wudhu/musala 6 orang pria atau wanita Area bersih 100%, terawat, dan tidak berbau yang berasal dari dalam area stasiun
 - 5) Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.
 - 6) Suhu dalam ruangan maksimal 27°C
 - 7) Kondisi stasiun selalu bersih dan terkontrol selama jam operasi Kereta api.
 - 8) Tersedianya tempat sampah dengan 2 pembagian (organik dan anorganik).
 - 9) Penanda informasi dilarang merokok di seluruh ruang publik stasiun
5. Aspek Kemudahan
- a. Stasiun Besar
- 1) Informasi yang disampaikan di stasiun kepada calon pengguna jasa, yang bisa terbaca dengan baik, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Denah/layout stasiun Kereta api
 - Nama Stasiun
 - Jadwal Operasi Kereta api
 - Tarif Kereta api
 - Arah/jalur evakuasi bila terjadi keadaan darurat
 - Mempunyai sistem pemberitahuan public (Public Address System (PA) atau Passenger Information System-PIS));
 - Informasi dalam bentuk visual diletakkan di tempat strategis antara lain di dekat loket, pintu masuk dan di ruang tunggu umum yang mudah terlihat dan jelas terbaca.;
 - Informasi dalam bentuk audio/suara harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih tinggi dari kebisingan yang ada.
 - 2) Pemberian informasi jika terjadi gangguan perjalanan kereta api : Informasi diumumkan maksimal 30 menit setelah terjadi gangguan

- 3) Informasi yang disampaikan di dalam stasiun, kepada pengguna jasa, yang bisa terbaca dengan mudah. Sekurang-kurangnya memuat:
 - Alternatif moda, lokasi dan penunjuk arah angkutan lanjutan;
 - Jenis angkutan lanjutan
 - Papan Petunjuk Angkutan Lanjutan;
 - Penempatan tanda sebelum pintu keluar stasiun Kereta api yang mudah terlihat;
 - Bersifat informatif, komunikatif dan edukatif.
 - 4) Fasilitas yang disediakan untuk memberikan informasi perjalanan kereta api dan layanan pengaduan
 - Mempunyai tempat dan 1 (satu) meja kerja
 - Tersedia 1 (satu) orang petugas yang cakap berkomunikasi
 - 5) Tempat untuk parkir kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
 - Luas tempat parkir disesuaikan dengan lahan yang tersedia
 - Sirkulasi kendaraan masuk, keluar, dan parkir lancar
 - 6) Ruang jalan khusus (pedestrian/ramp/ selasar) di lingkungan stasiun yang terpisah dengan kendaraan bermotor, Tersedianya aksesibilitas (pedestrian/ramp/selasar) yang cukup menampung pejalan kaki/ penumpang dengan kebutuhan di stasiun.
 - 7) Fasilitas papan informasi dalam komunikasi visual yang proporsional : Untuk informasi arah atau tujuannya penumpang, proporsi ukuran huruf/teks penanda lebih besar dari informasi lain.
- b. Stasiun Sedang
- 1) Informasi yang disampaikan di stasiun kepada calon pengguna jasa, yang bisa terbaca dengan baik, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Denah/layout stasiun Kereta api
 - Nama Stasiun
 - Jadwal Operasi Kereta api
 - Tarif Kereta api
 - Arah/jalur evakuasi bila terjadi keadaan darurat
 - Mempunyai sistem pemberitahuan public (Public Address System (PA) atau Passenger Information System-PIS)); Informasi dalam bentuk visual diletakkan di tempat strategis antara lain di dekat loket, pintu masuk dan di ruang tunggu umum yang mudah terlihat dan jelas terbaca;
 - Informasi dalam bentuk audio/suara harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih tinggi dari kebisingan yang ada.
 - 2) Pemberian informasi jika terjadi gangguan perjalanan kereta api : Informasi diumumkan maksimal 30 menit setelah terjadi gangguan
 - 3) Informasi yang disampaikan di dalam stasiun, kepada pengguna jasa, yang bisa terbaca dengan mudah. Sekurang-kurangnya memuat:
 - Alternatif moda, lokasi dan penunjuk arah angkutan lanjutan;
 - Jenis angkutan lanjutan
 - Papan Petunjuk Angkutan Lanjutan;
 - Penempatan tanda sebelum pintu keluar stasiun Kereta api yang mudah terlihat;
 - Bersifat informatif, komunikatif dan edukatif.
 - 4) Fasilitas yang disediakan untuk memberikan informasi perjalanan kereta api dan layanan pengaduan
 - Mempunyai tempat dan 1 (satu) meja kerja
 - Tersedia 1 (satu) orang petugas yang cakap berkomunikasi
 - 5) Tempat untuk parkir kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
 - Luas tempat parkir disesuaikan dengan lahan yang tersedia
 - Sirkulasi kendaraan masuk, keluar, dan parkir lancar

- 6) Ruang jalan khusus (pedestrian/ramp/ selasar) di lingkungan stasiun yang terpisah dengan kendaraan bermotor, Tersedianya aksesibilitas (pedestrian/ramp/selasar) yang cukup menampung pejalan kaki/ penumpang dengan kebutuhan di stasiun.
 - 7) Fasilitas papan informasi dalam komunikasi visual yang proporsional : Untuk informasi arah atau tujuannya penumpang, proporsi ukuran huruf/teks penanda lebih besar dari informasi lain.
- c. Stasiun Kecil
- 1) Informasi yang disampaikan di stasiun kepada calon pengguna jasa, yang bisa terbaca dengan baik, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - Denah/layout stasiun Kereta api
 - Nama Stasiun
 - Jadwal Operasi Kereta api
 - Tarif Kereta api
 - Arah/jalur evakuasi bila terjadi keadaan darurat
 - Mempunyai sistem pemberitahuan public (Public Address System (PA) atau Passenger Information System-PIS));
 - Informasi dalam bentuk visual diletakkan di tempat strategis antara lain di dekat loket, pintu masuk dan di ruang tunggu umum yang mudah terlihat dan jelas terbaca.
 - Informasi dalam bentuk audio/suara harus jelas terdengar dengan intensitas suara 20 dB lebih tinggi dari kebisingan yang ada.
 - 2) Pemberian informasi jika terjadi gangguan perjalanan kereta api : Informasi diumumkan maksimal 30 menit setelah terjadi gangguan
 - 3) Informasi yang disampaikan di dalam stasiun, kepada pengguna jasa, yang bisa terbaca dengan mudah. Sekurang-kurangnya memuat:
 - Alternatif moda, lokasi dan penunjuk arah angkutan lanjutan;
 - Jenis angkutan lanjutan
 - Papan Petunjuk Angkutan Lanjutan;
 - Penempatan tanda sebelum pintu keluar stasiun Kereta api yang mudah terlihat;
 - Bersifat informatif, komunikatif dan edukatif.
 - 4) Fasilitas yang disediakan untuk memberikan informasi perjalanan kereta api dan layanan pengaduan
 - Mempunyai tempat dan 1 (satu) meja kerja
 - Tersedia 1 (satu) orang petugas yang cakap berkomunikasi
 - 5) Tempat untuk parkir kendaraan baik roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
 - Luas tempat parkir disesuaikan dengan lahan yang tersedia
 - Sirkulasi kendaraan masuk, keluar, dan parkir lancar
 - 6) Ruang jalan khusus (pedestrian/ramp/ selasar) di lingkungan stasiun yang terpisah dengan kendaraan bermotor, Tersedianya aksesibilitas (pedestrian/ramp/selasar) yang cukup menampung pejalan kaki/ penumpang dengan kebutuhan di stasiun.
 - 7) Fasilitas papan informasi dalam komunikasi visual yang proporsional : Untuk informasi arah atau tujuannya penumpang, proporsi ukuran huruf/teks penanda lebih besar dari informasi lain.
6. Aspek Kesetaraan
- a. Stasiun Besar
- 1) Fasilitas khusus yang disediakan untuk penumpang dengan kebutuhan khusus
 - Tersedia tempat duduk untuk penumpang dengan kebutuhan khusus;
 - Tersedia ramp dengan kemiringan maksimal 10°, ketinggian hand rail 65-80 cm, bertekstur kasar/tidak licin;
 - Tersedia jalur pedestrian dengan Guiding Block untuk penumpang dengan kebutuhan khusus;
 - Tersedianya Lift atau jalur khusus untuk penumpang yang menggunakan kursi roda.

- 2) Loket pembelian tiket bagi penumpang berkebutuhan khusus
 - Tersedia loket dan/atau vending machine khusus bagi penumpang kebutuhan khusus
 - Desain loket disesuaikan dengan tingginya kursi roda
 - 3) Ruang/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi, Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI.
- b. Stasiun Sedang
- 1) Fasilitas khusus yang disediakan untuk penumpang dengan kebutuhan khusus
 - Tersedia tempat duduk untuk penumpang dengan kebutuhan khusus;
 - Tersedia ramp dengan kemiringan maksimal 10°, ketinggian hand rail 65-80 cm, bertekstur kasar/tidak licin;
 - Tersedia jalur pedestrian dengan Guiding Block untuk penumpang dengan kebutuhan khusus;
 - Tersedianya Lift atau jalur khusus untuk penumpang yang menggunakan kursi roda.
 - 2) Loket pembelian tiket bagi penumpang berkebutuhan khusus
 - Tersedia loket dan/atau vending machine khusus bagi penumpang kebutuhan khusus
 - Desain loket disesuaikan dengan tingginya kursi roda
 - 3) Ruang/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi, Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI.
- c. Stasiun Kecil
- 1) Fasilitas khusus yang disediakan untuk penumpang dengan kebutuhan khusus
 - Tersedia tempat duduk untuk penumpang dengan kebutuhan khusus;
 - Tersedia ramp dengan kemiringan maksimal 10°, ketinggian hand rail 65-80 cm, bertekstur kasar/tidak licin;
 - Tersedia jalur pedestrian dengan Guiding Block untuk penumpang dengan kebutuhan khusus;
 - Tersedianya Lift atau jalur khusus untuk penumpang yang menggunakan kursi roda.
 - 2) Ruang/tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi, Tersedia ruang khusus ibu menyusui, yang dilengkapi dengan fasilitas yang sesuai standar Kementerian Kesehatan RI.

II. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam perjalanan KA terdiri dari :

1. Aspek Keselamatan

a. Informasi dan fasilitas keselamatan

Informasi ketersediaan dan peralatan penyelamatan darurat dalam bahaya (kebakaran, kecelakaan atau bencana alam).

Informasi dan fasilitas keselamatan mudah terlihat dan terjangkau, antara lain :

- 1 (satu) APAR (per kereta dengan ukuran minimal 3 Kg yang terawat baik (APAR dalam kondisi belum kadaluwarsa dan dilengkapi indikator petunjuk jarum tekanan berwarna hijau serta dioperasikan oleh petugas / awak KA) ;
- Tombol darurat ;
- Peralatan pendukung antara lain : pemecah kaca, tombol/tuas pembuka pintu otomatis (bagi sarana yang sudah dilengkapi pintu otomatis), alat pemecah kaca disediakan untuk jendela kereta yang tidak dapat dibuka dan disesuaikan kondisi spekter sarana;
- Petunjuk yang jelas tentang tata cara evakuasi melalui media visual dan audio

- b. Informasi dan fasilitas kesehatan
Informasi ketersediaan dan fasilitas kesehatan untuk penanganan keadaan darurat seperti :
 - Minimal 1 (satu) set perlengkapan P3K yang tersedia dalam tiap kereta atau 1 (satu) set dibawa petugas pengaman / pengawalan dan masing - masing;
 - Perlengkapan P3K dapat digunakan oleh siapa saja yang membutuhkan ;
 - c. Pintu kereta
Pintu keluar atau masuk penumpang secara manual atau otomatis berfungsi dengan baik (pintu dengan sistem otomatis dapat dibuka secara manual pada saat keadaan darurat)
2. Aspek Keamanan
- a. Fasilitas Pendukung
Peralatan untuk memonitor kejadian selama dalam perjalanan kereta api, minimal 2 (dua) CCTV dalam 1 (satu) rangkaian kereta (diletakkan di kereta penumpang dengan resolusi yang jelas).
 - b. Petugas Keamanan
Orang yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna jasa di kereta.
 - 1) Tersedia petugas berseragam yang dilengkapi dengan atribut dan alat bantu.
 - 2) Untuk KA Antar Kota minimal 2 (dua) orang petugas dalam 1 (satu) rangkaian KA.
 - 3) Untuk KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT minimal 1 (satu) orang petugas dalam 6 kereta (6 cars).
 - 4) Untuk KA Bandara minimal 1 (satu) orang petugas dalam 6 kereta (6 cars).
 - c. Informasi Gangguan Keamanan
Informasi yang disampaikan pengguna jasa apabila mendapat gangguan keamanan berupa stiker berisi nomor telepon atau SMS pengaduan yang ditempel pada tempat yang strategis dan mudah dilihat, minimal terdapat 4 (empat) stiker di setiap kereta yang mudah terlihat, strategis dan jelas terbaca.
 - d. Lampu Penerangan
 - 1) Lampu penerangan di sarana kereta yang berfungsi sebagai sumber cahaya untuk membaca dan berkomunikasi KA Antar Kota
 - Pukul 17.00 - 22.00 Wib, 200 - 300 lux
 - Pukul 22.00 – 04.00 Wib, 60 - 100 lux
 - 2) KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT
Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.
 - 3) KA Bandara
Tersedia lampu penerangan dengan intensitas cahaya minimal 200 lux.
3. Aspek Keandalan / Keteraturan
- Memberikan informasi ketepatan / kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api, keterlambatan diinformasikan dengan intensitas suara 10 dB menggunakan bahasa yang sopan, singkat dan jelas.
- 1) KA Antar Kota
Keterlambatan dihitung 10% dari total waktu tempuh perjalanan kereta api yang dijadwalkan.
 - 2) KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT
Keterlambatan dihitung 20% dari total waktu tempuh perjalanan kereta api yang dijadwalkan.
 - 3) KA Bandara
Keterlambatan 15 menit.

4. Aspek Kenyamanan
 - a. Tempat duduk dengan konstruksi tetap yang mempunyai sandaran
Fasilitas untuk pengguna jasa angkutan kereta api untuk duduk di dalam kereta selama dalam perjalanan
 - 1) KA Antar Kota
Memiliki nomor tempat duduk.
 - 2) KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT
 - Tempat duduk minimal 20% dari spesifikasi teknis kereta.
 - Ruang untuk mengangkut penumpang berdiri maksimum 1 m² untuk 6 orang.
 - 3) KA Bandara
Semua penumpang duduk.
 - b. Toilet dilengkapi dengan air sesuai kebutuhan
Tempat atau fasilitas untuk buang air dengan ketersediaan air yang cukup selama dalam perjalanan, berfungsi sesuai dengan standar teknis dan operasi dan area bersih serta tidak berbau yang berasal dari dalam toilet.
 - c. Fasilitas pengatur sirkulasi udara
Fasilitas untuk sirkulasi udara dapat menggunakan AC, kipas angin atau ventilasi udara, suhu dalam kereta maksimal 27°C (dilengkapi dengan alat pengukur suhu ruangan pada setiap kereta).
 - d. Restorasi
Fasilitas untuk menunjang kebutuhan pengguna jasa yang hendak makan dan minum selama perjalanan kereta (khusus KA Antar Kota).
 - e. Fasilitas pegangan penumpang berdiri
Fasilitas pegangan penumpang (hand rail dan hand grip) yang disediakan untuk penumpang berdiri (khusus KA Perkotaan).
 - f. Rak bagasi
Fasilitas yang diperuntukkan bagi pengguna jasa angkutan kereta api untuk dapat menempatkan barang bawaan di dalam kereta dengan aman dan tidak mengganggu penumpang yang tersedia di atas tempat duduk.
 - g. Kebersihan
Kondisi atau keadaan kereta terbebas dari kotoran termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau meliputi kebersihan interior dan eksterior kereta, tersedia petugas kebersihan yang bertanggung jawab untuk kebersihan kereta yang menggunakan seragam dan dibekali dengan peralatan kebersihan, kondisi kereta harus bersih di setiap waktu dan tidak berbau.
5. Aspek Kemudahan
 - a. Informasi stasiun yang akan disinggahi / dilewati secara berurutan
Informasi yang disampaikan untuk mempermudah penumpang yang akan turun di suatu stasiun kereta api (sedang dan akan disinggahi / dilewati)
 - 1) Informasi dalam bentuk visual harus ditempatkan di tempat yang strategis, mudah terlihat dan mudah terbaca.
 - 2) Informasi dalam bentuk audio harus jelas terdengar dengan intensitas suara 10 dB lebih besar dari kebisingan yang ada.
 - b. Informasi gangguan perjalanan kereta api
Isi informasi yang terkait dengan hambatan – hambatan selama dalam perjalanan mengenai :
 - 1) Gangguan operasional sarana perkeretaapian
 - 2) Gangguan operasional Prasarana perkeretaapian
 - 3) Gangguan tidak langsung akibat masalah operasional
 - 4) Gangguan alamUntuk KA Antar Kota, KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT informasi diumumkan maksimal 30 menit setelah terjadi gangguan sedangkan untuk KA Bandara informasi diumumkan maksimal 10 menit setelah terjadi gangguan dan jelas terdengar dengan intensitas suara 10 dB lebih besar dari kebisingan yang ada.

- c. Nama / relasi kereta api dan nomor operasi kereta
Ketersediaan nama / relasi kereta api, nomor operasi dan nomor urut kereta untuk mempermudah penumpang mengetahui nama / relasi kereta api dan nomor urut kereta, terdiri dari :
- 1) KA Antar Kota
 - 2 (dua) buah nama kereta api / relasi kereta api di setiap kereta api pada bagian luar di sisi kiri.
 - 1 (satu) buah nomor urut kereta dipasang pada setiap samping pintu naik / turun penumpang.
 - 1 (satu) buah nomor urut kereta dipasang pada setiap ujung kereta bagian dalam
 - Penempatan mudah terlihat dan jelas terbaca.
 - 2) KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT
 - 2 (dua) buah nama kereta api / relasi kereta api pada bagian luar di sisi kiri dan kanan (untuk rangkaian yang ditarik lokomotif)
 - Display nama relasi / nomor operasi kereta api perkotaan dipasang di bagian muka/front end kereta (untuk rangkaian kereta api yang tidak ditarik lokomotif).
 - 3) KA Bandara
 - Display nomor operasi kereta api Bandara dipasang di bagian muka / front-end kereta.
- d. Informasi pelayanan
- Informasi yang disampaikan di dalam kereta kepada pengguna jasa
 - Mempunyai sistem pemberitahuan Public Address System (PA) atau Passenger Information System (PIS), informasi dalam bentuk visual PID (Passenger Information Display) diletakkan di tempat strategis di dalam kereta yang mudah terlihat (khusus KA Perkotaan, KRL, LRT dan MRT serta KA Bandara).
- e. Kadar gelap kaca
Berupa kaca film jendela kereta guna mengurangi panas sinar matahari namun tidak mengurangi kemudahan pandangan penumpang keluar kereta, kadar gelap kaca film maksimal 40%.
6. Aspek Kesetaraan
- a. Fasilitas bagi penumpang dengan berkebutuhan khusus
Fasilitas berupa kursi prioritas untuk mempermudah penumpang dengan kebutuhan khusus yang meliputi penyandang disabilitas, wanita hamil, penumpang membawa balita, lanjut usia dan orang sakit.
 - 1) Tersedia kursi prioritas yang dilengkapi stiker petunjuk dan edukatif
 - 2) Minimal terdapat 4 (empat) tempat duduk dalam satu kereta untuk KA antar kota dan minimal terdapat 12 (dua belas) tempat duduk dalam satu kereta untuk KA antar perkotaan, serta minimal 4 (empat) tempat duduk dalam satu rangkaian kereta untuk KA Bandara
 - b. Tempat khusus kursi roda
Fasilitas berupa ruang khusus yang diperuntukkan kepada penumpang yang menggunakan kursi roda, mempunyai tempat / ruang khusus kursi roda atau sesuai standar teknis sarana kereta yang diberi stiker / penanda khusus kursi roda.

D. Kapasitas Kereta Dan Gerbong

Berikut adalah kapasitas jenis-jenis kereta yang digunakan untuk angkutan penumpang dan gerbong yang digunakan untuk angkutan barang Perseroan:

Kereta:

K1 (Kereta Penumpang Eksekutif)	Kapasitas 48 & 50 Penumpang
K2 (Kereta Penumpang Bisnis)	Kapasitas 64 Penumpang
K3 (Kereta Penumpang Ekonomi) Premium, New Image	Kapasitas 80 Penumpang
K3 (Kereta Penumpang Ekonomi New Generation)	Kapasitas 72 Penumpang
K3 (Kereta Penumpang Ekonomi AC Split)	Kapasitas 106 Penumpang
K1 Wisata Priority	Kapasitas 30 Penumpang
K1 Wisata Imperial	Kapasitas 20 Penumpang
K1 Luxury	Kapasitas 18 & 26 Penumpang
K1 Compartement Suite	Kapasitas 16 Penumpang
K1 Panoramic	Kapasitas 38 Penumpang
Kereta Rel Listrik	Kapasitas 153 Penumpang
KP2, KP3 (Kereta Penumpang dan Pembangkit)	Kapasitas 56-88 Penumpang
M1, KM1, KM2 (Kereta Makan)	Kapasitas -
MP1, MP2, MP3, KMP2, KMP3 (Kereta Makan dan Pembangkit)	Kapasitas -
B (Kereta Bagasi)	Kapasitas 37-40 Ton
P (Kereta Pembangkit)	Kapasitas -
BP (Kereta Bagasi dan Pembangkit)	Kapasitas 37-40 Ton

Gerbong:

Gerbong GD (PPW) 30 Ton	Kapasitas 30 Ton
Gerbong GD (PPCW) 40 Ton	Kapasitas 40 Ton
Gerbong GD (PPCW) 42 Ton	Kapasitas 42 Ton
Gerbong GD (PKPKW) 45 Ton	Kapasitas 45 Ton
Gerbong GD (PPCW) 50 Ton	Kapasitas 50 Ton
Gerbong GD (PPCW) 54 Ton	Kapasitas 54 Ton
Gerbong GT (GGW) 30 Ton	Kapasitas 30 Ton
Gerbong GK (KKW) 30 Ton	Kapasitas 30 Ton
Gerbong GK (KKW) 40 Ton	Kapasitas 40 Ton
Gerbong GB (KKBW) 25 Ton	Kapasitas 25 Ton
Gerbong GB (KKBW) 30 Ton	Kapasitas 30 Ton
Gerbong GB (ZZOW) 30 Ton	Kapasitas 50 Ton
Gerbong GB (KKBW) 45 Ton	Kapasitas 45 Ton
Gerbong GB (KKBW) 50 Ton	Kapasitas 50 Ton
Gerbong GB (ZZOW) 50 Ton	Kapasitas 50 Ton

16. PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Berikut adalah penghargaan yang diterima oleh Perseroan selama tahun 2024 sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan:

No.	Nama Penghargaan	Tempat dan Tanggal	Event	Pemberi Penghargaan
1	KAI Raih Penghargaan pada Anugerah ICONOMICS'20 Best Companies Transportation Category	Jakarta, 29 Januari 2024	Anugerah ICONOMICS'20	ICONOMICS
2	Best Crisis Handling BUMN untuk KAI	Jakarta, 8 Maret 2024	BCOMSS 2024	Kementerian BUMN
	Individual Social Media Ranger Activation untuk Nurul Wulandari	Jakarta, 8 Maret 2024	BCOMSS 2024	Kementerian BUMN
4	Terbaik I Inovasi Bisnis Perusahaan Terbaik.	Jakarta, 13 Maret 2024	Anugrah BUMN 2024	Majalah BUMN TRACK bersama PPM Manajemen
5	Terbaik II Strategi Pertumbuhan Perusahaan Terbaik.	Jakarta, 13 Maret 2024	Anugrah BUMN 2024	Majalah BUMN TRACK bersama PPM Manajemen

No.	Nama Penghargaan	Tempat dan Tanggal	Event	Pemberi Penghargaan
6	Apresiasi Kepada KAI dalam Mendukung TVRI Jawa Barat menjalankan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Penyiaran Publik	Bandung, 27 April 2024	Semarak 37 Tahun TVRI Jawa Barat	TVRI Jawa Barat
7	Indonesia Best TJSL in Transportation Sector 2024	Jakarta, 7 Mei 2024	6th Indonesia CSR Awards 2024	The Economics
8	“Silver Champion” BUMN The Most Promising Company In Strategic Marketing	Jakarta, 16 Mei 2024	Jakarta Marketing Week	BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2024
9	“Gold Champion” The Most Promising Company In Tactical Marketing	Jakarta, 16 Mei 2024	Jakarta Marketing Week	BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2024
10	Direktur SDM dan Umum dinobatkan Sebagai Dewi BUMN 2024 (Apresiasi kepada direksi Perempuan di perusahaan BUMN yang banyak berperan dalam proses transformasi BUMN)	Jakarta, 16 Mei 2024	BUMN Entrepreneurial Marketing Award 2024	Jakarta Marketing Week
11	BUMN Peduli Lansia	Surabaya, 29 Mei 2022	Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional Tingkat Provinsi Jawa Timur	Provinsi Jawa Timur
12	The Best Leadership in Human Capital Development - Rosma Handayani	Jakarta, 1 Agustus 2024	Human Capital on Resilience Award	First Indonesia Magazine
13	The Best CEO Committed HC of The Year 2024 - Didiek Hartantyo	Jakarta, 1 Agustus 2024	Human Capital on Resilience Award	First Indonesia Magazine
14	The Most Resilience Company 2024	Jakarta, 1 Agustus 2024	Human Capital on Resilience Award	First Indonesia Magazine
15	The Best Business Transformation	Jakarta, 1 Agustus 2024	Human Capital on Resilience Excellence Award	First Indonesia Magazine
16	The Best Bussiness Transform Management and Communication Strategy	Jakarta, 1 Agustus 2024	Human Capital on Resilience Award	First Indonesia Magazine
17	The Best Career Development Program	Jakarta, 1 Agustus 2024	Human Capital on Resilience Excellence Award	First Indonesia Magazine
18	Best Social Impact and Human Rights	Jakarta, 8 Agustus 2024	ESG Initiative Awards (EIA) 2024	Business Update
19	Best Regulatory and Policy Advocacy	Jakarta, 8 Agustus 2024	ESG Initiative Awards (EIA) 2024	Business Update
20	Best CEO of ESG Initiatives & Commitment in Suistainable Public Transport - Didiek Hartantyo	Jakarta, 8 Agustus 2024	ESG Initiative Awards (EIA) 2024	Business Update

17. PEMASARAN, PENJUALAN DAN PELANGGAN

A. Program Pemasaran

Perseroan melaksanakan kegiatan pemasaran untuk masing-masing segmen usaha sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Pemasaran Angkutan Penumpang

Dalam menjalankan bisnis angkutan penumpang, Perseroan melakukan strategi pemasaran antara lain:

- a. Rekeyasa pola operasi KA, yakni menjalankan KA baru untuk meningkatkan utilitas trainset sebagai berikut:
 - Menjalankan KA *feeder* Padalarang-Bandung PP mulai TW IV tahun 2022;
 - Menjalankan KA relasi Pasar Senen-Garut PP mulai 1 Juli 2022;
 - Menjalankan KA relasi Cibatuh-Garut PP mulai 1 Juli 2022;
 - Menjalankan KA relasi Gambir-Garut PP mulai 1 Juli 2022;
 - Perpanjangan relasi KA Siliwangi s.d Padalarang mulai 1 Juli 2022;

- Menjalankan KA relasi Cepu-Semarang Tawang mulai 1 Maret 2022;
 - Menjalankan KA relasi Kandangan-Mn mulai 1 Januari 2022;
 - Menjalankan KA relasi Surabaya Gubeng-Blitar mulai 1 Januari 2022;
 - Menjalankan KA relasi Medan-Belawan mulai 1 April 2022;
 - Penambahan 8 frekuensi perjalanan KA relasi Indro-Sidoarjo mulai 1 Januari 2022.
- b. Perbaiki layanan waktu tempuh KA Taksaka menjadi 6 jam mulai 1 Januari 2022.
- c. Nomor layanan Call Center KAI langsung menghubungi ke nomor 121 dan tanpa menggunakan kode akses (021).

Guna menjaga dan meningkatkan loyalitas para mitra pengguna jasa angkutan penumpang, Perseroan juga melakukan inovasi dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Impelementasi *dynamic pricing*;
2. Pembuatan aplikasi penilaian kinerja *frontliner*

Pemasaran Angkutan Barang

Dalam menjalankan bisnis angkutan barang dengan tujuan mendapatkan pelanggan potensial, Perseroan melakukan strategi diantaranya sebagai berikut:

1. Rencana Angkutan
 - a. Sumatera Utara
Rencana angkutan Pupuk;
 - b. Sumatera Barat
Untuk target angkutan Semen menjadi 7 KA/hari dengan SF 24 KKW dan target angkutan Klinker menjadi 6 KA/hari SF 24 dgn @ Hari Operasi (HO) 330 hari.
 - c. Sumatera Selatan
 - Angkutan Batu bara PT Bukit Asam Tbk
 - 1) Tanjungenim baru-Tarahan: rerata 24 KA/hari atau 23,9 juta ton;
 - 2) Tanjungenim baru-Kertapati: rerata 13,3 KA/hari atau 6,3 juta ton.
 - Angkutan Batu bara Swasta
 - 1) Total rerata KA bongkar 20,9 KA/hari, Vol: 18,3 jt ton;
 - 2) Adanya mitra baru yaitu: PT Nexis dan PT BMS;
 - 3) Adanya angkutan KA dari CY Gunungmedang;
 - 4) Penambahan KA dengan target 10 KA dari Muaralawai 1 dan 2.
 - d. Jawa
 - 1) Komoditi Semen
 - 2) Komoditi Petikemas : Project NLE (National Logistic Ecosystem) dari CY Gedebage menuju CY JICT/TPK Koja;
 - 3) Komoditi Pupuk : Rencana angkutan PT Pupuk Indonesia Holding Company di Sumatera Utara dan Banyuwangi;
2. Penurunan Waktu Perputaran KA (WPKA)
 - a. Penyelesaian pekerjaan double track dan jalur sayap guna penurunan WPKA;
 - b. Target WPKA sesuai dengan SOP.
3. Pengembangan Sarana
 - a. Penambahan 54 unit lokomotif untuk angkutan barang di Sumatera Selatan;
 - b. Penambahan 1.125 unit GD 54 Ton untuk angkutan barang Sumatera Selatan;
 - c. Penambahan 996 unit GB Bottom Dump untuk angkutan barang Sumatera Selatan;
 - d. Penggantian 24 Bogie Set guna peningkatan kecepatan menjadi trainmerk F untuk angkutan BHP di Jawa.
4. Safety dan Pengembangan Teknologi Informasi
Peningkatan keselamatan dng penggunaan timbangan statis di terminal muat angkutan batu bara swasta

5. Marketing Strategy, customer care dan pentarifan.
 - a. Penyesuaian tarif batu bara PT BA 2022-2026;
 - b. Pengenaan target minimal 90% rencana angkutan pada angkutan batu bara;
 - c. Penggunaan model skema tarif untuk angkutan sesuai dengan cluster KA unggulan, non unggulan dan KA perintis;
 - d. Akan dilakukan gathering untuk 4 komoditi;
 - e. Penjagaan piutang tidak tertagih di bawah 3%.
 - f. Akan dilakukan taskforce dengan mitra peti kemas dan semen.

Guna menjaga dan meningkatkan loyalitas para mitra pengguna jasa angkutan barang, Perseroan juga melakukan inovasi dalam hal pembuatan *dashboard* angkutan barang.

Pemasaran Bisnis Pendukung Angkutan KA dan Non KA

Dalam menjalankan bisnis pendukung angkutan KA dan Non KA, Perseroan melakukan strategi pemasaran antara lain:

1. Inovasi Skema Bisnis
 - a. Skema revenue sharing berdasarkan tonase angkut atas kerjasama berbasis keterminalan muat-bongkar angkutan batu bara sumatera selatan
 - b. Pemasaran Naming rights Stasiun untuk meningkatkan pendapatan dan brand image
 - c. Pengelolaan sarana sebagai pendukung proses bisnis angkutan (KA local dan KA Bandara) bersama PT KCI, PT Railink dan PT KCIC-
2. Optimalisasi Pendapatan melalui pemanfaatan utilitas, baik dari peningkatan tarif eksisting maupun mitra/utilitas baru (temuan/backlog) dengan PT Telkom, PT Icon +, PT Integrasi Jaringan Ekosistem, PT Indosat, PT Pertamina, PT Telkomsel, PT Iforte Solusi Infotek, dan lain

B. Daerah Pemasaran dan Wilayah Operasional

Wilayah Operasional



Berikut adalah lokasi kantor-kantor Perseroan.

DAERAH OPERASI (DAOP)				
DAERAH Operasi (DAOP)	Kedudukan	Alamat	Telepon	Alamat Email
DAOP 1	Jakarta	Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat	021-3924977	dokumen.do1@kai.id
DAOP 2	Bandung	Jl. Stasiun Selatan No. 25, Bandung 40181	022-4230150	dokumen.do2@kai.id
DAOP 3	Cirebon	Jl. Siliwangi No.82 Cirebon	0231-203944	dokumen.do3@kai.id
DAOP 4	Semarang	Jl. M.H. Thamrin Nbo.3 Semarang 50132	024-3520134	dokumen.do4@kai.id
DAOP 5	Purwokerto	Jl. Jenderal Sudirman No. 209, Purwokerto 53116	0281-636031	dokumen.do5@kai.id
DAOP 6	Yogyakarta	Jl. Lempuyangan no. 1 Yogyakarta	0274-512056	dokumen.do6@kai.id
DAOP 7	Madiun	Jl. Kumpul Sunaryo No. 14, Madiun 63122	351-462263	dokumen.do7@kai.id
DAOP 8	Surabaya	Jl. Gubeng Masjid, Surabaya 60131	031-5036575	dokumen.do8@kai.id
DAOP 9	Jember	Jl. Dahlia No.2 Jember	0331-487067	dokumen.do9@kai.id

SUB DIVISI REGIONAL (DIVRE)				
Divisi Regional (DIVRE)	Kedudukan	Alamat	Telepon	Alamat Email
DIVRE I	Sumatera Utara	Jl. Prof. H.M Yamin, SH No. 14 Medan, 20231	0661-4533012	dokumen.dv1@kai.id
SUBDIVRE 1.1	Aceh	Jl. Sultan Iskandar Muda No,2 Banda Aceh	0651-6300855	dokumen.sdv11@kai.id
DIVRE II	Sumatera Barat	Jl. Stasiun No. 1, Kec. Padang Timur, Kel Sawah Timur, Padang 25121	0751-27650	dokumen.dv2@kai.id
DIVRE III	Palembang	Jl. Jend. Achmad Yani 13 Ulu No.541 Palembang 30258	0711-512427	dokumen.dv3@kai.id
DIVRE IV	Tanjung karang	Jl. Teuku Umar No. 23 Bandar Lampung 35111	0721-263142	dokumen.divre4@kai.id

BALAI YASA				
Balai Yasa	Alamat	Telepon	Alamat Email	
Mangarai	Jl. Bukit Duri Utara No. 1 Jakarta Selatan 12850	021-8291935	dokumen.bymri@kai.id	
Tegal	Jl. Semeru No. 5 Slerok, Tegal Timur, Tegal 52125	0283-353056	dokumen.bytg@kai.id	
Yogyakarta	Jl. Kusbini No. 1 Yogyakarta	0274-513385	dokumen.byyk@kai.id	
Surabaya Gubeng	Jl. Tapak Siring no. 5 Surabaya 60131	031-50220215	dokumen.bysgu@kai.id	
Lahat	Jl. Inspektur Yazid No.1, Lahat 31417	0731-321075	dokumen.bylt@kai.id	
Pulubrayan	Jl. Bengkel Pulubrayan No.1 Medan 20239	061-6615544	dokumen.bypub@kai.id	

8. Sistem Penjualan dan Penggunaan Jasa

Berikut adalah kegiatan penjualan dan distribusi Perseroan:

Angkutan Penumpang

Mekanisme penjualan pada angkutan penumpang melalui dua cara yaitu:

- *Penjualan Langsung / Go Show*
Penjualan yang dilakukan secara langsung pada loket di setiap stasiun.
- *Penjualan Reservasi melalui Channel Eksternal*
Penjualan yang dapat dilakukan pada loket di setiap stasiun, *Internet Reservation*, *Contact Center 121*, Aplikasi *KAI Access*, Agen Perjalanan, *Website Mitra KAI*, *minimarket* dan lain-lain

Pelanggan Perseroan dapat melakukan pembelian tiket kereta antara lain melalui:

- *Internet Reservation* samapi dengan 1 jam sebelum keberangkatan KA;
- *Contact Center 121* yang dapat dipesan sampai dengan 1 jam sebelum keberangkatan KA;
- Aplikasi *KAI Access* yang dapat dipesan sampai dengan 1 jam sebelum keberangkatan KA;
- *Website Mitra KAI* yang dapat dipesan sampai dengan 1 jam sebelum keberangkatan KA;
- Minimarket yang dapat dipesan dapat dipesan sampai dengan 1 jam sebelum keberangkatan KA;
- *Vending Machine* atau E-Kiosk yang dapat dipesan sampai dengan 1 jam sebelum keberangkatan KA.

Pada tahun 2015, Perseroan meluncurkan mesin *E-Kiosk* yaitu mesin penjualan tiket kereta api dimana penumpang dapat langsung melakukan pembayaran di mesin tersebut. Pembayaran dapat dilakukan dengan Kartu Kredit, Kartu ATM, dan Uang Tunai. Sedangkan untuk kereta KRL *Commuterline*, Penumpang harus dapat menggunakan jasa angkutan kereta dengan menggunakan uang elektronik atau kartu THB (Tiket Harian Berjamin).

Angkutan Barang

Angkutan barang menggunakan Kereta Api yang terdiri dari:

- a. Angkutan Korporasi, yaitu dilakukan kepada mitra tertentu berdasarkan perjanjian angkutan barang yang pembayarannya melalui invoicing (tagihan) sesuai dengan realisasi volume angkutan;
- b. Angkutan Retail, yaitu angkutan yang dilakukan melalui transaksi penjualan langsung kepada konsumen tanpa adanya Perjanjian sebelumnya.

Angkutan barang dengan menggunakan Kereta Api memiliki keunggulan:

- a. Mempunyai waktu yang sudah terjadwal, tingkat keamanan tinggi, bebas pungli, cepat dan mempunyai kapasitas angkut yang besar;
- b. Menjadi solusi transportasi logistic darat nasional dalam hal:
 - 1) Mengurangi polusi dan tingkat kecelakaan;
 - 2) Mengurangi inefisiensi akibat kemacetan jalan;
 - 3) Hemat energy dalam hal penggunaan BBM.

Angkutan KA dan Non KA

Pendayagunaan aset tetap dapat dilakukan dengan cara sewa atau pinjam pakai. Pemilihan cara pendayagunaan aset tetap tersebut, disesuaikan dengan karakteristik penggunaan atau pemanfaatan aset tetap oleh mitra dan didasarkan pada pertimbangan bisnis yang lebih menguntungkan Perseroan. Objek pendayagunaan aset tetap untuk usaha terdiri atas tanah dan/atau bangunan, sarana kereta api, menara, dan fasilitas uji.

Layanan Jasa Perseroan

Prasarana lain untuk sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada konsumen adalah dengan menyediakan :

Contact Center 121

Pelayanan prima menuntut Perseroan untuk selalu sigap melayani kebutuhan konsumen khususnya kebutuhan akan informasi terkait layanan atau produk yang diberikan. Layanan *Contact Center* PT Kereta Api Indonesia atau *Contact Center 121* (CC 121) hadir sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan. Pelayanan CC 121 meliputi Reservasi Tiket, Penanganan Keluhan/ Saran, Kritik dan Informasi lainnya yang berhubungan dengan PT Kereta Api dan seluruh Perusahaan Anak. CC 121 saat ini berada dibawah naungan 2 *Manager*, *Manager Call Center* 121 yang fokus pada pelayanan melalui Telepon (*Voice*) dan *Manager Customer Relation & Digital Community* yang fokus pada pelayanan *sosial media (text)* dan penanganan keluhan. Tanggung jawab masing-masing manager adalah mengelola kehandalan sistem dan infrastruktur *Contact Center* untuk mendukung operasional yang terintegrasi, serta pemeliharaan rutin perangkat kerja dan berkoordinasi dengan pihak IT Kantor Pusat maupun mitra (pihak kedua) dalam masalah *IT Application dan Networking*.

Customer Service On Station

Customer Service on Station (CSOS) bertugas melayani segala kebutuhan calon penumpang KA di stasiun, seperti informasi tentang perjalanan kereta api. CSOS juga siap menerima berbagai keluhan dan masukan dari penumpang mengenai berbagai layanan KA.

Customer Service Mobile

Customer Service Mobile (CSM) bertugas melayani segala kebutuhan penumpang KA di Stasiun secara mobile atau jemput bola, khususnya saat momen Lebaran dan natal tahun baru. SDM CSM berasal dari komunitas pecinta KA, SMA dan SMK.

Customer Service On Train (Kondektur)

Customer Service on Train (Kondektur) bertugas di atas KA sebagai pemimpin untuk melayani penumpang KA kompartemen, luxury, priority, Executive Argo, Eksekutif dan Kereta Api Campuran (Executive dan Bisnis) kereta Ekonomi dan Lokal. Sebagai upaya untuk menangani segala bentuk keluhan penumpang secara langsung dan semaksimal mungkin sehingga penumpang merasa nyaman. Kondektur juga memiliki peranan penting saat terjadi sesuatu, gangguan sarana atau lainnya yang berimbas pada pemberian *service recovery* serta *refund* tiket.

Mesin Antrian Q-Matic

Calon penumpang yang akan melakukan pembelian dan penukaran tiket di stasiun diatur dengan sistem mesin antrian yang terintegrasi dengan komputer, berbasis web sehingga semua aktivitas antrian seluruh lokasi dapat terpusat, terpantau secara mudah dan cepat serta data dapat dilihat secara *real time* ataupun historikal.

Perluasan Channel Pembelian Tiket Kereta Api

Perseroan terus memperluas channel pembelian tiket KA dengan membuka channel pembelian tiket secara online melalui mitra B2B maupun mitra B2C dengan kerja sama ini maka tiket kereta api dapat dibeli di agen resmi, mini market, dan atau *channel* alternatif lainnya. Perseroan telah meluncurkan “KAI Access by KAI”, sebuah aplikasi mobile untuk pemesanan tiket secara online dan mendapatkan info terbaru terkait kereta api melalui gawai. Aplikasi ini dapat diunduh di *Google Playstore, Appstore, Windows Market, dan Blackberry App World. Playstore untuk android, Appstore untuk ios, dan App Gallery untuk pengguna smartphone merk Huawei.*

Perseroan juga mengembangkan sistem *e-wallet*, yaitu cara pembayaran non-tunai (*cashless*) untuk memudahkan pembelian tiket bagi pelanggan KA lokal.

Pusat Pengendali (Pusdal) Pelayanan

Pusat Pengendali Pelayanan atau sering disebut Pusdal yang dibentuk pada Februari 2015 berdasarkan Keputusan Direksi No. KEP. C/OT.103/II/9/KA-2015 tertanggal 18 Februari 2015 dan KEP. U/OT.003/V/8/KA-2015 tertanggal 26 Mei 2015 agar dapat mengendalikan dan memantau proses pelayanan di atas kereta. Pengendalian terpadu mulai dari pra perjalanan hingga purna perjalanan.

Layanan FR (Face Recognition) Boarding Pass

Peningkatan *Customer Experience* kepada penumpang pada saat boarding tanpa memperlihatkan dokumen pribadi (Identitas & tiket)

Integrasi antar moda

Bekerjasama dengan DAMRI untuk kemudahan akses lanjutan penumpang kereta api

Layanan First Mile dan Last Mile

Layanan antar jemput dari dan ke stasiun untuk calon penumpang kereta api bekerjasama dengan Bluebird yang dapat dipesan melalui Access by KAI

b. Rincian Pendapatan

Berikut adalah tabel rincian pendapatan Perseroan berdasarkan segmen usaha per 31 Mei 2024:

KETERANGAN	31 Mei 2024					
	Jasa Angkutan	Jasa Non Angkutan	Konstruksi	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan Usaha	13.103.023.661	790.103.056	135.412.371	14.028.539.088	-	14.028.539.088
Antar Segmen	450.963.950	1.149.731.875	-	1.600.695.825	(1.600.695.825)	-
Jumlah pendapatan	13.553.987.611	1.939.834.931	135.412.371	15.629.234.913	(1.600.695.825)	14.028.539.088
Beban Operasi	(9.048.673.535)	(1.065.370.759)	(135.412.371)	(10.249.456.665)	-	(10.249.456.665)
Antar Segmen	(1.067.756.619)	(532.939.206)	-	(1.600.695.825)	1.600.695.825	-
Jumlah Beban	(10.116.430.154)	(1.598.309.965)	(135.412.371)	(11.850.152.490)	1.600.695.825	(10.249.456.665)
Hasil Segmen	3.437.557.457	341.524.966	-	3.779.082.423	-	3.779.082.423
Kontribusi	90,96%	9,04%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

Pada saat Prosektus ini diterbitkan sebagian besar pendapatan Perseroan di atribusikan oleh segmen usaha jasa angkutan sebesar 90,96% dan sisanya sebesar 9,04% diatribusikan oleh segmen usaha jasa non angkutan.

18. TEKNOLOGI INFORMASI

Tata Kelola IT (IT Governance)

Perusahaan telah menetapkan pedoman utama pengelolaan teknologi informasi melalui Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: PER.U/KK.101/IV/1/KA-2023 tanggal 04 April 2023 tentang Kebijakan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi (IT Governance). Kebijakan tersebut merupakan dasar pengelolaan Teknologi Informasi dan memberikan kerangka pengaturan yang komprehensif bagi seluruh unit yang terkait dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Teknologi Informasi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Media Komunikasi KAI Berbasis Teknologi Informasi.

Perusahaan memiliki media komunikasi yang digunakan untuk mensosialisasikan, mengkomunikasikan, dan memberikan informasi kepada internal dan eksternal. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Direksi No. Per.U/KK.301/III/1/KA-2019 tentang Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi.

Dalam perdir ini mengatur media komunikasi apa saja yang dimiliki Perusahaan antara lain:

- situs website korporat : <https://kai.id/>
- media sosial resmi perusahaan dengan akun : Kereta Api Kita, dan KAI 121
- eoffice / raileo

Selain itu juga diatur unit-unit pengelola, tugas dan tanggung jawabnya.

Penyampaian Informasi melalui media massa

Untuk penyampaian informasi kepada eksternal melalui media massa telah diatur dengan Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KG.203/XI/1//KA2016 tentang Pemberian Informasi Kepada Publik melalui Media Massa. Dalam SK tersebut telah ditetapkan kewenangan pemberian informasi kepada publik melalui media massa dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Informasi dalam lingkup perusahaan dilakukan oleh:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur;
 - c. EVP Corporate Secretary; atau
 - d. VP Public Relations.
2. Pemberian informasi dalam lingkup Daop/Divre dilakukan oleh:
 - a. Kepala Daerah Operasi/Divisi Regional; atau
 - b. Kepala bagian yang membidangi hubungan masyarakat di Daerah
3. Pemberian informasi pada lingkup pelayanan dan fasilitas di stasiun dapat dilakukan oleh Kepala Stasiun.

Media Sosial

Dalam penyampaian informasi ke publik melalui media sosial resmi perusahaan yang terdiri dari dua akun media sosial, telah dilakukan pengaturan fokus informasi yang akan disampaikan ke publik dengan Perdir No. PER.U/KK.301/X/1/KA-2023 tentang Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan. Pada perdir ini juga diatur apa yang boleh tidak boleh dilakukan oleh admin yg mengelola dan pengawasannya.

Eoffice / Raileo

Eoffice/Raileo merupakan media komunikasi internal. Melalui eoffice/ raileo ini berbagai informasi kepada internal dapat dilakukan seperti e-magazine Kontak dan kebijakan Perusahaan. Selain itu terdapat berbagai portal untuk kebutuhan administrasi kepegawaian. Eoffice / raileo ini telah diatur dalam Perdir No. Per.U/KK.301/III/1/KA-2019 ttg Pengelolaan Media Komunikasi dan Informasi.

Broadcast Email

Untuk menyebarkan informasi kegiatan perusahaan melalui email ke seluruh pekerja melalui mailing-list. Informasi yang disampaikan dapat berupa kegiatan di seluruh daerah, pencapaian perusahaan dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan citra perusahaan. Aturan mengenai broadcast peliputan kegiatan diatur dalam Instruksi Direksi Nomor: 12/KG.203/KA-2017.

19. RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan melakukan riset dalam bentuk pengembangan layanan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. Perseroan telah mengeluarkan biaya Rp16.105.897 ribu dan Rp 13.404.872 ribu untuk riset dan pengembangan untuk masing-masing periode 31 Mei 2024 dan 31 Mei 2023. Nilai tersebut setara dengan 0,12% dan 0,13% dari pendapatan atau 1,35% dan 1,22% dari laba bersih tahun berjalan untuk masing-masing periode 31 Mei 2024 dan 2023.

Perseroan terus melakukan inovasi pelayanan untuk kereta api penumpang, yaitu antara lain:

1. Prasarana proyek *double double track*,
2. Vending Machine Tiket Kereta Api yang mulai beroperasi sejak Maret 2015 bertujuan sebagai alternatif *channel* penjualan tiket dan edukasi masyarakat untuk bertransaksi tidak ke loket. Saat ini jumlah perangkatnya ada 149 unit tersebar di 52 Stasiun di Pulau Jawa;
3. Penambahan fasilitas Face Recognition (FR) Boarding Gate untuk mempermudah proses boarding gate bagi penumpang, sejak Tahun 2023 sudah terpasang terpasang sebanyak 21 Unit di 47 Stasiun Pulau Jawa
4. Pembatasan bagasi tangan/barang bawaan penumpang yang dibawa ke kabin untuk alasan keselamatan dan kenyamanan penumpang;
5. Kolaborasi Strategis dalam Ekspansi Penjualan Tiket KA. KAI telah berhasil menjalin kemitraan strategis dengan mitra-mitra potensial untuk memperluas kanal penjualan tiket KA sebagai bagian dari saluran resmi PT KAI. Hingga Agustus 2024, terdapat 16 mitra eksklusif yang telah secara langsung berkolaborasi dengan PT KAI. Mitra-mitra ini meliputi Traveloka, Tiket.com, Via.com, Mr. Aladin, KAWISATA, Tokopedia, Bimasakti, Indomaret, Voltras, Alfamart, Darmawisata, Rodex, Ayoconnect, Oketiket, Alfamidi, dan DSP.
6. Inovasi dibidang E-commerce berupa :
 - a. **Revamp Aplikasi dan Rebranding.** Pada Agustus 2023, PT KAI meluncurkan pembaruan besar pada aplikasi mobile KAI Access, yang kini hadir dengan identitas baru sebagai Access by KAI. Aplikasi ini tidak hanya mempertahankan fitur unggulan seperti pemesanan tiket kereta antar kota, tiket kereta lokal, pengubahan jadwal, pembatalan, dan e-boarding pass, tetapi juga melakukan peningkatan signifikan pada UI/UX yang memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Selain itu, fitur-fitur baru diperkenalkan untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan perjalanan dengan kereta api.
 - b. **Perluasan Layanan Pemesanan Tiket.** Access by KAI kini melayani lebih dari sekadar pemesanan tiket kereta antar kota dan lokal. Pengguna juga dapat memesan tiket kereta bandara, KRL, LRT Jabodebek, serta tiket kereta cepat WHOOSH, menjadikannya aplikasi yang terintegrasi untuk berbagai jenis perjalanan kereta.
 - c. **Integrasi Antar Moda.** Access by KAI menawarkan layanan integrasi antar moda transportasi, termasuk taksi dan bus, melalui kemitraan strategis dengan Bluebird untuk taksi dan Perum DAMRI untuk bus. Dengan fitur ini, pelanggan dapat memesan tiket kereta api bersamaan dengan transportasi lanjutan, memastikan pengalaman perjalanan yang lebih nyaman dan efisien.
 - d. **Layanan Tambahan untuk Kenyamanan Perjalanan.** Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur tambahan seperti Pemesanan Railfood, yang memungkinkan penumpang memesan makanan dan minuman untuk perjalanan mereka. Selain itu, tersedia pula produk asuransi tambahan seperti Asuransi Perlindungan Ekstra dan Asuransi Jaminan Refund 100%. Fitur lain termasuk pemesanan hotel dan live tracking untuk memantau posisi perjalanan kereta secara real-time.
 - e. **Layanan Lifestyle.** Untuk mendukung gaya hidup pengguna, Access by KAI menyediakan berbagai fitur seperti informasi jadwal sholat, trip planner untuk menyusun itinerary perjalanan, hiburan perjalanan, dan Premium Entertainment yang menyediakan konten video dan musik. Aplikasi ini juga menawarkan layanan pembelian pulsa, paket data, dan token listrik.
 - f. **Fitur Transfer Tiket dan Face Recognition.** Fitur transfer ticket memungkinkan pelanggan untuk mentransfer kode booking dari satu akun Access ke akun lainnya. Selain itu, terdapat fitur pendaftaran Face Recognition (FR) yang memungkinkan pengguna untuk melakukan registrasi tanpa harus mengantri di stasiun.

- g. **Kemudahan Pembayaran.** Access by KAI bekerjasama dengan berbagai mitra payment gateway dan penyedia layanan pembayaran untuk memperkaya opsi pembayaran. Metode pembayaran yang tersedia mencakup Virtual Account, Transfer melalui ATM/Mobile Banking, E-wallet, Direct Debit, QRIS, Kartu Kredit, Paylater, dan pembayaran melalui gerai.
 - h. **KAlpay – E-wallet Co-Branding.** KAlPay adalah e-wallet yang terintegrasi dalam aplikasi Access, hasil dari kolaborasi co-branding antara PT KAI dengan KASPRO, memberikan solusi pembayaran yang lebih mudah dan aman bagi pengguna Access.
7. Peningkatan promo dan Marcom melalui Kegiatan-kegiatan event-event, yaitu :
- a. pemberian diskon dan promo pada event-event besar;
 - b. Menyelenggarakan kegiatan olahraga besar tahunan tematik menyesuaikan trend
 - c. Menyelenggarakan Kegiatan dan berpartisipasi menjadi sponsor atas event yang diselenggarakan oleh promotor. Kegiatan tersebut antara lain KAI Expo, KAI Travel fair, Pekan Raya Jakarta, Ngopi Bareng KAI dll.
 - d. Menyelenggarakan kegiatan travelling by train dengan mengajak kalangan influencer untuk mempromosikan KA relasi-relasi tertentu.
 - e. Ikut serta dalam berbagai acara music festival dengan menasar Gen Z dan gen Y
 - f. Placement materi-materi promosi dan produk-produk KAI di media digital
 - g. Join promotion dengan brand dan wahana bermain anak-anak (kidzania)
 - h. Branding fasilitas/*corner* (kantin, lapangan olahraga basket volley, etc) di sekolah-sekolah
 - i. Penggunaan Brand Ambassador atau talent (public figur nasional) guna menunjang promosi
 - j. Program BPTV (Boarding Pass Thru Value) – Pemberian potongan harga atau diskon tertentu kepada pelanggan KAI terhadap tenan (hotel, resto, klinik) yang bekerjasama
8. Penambahan Produk dan peningkatan Pelayanan angkutan KA, antara lain :
- a. Melakukan rekayasa operasional KA untuk meningkatkan utilitas sarana dan efisiensi operasional KA
 - b. Penambahan rute dan perjalanan KA baru seperti KA Jakarta-Bandung yang semula hanya 8 KA (16 perjalanan), telah ditingkatkan menjadi 13 KA (26 perjalanan) untuk memenuhi tingginya permintaan.
 - c. Meningkatkan jumlah kereta/penambahan stamformasi dalam 1 trainset dari 8 menjadi 14 kereta, khususnya Kelas Ekonomi, di saat permintaan meningkat tajam.
 - d. Memaksimalkan stamformasi KA pada relasi tertentu pada saat permintaan tinggi pada saat akhir pekan dan libur panjang
 - e. Menjalankan KA tambahan pada relasi tertentu pada saat permintaan tinggi pada saat akhir pekan dan libur panjang KAI Resmikan Anggrek Executive Lounge KAI meresmikan Anggrek Executive Lounge di Stasiun Yogyakarta. Fasilitas Executive Lounge pertama tersebut akan dikembangkan di sejumlah stasiun lainnya. Anggrek Executive Lounge merupakan ruang tunggu eksklusif bagi penumpang kereta api dengan fasilitas yang diberikan yakni ruang tunggu yang eksklusif, termasuk makanan prasmanan, makanan tradisional, snack/coffee break, mushala, smoking room, serta free wi-fi.
 - f. Penyediaan Ruang Co-Working space di beberapa stasiun besar
9. Melakukan Investasi dibidang sarana, antara lain :
- a. Pengadaan 438 unit kereta New Image dengan 15 trainset K1, 6 K1, 6 trainset K3, 17 trainset K1, dan 80 KRd;
 - b. Pengadaan sarana pendukung Kereta Bandara seperti KA Bandara Minangkabau dan KA Bandara Adi Sumarmo;
 - c. Pengadaan sarana untuk mendukung operasi LRT Sumsel;
 - d. investasi pengembangan angkutan LRT Jabodetabek;
 - e. Program penggantian kereta yang telah berusia di atas 31 tahun;
 - f. Pengadaan 4 kereta Luxury Gen 1 Tahun 2018, 6 kereta Luxury Gen 2 Tahun 2019, 6 kereta Luxury Gen 3 Tahun 2023 dan 5 kereta Luxury Tahun 2024
 - g. Pengadaan investasi 612 Kereta Replacement Tahun 2023 – 2026 (56 Trianset yang terdiri dari 21 Trainset K1, 27 Trainset Campuran dan 8 Trainset K3 .
 - h. Modifikasi kereta K1 menjadi kereta Kompartemen dan kereta Panoramik tahun 2022 - 2023 untuk meningkatkan layanan customer experience

Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayan dalam angkutan barang, Perseroan telah melakukan kegiatan inovasi terhadap layanan tersebut sehingga dapat memberikan nilai tambah, antara lain yaitu:

1. Modifikasi Gerbong KKBW Canada 50 Ton menjadi KKBW 45 Ton *open side* angkutan PT Bukit Asam (Persero) Tbk untuk relasi Tanjungenim Baru tujuan Kertapati;
2. Penggantian penggunaan 2 Lok CC 206 menjadi 1 Lok CC 205 pada angkutan batu bara swasta (efisiensi biaya perawatan dan penggunaan BBM);
3. Modifikasi bogie kereta bagasi menjadi kecepatan 120 km/jam agar dapat dirangkaikan dengan kereta penumpang terkini;
4. Perbaikan dan penggantian komponen timbangan Kereta Api (*Train Scale*) di Stasiun Babat dan Stasiun Pasoso di tahun 2024

20. PERSAINGAN DAN PROSPEK USAHA

Keunggulan Bersaing

Perseroan memiliki beberapa keunggulan bersaing yang memperkuat kinerja Perseroan yaitu sebagai berikut:

- a. Merupakan satu-satunya BUMN yang bergerak di jasa transportasi kereta api**
Perseroan masih berdiri sebagai satu-satunya BUMN penyedia layanan jasa angkutan kereta api dan didukung kuat oleh pemerintah melalui dalam Perpres no. 14 tahun 2015 yang memprioritaskan industri kereta api dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.
- b. Posisi yang kuat di industri kereta api yang masih dalam tahap pertumbuhan**
Perseroan memiliki pemahaman dan kemampuan di bidang operasi dan bisnis kereta api yang telah dibangun selama beberapa dekade. Sampai dengan saat ini Perseroan cukup gencar dalam mengembangkan inisiatif terhadap proyek jalur kereta yang akan dibuka untuk mendukung infrastruktur antar pulau di tanah air.
- c. Jasa angkutan yang ditawarkan Perseroan memiliki banyak keuntungan, diantaranya :**
 - **Kereta api menjadi angkutan massal barang dan penumpang**
Perseroan sebagai penyedia jasa angkutan penumpang dan barang memiliki kapasitas angkutan hingga mencapai 1.500 penumpang dalam sekali perjalanan. Jumlah ini hampir setara dengan kapasitas kapal laut namun lebih terjangkau karena memiliki operasional di darat. Jasa angkutan yang ditawarkan Perseroan menjadi lebih unggul jika dibandingkan dengan transportasi darat lainnya.
 - **Kereta api beroperasi pada jalur tersendiri sehingga tingkat keselamatan cukup tinggi**
Kereta api dioperasikan pada jalur kereta api dan pengendaliannya dilakukan dengan sistem komunikasi sinyal. Sistem komunikasi persinyalan yang ada di kereta api dapat meminimalisir kecelakaan, sehingga tingkat keselamatan cukup tinggi.
 - **Operasional tidak terlalu dipengaruhi oleh cuaca**
Kereta api akan tetap beroperasi normal dengan skedul keberangkatan yang telah ditentukan. Perjalanan kereta api akan tetap berjalan sesuai dengan jadwal, walaupun kondisi cuaca kurang baik.
 - **Lebih hemat energi dan ramah lingkungan**
Kereta api menggunakan sistem ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan banyak polusi.
- d. Layanan Perkeretaapian yang aman dan nyaman**
Perseroan senantiasa melakukan inovasi dan penyesuaian demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik kemudahan dan kenyamanan dalam pemesanan tiket dan fasilitas lain di atas kereta api, kemudahan dan berbagai pilihan pembayaran, kemudahan akses moda lanjutan, kemudahan proses boarding, pilihan kelas kereta api dengan berbagai layanan hingga kemudahan administrasi dan operasional untuk angkutan barang maupun non angkutan

Prospek Usaha dan Rencana ke Depan

Laporan World Economic Outlook (WEO) yang diterbitkan Dana Moneter Internasional (IMF) pada 10 Oktober 2023 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 akan mencapai sebesar 2,9%, turun 0,1% dari proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2023 yang mencapai sebesar 3%. Upaya pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19 yang terus berlanjut pada 2024 masih akan dibayangi berbagai kondisi ketidakpastian global, mulai dari konflik geopolitik yang tak kunjung usai, pertumbuhan ekonomi China dan Amerika Serikat yang melemah, volatilitas harga komoditas, hingga ancaman perubahan iklim. Kondisi global tersebut, tentu dapat memberikan dampak yang signifikan pada perekonomian Indonesia apabila Pemerintah, regulator, pelaku industri dan pemangku kepentingan lainnya tidak menyiapkan langkah antisipatif.

Mengutip kajian keuangan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagian besar dollar memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 masih tetap stabil di kisaran 5%. Proyeksi World Bank sebesar 4,9%, Asian Development Bank (ADB) dan IMF sebesar 5,0% serta The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebesar 5,2%. Adapun Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 sebesar 5,2%. Inflasi Indonesia diproyeksikan sebesar 2,8% dengan nilai tukar Rupiah pada kisaran Rp15.000 per Dollar AS.

Mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global yang turut berdampak pada perekonomian nasional, arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2024 mencakup kebijakan moneter yang difokuskan pada stabilitas (*pro-stability*) khususnya pencapaian sasaran inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah.

Strategi Tahun 2024 Berdasarkan asumsi proyeksi makroekonomi di atas, KAI telah menetapkan strategi untuk tahun 2024 mendatang. Strategi tersebut berfokus pada:

1. Meningkatkan peran angkutan barang dalam logistik nasional dan peran angkutan penumpang, serta menyusun road map pengembangan pengelolaan aset;
2. Mengoptimalkan operasi layanan kereta api yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas angkut serta penambahan frekuensi KA dan pengurangan waktu tempuh perjalanan kereta api dengan menerapkan basis digitalisasi;
3. Mendukung peningkatan angkutan penumpang dan angkutan barang dengan menghilangkan backlog, serta inovasi berkelanjutan dengan penerapan proses digitalisasi dalam perawatan dalam mendukung efisiensi biaya;
4. Meningkatkan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api melalui penguatan kultur dan budaya dari patuh menjadi proaktif dengan mengimplementasikan program strategis sebagai berikut:
 - Pelatihan *basic safety*
 - Pelatihan *safety leadership*
 - *Safety Champion*
 - *Workload Analysis SDM Safety*
 - Penetapan KPI Keselamatan
 - Penetapan *Training Need Analysis* Keselamatan
 - Peningkatan Pemenuhan Implementasi SMKP
 - Kebijakan *Just Culture*
 - Pedoman RCHSEMS
 - *Safety Observation Card*
 - Revitalisasi SRI
 - Penguatan Program 5 Kunci Keselamatan
 - Perluasan Akses Informasi Keselamatan
 - Sistem *Reward* KeselamatanImplementasi program strategi budaya keselamatan proaktif oleh seluruh *stakeholder* sebagai pencegahan kecelakaan dan insiden yang dapat mengancam keselamatan pegawai, pihak ketiga, mitra, tamu dan penumpang serta operasional perkeretaapian.
5. Meningkatkan kompetensi SDM untuk menghadapi perubahan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai;

6. Melakukan kajian pengembangan bisnis dan implementasinya serta menjalin kerjasamanya dengan seluruh stakeholders untuk mendukung pendapatan;
7. Penguatan manajemen risiko, optimalisasi penugasan pemerintah dan optimalisasi pendanaan proses bisnis perusahaan;
8. Menjalankan efisiensi yang terukur, dengan tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api melalui penguatan kultur dan budaya.

Secara umum, prospek angkutan penumpang masih cukup menjanjikan dengan berbagai inovasi produk dan layanan KAI yang dapat memperkaya pengalaman penumpang. Kereta api masih menjadi transportasi andalan masyarakat untuk bepergian antar kota di Jawa dan Sumatera.

Sementara prospek angkutan barang masih sangat menarik seiring tumbuhnya pasar. Hingga beberapa tahun mendatang, KAI masih akan berinvestasi pada pengembangan bisnis angkutan batubara di Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sesuai dengan rencana kenaikan kapasitas angkut hingga 105 MTPA mulai tahun 2030. Permintaan batubara dari negara-negara Asia sebagai bagian bauran energi dunia hingga tahun 2050 masih cukup tinggi, meskipun disertai sederet regulasi dan kebijakan dalam rangka mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Kami pun menyadari, portofolio bisnis Perusahaan masih sangat bergantung pada pendapatan dari angkutan Batubara di Sumbagsel. Oleh karena itu, KAI perlu untuk mencari alternatif bisnis lain yang sesuai dengan rencana Pemerintah dalam hal pengembangan transportasi di bidang perkeretaapian.

Selain itu, transformasi digital yang dijalankan KAI telah mengembangkan model bisnis angkutan barang yang semula bersifat *business to business* (B2B) menjadi bisnis pengembangan dan pengelolaan terminal. KAI juga akan melanjutkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan *customer experience*. Layanan pada Access by KAI akan dioptimalkan untuk meningkatkan new revenue stream. Selain itu, KAI akan terus berkolaborasi dengan banyak pihak dalam pemetaan pasar serta pemasaran terintegrasi.

KAI juga akan lebih responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar, serta beradaptasi terhadap perubahan ekonomi global dan lokal.

21. STRATEGI BISNIS PERSEROAN

Potensi peningkatan permintaan pasar transportasi kereta api baik angkutan penumpang maupun angkutan barang harus diantisipasi Perseroan dengan pengembangan sarana dan prasarana serta kualitas layanan perkeretaapian.

a. Strategi Angkutan Penumpang

Di segmen angkutan penumpang, strategi Perseroan di tahun 2024 mencakup aspek-aspek pengembangan sebagai berikut :

1. *Revenue Growth*
 - a. *Pricing Strategy*
 - Implementasi RMS (*Revenue Management System*), Aplikasi untuk optimalisasi penentuan tarif dan *inventory* serta meningkatkan agility dan respon terhadap perubahan pasar untuk mencapai pendapatan terbaik
 - b. *Routes Optimization*
 - Rute Baru atau Perpanjangan Relasi
 - 1) KA Papandayan relasi Gambir - Garut PP (sudah beroperasi terhitung mulai tanggal 24 Januari 2024)
 - 2) KA Pangandaran relasi Gambir - Banjar PP (sudah beroperasi terhitung mulai tanggal 24 Januari 2024)
 - 3) KA Batavia relasi Solo - Gambir PP dijalankan sebagai KA tambahan (Jalan pada saat kondisi *long weekend* yang disesuaikan dengan ketersediaan sarana)
 - 4) KA Malioboro Ekspres relasi Purwokerto-Malang PP (sudah jalan reguler setelah angkutan lebaran 2024)
 - 5) KA Bandung-Ketapang PP (belum diusulkan perijinannya)

- 6) KA Malang-Ketapang PP (sedang proses usulan perijinan, target beroperasi di tahun 2025)
 - 7) KA Baturaden Ekspres semula relasi Bandung-Purwokerto Menjadi Pasar senin-Purwokerto (sedang proses perijinan operasi)
 - 8) KA Blambangan Ekspres semula relasi Ketapang-Semarang tawangmenjadi Ketapang–Pasar senin (sudah dioperasikan mulai 24 Juli 2024)
 - Penambahan Frekuensi
 - 1) KA Malabar 2 Relasi Bd-MI PP (sudah beroperasi terhitung mulai tanggal 24 Januari 2024)
 - 2) Sembrani tambahan Relasi Gmr-Sbi PP
 - 3) Argo Parahyangan relasi Gmr-Bd PP dengan pemanfaatan idle KA :
 - Gajayana
 - Harina
 - Argo Wilis
 - Pandalungan
 - Turangga
 - 4) Perubahan pola operasi KA Sawunggalih menjadi pola N-slagh
 - Intermoda dan Bundling
 - 1) Inisiasi untuk meperluas rute layanan Damri sebagai angkutan terusan/*feeder*
 - 2) Inisiasi untuk memperluas titik layanan Taksi Bluebird di stasiun sebagai angkutan *first* dan *last mile*
 - 3) Inisiasi layanan transportasi online yang terintegrasi pada platform *Access*
 - 4) Inisiasi Kerjasama dengan TJ layanan Royal Trans sebagai angkutan lanjutan
 - 5) Kerjasama dengan Hotel, *rental car*, tempat wisata untuk membuat *bundling* tiket.
2. *Data Driven Marketing*
- a. *Targeted Campaigns: implementasi marketing automation and Customer Relationship Management*
 - *Marketing Automation*
Implementasi *Marketing Automation* tingkat lanjutan sebagai platform analitik untuk proses analisa data pelanggan untuk meningkatkan LTV (*Lifetime Train Value*), menurunkan CAC (*Customer Acquisition Cost*), Meningkatkan *User Engagement* dan pembelian berulang melalui serangkaian program marketing yang dipersonalisasi dan diotomatisasi
 - *Customer Relationship Management*
Implementasi CRM (*Customer Relationship Management*) tingkat lanjutan dengan penambahan fitur dan fungsi untuk mengelola dan membangun hubungan, memahami, memelihara, dan meningkatkan interaksi perusahaan dengan pelanggan dengan melibatkan semua aspek interaksi termasuk pemasaran dan layanan pelanggan.
 - b. *Partnerships: Kolaborasi dengan Dinas Pariwisata, pelaku industri pariwisata dan akomodasi hotel*
 - Bekerja sama dengan Pemerintah atau instansi terkait untuk mendapatkan dukungan terutama terkait kebijakan yang menciptakan iklim yang mendorong pertumbuhan angkutan kereta api
 - Bekerjasama dengan penyedia jasa transportasi yang bisa saling melengkapi dengan angkutan kereta api agar dapat tercipta layanan transportasi yang terintegrasi dari *first mile* dan *last mile*
 - Bekerjasama dengan Hotel atau tempat wisata sebagai pelengkap layanan dan dapat dibuat suatu *bundle package* yang terdiri dari layanan transportasi, akomodasi dan wisata sehingga memudahkan pelanggan mendapatkan layanan dalam satu paket lengkap
 - c. *Loyalty Programs: implementasi loyalty programs dengan beragam benefit*
 - d. *Branding Strengthening: Sponsorship, Promotional Event & Co-Branding*
3. *Winning Customer Experience*
- a. *Improved Comfort: Upgrade interior KA untuk meningkatkan kenyamanan*
 - b. *Onboard Services: Meningkatkan kualitas layanan Wi-Fi, entertainment, menu makanan*
 - c. *Accessibility: Memastikan bahwa Stasiun dan Kereta api ramah disabilitas, Penambahan fasilitas FR Boarding gate*
 - d. *Community Engagement : Gathering dengan customer, komunitas dan mitra kerja*
 - e. *improve Customer Satisfaction Index, improve cleanliness SLA*

b. Strategi Angkutan Barang

Di segmen angkutan barang, strategi Perseroan di tahun 2024 mencakup aspek-aspek pengembangan sebagai berikut:

1. **Optimalisasi dan Pengembangan Mitra *Existing***
Meningkatkan angkutan barang dengan pengembangan angkutan barang, optimalisasi alat kerja dan efisiensi pola kerja dengan mitra
2. **Peningkatan Kapasitas**
Menangkap peluang dan potensi angkutan barang dengan meningkatkan kapasitas angkut sarana maupun prasarana.
3. **Pengoperasian KA Mitra Baru**
Ekspansi angkutan baru dan mitra baru dengan pendekatan optimalisasi atau investasi sarana
4. **Restrukturisasi Tarif**
Strategi yang dilakukan untuk mendongkrak pendapatan, ketertarikan calon mitra supaya menggunakan Kereta dan menaikan kapasitas angkutan barang bagi mitra
5. **Digitalisasi *Rail Cargo System***
Pengembangan Sistem Komunikasi Informasi untuk menghilangkan faktor error manusia, mempermudah *monitoring*, evaluasi dan menentukan strategi yang akan diambil dengan mempergunakan data *real time*.

c. Strategis Non Angkutan

Di segmen non angkutan barang, strategi Perseroan di tahun 2024 mencakup aspek-aspek pengembangan sebagai berikut:

1. **Digitalisasi Bisnis Non Angkutan**
 - a. **Peningkatan basis data melalui pengembangan fitur Portal Aset**
Portal Aset yang sebelumnya hanya dipergunakan untuk inputing data kontrak, pada periode 2024 ini Perseroan mengembangkan agar calon mitra potensial dapat mengetahui proses bisnis kerja sama aset mulai dari penyampaian minat kerja sama, negosiasi, drafting dan finalisasi kontrak, serta pemantauan pelaksanaan kerja sama.
 - b. **Pemasaran Digital aset potensial melalui pengembangan aplikasi Portal yang dapat diakses oleh calon mitra dengan ruang lingkup katalog aset, nilai sewa, pengajuan minat/sewa, negosiasi dan Monitoring kontrak.**
 - c. **Rencana implementasi ini akan diberlakukan kepada para calon mitra potensial, diantaranya PT Sebastian Citra, PT Reska Multi Usaha dan PT Budi Karya Raharja.**
2. **Peningkatan nilai jual aset melalui perbaikan/renovasi aset strategis yang sudah tidak layak sehingga diharapkan dapat menarik minat calon mitra.**
Berdasarkan hasil evaluasi internal proses bisnis non angkutan Perseroan, kondisi aset yang saat ini dipasarkan Perseroan kurang layak apabila dibandingkan dengan usaha sejenis di sekitarnya, dimana kondisi bisnis pengelolaan aset Perseroan baik di area stasiun maupun diluar stasiun hanya sebatas menyewakan aset berupa tanah dan/atau bangunan dengan kondisi sesuai dengan pada saat aset tersebut diminati oleh para mitra. Perseroan hingga saat ini belum menyediakan aset yang siap pakai. Perseroan di tahun 2024 mengalokasikan biaya perbaikan/renovasi untuk meningkatkan nilai jual yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang lebih tinggi. Contoh pelaksanaan yang saat ini dalam telah diperbaiki adalah aset Perusahaan di wilayah Daerah Operasi 5 Purwokerto dan aset dimaksud telah dikerjasamakan dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai minimum yang ditetapkan Perseroan. Calon mitra potensial yang saat ini berproses dengan menggunakan pendekatan rencana strategis ini antara lain PT Kereta Api Properti Manajemen.
3. **Membangun engagement dengan customer melalui Customer Gathering, Customer Dashboard, Customer Reward and Appreciation (additional Benefit, Diskon, give away, etc)**
4. **Peningkatan kapabilitas SDM melalui Training terkait dengan non Farebox dan bisnis properti, Training Sales Projection and Negotiation, dan Benchmark NFB**
Perseroan bekerja sama dengan IPMI International Business School untuk meningkatkan kapabilitas SDM segmen non angkutan.

Terdapat kecenderungan dalam pendapatan usaha KAI, khususnya pendapatan dari angkutan barang, yang didominasi oleh angkutan batu bara sekitar 85%. Pada saat musim hujan, secara teknis kondisi cuaca basah dapat mengganggu kegiatan eksplorasi atau eksploitasi yang dilakukan oleh pemilik tambang. Akibatnya, menghentikan sementara kegiatan operasional produksi karena medan tambang yang sulit demi keselamatan pekerja. Hal ini berdampak pada tidak terealisasinya angkutan batu bara sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Kegiatan usaha Perseroan tidak memiliki sifat musiman.

Terdapat ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan, termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah, dimana Perseroan telah menandatangani berbagai perjanjian dengan Pemerintah dan entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah dan diperkirakan akan terus melakukan transaksi sejenis di masa mendatang. Pemerintah sebagai satu-satunya pemegang saham Perseroan memberikan dukungan kepada Perseroan dalam bentuk subsidi untuk menutup selisih biaya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam bentuk subsidi PSO dan menjaga keselamatan perjalanan kereta api dengan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara dalam bentuk subsidi IMO.

Subsidi IMO diperoleh melalui penugasan setiap tahunnya dari Pemerintah dalam hal ini Kemenhub kepada KAI untuk melaksanakan kegiatan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara (IMO) namun ada keterbatasan alokasi DIPA yang dianggarkan oleh Kemenhub untuk kontrak IMO antara KAI dengan DJKA Kemenhub. Realisasi biaya IMO yang dikeluarkan oleh KAI untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan perjalanan kereta api agar prasarana laik operasi lebih tinggi dibandingkan nilai kontrak IMO yaitu sebesar Rp579.762.502 ribu untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024. Untuk mengakomodir selisih kurang tersebut telah terbit Perpres 33/2024 bahwa BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah dapat mengajukan usulan kekurangan pembayaran kepada Menteri.

Perseroan telah dan akan terus melakukan transaksi dari waktu ke waktu dengan badan usaha lain yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah, yaitu Pertamina yang merupakan pemasok BBM Perseroan.

22. PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Berikut adalah peraturan-peraturan terkait dengan lingkungan hidup:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Perseroan melakukan investasi pengembangan prasarana perkeretaapian di antaranya Pembangunan Jalur KA Bandara Soekarno-Hatta dan pembangunan prasarana Kereta Api Jalur Lingkar Jabodetabek, pembangunan Prasarana Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, dan Investasi Pengembangan Lainnya. Pelaksanaan proyek-proyek Perseroan tersebut dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Perseroan senantiasa menerapkan AMDAL atas proyek-proyek yang sedang dilaksanakan sebagai dasar untuk mengajukan Persetujuan Lingkungan.

23. TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perseroan menyadari bahwa pelanggan layak untuk mendapatkan pelayanan yang prima sehingga Perseroan terus meningkatkan sarana pelayanan, keselamatan operasional dan meminimalisir gangguan melalui pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan. Perseroan melaksanakan tanggung jawabnya kepada pelanggan dengan memperhatikan standar kualitas pelayanan yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan No. 48 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api. Selain itu, KAI Juga mengeluarkan kebijakan terkait standar pelayanan berdasarkan Maklumat Direksi Nomor: 6/LL.006/KA-2015 tanggal 07 Desember 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 untuk Program Kemitraan terealisasi sebesar Rp833.369.369,-, Program Bina Lingkungan terealisasi sebesar Rp6.171.999.694,- dan Program Community Relations sebesar Rp 3.355.210.920,-.

Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan program CSR adalah:

1. Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (UUPT) dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15, 17 & 34.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
4. Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/ MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
5. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER-U/KP.502.XII/1/KA-2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
6. Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER-U/KP.502.VI/1/KA-2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor PER-U/KP.502.XII/1/KA-2022 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Pada lingkup pelaporan tahunan, KAI juga melakukan penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 29 / POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta Surat Edaran OJK No. 30 /SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, perihal CSR dibagi ke dalam 4 (empat) aspek, yaitu: aspek lingkungan hidup; praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja; pengembangan sosial dan kemasyarakatan; serta tanggung jawab barang dan/atau jasa.

Selain peraturan dan perundang-undangan, penerapan program CSR KAI juga mengacu kepada ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*). ISO yang telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012 ini memberikan 7 (tujuh) subyek inti dalam pengelolaan CSR, yaitu:

- Tata kelola organisasi yang baik
- Penegakan hak asasi manusia
- Praktek ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan
- Dampak kegiatan perusahaan terhadap Lingkungan
- Prosedur operasi yang wajar
- Tanggung jawab terhadap konsumen
- Pelibatan dalam pengembangan masyarakat.

Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Implementasi CSR KAI pada dasarnya mengacu pada kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") bagi BUMN. Selain itu, Perseroan selalu berupaya membangun interaksi dengan komunitas pemangku kepentingan baik komunitas internal (pekerja Perseroan) maupun dengan komunitas eksternal, melalui program-program Community Relations yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian ruang lingkup CSR Perseroan dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Program Kemitraan (“PK”) merupakan kegiatan penyaluran dana pinjaman bergulir dan dana pembinaan kemitraan kepada mitra binaan. Sasaran dari kegiatan PK adalah pelaku usaha kecil, baik perorangan, badan usaha atau koperasi. Sektor penyaluran PK dibagi menjadi 7 sektor, yaitu industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa.

Berikut realisasi penyaluran dana revolving Program Pendanaan UMK (PUMK) berkolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

No	Jenis Program	Anggaran 2024	Realisasi per 31 Mei 2024
1	Program Pendanaan UMK (PUMK)	3.500.000.000	1.700.000.000
	Jumlah	3.500.000.000	1.700.000.000

Berikut merupakan realisasi Program Pembinaan yang diberikan untuk UMK Mitra Binaan:

No	Jenis Program	Anggaran 2024	Realisasi per 31 Mei 2024
1	Pameran MiKA	500.000.000	0
2	Teras UMK	300.000.000	0
3	MiKA Hasanah	125.000.000	0
4	MiKA Go Global	1.100.000.000	833.369.369
5	MiKA Next Class	300.000.000	0
	Jumlah	2.325.000.000	833.369.369

Tahun 2024, Perseroan memiliki 2.760 mitra binaan, Dengan Realisasi dana pada 31 Mei 2024 sebesar Rp 2.533.369.369 untuk 7 sektor usaha, dan Berkolaborasi dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, sebagaimana Surat dari Mentri BUMN Nomor :S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal “Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (“Kerja Sama Program PUMK”), untuk penyaluran dana PUMK di wilayah usaha yang terdiri dari 9 Daerah Operasional di Jawa, dan 4 Divisi Regional di Sumatera. Secara bertahap Perseroan akan terus memperluas cakupan wilayah penyaluran ke sejumlah wilayah Indonesia lainnya.

2. Program Bina Lingkungan (“BL”) merupakan program pemberdayaan masyarakat yang terutama ditujukan untuk masyarakat di sekitar lokasi operasional Perseroan. Dalam pelaksanaannya terdapat 7 (tujuh) jenis Program yang disalurkan yaitu:
 - a. KAI Quick Respon (Bantuan Korban Bencana Alam),
 - b. KAI EduFriend (Bantuan Pendidikan),
 - c. KAI Sehat Sejahtera (Bantuan Peningkatan Kesehatan)
 - d. KAI Pling – Peduli Lingkungan (Bantuan Prasarana dan Sarana Umum),
 - e. KAI Sar’i (Bantuan Sarana Ibadah),
 - f. KAI Go Green (Bantuan Pelestarian Alam), dan
 - g. KAI DungMas – Perlingdungan Masyarakat (Bantuan Sosial Kemasyarakatan).

Realisasi program Bina Lingkungan (BL) pada 31 Mei 2024 sebesar Rp 6.171.999.694,- yang disalurkan kepada 7 jenis Program sebagai berikut:

No	Jenis Bantuan	Anggaran 2024	Realisasi per 31 Mei 2024
1	KAI Quick Respon	500.000.000	154.068.180
2	KAI EduFriend	3.000.000.000	396.164.500
3	KAI Sehat Sejahtera	3.000.000.000	74.980.400
4	KAI Pling	2.500.000.000	2.783.742.500
5	KAI Sar’i	2.000.000.000	506.079.000
6	KAI Go Green	2.000.000.000	440.573.000
7	KAI DungMas	3.500.000.000	1.816.392.114
	Jumlah	16.500.000.000	6.171.999.694

3. *Program Community Relation* ("CR") yang merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan harmonis antara Perseroan dengan masyarakat, komunitas, lembaga, dan atau pemangku kepentingan guna mengatasi masalah sosial dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas Perseroan, dan meningkatkan keharmonisan hubungan serta untuk meningkatkan citra Perseroan/ corporate image.

Anggaran kegiatan *Community Relations* tahun 2024 sebesar Rp 10.208.267.206 dengan realisasi pada 31 mei 2024 sebesar Rp 3.355.210.920 terdiri dari realisasi kegiatan *Internal Community Relations* sebesar Rp 620.984.564 dan kegiatan *Eksternal Community Relations* sebesar Rp 2.734.226.356

IX. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tanggal 20 Desember 2022 Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2022 tanggal 12 Desember 2022, dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tanggal 2 Desember 2022. Pasal 3 atas penghasilan bunga obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (03 Agustus 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

1. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
2. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
3. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

1. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
2. Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU Cipta Kerja.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

1. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
2. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
3. Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PENDAPATAN CICILAN IMBALAN IJARAH, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp Jutaan)	%
		Seri A 3 TAHUN (Rp Jutaan)	SERI B 5 TAHUN (Rp Jutaan)	SERI C 7 TAHUN (Rp Jutaan)		
1.	PT Bahana Sekuritas	121.000	105.000	130.250	356.250	23,75
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	63.050	145.010	148.190	356.250	23,75
3.	PT CIMB Niaga Sekuritas	127.000	104.000	125.250	356.250	23,75
4.	PT Mandiri Sekuritas	126.750	94.350	210.150	431.250	28,75
TOTAL		437.800	448.360	613.840	1.500.000	100,00

Serta menerbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp Jutaan)	%
		Seri A 3 TAHUN (Rp Jutaan)	SERI B 5 TAHUN (Rp Jutaan)	SERI C 7 TAHUN (Rp Jutaan)		
1.	PT Bahana Sekuritas	41.200	30.050	47.500	118.750	23,75
2.	PT BRI Danareksa Sekuritas	25.110	3.100	90.540	118.750	23,75
3.	PT CIMB Niaga Sekuritas	31.000	19.000	68.750	118.750	23,75
4.	PT Mandiri Sekuritas	19.230	30.985	93.535	143.750	28,75
TOTAL		116.540	83.135	300.325	500.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas.

Berdasarkan UUP2SK yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

PT Bahana Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah pihak yang terafiliasi secara tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Penentuan Tingkat Bunga dan Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah

Tingkat Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi dan Sukuk Ijarah Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan Sukuk Ijarah, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing peneringkatan Obligasi dan Sukuk Ijarah.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : **Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office (MMI)**
Office 8 Suite H, Lantai 15,
Jalan Senopati Raya No. 8B,
Jakarta

Telp : (021) 29332858
Faks : (021) 29332857
Nomor STTD OJK : STTD.KH-13/PJ-1/PM.02/2023 atas nama Vyati Kartika Sari Iskandar, S.H., M.H.
Tanggal STTD OJK : 6 Februari 2023
Surat Perintah Kerja : Perjanjian Jasa Hukum No. KL.702/VIII/7/KA-2024 tanggal 9 Agustus 2024
Pedoman Kerja : Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Nama Partner : Vyati Kartika Sari, S.H., M.H.
Nama & Nomor Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201319

Tugas Pokok Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

Akuntan Publik : **RSM Indonesia, KAP Amir Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan**
Plaza ASIA Lantai 10
Jl. Jend. Sudirman Kav.59
Jakarta 12190

Telp : (021) 5140 1340
Faks : (021) 5140 1350
No STTD : STTD.AP-233/PM.22/2018 atas nama Dedy Sukrisnadi
Tanggal STTD : 06 Februari 2018
Surat Perintah Kerja : Perjanjian Pengadaan Jasa Konsultasi No. KL.702/VIII/32/KA-2024 tanggal 19 Juli 2024
Nama Partner : Dedy Sukrisnadi

- Tugas Pokok : Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Pedoman kerja berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Audit (SA).
- Notaris** : **Fathiah Helmi, S.H.,**
Graha Irama, Lantai 6, Suite C
Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 Kav.1&2 Kuningan
Jakarta 12950 – Indonesia
- Telp : (021) 5290 7304
Faks : (021) 526 1136
No STTD : STTD.N-93/PM.22/2018 atas nama Fathiah Helmi, SH.,
Tanggal STTD : 9 April 2018
Surat Perintah Kerja : Perjanjian No. KL.702/VIII/8/KA-2024 tanggal 9 Agustus 2024
Pedoman Kerja : Undang-undang dan Kode Etik Notaris
Nama & Nomor Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
- Tugas Pokok : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta akta-akta pengubahannya.
- Wali Amanat Obligasi** : **PT Bank Mega Tbk**
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten Pierre Tendean No. 12 - 14A
Jakarta 12790
- Telp : (021) 79175000
Faks : (021) 79187100
No STTD : No. 20/STTD-WA/PM/2000
Tanggal STTD : 2 Agustus 2000
Surat Perintah Kerja : SPK/335/KCF/VIII/2024 Tanggal 29 Agustus 2024
Pedoman Kerja : Undang-Undang Pasar Modal
- Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

PT Bank Mega Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Obligasi yang diterbitkan Perseroan dilarang:

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliamanati, dan/atau.
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Wali Amanat Sukuk : PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Ijarah

Kantor Pusat Gedung The Tower, Lt.25
Jl Gatot Subroto No.27
Jakarta Selatan 12930

Telp : (021) 3040 5999
Faks : (021) 3042 1888
No STTD : STTD.WA-1/PM.2/2021
Tanggal STTD : 19 April 2021
Surat Perintah Kerja : SPK/336/KCF/VIII/2024 Tanggal 29 Agustus 2024
Pedoman Kerja : Undang-Undang Pasar Modal

Tugas Pokok : Mewakili kepentingan Pemegang Sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Sukuk sesuai dengan syarat-syarat Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman kerja Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk. selaku Wali Amanat saat ini dan selama menjadi Wali Amanat Sukuk Ijarah yang diterbitkan Perseroan dilarang:

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliamanati, dan/atau.
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Lembaga : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Pemeringkat

Panin Tower Senayan City, Lantai 17
Jl. Asia Afrika Lot.19
Jakarta 12220

Izin : No. 39/PM-PI/1994
Tangga Izin : 31 Agustus 1994
Pedoman Kerja : Kode etik PEFINDO mengacu pada Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies (IPSCP Code) yang diterbitkan oleh International Organization of Securities Commissions ("IOSCO"). Anggota-anggota IOSCO adalah otoritas Pasar Modal lebih dari 100 negara. Kode etik dan praktek terbaik diadopsi dari Association of Credit Rating Agencies ini Asia ("ACRAA"). ACRAA adalah asosiasi yang didirikan oleh Asian credit rating agencies, dan diawasi oleh Asian Development Bank ("ADB")

- Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Lembaga Pemeringkat adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum yang objektif dan independen berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Perseroan sebagai pihak yang meminta pemeringkatan.
- Tim Ahli Syariah** : **Ketua: Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH**
Anggota: Awang Muda Satria LC, MIRKH, CFP, ALMI, AIIS
Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI) Jl. Dempo No. 19, Pegangsaan, Jakarta Pusat
- Izin ASPM : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH
KEP-13/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2022
Awang Muda Satria LC, MIRKH, CFP, ALMI, AIIS
KEP-05/PM.22/ASPM-P/2018 tanggal 8 Februari 2018
- Pedoman Kerja : Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Undang Undang Pasar Modal serta peraturan lainnya terkait Tim Ahli Syariah.
- Tugas Pokok : Melakukan penelaahan (review) berdasarkan ruang lingkup pekerjaan terhadap akad-akad dan bagian-bagian propektus lengkap dan prospektus ringkas serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan.
- Ruang Lingkup : 1. Memberikan nasihat, analisa, pembuatan dokumen dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal (selanjutnya seluruh lingkup tersebut disebut “Aktivitas”).
2. Spesifikasi Aktivitas adalah sebagai berikut:
 - Melakukan penelaahan terhadap akad-akad, bagian-bagian prospektus lengkap dan prospektus ringkas serta memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk Ijarah yang diterbitkan dan/ atau dokumen terkait dengan prinsip syariah lainnya;
 - Memberikan saran, draft, dan perbaikan terhadap dokumen-dokumen yang diperlukan oleh produk, jasa, dan/atau kegiatan usaha syariah di pasar modal sehingga sesuai dengan prinsip syariah;
 - Mendampingi dan/atau memberikan penjelasan kepada pihak-pihak terkait baik regulator, instansi pemerintah lain, pihak penunjang pasar modal, maupun dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia, dan/ atau pihak lain yang terkait, sehubungan dengan kesesuaian produk atau jasa syariah di pasar modal dengan prinsip syariah dan/ atau pelaksanaan prinsip syariah di pasar modal oleh Perseroan.
3. Pelaksanaan Aktivitas oleh DPS-TAS dilaksanakan berdasarkan permintaan dari Perseroan, serta pelaksanaan Aktivitas oleh DPS-TAS wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip syariah yang berlaku.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada UUP2SK.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan OJK No. 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK.

Bank Mega dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000, sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan dan Bank Mega selaku Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 2240/CAMS-WA/24 tanggal 29 Agustus 2024, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan:
 - (i) mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat (“POJK No. 19/2020”);
 - (ii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Bank Mega yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - (iii) merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan;
- Surat pernyataan No. 2241/CAMS-WA/24 tanggal 29 Agustus 2024, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- Surat pernyataan No. 2251/CAMS-WA/24 tanggal 30 Agustus 2024 , Wali Amanat menyatakan telah melakukan due diligence terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

d. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk., didirikan dengan nama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969 yang keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk., telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk. No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 12 Maret 2021 No. 07, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk tertanggal 27 Februari 2023 No. 08, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.09-0090709 tanggal 4 Maret 2024.

e. Permodalan

Susunan Pemegang Saham PT Bank Mega Tbk per 30 Juni 2024 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek kepada PT Bank Mega Tbk berdasarkan Surat No.DE/VII/2024-3326 tanggal 2 Juli 2024 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,021
Masyarakat (masing masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,979
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.259.076.635	7.629.538.317.500	

f. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega sesuai Akta No. 2 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Chairul Tanjung
 Komisaris Independen : Achjadi Ranuwisastra
 Komisaris Independen : Lambock V. Nahattands
 Komisaris Independen : Hizbullah

Direksi

Direktur Utama : Kostaman Thayib
 Wakil Direktur Utama : Indivara Erni
 Wakil Direktur Utama : Lay Diza Larentie
 Direktur : Yuni Lastianto
 Direktur : Madi Darmadi Lazuardi
 Direktur : Martin Mulwanto
 Direktur : Ir.C. Guntur Triyudianto
 Direktur Independen : YB Hariantono

g. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, PT Bank Mega Tbk. menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. PT Bank Mega Tbk. juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/ Escrow Agent), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance), Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI), Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT Bank Mega Tbk. berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional PT Bank Mega Tbk terus meluas, sehingga pada per 31 Desember 2023 PT Bank Mega Tbk telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 378 Cabang.

h. Pengalaman Bank Mega di pasar modal (5 Tahun Terakhir)

Wali Amanat (Trustee):

- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Th. 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Th. 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Th. 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Th. 2021

- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Th. 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022

- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023
- Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Th. 2023
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Th. 2024
- Obl. Berkelanjutan V BTPN Tahap I Th. 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi International Tahap II Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V PNM Tahap II Th. 2024
- Obl. Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Th. 2024
- Obl. Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Th. 2024
- Obl. Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Th. 2024
- Obl. Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Th. 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Th. 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Th. 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Th. 2024
- Obl. Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Th. 2024
- Obl. Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Th. 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Th. 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Th. 2024
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024

i. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan, dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

j. Pengganti Wali Amanat

Sesuai Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 yang kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dapat dilakukan dengan alasan:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan kontrak Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. Atas permintaan para Pemegang Obligasi;
- i. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- j. Timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
- k. Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

k. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk pada 31 Desember 2023 (audited) dan 2022. Laporan keuangan PT Bank Mega Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024. Sedangkan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2022 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KNMTR") (firma anggota Crowe Global) dengan partner penanggung jawab adalah Denny Susanto, CPA, flutuasi audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 27 Januari 2023 sebagai berikut

NERACA

Keterangan	(dalam juta Rupiah)	
	31 Desember	
	2023	2022
ASET		
Kas	855.222	901.616
Giro pada Bank Indonesia	6.822.433	8.691.986
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	104	101
Pihak ketiga	645.772	758.672
Total	645.876	758.773
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.203)	(1.153)
Giro pada bank lain - neto	644.673	757.620

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	3.352.627	9.164.176
Efek-efek		
Pihak berelasi	198.288	192.200
Pihak ketiga	37.426.300	38.985.741
Total	37.624.588	39.177.941
Dikurangi:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	0	(915)
Efek-efek - neto	37.624.588	39.177.026
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	7.215.441	3.254.705
Total	7.215.441	3.254.705
Tagihan derivatif		
Pihak ketiga	20.974	10.119
Kredit yang diberikan		
Pihak berelasi	1.318.592	880.897
Pihak ketiga	64.986.127	69.430.406
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(11.823)	(21.946)
Total Kredit yang diberikan	66.292.896	70.289.357
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(604.816)	(572.030)
Kredit yang diberikan - neto	65.688.080	69.717.327
Tagihan akseptasi		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	0	53.031
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	0	(66)
Tagihan akseptasi - neto	0	52.965
Aset tetap	8.121.885	7.999.048
Dikurangi:		
Akumulasi penyusutan	(1.924.127)	(1.632.305)
Aset tetap - neto	6.197.758	6.366.743
Aset lain-lain		
Pihak berelasi	15.751	13.848
Pihak ketiga	3.612.044	3.642.318
TOTAL ASET	132.049.591	141.750.449
LIABILITAS		
Liabilitas segera	296.179	245.593
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	482.783	470.942
Pihak ketiga	9.642.942	12.347.900
Tabungan		
Pihak berelasi	113.643	145.624
Pihak ketiga	15.548.598	14.585.937
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	1.717.317	1.827.590
Pihak ketiga	61.930.467	73.571.674
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	1.202.082	568.738
Pihak ketiga	2.670.514	977.958
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	12.573.231	13.263.387
Liabilitas derivatif	18.931	66.818

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Utang pajak penghasilan	59.596	143.076
Utang akseptasi	0	53.031
Pinjaman yang diterima	2.909.228	1.856.213
Liabilitas pajak tangguhan	156.812	48.996
Liabilitas imbalan pasca kerja	277.530	241.747
Obligasi Subordinasi - neto		
Pihak berelasi	48.000	38.000
Pihak ketiga	2.000	
Beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain		
Pihak berelasi	4.703	5.547
Pihak ketiga	639.592	645.998
TOTAL LIABILITAS	110.294.148	121.116.769
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham		
Modal dasar - 27.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh 11.740.923.365 saham	5.870.462	5.870.462
Tambahan modal disetor	6.347.491	6.347.491
Cadangan umum	1.716	1.639
Saldo laba	6.221.696	5.272.162
Penghasilan komprehensif lain	3.314.078	3.141.926
TOTAL EKUITAS	21.755.443	19.144.464
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	132.049.591	132.879.390

LAPORAN LABA RUGI

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga	10.217.532	9.069.057
Beban bunga	(4.685.387)	(3.199.931)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	5.532.145	5.869.126
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	1.671.911	1.925.229
Keuntungan penjualan efek-efek - neto	535.366	430.738
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	55.255	128.506
Keuntungan perubahan nilai wajar instrumen keuangan - neto	14.794	1.466
Lain-lain	10.704	11.339
Total pendapatan operasional lainnya	2.288.030	2.497.278
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA		
Provisi dan komisi	(11.427)	(11.749)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan - neto	(195.318)	(147.840)
Beban umum dan administrasi	(1.817.565)	(1.846.500)
Beban gaji dan tunjangan lainnya	(1.463.387)	(1.358.753)
PENDAPATAN OPERASIONAL - NETO	4.332.478	5.001.562
PENDAPATAN NON-OPERASIONAL - NETO	10.251	26.508
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.342.729	5.028.070
BEBAN PAJAK - NETO	(832.059)	(975.392)
LABA TAHUN BERJALAN	3.510.670	4.052.678

(dalam juta Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2023	2022
Penghasilan komprehensif lain:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasca kerja - neto	(48.533)	(39.105)
Surplus revaluasi aset	-	589.592
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai atas instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - neto		
(Kerugian) keuntungan yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang tersedia untuk dijual - neto	496.444	(313.949)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	3.958.581	
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	299	345

Alamat PT Bank Mega Tbk adalah sebagai berikut:

PT BANK MEGA Tbk.
 Menara Bank Mega. Lantai 16
 Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
 Jakarta 12790
 Telp : (021) 79175000 Ext. 16210
 Fax : (021) 7990720
website: www.bankmega.com
e-mail: waliamanat@bankmega.com
 U.p.: Capital Market Services

XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT SUKUK IJARAH

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II KAI Tahap I Tahun 2024 bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Sukuk sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK.

PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut sebagai “BSI”) dalam penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. STTD.WA-1/PM.2/2021 tanggal 19 April 2021.

BSI sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Sukuk mempunyai penanggung jawab kegiatan perwaliamanatan yang memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perwaliamanatan dalam penerbitan Sukuk Ijarah yang memahami kegiatan dan jenis usaha serta transaksi yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

A. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank Syariah Indonesia Tbk merupakan bank hasil penggabungan dari 3 Bank Umum Syariah milik BUMN yaitu PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Sebagai bank penerima penggabungan, PT Bank BRISyariah Tbk, kemudian berubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan berlaku efektif pada tanggal 1 Februari 2021 dan perubahan nama tersebut telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sebagaimana tertuang dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.03/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRISyariah Tbk serta Izin Perubahan Nama dengan Menggunakan Izin Usaha PT Bank BRISyariah Tbk menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sebagai akibat hukum dari penggabungan tersebut untuk selanjutnya hak dan kewajiban PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah diambil alih oleh dan menjadi hak dan kewajiban dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Penggabungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan penetrasi aset syariah dan meningkatkan daya saing sehingga dapat bersaing secara global dengan 10 (sepuluh) bank syariah terbesar di dunia dengan didukung modal dan aset, sumber daya manusia, sistem teknologi informasi dan produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah. Dan penggabungan ini juga telah menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah tersebut sehingga mampu menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan jaringan yang lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, yang didirikan berdasarkan Akta nomor 4 tanggal 3 April 1969 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Nomor 38 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Kota Jakarta Selatan yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan Nomor AHU-0006268.AH.01.02.TAHUN2021 tanggal 1 Februari 2021 yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 1 Februari 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0061498, yang terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 37 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024.

B. STRUKTUR PERMODALAN

Susunan Pemegang Saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. per 30 Juni 2024 berdasarkan perubahan Anggaran Dasar Bank melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024 dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024. Laporan Bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Saham Dengan Nilai Nominal Rp500,- (lima ratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar			
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	
Saham Seri B	79.999.999.999	39.999.999.999.500	
Jumlah Modal Dasar	80.000.000.000	40.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Saham Seri A Dwiwarna			
1. Negara Republik Indonesia	1	500	0,0
Saham Seri B			
1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	23.740.608.436	11.870.304.218.000	51,47
2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10.720.230.418	5.360.115.209.000	23,24
3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	15,38
4. Masyarakat	4.575.659.628	2.287.829.814.000	9,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	46.129.260.138	23.064.630.069.000	100,00
Saham dalam Portepel	33.870.739.862	16.935.369.931.000	

C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 38 tanggal 17 Mei 2024 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.09-0214075 tanggal 13 Juni 2024, susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Muliaman D. Hadad
Wakil Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Adiwarmanto Azwar Karim
Komisaris	: Suyanto
Komisaris	: Masduki Baidlowi
Komisaris	: Fauzi*
Komisaris	: Nazaruddin*
Komisaris	: Abu Rokhmad
Komisaris Independen	: Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	: Mohamad Nasir
Komisaris Independen	: Felicitas Tallulembang*

Direksi

Direktur Utama	: Hery Gunardi
Wakil Direktur Utama	: Bob Tyasika Ananta
Direktur Retail Banking	: Harry Gusti Utama*
Direktur Finance & Strategy	: Ade Cahyo Nugroho
Direktur Sales & Distribution	: Anton Sukarna
Direktur Compliance & Human Capital	: Tribuana Tunggadewi
Direktur Wholesale Transaction Banking	: Zaidan Novari
Direktur Treasury & International Banking	: Ari Rizaldi*
Direktur Information Technology	: Saladin D. Effendi
Direktur Risk Management	: Grandhis Helmi Harumansyah

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	: Prof. Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
Anggota	: Dr. KH. Mohamad Hidayat, MBA., M.H.
Anggota	: Dr. H. Oni Sahroni, MA
Anggota	: Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., M.H., M.Ag.*
Anggota	: Dr. KH. Abdul Ghofur Maimoen, M.A.*

*diangkat dalam RUPS Tahunan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal 17 Mei 2024 dan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK

D. KEGIATAN USAHA

Bidang usaha PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Indonesia Tbk No. 37 tanggal 17 Mei 2024 yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035266.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 13 Juni 2024 dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat nomor AHU-AH.01.03-0145286 tanggal 13 Juni 2024., dibuat di hadapan Ashoya Ratam, SH, MKn, Notaris di Jakarta adalah:

- Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyabittamilik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan pengambilalihan hutang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain wakalah, hawalah, kafalah dan rahn;
- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah;
- Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;

- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
- Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
- Memberikan fasilitas letter of credit atau Bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Menyenggarakan kegiatan atau produk Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Semua kegiatan usaha menurut Anggaran Dasar telah dijalankan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Bank.

E. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Bahwa Sukuk diterbitkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum. dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Penerbitan Sukuk, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- memantau perkembangan pengelolaan kegiatan Perseroan berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;
- mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan Kontrak Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Kontrak Perwaliamanatan;
- melaksanakan hasil keputusan rapat umum pemegang Sukuk sesuai dengan tanggung jawabnya;
- mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk, jika terdapat harta yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk;
- memantau pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan atau Agen Pembayaran kepada pemegang Sukuk;
- mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan Efek;
- mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jaminan, jika terdapat perubahan nilai atas jaminan; dan
- mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Sukuk.

F. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan Perjanjian Penerbitan Sukuk, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
- pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di pasar modal;
- Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau keputusan RUPSI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Atas permintaan para Pemegang Sukuk Ijarah;
- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- Atas permintaan Wali Amanat, dalam hal Wali Amanat mengundurkan diri atau Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan, maka Wali Amanat dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan.

G. LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Berikut ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian PT Bank Syariah Indonesia Tbk pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

No	Posisi keuangan	31 Des 23	31 Des 22
Aset			
1	Kas	5.255.841	4.951.469
2	Penempatan pada Bank Indonesia	32.440.778	31.778.458
3	Penempatan pada Bank Lain	2.074.473	867.492
4	Tagihan spot dan forward	-	-
5	Surat Berharga yang dimiliki	71.551.526	59.475.906
6	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	-	-
7	Tagihan akseptasi	431.228	481.403
8	Piutang	147.405.182	133.999.826
	a. Piutang murabahah	135.879.671	124.284.807
	b. Piutang istishna	30	132
	c. Piutang multijasa	207.320	-
	d. Piutang Qardh	11.307.081	9.701.609
	e. Piutang sewa	11.080	13.278
9	Pembiayaan Bagi Hasil	90.097.330	71.631.908
	a. Mudharabah	1.881.133	1.041.397
	b. Musyarakah	88.216.197	70.590.511
	c. Lainnya	-	-

No	Posisi keuangan	31 Des 23	31 Des 22
10	Pembiayaan sewa	2.190.107	1.484.573
11	Penyertaan modal	-	-
12	Aset Keuangan Lainnya	1.690.542	1.759.955
13	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	9.846.025	9.229.410
14	Salam	-	-
15	Aset Istishna dalam penyelesaian Termin Istishna	-	-
16	Persediaan	4.036	11.645
17	Aset tidak berwujud	665.915	258.687
18	Aset tetap dan inventaris	4.524.803	4.861.000
19	Aset non produktif	9.403	9.403
	a. Properti terbengkalai	9.403	9.403
	b. Agunan yang diambil alih	-	-
	c. Rekening tunda	-	-
	d. Aset antar kantor	-	-
20	Aset lainnya	5.128.985	3.385.123
	Total Aset	353.624.124	305.727.438
Liabilitas			
1	Dana Simpanan Wadiah	67.873.898	66.012.257
	a. Giro	20.847.524	21.797.852
	b. Tabungan	47.026.374	44.214.405
2	Dana Investasi non profit sharing	225.902.031	195.478.724
	a. Giro	32.353.865	22.723.088
	b. Tabungan	77.700.070	72.269.706
	c. Deposito	115.848.096	100.485.930
3	Uang elektronik	18	18
4	Liabilitas kepada Bank Indonesia	11.900.055	-
5	Liabilitas kepada Bank Lain	1.086.555	1.203.288
6	Liabilitas spot dan forward	-	-
7	Surat berharga yang diterbitkan	1.831.784	3.450.000
8	Liabilitas akseptasi	431.228	481.403
9	Pembiayaan diterima	776.250	778.375
10	Setoran jaminan	19.818	20.755
11	Liabilitas antar kantor	-	-
12	Liabilitas lainnya	5.063.366	4.797.008
13	Dana investasi profit sharing	-	-
14	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-
		314.885.003	272.221.828
Ekuitas			
15	Modal disetor	23.064.630	23.064.630
	a. Modal dasar	40.000.000	40.000.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	16.935.370	16.935.370
	c. Saham yang dibeli kembali -/-	-	-
16	Tambahan modal disetor	- 3.929.100 -	3.929.100
	a. Agio	3.381.491	3.381.491
	b. Disaglo -/-	7.310.591	7.310.591
	c. Modal sumbangan	-	-
	d. Dana setoran modal	-	-
	e. lainnya	-	-
17	Penghasilan komprehensif lain	692.146	657.957
	a. Keuntungan	692.146	713.434
	b. Kerugian -/-	-	55.477
18	Cadangan	2.236.713	1.384.677
	a. Cadangan umum	2.236.713	1.384.677
	b. Cadangan tujuan	-	-

No	Posisi keuangan	31 Des 23	31 Des 22
19	Laba/rugi	16.674.732	12.327.446
	a. Tahun tahun lalu	11.397.007	8.824.315
	b. Tahun berjalan	5.703.743	4.260.182
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	426.018	757.051
	Total Ekuitas	38.739.121	33.505.610

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah)

No	Posisi keuangan	31 Des 23	31 Des 22
	Aset		
1	Kas	5.255.841	4.951.469
2	Penempatan pada Bank Indonesia	32.440.778	31.778.458
3	Penempatan pada Bank Lain	2.074.473	867.492
4	Tagihan spot dan forward	-	-
5	Surat Berharga yang dimiliki	71.551.526	59.475.906
6	Tagihan atas Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	-	-
7	Tagihan akseptasi	431.228	481.403
8	Piutang	147.405.182	133.999.826
	a. Piutang murabahah	135.879.671	124.284.807
	b. Piutang istishna	30	132
	c. Piutang multijasa	207.320	-
	d. Piutang Qardh	11.307.081	9.701.609
	e. Piutang sewa	11.080	13.278
9	Pembiayaan Bagi Hasil	90.097.330	71.631.908
	a. Mudharabah	1.881.133	1.041.397
	b. Musyarakah	88.216.197	70.590.511
	c. Lainnya	-	-
10	Pembiayaan sewa	2.190.107	1.484.573
11	Penyertaan modal	-	-
12	Aset Keuangan Lainnya	1.690.542	1.759.955
13	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan -/-	9.846.025	9.229.410
14	Salam	-	-
15	Aset Istishna dalam penyelesaian Termin Istishna	-	-
16	Persediaan	4.036	11.645
17	Aset tidak berwujud	665.915	258.687
18	Aset tetap dan inventaris	4.524.803	4.861.000
19	Aset non produktif	9.403	9.403
	a. Properti terbengkalai	9.403	9.403
	b. Agunan yang diambil alih	-	-
	c. Rekening tunda	-	-
	d. Aset antar kantor	-	-
20	Aset lainnya	5.128.985	3.385.123
	Total Aset	353.624.124	305.727.438
	Liabilitas		
1	Dana Simpanan Wadiah	67.873.898	66.012.257
	a. Giro	20.847.524	21.797.852
	b. Tabungan	47.026.374	44.214.405
2	Dana Investasi non profit sharing	225.902.031	195.478.724
	a. Giro	32.353.865	22.723.088
	b. Tabungan	77.700.070	72.269.706
	c. Deposito	115.848.096	100.485.930
3	Uang elektronik	18	18
4	Liabilitas kepada Bank Indonesia	11.900.055	-
5	Liabilitas kepada Bank Lain	1.086.555	1.203.288
6	Liabilitas spot dan forward	-	-

No	Posisi keuangan	31 Des 23	31 Des 22
7	Surat berharga yang diterbitkan	1.831.784	3.450.000
8	Liabilitas akseptasi	431.228	481.403
9	Pembiayaan diterima	776.250	778.375
10	Setoran jaminan	19.818	20.755
11	Liabilitas antar kantor	-	-
12	Liabilitas lainnya	5.063.366	4.797.008
13	Dana investasi profit sharing	-	-
14	Kepentingan minoritas (minority interest)	-	-
		314.885.003	272.221.828
Ekuitas			
15	Modal disetor	23.064.630	23.064.630
	a. Modal dasar	40.000.000	40.000.000
	b. Modal yang belum disetor -/-	16.935.370	16.935.370
	c. Saham yang dibeli kembali -/-	-	-
16	Tambahan modal disetor	-	3.929.100
	a. Agio	3.381.491	3.381.491
	b. Disaglo -/-	7.310.591	7.310.591
	c. Modal sumbangan	-	-
	d. Dana setoran modal	-	-
	e. lainnya	-	-
17	Penghasilan komprehensif lain	692.146	657.957
	a. Keuntungan	692.146	713.434
	b. Kerugian -/-	-	55.477
18	Cadangan	2.236.713	1.384.677
	a. Cadangan umum	2.236.713	1.384.677
	b. Cadangan tujuan	-	-
19	Laba/rugi	16.674.732	12.327.446
	a. Tahun tahun lalu	11.397.007	8.824.315
	b. Tahun berjalan	5.703.743	4.260.182
	c. Dividen yang dibayarkan -/-	426.018	757.051
	Total Ekuitas	38.739.121	33.505.610

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk.
 Capital Market Services Department
 International & Financial Institution Group
 The Tower building Lantai 25
 Jl. Gatot Subroto No. 27
 Jakarta 12930
 Telepon: (021) 3040 5999
 Faksimili: (021) 3042 1888
 e-mail: maillist_capitalmarketbusiness@bankbsi.co.id
 Website: www.bankbsi.co.id

Up.: Capital Market Services Head

XIV. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSI yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSI yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, melampirkan kopi identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024 pukul 09.00 WIB dan ditutup pukul 16.00 WIB.

5. PENDAFTARAN

Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan/atau Sukuk Ijarah di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut di KSEI maka atas Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 19 November 2024.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan/atau RUPSI, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah kepada pemegang Sukuk Ijarah dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah maupun pelunasan pokok Obligasi dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah dan pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan
6. Hak untuk menghadiri RUPO dan/atau RUPSI dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO dan/atau RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO dan/atau RUPSI.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Selama Masa Penawaran Umum, Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan scan FPPO dan/atau FPPSI melalui email atau faksimili dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin Emisi Efek yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO dan/atau FPPSI diperoleh dalam bentuk *softcopy* melalui *email*.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan pesan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang ditawarkan. Tanggal penjataan akan dilakukan pada tanggal 18 November 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjataan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjataan, dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman pada peraturan Bapepam No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjataan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7., paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah dan harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 18 November 2024 (*in good funds*) pukul 16.00 WIB, dengan melakukan penyetoran pada rekening di bawah ini:

Obligasi:

<p>PT Bahana Sekuritas Bank CIMB Niaga Cabang: Graha CIMB Niaga No. Rekening: 800029698900 Atas Nama: PT Bahana Sekuritas</p>	<p>PT BRI Danareksa Sekuritas Bank Rakyat Indonesia Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000680.30.4 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas</p>	<p>PT CIMB Niaga Sekuritas Bank CIMB Niaga Cabang: Graha CIMB Niaga No. Rekening: 8001.6344.2600 Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas</p>	<p>PT Mandiri Sekuritas Bank Mandiri Cabang: Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas</p>
--	---	--	--

Sukuk Ijarah:

<p>PT Bahana Sekuritas Bank CIMB Niaga Syariah Cabang: Victoria No. Rekening: 860002080100 Atas Nama: PT Bahana Sekuritas</p>	<p>PT BRI Danareksa Sekuritas Bank Muamalat Cabang: Sudirman No. Rekening: 301-0070250 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas</p>	<p>PT CIMB Niaga Sekuritas Bank CIMB Niaga Cabang: Graha CIMB Niaga No. Rekening: 8600.0829.8400 Atas Nama: PT CIMB Niaga Sekuritas</p>	<p>PT Mandiri Sekuritas Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas</p>
--	---	--	---

Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada tanggal emisi. Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai dengan Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 19 November 2024 pada Rekening Perseroan, sebagai berikut:

	Obligasi	Sukuk Ijarah
Nama Bank	Bank BRI	Bank BSI
Cabang	BRI Kantor Cabang Bandung Asia Afrika	KCP Bandung Citarum
Atas Nama	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Kereta Api Indonesia
Nomor Rekening	000501004670308	8881119097

10. DISTRIBUSI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 19 November 2024, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Segera setelah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah kepada Penjamin Emisi Efek maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan.

11. PENUNDAAN ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

- a. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
 1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i) Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No.IX.A.2 lampiran 11; dan
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - iii) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - iv) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - i. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - ii. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - iii. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan Prospektus lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - iv. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

12. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat penjatahan dan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.

Apabila pencatatan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, dimana uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal diumumkan pembatalan atau penundaan penawaran umum.

Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan Obligasi, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan berupa denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan Sukuk Ijarah, maka Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan berupa Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah ditetapkan sebesar biaya riil yang dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss/al-furshah al-dha-i'ah*), yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Batasan besarnya kompensasi kerugian akibat keterlambatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keterlambatan Cicilan Imbalan Ijarah
 - Untuk Keterlambatan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp1.670.083,- (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan puluh tiga Rupiah) per hari keterlambatan.
 - Untuk Keterlambatan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp1.293.211,- (satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus sebelas Rupiah) per hari keterlambatan.
 - Untuk Keterlambatan Cicilan Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp4.797.692,- (empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua Rupiah) per hari keterlambatan.
- b. Keterlambatan Sisa Imbalan Ijarah
 - Untuk Keterlambatan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp24.926.611,- (dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus sebelas Rupiah) per hari keterlambatan.
 - Untuk Keterlambatan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp18.474.444,- (delapan belas juta empat ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) per hari keterlambatan.
 - Untuk Keterlambatan Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp67.573.125,- (enam puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu seratus dua puluh lima Rupiah) per hari keterlambatan.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan kepada para pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

13. LAIN – LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi/Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

14. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, di mana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi dan melaksanakan pembayaran Dana Sukuk Ijarah dan Cicilan Imbalan Sukuk Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah, atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

XV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada tanggal 15 November 2024 dari pukul 09.00 sampai 16:00 melalui *e-mail* para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT Bahana Sekuritas

Gedung Graha CIMB Niaga 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon: (021) 250 5678
Faximili: (021) 250 5087
Website: www.bahanasekuritas.id
Email: groupbsfixedincome@bahana.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Menara Gedung BRI II Lt.23
Jl. Jend Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faximili: (021) 2520 990
Website: bridanareksasekuritas.co.id
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT CIMB Niaga Sekuritas

Graha CIMB Niaga 25th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon : (021) 5084 7847
Faximili : (021) 5084 7848
Website: www.cimbniaga-ibk.co.id
Email : jk.dcmproject@cimbniaga-ibk.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri 1 Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jakarta, 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faximili: (021) 527 5701 / 526 3521
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisekuritas.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu berkaitan dengan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah disusun oleh Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office (MMI).

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No.: 8246/MMI-VKS/XI/2024

Jakarta, 11 November 2024

Kepada Yth.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1

Bandung 40117

Sebagai Wali Amanat Dalam Rangka:

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024:

PT BANK MEGA TBK

Menara Bank Mega Lantai 15

Jalan Kapten P. Tendean No.12-14A

Jakarta 12790

Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024:

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK (Terafiliasi)

Kantor Pusat Gedung The Tower

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 27

Jakarta 12930, Indonesia

Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan: Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024:

PT BRI DANAREKSA SEKURITAS (Terafiliasi)

Gedung BRI II, Lantai 23

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46

Jakarta 10210, Indonesia

PT MANDIRI SEKURITAS (Terafiliasi)

Menara Mandiri I, Lantai 24-25

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55

Jakarta 12190, Indonesia

PT BAHANA SEKURITAS (Terafiliasi)

Graha CIMB Niaga, Lantai 19

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58

Jakarta 12910, Indonesia

PT CIMB NIAGA SEKURITAS

Graha CIMB Niaga, Lantai 15

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58

Jakarta 12190, Indonesia

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN: OBLIGASI BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN II KERETA API INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Vyati Kartika Sari, S.H., M.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office, berkantor di Office 8, Lantai 15 Unit H, Jalan Senopati Raya No. 8B, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No. STTD.KH-13/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 03.10255, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota 201319, dan telah ditunjuk oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), sesuai dengan Perjanjian Jasa Hukum No. KL.702/VIII/7/KA-2024 tanggal 9 Agustus 2024, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan kepada masyarakat, menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan total target dana sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

f

1. Surat Berharga Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama “**Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia**” sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), yang diterbitkan secara bertahap, yaitu:
 - a. Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I, yang diberi nama Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dalam jumlah pokok obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut “**Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024**”) terdiri dari:
 - i. Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Seri A sebesar Rp437.800.000.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,7% (enam koma tujuh persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - ii. Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Seri B sebesar Rp448.360.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,0% (tujuh koma nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - iii. Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Seri C sebesar Rp613.840.000.000,00 (enam ratus tiga belas miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,1% (tujuh koma satu persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - b. Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II dan/atau tahap-tahap berikutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia yang ditawarkan dikurangi dengan jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I yang kepastian setiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II dan/atau tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia.
2. Surat Berharga Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama “**Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia**” dengan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), yang diterbitkan secara bertahap, yaitu:
 - a. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I, yang diberi nama Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dalam jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut “**Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024**”), yang terdiri dari:
 - i. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Seri A sebesar Rp116.540.000.000,00 (seratus enam belas miliar lima ratus empat puluh juta rupiah Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.808.180.000,00 (tujuh miliar delapan ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri A atau Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - ii. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Seri B sebesar Rp83.135.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar seratus tiga puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.819.450.000,00 (lima miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri B atau Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;
 - iii. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Seri C sebesar Rp300.325.000.000,00 (tiga ratus miliar tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp21.323.075.000,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Seri C atau Rp71.000.000,00 (tujuh puluh satu juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

- b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II dan/atau tahap-tahap berikutnya (jika ada), akan diterbitkan dalam jumlah sebesar selisih antara seluruh Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia yang ditawarkan dikurangi dengan jumlah Dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I yang kepastian setiap tahapnya akan ditentukan kemudian dalam Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II dan/atau tahap-tahap berikutnya (jika ada) sesuai dengan Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia.

Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia.

Dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega, Tbk sebagai Wali Amanat, yang tidak memiliki hubungan afiliasi namun memiliki hubungan kredit dengan Perseroan dengan jumlah tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) *outstanding* efek bersifat utang yang diwaliananati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.04/2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat ("**POJK No. 19/POJK.04/2020**") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliananatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 20/POJK.04/2020**"). Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 20 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 4 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 3 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 8 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Dalam rangka penawaran umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah menunjuk PT Bank Syariah Indonesia, Tbk sebagai Wali Amanat, yang memiliki hubungan afiliasi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah namun tidak memiliki hubungan kredit dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b POJK No. 19/POJK.04/2020 dan POJK No. 20/POJK.04/2020, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 No. 23 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 7 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 7 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 11 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Selanjutnya, Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas yang seluruhnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi (selanjutnya disebut "**Penjamin Pelaksana Emisi**"). PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan pengendalian secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia, sedangkan PT CIMB Niaga Sekuritas tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi telah menandatangani:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 22 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 6 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 6 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 10 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;

2. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 25 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 9 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 9 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 13 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan:

- a. Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk:
 1. Sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B.
 2. Sisanya akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagian Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A.
- b. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk:
 1. Sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagian Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A.
 2. Sisanya akan digunakan untuk pengadaan prasarana dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan berupa penataan bangunan stasiun, pembangunan rel jalur ganda, dan penataan emplasemen di Stasiun Kramasan serta prasarana pendukung lainnya.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, Perseroan telah menunjuk PT Pemingkatan Efek Indonesia (selanjutnya disebut "**Pefindo**") untuk melakukan pemingkatan atas seluruh nilai Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, Pefindo telah menerbitkan:

1. Sertifikat Pemingkatan No. RC-1026/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Periode 30 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025, dimana Pefindo memberikan peringkat *idAAA* (*Triple A*) terhadap Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia senilai maksimum Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah).
2. Sertifikat Pemingkatan No. RC-1027/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Sertifikat Pemingkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Periode 30 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025, dimana Pefindo memberikan peringkat *idAAA_(sy)* (*Triple A Syariah*) terhadap Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia senilai maksimum Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).

Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-10365/BEI.PP3/10-2024 tanggal 2 Oktober 2024 Perihal Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/POJK.04/2014**"), dalam rangka Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia, Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukungnya kepada OJK.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia ("**Pernyataan Pendaftaran**") atau lewatnya jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak: (i) tanggal

f

Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penawaran umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum, atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK telah terpenuhi.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Kereta Api Indonesia dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 Ref. No. 8233/MMI-VKS/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dan Tambahan Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Kereta Api Indonesia dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 Ref. No. 8245/MMI-VKS/XI/2024 tanggal 11 November 2024 ("**Laporan Uji Tuntas**"). Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Kereta Api Indonesia dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 Ref. No. 8234/MMI-VKS/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Bahwa dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan Tambahan Laporan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.
3. Bahwa informasi, fakta, dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dapat terpengaruh bilamana fakta-fakta dan informasi yang sebenarnya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi tersebut di atas.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup, dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak pendirian sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum ini dan (b) aspek hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada POJK No. 36/POJK.04/2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Sukuk ("**POJK No. 18/POJK.04/2015 jo. POJK No. 3/POJK.04/2018**"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK 20/POJK.04/2020**"), dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan

f

oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No. Kep/02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 ("**Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM**").

2. Sehubungan dengan penyertaan Perseroan pada perusahaan-perusahaan lain, pemeriksaan uji tuntas dari segi hukum juga kami lakukan atas perusahaan anak Perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Kami karenanya telah melakukan Uji Tuntas dari segi hukum dan memberikan laporan uji tuntas atas perusahaan anak Perseroan dan perusahaan asosiasi sebagai berikut:
 - 2.1 Uji Tuntas dari segi hukum lengkap dan Laporan Uji Tuntas Lengkap atas perusahaan anak yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham lebih dari sama dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan anak tersebut dan perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia ("**Perusahaan Anak**");
 - 2.2 Uji Tuntas dari segi hukum sesuai kebutuhan dan penjelasan ringkas atas perusahaan asosiasi yang berbentuk badan hukum Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan saham kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asosiasi tersebut ("**Perusahaan Asosiasi**"), kami melakukan pemeriksaan sesuai kebutuhan terhadap Perusahaan Asosiasi dan mengungkapkan dalam bab keabsahan penyertaan saham di perusahaan lain dalam Laporan Uji Tuntas Perseroan.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang usaha jasa perkeretaapian dan jasa penunjang lainnya terkait perkeretaapian.
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.
4. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
5. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 11 November 2024.
6. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan,

ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.

9. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
10. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta, dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 serta atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan, dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Industri transportasi perkeretaapian dimulai pada tahun 1864 ketika *Namlooze Venootschap Nederlansch Indische Spoorweg Maatschappij* membangun jalan kereta api dari Semarang ke Surakarta, Jawa Tengah. Setelah itu, tiga perusahaan lainnya ikut membangun jalur-jalur kereta api, baik di Jawa, maupun di luar Jawa. Ketiga perusahaan tersebut adalah *Staatsspoorwegen* (SS), *Verenigde Spoorwegbedrijf*, dan *Deli Spoorwegen Maatschappij*. Setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, beberapa hari kemudian dilakukan pengambilalihan stasiun dan kantor kereta api yang dikuasai Jepang. Puncaknya adalah pengambilalihan Kantor Pusat Kereta Api Bandung tanggal 28 September 1945, pada tanggal ini juga didirikan Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI).

Pada tanggal 25 Mei 1963, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1963 tentang Perusahaan Negara Kereta Api untuk membentuk Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA). Selanjutnya, pada 15 September 1971, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan), PNKA diubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA). Dengan status sebagai Perusahaan Negara dan Perusahaan Jawatan, saat itu Perusahaan beroperasi melayani masyarakat dengan dana subsidi dari Pemerintah.

Pada tanggal 30 Oktober 1990, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api. Untuk mendorong Perumka menjadi perusahaan bisnis jasa, pada tanggal 3 Februari 1998 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) merupakan suatu perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Bandung dan didirikan berdasarkan Akta Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 2 tanggal 1 Juni 1999 sebagaimana diubah dengan Akta Perbaikan No. 14 tanggal 13 September 1999, yang seluruhnya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di

f

Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-17171.HT.01.01.TH.99. tanggal 1 Oktober 1999, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 101166000151 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Bandung No. 1104/BH.10.11/XI/99, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 tanggal 14 Januari 2000, Tambahan No. 240 (“**Akta Pendirian Perseroan**”).

Pendirian Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat bagi Perseroan.

2. Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 24 tanggal 5 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0175387 tanggal 24 Juli 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0151267.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 24 Juli 2024, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 60 tanggal 26 Juli 2024, Tambahan No. 22447 (“**Akta No. 24/2024**”).

Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui perubahan Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 6), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 11), Pasal 11 ayat (5), Pasal 11 ayat (7), Pasal 11 ayat (8) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pasal 11 ayat (10) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf i, Pasal 12 ayat (5), Pasal 16 ayat (6), menambahkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 19) dan angka 20), Pasal 11 ayat (8) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, Pasal 11 ayat (1) huruf p, Pasal 11 ayat (11), Pasal 12 ayat (25) huruf a dan huruf b, Pasal 15 ayat (2) huruf b angka 15), Pasal 16 ayat (27) huruf a dan huruf b, Pasal 23 ayat (20) huruf a, dan huruf b, penyesuaian penomoran dalam Pasal 11 ayat (12) sampai dengan ayat (27) serta menyusun dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan.

Anggaran dasar yang berlaku bagi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 24/2024 di atas, yang selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar**”. Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/POJK.04/2014**”). Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 24 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perseroan, dinyatakan bahwa Perseroan berkomitmen untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan sesuai POJK No. 33/POJK.04/2014 selambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pernyataan Perseroan. Belum diaturnya ketentuan yang terdapat pada POJK No. 33/POJK.04/2014 pada Anggaran Dasar Perseroan, tidak mengurangi kewajiban Perseroan sebagai Emiten untuk tunduk pada POJK No. 33/POJK.04/2014. Dengan belum disesuaikannya ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 sebagaimana diatur dalam Pasal 41 POJK No. 33/POJK.04/2014, maka berdasarkan Pasal 38 ayat (1) POJK No. 33/POJK.04/2014, dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Perseroan.

3. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, adalah melakukan penyelenggaraan perkeretaapian, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Melakukan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan prasarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan usaha:
 - 1) Konstruksi gedung lainnya;
 - 2) Konstruksi jalan rel;

- 3) Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *fly over*, dan *underpass*;
 - 4) Konstruksi terowongan;
 - 5) Konstruksi bangunan sipil telekomunikasi untuk prasarana transportasi;
 - 6) Instalasi listrik;
 - 7) Instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api;
 - 8) Aktivitas stasiun kereta api.
- b. Melakukan penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang meliputi pengadaan, pengoperasian, perawatan, dan pengusahaan sarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan usaha:
 - 1) Reparasi lokomotif dan gerbong kereta;
 - 2) Angkutan jalan rel untuk penumpang;
 - 3) Angkutan jalan rel untuk barang;
 - 4) Angkutan jalan rel perkotaan;
 - 5) Angkutan jalan rel wisata.
 - c. Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya) suku cadang dan perlengkapannya.
 - d. Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*).
 - e. Aktivitas konsultasi transportasi.
 - f. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
 - g. Kegiatan penunjang Pendidikan.
 - h. Penanganan kargo (bongkar muat barang).
 - i. Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD).
 - j. Angkutan multimoda.
 - k. Aktivitas agen perjalanan lainnya.
 - l. Pendidikan lainnya swasta.
 - m. Pendidikan Kesehatan swasta.
 - n. Pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian.
 - o. Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya.
 - p. Usaha jasa pertambangan.
 - q. Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.
 - r. Kerjasama peningkatan akses stasiun kereta api yang bersinggungan dengan lahan milik pihak lain untuk dikembangkan dengan konsep terhubung dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan dan mendukung peningkatan pelayanan penumpang.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- a. Pergudangan dan penyimpanan.
- b. Aktivitas *cold storage*.
- c. Aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah Kawasan berikat.
- d. Pergudangan dan penyimpanan lainnya.
- e. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut.
- f. Aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau.
- g. Angkutan melalui saluran pipa.
- h. Konstruksi sentral telekomunikasi.
- i. Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya.
- j. Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri.
- k. Aktivitas pengolahan data.
- l. Portal web dan/atau *platform digital* dengan tujuan komersial.
- m. Konstruksi gedung hunian.
- n. Konstruksi gedung perkantoran.
- o. Konstruksi gedung perbelanjaan.
- p. Konstruksi gedung penginapan.
- q. Instalasi mekanikal.
- r. Instalasi konstruksi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
- s. Periklanan.
- t. Aktivitas klinik swasta.
- u. Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi.

- v. Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik.
- w. Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan.
- x. Konstruksi gedung kesehatan.
- y. Penyiapan lahan.
- z. Museum yang dikelola swasta.
- aa. Aktivitas biro perjalanan wisata.
- bb. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain dalam rangka mengembangkan proses bisnis Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum atas nama Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 141 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019, sedang dalam proses permohonan perpanjangan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Surat Perseroan No. KT.101/VIII/1/RH/KA-224 tanggal 6 Agustus 2024 perihal Permohonan Penambahan Pengoperasian Kereta Api pada Lintas Pelayanan Berbeda, Penambahan Frekuensi KA pada Lintas Pelayanan Sama dan Perpanjangan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum. Tidak terdapat konsekuensi yuridis sehubungan dengan belum diperolehnya perpanjangan Izin Operasi Sarana ini mengingat dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 141 Tahun 2019 tanggal 5 Agustus 2019, diatur bahwa Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum berlaku selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Keputusan dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun.

Seluruh perizinan yang penting dan material sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan merupakan milik Perseroan dan masih berlaku serta tidak terdapat kewajiban lebih lanjut yang harus dilakukan oleh Perseroan kecuali Perseroan harus melakukan perpanjangan apabila izin yang dimiliki oleh Perseroan akan berakhir dan melakukan pemenuhan terhadap persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh sertifikat standar. Perseroan telah memperoleh seluruh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS sesuai dengan realisasi kegiatan usaha Perseroan dan Pemerintah Daerah.

4. Pada tanggal Pendapat Hukum, struktur Permodalan Perseroan dalam 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 122 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010132.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 006 tanggal 20 Januari 2023, Tambahan No. 001881 ("**Akta No. 122/2023**") jo. Akta No. 24/2024 sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp40.000.000.000.000,00 (empat puluh triliun Rupiah) yang terbagi atas 40.000.000 (empat puluh juta) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp22.368.743.000.000,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta Rupiah) yang terbagi atas 22.368.743 (dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga) saham.

Modal Disetor : Rp22.368.743.000.000,00 (dua puluh dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang saham Perseroan telah melakukan penyeteroran modal ke dalam Perseroan sebesar:

- 4.1. Rp19.168.743.000.000,00 (sembilan belas triliun seratus enam puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta Rupiah) merupakan setoran modal sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 278 tanggal 31 Desember 2021, dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. AHU-AH.01.03 0494898 tanggal 31 Desember 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0235656.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, dan telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia No. 06 tanggal 1 April 2022, Tambahan No. 011620, yang diperoleh dari penyertaan modal oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Setoran tersebut berupa pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1984/1985 sampai dengan Tahun Anggaran 1998/1999, 1999/2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, dan 2021.

- 4.2. Rp3.200.000.000.000,00 (tiga triliun dua ratus miliar Rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 62 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, sebagaimana penyeteroran dibuktikan dengan bukti setor dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan nomor rekening 0005-01-004107-30-5 tanggal 31 Desember 2022.
5. Susunan Pemegang Saham Perseroan untuk 2 (dua) tahun terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Saham @Rp1.000.000,00	Persentase (%)
Modal Dasar	40.000.000	40.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Negara Republik Indonesia	22.368.743	22.368.743.000.000,00	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	22.368.743	22.368.743.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	17.631.257	17.631.257.000.000,00	

f

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah, telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan, dilakukan secara berkesinambungan oleh pemegang saham Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi Perseroan telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham tanggal 5 Juli 2024 sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), dan Pasal 11 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan.

6. Sesuai dengan kriteria Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**"), pengendali sesungguhnya dari Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang bukan perorangan. Berdasarkan Notulensi Rapat tanggal 10 Maret 2020, telah disepakati bersama-sama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Hukum dan HAM serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa Direksi Perseroan dalam hal ini Direktur Utama atau dapat juga anggota Direksi lainnya sebagai Pemilik Manfaat Perseroan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf f Perpres No. 13/2018 dikarenakan manfaat yang diterima oleh Direktur Utama atau Direksi adalah dalam bentuk gaji atau tantiem, sehingga menjadi jalan keluar untuk Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas yang dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pelaporan yang disampaikan oleh Perseroan pada Sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM, pemilik manfaat Perseroan adalah Direktur Utama atas nama Didiek Hartantyo. Namun demikian, Pemilik Manfaat yang telah dilaporkan oleh Perseroan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 1 Perpres No. 13/2018. Pemilik Manfaat yang dilaporkan oleh Perseroan tidak memiliki pengendalian di luar kapasitas sebagai Direktur Utama atau Direksi Perseroan sehingga apabila Didiek Hartantyo tidak lagi menjabat selaku Direktur Utama Perseroan, maka Perseroan wajib menetapkan anggota Direksi Perseroan lain sebagai Pemilik Manfaat baru. Oleh karenanya, pelaporan Pemilik Manfaat yang dilakukan oleh Perseroan hanya sebagai pemenuhan persyaratan administratif sebagaimana diwajibkan dalam Perpres No. 13/2018.

7. Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Per 31 Mei 2024, telah memiliki cadangan laba sebesar Rp9.476.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh enam juta Rupiah) atau sebesar 42,36% (empat puluh dua koma tiga enam persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Hal ini telah melebihi kewajiban cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1) UUPT.
8. Pada tanggal Pendapat Hukum, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama dan Komisaris Independen	: Said Aqil Siroj
Komisaris	: Sri Paduka Mangkoenagoro X
Komisaris	: Diah Natalisa
Komisaris	: Chairul Anwar
Komisaris	: Mohamad Risal Wasal
Komisaris Independen	: Rochadi
Komisaris Independen	: Endang Tirtana
Komisaris Independen	: Johan Bakti Porsea Sirait

Direksi

Direktur Utama	: Didiek Hartantyo
Direktur Niaga	: Hadis Surya Palapa
Direktur Operasi	: Awan Hermawan Purwadinata
Direktur Pengelolaan Prasarana	: Heru Kuswanto
Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana	: John Roberto

Direktur Keselamatan dan Keamanan	: Dadan Rudiansyah
Direktur SDM dan Umum	: Rosma Handayani
Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan	: Rudi As Aturridha
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	: Salusra Wijaya

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat tersebut di atas diangkat berdasarkan:

- a. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-236/MBU/07/2020 tanggal 14 Juli 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 84 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0297832 tanggal 21 Juli 2020 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0116960.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020, sehubungan dengan pengangkatan Salusra Wijaya selaku Direktur Keuangan Perseroan.
- b. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-28/MBU/01/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 01 tanggal 1 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0075399 tanggal 5 Februari 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0022844.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021, sehubungan dengan pengangkatan Didiek Hartantyo selaku Direktur Utama.
- c. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-48/MBU/02/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 132 tanggal 23 Februari 2021 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0143714 tanggal 5 Maret 2021 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041950.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 5 Maret 2021, sehubungan dengan pengangkatan Dadan Rudiansyah selaku Direktur Niaga dan Heru Kuswanto selaku Direktur Operasi.
- d. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-417/MBU/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 277 tanggal 31 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0494849 tanggal 31 Desember 2021, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-023559.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021, sehubungan dengan pengangkatan Endang Tirtana selaku Komisaris Independen Perseroan.

- e. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-64/MBU/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 94 tanggal 16 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.-1.03-0178368 tanggal 19 Maret 2021 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051827.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021, sehubungan dengan pengangkatan Said Aqil Siroj selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Rochadi selaku Komisaris Independen, Diah Natalisa selaku Komisaris, dan Chairul Anwar selaku Komisaris Perseroan.
- f. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-89/MBU/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Kereta Api Indonesia No. 15 tanggal 6 April 2022 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0003262 tanggal 11 April 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071077.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 April 2022, sehubungan dengan pengalihan penugasan Anwan Hermawan yang semula Direktur Pengelolaan Prasarana menjadi Direktur Operasi, Heru Kuswanto yang semula Direktur Operasi menjadi Direktur Pengelolaan Prasarana, Hadis Surya Palapa selaku Direktur Niaga.
- g. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-173/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia dan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-174/MBU/08/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 30 tanggal 5 September 2022 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0052983 tanggal 9 September 2022, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0178648.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 9 September 2022, sehubungan dengan pengangkatan Johan Bakti Porsea Sirait selaku Komisaris Independen dan Sri Paduka Mangkoenagoro X selaku Komisaris Perseroan.
- h. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-207/MBU/09/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 383 tanggal 30 September 2022 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0063053 tanggal 7 Oktober 2022 telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0200168.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Oktober 2022, sehubungan dengan pengangkatan Mohamad Risal Wasal selaku Komisaris Perseroan.

- i. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-322/MBU/11/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 50 tanggal 12 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0195208 tanggal 12 Desember 2023, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0251244.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, sehubungan dengan perubahan nomenklatur yang semula Direktur Pengelolaan Sarana menjadi Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan, Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana, pengalihan penugasan John Robertho yang semula Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha menjadi Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana Perseroan, dan pengangkatan Rudi As Aturridha selaku Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan Perseroan.
- j. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. SK-62/MBU/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 104 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0113858 tanggal 21 Maret 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0059392.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024, sehubungan dengan pengangkatan Rosma Handayani selaku Direktur SDM dan Umum, Dadan Rudiansyah selaku Direktur Keselamatan dan Keamanan Perseroan.
- k. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 191/MBU/08/2024 tanggal 2 Agustus 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 47 tanggal 16 Agustus 2024 yang dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Kota Bandung, perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0241626 tanggal 20 Agustus 2024, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0173945.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 20 Agustus 2024, sehubungan dengan pengangkatan Awan Hermawan selaku Direktur Operasi dan John Robertho selaku Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (11) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta POJK No. 33/POJK.04/2014.

Susunan Komisaris Independen yang menjabat pada tanggal Pendapat Hukum ini, telah memenuhi ketentuan jumlah susunan Komisaris Independen yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (3) POJK No. 33/POJK.04/2014.

9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. SK.U/KH.608/V/47/SAP/KA-2023 tanggal 29 Mei 2023, Perseroan telah mengangkat Raden Agus Dwinanto Budiadji sebagai Sekretaris Perusahaan.
10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara ("**Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023**"), Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK No. 55/POJK.04/2015**"), Dewan Komisaris Perseroan telah mengangkat Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 06/CH/DEKOM/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan, susunan Komite Audit Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota) : Rochadi/Komisaris Independen
Anggota : Johan Sirait/Komisaris Independen
Anggota : Endang Tirtana/Komisaris Independen
Anggota : Ernesto
Anggota : Amalia Setyanti Lestari

Pengangkatan Komite Audit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Permen BUMN No. PER 2/MBU/03/2023, Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan POJK No. 55/POJK.04/2015. Perseroan telah memiliki piagam komite audit sebagaimana dinyatakan dalam Piagam Komite Audit No. 01A/CIA/KOM/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017, yang mengatur pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota Komite Audit, yaitu tujuan dan fungsi Komite Audit, kewenangan, keanggotaan, tata cara dan prosedur kerja, penyelenggaraan rapat, program kerja tahunan, sistem pelaporan dan evaluasi. Piagam Komite Audit telah dimuat dalam *website* Perseroan yaitu pada https://ppid.kai.id/media/konten/110_piagam_audit_2017.pdf.

11. Untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ("**POJK No. 34/POJK.04/2014**"), Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 10/CH/DEKOM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota) : Said Aqil Siroj/Komisaris Utama/Komisaris Independen
Anggota : Diah Natalisa/Komisaris
Anggota : Sri Paduka Mangkoenagoro X/Komisaris
Anggota : Corina D. Riantoputra
Anggota : Satia Indrarini

Pengangkatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER 3/MBU/03/2023 dan POJK No. 34/POJK.04/2014. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah selama 3 (tiga) tahun dengan tidak mengurangi hak dan kewenangan Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 POJK No. 34/POJK.04/2014, Perseroan telah menyusun Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia No. 05/CH/DEKOM/III/2021 tentang Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi tanggal 10 Maret 2021. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi telah dimuat dalam *website* Perseroan yaitu pada https://ppid.kai.id/media/konten/110_piagamkomite.pdf.

12. Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK No. 56/POJK.04/2015**"), Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal di bawah kendali Satuan Pengawas Internal dan telah menyusun serta memberlakukan Piagam Satuan Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Direksi Perseroan No. SK.U/KG.210/III/1/KA-2024 tanggal 19

f

Februari 2024 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*). Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No. SK.U/KH.608/II/153/SAP/KA-2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pengukuhan Jabatan di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero), Direksi Perseroan telah melakukan pengukuhan jabatan Dwi Erni Ratnawati sebagai *Executive Vice President of Internal Audit*.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. SK.U/KH.608/II/67/SAP/KA-2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Mutasi Di Lingkungan Perseroan, Keputusan Direksi No. SK.U/KH.608/III/41/SAP/KA-2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang Mutasi Di Lingkungan Perseroan, Keputusan Direksi No. SK.U/KH.608/IV/8/SAP/KA-2024 tanggal 5 April 2024 tentang Pengukuhan Jabatan Di Lingkungan Perseroan, dan Keputusan Direksi No. SK.U/KH.608/II/156/SAP/KA-2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pengukuhan Jabatan Di Lingkungan Perseroan, susunan satuan pengawas internal Perseroan adalah sebagai berikut:

<i>Executive Vice President Internal Audit / Kepala SPI</i>	: Dwi Erni Ratnawati
<i>Vice President General Audit 1</i>	: Bambang Purwadi Nugroho
<i>Vice President General Audit 2</i>	: Bambang Purwanto Atmadji
<i>Vice President of Evaluation, Monitoring and Administration</i>	: Andi Gumilar
<i>Vice President of Special Audit</i>	: Abdul Karim

13. Dalam rangka penerapan manajemen risiko untuk memenuhi ketentuan dalam Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Manajemen Risiko berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 09/CH/DEKOM/V/2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota)	: Chairul Anwar/ Komisaris
Anggota	: Mohamad Risal Wasal/ Komisaris
Anggota	: Elen Setiadi/ Komisaris
Anggota	: Miranti Gani
Anggota	: Handy Purnama

Pengangkatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dilakukan sesuai dengan Permen BUMN No. PER 2/MBU/03/2023. Masa jabatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko adalah 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan setiap saat berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris. Perseroan memiliki Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko sebagaimana dibuktikan dengan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko No. 27/KPMR/XI/2021 tanggal 8 November 2021, yang di antaranya mengatur keanggotaan, tugas, fungsi, dan masa jabatan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko.

14. Perseroan telah membentuk Komite Keselamatan Tingkat Pusat dan Daerah No. SK.U/KO.101/IV/1/KA-2020 tentang Pembentukan Komite Keselamatan Tingkat Pusat tanggal 1 April 2020 sebagaimana diubah oleh Keputusan Direksi Perseroan No. SK.U/KO.101/II/2/KA-2024 tanggal 22 Januari 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Pembina	: Direktur Utama
Ketua	: Direktur Keselamatan dan Keamanan
Wakil Ketua	: Direktur SDM dan Urmn
Sekretaris 1	: <i>Vice President of Safety</i>
Sekretaris 2	: <i>Vice President of Safety Standard</i>
Anggota	: Direktur Niaga
Anggota	: Direktur Operasi
Anggota	: Direktur Pengelolaan Prasarana
Anggota	: Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana
Anggota	: Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan
Anggota	: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Anggota Bidang Niaga	: <i>Executive Vice President of Freight Marketing and Sales</i>
Anggota Bidang Niaga	: <i>Executive Vice President of Passenger Transport Marketing and Sales</i>
Anggota Bidang Operasi	: <i>Executive Vice President of Operation Management</i>

f

Anggota Bidang Operasi	:	<i>Executive Vice President of Operation Personnel</i>
Anggota Bidang Sintelis	:	<i>Executive Vice President of Signalling, Telecommunication, and Electricity</i>
Anggota Bidang Jalan Rel dan Jembatan	:	<i>Executive Vice President of Track and Bridge</i>
Anggota Bidang Sarana	:	<i>Executive Vice President of Rollingstock Maintenance</i>
Anggota Bidang Sarana	:	<i>Executive Vice President of Technical Engineering and Rollingstock Asset</i>
Anggota Bidang Keamanan	:	<i>Executive Vice President of Security</i>

15. Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf p Anggaran Dasar Perseroan, Direksi Perseroan wajib memperoleh tanggapan Dewan Komisaris dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah memperoleh:

15.1 Tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris sebagaimana dinyatakan dalam Surat Tanggapan Dewan Komisaris No. 42/CF/KOM/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 perihal Tanggapan Tertulis Penerbitan Obligasi Tahun 2024,

15.2 Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. S-484/MBU/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 Perihal Persetujuan atas Rencana Penerbitan Obligasi Konvensional dan/atau Sukuk melalui Mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan II Tahun 2024 PT Kereta Api Indonesia (Persero).

16. Perseroan dalam menjalankan operasinya, memiliki Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa, dan Divisi Bertujuan Khusus dengan perincian sebagai berikut: 9 (sembilan) Daerah Operasi ("**Daop**"), 4 (empat) Divisi Regional ("**Divre**"), 6 (enam) Balai Yasa ("**Balai Yasa**"), 1 (satu) Divisi Bertujuan Khusus yaitu *Light Rail Transit Jabodebek*, yang tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Jaringan kerja tersebut telah memperoleh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh instansi-instansi terkait, dan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan yang dilakukan dan/atau diperoleh Perseroan yang penting dan material sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan, seluruh perizinan yang dimiliki Perseroan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan seluruhnya masih berlaku.

17. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki harta kekayaan sebagai berikut:

17.1. Aset tetap Perseroan terdiri dari Prasarana berupa tanah, bangunan, dan instalasi, Sarana berupa lokomotif, kereta, dan gerbong, dan Fasilitas berupa mesin dan peralatan, kendaraan, dan inventaris. Aset tetap yang saat ini dimiliki oleh Perseroan diperoleh dari penyertaan modal oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Kereta Api Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Kereta Api;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero); dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

17.1.1. Prasarana (Tanah, Bangunan, dan Instalasi)

Prasarana yang dimiliki oleh Perseroan berdiri di atas tanah yang tersebar di 9 (sembilan) Daop dan 4 (empat) Divre dengan bukti hak kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai, Sertifikat Hak Guna Bangunan, dan Sertifikat Hak Pengelolaan. Tanah tersebut umumnya digunakan untuk, antara lain, kantor Perseroan, stasiun kereta api, pemberhentian dengan layanan, emplasemen dan balai yasa.

Seluruh sertipikat hak atas tanah terdaftar atas nama Perseroan, masih berlaku dan telah dilengkapi dengan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prasarana berupa tanah beserta bangunan tersebut tidak sedang dibebani hak tanggungan, dan tidak dalam status sengketa atau perkara. Pemilikan dan/atau penguasaan prasarana berupa tanah beserta bangunan telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

17.1.2. Sarana (Lokomotif, Kereta, dan Gerbong)

Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki Sarana berupa (i) 5 (lima) unit Lokomotif Uap, (ii) 582 (lima ratus delapan puluh dua) unit Lokomotif Diesel, (iii) 2.467 (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh) unit kereta penumpang, (iv) 213 (dua ratus tiga belas) unit kereta rel diesel dimana 6 (enam) unit di antaranya difungsikan sebagai *rail clinic*, (v) 203 (dua ratus tiga) unit kereta rel listrik, (vi) 198 (seratus sembilan puluh delapan) unit *light rail transit*, dan (vii) 9.957 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh tujuh) Gerbong.

Kepemilikan Sarana oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana tersebut bebas dari sengketa dan tidak sedang menjadi agunan kecuali terhadap:

- a. 600 (enam ratus) unit Gerbong Buka, 600 (enam ratus) unit Gerbong Datar, dan 1.213 (seribu dua ratus tiga belas) unit Gerbong Datar, dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 6 November 2012, dibuat di hadapan Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Bandung, sebagaimana terakhir diubah dengan Perubahan Kedelapan atas Perjanjian Kredit No: 374/Add-KCK/2022;
- b. 1.200 (seribu dua ratus) unit Gerbong Buka, 1.200 (seribu dua ratus) unit Gerbong Datar dan 144 (seratus empat puluh empat) unit Lokomotif Diesel, dijaminkan kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sehubungan dengan Akta Perjanjian Kredit Investasi Pengadaan 144 Unit Lokomotif dan 2.400 Unit Gerbong (PPCW dan KKBW Kap 50 ton) No. 13 tanggal 9 Maret 2011, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir kali diubah dengan Perubahan V Perjanjian Kredit Sindikasi No. 5 (13) tanggal 8 Juli 2021; dan
- c. 50 (lima puluh) unit Lokomotif Diesel, dijaminkan kepada HSBC Bank USA, National Association dan Export-Import Bank of the United State sehubungan dengan Perjanjian Kredit No. AP087413XX tertanggal 15 Oktober 2014, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. 1 tanggal 26 Januari 2015.

Penjaminan atas sebagian Sarana milik Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi gagal bayar dan jaminan berupa sebagian Sarana milik Perseroan dieksekusi, maka hal tersebut akan berdampak material terhadap Perseroan.

17.1.3. Fasilitas (Mesin dan Peralatan, Kendaraan, dan Inventaris)

Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki fasilitas berupa mesin dan peralatan, kendaraan bermotor sebanyak 680 (enam ratus delapan puluh) unit terdiri dari 183 (seratus delapan puluh tiga) unit kendaraan roda dua, 4 (empat) unit kendaraan roda tiga, dan 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) unit kendaraan roda empat, serta inventaris.

Fasilitas berupa mesin dan peralatan, kendaraan, dan inventaris yang dimiliki Perseroan tidak sedang dibebani gadai atau jaminan fidusia, dan tidak dalam status sengketa atau perkara. Pemilikan dan/atau penguasaan fasilitas berupa mesin dan peralatan, kendaraan, dan inventaris telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

- 17.2. Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual yang telah didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa 4 (empat) merek dan 1 (satu) hak cipta. Hak Kekayaan Intelektual milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah mengajukan permohonan pendaftaran atas 1 (satu) merek yaitu "KAIPay" kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 22 Desember 2023. Selama dua bulan Masa Pengumuman di Berita Resmi Merek No. 01/P-M/II/A/2024 tanggal 3 Januari 2024 sampai 3 Maret 2024, tidak terdapat keberatan dari pihak lain, sehingga permohonan merek tersebut saat ini sedang dalam tahap Pemeriksaan Substantif. Sesuai dengan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Perseroan telah memperoleh perlindungan atas merek tersebut, walaupun belum didaftarkan atas nama Perseroan.

- 17.3. Perseroan memiliki investasi dalam bentuk deposito pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Baiturridha Pusaka. Deposito milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Perseroan telah membuat Perjanjian Kerja Bersama berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Perseroan dengan Serikat Pekerja Perseroan Periode 2024-2026 tanggal 28 Juni 2024, yang telah didaftarkan pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 4/HL.00.01/00.0000.240701012/B/VIII/2024 tentang Perjanjian Kerja Bersama antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja Kereta Api tanggal 7 Agustus 2024, yang berlaku dihitung sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 27 Juni 2026.
19. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran gaji atau upah kepada seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat, Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa, dan Divisi Bertujuan Khusus sesuai dengan perjanjian kerja dengan masing-masing tenaga kerjanya. Gaji yang dibayarkan telah melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi yang diatur dalam Keputusan Gubernur pada masing-masing provinsi dimana Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
20. Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ("**BPJS Ketenagakerjaan**") dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan ("**BPJS Kesehatan**") sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dengan Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 0900000021621 tanggal 6 April 2010 untuk karyawan Perseroan, Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. 1000000016998 tanggal 31 Agustus 2010 untuk karyawan Perseroan yang merupakan Eks Pegawai Negeri Sipil dan Perum dan Kode Badan Usaha/Entitas BPJS Kesehatan No. 01352216 tanggal 17 Desember 2014.
21. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perseroan. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, total jumlah karyawan Perseroan sebanyak 25.167 (dua puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh) orang karyawan. Seluruh karyawan Perseroan merupakan Warga Negara Indonesia, dan tidak terdapat tenaga kerja asing.

22. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, pegawai Perseroan secara bersama-sama telah membentuk wadah organisasi bernama Serikat Pekerja Kereta Api (SP Kereta Api) pada Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP.538/M/BW/1999 tanggal 30 Desember 1999 dan Serikat Pekerja Kereta Api Indonesia (SP-KAI) berdasarkan pencatatan pada Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Bukti Pencatatan No. KT.03.02.01/2222/Disnaker/IX/2023 tanggal 20 September 2023.
23. Perseroan telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pimpinan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KL.209/XI/1/KA-2022 tanggal 14 November 2022 perihal Permohonan Pencatatan Lembaga Kerjasama Bipartit, yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung No. KT.03.02.03/2223-Disnaker/XI/2022 tanggal 18 November 2022 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya. Lembaga Kerjasama Bipartit dibentuk sebagai forum komunikasi bersama dengan perwakilan karyawan Perseroan dalam rangka menentukan kebijakan, kesepakatan, dan hal-hal strategis lainnya sehubungan dengan hubungan industrial antara Perseroan dengan karyawan Perseroan.
24. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang sah pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

24.1. Penyertaan saham Perseroan secara langsung dengan kepemilikan lebih dari 50% (lima puluh persen) ("**Perusahaan Anak**") yaitu sebagai berikut:

a. PT Reska Multi Usaha

PT Reska Multi Usaha ("**PT RMU**"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Restoran Kereta Api No. 18 tanggal 2 Juli 2003, yang dibuat di hadapan Darwin Ginting, S.H., M.H., Notaris di Kabupaten Bandung, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. C-21011.HT.01.01.TH.2003 tanggal 4 September 2003 dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 101115509567 tanggal 15 September 2003, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23, Tambahan No. 2773/2004 ("**Akta Pendirian PT RMU**"), anggaran dasar PT RMU pada Akta Pendirian PT RMU telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (Sirkuler) tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Reska Multi Usaha No. 25 tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat di hadapan Julius Purnawa, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0053016.AH,01.02.Tahun 2023 tanggal 5 September 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0174341.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 5 September 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72, Tambahan No. 027520.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT RMU sejak pendirian pada tahun 2003. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 100.487 (seratus ribu empat ratus delapan puluh tujuh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp100.749.000.000,00 (seratus miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta Rupiah) atau sebesar 99,74% (sembilan puluh sembilan koma tujuh empat persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT RMU berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham PT Reska Multi Usaha No. 06 tanggal 21 September 2019 yang dibuat di hadapan Silvia Anugrahwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0342387 tanggal 7 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-

f

0188426.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT RMU masih beroperasi.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Akta Pendirian Perseroan, dalam rangka pendirian dan penyertaan pada PT RMU, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. S-55/M-MBU/2001 tanggal 29 Oktober 2001 dan Surat No. 511/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002.

b. PT Railink

PT Railink ("**PT Railink**") PT Railink didirikan dengan nama PT Railink berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 28 September 2006 dibuat di hadapan Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No. W29-00480 HT.01.01-TH.2006 tanggal 7 Desember 2006, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 11 tanggal 6 Februari 2007, Tambahan No. 1205 ("**Akta Pendirian PT Railink**"), anggaran dasar PT Railink pada Akta Pendirian PT Railink telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Railink No. 05 tanggal 27 Januari 2023, dibuat di hadapan Ariani Lakshmijati Rachim, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Railink telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Railink No. AHU-0006548.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Railink No. AHU-AH.01.03-0017880 tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0020472.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 10, Tambahan No. 003550 ("**Akta No. 05/2023**").

Perseroan melakukan penyertaan pada PT Railink sejak pendirian pada tahun 2006. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 527.640 (lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp527.640.000.000,00 (lima ratus dua puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh juta Rupiah) atau sebesar 60% (enam puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT Railink berdasarkan Akta No. 05/2023. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT Railink masih beroperasi.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 huruf (a) Akta Pendirian Perseroan, dalam rangka pendirian dan penyertaan pada PT Railink, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-437/MBU/2006 tanggal 21 September 2006.

c. PT Kereta Commuter Indonesia

PT Kereta Commuter Indonesia ("**PT KCI**") didirikan dengan nama PT KAI Commuter Jabodetabek, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT KAI Commuter Jabodetabek No. 457 tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Ilimiawan Dekrit Supatmo, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-74707.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097249.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 16 Oktober 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52, Tambahan No. 17112 ("**Akta Pendirian PT KCI**"), anggaran dasar PT KCI pada Akta Pendirian PT KCI telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Commuter Indonesia No. 12 tanggal 13 November 2020 yang dibuat di hadapan Tri Mulyahati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0077290.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 19 November 2020 dan

1

telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193687.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 19 November 2020 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 93, Tambahan No. 043942.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT KCI sejak pendirian pada tahun 2008. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 230.000 (dua ratus tiga puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar Rupiah) atau sebesar 99,78% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh delapan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT KCI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT KAI Commuter Jabodetabek No. 73 tanggal 21 November 2014 yang dibuat di hadapan Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Bandung, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-08975.40.21.2014 tanggal 28 November 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0124272.40.80.2014 tanggal 28 November 2014 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 95, Tambahan No. 1190/L. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT KCI masih beroperasi.

Sesuai ketentuan Akta Pendirian Perseroan, dalam rangka pendirian dan penyertaan pada PT KCI Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Surat No. 386/S/KOM/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008.

d. PT Kereta Api Pariwisata

PT Kereta Api Pariwisata ("**PT KAWIS**"), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kereta Api Pariwisata No. 11 tanggal 8 September 2009 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04724.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0007022.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84 tanggal 19 Oktober 2010, Tambahan No. 34052 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian PT KAWIS**"), anggaran dasar PT KAWIS pada Akta Pendirian PT KAWIS telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KAWIS No. 77 tanggal 13 November 2020, dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., M.H., Notaris di Bandung, pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT KAWIS telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT KAWIS No. AHU-AH.01.03-0409004 tanggal 18 November 2020 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0193367.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 18 November 2020.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT KAWIS sejak pendirian pada tahun 2009. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp24.750.000.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT KAWIS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KAWIS No. 72 tanggal 21 November 2014, dibuat di hadapan Surjadi Jasin, S.H., Notaris di Bandung, pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT KAWIS telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT KAWIS No. AHU-11909.40.20.2014 tanggal 28 November 2014 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0124285.40.80.2014 tanggal 28 November 2014. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT KAWIS masih beroperasi.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka pendirian dan penyertaan pada PT KAWIS, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Komisaris No. A.429/S/KOM/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 dan dan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-535/MBU/2009 tanggal 29 Juni 2009.

e. PT Kereta Api Logistik

PT Kereta Api Logistik ("**PT KALOG**"), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kereta Api Logistik No. 10 tanggal 8 September 2009 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-51175.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069433.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 14 September 2010, Tambahan No. 18662 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian PT KALOG**"), anggaran dasar PT KALOG pada Akta Pendirian PT KALOG telah diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Sirkuler) PT Kereta Api Logistik No. 111 tanggal 27 November 2023 yang dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0074532.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 30 November 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0241986.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 30 November 2023, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 050 tanggal 21 Juni 2024, Tambahan No. 017726.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT KALOG sejak pendirian pada tahun 2009. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 74.750 (tujuh puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp74.750.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 99,30% (sembilan puluh sembilan koma tiga puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT KALOG berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Api Logistik No. 228 tanggal 23 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Yoshshi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0209983 tanggal 28 Mei 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073938.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 9 Agustus 2019, Tambahan No. 21460. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT KALOG masih beroperasi.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka pendirian dan penyertaan pada PT KALOG, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Komisaris No. A.429/S/KOM/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-535/MBU/2009 tanggal 29 Juni 2009.

f. PT Kereta Api Properti Manajemen

PT Kereta Api Properti Manajemen ("**PT KAPM**"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 9 tanggal 8 September 2009 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Keputusan No. AHU-51501.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069922.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Oktober 2009 ("**Akta Pendirian PT KAPM**"), anggaran dasar PT KAPM pada Akta Pendirian PT KAPM telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT

KAPM No. 47 tanggal 21 Agustus 2023, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, perubahan anggaran dasar telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0049244.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 22 Agustus 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0162276.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 22 Agustus 2023, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 2023, Tambahan No. 30857.

Perseroan melakukan penyertaan pada PT KAPM sejak pendirian tahun 2009. Pada tanggal pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 272.550 (dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp272.550.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 99,63% (sembilan puluh sembilan koma enam tiga persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT KAPM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KAPM No. 02 tanggal 2 Oktober 2019, dibuat di hadapan Agung Sri Wijayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, perubahan anggaran dasar telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Keputusan No. AHU-0079321.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0187976.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 7 Oktober 2019. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT KAPM masih beroperasi.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka pendirian dan penyertaan pada PT KAPM Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana dibuktikan dengan Surat Persetujuan Komisaris No. A.429/S/KOM/V/2009 tanggal 1 Mei 2009 dan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Surat Persetujuan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. S-535/MBU/2009 tanggal 29 Juni 2009.

g. PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ("**PT PSBI**"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia No. 21 tanggal 2 Oktober 2015, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan No. AHU-2460435.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 12 Oktober 2015, didaftarkan pada Daftar Perseroan di bawah No. AHU-3564963.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Oktober 2015, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 16 Februari 2016, Tambahan No. 2590 ("**Akta Pendirian PT PSBI**"). Anggaran Dasar PT PSBI pada Akta Pendirian PT PSBI telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 67 tanggal 21 November 2022, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0086182.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 November 2022 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT PSBI telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0318397 tanggal 28 November 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0238746.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 November 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8, Tambahan No. 002689 ("**Akta No. 67/2022**").

Perseroan melakukan penyertaan pada PT PSBI sejak pendirian tahun 2015. Pada tanggal pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki 8.023.585 (delapan juta dua puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.023.585.000.000,00 (delapan triliun dua puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh lima juta Rupiah) atau sebesar 51,37% (lima puluh satu koma tiga puluh tujuh persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT PSBI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 67 tanggal 21 November 2022, dibuat di hadapan Mala Mukti,

S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT PSBI telah dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0086182.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 November 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0318397 tanggal 28 November 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0238746.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 November 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 8, Tambahan No. 002689. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT PSBI masih beroperasi.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat 10 huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka pendirian dan penyertaan pada PT PSBI, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. 07/CG/KOM/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-625/MBU/10/2015 tanggal 2 Oktober 2015.

- 24.2. PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek ("**PT MITJ**"), suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek No. 11 tanggal 11 Februari 2020 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0008856.AH.01.01.Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029043.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 12 Februari 2020, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 30 Juni 2020, Tambahan No. 23378 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian PT MITJ**"). Anggaran Dasar PT MITJ pada Akta Pendirian PT MITJ telah diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek No. 14 tanggal 15 September 2023 dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0064383.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023, Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0132086 tanggal 23 Oktober 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0211097.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023, telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 86, Tambahan No. 33536 ("**Akta PT MITJ No. 14/2023**").

Perseroan melakukan penyertaan pada PT MITJ sejak pendirian pada tahun 2020. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki 66.150 (enam puluh enam ribu seratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp66.150.000.000,00 (enam puluh enam miliar seratus lima puluh juta Rupiah) atau sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh PT MITJ berdasarkan Akta PT MITJ No. 14/2023. Pada tanggal Pendapat Hukum, PT MITJ masih beroperasi. PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) dan Perseroan secara bersama-sama mengendalikan PT MITJ dengan komposisi: (i) PT Mass Rapid Transit Jakarta memiliki sebesar 51% saham pada PT MITJ; dan (ii) Perseroan memiliki sebesar 49% saham pada PT MITJ.

25. Akta pendirian dan perubahan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah dibuat secara sah dan memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan instansi terkait serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

Beberapa perubahan anggaran dasar PT RMU, PT KAPM dan PT KAWIS, belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 40/2007, pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga tidak ada konsekuensi hukum terhadap PT RMU, PT KAPM dan PT KAWIS, akibat

belum diumumkannya beberapa perubahan anggaran dasar PT RMU, PT KAPM dan PT KAWIS. Namun demikian, sepanjang belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara maka perubahan anggaran dasar tersebut belum mengikat pihak ketiga, melainkan hanya berlaku bagi setiap pemegang saham, anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT RMU, PT KAPM dan PT KAWIS.

26. Perusahaan Anak, kecuali PT Railink dan PT PSBI, telah memenuhi kewajiban cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) UUP. PT Railink dan PT PSBI masih membukukan rugi sehingga sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) UUP belum diwajibkan untuk menyisihkan cadangan.
27. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak sebagaimana diatur pada Pasal 3 anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak telah disesuaikan dengan Peraturan KBLI 2020. Perusahaan Anak telah menyesuaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi NIB OSS-RBA sesuai dengan PP No. 5 Tahun 2021.
28. Para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, telah diangkat dengan sah sesuai ketentuan anggaran dasar masing-masing Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.
29. Permodalan pada Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dan dilengkapi dengan bukti setoran yang sah dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku utamanya Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUP.
30. Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dalam menjalankan kegiatan usaha telah memperoleh seluruh izin-izin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS sesuai dengan realisasi kegiatan usaha Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi serta yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak.
31. Perusahaan Anak telah memenuhi persyaratan-persyaratan formal di bidang perburuhan yaitu:
 - 31.1. Perusahaan Anak telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran gaji atau upah kepada seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor wilayah atau kantor cabang sesuai dengan perjanjian kerja dengan masing-masing tenaga kerjanya. Gaji yang dibayarkan telah melebihi ketentuan Upah Minimum Provinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor Perusahaan Anak berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
 - 31.2. Perusahaan Anak telah mengikutsertakan (i) seluruh tenaga kerja dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun mengikutsertakan tenaga kerja dalam program hari tua yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi, dan (ii) seluruh tenaga kerja Perusahaan Anak dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pegawai dan program bantuan kematian yang dikelola oleh Perusahaan Anak.
 - 31.3. Perusahaan Anak telah menyampaikan laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan. Perusahaan Anak wajib melakukan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan sebelum tenggat waktu terlewat. Perusahaan Anak tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.
 - 31.4. Perusahaan Anak, yaitu PT RMU, PT Railink, PT KCI, PT KAWIS, PT KALOG dan PT PSBI, telah memenuhi kewajiban untuk membuat Peraturan Perusahaan dan mendaftarkan Peraturan Perusahaan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga

Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk memperoleh pengesahan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, Perusahaan Anak yaitu PT KAPM telah membuat Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2024-2026 berdasarkan Keputusan Direksi PT KAPM No. KEP.DIR/SDM.010/VII/KAPM-2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Peraturan Perusahaan namun Peraturan Perusahaan tersebut belum disahkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, PT KAPM dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sesuai dengan Pasal 188 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- 31.5. Perusahaan Anak yaitu PT KALOG, PT Railink, dan PT KAWIS telah membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Perusahaan Anak yaitu PT RMU, PT KCI, dan PT KAPM, belum membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka berdasarkan Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang No. 13/2003 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Terhadap Perusahaan Anak yang belum membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, atau pembatalan persetujuan.

Sedangkan Perusahaan Anak yaitu PT PSBI, tidak diwajibkan untuk membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena hanya memiliki 28 (dua puluh delapan) orang karyawan.

32. Perusahaan Anak memiliki harta kekayaan yang bebas dari segala jaminan, pertanggungan, dan penyitaan dalam bentuk apapun, dimiliki dengan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilengkapi dengan dokumen yang mendukung kepemilikan harta tersebut. Pemilikan dan/atau penguasaan aset-aset oleh Perusahaan Anak telah sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak.
33. Perjanjian-perjanjian antara Perusahaan Anak dengan pihak ketiga dan Perusahaan Anak dengan pihak terafiliasi seluruhnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perusahaan Anak serta tidak terdapat ketentuan pembatasan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah, yang menghalangi pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, dan rencana penggunaan dana hasil Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.
34. Perusahaan Anak, kecuali PT PSBI, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak, seluruhnya tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara pidana dan perkara perdata lain di Pengadilan Negeri dimana Perusahaan Anak mempunyai tempat usaha, perkara perburuhan di hadapan Pengadilan Hubungan Industrial, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan perkara kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan/atau pembubaran dalam register perkara di Pengadilan Niaga serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.
35. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-

keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut (a) tidak melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan; (b) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak di dalamnya; (c) tidak terdapat ketentuan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah; dan (d) tidak terdapat ketentuan yang menghalangi rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak:

- 35.1. Perseroan dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari kreditur dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 termasuk penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 yang salah satunya untuk *refinancing*, mengingat bahwa Perseroan masih memenuhi seluruh *financial covenant* sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian-perjanjian dan dinyatakan dalam Laporan Keuangan Perseroan *Audited* per 31 Mei 2024 yang diaudit dan diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan serta surat tanggapan dari masing-masing kreditur Perseroan.
- 35.2. Perseroan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku Agen Fasilitas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk selaku Agen Fasilitas dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) selaku kreditur dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku kreditur, setelah Tanggal Emisi Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.
- 35.3. Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 termasuk penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 yang salah satunya untuk *refinancing*, mengingat tindakan tersebut tidak dibatasi dan tidak diatur dalam perjanjian-perjanjian perwaliamanatan obligasi dan sukuk yang sebelumnya telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Selain kewajiban tersebut di atas, tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan kepada pihak ketiga lainnya sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024. Tidak terdapat pembatasan (*negative covenant*) dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian pemberian fasilitas yang diterima oleh Perseroan yang dapat merugikan hak dan kepentingan pemegang obligasi dan/atau sukuk serta menghalangi penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024. Lebih lanjut, Perseroan sesuai Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Agustus 2024 menyatakan bahwa selama umur Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, tidak akan membuat pengikatan dan/atau perjanjian dengan syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan pemegang Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.

Lebih lanjut, sehubungan dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, terdapat beberapa perjanjian yang sedang dalam proses perpanjangan sebagai berikut:

- a. Perjanjian Layanan Penjualan Tiket Kereta Api dan/atau Penerimaan Pembayaran Tiket Kereta Api No. KAI.KL.705/XI/27/KA-2022 dan No. PT Klik Indomaret Sukses 407/CLG/XI/2022 tertanggal 1 November 2022, oleh dan antara PT Klik Indomaret Sukses;
- b. Perjanjian Layanan Penjualan Tiket Kereta Api dan/atau Penerimaan Pembayaran Tiket Kereta Api No. Pihak Pertama KL.705/XI/28/KA-2022 dan No. Pihak Kedua MIDI-

- KAI/BUSDEV/TIKET/XI/2022/023 tertanggal 10 November 2022, oleh dan antara Perseroan dan PT Midi Utama Indonesia Tbk;
- c. Perjanjian Layanan Penjualan Tiket Kereta Api dan/atau Penerimaan Pembayaran Tiket Kereta Api No. KAI KL.705/X/41/KA-2022 dan No. PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk SAT-KAI/ES/LAYANAN PENJUALAN TIKET KERETA API/X/2022/CM1-203A tertanggal 3 Oktober 2022, oleh dan antara Perseroan dan PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;
 - d. Perjanjian No. KL.701/XI/339/DO.9-2020 tanggal 18 November 2020 tentang Sewa Rumah Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Untuk Branch Office 9 Jember di Jalan Wijaya Kusuma KM.197 +285 Empl. Stasiun Jember Lintas Surabaya, Panurunan yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT RMU; dan
 - e. Perjanjian Sewa Aset PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.701/XI/13/KA- 2022 tanggal 16 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan PT KAWIS.

Sehubungan dengan jangka waktu perjanjian, meskipun jangka waktu dalam perjanjian-perjanjian tersebut telah habis berlaku, namun demikian Para Pihak masih mengikatkan diri pada perjanjian tersebut. Dengan adanya kondisi tersebut, Perseroan dan masing-masing pihak dalam perjanjian melakukan persetujuan diam-diam sebagaimana diatur dalam Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUH Perdata**”) dan Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 tentang Persetujuan Diam-Diam. Dengan demikian, terhadap perjanjian yang telah habis masa berlaku tersebut tetap mengikat para pihak sampai ditandatangani pembaharuan/perpanjangan atas masing-masing perjanjian tersebut sebagaimana berlaku asas konsensualitas yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata.

36. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi-obligasi dan sukuk-sukuk yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 36.1. Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 36.2. Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - 36.3. Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri B sebesar Rp1.100.000.000.000,00 (satu triliun seratus miliar Rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi
 - 36.4. Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A sebesar Rp634.000.000.000,00 (enam ratus tiga puluh empat miliar Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - 36.5. Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B sebesar Rp866.000.000.000,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar Rupiah), berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
 - 36.6. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A sebesar Rp117.350.000.000,00 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh juta Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 36.7. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri B dalam jumlah sebesar Rp382.650.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar enam ratus lima puluh juta Rupiah), berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
 - 36.8. Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri A sebesar Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

- 36.9. Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri B sebesar Rp295.500.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- 36.10. Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri C sebesar Rp337.500.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah), berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- 36.11. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri A sebesar Rp62.500.000.000,00 (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah), berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- 36.12. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri B dalam jumlah sebesar Rp127.270.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta Rupiah), berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- 36.13. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri C dalam jumlah sebesar Rp110.230.000.000,00 (seratus sepuluh miliar dua ratus tiga puluh juta Rupiah), berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.

Obligasi dan Sukuk yang diterbitkan Perseroan tidak dijamin dengan agunan khusus berupa benda, pendapatan atau aktiva lain Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia atau lembaga penjaminan lainnya. Seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas semua hutang Perseroan kepada semua kreditur yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen termasuk Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 secara *paripassu*, berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi dan sukuk yang telah diterbitkan tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari pemegang Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari masing-masing sukuk yang masih terutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing Obligasi dan/atau Sukuk tersebut, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari Wali Amanat masing-masing Obligasi dan/atau Sukuk.

37. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b POJK No. 19/POJK.04/2020 dan POJK No. 20/POJK.04/2020:
 - 37.1 PT Bank Mega Tbk tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan namun memiliki hubungan kredit dengan Perseroan yang jumlahnya tidak lebih dari 25% (dua puluh lima persen) *outstanding* efek bersifat utang yang diwaliamanati.
 - 37.2 PT Bank Syariah Indonesia Tbk memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena secara langsung dan/atau tidak langsung dikendalikan oleh pihak yang sama yaitu Negara Republik Indonesia. Perseroan tidak memiliki hubungan kredit dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.
38. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 38.1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia No. 19 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi

Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia No. 3 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia No. 3 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia No. 7 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.

38.2. Dokumen yang ditandatangani dalam rangka Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 20 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 4 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 4 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 8 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk. sebagai Wali Amanat.
- b. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 21 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 5 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 5 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 9 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.
- c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 22 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 6 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 6 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 10 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas.
- d. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga di PT Kustodian Sentral Efek No. Pendaftaran SP-088/OBL/KSEI/0824 tanggal 30 Agustus 2024, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.
- e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 26 Tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara KSEI dengan Perseroan.

38.3. Dokumen yang ditandatangani dalam rangka Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 23 tanggal 30 Agustus 2024 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 7 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 7 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 11 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh antara Perseroan dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. sebagai Wali Amanat.

- b. Akta Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 24 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 8 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 8 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Pengakuan Kewajiban Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 12 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh Perseroan.
- c. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 25 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 9 tanggal 18 September 2024, Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 9 tanggal 10 Oktober 2024, dan Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. 13 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta oleh dan antara Perseroan dengan PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas.
- d. Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di PT Kustodian Sentral Efek No. Pendaftaran SP-023/SKK/KSEI/0824 tanggal 30 Agustus 2024, dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, oleh dan antara PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Perseroan.
- e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 27 tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara KSEI dengan Perseroan.
- f. Akad Ijarah I Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. KL.705/VIII/21/KA-2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah I Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. KL.705/IX/9/KA-2024 tanggal 18 September 2024, Perubahan II dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah I No. KL.705/X/12/KA-2024 tanggal 10 Oktober 2024, dan Perubahan III dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah I No. KL.705/XI/9/KA-2024 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, antara Perseroan sebagai Mu'jir dengan Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 sebagai Musta'jir.
- g. Akad Ijarah II Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. KL.705/VIII/22/KA-2024 tanggal 30 Agustus 2024 sebagaimana diubah dengan Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah II Sehubungan Dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 No. KL.705/IX/10/KA-2024 tanggal 18 September 2024, Perubahan II dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah II No. KL.705/X/13/KA-2024 tanggal 10 Oktober 2024, dan Perubahan III dan Pernyataan Kembali Akad Ijarah II No. KL.705/XI/10/KA-2024 tanggal 11 November 2024, seluruhnya dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, antara Pemegang Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 sebagai Mu'jir dan Perseroan sebagai Musta'jir.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK. Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 UUPM, baik dengan Perusahaan Pemeringkat Efek, PT CIMB Niaga Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek, dan PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, namun Perseroan mempunyai hubungan afiliasi dengan PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas selaku Penjamin Emisi Efek serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh Negara Republik Indonesia.

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 sebagaimana disebutkan di atas, telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/POJK.04/2020.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan (ii) tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak di dalamnya.

39. Sehubungan dengan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, sesuai ketentuan POJK No.18/POJK.04/2015 jo. POJK No. 3/POJK.04/2018, Perseroan telah menunjuk AH. Azharuddin Latief dan Awang Muda Satria selaku Tim Ahli Syariah yang telah memperoleh Izin Ahli Syariah Pasar Modal sesuai (i) Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-13/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada AH. Azharuddin Latief dan (ii) Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-02/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 8 Februari 2023 tentang Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal Kepada Awang Muda Satria, keduanya ditugaskan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk mendampingi proses penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia melalui surat Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia No. 332A/KCF/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Penunjukan Tim Ahli Syariah dan telah ditunjuk oleh Perseroan sesuai Surat Penunjukan Tim Ahli Syariah No. 332A/KCF/VII/2024 tanggal 28 Agustus 2024, untuk memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah terhadap Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024. Tim Ahli Syariah telah memberikan Pernyataan Kesesuaian Syariah tanggal 11 November 2024 yang menyatakan bahwa struktur/skema beserta perjanjian dan dokumen yang dibuat dalam rangka Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
40. Perseroan telah memenuhi persyaratan pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK No. 36/POJK.04/2014 yaitu telah menjadi Emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami Gagal Bayar dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k POJK No. 36/POJK.04/2014 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Perseroan tanggal 28 Agustus 2024 dan Surat Pernyataan dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan No. 3980824/DSN/11211 tanggal 30 Agustus 2024.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 telah mematuhi persyaratan efek yang memiliki peringkat dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam Pasal 5 POJK No. 36/POJK.04/2014 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal, sebagaimana dibuktikan dengan:

- a. Sertifikat Pemeringkat No. RC-1026/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Periode 30 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025, dimana Pefindo memberikan peringkat *idAAA (Triple A)* terhadap Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahun 2024 senilai maksimum Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah).
- b. Sertifikat Pemeringkat No. RC-1027/PEF-DIR/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Periode 30 Agustus 2024 sampai dengan 1 Agustus 2025, dimana Pefindo memberikan peringkat *idAAA_(sy) (Triple A Syariah)* terhadap Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahun 2024 senilai maksimum Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).
41. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan:
- 41.1. Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk:

i. sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B, dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Surat Utang : Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B
- Jumlah utang saat ini : Rp1.000.000.000.000,00
- Jangka waktu (tenor) : 7 (tujuh) tahun
- Jatuh tempo : 21 November 2024
- Penggunaan dana : Penyelesaian proyek KA Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) dan pembelian kereta
- Suku bunga : 8,25% p.a
- Jumlah utang yang akan dibayarkan : Sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah)
- Sisa saldo utang setelah pembayaran : Sebesar Rp0,00 (nol Rupiah)
- Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur : Tidak ada
- Riwayat utang : Pada tanggal 21 November 2017, Perseroan menerbitkan Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017 Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi.
- Prosedur dan persyaratan pembayaran utang :
 1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi.
 2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.

ii. Sisanya akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagian Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Surat Utang : Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A
- Jumlah utang saat ini : Rp900.000.000.000,00
- Jangka waktu (tenor) : 5 (lima) tahun
- Jatuh tempo : 13 Desember 2024
- Tujuan penggunaan : Pembayaran sebagian saldo pokok pinjaman terutang pada PT Bank HSBC Indonesia (tidak terafiliasi)
- Suku bunga : 7,75% p.a
- Jumlah utang yang akan dibayarkan : Sekitar Rp492.468.104.078,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus empat ribu tujuh puluh delapan Rupiah). Adapun Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A tersebut akan dibayarkan menggunakan dana yang diperoleh dari Obligasi ini dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 serta kas internal Perseroan.
- Sisa saldo utang setelah pembayaran : Sekitar Rp407.531.895.922,00 (empat ratus tujuh miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus

sembilan puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua Rupiah).

Adapun Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A tersebut akan dibayarkan menggunakan dana yang diperoleh dari Obligasi ini dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 ini serta kas internal Perseroan, sehingga sisa saldo utang setelah pembayaran adalah sebesar Rp0.00 (nol Rupiah).

- Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur : Tidak ada
- Riwayat utang : Pada tanggal 13 Desember 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
- Prosedur dan persyaratan pembayaran utang :
 1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi.
 2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran bunga obligasi adalah berasal dari pendapatan operasional Perseroan.

41.2. Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi akan digunakan Perseroan untuk:

i. sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembiayaan kembali (*refinancing*) sebagian Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A, dengan rincian sebagai berikut:

- Nama Surat Utang : Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A
- Jumlah utang saat ini : Rp900.000.000.000,00
- Jangka waktu (tenor) : 5 (lima) tahun
- Jatuh tempo : 13 Desember 2024
- Tujuan penggunaan : Pembayaran sebagian saldo pokok pinjaman terutang pada PT Bank HSBC Indonesia (tidak terafiliasi)
- Suku bunga : 7,75% p.a
- Jumlah utang yang akan dibayarkan : Sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) dari Penawaran umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi total biaya emisi Sukuk Ijarah.
- Sisa saldo utang setelah pembayaran : sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).

Adapun Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A tersebut akan dibayarkan menggunakan dana yang diperoleh dari Obligasi Berkelanjutan II Kereta

f

Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah ini serta kas internal Perseroan, sehingga sisa saldo utang setelah pembayaran adalah sebesar Rp0,00 (nol Rupiah).

- Sifat hubungan afiliasi dengan kreditur : Tidak ada
- Riwayat utang : Pada tanggal 13 Desember 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi.
- Prosedur dan persyaratan pembayaran utang :
 1. Obligasi dilunasi pada tanggal pelunasan pokok obligasi.
 2. Pembayaran pokok obligasi kepada pemegang obligasi melalui pemegang rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 3. Perseroan akan menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.

- ii. Sisanya akan digunakan untuk pengadaan prasarana dalam rangka pengembangan angkutan barang di Sumatera Bagian Selatan berupa penataan bangunan stasiun, pembangunan rel jalur ganda, dan penataan emplasemen di Stasiun Kramasan serta prasarana pendukung lainnya.

Sumber dana yang digunakan untuk pembayaran cicilan imbalah ijarah adalah berasal dari pendapatan operasional Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan dalam perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penggunaan dana sebagaimana tersebut di atas. Perseroan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/POJK.04/2015").

Sesuai ketentuan Pasal 10 POJK No. 30/POJK.04/2015, Perseroan apabila melakukan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi dan/atau Sukuk, wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Obligasi dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk; (ii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk; dan (iii) menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi dan/atau Rapat Umum Pemegang Sukuk.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, masing-masing anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris telah menyatakan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, termasuk dengan penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah

Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta telah diperiksa kebenarannya oleh Konsultan Hukum.

42. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan telah memperoleh Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat No. S-10365/BEI.PP3/10-2024 tanggal 2 Oktober 2024 Perihal Persetujuan Prinsip Efek Bersifat Utang.
43. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan sedang terlibat dalam 59 (lima puluh sembilan) Perkara Perdata, 13 (tiga belas) Perkara Tata Usaha Negara, 5 (lima) Perkara Hubungan Industrial, 1 (satu) Perkara Pajak, dan 48 (empat puluh delapan) perkara pidana. Sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.

Terhadap perkara perdata sehubungan dengan aset yang sedang dihadapi oleh Perseroan, tidak memiliki dampak material terhadap Perseroan, sehingga apabila putusan tersebut tidak dimenangkan oleh Perseroan maka tidak terdapat dampak keuangan dan tidak terdapat gangguan atau hambatan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, tidak terlibat atau tidak terdaftar sebagai penggugat, tergugat, pelawan, terlawan dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum dalam suatu tindak pidana, tidak terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, tidak terlibat dalam sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, tidak terdaftar sebagai pihak dalam suatu sengketa atau gugatan perdata yang terdaftar di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau badan arbitrase lainnya, tidak terdaftar sebagai termohon maupun permohonan dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara hak kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak terlibat dalam perkara monopoli atau persaingan usaha tidak sehat serta tidak menerima somasi ataupun tuntutan dari pihak manapun.

Perkara yang sedang dihadapi Perseroan tidak memberikan dampak terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024.

44. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Laporan Uji Tuntas, dan Prospektus, antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, permodalan Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Pendapat Hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Pendapat Hukum.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR LAW OFFICE



Vyati Kartika Sari, S.H., M.H.

STTD No. STTD.KH-13/PJ-1/PM.02/2023

Tanda Pengenal Advokat No. 03.10255

Anggota HKHPM No. 201319

Tembusan:

1. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Yang terhormat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. LAPORAN KEUANGAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor independen yang telah disusun oleh KAP Amir Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia).

Halaman ini sengaja dikosongkan



**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK/ AND SUBSIDIARIES**

Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Interim Consolidated Financial Statements For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and Consolidated Financial Statements for the Years Ended December 31, 2023 and 2022

Daftar Isi	Halaman/ <u>Pages</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		<i>Interim Consolidated Financial Statements For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and Consolidated Financial Statements for the Years Ended December 31, 2023 and 2022</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim	1	<i>Interim Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Interim	3	<i>Interim Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian Interim	4	<i>Interim Consolidated Statements of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian Interim	5	<i>Interim Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim	7	<i>Notes to the Interim Consolidated Financial Statements</i>



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM UNTUK PERIODE
LIMA BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MEI 2024
DAN 2023 (TIDAK DIAUDIT) DAN LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE INTERIM
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR
THE FIVE-MONTH PERIODS ENDED AS OF MAY 31, 2024
AND 2023 (UNAUDITED) AND CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND 2022
PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We the undersigned:

1. Nama	:	Didiek Hartantyo	:	Name
Alamat kantor	:	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung	:	Office address
Alamat rumah	:	Taman Lebak Bulus III No.5 Cilandak, Jakarta Selatan	:	Residential address
Telepon	:	+62 22 4230031	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur Utama / President Director	:	Title
2. Nama	:	Salusra Wijaya	:	Name
Alamat kantor	:	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung	:	Office address
Alamat rumah	:	Jl. Turi III No 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	:	Residential address
Telepon	:	+62 22 4230039	:	Telephone
Jabatan	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management	:	Title

menyatakan bahwa:

declare that:

- | | |
|--|---|
| 1 Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian interim PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Perusahaan") dan Entitas Anaknya; | 1 We are responsible for the preparation and presentation of the interim consolidated financial statements of PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Company") and Its Subsidiaries; |
| 2 Laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2 The interim consolidated financial statements of Company and Its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards; |
| 3 a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3 a. All information in interim consolidated financial statements of Company and Its Subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner; |
| b. Laporan keuangan konsolidasian interim Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The interim consolidated financial statements of Company and Its Subsidiaries do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts; |
| 4 Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya. | 4 We are responsible for the Company and Its Subsidiaries's internal control system. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors
Bandung, 14 Oktober / October 14, 2024

Didiek Hartantyo
Direktur Utama / President Director

Salusra Wijaya
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko /
Director of Finance and Risk Management

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : 01095/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/X/2024

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 215140 1340
F +62 215140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Opini

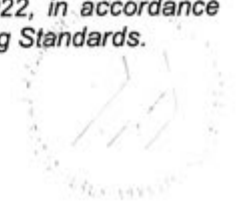
Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian interim PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian interim tanggal 31 Mei 2024 dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode lima bulan yang berakhir tanggal 31 Mei 2024 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian interim terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Mei 2024, dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian interimnya untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, dan kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Opinion

We have audited the interim consolidated financial statements of PT Kereta Api Indonesia (Persero) and its Subsidiaries ("the Group"), which comprise the interim consolidated statement of financial position as at May 31, 2024 and the consolidated statement of financial position as at December 31, 2023 and 2022, and the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated statement of changes in equity and interim consolidated statement of cash flows for the five-month period ended May 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the years ended December 31, 2023 and 2022, and notes to the consolidated financial statements, including a material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying interim consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the interim consolidated financial position of the Group as at May 31, 2024, the consolidated financial position as at December 31, 2023 and 2022, and their interim consolidated financial performance and consolidated cash flows for the five-month period ended May 31, 2024, and their consolidated financial performance and consolidated cash flows for the years ended December 31, 2023 and 2022, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

i

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim periode berjalan. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian interim terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Penyelesaian Tagihan Track Access Charge ("TAC") dan Infrastructure Maintenance Operation ("IMO")

Sesuai dengan Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Perusahaan"), maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang transportasi khususnya perkeretaapian. Sesuai peraturan yang berlaku, Grup memiliki kewajiban atas penggunaan dan pemeliharaan prasarana tersebut kepada Pemerintah berupa biaya TAC yang ditagihkan per triwulan atas penggunaan prasarana. Disamping itu, terkait dengan pemeliharaan prasarana yang digunakan tersebut, Perusahaan berhak untuk memperoleh penggantian biaya-biaya pemeliharaan berupa IMO.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 20 Tahun 2024 ("PMK 20/2024") tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2021 ("PMK 138/2021") tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal ini TAC,

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Interim Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the interim consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matter

Key audit matter are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the interim consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the interim consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matter.

Bill Settlement of Track Access Charge ("TAC") and Infrastructure Maintenance Operation ("IMO")

In accordance with PT Kereta Api Indonesia (Persero)'s ("the Company") Articles of Association, the purpose and objective of the Company are to conduct business in the transportation sector, especially railways. In accordance with applicable regulations, the Group has an obligation for the use of the infrastructure to the Government in the form of TAC fees, which are billed quarterly for the use of infrastructures. In addition, relates to the maintenance of the infrastructures used, the Company has the right to seek reimbursement for maintenance costs in the form of IMO.

According to Minister of Finance Regulation No. 20 year 2024 ("PMK 20/2024") concerning Amendments to Minister of Finance Regulation No. 138 year 2021 ("PMK 138/2021") concerning Types and Tariffs for Volatile Types of Non-Tax State Revenue and Urgent Needs that apply to the Ministry of Transportation, rates for types of Non-Tax State Revenue, in this case TAC, will be determined in the cooperation contract in



ditetapkan dalam suatu kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 33/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 53/2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, serta Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, yang berdasarkan peraturan tersebut, Perusahaan dapat mengajukan usulan kurang bayar atas IMO tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya setelah melalui evaluasi Kementerian Perhubungan dan reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Memertimbangkan penyelesaian kontrak kerjasama TAC dan tagihan IMO memerlukan waktu yang panjang untuk mendapatkan kepastian, kami menaruh perhatian signifikan atas penetapan tarif TAC dan penyelesaian tagihan IMO serta atas jumlah-jumlah terutang yang dilaporkan pada tanggal 31 Mei 2024.

Oleh karena hal-hal tersebut di atas dan signifikansi jumlah tagihan TAC dan IMO, kami memerlukan bukti audit yang lebih persuasif dan relevan dengan melakukan prosedur-prosedur audit yang mencakup, antara lain:

- Pemahaman dan pengevaluasian desain dan implementasi pengendalian internal grup terkait proses pengestimasian biaya TAC;
- Pengujian substantif bagaimana manajemen menghitung biaya TAC berdasarkan peraturan yang berlaku, meliputi pengujian terhadap relevansi dan kehandalan data yang digunakan, ketepatan penggunaan metode dan konsistensi asumsi yang mendasari estimasi tersebut;
- Pengujian akurasi perhitungan biaya TAC;
- Diskusi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait perhitungan biaya TAC dan penerapan PMK 138/2021 juncto PMK 20/2024 serta penerapan Perpres 33/2024 terkait IMO;
- Evaluasi perubahan keadaan dan kejadian setelah tanggal pengukuran biaya TAC dan IMO hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian interim ini diterbitkan; dan
- Evaluasi kecukupan pengungkapan TAC dan IMO pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian interim.

accordance with the provisions of statutory regulations. In addition, according to Presidential Decree (Perpres) No. 33/2024 concerning the Third Amendment to Presidential Regulation No. 53/2012 concerning Public Service Obligations and Pioneer Transportation Subsidies in the Railway Sector, Costs of Using State-Owned Railway Infrastructure, and Maintenance and Operation of State-Owned Railway Infrastructure, that based on the regulation, the Company can submit a proposal for underpayment of IMO for 2023 and subsequent years after going through the Ministry of Transportation's evaluation and review by Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Considering that the settlement of TAC cooperation contract and IMO invoice takes a long time to get certainty, we pay significant attention to the determination of TAC rates and the settlement of IMO invoice and the outstanding amounts reported as at May 31, 2024.

Due to above matters and the significance of the amount of the TAC and IMO billings, we require more persuasive and relevant audit evidence by performing the audit procedures, among others:

- *Understanding and evaluating the design and implementation of group internal controls regarding the process for estimating the TAC fee;*
- *Substantive testing of how the management calculates TAC fee based on applicable regulations, including testing of the relevance and reliability of the data used, the accuracy of the method used and the consistency of the assumptions on which the estimate are based;*
- *Testing the accuracy of TAC fee calculations;*
- *Discussions and consultations with relevant stakeholders regarding TAC fee calculations and implementation of PMK 138/2021 juncto PMK 20/2024 and implementation of Perpres 33/2024 related to IMO;*
- *Evaluation of changes in circumstances and events after the TAC and IMO fee measurement date to the issuance date of these interim consolidated financial statements; and*
- *Evaluation of the adequacy of disclosures of TAC and IMO in the notes to the interim consolidated financial statements.*

Pengungkapan secara Grup mengenai TAC ini dijelaskan dalam Catatan 2.v, 22, 39, 41, 52.a serta pengungkapan secara Perusahaan mengenai IMO dijelaskan pada Catatan 52.b atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir.

Hal-hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 01059/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/IX/2024 bertanggal 19 September 2024 atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup pada tanggal dan untuk periode lima bulan yang berakhir 31 Mei 2024, serta pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 dengan opini tanpa modifikasi. Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan penawaran umum efek utang, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 56 atas laporan keuangan konsolidasian interim terlampir.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim, laporan perubahan ekuitas konsolidasian interim, dan laporan arus kas konsolidasian interim untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2023, dan catatan penjelasan lainnya, tidak diaudit atau direviu dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini maupun bentuk keyakinan lainnya atas laporan tersebut.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024, serta tidak ditujukan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

The Group's disclosures regarding the TAC are explained in Notes 2.v, 22, 39, 41, 52.a and the Company's disclosures regarding the IMO are explained in Notes 52.b to the accompanying interim consolidated financial statements.

Other Matters

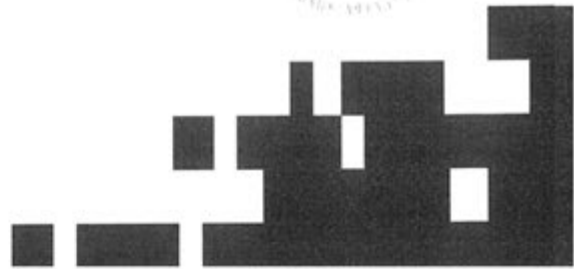
Prior to this report, we have issued our independent auditors' report No. 01059/2.1030/AU.1/06/0645-3/1/IX/2024 dated September 19, 2024 on the interim consolidated financial statements of the Group as at and for the five month ended May 31, 2024, as at and for the years ended December 31, 2023 and 2022 with an unmodified opinion. With respect to the plan of the Company to conduct public offering of debt securities, the Company has reissued its interim consolidated financial statements as described in Note 56 to the accompanying interim consolidated financial statements.

The accompanying interim consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, interim consolidated changes in equity and interim consolidated statements of cash flows for the five-month period ended May 31, 2023, and other explanatory notes, were neither audited nor reviewed and accordingly, we do not express opinion or any other form of assurance on those statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Series Issues of Obligasi Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 and Series Issues of Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2024 and is not intended to be and should not be used of any other purposes.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Interim Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the interim consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the interim consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim tersebut.

Sebagai bagian dan suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian interim, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat

In preparing the interim consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

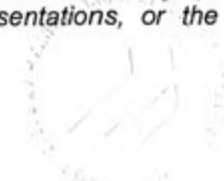
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Interim Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the interim consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these interim consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the interim consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*



melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
 - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
 - Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian interim atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
 - Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian interim mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
 - Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian interim. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
 - *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
 - *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the interim consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
 - *Evaluate the overall presentation, structure and content of the interim consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the interim consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
 - *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the interim consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

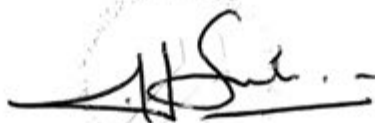
Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian interim periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the interim consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Dedy Sukrisnadi

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.0645/
Public Accountant License Number: AP.0645

Jakarta, 14 Oktober 2024/ October 14, 2024



01095



**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM**
Tanggal 31 Mei 2024,
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION**
As of May 31, 2024,
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Thousand Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31			
	Rp	2023 Rp	2022 Rp		
ASET				ASSET	
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS	
Kas dan Setara Kas	2.f, 2.g, 2.h, 2.w, 5, 42	4.549.819.332	5.138.571.482	5.695.720.193	Cash and Cash Equivalents
Dana Dibatasi Penggunaannya	2.f, 2.g, 2.i, 2.w, 6, 42	2.720.219.288	2.587.812.673	5.610.385.976	Restricted Funds
Piutang Usaha					Trade Receivables
Pihak Berelasi	2.f, 2.g, 2.w, 7, 42	1.522.305.765	1.253.114.802	934.629.745	Related Parties
Pihak Ketiga	2.w, 7	466.832.688	616.479.973	471.708.322	Third Parties
Piutang Lain-lain					Other Receivables
Pihak Berelasi	2.g, 2.w, 8, 42	8.183.000	8.183.000	--	Related Parties
Pihak Ketiga	2.w, 8	39.823.498	53.403.990	90.003.063	Third Parties
Persediaan	2.j, 9	1.310.706.580	1.528.349.171	1.145.313.941	Inventories
Pendapatan Masih akan Diterima					Accrued Income
Pihak Berelasi	2.g, 2.w, 10, 42	2.624.275.207	439.036.344	719.566.683	Related Parties
Pihak Ketiga	2.w, 10	422.667.435	324.703.696	220.050.288	Third Parties
Uang Muka	2.k, 11	64.240.770	92.819.225	57.650.571	Advances
Biaya Dibayar di Muka	2.k, 12	252.647.774	167.365.297	62.652.603	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar di Muka	2.r, 13.a	795.925.807	690.300.423	303.896.017	Prepaid Taxes
Aset Lancar Lainnya	14	10.992.438	123.701.643	26.370.549	Other Current Assets
JUMLAH ASET LANCAR		14.788.639.582	13.023.841.719	15.337.947.951	TOTAL CURRENT ASSETS
ASET TIDAK LANCAR					NON-CURRENT ASSETS
Piutang Lain-lain	2.f, 2.g, 2.w, 8, 42	7.214.834.232	--	--	Other Receivable
Uang Muka Jangka Panjang	11.b	2.965.912.058	3.093.767.915	20.640.157	Long-term Advances
Investasi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	2.d, 2.e, 15.a	4.301.935.804	5.808.370.149	6.315.362.037	Investment in Associates and Joint Ventures
Investasi Jangka Panjang	2.w, 15.b	35.747.769	35.747.769	24.176.000	Long-term Investment
Aset Pajak Tangguhan	2.r, 13.e	1.204.709.241	1.216.932.650	1.432.778.568	Deferred Tax Assets
Aset Tetap	2.m, 16	27.090.722.780	26.370.631.004	23.924.692.897	Fixed Assets
Properti Investasi	2.l, 17	266.259.362	246.905.669	126.085.555	Investment Properties
Hak Pengoperasian Aset Prasarana	2.n, 2.o, 18	30.617.492.459	30.697.675.664	23.736.944.016	Infrastructure Assets Operating Rights
Aset Takberwujud	2.y, 19	752.552.410	576.231.411	422.760.902	Intangible Assets
Aset Hak Guna	2.s, 20	84.899.422	92.152.320	53.116.074	Right-of-Use Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	21	225.500.854	212.057.103	186.725.566	Other Non-Current Assets
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		74.760.566.391	68.350.471.654	56.243.281.772	TOTAL NON-CURRENT ASSETS
JUMLAH ASET		89.549.205.973	81.374.313.373	71.581.229.723	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha					Trade Payables
Pihak Berelasi	2.g, 2.w, 22, 42	965.653.310	4.976.299.233	880.714.681	Related Parties
Pihak Ketiga	2.f, 2.w, 22	961.841.412	2.394.977.405	1.578.171.487	Third Parties
Beban Akrual	2.u, 2.w, 23	2.494.483.189	2.203.317.939	1.572.961.926	Accruals
Utang Pajak	2.r, 13.b	625.421.368	621.745.503	309.332.730	Taxes Payable
Pendapatan Diterima di Muka	2.q, 24	1.310.581.012	1.281.637.698	1.144.639.451	Unearned Revenue
Liabilitas Imbalan Kerja	2.t, 27.a	1.710.180.412	1.295.541.970	962.743.057	Employee Benefits Liabilities
Pinjaman Bank Jangka Pendek	2.g, 2.w, 25, 42	1.942.426.859	1.388.523.138	1.760.000.000	Short-term Bank Loans
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun					Current Maturities of Long-term Liabilities
Liabilitas Sewa	2.s, 20	33.231.048	36.504.861	16.563.637	Lease Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang	2.f, 2.g, 2.w, 29, 42	1.401.057.983	1.294.613.508	1.196.958.601	Long-term Loans
Pinjaman Program PEN	2.w, 28	437.500.000	437.500.000	437.500.000	PEN Program Loan
Utang Obligasi	2.w, 30	1.899.345.831	1.898.852.925	--	Bonds Payable
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	26	97.079.698	91.802.000	98.538.290	Other Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		13.878.802.122	17.921.316.180	9.958.123.860	TOTAL CURRENT LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES
Pendapatan Diterima di Muka	2.q, 24	808.675.891	834.563.297	837.174.293	Unearned Revenue
Liabilitas Imbalan Kerja	2.t, 27.b	5.768.798.768	5.618.516.876	5.197.151.974	Employee Benefits Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun					Long-term Liabilities - Net of Current Maturities
Liabilitas Sewa	2.s, 20	60.531.873	74.166.028	44.599.263	Lease Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang	2.f, 2.g, 2.w, 29, 42	31.189.538.038	20.142.027.462	18.282.631.817	Long-term Loans
Pinjaman Program PEN	2.w, 28	2.406.250.000	2.625.000.000	3.062.500.000	PEN Program Loan
Utang Obligasi	2.w, 30	2.595.044.282	2.594.469.619	4.490.760.381	Bonds Payable
Sukuk Ijarah	2.w, 31	498.702.478	498.586.194	498.307.111	Sukuk Ijarah
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	32	170.697.653	159.530.476	129.796.719	Other Long-term Liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		43.498.238.983	32.546.859.952	32.542.921.558	TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES
JUMLAH LIABILITAS		57.377.041.105	50.468.176.132	42.501.045.418	TOTAL LIABILITIES

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Pada Tanggal 31 Mei 2024,
31 Desember 2023, dan 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS
OF FINANCIAL POSITION (Continued)**
As of May 31, 2024,
December 31, 2023, and 2022
(Expressed in Thousand Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		Rp	2023 Rp	2022 Rp	
EKUITAS					EQUITY
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Entitas Induk					Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity
Modal Saham					Share Capital
Nilai Nominal Rp1.000 per Saham					Rp1,000 Par Value per Shares
Modal Dasar Sebesar 40.000.000 Saham					Authorized Capital of 40,000,000 Shares
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh pada 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 sebesar 22.368.743, dan 31 Desember 2022 sebesar 19.168.743 saham					Issued and Fully Paid as of May 31, 2024, Desember 31, 2023 amounted to 22,368,743, and December 31, 2022 amounted to 19,168,743 shares, respectively
Tambahan Penyertaan Modal Negara	33	22.368.743.000	22.368.743.000	19.168.743.000	Additional of Government Capital Investment
Saldo Laba	34	--	--	3.200.000.000	Retained Earnings
Ditentukan penggunaannya	36	9.476.398.277	9.476.398.277	7.694.357.800	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	36	1.266.852.084	76.609.318	(15.271.506)	Unappropriated
Komponen Ekuitas Lainnya		(1.036.899.053)	(1.105.074.666)	(1.060.098.895)	Other Components of Equity
Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	2.c	32.075.094.308	30.816.675.929	28.987.730.399	Equity Attributable to Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali	2.c, 38	97.070.560	89.461.312	92.453.906	Non-controlling Interests
JUMLAH EKUITAS		32.172.164.868	30.906.137.241	29.080.184.305	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		89.549.205.973	81.374.313.373	71.581.229.723	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN INTERIM**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit),
dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS
OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited),
and for the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Thousand Rupiah,
Unless Otherwise Stated)**

Catatan/ Notes	31 Mei/May 31		31 Desember/December 31			
	2024	2023	2023	2022		
	(5 Bulan/Months)	(Tidak Diaudit/ Unaudited) (5 Bulan/Months)	(12 Bulan/Months)	(12 Bulan/Months)		
	Rp	Rp	Rp	Rp		
PENDAPATAN					REVENUES	
Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya	2.g, 2. u, 2.v, 39, 42	13.893.126.717	10.612.558.415	27.764.287.041	22.967.071.664	Transportation and Other Operating Revenues
Pendapatan Konstruksi	2.v, 17, 46	135.412.371	339.021.316	7.342.248.533	2.610.567.346	Construction Revenue
Jumlah Pendapatan		14.028.539.088	10.951.579.731	35.106.535.574	25.577.639.010	Total Revenues
BEBAN POKOK PENDAPATAN					COST OF REVENUES	
Beban Angkutan dan Usaha Lainnya	2.u, 2.v, 2.g, 40, 42	(8.603.518.266)	(7.198.478.897)	(19.676.271.707)	(15.930.293.675)	Transportation and Other Operating Costs
Beban Konstruksi	2.v, 18, 46	(135.412.371)	(339.021.316)	(7.342.248.533)	(2.610.567.346)	Construction Cost
Jumlah Beban Pokok Pendapatan		(8.738.930.637)	(7.537.500.213)	(27.018.520.240)	(18.540.861.021)	Total Cost of Revenues
LABA BRUTO		5.289.608.451	3.414.079.518	8.088.015.334	7.036.777.989	GROSS PROFIT
Beban Usaha	2. u, 41	(1.510.526.028)	(1.434.857.643)	(4.227.212.786)	(3.664.532.070)	Operating Expenses
LABA USAHA		3.779.082.423	1.979.221.875	3.860.802.548	3.372.245.919	OPERATING PROFIT
Penghasilan Keuangan	2. u, 43	186.290.476	133.375.545	301.722.909	139.514.944	Finance Income
Bagian Rugi Bersih Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	2.d, 2.e, 15.a	(1.505.375.882)	(141.716.712)	(507.073.954)	(267.504.227)	Share in Net Loss of Associates and Joint Ventures
Beban Keuangan	2.o, 44	(1.012.661.453)	(502.413.649)	(1.507.438.966)	(980.572.153)	Finance Cost
Selisih Kurs	2.f, 46	170.527.630	(90.088.052)	(57.275.927)	42.673.710	Foreign Exchanges
Keuntungan (Kerugian) Lain-lain - Bersih	2.u	(163.258.557)	19.336.152	156.750.557	(95.769.893)	Other Gains (Losses) - Net
LABA SEBELUM PAJAK		1.454.604.637	1.397.715.159	2.247.487.167	2.210.588.300	INCOME BEFORE TAX
Beban Pajak Penghasilan	2.r, 13.d, 13.e	(256.749.899)	(299.341.130)	(375.939.030)	(524.599.080)	Income Tax Expense
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN		1.197.854.738	1.098.374.029	1.871.548.137	1.685.989.220	INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN						OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain yang Tidak Direklasifikasi ke Laba Rugi pada Periode Berikutnya: Pengukuran Kembali						Other Comprehensive Income (Loss) Not to be Reclassified to Profit or Loss Subsequently: Remeasurement of Defined Benefit Obligation
Liabilitas Imbalan Pasti		87.723.281	(55.521.724)	(56.850.198)	746.347.332	Income Tax Effect
Efek Pajak Penghasilan Terkait	2.r, 13.e	(19.550.392)	12.214.779	11.703.462	(165.506.775)	
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain - Setelah Pajak		68.172.889	(43.306.945)	(45.146.736)	580.840.557	Total Other Comprehensive Income (Loss) - Net of Tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		1.266.027.627	1.055.067.084	1.826.401.401	2.266.829.777	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD/YEAR
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						INCOME FOR THE PERIOD/YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk	2.c	1.190.242.766	1.098.423.405	1.873.921.301	1.782.040.477	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali	2.c, 38	7.611.972	(49.376)	(2.373.164)	(96.051.257)	Non-controlling Interest
JUMLAH		1.197.854.738	1.098.374.029	1.871.548.137	1.685.989.220	TOTAL
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik Entitas Induk	2.c	1.258.418.379	1.055.116.460	1.828.945.530	2.362.914.534	Owner of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali	2.c, 38	7.609.248	(49.376)	(2.544.129)	(96.084.757)	Non-controlling Interest
JUMLAH		1.266.027.627	1.055.067.084	1.826.401.401	2.266.829.777	TOTAL
Laba per Saham Dasar	2.x, 45	53	49	84	93	Basic Earning per Share

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these interim consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN INTERIM**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan
untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**

For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and
for the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Thousand Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/
Equity Attributable to the Owner of the Parent Entity**

Catatan/ Note	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ <i>Issued and Paid-up Capital Stock</i> Rp	Penyertaan Modal Negara dalam Proses Penerbitan Saham/ <i>State Equity Participation in Issuance Process</i> Rp	Ditentukan Penggunaannya/ <i>Appropriated</i> Rp	Belum Ditentukan Penggunaannya/ <i>Unappropriated</i> Rp	Komponen Ekuitas Lain/ <i>Other Components of Equity</i> Rp	Jumlah/ Total Rp	Kepentingan Nonpengendali/ <i>Non-Controlling interest</i> Rp	Jumlah ekuitas/ Total Equity Rp	
Saldo 1 Januari 2022	19.168.743.000	--	7.694.357.800	(1.797.311.983)	(1.616.903.232)	23.448.885.585	148.767.207	23.597.652.792	January 1, 2022
Penambahan Penyertaan Modal Negara dalam Proses Penerbitan Saham	34	--	3.200.000.000	--	--	3.200.000.000	--	3.200.000.000	<i>Additional on State Equity Equity Participation in Issuance Process</i>
Konversi Pinjaman Pemegang Saham		--	--	--	--	--	16.000.000	16.000.000	<i>Conversion of Shareholders Loan</i>
Penyesuaian atas Kepentingan Non-pengendali	38	--	--	--	(24.069.720)	(24.069.720)	24.069.720	--	<i>Adjustment of Non-Controlling Interest</i>
Dividen Entitas Anak		--	--	--	--	--	(298.264)	(298.264)	<i>Dividend of Subsidiaries</i>
Laba Tahun Berjalan	36	--	--	1.782.040.477	--	1.782.040.477	(96.051.257)	1.685.989.220	<i>Income for the Year</i>
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		--	--	--	580.874.057	580.874.057	(33.500)	580.840.557	<i>Remeasurement of Defined Benefit Obligation</i>
Saldo 31 Desember 2022	19.168.743.000	3.200.000.000	7.694.357.800	(15.271.506)	(1.060.098.895)	28.987.730.399	92.453.906	29.080.184.305	December 31, 2022
Reklasifikasi Penambahan Penyertaan Modal Negara	33, 34	3.200.000.000	(3.200.000.000)	--	--	--	--	--	<i>Reclassification Additional on State Equity</i>
Laba Periode Berjalan		--	--	1.098.423.405	--	1.098.423.405	(49.376)	1.098.374.029	<i>Income for the Period</i>
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		--	--	--	(43.306.945)	(43.306.945)	--	(43.306.945)	<i>Remeasurement of Defined Benefit Obligation</i>
Saldo 31 Mei 2023 (Tidak Diaudit)	22.368.743.000	--	7.694.357.800	1.083.151.899	(1.103.405.840)	30.042.846.859	92.404.530	30.135.251.389	May 31, 2023 (Unaudited)
Saldo 1 Januari 2023	19.168.743.000	3.200.000.000	7.694.357.800	(15.271.506)	(1.060.098.895)	28.987.730.399	92.453.906	29.080.184.305	Balance as of January 1, 2023
Reklasifikasi Penambahan Penyertaan Modal Negara	33, 34	3.200.000.000	(3.200.000.000)	--	--	--	--	--	<i>Reclassification Additional on State Equity</i>
Dividen Entitas Anak		--	--	--	--	--	(448.465)	(448.465)	<i>Dividend of Subsidiaries</i>
Laba Tahun Berjalan		--	--	1.873.921.301	--	1.873.921.301	(2.373.164)	1.871.548.137	<i>Income for the Years</i>
Pembentukan Cadangan Pengukuran Kembali	36	--	--	1.782.040.477	(1.782.040.477)	--	--	--	<i>Reserve Establishment Remeasurement of Defined Benefit Obligation</i>
Liabilitas Imbalan Pasti		--	--	--	(44.975.771)	(44.975.771)	(170.965)	(45.146.736)	
Saldo 31 Desember 2023	22.368.743.000	--	9.476.398.277	76.609.318	(1.105.074.666)	30.816.675.929	89.461.312	30.906.137.241	December 31, 2023
Laba Periode Berjalan		--	--	1.190.242.766	--	1.190.242.766	7.611.972	1.197.854.738	<i>Profit (Loss) For the Period</i>
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Pasti		--	--	--	68.175.613	68.175.613	(2.724)	68.172.889	<i>Remeasurement of Defined Benefit Obligation</i>
Saldo 31 Mei 2024	22.368.743.000	--	9.476.398.277	1.266.852.084	(1.036.899.053)	32.075.094.308	97.070.560	32.172.164.868	Balance as of May 31, 2024

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
interim consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
INTERIM**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit),
dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS OF
CASH FLOWS**

For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited),
and for the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Thousand Rupiah,
Unless Otherwise Stated)

Catatan/ Notes	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Mei 2023/ May 31, 2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited)	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	(5 Bulan/Months)	(5 Bulan/Months)	(12 Bulan/Months)	(12 Bulan/Months)	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Arus Kas dari					Cash Flows from
Aktivitas Operasi					Operating Activities
Penerimaan Kas dari Pelanggan	10.875.420.782	8.958.962.090	23.922.111.200	18.291.269.386	Cash Receipts from Customers
Pembayaran kepada Pemasok	(6.104.370.100)	(4.672.769.182)	(12.614.784.291)	(9.701.299.799)	Payments to Suppliers
Pembayaran kepada Karyawan	(2.618.416.230)	(3.180.520.688)	(7.261.135.359)	(6.469.435.899)	Payments to Employees
Penerimaan dari Pemerintah	579.762.502	390.939.216	2.893.428.499	4.043.803.506	Receipts from Government
Pembayaran kepada Pemerintah	(257.475.601)	(429.120.500)	(656.220.091)	(221.003.573)	Payments to Government
Penerimaan Bunga	186.290.476	133.440.291	192.619.984	139.527.011	Receipts from Interest Income
Penerimaan Kas dari Restitusi Pajak	13.g	51.090.496	52.410.340	240.700.252	Cash Receipt from Tax Restitution
Pembayaran Pajak Penghasilan	(552.492.969)	(252.380.984)	(452.680.995)	(261.362.844)	Payment of Income Tax
Pembayaran Beban Keuangan	(649.478.984)	(382.963.926)	(1.357.714.336)	(900.937.343)	Payment of Finance Cost
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari					Net Cash Flow Provided by
Aktivitas Operasi	1.459.239.876	616.676.812	4.718.034.952	5.161.260.697	Operating Activities
Arus Kas dari					Cash Flows from
Aktivitas Investasi					Investing Activities
Perolehan Aset Tetap	16, 52	(1.708.530.912)	(236.694.369)	(2.844.996.137)	Acquisitions of Fixed Assets
Penjualan Aset Tidak Lancar Lainnya	21	--	61.477.505	78.446.395	Disposal of Other Non-current Assets
Perolehan Hak Pengoperasian					Acquisitions of Infrastructure Assets
Aset Prasarana	16, 52	(4.362.527.861)	(463.343.246)	(3.637.895.369)	Operating Right
Penambahan Properti Investasi		(21.909.704)	--	(37.901.562)	Addition of Investment Properties
Penambahan Aset Takberwujud	19	(223.398.771)	(25.138.556)	(182.588.089)	Addition of Intangible Asset
Penambahan Aset Dalam Pelaksanaan					Addition of Assets in Progress
Penempatan Uang Muka					Placement of Paid-up
Setoran Modal	12	(15.199.073)	(2.045.434.311)	(2.728.053.311)	Capital Advance
Penempatan Investasi pada Entitas					Placement Investment in Associate
Asosiasi dan Ventura Bersama	15.a	--	--	(22.050.000)	and Joint Venture
Pinjaman diberikan kepada					Loans Granted
Entitas Asosiasi		--	--	(30.233.000)	in Associate
Penerimaan Bunga Pinjaman dari		--	--	22.050.000	Repayment of Loans from
Entitas Asosiasi		--	--	791.878.657	Associate
Penerimaan Dividen dari Entitas					Dividend Receipts from Associate
Asosiasi dan Ventura Bersama	15.a	1.058.463	--	19.807.329	and Joint Venture
Pinjaman diberikan kepada					Loans Granted to
Entitas Ventura Bersama		(7.009.384.829)	--	--	the Joint Venture
Penempatan Dana					Placement of
Dibatasi Penggunaannya	7	(137.726.254)	--	(101.878.255)	Restricted Fund
Penarikan Dana					Drawdown of
Dibatasi Penggunaannya	7	5.319.639	2.205.604.173	4.024.574.246	Restricted Fund
Penempatan Sinking Fund					Placement of Sinking Fund Jakarta -
Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung		--	--	(900.122.689)	Bandung High Speed Railway Project
Arus Kas Bersih yang Digunakan					Net Cash Flows Used in
untuk Aktivitas Investasi	(13.472.299.301)	(503.528.804)	(6.340.840.442)	(8.319.191.885)	Investing Activities
Arus Kas dari					Cash Flows from
Aktivitas Pendanaan					Financing Activities
Penerimaan Pinjaman Bank					Receipts from Short-term
Jangka Pendek	25, 52	3.126.678.432	2.959.899.620	5.636.300.935	Bank Loans
Penerimaan Pinjaman Bank					Receipts from Long-term
Jangka Panjang	29, 52	11.415.281.630	318.991.834	3.200.303.452	Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank					Payment from Short-term
Jangka Pendek	25, 52	(2.572.774.711)	(3.144.899.620)	(6.007.777.797)	Bank Loans
Pembayaran Pinjaman Bank					Payment from Long-term
Jangka Panjang	29, 52	(471.029.220)	(471.211.958)	(1.236.391.211)	Bank Loans
Pembayaran Liabilitas Sewa	52	(25.626.485)	(31.554.208)	(31.554.208)	Payment of Lease Liabilities
Pembayaran Pinjaman Program PEN	28, 52	(218.750.000)	(218.750.000)	(437.500.000)	Repayment from government loans
Penerimaan Obligasi	30	--	--	--	Receipts from Bonds
Penerimaan Sukuk	31	--	--	--	Receipts from Sukuk
Pembayaran Obligasi	30	--	--	--	Repayment of Bonds
Pembayaran Biaya Emisi Obligasi	52	--	--	--	Payment of Issuance Costs Bonds
Pembayaran Biaya Emisi Sukuk	52	--	--	--	Payment of Issuance Costs Sukuk
Penerimaan Penyertaan Modal Negara	54	--	--	--	Addition of Government Capital
Penerimaan Pinjaman					Loans addition of
Kepentingan Nonpengendali		--	--	--	Non-Controlling Interest
Pembayaran Dividen				33.897.362	Payments of Dividends
Entitas Anak		--	--	(448.465)	of Subsidiaries
Arus Kas Bersih yang Diperoleh					Net Cash Flows Provided by/
dari/(Digunakan untuk)					(Used in)
Aktivitas Pendanaan	11.253.779.645	(587.524.332)	1.122.932.706	5.002.773.735	Financing Activities

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan konsolidasian interim secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
interim consolidated financial statements as a whole

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN INTERIM**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir
pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit),
dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022
(Disajikan dalam Ribuan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
INTERIM CONSOLIDATED STATEMENTS
OF CASH FLOWS**

*For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited),
and for the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(Expressed in Thousand Rupiah,
Unless Otherwise Stated)*

Catatan/ Notes	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Mei 2023/ May 31, 2023	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
	(5 Bulan/Months)	(Tidak Diaudit/ Unaudited) (5 Bulan/Months)	(12 Bulan/Months)	(12 Bulan/Months)	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(759.279.780)	(474.376.324)	(499.872.784)	1.844.842.547	Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas Awal Periode/Tahun	5.138.571.482	5.695.720.193	5.695.720.193	3.808.203.932	Cash and Cash Equivalents at the Beginning of Period/Year
Selisih Kurs					Foreign Exchange Rate
Kas dan Setara Kas Akhir Periode/Tahun	170.527.630	(90.088.052)	(57.275.927)	42.673.714	Cash and Cash Equivalents at the End of Period/Year
	4.549.819.332	5.131.255.817	5.138.571.482	5.695.720.193	

Informasi tambahan terkait arus kas disajikan pada Catatan 52.

Additional information related to cash flows is presented in Note 52.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Perusahaan") mulanya merupakan bagian dari gabungan Perusahaan Asing Milik Belanda yang bergerak disektor perkeretaapian, didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1864 di wilayah Jawa dan Sumatera. Pada tahun 1963 secara resmi didirikan/dibentuk Peruspahaan Negara yang bergerak disektor perkeretaapian berdasarkan Peraturan Pemerintah No 22 tahun 1963, dari 12 Perusahaan Asing Kereta Api Milik Belanda yang dinasionalisasi oleh Pemerintah Republik Indonesia. (Peraturan Pemerintah No 40 dan No 41 tahun 1959).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("Perusahaan") didirikan pada tanggal 1 Juni 1999 dengan Akta Notaris No. 2 dari Notaris Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang disempurnakan dengan Akta Notaris No. 14 tanggal 13 September 1999 dari notaris yang sama, akta-akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-17171 HT.01.01.TH.99 tanggal 1 Oktober 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 4 Tambahan No. 240/2000 tanggal 14 Januari 2000.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang dicatat dalam Akta No. No. 122 tanggal 11 Januari 2023 dari Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Bandung tentang perubahan maksud dan tujuan perusahaan. Akta perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023.

Perusahaan berkantor pusat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung.

1. General

a. Establishment and General Information

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (the "Company") was originally part of combination Dutch-owned foreign company engaged in the railway sector, was established and operated commercially in 1864 in Java and Sumatra. In 1963 officially established/formed a State Company engaged in the railway sector based on Government Regulation No. 22 of 1963, from 12 Dutch-owned foreign railway companies nationalized by the Government of the Republic of Indonesia. (Government Regulation No. 40 and No. 41/1959).

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (the Company), was established based on Notarial Deed No. 2 dated June 1, 1999 of Imas Fatimah, S.H., Notary in Jakarta, and amended with Notarial Deed No. 14 dated September 13, 1999 of Imas Fatimah, S.H., in Jakarta. These deeds were approved by the Minister of Law of Republic of Indonesia as stated on his Decision Letter No. C-17171 HT.01.01.TH.99 dated October 01, 1999 and was published in State Gazette of Republic of Indonesia No. 4 Supplement No. 240/2000 dated January 14, 2000.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Statement of Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) in lieu of the Company General Meeting of Shareholders of PT Kereta Api Indonesia (Persero) according to Deed No. 122 dated January 11, 2023 of Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notary in Bandung regarding purposes and objectives of the company. The Deed was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU 01.03-0008225 dated January 17, 2023.

The Company's head office is located at Jl. Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

Seluruh saham Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

b. Maksud dan Tujuan

Sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 melakukan penyelenggaraan perkeretaapian dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdata saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyelenggaraan prasana perkeretaapian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan, dan perusahaan prasarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan usaha:
 - a) Konstruksi Gedung lainnya;
 - b) Konstruksi jalan rel;
 - c) Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over dan underpass;
 - d) Konstruksi Terowongan;
 - e) Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi;
 - f) Instalasi Listrik;
 - g) Instalasi Sinyal dan Telekomunikasi Kereta Api; dan
 - h) Aktivitas Stasiun Kereta Api.
- 2) Melakukan penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi pengadaan, pengoperasian, perawatan dan perusahaan sarana perkeretaapian yang mencakup pada kegiatan usaha:
 - a) Reparasi lokomotif dan gerbong kereta;
 - b) Angkutan jalan rel untuk penumpang;
 - c) Angkutan jalan rel untuk barang;
 - d) Angkutan jalan rel untuk perkotaan;
 - e) Angkutan jalan rel untuk wisata;

1. General (Continued)

The Company's shares of stock are wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia.

b. Purposes and Objectives

In accordance with Article 3 paragraph 1, carrying out railway operations and optimizing the use of resources owned by the Company to produce goods and/or services of high quality and strong competitiveness to obtain/pursue profits in order to increase the value of the Company by applying the principles of Limited Liability Companies.

To achieve the above purposes and objectives, the Company may perform these following activities:

- 1) Carrying out railway infrastructure that includes the construction, operation, maintenance, and business of railway infrastructure that includes business activities:
 - a) Construction of other buildings;
 - b) Construction of the rail road;
 - c) Construction of Civil Building Bridges, Overpasses, Fly Over and underpasses;
 - d) Tunnel construction;
 - e) Construction of Telecommunication Civil Buildings for Transportation Infrastructure;
 - f) Electrical Installation;
 - g) Railway Signal installation and telecommunications; and
 - h) Train Station activity;
- 2) Conduct the implementation of railway advice which includes the procurement, operation, maintenance, and business of railway facilities that include business activities:
 - a) Repairment locomotives and wagon;
 - b) Rail road transportation for passengers;
 - c) Rail road transportation for goods;
 - d) Rail road transportation for urban areas;
 - e) Rail road transportation for tours;

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

- 3) Perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya;
- 4) Perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*);
- 5) Aktivitas konsultasi transportasi;
- 6) Aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
- 7) Kegiatan penunjang pendidikan;
- 8) Penanganan kargo (bongkar muat barang);
- 9) Aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD);
- 10) Angkutan multimoda;
- 11) Aktivitas agen perjalanan lainnya;
- 12) Pendidikan lainnya swasta;
- 13) Pendidikan kesehatan swasta;
- 14) Pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian;
- 15) Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- 16) Usaha jasa pertambangan;
- 17) *Real estate* yang dimiliki sendiri atau disewa; dan
- 18) Kerjasama peningkatan akses stasiun kereta api yang bersinggungan dengan lahan milik pihak lain untuk dikembangkan dengan konsep terhubung dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi Perusahaan dan mendukung peningkatan pelayanan penumpang.

Selain kegiatan usaha utama, perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- 1) Pergudangan dan penyimpanan;
- 2) Aktivitas *cold storage*;
- 3) Aktivitas *bounded warehousing* atau wilayah kawasan berikat;
- 4) Pergudangan dan penyimpanan lainnya;
- 5) Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
- 6) Aktivitas pelayanan kepelabuhan sungai dan danau;
- 7) Angkutan melalui saluran pipa;
- 8) Konstruksi sentral telekomunikasi;
- 9) Konstruksi jaringan irigasi, komunikasi dan limbah lainnya;
- 10) Aktivitas telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri;

1. General (Continued)

- 3) *Large trade in land transportation (exclude cars, motorcycles, and others), spare parts and equipment;*
- 4) *Large trade in used and unused goods (scrap);*
- 5) *Transportation consulting activities;*
- 6) *Other management consulting activities;*
- 7) *Educational support activities;*
- 8) *Cargo handling (goods's loading and unloading);*
- 9) *Railway Cargo Expedition activities and Land Transport Expeditions (EMKA & EAD);*
- 10) *Multimodal transportation;*
- 11) *Other travel agents's activities;*
- 12) *Other private education;*
- 13) *Private health education;*
- 14) *Education and training in the railways areas;*
- 15) *Supporting activities of mining and other excavations;*
- 16) *Mining services;*
- 17) *Self-owned or leased real estate; and*
- 18) *Improvement at access to railway stations that intersect by other parties with the concept of connecting in order to increase value added for the Company and improvement of passenger services.*

Other than its core business, the company may perform its activities to optimize the resource which are owned by the Company to:

- 1) *Warehousing and storage;*
- 2) *Cold storage activities;*
- 3) *Bounded warehousing activities or bonded area areas;*
- 4) *Warehousing and other storage;*
- 5) *Marine service activities;*
- 6) *Service activities of river and lake facilities;*
- 7) *Transportation pipelines;*
- 8) *Central construction of telecommunications;*
- 9) *Construction of irrigation networks, communication and other waste;*
- 10) *Special telecommunication activities for internal purposes;*

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

- 11) Aktivitas pengolahan data;
- 12) Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial;
- 13) Konstruksi Gedung Hunian;
- 14) Konstruksi Gedung Perkantoran;
- 15) Konstruksi Gedung Perbelanjaan;
- 16) Konstruksi Gedung Penginapan;
- 17) Instalasi Mekanikal;
- 18) Instalasi konstruksi lainnya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain;
- 19) Periklanan;
- 20) Aktivitas klinik swasta;
- 21) Aktivitas pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter dan dokter gigi;
- 22) Perdagangan eceran barang obat farmasi untuk manusia di apotik;
- 23) Aktivitas pelayanan penunjang kesehatan;
- 24) Konstruksi gedung kesehatan;
- 25) Penyiapan lahan;
- 26) Museum yang dikelola swasta;
- 27) Aktivitas biro perjalanan wisata; dan
- 28) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan lain dalam rangka mengembangkan proses bisnis Perseroan.

Kegiatan utama Perusahaan saat ini adalah bergerak dalam bidang usaha pengangkutan penumpang dan/atau barang dengan kereta api, usaha pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian, serta usaha penyewaan sarana/prasarana/fasilitas yang meliputi sewa kios/gudang/ruang stasiun dan terminal peti kemas.

c. Wilayah Kerja

Dalam menjalankan kegiatan operasinya, Perusahaan memiliki Daerah Operasi, Divisi Regional, Balai Yasa, dan Divisi Bertujuan Khusus sebagai berikut:

Daerah Operasi (Daop), terdiri dari:

- 1) Daop 1, berkedudukan di Jakarta
- 2) Daop 2, berkedudukan di Bandung
- 3) Daop 3, berkedudukan di Cirebon
- 4) Daop 4, berkedudukan di Semarang
- 5) Daop 5, berkedudukan di Purwokerto
- 6) Daop 6, berkedudukan di Yogyakarta
- 7) Daop 7, berkedudukan di Madiun
- 8) Daop 8, berkedudukan di Surabaya
- 9) Daop 9, berkedudukan di Jember

1. General (Continued)

- 11) *Data processing activities;*
- 12) *Web portals and/or digital platforms for commercial purposes;*
- 13) *Residential Building's construction;*
- 14) *Office building's construction;*
- 15) *Shopping building's construction;*
- 16) *Inn Building's construction;*
- 17) *Mechanical installation;*
- 18) *Unclassified Other construction installations;*
- 19) *Advertising;*
- 20) *Private clinic activities;*
- 21) *Health care activities carried out by health workers beside of doctors and dentists;*
- 22) *Pharmaceutical drug's retail trade in human's pharmacies;*
- 23) *Health support service activities;*
- 24) *Health building's construction;*
- 25) *Land preparation;*
- 26) *Private museums;*
- 27) *Travel agencies's activities; and*
- 28) *Capital investment other companies to develop the Company's business processes.*

The Company's current main business activities are in railway transportation for passenger and/or freight, railway-based education and training services, and rolling stock/infrastructure/facility rental business including shops/warehouse/station space and container terminal.

c. Operation Regions

In conducting its business, the Company has Operating Region, Regional Division, Balai Yasa (Workshop), and Special Purpose Division as follow:

Operating Regions (Daop) consists of:

- 1) *Daop 1, located in Jakarta*
- 2) *Daop 2, located in Bandung*
- 3) *Daop 3, located in Cirebon*
- 4) *Daop 4, located in Semarang*
- 5) *Daop 5, located in Purwokerto*
- 6) *Daop 6, located in Yogyakarta*
- 7) *Daop 7, located in Madiun*
- 8) *Daop 8, located in Surabaya*
- 9) *Daop 9, located in Jember*

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Divisi Regional (Divre), terdiri dari:
1) Divre I, berkedudukan di Medan
2) Divre II, berkedudukan di Padang
3) Divre III, berkedudukan di Palembang
4) Divre IV, berkedudukan di Tanjung Karang

Regional Division (Divre), consists of:
1) *Divre I, located in Medan*
2) *Divre II, located in Padang*
3) *Divre III, located in Palembang*
4) *Divre IV, located in Tanjung Karang*

Balai Yasa terdiri dari:
1) Balai Yasa Manggarai, berkedudukan di Jakarta
2) Balai Yasa Tegal, berkedudukan di Tegal
3) Balai Yasa Yogyakarta, berkedudukan di Yogyakarta
4) Balai Yasa Gubeng, berkedudukan di Surabaya
5) Balai Yasa Lahat, berkedudukan di Lahat
6) Balai Yasa Pulubrayan, berkedudukan di Medan

Balai Yasa, consists of:
1) *Balai Yasa Manggarai, located in Jakarta*
2) *Balai Yasa Tegal, located in Tegal*
3) *Balai Yasa Yogyakarta, located in Yogyakarta*
4) *Balai Yasa Gubeng, located in Surabaya*
5) *Balai Yasa Lahat, located in Lahat*
6) *Balai Yasa Pulubrayan, located in Medan*

Divisi Bertujuan Khusus yaitu *Light Rail Transit* Jabodebek, berkedudukan di Bekasi.

Special Purpose Division is Light Rail Transit Jabodebek, located in Bekasi.

d. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Beserta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 berdasarkan Akta No. 104 tanggal 20 Maret 2024 dan Akta No. 383 tanggal 30 September 2022 dibuat di hadapan Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Bandung yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0113858 tanggal 21 Maret 2024 dan No. AHU-AH.01.09-0063053 tanggal 7 Oktober 2022 adalah sebagai berikut:

d. Board of Commissioners and Directors and Employees

The composition of the Company's Board of Commissioners as of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 based on the Deed No. 104 dated March 20, 2024 and the Deed No. 383 dated September 30, 2022 made in presence of Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notary in Bandung that have approved by the Ministry of Law and Human Rights with Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0113858 dated March 21, 2024 and No. AHU-AH.01.09-0063053 dated October 7, 2022 are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember 2023 dan 2022/ December 31, 2023 and 2022	
Dewan Komisaris			Board of Commissioners
Komisaris Utama dan Komisaris Independen	Said Aqil Siroj	Said Aqil Siroj	<i>President Commissioner and Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	--	Riza Primadi	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Rochadi	Rochadi	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Endang Tirtana	Endang Tirtana	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Johan Sirait	Johan Sirait	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris	Diah Natalisa	Diah Natalisa	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Chairul Anwar	Chairul Anwar	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Sri Paduka Mangkoenagoro X	Sri Paduka Mangkoenagoro X	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Mohamad Risal Wasal	Mohamad Risal Wasal	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Elen Setiadi	--	<i>Commissioner</i>

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

Berdasarkan Akta No. 104 tanggal 20 Maret 2024 dan No. 50 tanggal 12 Desember 2023 dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H. Notaris di Bandung yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0113858 tanggal 21 Maret 2024 dan AHU-AH.01.09-0195208 tanggal 12 Desember 2023, susunan Dewan Direksi pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

Based on the Deed No.104 dated March 20, 2024 and No. 50 dated December 12, 2023 made in presence of Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H. in Notary Bandung that have approved by the Ministry of Law and Human Rights with Decision Letter No.AHU-AH.01.09-0113858 dated March 21, 2024 and No. AHU-AH.01.09-0195208 dated December 12, 2023, the composition of the Company's Board of Directors changes as of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		Directors
		2023	2022	
Direksi				Directors
Direktur Utama	Didiek Hartantyo	Didiek Hartantyo	Didiek Hartantyo	President Director
Direktur Niaga	Hadis Surya Palapa	Hadis Surya Palapa	Hadis Surya Palapa	Director of Commercials
Direktur Operasi	Awan Hermawan Purwadinata	Awan Hermawan Purwadinata	Awan Hermawan Purwadinata	Director of Operations
Direktur Pengelolahan Prasarana	Heru Kuswanto	Heru Kuswanto	Heru Kuswanto	Director of Infrastructure Management
Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana	John Robertho	John Robertho	Eko Purwanto	Director of Strategic Planning and Rolling Stock Management
Direktur Keselamatan dan Keamanan	Dadan Rudiansyah	Sandry Pasambuna	Sandry Pasambuna	Director of Safety and Security
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	Rosma Handayani	Suparno	Suparno	Director of Human Capital and General Affairs
Direktur Pengembangan Usaha dan Kelembagaan	Rudi As Aturridha	Rudi As Aturridha	John Robertho	Director of Business Development and Institutional Relations
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Salusra Wijaya	Salusra Wijaya	Salusra Wijaya	Director of Finance and Risk Management

Susunan anggota Komite Audit pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 06/CH/DEKOM/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan No. 08/CH/DEKOM/XI/2022 tanggal 23 November 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of members of the Audit Committee as of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022, based on Decree of the Board of Commissioner No. 06/CH/DEKOM/III/2024, dated March 20, 2024 and No. 08/CH/DEKOM/XI/2022 November 23, 2022 are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember 2023 dan 2022/ December 31, 2023 and 2022		Audit Committee
Komite Audit				Audit Committee
Ketua	Rochadi	Riza Primadi	Rochadi	Chairman
Anggota	Johan Sirait	Rochadi	Johan Sirait	Member
Anggota	Ernesto	Ernesto	Ernesto	Member
Anggota	Amalia Setyanti Lestari	Amalia Setyanti Lestari	Amalia Setyanti Lestari	Member

Susunan Komite Pemantau Manajemen Risiko pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. 07/CH/DEKOM/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dan No. 09/CH/DEKOM/XI/2022 tanggal 23 November 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Risk Management Monitoring Committee as of May 31, 2024 and December 31, 2023, and 2022, based on No. 07/CH/DEKOM/III/2024 dated March 21, 2024 and No. 09/CH/DEKOM/XI/2022 dated November 23, 2022 are as follows:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember 2023 dan 2022/ December 31, 2023 and 2022	
Komite Pemantau Manajemen Risiko			Monitoring Risk Management Committee
Ketua (merangkap Anggota)	Chairul Anwar	Chairul Anwar	<i>Chairman (concurrently Member)</i>
Anggota	Mohamad Risal Wasal	Endang Tirtana	<i>Member</i>
Anggota	Elen Setiadi	Mohamad Risal Wasal	<i>Member</i>
Anggota	Miranti Gani	Miranti Gani	<i>Member</i>
Sekretaris/Anggota	Handy Purnama	Handy Purnama	<i>Secretary/Member</i>

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 03/CH/DEKOM/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

The composition of the Nomination and Remuneration Committee changes based on the Decree of Board of Commissioners No. 03/CH/DEKOM/VIII/2022 dated August 30, 2022 as follows:

	31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022/ May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022	
Komite Nominasi dan Remunerasi		Nomination and Remuneration Committee
Ketua (merangkap Anggota)	Said Aqil Siroj	<i>Chairman (concurrently Member)</i>
Anggota	Diah Natalisa	<i>Member</i>
Anggota	Sri Paduka Mangkoenagoro X	<i>Member</i>
Anggota	Corina D. Riantoputra	<i>Member</i>

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022, kepala satuan pengendali internal dan sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

As of May 31, 2024 and December 31, 2023, and 2022, the head of the internal control unit and the Company secretary are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31 2023	2022	
Satuan Pengendali Internal (SPI) dan Sekretaris Perusahaan				Internal Audit Unit (SPI) and Corporate Secretary
Ketua Satuan Pengendali Internal	Dwi Erni Ratnawati	Dwi Erni Ratnawati	Dwi Erni Ratnawati	<i>Head of Internal Audit (SPI)</i>
Sekretaris Perusahaan	Raden Agus Dwinanto Budiadji	Raden Agus Dwinanto Budiadji	Asdo Artriviyanto	<i>Corporate Secretary</i>

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah karyawan (tidak termasuk Direksi) Perusahaan dan entitas anak masing-masing sejumlah 54.015 pegawai (30.118 pegawai tetap, 23.897 pegawai tidak tetap dan alih daya), 40.755 pegawai (30.342 pegawai tetap, 10.413 pegawai tidak tetap dan alih daya), 41.448 pegawai (29.530 pegawai tetap, 11.918 pegawai tidak tetap dan alih daya) (tidak diaudit).

As of May 31, 2024, December 31, 2023 and 2022 the number of employees (excluding Directors) The Company and subsidiaries are 54,015 employees (30,118 fixed, 23,897 contracted and outsourcing), 40,755 pegawai (30,342 fixed, 10,413 contracted and outsourcing), 41,448 (29,530 fixed, 11,918 contracted and outsourcing) employees, respectively (unaudited).

e. Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perusahaan

Pada tanggal 13 November 2017, Perusahaan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-438/D.04/2017 atas Penawaran perdana penerbitan Obligasi I Kereta Api Indonesia tahun 2017 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 21 November 2017.

e. The Company's Bonds and Sukuk Ijarah Public Offering

As of November 13, 2017, the Company obtained an effective statement from Financial Services Authority (OJK) No. S-438/D.04/2017 for Initial Public Offering on the issuance of bonds I Kereta Api Indonesia year 2017 with a principal amount of Rp2,000,000,000 and were listed on the Indonesia Stock Exchange on November 21, 2017.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

Pada tanggal 18 November 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi I seri A Kereta Api Indonesia Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000.

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perusahaan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: S-189/D.04/2019 atas Penawaran umum penerbitan Obligasi II Kereta Api Indonesia tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.000.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Desember 2019.

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan telah mendapatkan surat pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-148/D.04/2022 atas Penawaran perdana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap 1 Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000 dan Sukuk Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap 1 Tahun 2022 dengan sisa imbalan Ijarah sebesar Rp500.000.000 dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2022.

Pada tanggal 31 Mei 2024, jumlah utang obligasi dan sukuk ijarah adalah sebesar Rp5.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No./ No.	Obligasi/ Bonds	Jumlah/ Amount	Bunga per Tahun/ Interest per Annum	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date
1	Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017/ Kereta Api Indonesia Bond I Year 2017 Seri/ Serie B	1.000.000.000	8,25%	7	13 November 2017/ November 13, 2017	1 November 2024/ November 1, 2024
2	Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019/ Kereta Api Indonesia Bond II Year 2019 Seri/ Serie A	900.000.000	7,75%	5	6 Desember 2019/ December 6, 2019	16 Desember 2024/ December 16, 2024
	Seri/ Serie B	1.100.000.000	8,20%	7	6 Desember 2019/ December 6, 2019	16 Desember 2026/ December 16, 2026
3	Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022/ Kereta Api Indonesia Continuing Bond I Year 2022 Seri/ SerieA	634.000.000	7,10%	5	5 Agustus 2022/ August 5, 2022	5 Agustus 2027/ August 5, 2027
	Seri/ SerieB	866.000.000	8,00%	7	5 Agustus 2022/ August 5, 2022	5 Agustus 2029/ August 5, 2029

1. General (Continued)

On November 18, 2022, the Company has paid off Kereta Api Indonesia 2017 Bond I series A year 2017 of Rp1,000,000,000.

As of December 6, 2019, the Company obtained an effective statement from Financial Services Authority (OJK) No: S-189/D.04/2019 for General Public Offering on the issuance of bonds II Kereta Api Indonesia year 2019 with a principal amount of Rp2,000,000,000 and were listed on the Indonesia Stock Exchange on December 16, 2019.

As of July 29, 2022, the Company obtained an effective statement from Financial Services Authority (OJK) No. S-148/D.04/2022 for Initial Public Offering on the issuance of Continuing Bonds I Kereta Api Indonesia Phase I Year 2022 with a principal amount of Rp1,500,000,000 and Continuing Sukuk I Kereta Api Indonesia Phase I Year 2022 with a remaining Ijarah benefit amount of Rp500,000,000 were listed on the Indonesia Stock Exchange on August 3, 2022.

As of May 31, 2024, The amount of bonds payables and sukuk ijarah amounted to Rp5,000,000,000 with detail as follows:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

1. General (Continued)

No./ No.	Sukuk/ Sukuk	Jumlah/ Amount	Cicilan Imbalan per Tahun/ Installment Benefit per Annum	Tahun/ Years	Tanggal Penerbitan/ Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date
1	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022/ Kereta Api Indonesia Continuing Sukuk Ijarah I Year 2022 Seri/ Serie A	117.350.000	8.331.850	5	5 Agustus 2022/ August 5, 2022	5 Agustus 2027/ August 5, 2027
	Seri/ Serie B	382.650.000	30.612.000	7	5 Agustus 2022/ August 5, 2022	5 Agustus 2029/ August 5, 2029

f. Entitas Anak

Perusahaan memiliki entitas anak pada 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

f. The Subsidiaries

The Company has subsidiaries as of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 as follows:

No.	Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Pokok/ Main Activity	Tahun Pendirian/ Establishment Date	Tahun Operasi/ Year of Operation	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership			Jumlah Aset Sebelum Eliminasi/ Total Assets Before Elimination		
						31 Mei/May 31	31 Desember/December 31	2022	31 Mei/May 31	31 Desember/December 31	2022
						(%)	(%)	(%)	Rp	Rp	Rp
1	PT Reska Multi Usaha (RMU)	Jakarta	Restoran Kereta Api/ The Railways Restaurant	2003	2003	99,74	99,74	99,74	783.689.816	560.460.847	482.887.390
2	PT Railink (Railink)	Jakarta	Transportasi Kereta Api Bandara/ Airport Railways	2005	2014	60,00	60,00	60,00	472.658.721	423.753.460	564.519.459
3	PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)	Jakarta	Transportasi Kereta Commuter/ Commuter Railways	2008	2008	99,78	99,78	99,78	3.539.472.383	3.392.366.123	3.278.464.511
4	PT KA Logistik (KALOG)	Jakarta	Distribusi Logistik berbasis Kereta Api/ Railway-Based Logistic Service	2009	2009	99,30	99,30	99,30	884.042.650	865.859.021	847.167.021
5	PT KA Properti Manajemen (KAPM)	Jakarta	Pengelolaan Aset Properti Perkeretaapian/ Railway Property Asset Management	2009	2009	99,63	99,63	99,63	926.635.473	825.751.525	905.134.224
6	PT KA Pariwisata (KAWIS)	Jakarta	Pariwisata Kereta Api/ Railways Tourism	2009	2010	99,90	99,90	99,90	296.949.050	299.222.056	152.859.992

PT Reska Multi Usaha (RMU)

RMU didirikan berdasarkan Akta No. 18 tanggal 2 Juli 2003 oleh Notaris Darwin Ginting, S.H., M.H., yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C - 21011 HT 01.01. Tahun 2003 tanggal 4 September 2003.

Anggaran Dasar RMU telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta Nomor 6 tanggal 21 September 2019 oleh Notaris Silvia Anugrahwaty, S.H., M.Kn. mengenai Perubahan Modal Dasar. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-0079549.AH.01.02 tanggal 7 Oktober 2019.

Modal dasar RMU sebesar Rp100.749.000 terbagi atas 100.749 saham dengan bernilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 100.749 saham atau sebesar Rp100.749.000 dengan komposisi sebagai berikut:

PT Reska Multi Usaha (RMU)

RMU was established based on Notarial Deed No. 18 dated on July 2, 2003 of Notary Darwin Ginting, S.H., M.H., which approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. C - 21011 HT 01.01 Tahun 2003 dated September 4, 2003.

RMU's Articles of association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 6 dated September 21, 2019 of Notary Silvia Anugrahwaty, S.H., M.Kn. concerning the Changes in the Authorized Capital. The amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-0079549.AH.01.02 dated October 7, 2019.

The authorized capital of RMU amounted to Rp100,749,000 composed of 100,749 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp100,749,000 composed of 100,749 shares with share ownership as follows:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum (Lanjutan)

- Perusahaan memiliki 99,74% atau sebanyak 100.487 saham dengan nilai sebesar Rp100.487.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,26% atau sebanyak 262 saham dengan nilai sebesar Rp262.000.

PT Railink (Railink)

Railink didirikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN No. S-108/MBU/2005 tanggal 8 Maret 2005 dan Akta Pendirian No. 34 tanggal 28 September 2006, dari Notaris Ny. Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Notaris di Banten yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. W29-00480HT.01.01. TH.2006, pada tanggal 7 Desember 2006.

Anggaran Dasar Railink telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah menurut Keputusan Para Pemegang Saham yang telah disahkan dengan Akta Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 05 tanggal 27 Januari 2023 mengenai Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor kepada Railink. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0017880 tanggal 31 Januari 2023.

Modal dasar Railink pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp879.400.000, ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 879.400 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000 per saham atau sebesar Rp879.400.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 60,00% atau sebanyak 527.640 saham dengan nilai sebesar Rp527.640.000.
- PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki 40,00% atau sebanyak 351.760 saham dengan nilai sebesar Rp351.760.000.

Modal dasar Railink pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp839.400.000, ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 839.400 saham dengan

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. General (Continued)

- The Company owns 99.74% or 100,487 shares amounting to Rp100,487,000.
- Yayasan Pusaka owns 0.26% or 262 shares amounting to Rp262,000.

PT Railink (Railink)

Railink was established based on Letter of Approval from Minister of SOEs No. S-108/MBU/2005 dated March 8, 2005, and Notarial Deed No. 34 dated September 28, 2006 of Notary Ny. Silvia Abbas Sudrajat, S.H., Notary in Banten, which has been approved by the Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. W29-00480HT.01.01.TH.2006 dated December 7, 2006.

Railink's Article of Association has been amended several times, most recently by Agreement of Stockholders legalized by the Notarial Deed of Ariani Lakhsmijati Rachim, S.H., No. 05 dated January 27, 2023 concerning the Changes in the authorized and paid in capital. These amendments have been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. Decision Letter of Amended's articles No. AHU-AH.01.03-0017880 dated January 31, 2023.

The authorized capital of Railink as of December 31, 2023 amounted to Rp879,400,000, issued and fully paid capital amounted to Rp879,400,000 composed of 879,400 shares with par value of Rp1,000 per share with share ownership as follows:

- The Company owns 60.00% or 527,640 shares amounting to Rp527,640,000.
- PT Angkasa Pura II (Persero) owns 40.00% or 351,760 shares amounting to Rp351,760,000.

The authorized capital of Railink as of December 31, 2022 amounted to Rp839,400,000, issued and fully paid capital amounted to Rp839,400,000

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum (Lanjutan)

nilai nominal sebesar Rp1.000 per saham atau sebesar Rp839.400.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 60,00% atau sebanyak 503.640 saham dengan nilai sebesar Rp503.640.000.
- PT Angkasa Pura II (Persero) memiliki 40,00% atau sebanyak 335.760 saham dengan nilai sebesar Rp335.760.000.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)

KCI didirikan berdasarkan Akta Notaris Ilmiawan Dekrit S., S.H., pada tanggal 15 September 2008 No.457 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-74707.AH.01.01, tanggal 16 Oktober 2008.

Anggaran Dasar KCI telah mengalami beberapa perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 1 tanggal 7 Januari 2019 dari Notaris Tri Mulyahati, S.H., yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-0002753.AH.01.02 Tahun 2019 tanggal 18 Januari 2019.

Modal dasar KCI sebesar Rp542.000.000 terbagi atas 542.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 230.500 saham atau sebesar Rp230.500.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,78% atau sebanyak 230.000 saham dengan nilai sebesar Rp230.000.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,22% atau sebanyak 500 saham dengan nilai sebesar Rp500.000.

Pada tahun 2022, KCI telah mendapat persetujuan penambahan pengoperasian pada lintas pelayanan Manggarai-Bandar Udara Soekarno-Hatta sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KA.005/1/4/DJKA/2022 pada tanggal 29 Juli 2022 (Catatan 35).

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. General (Continued)

composed of 839,400 shares with par value of Rp1,000 per share with share ownership as follows:

- The Company owns 60.00% or 503,640 shares amounting to Rp503,640,000.
- PT Angkasa Pura II (Persero) owns 40.00% or 335,760 shares amounting to Rp335,760,000.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI)

KCI was established based on Notarial Deed of Ilmiawan Dekrit S., S.H., No. 457 dated September 15, 2008 which is approved by the Minister of Law and Human Right of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-74707.AH.01.01, dated October 16, 2008.

KCI's Article of Association has been amended several time, most recently by Notarial Deeds No. 1 on January 7, 2019 of Notary Mulyahati, S.H., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-0002753.AH.01.02 Tahun 2019 dated January 18, 2019.

The authorized capital of KCI amounted to Rp542,000,000 composed of 542,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp230,500,000 composed of 230,500 shares with share ownership as follows:

- The Company owns 99.78% or 230,000 shares amounting to Rp230,000,000.
- Yayasan Pusaka owns 0.22% or 500 shares amounting to Rp500,000.

In 2022, KCI has received approval for additional operations on the Manggarai-Soekarno-Hatta Airport service line in accordance with the Decree of the Ministry of Transportation through the Director General of Railways No. KA.005/1/4/DJKA/2022, on July 29, 2022 (Note 35).

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum (Lanjutan)

PT KA Logistik (KALOG)

KALOG didirikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN No. S-536/MBU/2009, tanggal 29 Juli 2009 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 10, tanggal 8 September 2009 yang dibuat di hadapan Ny. Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian KALOG telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-51175.AH.01.01, pada tanggal 22 Oktober 2009.

Anggaran Dasar KALOG telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Yoshsi, S.H., M.Kn No. III tanggal 27 November 2023 mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar tentang maksud dan tujuan serta kegiatan. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 30 November 2023 nomor AHU-0074532.AH.01.02. Tahun 2023.

Modal dasar KALOG sebesar Rp99.100.000 terbagi atas 99.100 saham dengan bernilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 75.275 saham atau sebesar Rp75.275.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,30% atau sebanyak 74.750 saham dengan nilai sebesar Rp74.750.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,70% atau sebanyak 525 saham dengan nilai sebesar Rp525.000.

PT KA Properti Manajemen (KAPM)

KAPM didirikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN No. S- 535/MBU/2009, tanggal 29 Juli 2009 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 9, tanggal 8 September 2009 yang dibuat dihadapan Ny. Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-5150.AH.01.01 pada tanggal 26 Oktober 2009.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. General (Continued)

PT KA Logistik (KALOG)

KALOG was established based on the Letter of Approval from the Minister of SOEs No. S-536/MBU/2009, dated July 29, 2009 and based on the Deed of Establishment No. 10, dated September 8, 2009 of Ny. Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. Deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights Republic of Indonesia in his Decision Letter. No. AHU-51175.AH.01.01, dated October 22, 2009.

KALOG's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed of Yoshsi, S.H., M.Kn No. III dated November 27, 2023 concerning amendments to Article 3 of the Articles of Association regarding the aims and objectives as well as business. This amendment has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a Decree dated November 30, 2023 number AHU-0074532.AH.01.02. year 2023.

The authorized capital of KALOG amounted to Rp99,100,000 composed of 99,100 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted Rp75,275,000 composed of 75,275 shares with share ownership as follows:

- The Company owns 99.30% or 74,750 shares amounting to Rp74,750,000.
- Yayasan Pusaka owns 0.70% or 525 shares amounting to Rp525,000.

PT KA Properti Manajemen (KAPM)

KAPM was established under the Letter of Approval from the Minister of SOEs No. S-535/MBU/2009, dated July 29, 2009 and based on the Deed of Establishment No. 9 dated September 8, 2009 of Ny. Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta. Deed of Establishment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia in Decision Letter No. AHU-5150.AH.01.01 on October 26, 2009.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum (Lanjutan)

Anggaran Dasar KAPM telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir Akta No. 21 tertanggal 11 November 2020 mengenai perubahan modal dasar yang dibuat oleh Notaris Dini Lastari Siburian, S.H, M.Kn., di Jakarta telah dicatat dalam database Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai suratnya No. AHU-0189728.AH.01.11 tanggal 12 November 2020.

Modal dasar KAPM sebesar Rp273.575.000 terbagi atas 273.575 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 273.575 saham atau sebesar Rp273.575.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,63%, atau sebanyak 272.550 saham dengan nilai sebesar Rp272.550.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,37% atau sebanyak 1.025 saham dengan nilai sebesar Rp1.025.000.

PT KA Pariwisata (KAWIS)

KAWIS didirikan berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri Negara BUMN No. S- 537/MBU/2009 tanggal 29 Juli 2009 dan berdasarkan Akta Pendirian No. 11, tanggal 8 September 2009, Notaris Ny. Fathiah Helmi, S.H., dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat Keputusan No. AHU-04724.AH.01.01, tanggal 28 Januari 2010.

Anggaran Dasar KAWIS telah mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Kereta Api Pariwisata No. 5, tanggal 14 Desember 2017 mengenai perubahan modal dasar yang dibuat dihadapan Notaris Agung Sri Wijayanti S.H, M.Kn., telah dicatat dalam database Sistem Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai suratnya AHU-0027019.AH.01.02 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017.

Modal dasar KAWIS sebesar Rp99.100.000 terbagi atas 24.775 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. General (Continued)

KAPM's Articles of Association have been amended several times, most recently by Deed No. 21 dated November 11, 2020 concerning the Changes in the authorized capital of Notary Dini Lastari Siburian, S.H, M.Kn., in Jakarta have been recorded in the Legal Entity Database System of the Minister of Justice and Human Rights according to Decision Letter No. AHU-0189728.AH.01.11 dated November 12, 2020.

The authorized capital of KAPM amounted to Rp273,575,000 composed of 273,575 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to Rp273,575,000 composed of 273.575 shares with share ownership as follows:

- The Company owns 99.63% or 272,550 shares amounting to Rp272,550,000.
- Yayasan Pusaka owns 0.37% or 1,025 shares amounting to Rp1,025,000.

PT KA Pariwisata (KAWIS)

KAWIS was established within Letters of approval from the Minister of SOEs No. S-537/MBU/2009, dated July 29, 2009 and based on Notarial Deed No. 11 of Notary Ny. Fathiah Helmi, S.H., dated September 8, 2009 and approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU-04724.AH.01.01, dated on January 28, 2010.

The Articles of Association have been amended by Deed of Statement of Shareholders Resolution of PT Kereta Api Pariwisata No. 5, dated December 14, 2017 concerning the Changes in the authorized capital of Notary Agung Sri Wijayanti S.H, M.Kn., have been recorded in the Legal Entity Database System of the Minister of Justice and Human Rights according to Decision Letter No. AHU-0027019.AH.01.02 year 2017 dated December 20, 2017.

The authorized capital of KAWIS amounted to Rp99,100,000 composed of 24,775 shares with par value of Rp1,000 per share.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. Umum (Lanjutan)

Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 24.775 saham atau sebesar Rp24.775.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 99,90%, atau sebanyak 24.750 saham dengan nilai sebesar Rp24.750.000.
- Yayasan Pusaka memiliki 0,10% atau sebanyak 25 saham dengan nilai sebesar Rp25.000.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Pengukuran dan Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Laporan keuangan konsolidasian interim disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian interim. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

1. General (Continued)

Total issued and fully paid capital amounted to Rp24,775,000 composed of 24,775 shares with share ownership as follows:

- The Company owns 99.90% or 24,750 shares amounting to Rp24,750,000.
- Yayasan Pusaka owns 0.10% or 25 shares amounting to Rp25,000.

2. Material Accounting Policies Information

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which issued by the Financial Accounting Standard Board-Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI), and regulations in the Capital Market include Regulations No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

b. Basis of Measurement and Preparation of the Interim Consolidated Financial Statements

The interim consolidated financial statements have been prepared and presented based on going concern assumption and accrual basis of accounting, except for the interim consolidated statements of cash flows. Basis of measurement in preparation of these interim consolidated financial statements is the historical costs concept, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Laporan arus kas konsolidasian interim disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian interim mencakup laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas anak seperti disebutkan pada Catatan 1.

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari perusahaan dan seluruh entitas anak yang secara langsung dan tidak langsung, dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Entitas induk menyusun laporan keuangan konsolidasian interim dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha dieliminasi secara penuh.

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit.

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

The interim consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing, and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the interim consolidated financial statements is Rupiah which is the functional currency of the Group.

c. Principles of Consolidation

The interim consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and subsidiaries as described in Note 1.

The existence and effect of substantive potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (ie substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The Group's financial statements incorporate the results, cash flows, assets and liabilities of the Company and all of its directly and indirectly controlled subsidiaries. Subsidiaries are consolidated from the effective date of acquisition, which is the date on which the Group effectively obtains control of the acquired business, until that control ceases.

A parent prepares interim consolidated financial statements using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances. All intragroup transactions, balances, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the group are eliminated in full.

The Group attributed the profit and loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent and non-controlling interest even though this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

The Group presents non-controlling interest in equity in the consolidated statement of financial position, separately from the equity owners of the parent.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan non-pengendali yang disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

Changes in the parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in loss of control are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interest change, the Group adjusted the carrying amounts of the controlling interest and non-controlling interest to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

If the Group loses control, the Group:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh SAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- f. Mengakui perbedaan apapun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

- a. *Derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts at the date when control is lost;*
- b. *Derecognizes the carrying amount of any non-controlling interests in the former subsidiary at the date when control is lost (including any components of other comprehensive income attributable to them);*
- c. *Recognizes the fair value of the consideration received (if any), from the transaction, event or circumstances that resulted the loss of control;*
- d. *Recognizes any investment retained in the former subsidiary at fair value at the date when control is lost;*
- e. *Reclassifies to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other SAK's, the amount recognized in other comprehensive income in relation to the subsidiary; and*
- f. *Recognizes any resulting difference as a gain or loss attributable to the parent.*

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

d. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas dimana Grup memiliki kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut (pengaruh signifikan).

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal investasi diakui sebesar biaya perolehan, dan jumlah tercatat ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian atas laba rugi dan penghasilan atau kerugian komprehensif lain *investee* setelah tanggal perolehan. Bagian atas laba rugi *investee* diakui dalam laba rugi. Penerimaan distribusi dari *investee* mengurangi nilai tercatat investasi.

Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga mungkin dibutuhkan untuk perubahan dalam proporsi bagian investor atas *investee* yang timbul dari penghasilan komprehensif lain, termasuk perubahan yang timbul dari revaluasi aset tetap dan selisih penjabaran valuta asing. Bagian investor atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi sebagai berikut:

- (a) jika investasi menjadi entitas anak.
- (b) jika sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan, maka Grup mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar.
- (c) ketika Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan investasi tersebut menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika *investee* telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas terkait.

d. Investments in Associates

Associates are entities which the Group has the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies (significant influence).

Investment in associates accounted using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognised at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognise the investor's share of the profit or loss and other comprehensive income or loss of the investee after the date of acquisition. The investor's share of the profit or loss of the investee is recognised in profit or loss. Distributions received from an investee reduce the carrying amount of the investment.

Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the investor's proportionate in the investee arising from changes in the investee's other comprehensive income, including those arising from the revaluation of fixed assets and from foreign exchange translation differences. The investor's share of those changes is recognized in other comprehensive income.

The Group discontinue the use of the equity method from the date when its investment ceases to be an associate as follows:

- (a) if the investment becomes a subsidiary.*
- (b) If the retained interest in the former associate is a financial asset, the Group measure the retained interest at fair value.*
- (c) when the Group discontinue the use of the equity method, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that investment on the same basis as would have been required if the investee had directly disposed of the related assets or liabilities.*

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

e. Pengaturan Bersama

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama, yaitu persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu Pengaturan Bersama yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Grup mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

1) Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- (d) Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- (e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2) Ventura Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

e. Join Arrangement

Joint arrangement is an arrangement of which two or more parties have joint control, i.e. the contractually agreed sharing of control of Joint Arrangement, which exist only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.

The Group classified joint arrangement as:

1) *Joint Operation*

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

A joint operator recognize in relation to its interest in a joint operation:

- (a) *Assets, including its share of any assets held jointly;*
- (b) *Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- (c) *Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- (d) *Share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- (e) *Expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

2) *Joint Venture*

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control upon the agreement, have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

Joint venturers recognize its interest in a joint venture as an investment and accounts for that investment using the equity method.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

f. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama periode dan tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

Mata Uang Asing (Nilai Penuh)	31 Mei/May 31	31 Desember/December 31		Foreign Currency (Full Amount)
	2024	2023	2022	
Dolar Amerika Serikat	16.253	15.416	15.731	United States Dollar
Euro	104	110	16.713	Euro
Yen Jepang	17.570	17.140	118	Japanese Yen
Yuan Tiongkok	2.243	2.170	2.257	Chinese Yuan

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

g. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas

f. Foreign Currency Transaction and Balances

In preparing the financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and all subsidiaries is Indonesian Rupiah.

Transactions during the period and year in foreign currencies are recorded in Rupiah by applying to the foreign currency amount the spot exchange rate between Rupiah and the foreign currency at the date of transactions. At the end of reporting period, foreign currency monetary items are translated to Rupiah using the closing rate of Bank of Indonesia at May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 as follows:

Exchange differences arising on the settlement of monetary items or on translating monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

g. Transactions with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control of the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent,

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

- anak, dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya);
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok dimana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh pemerintah. Pemerintah mengacu kepada instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

- subsidiary, and subsidiary is related to the others);
- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity itself is the programme organizer, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
 - viii. The entity, or any member of a group which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significant influence by a government. Government refers to government agencies and similar bodies whether local, national or international.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 42.

h. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

Dalam komponen setara kas tidak termasuk deposito berjangka yang dijadikan jaminan pada bank walaupun jatuh temponya tidak lebih dari 3 (tiga) bulan. Deposito yang bersangkutan disajikan dalam kelompok aset lancar sepanjang penjaminan tersebut meliputi periode tidak lebih dari satu tahun dari tanggal laporan posisi keuangan.

i. Dana Dibatasi Penggunaannya

Rekening yang dibatasi penggunaannya dan atau digunakan sebagai jaminan diklasifikasi berdasarkan jatuh temponya.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan jumlah terendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Biaya persediaan terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto merupakan taksiran harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

Entity related to the Government can be an entity which controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that representing as the shareholders of the entity or an entity controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOEs as a shareholder's representative.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 42.

h. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents are cash on hand, cash in banks (current account) and time deposits with maturity periods of three months or less at the time of investment that are not used as collateral or are not restricted.

The components of cash equivalents does not include time deposit which was pledged as collateral for a bank, although the maturities are shorter than 3 (three) months. The mentioned deposit is presented in the current assets of the guarantee covers a period not exceeding one year from the balance sheet date.

i. Restricted Fund

Current accounts which are restricted and or used as security are classified based on the maturity.

j. Inventories

Inventories are carried at the lower of cost and net realizable value. The cost of inventories comprise all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and condition. Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make sales.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto, diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut.

k. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

l. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model biaya dan mengukur properti investasi sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Hak atas tanah tidak disusutkan dan disajikan sebesar biaya perolehan.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

The amount of any write-down of inventories to net realizable value and all losses of inventories shall be recognised as an expense in the period the write-down or loss occurs. The amount of any reversal of any write-down of inventories, arising from an increase in net realizable value, is recognised as a reduction in the amount of inventories recognised as an expense in the period in which the reversal occurs.

k. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized to operations using straight-line method over their beneficial periods.

l. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held by the owner or the lessee under a finance lease to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the daily business activities.

Investment property is recognized as an asset when, and only when there is a probability that the future economic benefits which are associated with the investment property, will flow into the entity and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group may choose to use cost model and measure its investment property at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Landrights are not depreciated and are carried at costs.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

Bangunan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis (12-40 tahun).

Buildings are depreciated using the straight-line method over their estimated useful lives (12-40 years).

Pengalihan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain.

Transfer to investment property made when, and only when, there is a change in usage, evidenced by end of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party.

Pengalihan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya pengembangan untuk dijual.

Transfer from investment property made when, and only when, there is a change in usage, evidenced by commencement of owner-occupation and commencement of development with a view of sale.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

m. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai intensi manajemen.

m. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

When applicable, the cost may also comprises the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or as a consequence of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

After initial recognition, fixed assets, except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets starts when available for use and was computed by using straight-line method based on the estimated useful lives of assets as follows:

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)/ Useful Lives (Years)	Tarif Penyusutan per Tahun/ Depreciation Rate per Year	Type of Fixed Assets
Sarana			Rolling Stock
Lokomotif	30	3,33%	Locomotive
Kereta	15-30	3,33% - 6,67%	Train
Gerbong	30	3,33%	Wagons
Prasarana			Infrastructure
Bangunan	12-40	2,50% - 10%	Building
Prasarana dan Instalasi	5-20	5,00% - 20,00%	Infrastructure and Installation
Fasilitas			Facilities
Mesin dan Peralatan	3-40	2,50% - 33,33%	Machinery and Equipment
Kendaraan	4-8	12,50% - 25,00%	Vehicles
Inventaris	4-5	20,00% - 25,00%	Supplies

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "aset tetap dalam pembangunan" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya.

Self-constructed of fixed assets are presented as part of the fixed assets under "assets under construction" and are stated at its cost.

Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour, or other resources incurred.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan bersih, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

n. Perjanjian Konsesi Jasa

Grup telah menerapkan ISAK 112, "Perjanjian Konsesi Jasa" (ISAK 112) dan ISAK 229, "Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan" (ISAK 229) sehubungan dengan hak pengoperasian aset.

ISAK 112 mengatur prinsip umum dalam pengakuan dan pengukuran hak dan kewajiban terkait dengan perjanjian konsesi jasa. ISAK 112 mengatur bahwa infrastruktur tidak diakui sebagai aset tetap operator (pihak penerima konsesi jasa) karena perjanjian jasa kontraktual tidak memberikan hak kepada operator untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik.

Operator memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak.

ISAK 229 memberikan panduan spesifik mengenai pengungkapan yang diperlukan atas perjanjian konsesi jasa.

Grup membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai aset takberwujud, aset konsesi dalam bentuk aset takberwujud yaitu hak pengoperasian akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian aset.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when item is derecognized.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

n. Service Concession Arrangement

The Group has adopted ISAK 112, "Service Concession Arrangement" (ISAK 112) and ISAK 229, "Service Concession Arrangement: Disclosure" (ISAK 229) related to operating rights of assets.

ISAK 112 determines the general principles in the recognition and measurement of liabilities and rights related to service concession arrangement. ISAK 112 regulates that an operator (concession right beneficiary) does not recognize any infrastructure assets because the contractual service arrangement does not convey the right to control the use of the public service infrastructure to the operator.

The operator has access to operate the infrastructure to provide the public service on behalf of the grantor in accordance with the terms specified in the contract.

ISAK 229 provides specific guidance for the required disclosures regarding the service concession arrangement.

The Group accounts for its service concession arrangement under the intangible asset, concession assets which are under intangible asset which is operation rights of assets will be amortized over the remaining concession period from the date of operation of the assets.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi aset diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Hak pengoperasian aset dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat penghentian pengakuan karena aset konsesi diharapkan telah diamortisasi secara penuh, akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) tanpa syarat.

Hak pengoperasian aset yang diberikan kepada Grup dapat dialihkan dengan persetujuan Pemerintah/ DJKA.

Hak Pengoperasian aset diamortisasi sepanjang masa konsesi berkisar antara 30-50 tahun.

Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/ DJKA pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi akan dihentikan pengakuannya.

Selama periode konstruksi, Grup mengakui pendapatan dan biaya konstruksi sesuai dengan penambahan aset konsesi.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti diskonto baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai proses pembangunan aset kualifikasian, dikapitalisasi sampai saat proses pembangunannya selesai.

Untuk pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam tahun berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi sementara dari pinjaman tersebut.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

During the construction period, the accumulated cost of assets are recognized as concession assets in progress. The amortization of the cost starts when the concession assets are ready to be operated.

The operation rights of assets are derecognized at the end of the concession period. There will be no gain or loss upon derecognition as the concession assets which are expected to be fully amortized by then, will be handed over to the Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) for no consideration.

The operation rights of asset granted to the Group are transferrable with approval from the Government/ DJKA.

The operating rights of assets are amortized over the concession period ranging from 30-50 years.

These concession right assets will be transferred to the Government/ DJKA at the end of the concession period and, at such time, all accounts related to the concession rights assets will be derecognized.

During the construction period, the Group recognizes revenues and costs of construction in accordance with the addition of concession assets.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalized up to the date when the construction is completed.

For borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount allowed to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the year, less any investment income earned from the temporary investment of such borrowings.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

o. Biaya Pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian, dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman dapat mencakup beban bunga, beban keuangan dalam sewa pembiayaan atau selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing sepanjang selisih kurs tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat Grup telah melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya serta pengeluaran untuk aset dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan ketika secara substansial seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan atau dijual sesuai dengan intensinya telah selesai.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lainnya, seperti biaya diskonto pinjaman baik yang secara langsung atau tidak langsung digunakan untuk pendanaan konstruksi aset kualifikasian, dikapitalisasi hingga aset tersebut selesai dikonstruksi. Untuk biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung pada aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dari biaya pinjaman aktual yang terjadi selama periode berjalan, dikurangi penghasilan yang diperoleh dari investasi sementara atas dana hasil pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak dapat diatribusikan secara langsung pada suatu aset kualifikasian, jumlah yang dikapitalisasi ditentukan dengan mengalikan tingkat kapitalisasi terhadap jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh aset kualifikasian. Tingkat kapitalisasi dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang biaya pinjaman yang dibagi dengan jumlah pinjaman yang tersedia selama periode, selain pinjaman yang secara spesifik diambil untuk tujuan memperoleh suatu aset kualifikasian.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

o. Borrowing Costs

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset, are capitalized as part of the cost of that asset. Other borrowing costs are recognized as an expense when incurred. Borrowing costs may include interest expense, finance charges in respect of finance leases, or exchange differences arising from foreign currency borrowings to the extent that they are regarded as an adjustment to interest costs.

Capitalization of borrowing costs commences when the Group undertakes activities necessary to prepare the asset for its intended use or sale and expenditures for the asset and its borrowing costs has been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying assets for its intended use or sale are complete.

Interest and other borrowing costs, such as discount fees on loans either directly or indirectly used in financing the construction of a qualifying asset, are capitalised up to the date when construction is complete. For borrowings that are directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined as the actual borrowing cost incurred during the period, less any income earned on the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalised is determined by applying a capitalisation rate to the amount expended on the qualifying assets. The capitalisation rate is the weighted average of the total borrowing costs applicable to the total borrowings outstanding during the period, other than borrowings made specifically for the purpose of obtaining a qualifying asset.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

p. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan ditentukan atas suatu aset individual, dan jika tidak memungkinkan, Grup menentukan jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas dari aset tersebut.

Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya. Nilai pakai adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan akan diterima dari aset atau unit penghasil kas.

Nilai kini dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset atau unit yang penurunan nilainya diukur. Jika, dan hanya jika, jumlah terpulihkan aset lebih kecil dari jumlah tercatatnya, maka jumlah tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Penurunan tersebut adalah rugi penurunan nilai dan segera diakui dalam laba rugi.

Rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Jika demikian, jumlah tercatat aset dinaikan ke jumlah terpulihkannya. Kenaikan ini merupakan suatu pembalikan rugi penurunan nilai.

q. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka atas pemakaian lahan dan bangunan diamortisasi selama masa kontrak pemakaian dengan menggunakan metode garis lurus. Bagian tidak lancar atas pendapatan diterima dimuka disajikan sebagai bagian dari "Liabilitas Jangka Panjang" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

p. Impairment of Assets Non-financial

At the end of each reporting period, the Group assess whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group shall estimate the recoverable amount of the asset. Recoverable amount is determined for an individual asset, if its is not possible, the Group determines the recoverable amount of the asset's cash-generating unit.

The recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and its value in use. Value in use is the present value of the estimated future cash flows of the asset or cash generating unit.

Present values are computed using pre-tax discount rates that reflect the time value of money and the risks specific to the asset or unit whose impairment is being measured. If, and only if, the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to its recoverable amount. The reduction is an impairment loss and is recognized immediately in profit or loss.

An impairment loss recognized in prior period for an asset other than goodwill is reversed if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If this is the case, the carrying amount of the asset shall be increased to its recoverable amount. That increase is a reversal of an impairment loss.

q. Unearned Revenues

Unearned revenues from usage of land and buildings are amortized over the usage term using the straight-line method. The non-current portion of unearned revenues is shown as part of "Long-term Liabilities" in the consolidated statement of financial position.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Pendapatan diterima di muka atas angkutan penumpang merupakan pendapatan atas jasa angkutan penumpang pengguna kereta api yang realisasi keberangkatannya pada periode berikutnya.

Pendapatan diterima di muka angkutan barang merupakan pendapatan atas jasa angkutan barang yang terdiri dari angkutan peti kemas, batu bara, parcel, barang curah dan barang jenis lain yang realisasi keberangkatannya pada periode berikutnya.

r. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak berlaku atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

Unearned revenues from passenger transportation represent revenue as on passenger transport services by train which the travel realization departure is in next period.

Unearned revenue of freight transportation represents revenue generated from freight transport railway services consist of freight of containers, coal, parcel, bulk cargo and other types of goods of which the departure is realized in the following period.

r. Income Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax.

Current tax and deferred tax is recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognised as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognised as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis, pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan. Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

A deferred tax liability shall be recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) the initial recognition of goodwill; or*
- b) the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination, at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.*

A deferred tax asset shall be recognised for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.

Assets and liabilities deferred tax are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period. The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:
 - i. entitas kena pajak yang sama; atau
 - ii. entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

s. Sewa

Grup sebagai Penyewa (Lessee)

Pada tanggal insepri suatu kontrak, Grup menilai apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan suatu aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Untuk menilai apakah suatu kontrak memberikan hak untuk mengendalikan suatu aset identifikasian, Grup menilai apakah:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *the Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either:*
 - i. *the same taxable entity; or*
 - ii. *different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.*

The Group offsets current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) *has legally enforceable right to set off the recognized amounts, and*
- b) *intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.*

s. Leases

Group as Lessee

At inception of a contract, the Group assesses whether a contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group assesses whether:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

- a. Kontrak melibatkan penggunaan suatu aset identifikasian – ini dapat ditentukan secara eksplisit atau implisit dan secara fisik dapat dibedakan atau mewakili secara substansial seluruh kapasitas aset yang secara fisik dapat dibedakan. Jika pemasok memiliki hak substitusi substantif, maka aset tersebut tidak teridentifikasi;
- b. Grup memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset selama periode penggunaan; dan
- c. Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Grup memiliki hak ini ketika hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah bagaimana dan untuk tujuan apa aset tersebut digunakan.

Dalam kondisi tertentu di mana semua keputusan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya, Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset tersebut jika:

- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
- Grup mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan.

Pada tanggal inisiasi atau pada saat penilaian kembali suatu kontrak yang mengandung suatu komponen sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi: pembayaran sewa tetap, jumlah yang akan dibayarkan dalam jaminan nilai residu dan harga eksekusi opsi beli, opsi perpanjangan atau penalti penghentian jika Grup cukup pasti akan mengeksekusi opsi tersebut.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

- a. *The contract involves the use of an identified asset – this may be specified explicitly or implicitly and should be physically distinct or represent substantially all of the capacity of a physically distinct asset. If the supplier has the substantive substitution right, then the asset is not identified;*
- b. *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits of the use of assets during the period of use; and*
- c. *The Group has the right to direct the use of the identified asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are most relevant to changing how and for what purpose the asset is used.*

In certain circumstances where all the decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined, the Group has the right to direct the use of the asset if either:

- *The Group has the right to operate the asset; or*
- *The Group designed the asset in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used.*

At inception date or on reassessment of a contract that contains a lease component, the Group allocates consideration in the contract to each lease component on the basis of their relative stand-alone prices.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise the following: fixed payments, amounts expected to be payable under a residual value guarantee and the exercise price under a purchase option, optional renewal period or penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Grup mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa. Aset hak guna awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah pengukuran awal dari liabilitas sewa disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar atau tempat di mana aset berada, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak guna dengan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini atas pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau, jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, digunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup. Umumnya, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai suku bunga diskonto.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

The Group recognizes a right-of-use asset and a lease liability at the lease commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liability adjusted for any lease payments made at or before the commencement date, plus any initial direct costs incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset or the site on which it is located, less any lease incentives received.

After the commencement date, the Group measures the right-of-use assets under the cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right-of-use asset depreciated using straight line method.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not yet paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, The Group incremental borrowing rate. Generally, The Group uses its incremental borrowing rate as the discount rate.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

- a. Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- b. Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar;
- c. Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika ada perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak guna telah berkurang menjadi nol.

Selanjutnya, pembayaran atas kontrak yang termasuk ke dalam pengecualian, yakni pembayaran atas sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui pada metode garis lurus dan dibebankan pada laba rugi. Pembayaran sewa terkait dengan sewa yang dikecualikan tersebut diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai Pemberi Sewa (Lessor)

Sewa dimana grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi biaya langsung awal sehubungan proses negosiasi sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Pendapatan sewa operasi diakui sebagai pendapatan atas dasar garis lurus selama masa sewa.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- a. Increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;
- b. Reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and
- c. Remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.

It is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value guarantee, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets, or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to zero.

Furthermore, payments associated with contracts included in the exception, which are payments associated with all Short-term leases and certain leases of all low-value assets are recognized on a straight-line basis as an expense in profit or loss. The lease payments associated with those leases will be recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Group as Lessor

Leases where the group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership are classified as operating leases. Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized as expense over the lease term on the same basis as rental income. Operating lease income is recognized as income on a straight-line basis over the lease term.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

t. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 64/2007, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 105/PMK.02/2010, Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023, dan PP No. 35/2021.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

t. Employee Benefit

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of Short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service. Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance and service payments are calculated based on Government Regulation (PP) No. 64/2007, Minister of Finance Regulation (PMK) No. 105/PMK.02/2010, Job Creation Law No.6/2023, and PP No. 35/2021.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method. Present value of benefit obligation is determined by discounting the benefit.

The Group accounts not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset ceiling are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

- (a) Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- (a) Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237 dan melibatkan pembayaran pesangon.

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang, imbalan cacat permanen dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui dalam laba rugi.

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisa transaksi melalui lima langkah analisa berikut:

1. Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak
 - Grup bisa mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - Kontrak memiliki substansi komersial;
 - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, pajak penjualan barang mewah, pajak pertambahan nilai dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diteruskannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

- (a) When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
- (a) When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 237 and involves payment of termination benefits.

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

Other Long-term Employee Benefits

Other Long-term employee benefits such as long service leave, permanent disability benefit and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and change in actuarial assumption are charged and credited to profit or loss.

u. Revenue and Expenses Recognition

In determining revenue recognition, the Group perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. The contract has been agreed by the parties involved in the contract
 - The Group can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;
 - The contract has commercial substance;
 - It is probable that the Group will receive benefits for the goods or services transferred.
2. Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives, luxury sales tax, value added tax and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dengan cara sebagai berikut:

- Suatu waktu tertentu (umumnya janji untuk menyerahkan barang ke pelanggan); atau
- Sepanjang waktu (umumnya janji untuk menyerahkan jasa ke pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi dalam sepanjang waktu, Grup memilih ukuran penyelesaian yang sesuai untuk penentuan jumlah pendapatan yang dapat diakui karena telah terpenuhinya kewajiban pelaksanaan.

Suatu kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu kecuali jika memenuhi salah satu kriteria berikut, dalam hal ini dipenuhi sepanjang waktu:

- Pelanggan secara bersamaan menerima dan menggunakan manfaat yang diberikan oleh pelaksanaan Grup sebagaimana yang dilakukan Grup;
- Pelaksanaan Grup menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan saat aset itu dibuat atau ditingkatkan; dan
- Pelaksanaan Grup tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif untuk Grup dan Grup memiliki hak yang dapat diberlakukan atas pembayaran untuk kinerja yang diselesaikan hingga saat ini.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).

A performance obligation may be satisfied at the following:

- A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or
- Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Group selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that can be recognized as the performance obligation is satisfied.

A performance obligation is satisfied at a point in time unless it meets one of the following criteria, in which case it is satisfied over time:

- The customer simultaneously receives and consumes the benefits provided by the Group's performance as the Group performs;
- The Group's performance creates or enhances an asset that the customer controls as the asset is created or enhanced; and
- The Group's performance does not create an asset with an alternative use to the Group and the Group has an enforceable right to payment for performance completed to date.

Expense Recognition

Expenses are recognized as incurred (accrual basis), unless they create an asset related to future contract activity.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan.

Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

v. Pengakuan Pendapatan Kompensasi dan Beban Sewa Penggunaan Prasarana Pemerintah

- 1) Pendapatan kompensasi *Public Service Obligation* (PSO) yang diperoleh dari Pemerintah disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan jasa angkutan penumpang.
- 2) Pendapatan dari kompensasi PSO diakui secara akrual.
- 3) Segala ketentuan mengenai PSO diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.
- 4) Beban pemeliharaan prasarana yang dibiayai oleh Pemerintah (IMO) yang pengerjaannya dilakukan oleh Perusahaan diperlakukan sebagai Pendapatan Usaha dan diakui saat terjadinya sesuai dengan estimasi nilai kontrak antara Pemerintah dan Perusahaan sebagai penyelenggara.
- 5) Beban penggunaan prasarana milik Pemerintah (TAC) yang terutang kepada Pemerintah menjadi penambah beban operasi tidak langsung dan diakui saat terjadinya.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

The costs that directly relate to the contract generate resources to satisfy the contract ("cost to fulfill") or is incremental on obtaining a contract ("cost to obtain") and are expected to be recovered.

These costs are therefore eligible for capitalization under PSAK 115: Revenue from Contracts with Customers and recognized as other current assets. Such cost will be amortized on a systematic basis that is consistent with the transfer of the goods or services to which such asset relates.

v. The Recognition of Compensation Income and Rent Expenses of Government's Infrastructure

- 1) *Compensation income of Public Service Obligation (PSO) received from the Government presented in the income statement as revenue passenger transportation service.*
- 2) *The PSO compensation income obtained from the Government is recognized in accrual method.*
- 3) *All of the PSO arranged in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 84/PMK.02/2016 about Procedures for Procurement, Disbursement, and Accountability of the Public Service Obligation Fund or the Railway Transport Sector Economy Class.*
- 4) *The infrastructure maintenance expenses are funded by Government (IMO), which is performed by the Company and treated as Revenue and recognize when incurred in accordance with the contract estimation between the Government and the Company as organizer.*
- 5) *The rental expenses of railroad infrastructure (TAC) which is owed to the Government is recorded as the additional of indirect operation expense and recognized at the time incurred.*

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

- 6) Pendapatan kompensasi angkutan perintis yang diperoleh dari pemerintah disajikan sebagai pendapatan jasa angkutan dan diakui secara akrual.

w. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar

tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dengan menggunakan dua dasar yaitu: model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(i) **Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi**

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

- 6) *Pioneer transportation compensation income received from the Government presented as revenue freight service and recognized on accrual basis.*

w. Financial Instrument

Initial Recognition and Measurement

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position when, and only when, it becomes a party to the contractual provisions of the instrument. At initial recognition, the Group measures all financial assets and financial liabilities at its fair value. In the case of a financial asset or financial liability not at fair value through profit or loss, fair value plus or minus with

the transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred on acquisition of a financial asset and issue of a financial liability classified at fair value through profit or loss are expensed immediately.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Group financial assets are classified into the following specified categories: financial assets at amortized costs, financial assets at fair value through other comprehensive income, and financial assets at fair value through profit or loss. on the basis of both: the Group's business model for managing the financial assets and the contractual cash flow characteristics of the financial asset.

(i) **Financial Assets Measured at Amortized Costs**

Financial assets are measured at amortized costs if these conditions are met:

- (1) *The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak material jumlahnya atau tidak sering.

(ii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (1) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- (2) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest - SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

- (2) *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit and loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be immaterial in value or infrequent in nature.

(ii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

A financial asset shall be measured at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met:

- (1) *The financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets; and*
- (2) *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

(iii) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Grup dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

The financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized initially in other comprehensive income (OCI), except for impairment gains and losses, and a portion of foreign exchange gains and losses, are recognized in profit or loss. When the asset is derecognized or reclassified, changes in fair value previously recognized in other comprehensive income and accumulated in equity are reclassified from equity to profit and loss as a reclassification adjustment.

(iii) Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are those which do not meet both criteria for neither amortized costs nor FVTOCI.

After initial recognition, FVTPL financial assets are measured at fair value. The changes in fair value are recognized in profit or loss.

Financial assets in form of derivatives and investment in equity instrument are not eligible to meet both criteria for amortized costs or fair value through other comprehensive income FVTOCI. Hence, these are measured at fair value through profit or loss FVTPL. Nonetheless, the Group may irrevocably designate an investment in an equity instrument which is not held for trading in any time soon as FVTOCI. This designation result in gains and losses to be presented in other comprehensive income, except for dividend income on a qualifying investment which is recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings, not to profit or loss.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- (a) Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- (b) Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- (c) Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) Jumlah penyisihan kerugian dan
 - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.
- (d) Imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakusisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal Grup dapat membuat penetapan yang takterbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- (a) Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda beda; atau

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortised cost, except for:

- (a) Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value.
- (b) Financial liabilities that arise when a transfer of a financial asset does not qualify for derecognition or when the continuing involvement approach applies.
- (c) Financial guarantee contracts and commitments to provide a loan at a below-market interest rate. After initial recognition, an issuer of such a contract and an issuer of such a commitment shall subsequently measure it at the higher of:
 - (i) the amount of the loss allowance
 - (ii) the amount initially recognised less, when appropriate, the cumulative amount of income recognised in accordance with the principles of PSAK 115.
- (d) Contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination to which PSAK 103 applies. Such contingent consideration shall subsequently be measured at fair value with changes recognised in profit or loss.

Group may, at initial recognition, irrevocably designate a financial liability as measured at fair value through profit or loss when permitted by the standard or when doing so results in more relevant information, because either:

- (a) It eliminates or significantly reduces a measurement or recognition inconsistency (sometimes referred to as "an accounting mismatch") that would otherwise arise from measuring assets or liabilities or recognising the gains and losses on them on different bases; or

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

- (b) Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan.

Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

- (b) A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities is managed and its performance is evaluated on a fair value basis, in accordance with a documented risk management or investment strategy, and information about the group is provided internally on that basis to the Group's key management personnel.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset when, and only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement.

If the Group transfers substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognizes separately as asset or liabilities any rights and obligations created or retained in the transfer. If the Group neither transfers not retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset and has retained control, the Group continues to recognize the financial asset to the extent of its continuing involvement in the financial asset. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group removes a financial liability from its statement of financial position when, and only when, it is extinguished, ie when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kredatnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain, sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

Impairment of Financial Assets

The Group recognizes expected credit loss for its financial assets measured at amortized costs and financial assets measured at FVTOCI.

At the end of each reporting date, the Group calculates any impairment provision in financial instruments based on its lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instruments has increased significantly since its initial recognition. However, if credit risk has not increased significantly since initial recognition, then 12 months expected credit loss is recognized.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for trade receivables and contract assets without significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when the counterparty is unlikely to pay its credit obligations to the Group in full. The maximum period considered when estimating expected credit loss is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

Impairment losses are recognized as a deduction in financial assets' carrying amount, except for financial assets measured at FVTOCI where its impairment is recognized in other comprehensive income, the expected credit loss (or recovery of credit loss) is recognized in profit or loss, as gains or losses of financial asset impairment.

The expected credit loss of financial instruments are conducted by a means which reflect:

- i. An unbiased and probability-weighted amount that reflects a range of possible outcomes;
- ii. Time value of money; and

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomik dan bisnis dalam jangka waktu panjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya. Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan "peringkat grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup menggunakan metode *roll rate* untuk mengukur penurunan nilai piutang usaha.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

iii. Reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions.

Financial assets may be considered to not having significant increase in credit risk since initial recognition if the financial assets have a low credit risk at the reporting date. Credit risk on financial instrument may be considered be low if there is a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term and adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations. To determine whether a financial asset has a low credit risk, the Group may use internal credit risk rating or external assessment. For example, a financial asset with "investment grade" according to external assessment has a low credit risk rating, thus it does not experience an increase in significant credit risk since initial recognition.

The Group is using the roll rate method to measure the provision for impairment of account receivable.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Jika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka diperlukan untuk menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai) atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTPL, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTPL menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit yang diharapkan tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

When calculating the effective interest rate, the Group estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group reclassifies a financial asset if and only if the Group's business model objective for its financial assets changes so its previous model assessment would no longer apply.

If the Group reclassifies a financial asset, it is required to apply the reclassification prospectively from the reclassification date. Previously recognized gains, losses (including impairment gains or losses) or interest are not restated.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTPL, then its fair value is measured at reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and its fair value is recognized in profit or loss. Otherwise, if the Group reclassifies its financial asset from FVTPL into amortized cost, then its fair value at the date of reclassification becomes new gross carrying amount.

When the Group reclassifies its financial asset out of the amortized cost into FVTOCI, its fair value is measured at the reclassification date. Any gains or losses resulted from the difference between previous amortized cost and fair value is recognized in other comprehensive income. Effective interest rate and expected credit loss measurement are not adjusted as a result of the reclassification.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTOCI menjadi biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan tersebut direklasifikasi ke nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

Otherwise, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into amortized cost, the financial asset is reclassified by its fair value at the reclassification date. However, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are omitted from equity and adjusted to the financial asset's fair value at the date of reclassification. Consequently, at the reclassification date, the financial asset is measured the same way as if it were amortized cost.

This adjustment affects other comprehensive income but not profit or loss, and hence it is not a reclassification adjustment. Effective interest rate and expected credit loss are no longer adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies its financial asset out of the FVTPL into FVTOCI, the financial asset is measured at its fair value. Similarly, when the Group reclassifies its financial asset out of the FVTOCI into FVTPL the financial asset is measured at its fair value. Any gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified out of the equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Offsetting a Financial Asset and a Financial Liability

A financial asset and financial liability shall be offset when and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amount; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

- (i) Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);
- (ii) Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2);
- (iii) Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki nilai wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

x. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into different levels in a fair value hierarchy based on the degree to which the inputs to the measurement are observable and the significance of the inputs to the fair value measurement in its entirety:

- (i) Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);
- (ii) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (Level 2);
- (iii) Unobservable inputs for the assets or liabilities (Level 3).

When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses market observable data to the extent possible. If the fair value of an asset or a liability is not directly observable, the Group uses valuation techniques appropriate in the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period during which the change occurred.

x. Earning per Share

Basic earnings per share is computed by dividing the profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculation of diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary equity holders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

y. Aset Takberwujud

Lisensi dan perangkat lunak yang diperoleh dikapitalisasi berdasarkan biaya-biaya yang terjadi untuk memperoleh dan mempersiapkannya hingga siap digunakan. Biaya-biaya ini diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa pemanfaatan berkisar antara 4-20 tahun.

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaharuan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak.

z. Segmen Operasi

Grup menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam menilai kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmetasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi entitas legal di dalam Grup.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

aa. Bagian Hibah dari Pinjaman Pemerintah

Manfaat atas pinjaman pemerintah yang memiliki tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar diperlakukan sebagai hibah pemerintah. Pinjaman tersebut diakui dan diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal neraca. Manfaat pinjaman dengan tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar diukur sebagai perbedaan antara nilai tercatat awal pinjaman dan jumlah yang diterima.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

y. Intangible Assets

Licenses and software are capitalized on the basis of the cost incurred to acquire and to prepare the assets for intended use. These costs are amortized using the straight-line method over the useful life ranging from 4-20 years.

The cost of maintaining an extension or renewal of legal title to land is recognized as an intangible asset and amortized over the life of the legal entitlement.

z. Operating Segment

Group presented operating segments based on the financial information used by the chief operating decision maker in assessing the performance of segments and in the allocation of resources. The segments are based on the activities of each of the operating legal entities within the Group.

An operating segment is a component of the entity:

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assesses its performance; and
- for which separate financial information is available.

aa. The Grants Portion of Government Loans

Benefits on government loans that bear interest rates below market rates are treated as government grants. These loans are recognized and measured at fair value at balance sheet date. Benefits bearing interest rates below market interest rates are measured as the difference between the original carrying amount of the loan and the amount received.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (Lanjutan)

Manfaat tersebut diakui sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama periode entitas mengakui beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan dengan hibah tersebut.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") yang Berlaku Efektif

Berikut amendemen dan penyesuaian atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Kewajiban Diklasifikasikan Sebagai Lancar atau Tidak Lancar;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik; dan
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok.

Implementasi standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan pada periode berjalan atau tahun sebelumnya.

4. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian interim Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2. Material Accounting Policies Information (Continued)

These benefits are recognized as deferred income and amortized on straight line method over the period in which the entity recognizes expenses for the related costs it is intended to compensate for under the grant.

3. Effective Statements of Financial Accounting Standard ("PSAK")

The following are amendment and improvements to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2024, with early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as Current or Noncurrent;*
- *Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;*
- *Amendments PSAK 116: Lease regarding Lease Liability in a Sale and Leaseback; and*
- *Amendments PSAK 207: Statement of Cash Flows and PSAK 107: Financial Instrument: Disclosure regarding Supplier Finance Arrangements.*

The implementation of the above standards had no material effect on the amounts reported for the current period or prior financial year.

4. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Estimates and Judgments

Judgment

The preparation of the Group's interim consolidated financial statements requires management to make judgments, estimate and assumption that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future periods.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian interim disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai

Grup menilai penurunan nilai pada aset keuangan dengan biaya perolehan yang diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen harus mempertimbangkan informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan *roll rate* dan *discounted cash flow* untuk menilai kas dan setara kas, dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain.

Pada kas dan setara kas serta dana dibatasi penggunaannya, nilai cadangan tidak material sehingga Grup tidak melakukan penurunan nilai atas aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset keuangan telah diungkapkan dalam Catatan 5, 6, 7 dan 8.

Pensiun dan Imbalan Pascakerja

Penentuan kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun, dan tingkat kematian.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Estimates and Judgments (Continued)

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the interim consolidated financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment loss

Group assesses its financial assets measured at amortized cost for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes a judgement as to whether there is reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort about past events, current conditions and forecasts of future conditions. Group applies simplified approach using *roll rate* and *discounted cash flow* to measuring cash and equivalents, restricted fund, trade receivables and other receivable.

For cash and cash equivalents and restricted funds, the impairment value is not material so the Group does not reduce the value of these financial assets. The carrying amounts of financial assets are disclosed in Notes 5, 6, 7 and 8.

Pension and Post-Employment Benefits

The determination of the Group's cost for pension and employee benefits liabilities is depended on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diperlakukan sesuai dengan kebijakan yang dijelaskan pada Catatan 2.v. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan material dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto (Catatan 27).

Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Hak Pengoperasian Aset Prasarana

Biaya perolehan aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya, sedangkan hak pengoperasian aset prasarana perkeretaapian diamortisasi berdasarkan metode garis lurus. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 40 tahun, sedangkan masa manfaat hak pengoperasian aset prasarana perkeretaapian sesuai dengan perjanjian pengelolaan aset prasarana antara 30-50 tahun. Umur masa manfaat ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan dan amortisasi masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat atas aset tetap dan hak pengelolaan aset pada tanggal-tanggal pelaporan masing-masing diungkapkan dalam Catatan 15 dan 17.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati, dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Proyeksi arus kas tidak termasuk aktivitas restrukturisasi

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Estimates and Judgments (Continued)

Actual results that differ from the Group's assumptions are treated in accordance with the policies as mentioned in Note 2.v. While the Group believes that the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's assumption may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense (Note 27).

Depreciation of Fixed Assets and Amortization of Infrastructure Assets Operating Rights

The costs of fixed asset, except from land, are depreciated on the straight-line method over their estimated useful lives, while the railway infrastructure assets operating rights are amortized based on the straight-line method. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 3 to 40 years, while the useful life of the railway infrastructure assets accordance to the agreement of operating rights of assets from 30-50 years. These are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation and amortization changes could be revised. The net carrying amounts of the Group's fixed assets and railways infrastructure assets operating rights at reporting dates are disclosed in Notes 15 and 17, respectively.

Impairment of Non-Financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or a cash gain unit exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

The value in use calculation is based on a discounted cash flow model. The future cash flow projection does not include restructuring

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting (Lanjutan)

Grup yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari unit penghasil kas yang diuji.

Nilai terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Pajak Penghasilan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya pendapatan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atau kelebihan bayar atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui aset atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi bahwa nilai tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo lebih rendah dari kelebihan bayar pajak.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan diakui atas seluruh beda temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen diharuskan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

Penentuan Nilai Wajar Liabilitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN")

Nilai wajar liabilitas PEN dihitung menggunakan metode *discounted cash flow* dengan suku bunga 5,07% per tahun selama 10 tahun masa pinjaman. *Projected cash flow* yang digunakan telah memperhitungkan kemampuan Perusahaan dalam memenuhi indikator pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Estimates and Judgments (Continued)

activities that the Group is not yet committed to or significant future investments that will enhance the asset's performance of the cash gain unit being tested.

The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the expected future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Income Tax

Uncertainties over the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, that could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Significant judgment is undertaken to determine the provision or overpayment of corporate income tax. There are certain transactions and computations which the ultimate tax determination is uncertain in the ordinary course of business. The Group recognized the assets on corporate income tax based on an estimate that any additional corporate income tax that will be due still lower than the amount of tax overpayment.

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all of deductible temporary differences which is probable that the taxable profit will be available against thus the losses can be utilized. The significant estimation made by management are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based on the time of use and the level of future taxable profit and future tax planning strategies.

Determination of the Fair Value of "Program Pemulihan Ekonomi Nasional ("PEN") Liability

The fair value of PEN liabilities is calculated using the discounted cash flow method with an interest rate of 5.07% per annum for the 10 years of the loan period. The projected cash flow used has taken into account the Company's ability to meet the payment indicators based on the loan agreement.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. Kas dan Setara Kas

5. Cash and Cash Equivalents

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Kas				Cash on Hand
Kas Kantor	12.231.874	18.253.925	10.139.476	Cash on Hand-Office
Kas Stasiun	1.469.532	2.562.969	2.863.194	Cash on Hand-Stations
Jumlah Kas	13.701.406	20.816.894	13.002.670	Total Cash on Hand
Bank				Cash in Banks
Pihak Berelasi (Catatan 42)	3.678.059.049	3.456.887.394	4.894.631.652	Related Parties (Note 42)
Pihak Ketiga				Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	170.206.182	141.792.873	203.210.705	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	71.345.583	7.612.571	10.444.565	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	32.926.369	23.655.075	32.194.776	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank Permata Tbk	32.378.701	51.148.964	32.884.382	PT Bank Permata Tbk
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	6.023.454	42.135.072	104.957.952	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	3.337.319	3.332.519	3.228.504	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank DKI	3.018.666	3.639.375	1.723.322	PT Bank DKI
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	548.401	548.402	548.401	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	388.988	386.983	383.264	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Subjumlah	320.173.663	274.251.834	389.575.871	Subtotal
Jumlah Bank	3.998.232.712	3.731.139.228	5.284.207.523	Total Cash in Bank
Deposito Berjangka				Time Deposit
Pihak Berelasi (Catatan 42)	537.885.214	1.386.615.360	398.510.000	Related Parties (Note 42)
Jumlah Deposito	537.885.214	1.386.615.360	398.510.000	Total Deposit
Jumlah	4.549.819.332	5.138.571.482	5.695.720.193	Total

Berdasarkan mata uang:

By currencies:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Kas				Cash on Hand
Rupiah	13.701.406	20.816.894	13.002.670	Rupiah
Bank				Cash in Bank
Rupiah	1.378.091.530	2.548.877.622	4.007.355.256	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	2.569.188.347	1.173.196.787	1.258.865.187	United States Dollar
Euro	50.298.453	8.372.273	17.243.459	Euro
Yen Jepang	654.382	692.546	743.621	Japanese Yen
Deposito Berjangka				Time Deposit
Dolar Amerika Serikat	--	770.800.000	157.310.000	United States Dollar
Rupiah	537.885.214	615.815.360	241.200.000	Rupiah
Jumlah	4.549.819.332	5.138.571.482	5.695.720.193	Total

Kisaran suku bunga per tahun dan jangka waktu deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Interest rates per annum and maturity period of time deposits are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Dolar Amerika Serikat	--	2,85% - 5,25%	1,25% - 2,85%	United States Dollar
Rupiah	5,20%-5,30%	2,40% - 6,00%	2,50% - 5,00 %	Rupiah
Jangka Waktu	1-3 Bulan/ Months Automatic Roll Over (ARO)	1-3 Bulan/ Months Automatic Roll Over (ARO)	1-3 Bulan/ Months Automatic Roll Over (ARO)	Maturity Year

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. Dana Dibatasi Penggunaannya

6. Restricted Funds

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Pihak Berelasi (Catatan 42)	2.693.279.762	2.560.880.158	5.590.894.318	Related Parties (Note 42)
Pihak Ketiga				Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk	26.932.514	26.932.515	19.491.658	PT Bank Central Asia Tbk
China Development Bank	7.012	--	--	China Development Bank
Jumlah	2.720.219.288	2.587.812.673	5.610.385.976	Total

Berdasarkan mata uang:

By currencies:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Rupiah	1.817.065.821	1.687.689.985	5.610.385.819	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	903.147.268	900.122.688	157	United States Dollar
Yuan Tiongkok	6.199	--	--	Chinese Yuan
Jumlah	2.720.219.288	2.587.812.673	5.610.385.976	Total

Rincian peruntukan dana dibatasi penggunaannya adalah sebagai berikut:

Details allocation of restricted funds are as follows:

No	Peruntukan Dana/ Allocation of Funds	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31	
			2023	2022
1.	Sinking Fund Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung/ Sinking Fund for Jakarta Bandung High Speed Railway Project	1.395.238.443	900.122.688	--
2.	Dana PMN untuk Proyek LRT Jabodebek/ PMN Fund for LRT Jabodebek Project	803.218.323	818.736.431	2.153.637.590
3.	Dana Floating Kartu Multi Trip (KMT)/ Floating Money Trip Card (KMT)	201.166.161	195.584.566	148.546.590
4.	Deposit atas Perjanjian Kontribusi untuk Proyek LRT Jabodebek/ Contribution Deposits for LRT Jabodebek Project	100.432.465	--	--
5.	Pembukaan L/C Impor Suku Cadang dan Peralatan Pemeliharaan Sistem Brake EMU 6000, EMU 8500/800, Pembelian Suku Cadang dan Jaminan Pinjaman Bank/ Opening the L/C Import Spare Parts and Maintenance Equipment Brake Systes EMU 6000, EMU 8500/800 and the Purchase of Spare Parts	89.290.531	82.563.909	50.937.864
6.	Proyek KA Bandara Soekarno-Hatta/ Soekarno-Hatta Airport Train Railway Project	61.769.430	61.769.430	56.372.595
7.	Pengadaan Suku Cadang Sarana/ Procurement Maintenance Operation Spare Parts and Services (MOSS)	43.321.125	18.199.305	382.009
8.	Dana PMN untuk Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung/ PMN Fund for Jakarta Bandung High Speed Railway Project	25.732.204	510.785.602	3.200.000.000
9.	Pemeliharaan Sarana KA Bandara Kualanamu, Medan/ Maintenance Agreement of Airport Rolling Stock in Kualanamu, Medan	38.784	38.751	38.674
10.	Proyek Commuter Jabodetabek/ Commuter Jabodebek Project	11.821	11.810	11.783
11.	Pembelian Sarana KA Stasiun Soekarno-Hatta/ Purchasing of Rolling Stock for Soekarno-Hatta Station	--	181	458.871
	Jumlah/Total	2.720.219.288	2.587.812.673	5.610.385.976

7. Piutang Usaha

7. Trade Receivables

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Pihak Berelasi (Catatan 42)	1.535.582.608	1.266.965.945	963.280.644	Related Parties (Note 42)
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.276.843)	(13.851.143)	(28.650.899)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Berelasi - Neto	1.522.305.765	1.253.114.802	934.629.745	Related Parties - Net
Pihak Ketiga	769.477.830	887.185.621	709.101.183	Third Parties
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(302.645.142)	(270.705.648)	(237.392.861)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Ketiga - Neto	466.832.688	616.479.973	471.708.322	Third Parties - Net
Neto	1.989.138.453	1.869.594.775	1.406.338.067	Net

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. Piutang Usaha (Lanjutan)

7. Trade Receivables (Continued)

Berdasarkan mata uang:

By currencies:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Rupiah	2.156.671.528	2.022.067.062	1.514.495.695	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	148.388.910	132.084.504	157.886.132	United States Dollar
Jumlah	2.305.060.438	2.154.151.566	1.672.381.827	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(315.921.985)	(284.556.791)	(266.043.760)	Allowance for Impairment Losses
Neto	1.989.138.453	1.869.594.775	1.406.338.067	Net

Berdasarkan umur:

By age:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
0 - 30 Hari	1.708.204.234	1.653.982.587	1.190.788.301	0 - 30 Days
31 - 90 Hari	127.533.445	176.516.181	113.776.059	31 - 90 Days
91 - 360 Hari	215.602.239	87.135.226	103.240.557	91 - 360 Days
> 360 Hari	253.720.520	236.517.572	264.576.910	> 360 Days
Jumlah	2.305.060.438	2.154.151.566	1.672.381.827	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(315.921.985)	(284.556.791)	(266.043.760)	Allowance for Impairment Losses
Neto	1.989.138.453	1.869.594.775	1.406.338.067	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Saldo Awal	(284.556.791)	(266.043.760)	(305.323.488)	Beginning Balance
Pemulihan/(Penambahan)	(31.365.194)	(18.513.031)	39.279.728	Recovery/(Addition)
Saldo Akhir	(315.921.985)	(284.556.791)	(266.043.760)	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover the possible losses on uncollectible accounts.

Tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan jaminan atas pinjaman.

There are no trade receivables that pledged as collateral for the loan.

8. Piutang Lain-lain

8. Other Receivables

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Piutang Lain-lain - Lancar:				Others Receivable - Current:
Pihak Berelasi (Catatan 42)	8.183.000	8.183.000	--	Related Parties (Note 42)
Pihak Ketiga	47.529.094	60.977.138	92.696.413	Third Parties
Dikurangi:				Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(7.705.596)	(7.573.148)	(2.693.350)	Allowance for Impairment Losses
Neto	48.006.498	61.586.990	90.003.063	Net
Piutang Lain-lain - Tidak Lancar:				Other Receivables - Non Current:
Pihak Berelasi (Catatan 42)	7.324.759.755	109.925.523	109.925.523	Related Parties (Note 42)
Dikurangi:				Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(109.925.523)	(109.925.523)	(109.925.523)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Berelasi - Neto	7.214.834.232	--	--	Related Parties - Net
Pihak Ketiga	62.615.570	62.615.570	62.615.570	Third Parties
Dikurangi:				Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(62.615.570)	(62.615.570)	(62.615.570)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Ketiga - Neto	--	--	--	Third Parties - Net
Neto	7.262.840.730	61.586.990	90.003.063	Net

8. Piutang Lain-lain (Lanjutan)

8. Other Receivables (Continued)

Piutang Lain-lain Tidak Lancar Pihak Berelasi pada 31 Mei 2024 terutama merupakan transaksi pinjaman kepada Entitas Ventura Bersama yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang pendanaannya berasal dari pinjaman China Development Bank berdasarkan perjanjian No. KL.702/I/33/KA-2024 tanggal 31 Januari 2024 (Catatan 50).

Other Non-Current Receivables from Related Parties as May 31, 2024 mainly represents loan transaction to Joint Venture Entity, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), whose funding comes from China Development Bank loan based on agreement No. KL.702/I/33/KA-2024 dated 31 January 2024 (Note 50).

Berdasarkan mata uang:

By currencies:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Dolar Amerika Serikat	3.754.361.735	--	--	United States Dollar
Yuan Tiongkok	3.460.472.497	--	--	Chinese Yuan
Rupiah	228.253.187	241.701.231	265.237.506	Rupiah
Jumlah	7.443.087.419	241.701.231	265.237.506	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(180.246.689)	(180.114.241)	(175.234.443)	Allowance for Impairment Losses
Neto	7.262.840.730	61.586.990	90.003.063	Net

Berdasarkan umur:

By age:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Belum Jatuh Tempo	7.214.834.232	--	--	Outstanding
0 - 30 Hari	37.858.442	60.254.842	89.350.419	0 - 30 Days
31 - 90 Hari	1.061.972	30.202	247.658	31 - 90 Days
91 - 360 Hari	9.127.704	1.343.565	1.730.388	91 - 360 Days
> 360 Hari	180.205.069	180.072.622	173.909.041	> 360 Days
Jumlah	7.443.087.419	241.701.231	265.237.506	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(180.246.689)	(180.114.241)	(175.234.443)	Allowance for Impairment Losses
Neto	7.262.840.730	61.586.990	90.003.063	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Saldo Awal	(180.114.241)	(175.234.443)	(1.106.010.115)	Beginning Balance
Pemulihan/(Penambahan)	(132.448)	(4.879.798)	930.775.672	Recovery/(Addition)
Saldo Akhir	(180.246.689)	(180.114.241)	(175.234.443)	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

Management believes that the allowance for impairment losses on receivables is adequate to cover possible losses on the uncollectible other receivables.

Eksposur maksimum risiko kredit pada tanggal pelaporan adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori piutang yang disebutkan di atas. Grup tidak menguasai aset-aset sebagai jaminan piutang.

The maximum exposure to credit risk at the reporting date is the carrying amount of each class of receivables mentioned above. The Group does not recognize any asset as collateral for receivables.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. Persediaan

9. Inventories

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Suku Cadang Sarana	1.120.679.580	1.238.415.440	1.065.426.895	Rolling Stock Spare Parts
Suku Cadang Prasarana	335.683.856	461.538.274	223.925.849	Infrastructure Spare Parts
Lain-lain	21.498.709	22.696.178	23.090.194	Others
Jumlah	1.477.862.145	1.722.649.892	1.312.442.938	Total
Dikurangi:				Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(167.155.565)	(194.300.721)	(167.128.997)	Allowance for Impairment Losses
Neto	1.310.706.580	1.528.349.171	1.145.313.941	Net

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Saldo Awal	(194.300.721)	(167.128.997)	(179.073.842)	Beginning Balance
Pemulihan/(Penambahan)	27.145.156	(27.171.724)	11.944.845	Recovery/(Addition)
Saldo Akhir	(167.155.565)	(194.300.721)	(167.128.997)	Ending Balance

Suku cadang sarana merupakan suku cadang yang digunakan untuk perawatan rutin/berkala armada lokomotif, kereta (penumpang, pembangkit, diesel, dan listrik) dan gerbong yang dilakukan di Balai Yasa dan Dipo Perusahaan yang tersebar di Daerah Operasi dan Divisi Regional.

Rolling stock spare parts represent spare parts used for routine/scheduled maintenance of locomotives, trains (passenger, generator, diesel, and electric) and wagons which are undertaken in the Company's Balai Yasa and Depots located in various Operational Regions and Regional Divisions.

Suku cadang prasarana digunakan untuk perawatan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada prasarana pokok yang meliputi jalan rel kereta api, jembatan, perlintasan, persinyalan, instalasi listrik dan instalasi komunikasi. Sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 tentang Perkeretaapian, penyelenggara prasarana perkeretaapian wajib merawat prasarana perkeretaapian agar tetap layak operasi.

Infrastructure spare parts are used to maintain or repair any damages occurred in the main infrastructures which comprise of railway-road, bridge, cross-bar-crossing, signal, electric installation, and communication installation. According to Law No. 13 Year 1992 regarding Railways as replaced by Law No.23 Year 2007 dated April 25, 2007 regarding Railways, the operator of the railway infrastructure has obligation to maintain the operating feasible of railway infrastructures.

Jumlah persediaan yang telah digunakan dan diakui sebagai beban perawatan sarana dan prasarana sebesar Rp1.009.257.012 dan Rp679.334.143 untuk periode-periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 dan sebesar Rp1.942.556.875 dan Rp1.554.174.318 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The amount of inventory that has been used and recognized as facilities and infrastructure maintenance expense amounted to Rp1,009,257,012 and Rp679,334,143 for the five-month periods ended May 31, 2024 and 2023 and Rp1,942,556,875 and Rp1,554,174,318 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

Perusahaan tidak mengasuransikan persediaan terhadap risiko kecelakaan, kebakaran dan jenis risiko kerugian lainnya.

The Company does not insure inventories against any risk of accidents, fire and other types of risk of losses.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah cukup untuk menutupi kerugian penurunan nilai atas nilai persediaan usang.

Management believes that the allowance for impairment losses on inventories are adequate to cover possible losses on the obsolete inventories.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. Pendapatan Masih akan Diterima

10. Accrued Income

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Pihak Berelasi (Catatan 42)	2.818.795.055	616.070.541	884.228.974	Related Parties (Note 42)
Dikurangi:				Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(194.519.848)	(177.034.197)	(164.662.291)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Berelasi - Neto	2.624.275.207	439.036.344	719.566.683	Related Parties - Net
Pihak ketiga				Third parties
Jasa Angkutan Barang	243.232.961	275.008.098	137.680.851	Freight Transportation Services
Konstruksi	6.326.105	6.253.848	3.595.759	Construction
Jasa Parkir	393.788	8.825.591	8.825.591	Parking Services
Lainnya	181.300.175	42.016.724	71.424.186	Others
Dikurangi:				Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(8.585.594)	(7.400.565)	(1.476.099)	Allowance for Impairment Losses
Pihak Ketiga - Neto	422.667.435	324.703.696	220.050.288	Third Parties - Net
Jumlah	3.046.942.642	763.740.040	939.616.971	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai sebagai berikut:

The movement of the allowance for impairment losses is as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Saldo Awal	(184.434.762)	(166.138.390)	(165.865.521)	Beginning Balance
Penambahan	(18.670.680)	(18.296.372)	(272.869)	Addition
Saldo Akhir	(203.105.442)	(184.434.762)	(166.138.390)	Ending Balance

Pendapatan masih akan diterima dari pihak berelasi terdiri dari subsidi yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka memberikan layanan angkutan kereta api kepada masyarakat, kompensasi atas *Infrastructure Maintenance Operation* (IMO), dan kompensasi kewajiban pelayanan publik (PSO) yang merupakan tagihan kepada Pemerintah atas kompensasi PSO berdasarkan Perjanjian antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan Perusahaan sebagai berikut:

- Perjanjian No. HK.201/1/4/DJKA/2024 dan No. KL.701/II/10/KA-2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2024.
- Perjanjian No. HK.201/1/5/DJKA/2024 dan No. KL.701/II/9/KA-2024 tanggal 19 Februari 2024 tentang Subsidi Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (*Light Rail Transit*) Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi.

Pendapatan masih akan diterima jasa angkutan barang merupakan tagihan atas angkutan barang yang sudah diantar namun belum ditagihkan yang meliputi angkutan batu bara, angkutan semen, angkutan peti kemas, angkutan parcel/hantaran, angkutan bahan bakar minyak, angkutan perkebunan, angkutan logam/besi baja, dan angkutan lainnya.

Accrued income from related parties include subsidies provided by the Government in order to provide rail transportation services to the public, compensation for *Infrastructure Maintenance Operation* (IMO) compensation for public service obligations (PSO), which is a claim to the Government for PSO compensation based on Agreement between the Directorate General of Railways and Companies:

- Agreement No. HK.201/1/4/DJKA/2024 and No. KL.701/II/10/KA-2024 dated February 19, 2024 concerning the Operation of the Public Service Obligation (PSO) in the Field of Rail Transportation for Economy Class Services for 2024.
- Agreement No. HK.201/1/5/DJKA/2024 and No. KL.701/II/9/KA-2024 dated February 19, 2024 concerning Subsidies for the Operation of Integrated Light Rail Transit in the Jakarta, Bogor, Depok and Bekasi Regions.

Accrued income of freight transportation service represents revenue generated from freight transportations which are already delivered but not billed yet, comprising of coal transportation, cement transportation, container transportation, parcel/delivery transportation, fuel transportation, plantation transportation, metal/steel transportation, and other transportations.

10. Pendapatan Masih akan Diterima (Lanjutan)

Pendapatan masih akan diterima lainnya merupakan catering, jasa *outsourcing*, biaya pekerjaan, iklan dan promosi.

10. Accrued Income (Continued)

Other accrued income represents revenues generated from catering, outsourcing service, service fee, promotion, and advertisement.

11. Uang Muka

11. Advances

a. Uang Muka Jangka Pendek

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Uang Muka Dinas	62.645.347	10.881.934	3.851.772	Operating Advances
Uang Muka Pihak Ketiga	1.595.423	81.937.291	53.798.799	Third Parties Advances
Jumlah	64.240.770	92.819.225	57.650.571	Total

Uang muka pihak ketiga merupakan pembayaran di muka kepada pemasok dan pembelian barang.

Third parties' advances represent the advance payments to suppliers and inventory purchases.

b. Uang Muka Jangka Panjang

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Uang Muka Setoran Modal	2.743.252.384	2.728.053.311	--	Paid in Capital Advances
Uang Muka Aset	222.659.674	365.714.604	20.640.157	Assets Advances
Jumlah	2.965.912.058	3.093.767.915	20.640.157	Total

Uang muka modal disetor merupakan setoran modal kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ("PSBI") yang terdiri dari:

1. Setoran tunai sebesar Rp2.030.804.000 berdasarkan Perjanjian No. KL.705/III/5/KA-2023 tanggal 9 Maret 2023.
2. Setoran tunai sebesar Rp14.630.311 berdasarkan Perjanjian No. KL.702/V/8/KA-2023 tanggal 23 Mei 2023.
3. Setoran tunai sebesar Rp682.619.000 berdasarkan Perjanjian No. KL.705/VI/13/KA-2023 tanggal 22 Juni 2023.
4. Setoran tunai sebesar Rp15.199.073 berdasarkan Perjanjian No. KL.702/II/33/KA-2024 tanggal 31 Januari 2024.

Pada 31 Mei 2024, sebagian besar uang muka aset merupakan uang muka pembelian rangkaian KA Eksekutif *New Generation*, dan pembangunan pusat data.

b. Long-term Advances

Paid in capital advances represents paid on PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia ("PSBI") which consists of:

1. Paid in capital amounting to Rp2,030,804,000 based on Agreement No. KL.705/III/5/KA-2023 dated March 9, 2023.
2. Paid in capital amounting to Rp14,630,311 based on Agreement No. KL.702/V/8/KA-2023 dated May 23, 2023.
3. Paid in capital amounting to Rp682,619,000 based on Agreement No. KL.705/VI/13/KA-2023 dated June 22, 2023.
4. Paid in capital amounting to Rp15,119,073 based on Agreement No. KL.702/II/33/KA-2024 dated January 31, 2024.

As of May 31, 2024 most of the advances for assets represent advances which consists of New Generation Train, and data center construction.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

12. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 masing-masing sebesar Rp225.647.774, Rp167.365.297, dan Rp62.652.603.

Biaya dibayar di muka merupakan pembayaran di muka kepada sub kontraktor dan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Grup untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sedang dikerjakan, pembayaran jasa asuransi dan sewa.

12. Prepaid Expenses

Prepaid expenses as May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 amounted to Rp225,647,774, Rp167,365,297, dan Rp62,652,603, respectively.

Prepaid expenses represent advance payment to sub-contractors and all costs incurred to complete Group's projects under construction, insurance premium and rent.

13. Perpajakan

13. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Perusahaan				The Company
Pajak Penghasilan				Income Tax
Pasal 28a:				Article 28a:
2023	130.584.254	128.074.019	--	2023
2022	96.201.568	96.201.568	98.709.717	2022
2021	--	--	67.009.624	2021
Pajak Pertambahan Nilai	438.251.877	378.611.594	103.540.737	Value-Added Tax
Subjumlah	665.037.699	602.887.181	269.260.078	Subtotal
Entitas anak				Subsidiaries
Pajak Penghasilan				Income Tax
Pasal 4 (2)	150.192	110.169	--	Article 4 (2)
Pasal 28a:				Article 28a:
2024	15.588.192	--	--	2024
2023	28.648.542	28.648.542	--	2023
2021	--	--	9.873.157	2021
Pajak Pertambahan Nilai	86.501.182	58.654.531	24.762.782	Value-Added Tax
Subjumlah	130.888.108	87.413.242	34.635.939	Subtotal
Jumlah	795.925.807	690.300.423	303.896.017	Total

a. Prepaid Taxes

b. Utang Pajak

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Perusahaan				The Company
Pajak Penghasilan				Income Tax
Pasal 4 (2)	2.459.193	29.350.740	12.367.793	Article 4 (2)
Pasal 21	28.233.003	160.887.278	64.991.629	Article 21
Pasal 22	7.069.116	9.771.232	5.868.954	Article 22
Pasal 23	7.174.963	23.138.521	21.845.785	Article 23
Pasal 29	124.384.504	--	--	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	408.820.321	342.704.025	141.624.718	Value-Added Tax
Subjumlah	578.141.100	565.851.796	246.698.879	Subtotal
Entitas anak				Subsidiaries
Pajak Penghasilan				Income Tax
Pasal 4 (2)	1.128.525	6.503.551	3.264.006	Article 4 (2)
Pasal 21	6.800.158	26.818.157	21.409.723	Article 21
Pasal 23	1.585.454	2.010.181	1.552.318	Article 23
Pasal 25	7.881.509	4.812.198	701.651	Article 25
Pasal 29	8.453.801	12.178.166	32.771.764	Article 29
Pajak Pertambahan Nilai	21.430.821	3.571.454	2.934.389	Value-Added Tax
Subjumlah	47.280.268	55.893.707	62.633.851	Subtotal
Jumlah	625.421.368	621.745.503	309.332.730	Total

b. Taxes Payable

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

**c. Perhitungan Taksiran Pajak
Penghasilan Badan**

**c. Self-Assessment of Corporate Income
Tax**

Rekonsiliasi antara laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi konsolidasian dengan laba kena pajak, menjadi dasar dalam pengisian SPT PPh Badan adalah sebagai berikut:

Reconciliation between the consolidated profit before income tax according to the consolidated income statement and taxable income, which is the basis for filing the Corporate Income Tax Return, are as follows:

	31 Mei/May 31		31 Desember/December 31		
	2024	2023	2023	2022	
Laba Konsolidasian					Consolidated Income
Sebelum Pajak Penghasilan	1.454.604.637	1.397.715.159	2.247.487.167	2.210.588.300	Before Tax Income
Dikurangi:					Less:
Laba Entitas Anak- Bersih	235.410.701	324.391.333	594.715.201	361.975.997	Subsidiaries Profit - Net
Efek Eliminasi	38.703.001	(74.114.748)	(142.722.771)	(92.430.094)	Elimination Effect
Laba Sebelum Pajak	1.180.490.935	1.147.438.574	1.795.494.737	1.941.042.397	Profit Before Tax
Beda Waktu:					Timing Differences:
Penyusutan	(159.028.943)	(138.243.835)	(392.039.299)	(272.496.267)	Depreciation
Amortisasi	(16.610.101)	(20.714.459)	(92.599.471)	(43.069.098)	Amortization
Imbalan Pascakerja	234.167.246	255.304.473	371.994.656	391.642.151	Post-Employment Benefit
Penurunan Nilai Aset Tetap	--	--	(68.614.849)	72.404.085	Impairment of Fixed Assets
Penurunan/(Pemulihan) Nilai Persediaan	(27.145.157)	17.391.374	27.171.738	(11.944.845)	Impairment/(Recovery) of Inventories
Koreksi Rugi Fiskal	(73.881.620)	--	--	--	Tax Lossess Correction
Penyisihan/(Pemulihan) Penurunan Nilai Aset Keuangan	90.766.193	(11.657.745)	(2.351.899)	(59.983.706)	Allowance/(Recovery) for Impairment Losses
Subjumlah	48.267.618	102.079.808	(156.439.124)	76.552.320	Subtotal
Beda Tetap:					Permanent Differences:
Beban Tidak Diperkenankan	138.941.275	326.192.487	379.896.698	431.356.098	Non-Deductible Expenses
Pendapatan Bunga	(56.290.763)	(72.812.017)	(161.777.663)	(97.885.674)	Interest Income
Pendapatan Sewa	(323.285.643)	(387.154.865)	(850.545.524)	(763.469.835)	Rent Revenue
Pendapatan Dividen dari Entitas Anak	--	--	(120.420.411)	(86.558.605)	Dividend Income from Subsidiaries
Subjumlah	(240.635.131)	(133.774.395)	(752.846.900)	(516.558.016)	Subtotal
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	988.123.422	1.115.743.987	886.208.713	1.501.036.701	Estimated Taxable Income
Rugi Fiskal Tahun Sebelumnya:					Fiscal Losses Prior Year:
2022	--	1.250.368.667	--	--	2022
2021	--	(1.101.908.998)	(960.090.331)	(990.200.403)	2021
2020	--	(1.609.859.715)	--	(1.470.926.629)	2020
Akumulasi Rugi Fiskal	988.123.422	(345.656.059)	(73.881.618)	(960.090.331)	Accumulated Fiscal Losses
Taksiran Pajak Kini Perusahaan	217.387.153	--	--	--	Estimated Current Tax of the Company
Kredit Pajak Penghasilan:					Income Tax Deduction:
Pasal 22	(4.142.005)	--	(7.496.342)	(2.680.982)	Article 22
Pasal 23	(88.860.644)	--	(120.577.677)	(96.028.735)	Article 23
Jumlah Kredit Pajak	(93.002.649)	--	(128.074.019)	(98.709.717)	Total Tax Credit
Kurang/(Lebih) Bayar Pajak - Perusahaan	124.384.504	--	(128.074.019)	(98.709.717)	Tax Loss/(Over) Payment - the Company

Dalam laporan keuangan interim ini, jumlah penghasilan kena pajak pada 31 Mei 2024 didasarkan atas perhitungan sementara.

In this interim financial report, the amount of taxable income as of May 31, 2024 is based on provisional calculation.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak dengan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between tax expense and results of multiplication of accounting profit before tax with prevailing tax rate, are as follows:

	31 Mei/May 31		31 Desember/December 31		
	2024	2023	2023	2022	
Laba Konsolidasian					Consolidated Income
Sebelum Pajak Penghasilan	1.454.604.637	1.397.715.159	2.247.487.167	2.210.588.300	Before Tax Income
Dikurangi:					Less:
Laba Entitas Anak- Bersih	235.410.701	324.391.333	594.715.201	361.975.997	Subsidiaries Profit - Net
Efek Eliminasi	38.703.001	(74.114.748)	(142.722.771)	(92.430.094)	Elimination Effect
Laba Sebelum Pajak	1.180.490.935	1.147.438.574	1.795.494.737	1.941.042.397	Profit Before Tax
Pajak yang Dihitung Sesuai Tarif yang Berlaku	259.708.006	252.436.486	395.008.842	427.029.327	Tax Calculated at Applicable Tax Rate
Koreksi Beda Tetap	(52.939.729)	(29.430.366)	(165.626.318)	(113.642.764)	Permanent Difference Corrections
Koreksi Rugi Fiskal	--	--	--	55.141.170	Tax Loss Correction
Penyesuaian Beban Pajak Kini	(2.510.235)	--	2.508.149	(1.446.561)	Current Tax Expense Adjustment
Penyesuaian Beban Pajak Tangguhan	--	--	--	(28.881.902)	Deferred Tax Expense Adjustment
Beban Pajak Perusahaan	204.258.042	223.006.120	231.890.673	338.199.270	The Company's Tax Expense
Beban Pajak Entitas Anak	52.491.857	76.335.010	144.048.357	186.399.810	Subsidiary's Tax Expense
Beban Pajak Konsolidasian	256.749.899	299.341.130	375.939.030	524.599.080	Consolidated Tax Expense

d. Rincian Beban Pajak

d. Details of Tax Expense

	31 Mei/May 31		31 Desember/December 31		
	2024	2023	2023	2022	
Perusahaan:					The Company:
Beban Pajak Kini					Current Tax Expense
Pajak Kini	217.387.153	--	--	--	Current Tax
Penyesuaian Pajak Tahun Lalu	(2.510.235)	--	2.508.149	(1.446.561)	Prior Year Tax Adjustment
Pajak Tangguhan	(10.618.876)	223.006.120	229.382.524	339.645.831	Deferred Tax
Jumlah	204.258.042	223.006.120	231.890.673	338.199.270	Total
Entitas Anak:					Subsidiaries:
Pajak Kini	49.199.964	73.958.046	144.914.096	129.815.754	Current Tax
Penyesuaian Pajak Tahun Lalu	--	--	967.405	1.212.318	Prior Year Tax Adjustment
Pajak Tangguhan	3.291.893	2.376.964	(1.833.144)	55.371.738	Deferred Tax
Jumlah	52.491.857	76.335.010	144.048.357	186.399.810	Total
Konsolidasian:					Consolidated:
Pajak Kini	266.587.117	73.958.046	144.914.096	129.815.754	Current Tax
Penyesuaian Pajak Tahun Lalu	(2.510.235)	--	3.475.554	(234.243)	Prior Year Tax Adjustment
Pajak Tangguhan	(7.326.983)	225.383.084	227.549.380	395.017.569	Deferred Tax
Jumlah	256.749.899	299.341.130	375.939.030	524.599.080	Total

Pada 31 Mei 2024, penyesuaian beban pajak merupakan penerimaan atas bukti potong setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pelaporan pajak.

On May 31, 2024, the adjustment to tax expense represents the receipt of withholding slip after the date of financial statements up to the date of annual tax return.

Pada 31 Desember 2023 dan 2022, penyesuaian beban pajak merupakan penyesuaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan.

December 31, 2023 and 2022, the adjustment to tax expense represents the Corporate Income Tax Return.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)

For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

e. Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Rincian dari aset dan liabilitas pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

e. Deferred Tax

Deferred tax is estimated based on the effect of temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities for the financial reporting with taxable bases of assets and liabilities. Details of deferred tax assets and liabilities are as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Dibebankan (Dikreditkan) ke Laba Rugi/ Charged (Credited) to Profit or Loss	Dibebankan (Dikreditkan) ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charge (Credited) to Other Comprehensive Income	31 Mei 2024/ May 31, 2024	
Perusahaan:					The Company:
Aset Tetap	(688.997.099)	(34.986.367)	--	(723.983.466)	Fixed Assets
Aset Takberwujud	(73.011.434)	(3.654.222)	--	(76.665.656)	Intangible Assets
Rugi Fiskal	16.253.957	(16.253.957)	--	--	Tax Loss
Liabilitas Imbalan Kerja dan Persediaan	1.266.450.688	51.516.794	(18.818.956)	1.299.148.526	Employee Benefits Liabilities Impairment of Fixed Assets and Inventories
Penurunan Nilai Aset Tetap dan Persediaan	124.222.637	(5.971.935)	--	118.250.702	Allowance for Impairment Losses of Financial Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	454.960.774	19.968.563	--	474.929.337	Losses of Financial Assets
Sub Jumlah	<u>1.099.879.523</u>	<u>10.618.876</u>	<u>(18.818.956)</u>	<u>1.091.679.443</u>	Sub Total
Entitas anak:					Subsidiaries:
Aset Tetap	20.626.444	(1.892.588)	--	18.733.856	Fixed Assets
Aset Hak Guna	(65.703.730)	15.409.229	--	(50.294.501)	Right of Use Assets
Liabilitas Sewa	73.575.209	(18.944.064)	--	54.631.145	Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja dan Persediaan	3.606.789	1.196.757	(731.436)	4.072.110	Employee Benefits Liabilities Impairment of Fixed Assets
Penurunan Nilai Aset Tetap dan Persediaan	2.653.333	--	--	2.653.333	Allowance for Impairment Losses of Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	56.771.268	1.595.374	--	58.366.642	Maintenance Expenses
Beban Pemeliharaan	25.523.814	(656.601)	--	24.867.213	
Sub Jumlah	<u>117.053.127</u>	<u>(3.291.893)</u>	<u>(731.436)</u>	<u>113.029.798</u>	Sub Total
Jumlah	<u>1.216.932.650</u>	<u>7.326.983</u>	<u>(19.550.392)</u>	<u>1.204.709.241</u>	Total
			(Dibebankan) Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charge (Credited) to Other		
		(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/ Charged (Credited) to Profit or Loss	Comprehensive Income	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Perusahaan:					The Company:
Aset Tetap	(602.748.453)	(86.248.646)	--	(688.997.099)	Fixed Assets
Aset Takberwujud	(52.639.550)	(20.371.884)	--	(73.011.434)	Intangible Assets
Rugi Fiskal	211.219.873	(194.965.916)	--	16.253.957	Tax Loss
Liabilitas Imbalan Kerja dan Persediaan	1.174.977.939	81.838.824	9.633.925	1.266.450.688	Employee Benefits Liabilities Impairment of Fixed Assets and Inventories
Penurunan Nilai Aset Tetap dan Persediaan	133.340.122	(9.117.485)	--	124.222.637	Allowance for Impairment Losses of Financial Assets
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	455.478.191	(517.417)	--	454.960.774	Losses of Financial Assets
Subjumlah	<u>1.319.628.122</u>	<u>(229.382.524)</u>	<u>9.633.925</u>	<u>1.099.879.523</u>	Subtotal
Entitas anak:					Subsidiaries:
Aset Tetap	23.590.937	(2.964.493)	--	20.626.444	Fixed Assets
Aset Hak Guna	364.284	(66.068.014)	--	(65.703.730)	Right of Use Assets
Liabilitas Sewa	1.524.324	72.050.885	--	73.575.209	Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja dan Persediaan	2.310.835	(773.583)	2.069.537	3.606.789	Employee Benefits Liabilities Impairment of Fixed Assets
Penurunan Nilai Aset Tetap dan Persediaan	2.653.333	--	--	2.653.333	Allowance for Impairment Losses of Receivables
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang	58.276.969	(1.505.701)	--	56.771.268	Maintenance Expenses
Beban Pemeliharaan	24.429.764	1.094.050	--	25.523.814	
Subjumlah	<u>113.150.446</u>	<u>1.833.144</u>	<u>2.069.537</u>	<u>117.053.127</u>	Subtotal
Jumlah	<u>1.432.778.568</u>	<u>(227.549.380)</u>	<u>11.703.462</u>	<u>1.216.932.650</u>	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

	31 Desember 2021/ December 31, 2021	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laba Rugi/ Charged (Credited) to Profit or Loss	(Dibebankan) Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif Lain/ Charge (Credited) to Other Comprehensive Income	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Perusahaan:					The Company:
Aset Tetap	(542.799.274)	(59.949.179)	--	(602.748.453)	Fixed Assets
Aset Takberwujud	(43.164.348)	(9.475.202)	--	(52.639.550)	Intangible Assets
Rugi Fiskal	596.589.117	(385.369.244)	--	211.219.873	Tax Loss
Liabilitas Imbalan Kerja	1.267.824.669	75.420.311	(168.267.041)	1.174.977.939	Employee Benefits Liabilities
Penurunan Nilai Aset Tetap dan Persediaan	120.039.089	13.301.033	--	133.340.122	Impairment of Fixed Assets and Inventories
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan	429.051.741	26.426.450	--	455.478.191	Allowance for Impairment Losses of Financial Assets
Subjumlah	1.827.540.994	(339.645.831)	(168.267.041)	1.319.628.122	Subtotal
Entitas anak:					Subsidiaries:
Aset Tetap	19.843.131	3.747.806	--	23.590.937	Fixed Assets
Rugi Fiskal	58.886.632	(58.886.632)	--	--	Tax Loss
Aset Hak Guna	(1.251.069)	1.615.353	--	364.284	Right of Use Assets
Liabilitas Sewa	2.045.583	(521.259)	--	1.524.324	Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	6.603.129	(7.052.560)	2.760.266	2.310.835	Employee Benefits Liabilities
Penurunan Nilai Aset Tetap Cadangan Kerugian	2.901.225	(247.892)	--	2.653.333	Impairment of Fixed Assets Allowance for Impairment
Penurunan Nilai Piutang	56.839.585	1.437.384	--	58.276.969	Losses of Receivables
Beban Pemeliharaan	19.897.351	4.532.413	--	24.429.764	Maintenance Expenses
Pencadangan Bonus	(1.237)	1.237	--	--	Bonus Provision
Cadangan Kerugian Nilai Kas dan Setara Kas	(2.412)	2.412	--	--	Allowance for Impairment Losses of Cash and Cash Equivalents
Subjumlah	165.761.918	(55.371.738)	2.760.266	113.150.446	Subtotal
Jumlah	1.993.302.912	(395.017.569)	(165.506.775)	1.432.778.568	Total

f. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak Perusahaan sampai 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

f. Tax Assessment Letter

Notice of Tax Assessment of the Company until May 31, 2024 are as follows:

Tahun Pajak/ Tax Year	Objek Pajak/ Tax Object	Nomor Hasil Pemeriksaan/ Examination Result Number	Tanggal Terbit/ Issued Date	Total Tagihan Pajak/ Total Tax Collection Rp*)
2022	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan PPh Badan/ Notice of Overpayment Assessment of Corporate Income Tax	00032/406/22/093/24	25/06/2024	(49.098.377.716)
2022	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23/ Notice of Tax Underpayment Assessment of Income Tax Article 23	00058/203/22/093/24	25/06/2024	123.916.537.947
2022	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember/ Notice of Tax Underpayment Assessment of Value-Added Tax Goods and Services Period December	00149/207/22/093/24	25/06/2024	65.581.385.574
Jumlah/Total				140.399.545.805

*) Nilai Penuh/Full Amount

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

g. Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan Pajak Tahun 2020 Perusahaan

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak tahun 2020, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan tahun 2020 No. 00017/406/20/093/22 tanggal 20 April 2022 sebesar Rp276.871.157.

Rugi Fiskal Perusahaan juga mengalami koreksi sebesar Rp138.933.086, sehingga menjadi Rp1.470.926.629.

Pada tanggal 18 Mei 2022 Perusahaan telah menerima restitusi pajak penghasilan badan tahun 2020 sebesar Rp239.559.258 setelah dikurangi kurang bayar PPN tahun pajak 2020 sebesar Rp37.215.127 dan PPh pasal 21 tahun pajak 2022 sebesar Rp96.772.

Perusahaan juga menerima pengembalian atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN tahun 2020 sebesar Rp5.801.478 berdasarkan:

- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Februari 2020 pada tanggal 13 Mei 2022 senilai Rp1.241.749;
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN April 2020 pada tanggal 13 Mei 2022 senilai Rp140.702;
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PPN Mei 2020 pada tanggal 25 Mei 2022 senilai Rp4.419.027.

RMU

Pada tanggal 25 Juni 2022, RMU menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan tahun 2020 No. 00003/406/20/093/22 tanggal 9 Maret 2022 sebesar Rp6.254.308, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan, PPN, dan sanksi sebesar Rp19.041.677.

Pada tanggal 27 April 2022, RMU menerima Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan No. KEP00003/ANGSUR/WPJ.19/Kp.0404/2022 sampai dengan KEP 000012/ANGSUR/WPJ.19/KP.0404/2022 tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak selama 12 bulan dari 26 Mei 2022 hingga 26 April

g. Tax Assessments 2020's Tax Assessment The Company

Based on 2020's Tax Assessment, the Company received a Notice of Tax Overpayment Assessment Income for the year 2020 with the number 00017/406/20/093/22 dated April 20, 2022 amounting to Rp276,871,157.

The Company's Tax Loss also have corrected amount Rp138,933,086, to Rp1,470,926,629.

On May 18, 2022, The Company has received restitution of corporate income tax for fiscal year 2020 amounted to Rp239,559,258 after deducted under payment of VAT tax year 2020 amounted to Rp37,215,127 and tax article 21 tax year 2022 amounted to Rp96,772.

The company also received a restitution for the Notice of Tax Overpayment Assessment of VAT fiscal year 2020 amount Rp5,801,478 based on:

- Notice of Tax Overpayment Assessment for VAT period February 2020 on May 13, 2022 amounting to Rp1,241,749;
- Notice of Tax Overpayment Assessment of VAT period April 2020 on May 13, 2022 in the amount of Rp140,702;
- Notice of Tax Overpayment Assessment of VAT period May 2020 on May 25, 2022 worth Rp4,419,027.

RMU

On June 25, 2022, RMU received Notice of Tax Overpayment Assessment for Corporate Income Tax year 2020 No. 00003/406/20/093/22 dated March 9, 2022 amounting to Rp6,254,308, Notice of Tax Underpayment Assessment for Income Tax, VAT, and a penalty amounting to Rp19,041,677.

On April 27, 2022, RMU received a letter from the Directorate of Tax General No. KEP 00003/ANGSUR/WPJ.19/Kp.0404/2022 until No. KEP 000012/ANGSUR/WPJ.19/KP.0404/2022 regarding Acceptance of Installment Tax Payment for 12 months from May 26, 2022 until April 26, 2023 with monthly installment amounted to

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

13. Perpajakan (Lanjutan)

2023 dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp515.155. Pada 31 Desember 2023, kewajiban ini telah diselesaikan oleh RMU.

Pada tanggal 27 April 2022, RMU menerima Surat Keputusan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan No. KEP00003/ANGSUR/WPJ.19/Kp.0404/2022 sampai dengan KEP 000012/ANGSUR/WPJ.19/KP.0404/2022 tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak selama 12 bulan dari 26 Mei 2022 hingga 26 April 2023 dengan jumlah angsuran per bulan sebesar Rp515.155. Pada 31 Desember 2023, kewajiban ini telah diselesaikan oleh RMU.

**Pemeriksaan Pajak Tahun 2021
Perusahaan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak 2021, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan tahun 2021 dengan No. 00022/406/21/093/23 tanggal 17 April 2023 sebesar Rp67.009.624.

Rugi Fiskal Perusahaan juga mengalami koreksi sebesar Rp111.708.595, sehingga menjadi Rp990.200.403.

Pada tanggal 15 Mei 2023, Perusahaan telah menerima restitusi pajak penghasilan badan tahun 2021 sebesar Rp51.090.496 setelah dikurangi utang pajak sebesar Rp15.919.128.

RMU

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak 2021, RMU menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp2.638.167 dibayarkan melalui kompensasi Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2021 dengan No. 00024/406/21/093/23 tanggal 23 Mei 2023 sebesar Rp8.905.752.

Pada tanggal 16 Juni 2023, RMU telah menerima restitusi pajak penghasilan badan sebesar Rp1.319.844.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. Taxation (Continued)

Rp515,155. On December 31, 2023, this obligation have been completed by RMU.

On April 27, 2022, RMU received a letter from the Directorate of Tax General No. KEP 00003/ANGSUR/WPJ.19/Kp.0404/2022 until No. KEP 000012/ANGSUR/WPJ.19/KP.0404/2022 regarding Acceptance of Installment Tax Payment for 12 months from May 26, 2022 until April 26, 2023 with monthly installment amounted to Rp515,155. On December 31, 2023, this obligation have been completed by RMU.

**2021's Tax Assessment
The Company**

Based on 2021's Tax Assessment, the Company received a Notice of Tax Overpayment Assessment Income Tax for the year 2021 with the number 00022/406/21/093/23 dated April 17, 2023 amounting to Rp67,009,624.

Company's Tax Loss also have corrected amount Rp111,708,595, to Rp990,200,403.

On May 15, 2023, The Company has received restitution of corporate income tax for fiscal year 2021 amounted to Rp51,090,496 after less tax payable of Rp15,919,128.

RMU

Based on 2021's Tax Assessment, RMU received Notice of Tax Underpayment Assessment for Income Tax and Value Added Tax amounting to Rp2,638,167 paid through compensation of Notice of Tax Overpayment Assessment for Corporate Income Tax 2021 No. 00024/406/21/093/23 dated May 23, 2023 amounting to Rp8,905,752.

On June 16, 2023, RMU received restitution of amounted to Rp1,319,844.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. Perpajakan (Lanjutan)

13. Taxation (Continued)

**Pemeriksaan Pajak Tahun 2022
Perusahaan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak 2022, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan tahun 2022 dengan No. 00032/406/22/093/24 sebesar Rp49.098.378, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 tahun 2022 dengan No. 00058/203/22/093/24 sebesar Rp123.916.537, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember dengan No. 00149/207/22/093/24 sebesar Rp65.581.386 tanggal 25 Juni 2024.

Pada tanggal 25 Juli 2024, Perusahaan telah menerima lebih bayar pajak setelah dikurangi kompensasi utang pajak sebesar Rp49.068.769. Atas kurang bayar pajak tersebut, Perusahaan akan mengajukan keberatan.

h. Pengampunan Pajak

Sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2016 dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

No. PER-18/PJ/2016 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Uang Tebusan Dalam Rangka Pengampunan Pajak, entitas anak (KALOG) telah melaksanakan pengampunan pajak ini.

Aset pengampunan pajak sebesar Rp486.081 dicatat sebagai tambahan modal disetor atas pengampunan pajak pada entitas anak (KALOG).

**2022's Tax Assessment
The Company**

Based on 2022's Tax Assessment, the Company received a Notice of Tax Overpayment Assessment Income Tax for the year 2022 with the No. 00032/406/22/093/24 amounting to Rp49,098,378, Notice of Tax Underpayment Assessment of Income Tax Article 23 No. 00058/203/22/093/24 amounting to Rp123,916,537, and Notice of Tax Underpayment Assessment of Value-Added Tax Goods and Services Period December No. 00149/207/22/093/24 amounting to Rp65,581,386 dated June 25, 2024.

On July 25, 2024, the Company received tax overpayment net of tax payable compensation amounting to Rp49,068,769. For the tax underpayment, the Company will file an objection. For the underpayment, the Company will file an objection.

h. Tax Amnesty

In accordance to the implementation of Regulation of the Minister of Finance No. 118/PMK.03/2016 on the Implementation of Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty, as amended by Regulation of the Minister of Finance No. 141/PMK.03/2016 and Directorate General of Tax Regulation.

No. PER-18/PJ/2016 on Redemption Payment of Excess Refund in the framework of Tax Amnesty, subsidiary (KALOG) was participated this tax amnesty.

Assets of tax amnesty amounting to Rp486,081 was recorded as additional paid-in capital of tax amnesty in subsidiary (KALOG).

14. Aset Lancar Lainnya

14. Other Current Assets

Aset lancar lainnya pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 masing-masing sebesar Rp10.992.438, Rp123.701.643, dan Rp26.370.549.

Other current assets as May 31, 2024 and December 31, 2023, and 2022 amounted to Rp10,992,438, Rp123,701,643, and Rp26,370,549, respectively.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. Aset Lancar Lainnya (Lanjutan)

14. Other Current Assets (Continued)

Saldo tersebut merupakan uang jaminan atas bank garansi, serta dana sehubungan dengan pemakaian jasa parkir yang menggunakan kartu multitrip.

This balance represents security deposit of bank guarantee, and funds in connection with the use of parking services that use multitrip card.

15. Investasi

15. Investment

a. Investasi Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

a. Investment in Associates and Joint Ventures

	31 Mei 2024/ May 31, 2024		31 Desember/December 31 2023		
Entitas Asosiasi					Associates
PT Moda Integrasi					PT Moda Integrasi
Transportasi Jabodetabek	26.747.408		28.617.769	17.307.401	Transportasi Jabodetabek
PT BPRS Baiturridha Pusaka	10.350.245		9.519.838	8.204.532	PT BPRS Baiturridha Pusaka
Ventura Bersama					Joint Ventures
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	4.201.446.293		5.708.376.759	6.208.789.974	PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
KSO Bumi Kalog	43.146.987		42.005.447	59.698.827	JV Bumi Kalog
KSO B Kalog	17.271.466		16.876.931	16.175.849	JV B Kalog
KSO PT Mega Dasa Semesta	2.973.405		2.973.405	5.185.454	JV PT Mega Dasa Semesta
Jumlah	4.301.935.804		5.808.370.149	6.315.362.037	Total

Rincian investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama adalah sebagai berikut:

The details of the investment in associates and joint ventures are as follows:

Nama Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ Name of Associates and Joint Venture	Aktivitas Utama/ Principal Activity	31 Mei/May 31, 2024					
		Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Nilai Tercatat Penyeritaan Awal Periode/ Carrying Value at Beginning of Period	Penambahan Periode Berjalan/ Additions of Current Period	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ Portion in Net Profit (Loss)	Pembayaran Dividen/ Dividend Payment	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Entitas Asosiasi/ Associates							
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	Pengangkutan darat terintegrasi Jakarta-Bogor-Depok Tangerang-Bekasi ("Jabodetabek")	49,00	28.617.769	--	(1.870.361)	--	26.747.408
PT BPRS Baiturridha Pusaka	Pembiayaan dan Jasa perbankan/ Financing and Banking services	20,00	9.519.838	--	1.888.870	(1.058.463)	10.350.245
Ventura Bersama/ Joint Ventures							
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	Pengangkutan darat, perdagangan, jasa industri, pembangunan/ Land transportation, trading, services, industry, development	51,37	7.260.618.691	--	(1.506.930.466)	--	5.753.688.225
KSO Bumi Kalog	Pelayanan Logistik di kawasan Waru, Sungai Lagoa dan Kalimas/ Logistics services in Waru, Sungai Lagoa and Kalimas area	45,00	42.005.447	--	1.141.540	--	43.146.987
KSO B Kalog	Pelayanan Logistik berbasis angkutan Kereta Api/ Logistics services with railway based	65,00	16.876.931	--	394.535	--	17.271.466
KSO PT Mega Dasa Semesta	Pembangunan, pemasaran dan pengelolaan perkantoran dan pertokoan/ Development, marketing, office management and shopping center	50,00	5.134.010	--	--	--	5.134.010
Jumlah/ Total			7.362.772.686	--	(1.505.375.882)	(1.058.463)	5.856.338.341
Dikurangi/ Deducted							
Cadangan Penurunan Nilai Investasi pada PSBI/ Allowance for Impairment Losses of Investment in PSBI			(1.552.241.932)	--	--	--	(1.552.241.932)
Cadangan Penurunan Nilai Investasi pada KSO PT Mega Dasa Semesta/ Allowance for Impairment Losses of Investment in KSO PT Mega Dasa Semesta			(2.160.605)	--	--	--	(2.160.605)
Subjumlah/ Subtotal			(1.554.402.537)	--	--	--	(1.554.402.537)
Jumlah/ Total			5.808.370.149				4.301.935.804

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. Investasi (Lanjutan)

15. Investment (Continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023							
Nama Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ Name of Associates and Joint Venture	Aktivitas Utama/ Principal Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Nilai Tercatat Penyeritaan Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of Year	Penambahan Tahun Berjalan/ Additions of Current Year	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ Portion in Net Profit (Loss)	Pembayaran Dividen/ Dividen Payment	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Entitas Asosiasi/ Associates							
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	Pengangkutan darat terintegrasi Jakarta-Bogor-Depok Tangerang-Bekasi ("Jabodetabek")	49,00	17.307.401	22.050.000	(10.739.632)	--	28.617.769
PT BPRS Baiturridha Pusaka	Pembiayaan dan Jasa perbankan/ <i>Financing and Banking services</i>	20,00	8.204.532	--	2.611.751	(1.296.445)	9.519.838
Ventura Bersama/ Joint Ventures							
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	Pengangkutan darat, perdagangan, jasa, industri, pembangunan/ <i>Land transportation, trading, services, industry, development</i>	51,37	7.761.031.906	--	(500.413.215)	--	7.260.618.691
KSO Bumi Kalog	Pelayanan Logistik di kawasan Waru, Sungai Lagoa dan Kalimas/ <i>Logistics services in Waru, Sungai Lagoa and Kalimas area</i>	45,00	59.698.827	--	817.504	(18.510.884)	42.005.447
KSO B Kalog	Pelayanan Logistik berbasis angkutan Kereta Api/ <i>Logistics services with railway based</i>	65,00	16.175.849	--	701.082	--	16.876.931
KSO PT Mega Dasa Semesta	Pembangunan, pemasaran dan pengelolaan perkantoran dan pertokoan/ <i>Development, marketing, office management and shopping center</i>	50,00	5.185.454	--	(51.444)	--	5.134.010
Jumlah/ Total			7.867.603.969	22.050.000	(507.073.954)	(19.807.329)	7.362.772.686
Dikurangi/ <i>Deducted</i>							
Cadangan Penurunan Nilai Investasi pada PSBI/ <i>Allowance for Impairment losses of investment in PSBI</i>			(1.552.241.932)	--	--	--	(1.552.241.932)
Cadangan Penurunan Nilai Investasi pada KSO PT Mega Dasa Semesta/ <i>Allowance for Impairment losses of investment in KSO PT Mega Dasa Semesta</i>			--	(2.160.605)	--	--	(2.160.605)
Subjumlah/ <i>Subtotal</i>			(1.552.241.932)	(2.160.605)	--	--	(1.554.402.537)
Jumlah/ Total			6.315.362.037				5.808.370.149

31 Desember 2022/December 31, 2022								
Nama Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ Name of Associates and Joint Venture	Aktivitas Utama/ Principal Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Nilai Tercatat Penyeritaan Awal Tahun/ Carrying Value at Beginning of Year	Reklasifikasi/ Reclassification	Penambahan Tahun Berjalan/ Additions of Current Year	Bagian Laba (Rugi) Bersih/ Portion in Net Profit (Loss)	Pembayaran Dividen/ Dividen Payment	Nilai Tercatat/ Carrying Value
Entitas Asosiasi/ Associates								
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	Pengangkutan darat terintegrasi Jakarta-Bogor-Depok Tangerang-Bekasi ("Jabodetabek")	49,00	21.561.288	--	4.900.000	(9.153.887)	--	17.307.401
PT BPRS Baiturridha Pusaka	Pembiayaan dan Jasa perbankan/ <i>Financing and Banking services</i>	20,00	6.802.910	--	--	2.089.885	(688.263)	8.204.532
Ventura Bersama/ Joint Ventures								
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)	Pengangkutan darat, perdagangan, jasa, industri, pembangunan/ <i>Land transportation, trading, services, industry, development</i>	51,37	--	7.230.581.343	791.878.657	(261.428.094)	--	7.761.031.906
KSO Bumi Kalog	Pelayanan Logistik di kawasan Waru, Sungai Lagoa dan Kalimas/ <i>Logistics services in Waru, Sungai Lagoa and Kalimas area</i>	45,00	59.430.042	--	--	268.785	--	59.698.827
KSO B Kalog	Pelayanan Logistik berbasis angkutan Kereta Api/ <i>Logistics services with railway based</i>	65,00	15.458.451	--	--	717.398	--	16.175.849
KSO PT Mega Dasa Semesta	Pembangunan, pemasaran dan pengelolaan perkantoran dan pertokoan/ <i>Development, marketing, office management and shopping center</i>	50,00	5.183.768	--	--	1.686	--	5.185.454
Jumlah/ Total			108.436.459	7.230.581.343	796.778.657	(267.504.227)	(688.263)	7.867.603.969
Dikurangi/ <i>Deducted</i>								
Cadangan Penurunan Nilai Investasi pada PSBI/ <i>Allowance for Impairment losses of investment in PSBI</i>			--	(621.466.260)	(930.775.672)	--	--	(1.552.241.932)
Jumlah/ Total			108.436.459					6.315.362.037

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai investasi cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat penurunan nilai investasi.

Management believes that the allowance for impairment losses of investment is adequate to cover possible losses resulting from any decline in the investment value of the investment.

31 Mei/May 31, 2024				
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ Associates and Joint Ventures	Total Aset/ Total Asset	Total Liabilitas/ Total Liabilities	Total Pendapatan/ Total Revenue	Lab a (Rugi) Neto/ Net Income (Loss)
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	27.646.859.821	16.306.184.651	--	(2.933.483.484)
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	88.206.924	33.605.106	700.837	(3.817.063)
PT BPRS Baiturridha Pusaka	270.113.886	238.877.749	21.340.765	9.444.348
KSO Bumi Kalog	63.380.636	21.984.213	25.548.701	2.536.755
KSO B Kalog	33.803.140	7.231.654	7.500.263	606.977
KSO PT Mega Dasa Semesta	14.137.968	3.494.666	--	--

15. Investasi (Lanjutan)

15. Investment (Continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023				
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ <i>Associates and Joint Ventures</i>	Total Aset/ <i>Total Asset</i>	Total Liabilitas/ <i>Total Liabilities</i>	Total Pendapatan/ <i>Total Revenue</i>	Laba (Rugi) Neto/ <i>Net Income (Loss)</i>
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	23.263.019.735	9.006.517.505	--	(974.135.128)
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	90.381.000	31.977.390	13.228.975	(21.917.616)
PT BPRS Baiturridha Pusaka	240.658.227	207.831.788	39.894.177	13.058.757
KSO Bumi Kalog	63.369.432	19.593.802	61.243.581	1.816.675
KSO B Kalog	35.642.324	9.677.815	19.088.721	1.078.587
KSO PT Mega Dasa Semesta	14.240.856	3.494.665	--	(102.888)

31 Desember 2022/December 31, 2022				
Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama/ <i>Associates and Joint Ventures</i>	Total Aset/ <i>Total Asset</i>	Total Liabilitas/ <i>Total Liabilities</i>	Total Pendapatan/ <i>Total Revenue</i>	Laba (Rugi) Neto/ <i>Net Income (Loss)</i>
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	21.462.201.000	8.961.610.000	--	(508.912.000)
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	81.877.958	46.556.732	6.243.054	(18.681.402)
PT BPRS Baiturridha Pusaka	196.876.568	166.000.710	36.164.464	16.305.545
KSO Bumi Kalog	105.627.375	15.255.112	57.487.302	597.300
KSO B Kalog	36.660.604	11.757.247	20.287.459	1.103.690
KSO PT Mega Dasa Semesta	14.240.856	3.494.666	--	3.373

**PT Moda Integrasi Transportasi
Jabodetabek (MITJ)**

MITJ didirikan oleh Perusahaan dan PT Mass Rapid Transit Jakarta ("MRTJ") berdasarkan Akta Pendirian No. 11 tanggal 11 Februari 2020. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0008856.AH.01.01 tanggal 12 Februari 2020.

Anggaran Dasar MITJ telah mengalami perubahan dengan Akta No. 14 tanggal 15 September 2023 oleh Notaris Aulia Taufani, S.H., mengenai perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. AHU-0064383.AH.01.02 tanggal 23 Oktober 2023.

Pada tanggal 31 Mei 2024 dan 31 Desember 2023, modal dasar MITJ sebesar Rp135.000.000 yang terbagi atas 135.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 135.000 saham atau sebesar Rp135.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- MRTJ memiliki 51% atau sebanyak 68.850 saham dengan nilai sebesar Rp68.850.000.
- Perusahaan memiliki 49% atau sebanyak 66.150 saham dengan nilai sebesar Rp66.150.000.

**PT Moda Integrasi Transportasi
Jabodetabek (MITJ)**

MITJ was established by the Company and PT Mass Rapid Transit Jakarta ("MRTJ") based on Deed of Establishment No. 11 dated February 11, 2020. The Deed has obtained approval and ratification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0008856.AH.01.01 dated February 12, 2020.

MITJ's Articles of association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 14 dated September 15, 2023 of Notary Aulia Taufani, S.H., concerning the changes of authorized capital and issued and fully paid capital. The amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-0064383.AH.01.02 dated October 23, 2023.

As of May 31, 2024 and December 31, 2023, the authorized capital of MITJ amounted to Rp135,000,000, consists of 135,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to 135,000 shares or equivalent to Rp135,000,000 with shares ownership compositions are as follows:

- MRTJ owns 51% or 68,850 shares amounting to Rp68,850,000.
- The Company owns 49% or 66,150 shares amounting to Rp66,150,000.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

15. Investasi (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, modal dasar MITJ sebesar Rp90.000.000 yang terbagi atas 90.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 90.000 saham atau sebesar Rp90.000.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- MRTJ memiliki 51% atau sebanyak 45.900 saham dengan nilai sebesar Rp45.900.000.
- Perusahaan memiliki 49% atau sebanyak 44.100 saham dengan nilai sebesar Rp44.100.000.

PT BPRS Baiturridha Pusaka

PT BPRS Baiturridha Pusaka didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 3 Maret 1993 dibuat di hadapan Wiratni Ahmadi, Notaris di Bandung. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-1941 HT.01.01.TH93 tanggal 3 April 1993.

Anggaran dasar PT BPRS Baiturridha Pusaka telah mengalami perubahan, Adapun perubahan terakhir anggaran dasar diubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BPRS Baiturridha Pusaka No. 01 tanggal 1 September 2023 yang dibuat dihadapan Christy Maharani Akbar, Sarjana Hukum Notaris di Bandung, perubahan anggaran dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0055620.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 15 September 2023.

Pada 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 modal dasar PT BPRS Baiturridha Pusaka sebesar Rp20.000.000 yang terbagi atas 400.000 saham dengan nilai nominal Rp50 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 222.816 saham atau sebesar Rp11.140.800 dengan komposisi sebagai berikut:

- Yayasan Pusaka memiliki 80% atau sebesar 178.253 dengan nilai sebesar Rp8.912.650.
- RMU memiliki 20% atau sebesar 44.563 dengan nilai sebesar Rp2.228.150.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. Investment (Continued)

As of December 31, 2022, the authorized capital of MITJ amounted to Rp90,000,000, consists of 90,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to 90,000 shares or equivalent to Rp90,000,000 with shares ownership compositions are as follows:

- MRTJ owns 51% or 45,900 shares amounting to Rp45,900,000.
- The Company owns 49% or 44,100 shares amounting to Rp44,100,000.

PT BPRS Baiturridha Pusaka

PT BPRS Baiturridha Pusaka was established based on Deed No. 23 dated March 3, 1993 made before Wiratni Ahmadi, Notary in Bandung. The Deed has obtained approval and ratification from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. C2-1941 HT.01.01.TH93 dated April 3, 1993.

The articles of association of PT BPRS Baiturridha Pusaka have been amended, the last amendment to the articles of association was amended in accordance with the Deed of Statement of the Shareholders of PT BPRS Baiturridha Pusaka No. 01 dated September 1, 2023 made before Christy Maharani Akbar, Bachelor of Laws Notary in Bandung, the amendment to the articles of association has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0055620.AH.01.02.Tahun 2023 dated September 15, 2023.

As of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 the authorized capital of PT BPRS Baiturridha Pusaka amounted to Rp20,000,000, consists of 400,000 shares with par value of Rp50 per share. Total issued and fully paid capital amounted to 222,816 shares or equivalent to Rp11,140,800 with shares ownership compositions are as follows:

- Yayasan Pusaka owns 80% or 178,253 shares amounting to Rp8,912,650.
- RMU owns 20% or 44,563 shares amounting to Rp2,228,150.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. Investasi (Lanjutan)

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

Anggaran Dasar PSBI telah mengalami perubahan dengan Akta No. 67 tanggal 21 November 2022 oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. di Jakarta. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Keputusan AHU-AH.01.03-0318397 tanggal 28 November 2022.

Modal dasar PSBI pada 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 berjumlah Rp50.000.000 yang terbagi atas 50.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham. Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 15.620.041 saham atau sebesar Rp15.620.041.000 dengan komposisi sebagai berikut:

- Perusahaan memiliki 51,37% atau sebanyak 8.023.585 saham dengan nilai sebesar Rp8.023.585.000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk memiliki 39,12% atau sebanyak 6.110.596 saham dengan nilai sebesar Rp6.110.596.000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk memiliki 8,30% atau sebanyak 1.297.235 saham dengan nilai sebesar Rp1.297.235.000.
- PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) memiliki 1,21% atau sebanyak 188.625 saham dengan nilai sebesar Rp188.625.000.

Berdasarkan Surat dari Menteri BUMN No. S-491/MBU/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 terkait Persetujuan Rencana Setoran Modal Perusahaan pada PSBI, menyatakan bahwa menyetujui penambahan setoran modal dalam rangka penyelesaian utang piutang bunga pinjaman pemegang saham PSBI pada hari yang sama (*intraday*) berupa uang sebesar Rp791.878.814.

Para pemegang saham telah sepakat untuk mengkonversi uang muka setoran modal menjadi modal disetor yang telah tertuang dalam akta notaris Mala Mukti, S.H., LL.M No. 67 tanggal 21 November 2022. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan hak Asasi manusia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0318397 tanggal 28 November 2022, sehingga total uang muka setoran modal perusahaan yang dikonversi menjadi setoran modal adalah sebesar Rp7.230.581.343 dan penyertaan melalui kas sebesar Rp791.878.814.

15. Investment (Continued)

PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI)

PSBI's Articles of association has been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 67 dated November 21, 2022 of Notary Mala Mukti, S.H.,LL.M. in Jakarta. The amendments were approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0318397 dated November 28, 2022.

The authorized capital of PSBI on May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 amounted to Rp50,000,000, consists of 50,000 shares with par value of Rp1,000 per share. Total issued and fully paid capital amounted to 15,620,041 shares or equivalent to Rp15,620,041,000 with shares ownership compositions are as follows:

- The Company owns 51.37% or 8,023,585 shares amounting to Rp8,023,585,000.
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk owns 39.12% or 6,110,596 shares amounting to Rp6,110,596,000.
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk owns 8.30% or 1,297,235 shares amounting to Rp1,297,235,000.
- PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) owns 1.21% or 188,625 shares amounting to Rp188,625,000.

Based on the letter from the Minister of SOEs No. S-491/MBU/08/2022 dated August 8, 2022 regarding Approval for Additional Company Equity Participation in PSBI, stated that it approved the additional capital in the form of settlement of a debt interest on shareholder's loans in *intraday* amounting to Rp791,878,814.

The shareholders have agreed to convert the additional paid-in capital advance into paid-in capital has been stated in the notarial deed of Mala Mukti, S.H., LLM No. 67 dated November 21, 2022. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights in his Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0318397 dated November 28, 2022, so that total the additional paid-in capital advance of the company's which is converted into paid-in capital amounting to Rp7,230,581,343 and investment through cash amounting to Rp791,878,814.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. Investasi (Lanjutan)

Tidak terdapat informasi kuotasi harga publikasian atas nilai wajar investasi di PSBI.

KSO Bumi Kalog

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi No. 01 tanggal 23 Mei 2013, dari Notaris Yoshsi S.H., M.Kn., KALOG mengadakan perjanjian kerja sama operasi dengan PT Bumi Wijaya Indorail dalam usaha pelayanan logistik di kawasan Stasiun Waru, Stasiun Sungai Lagoa dan Stasiun Kalimas. Komposisi penyertaan pendanaan dan pembagian biaya serta keuntungan (*cost & profit sharing*) masing-masing adalah sebagai berikut:

- 51% untuk KALOG.
- 49% untuk PT Bumi Wijaya Indorail.

Kerja sama ini berlaku selama berlakunya perjanjian persewaan/pengelolaan kawasan Stasiun Waru, Stasiun Kalimas, Stasiun Lagoa dan stasiun-stasiun lainnya. Perjanjian kerja sama operasi telah mengalami dua kali perubahan dan yang terakhir dengan Akta Notaris No. 2 Yoshsi S.H., M.Kn., tanggal 5 Juni 2014 untuk menambah kawasan Stasiun Sungai Lagoa (SAO 1 dan SAO 2 menjadi SAO Terpadu) dan perubahan komposisi penyertaan pendanaan dan pembagian biaya serta keuntungan masing-masing pada 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

- 45% untuk KALOG.
- 55% untuk PT Bumi Wijaya Indorail.

KSO B Kalog

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Operasi No. 3 tanggal 10 Agustus 2012 antara KALOG dengan PT Bintang Laut Platinum dengan Addendum II No. 0079.PJ/ KALOG-BLP/2016, tanggal 28 April 2016 dalam kegiatan usaha pelayanan logistik berbasis angkutan kereta api, komposisi keuntungan (*cost & profit sharing*) pada 31 Mei 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

- 65% untuk KALOG.
- 35% untuk PT Bintang Laut Platinum.

Jangka waktu perjanjian adalah selama kerja sama antara KALOG dengan PT Bintang Laut Platinum berlaku.

15. Investment (Continued)

There is no information of quoted published price on the fair value investment in PSBI.

JV Bumi Kalog

Based on Joint Operation Agreement No. 01, dated May 23, 2013 by Notary Yoshsi S.H., M.Kn., KALOG entered into a joint operation with PT Bumi Wijaya Indorail for a cooperation in logistic activities in Waru Station, Sungai Lagoa Station and Kalimas Station areas. The composition of the participation of funding and sharing costs and benefits (*cost & profit sharing*) is as follows:

- 51% KALOG.
- 49% for PT Bumi Wijaya Indorail.

The agreement is valid in accordance with the agreement of rental/management of Waru Station, Kalimas Station, Sungai Lagoa Station and other stations area. Joint operation agreement has been amended twice, and recently by Notarial Deed No. 02 dated June 5, 2014 of Yoshsi S.H., M.Kn., regarding to the expansion of Sungai Lagoa Station area (existing SAO 1 and SAO 2 become Integrated SAO) and changes in the composition of the participation of funding and sharing costs and benefits on May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 as follows:

- 45% for KALOG.
- 55% for PT Bumi Wijaya Indorail.

JV B Kalog

Based on Joint Operation Agreement No. 3 dated August 10, 2012 between KALOG and PT Bintang Laut Platinum with Addendum II No. 0079.PJ/KALOG-BLP/2016, dated on April 28, 2016, for the activities of railway-based logistic delivery services, the composition of profits (*cost & profit sharing*) May 31, 2024 and December 31, 2023, and 2022 is as follows:

- 65% for KALOG.
- 35% for PT Bintang Laut Platinum.

The cooperation is valid in accordance with the agreement between KALOG and PT Bintang Laut Platinum.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. Investasi (Lanjutan)

KSO PT Mega Dasa Semesta

KAPM menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Mega Dasa Semesta dalam membangun dan mengelola aset yang berada di Waru Sidoarjo.

Berdasarkan nota kesepahaman No. 022/DIR.KAPM/PER/ OPTWR/XII/2013 dan 019/KS.MDS/XII.2013 tanggal 20 Desember 2013 antara KAPM dengan PT Mega Dasa Semesta tentang perjanjian kerja sama pembangunan, pemasaran dan pengelolaan kompleks perkantoran dan pertokoan di Jl. Brigjen Katamso, Waru, Sidoarjo dengan komposisi penyertaan modal dan pembagian keuntungan pada 31 Mei 2024 dan 31 Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

- 50% untuk KAPM.
- 50% untuk PT Mega Dasa Semesta.

Pada 31 Desember 2023 KAPM melakukan cadangan penurunan nilai investasi sebesar Rp2.161. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai investasi cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai investasi tersebut.

b. Investasi Jangka Panjang

PT Fintek Karya Nusantara

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Saldo Awal Investasi	35.747.769	24.176.000	54.853.000	Beginning Balance of Investment
Perubahan Nilai Wajar	--	11.571.769	(30.677.000)	Fair Value Changes
Saldo Akhir Investasi	35.747.769	35.747.769	24.176.000	Ending Balance of Investment

Informasi tambahan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 sehubungan dengan investasi pada PT Fintek Karya Nusantara adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jenis Usaha/ Type of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership 2023 dan/and 2022
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara jasa sistem pembayaran/ Payment system service providers	1,82%

Berdasarkan Risalah Sirkuler Keputusan Pemegang Saham No. PT KAI Persero KP.303/X/3/KA-2019 dan No. Yayasan Pusaka 09/RIS-KCI/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 menyatakan persetujuan penyertaan modal KCI kepada PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) berupa penyeteroran saham sebesar

15. Investment (Continued)

JV PT Mega Dasa Semesta

KAPM entered into the cooperation agreement with PT Mega Dasa Semesta to build and manage the assets in of Waru Sidoarjo.

Based on memorandum of understanding No. 022/DIR. KAPM/PER/OPTWR/XII/2013 and 019/KS. MDS/XII/2013 dated December 20, 2013 between KAPM and PT Mega Dasa Semesta about joint operation for development, marketing and management office and shopping block at Jl. Brigjen Katamso, Waru, Sidoarjo with composition of fund deposits and profit sharing on May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 as follows:

- 50% for KAPM.
- 50% for PT Mega Dasa Semesta.

As of December 31, 2023 KAPM has made a reserve for impairment of investment of Rp2,161. Management believes that the allowance for impairment losses on investments is adequate to cover possible losses from the decline in investment value.

b. Long-term Investment

PT Fintek Karya Nusantara

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Saldo Awal Investasi	35.747.769	24.176.000	54.853.000	Beginning Balance of Investment
Perubahan Nilai Wajar	--	11.571.769	(30.677.000)	Fair Value Changes
Saldo Akhir Investasi	35.747.769	35.747.769	24.176.000	Ending Balance of Investment

Additional information as of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 related to investment in PT Fintek Karya Nusantara are as follows:

Keterangan	Jenis Usaha/ Type of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership 2023 dan/and 2022
PT Fintek Karya Nusantara	Penyelenggara jasa sistem pembayaran/ Payment system service providers	1,82%

Based on Circular Minutes of Shareholder Decree No. PT KAI Persero KP.303/X/3/KA-2019 and No. Yayasan Pusaka 09/RIS-KCI/X/2019 dated October 24, 2019 stated agreement for the capital investment KCI to PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) in the form of a 2.03% share of paid-in capital and

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. Investasi (Lanjutan)

2,03% dari modal disetor dan ditempatkan PT Fintek Karya Nusantara atau ekuivalen dengan nilai setoran modal sebesar Rp37.000.000 yang terbagi atas 3.700 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp10.000.

Berdasarkan Akta Finarya No. 53 tanggal 8 November 2022 persentase kepemilikan Perusahaan pada Finarya menjadi sebesar 1,82% dari modal disetor dan ditempatkan Finarya.

Berdasarkan valuasi kembali dari Laporan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Tobing Panuturi dan Rekan; Anas Karim Rivai dan Rekan, pada 31 Desember 2023 dan 2022, nilai wajar investasi KCI pada Finarya masing-masing adalah sebesar Rp35.747.769 dan Rp24.176.000.

Per 31 Mei 2024, Manajemen berkeyakinan tidak terdapat perubahan nilai wajar yang signifikan sehingga tidak dilakukan valuasi kembali atas nilai wajar investasi tersebut.

15. Investment (Continued)

placed by PT Fintek Karya Nusantara or equivalent to a capital deposit of Rp37,000,000 which is divided into 3,700 shares, each with a par value of Rp10,000.

Based on the deed of Finarya No. 53 dated November 8, 2022 the percentage of the Company's ownership in Finarya is 1.82% of the paid up and issued capital of Finarya.

Based on the re-valuation of the Public Appraisal Service Office Report (KJPP), Tobing Panuturi and Partners; Anas Karim Rivai and Partners, as of December 31, 2023 and 2022, the fair value of KCI's investment in Finarya amounted to Rp35,747,769 and Rp24,176,000.

As of May 31, 2024, Management believes that there is no significant change in fair value and therefore no revaluation of the fair value of the investment is required.

16. Aset Tetap

16. Fixed Assets

	31 Mei 2024/May 31, 2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Sarana:					Rolling Stock:
Lokomotif	9.443.910.756	--	--	9.443.910.756	Locomotive
Kereta	14.380.671.999	770.821.196	18.786.000	15.170.279.195	Trains
Gerbong	4.396.179.136	--	--	4.396.179.136	Wagons
Prasarana:					Infrastructures:
Tanah	166.911.132	--	(925.417)	165.985.715	Land
Bangunan	2.750.982.870	34.860.406	16.284.217	2.802.127.493	Buildings
Prasarana dan Instalasi	1.499.450.585	2.600.580	2.222.407	1.504.273.572	Infrastructures and Installations
Fasilitas:					Facilities:
Mesin dan Peralatan	2.934.860.627	54.363.454	8.580.204	2.997.804.285	Machinery and Equipments
Kendaraan	94.683.369	--	3.930.500	98.613.869	Vehicles
Inventaris	173.179.844	367.729	295.010	173.842.583	Supplies
Aset dalam Pembangunan	1.637.067.007	459.248.442	(50.160.348)	2.046.155.101	Assets Under Construction
Jumlah	37.477.897.325	1.322.261.807	(987.427)	38.799.171.705	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. Aset Tetap (Lanjutan)

16. Fixed Assets (Continued)

31 Mei 2024/May 31, 2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Sarana:					<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	3.325.399.541	122.090.927	--	3.447.490.468	<i>Locomotive</i>
Kereta	3.328.406.706	211.591.037	--	3.539.997.743	<i>Trains</i>
Gerbong	1.372.481.585	60.381.294	--	1.432.862.879	<i>Wagons</i>
Prasarana:					<i>Infrastructures:</i>
Bangunan	650.689.696	48.514.911	(2.088.468)	697.116.139	<i>Buildings</i>
Prasarana dan Instalasi	662.593.538	38.032.241	--	700.625.779	<i>Infrastructures and Installations</i>
Fasilitas:					<i>Facilities:</i>
Mesin dan Peralatan	1.334.730.220	114.916.213	--	1.449.646.433	<i>Machinery and Equipments</i>
Kendaraan	59.103.804	3.605.010	--	62.708.814	<i>Vehicles</i>
Inventaris	143.488.824	4.139.439	--	147.628.263	<i>Supplies</i>
Jumlah	<u>10.876.893.914</u>	<u>603.271.072</u>	<u>(2.088.468)</u>	<u>11.478.076.518</u>	<i>Total</i>
Penurunan Nilai Aset Tetap					Fixed Assets Impairment
Sarana:					<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	159.487.043	--	--	159.487.043	<i>Locomotive</i>
Kereta	48.464.088	--	--	48.464.088	<i>Trains</i>
KRD	11.090.000	--	--	11.090.000	<i>KRD</i>
Gerbong	11.331.276	--	--	11.331.276	<i>Wagons</i>
Jumlah	<u>230.372.407</u>	<u>--</u>	<u>--</u>	<u>230.372.407</u>	<i>Total</i>
Nilai Tercatat	<u>26.370.631.004</u>			<u>27.090.722.780</u>	Carrying Amount
31 Desember 2023/December 31, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Sarana:					<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	9.443.910.756	--	--	9.443.910.756	<i>Locomotive</i>
Kereta	9.278.367.313	1.021.902.779	4.080.401.907	14.380.671.999	<i>Trains</i>
Gerbong	4.400.467.290	--	(4.288.154)	4.396.179.136	<i>Wagons</i>
Prasarana:					<i>Infrastructures:</i>
Tanah	135.630.829	35.682.701	(4.402.398)	166.911.132	<i>Land</i>
Bangunan	2.513.361.125	268.615.872	(30.994.127)	2.750.982.870	<i>Buildings</i>
Prasarana dan Instalasi	1.358.156.655	142.102.140	(808.210)	1.499.450.585	<i>Infrastructures and Installations</i>
Fasilitas:					<i>Facilities:</i>
Mesin dan Peralatan	2.406.317.362	510.299.590	18.243.675	2.934.860.627	<i>Machinery and Equipments</i>
Kendaraan	69.741.506	7.220.030	17.721.833	94.683.369	<i>Vehicles</i>
Inventaris	169.834.925	2.275.354	1.069.565	173.179.844	<i>Supplies</i>
Aset dalam Pembangunan	3.923.275.870	1.474.228.828	(3.760.437.691)	1.637.067.007	<i>Assets Under Construction</i>
Jumlah	<u>33.699.063.631</u>	<u>3.462.327.294</u>	<u>316.506.400</u>	<u>37.477.897.325</u>	<i>Total</i>

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. Aset Tetap (Lanjutan)

16. Fixed Assets (Continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Sarana:					<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	3.032.381.316	293.018.225	--	3.325.399.541	<i>Locomotive</i>
Kereta	2.940.140.087	388.266.619	--	3.328.406.706	<i>Trains</i>
Gerbong	1.231.454.767	144.971.806	(3.944.988)	1.372.481.585	<i>Wagons</i>
Prasarana:					<i>Infrastructures:</i>
Bangunan	562.016.515	110.282.255	(21.609.074)	650.689.696	<i>Buildings</i>
Prasarana dan Instalasi	578.493.084	84.809.241	(708.787)	662.593.538	<i>Infrastructures and Installations</i>
Fasilitas:					<i>Facilities:</i>
Mesin dan Peralatan	1.097.209.371	237.520.849	--	1.334.730.220	<i>Machinery and Equipments</i>
Kendaraan	51.300.066	7.803.738	--	59.103.804	<i>Vehicles</i>
Inventaris	130.057.831	13.430.993	--	143.488.824	<i>Supplies</i>
Jumlah	<u>9.623.053.037</u>	<u>1.280.103.726</u>	<u>(26.262.849)</u>	<u>10.876.893.914</u>	<i>Total</i>
Penurunan Nilai Aset Tetap					Fixed Assets Impairment
Sarana:					<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	139.986.421	19.500.622	--	159.487.043	<i>Locomotive</i>
Kereta	--	48.464.088	--	48.464.088	<i>Trains</i>
KRD	--	11.090.000	--	11.090.000	<i>KRD</i>
Gerbong	11.331.276	--	--	11.331.276	<i>Wagons</i>
Jumlah	<u>151.317.697</u>	<u>79.054.710</u>	<u>--</u>	<u>230.372.407</u>	<i>Total</i>
Nilai Tercatat	<u>23.924.692.897</u>			<u>26.370.631.004</u>	Carrying Amount
31 Desember 2022/December 31, 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Sarana:					<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	8.762.204.836	578.661.640	103.044.280	9.443.910.756	<i>Locomotive</i>
Kereta	9.113.501.783	166.049.585	(1.184.055)	9.278.367.313	<i>Trains</i>
Gerbong	3.671.667.328	629.851.194	98.948.768	4.400.467.290	<i>Wagons</i>
Prasarana:					<i>Infrastructures:</i>
Tanah	122.526.652	--	13.104.177	135.630.829	<i>Land</i>
Bangunan	2.472.230.979	32.951.717	8.178.429	2.513.361.125	<i>Buildings</i>
Prasarana dan Instalasi	1.279.588.125	17.016.806	61.551.724	1.358.156.655	<i>Infrastructures and Installations</i>
Fasilitas:					<i>Facilities:</i>
Mesin dan Peralatan	1.983.575.299	373.285.448	49.456.615	2.406.317.362	<i>Machinery and Equipments</i>
Kendaraan	63.966.839	4.903.269	871.398	69.741.506	<i>Vehicles</i>
Inventaris	147.229.193	6.677.713	15.928.019	169.834.925	<i>Supplies</i>
Aset dalam Pembangunan	3.700.669.588	1.000.846.786	(778.240.504)	3.923.275.870	<i>Assets Under Construction</i>
Jumlah	<u>31.317.160.622</u>	<u>2.810.244.158</u>	<u>(428.341.149)</u>	<u>33.699.063.631</u>	<i>Total</i>

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. Aset Tetap (Lanjutan)

16. Fixed Assets (Continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan					Depreciation
Sarana:					<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	2.685.662.618	346.718.698	--	3.032.381.316	<i>Locomotive</i>
Kereta	2.623.502.982	317.260.235	(623.130)	2.940.140.087	<i>Trains</i>
Gerbong	1.096.795.669	134.659.098	--	1.231.454.767	<i>Wagons</i>
Prasarana:					<i>Infrastructures:</i>
Bangunan	466.379.667	102.627.586	(6.990.738)	562.016.515	<i>Buildings</i>
Prasarana dan Instalasi	491.901.899	86.591.185	--	578.493.084	<i>Infrastructures and Installations</i>
Fasilitas:					<i>Facilities:</i>
Mesin dan Peralatan	886.961.041	210.326.353	(78.023)	1.097.209.371	<i>Machinery and Equipments</i>
Kendaraan	46.498.178	4.801.888	--	51.300.066	<i>Vehicles</i>
Inventaris	110.138.072	19.919.759	--	130.057.831	<i>Supplies</i>
Jumlah	<u>8.407.840.126</u>	<u>1.222.904.802</u>	<u>(7.691.891)</u>	<u>9.623.053.037</u>	<i>Total</i>
Penurunan Nilai					Fixed Assets
Aset Tetap					Impairment
Sarana:					<i>Rolling Stock:</i>
Lokomotif	47.912.089	92.074.332	--	139.986.421	<i>Locomotive</i>
Gerbong	446.327	10.884.949	--	11.331.276	<i>Wagons</i>
Jumlah	<u>48.358.416</u>	<u>102.959.281</u>	<u>--</u>	<u>151.317.697</u>	<i>Total</i>
Nilai Tercatat	<u>22.860.962.080</u>			<u>23.924.692.897</u>	Carrying Amount

Pada 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022, penurunan nilai pada Aset Tetap dikarenakan beberapa aset tetap sarana mengalami kerusakan akibat adanya Kecelakaan Kereta Api beberapa sarana lainnya tidak dalam kondisi siap operasi sehingga nilai perolehannya harus diturunkan.

May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022, impairment of Fixed Assets was due to several fixed assets of rolling stock being damaged due to a Train Accident as of several other rolling stock not in a ready to operate condition so that their acquisition value had to be impaired.

Pada 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022, Grup melakukan reklasifikasi aset sebagai berikut (Catatan 16, 17, 18 dan 21):

On May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022, the Group reclassified assets as follows (Notes 16, 17, 18 and 21):

31 Mei 2024/May 31, 2024				
	Saldo Sebelum Reklasifikasi/ Balance Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Setelah Reklasifikasi/ Balance After Reclassification	
Biaya Perolehan:				Acquisition Cost:
Aset Tetap	37.477.897.325	(987.427)	37.476.909.898	<i>Fixed Asset</i>
Properti Investasi	335.407.487	987.427	336.394.914	<i>Investment Properties</i>
Hak Pengoperasian				<i>Infrastructure Assets</i>
Aset Prasarana	32.126.181.046	--	32.126.181.046	<i>Operating Rights</i>
Aset Takberwujud	941.306.019	--	941.306.019	<i>Intangible Assets</i>
Aset Lain-lain	6	-	6	<i>Other Assets</i>
Subjumlah	<u>70.880.791.883</u>	<u>--</u>	<u>70.880.791.883</u>	Subtotal
Akumulasi penyusutan:				Accumulated Depreciation:
Aset Tetap	10.876.893.914	(2.088.468)	10.874.805.446	<i>Fixed Assets</i>
Properti Investasi	88.501.818	2.088.468	90.590.286	<i>Investment Properties</i>
Aset Lain-lain	--	--	--	<i>Other Assets</i>
Subjumlah	<u>10.965.395.732</u>	<u>--</u>	<u>10.965.395.732</u>	Subtotal
Nilai Tercatat	<u>59.915.396.151</u>		<u>59.915.396.151</u>	Carrying Amount

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. Aset Tetap (Lanjutan)

16. Fixed Assets (Continued)

31 Desember 2023/December 31, 2023			
	Saldo Sebelum Reklasifikasi/ Balance Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Setelah Reklasifikasi/ Balance After Reclassification
Biaya Perolehan:			
Aset Tetap	33.699.063.631	316.506.400	34.015.570.031
Properti Investasi	186.960.302	110.545.623	297.505.925
Hak Pengoperasian			
Aset Prasarana	24.805.063.930	(433.711.651)	24.371.352.279
Aset Takberwujud	743.325.986	2.324.039	745.650.025
Aset Lain-lain	--	4.335.589	4.335.589
Subjumlah	59.434.413.849	--	59.434.413.849
Akumulasi penyusutan:			
Aset Tetap	9.623.053.037	(26.262.849)	9.596.790.188
Properti Investasi	60.874.747	22.317.861	83.192.608
Aset Lain-lain	--	3.944.988	3.944.988
Subjumlah	9.683.927.784	--	9.683.927.784
Nilai Tercatat	49.750.486.065		49.750.486.065
			Acquisition Cost:
			Fixed Asset
			Investment Properties
			Infrastructure Assets
			Operating Rights
			Intangible Assets
			Other Assets
			Subtotal
			Accumulated Depreciation:
			Fixed Assets
			Investment Properties
			Other Assets
			Subtotal
			Carrying Amount
31 Desember 2022/December 31, 2022			
	Saldo Sebelum Reklasifikasi/ Balance Before Reclassification	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Setelah Reklasifikasi/ Balance After Reclassification
Biaya Perolehan:			
Aset Tetap	31.317.160.622	(428.341.149)	30.888.819.473
Properti Investasi	146.832.414	40.127.888	186.960.302
Hak Pengoperasian			
Aset Prasarana	21.385.819.023	417.506.380	21.803.325.403
Aset Lain-lain	30.555.196	(29.293.119)	1.262.077
Subjumlah	52.880.367.255	--	52.880.367.255
Akumulasi penyusutan:			
Aset Tetap	8.407.840.126	(7.691.891)	8.400.148.235
Properti Investasi	50.452.796	6.990.738	57.443.534
Aset Lain-lain	--	701.153	701.153
Subjumlah	8.458.292.922	--	8.458.292.922
Nilai Tercatat	44.422.074.333		44.422.074.333
			Acquisition Cost:
			Fixed Asset
			Investment Properties
			Infrastructure Assets
			Operating Rights
			Other Assets
			Subtotal
			Accumulated Depreciation:
			Fixed Assets
			Investment Properties
			Other Assets
			Subtotal
			Carrying Amount

Aset tetap tersebut di atas merupakan aset tetap pemilikan langsung Grup.

Perusahaan memiliki aset tanah yang telah bersertifikat seluas 148.043.362 m². Bentuk sertifikat tersebut berupa Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dengan jangka waktu pemakaian berakhir antara tahun 2024 sampai dengan 2053. Manajemen berkeyakinan bahwa hak atas tanah tersebut dapat diperpanjang.

Terdapat aset tetap dijadikan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman (Catatan 29).

Those fixed assets above represents the Group direct acquisition fixed assets.

The Company has certified land assets of 148,043,362 sqm. The certificates consist of Right of use of Structure, Right of Use and Right of Management with the term of usage ended between 2024 up to 2053. Management believes the land rights are able to be extended.

Some fixed assets are used as collateral for loans (Note 29).

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

16. Aset Tetap (Lanjutan)

Penyusutan sebesar Rp603.271.072, dan Rp512.820.936 untuk periode-periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023, Rp1.280.103.726 dan Rp1.222.904.802 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dibebankan pada akun beban angkutan dan usaha lainnya dan beban usaha.

Biaya perolehan bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan sebesar Rp1.666.795.690 dan Rp1.575.899.312 untuk periode-periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023, Rp1.642.187.542 dan Rp1.483.954.503 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Perusahaan mengasuransikan aset sarana pada PT Asuransi Wahana Tata untuk periode 3 tahun mulai 30 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2025, dengan kondisi semua risiko seperti gempa bumi, terorisme dan sabotase dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

1. Polis semua risiko properti, pada saat operasi adalah 10% dari kerugian atau minimal USD35,000 (nilai penuh) setiap kerugian. Pada saat di Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD350,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
2. Polis gempa bumi, pada saat operasi adalah 10% dari kerugian atau minimal USD35,000 (nilai penuh) setiap kerugian. Pada saat di Depo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD350,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
3. Polis terorisme dan sabotase sebesar USD250,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.

Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. Fixed Assets (Continued)

Depreciation amounted to Rp603,271,072 and Rp512,820,936 for the five-month periods ended May 31, 2024 and 2023, Rp1,280,103,726 and Rp1,222,904,802 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively, are charged to transportation and other business expenses and operating expenses.

The acquisition costs of fixed assets which have been fully depreciated and are still in use amounted to Rp1,666,795,690 and Rp1,575,899,312 for the five-month periods ended May 31, 2024 and 2023, Rp1,642,187,542 and Rp1,483,954,503 for the years ended December 31, 2023 and 2022.

The Company has insured rolling stock assets to PT Asuransi Wahana Tata for 3 years started from October 30, 2022 until October 30, 2025 for all risks such as earthquake, terrorism and sabotage with the coverages are as follows:

1. All property risks insurance, while in operation is 10% of loss, at minimum USD35,000 (full amount) each loss. While in Depo or Workshop is 10% of loss, or at minimum USD350,000 (full amount) each loss.
2. Earthquake insurance, while in operation 10% of loss, minimum USD35,000 (full amount) each loss. While in Depo or Workshop 10% of loss, or at minimum USD350,000 (full amount) each loss.
3. Terrorism and sabotage insurance of USD250,000 (full amount) each loss.

Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses over the insured assets.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

16. Aset Tetap (Lanjutan)

16. Fixed Assets (Continued)

Pada tanggal 31 Mei 2024, Desember 2023, dan 2022 aset dalam pembangunan terdiri dari:

As of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022, assets under construction consist of:

31 Mei 2024/May 31, 2024					
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	Nilai Kontrak/ <i>Total Contracts</i>	Persentase Penyelesaian/ <i>Percentage of Completion</i> (%)	Estimasi Penyelesaian/ <i>Estimated Completion</i>	
	Rp	Rp			
Sarana Prasarana	182.845.426	580.743.245	31,48	2024-2025	<i>Rolling Stock Infrastructure</i>
Proyek Prasarana Lainnya	1.598.785.751	1.949.754.823	82,00	2024-2025	<i>Other Infrastructure Project</i>
Fasilitas	264.523.924	305.118.565	86,70	2024-2025	<i>Facilities</i>
Jumlah	2.046.155.101	2.835.616.633			Total
31 Desember 2023/December 31, 2023					
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	Nilai Kontrak/ <i>Total Contracts</i>	Persentase Penyelesaian/ <i>Percentage of Completion</i> (%)	Estimasi Penyelesaian/ <i>Estimated Completion</i>	
	Rp	Rp			
Sarana Prasarana	161.105.445	250.513.645	64,31	2024	<i>Rolling Stock Infrastructure</i>
Proyek Prasarana Lainnya	1.388.797.147	1.646.569.560	84,34	2024	<i>Other Infrastructure Project</i>
Fasilitas	87.164.415	97.417.044	89,48	2024	<i>Facilities</i>
Jumlah	1.637.067.007	1.994.500.249			Total
31 Desember 2022/December 31, 2022					
	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	Nilai Kontrak/ <i>Total Contracts</i>	Persentase Penyelesaian/ <i>Percentage of Completion</i> (%)	Estimasi Penyelesaian/ <i>Estimated Completion</i>	
	Rp	Rp			
Sarana Prasarana	3.125.471.746	3.964.844.427	78,83	2023	<i>Rolling Stock Infrastructure</i>
Proyek Jabodetabek	5.267.117	2.145.617.337	97,18	2023	<i>Jabodetabek Project</i>
Proyek Prasarana Lainnya	761.924.537	1.155.194.684	65,96	2023	<i>Other Infrastructure Project</i>
Fasilitas	30.612.470	30.623.800	99,96	2023	<i>Facilities</i>
Jumlah	3.923.275.870	7.296.280.248			Total

Proyek Jabodetabek merupakan proyek pengembangan prasarana perkeretaapian sehubungan dengan pengembangan kereta komuter untuk wilayah Jabodetabek,

The Jabodetabek project is a railway infrastructure development project in connection with the development of commuter trains for the Jabodetabek area

Proyek prasarana lainnya merupakan proyek pengembangan prasarana perkeretaapian sehubungan dengan pengembangan bangunan dan aktivitas-aktivitas pekerjaan penunjang lainnya seperti pekerjaan conveyor, infrastruktur pekerjaan *e-ticketing* dan pengembangan emplasemen stasiun.

Other infrastructure project is a railway infrastructure development project related to the development of buildings and other supporting work activities such as conveyor work, e-ticketing work infrastructure and station emplacement development.

Pada 31 Desember 2023, seluruh aset dalam pembangunan proyek Jabodetabek telah selesai 100%.

On December 31, 2023, all assets under construction in the Jabodetabek project have been 100% completed.

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. Properti Investasi

17. Investment Properties

31 Mei 2024/May 31, 2024				
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan				Acquisition Cost
Tanah	12.633.938	--	925.417	Land
Bangunan	322.773.549	21.909.704	62.010	Buildings
Jumlah	335.407.487	21.909.704	987.427	Total
Akumulasi Penyusutan				Depreciation accumulated:
Bangunan	88.501.818	1.454.970	2.088.468	Buildings
Jumlah	88.501.818	1.454.970	2.088.468	Total
Nilai Tercatat	246.905.669		266.259.362	Carrying Amount
31 Desember 2023/December 31, 2023				
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan				Acquisition Cost
Tanah	8.278.976	--	4.354.962	Land
Bangunan	178.681.326	37.901.562	106.190.661	Buildings
Jumlah	186.960.302	37.901.562	110.545.623	Total
Akumulasi Penyusutan				Depreciation accumulated:
Bangunan	60.874.747	5.309.210	22.317.861	Buildings
Jumlah	60.874.747	5.309.210	22.317.861	Total
Nilai Tercatat	126.085.555		246.905.669	Carrying Amount
31 Desember 2022/December 31, 2022				
Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan				Acquisition Cost
Tanah	21.383.153	--	(13.104.177)	Land
Bangunan	125.449.261	--	53.232.065	Buildings
Jumlah	146.832.414	--	40.127.888	Total
Akumulasi Penyusutan				Depreciation accumulated:
Bangunan	50.452.796	3.431.213	6.990.738	Buildings
Jumlah	50.452.796	3.431.213	6.990.738	Total
Nilai Tercatat	96.379.618		126.085.555	Carrying Amount

Dasar pengklasifikasian properti investasi atas tanah dan bangunan adalah luas tanah dan bangunan pada aset tetap yang disewakan kepada pihak ketiga.

Pada 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022, Grup melakukan reklasifikasi atas aset tetap yang disewakan ke dalam aset properti investasi (Catatan 16).

Penyusutan sebesar Rp1.454.970 dan Rp1.586.503 untuk periode-periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023, Rp5.309.210 dan Rp3.431.213 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dibebankan pada akun beban operasi tidak langsung.

Investment properties of land and buildings are classified based on the amount of land and buildings leased to third parties.

As of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022, the Group reclassifies the rental fixed assets into investment properties (Note 16).

Depreciation amounted to Rp1,454,970 and Rp1,586,503 for the five-months periods ended May 31, 2024 and 2023 and Rp5,309,210 and Rp3,431,213 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively, charged to indirect operating expenses account.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. Properti Investasi (Lanjutan)

Pendapatan atas optimalisasi aset masing-masing sebesar Rp 272.064.819 dan Rp219.714.061 untuk periode-periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023, Rp649.662.475 dan Rp630.197.305 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 39).

Beban atas optimalisasi aset masing-masing sebesar Rp213.768.765 dan Rp 131.754.772 untuk periode-periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023, Rp511.938.878 dan Rp648.309.642 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan 2022 (Catatan 40).

Properti investasi Grup terdiri atas aset yang berupa tanah dan bangunan. Bagian yang dipergunakan untuk kegiatan operasional dicatat sebagai Aset Tetap, sedangkan bagian yang disewakan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga dicatat sebagai properti investasi.

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 Grup tidak memiliki kewajiban kontraktual atas perbaikan dan perawatan di masa depan.

Nilai wajar properti investasi pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.741.832.756, Rp1.571.944.551, dan Rp1.357.998.427.

17. Investment Properties (Continued)

Income generated from optimization of assets amounted Rp 272,064,819 and Rp219,714,061 for the five-month periods ended on May 31, 2024 and 2023, Rp649,662,475 and Rp630,197,305 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 39).

Expenses generated from optimization of assets amounted to Rp213,768,765 and Rp131,754,772, for five-month periods ended May 31, 2024, 2023, Rp511,938,878 and Rp648,309,642 for the years ended on December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 40).

The Group's investment properties consist of assets in the form of land and buildings. The portion used for operational activities is recorded as Fixed Assets, while the portion that is leased to related parties and third parties is recorded as investment property.

As of May 31, 2024, December 31, 2023 and 2022 the Group had no contractual obligations for future repairs and maintenance.

The fair value of investment properties as of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 amounted to Rp1,741,832,756, Rp1,571,944,551, and Rp1,357,998,427, respectively.

18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana

18. Infrastructure Assets Operating Rights

	31 Mei 2024/May 31, 2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Hak Pengoperasian					Infrastructure Assets
Aset Prasarana -					Operating Rights -
Konsesi	28.335.361.035	--	--	28.335.361.035	Concession
Non-Konsesi	2.356.946.553	--	--	2.356.946.553	Non-Concession
Pekerjaan dalam					Construction in
Proses Konstruksi -					Progress -
Konsesi	381.997.205	135.412.371	--	517.409.576	Concession
Non-Konsesi	1.051.876.253	81.216.163	--	1.133.092.416	Non-Concession
Jumlah	32.126.181.046	216.628.534	--	32.342.809.580	Total
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan					Depreciation
Hak Pengoperasian					Infrastructure Assets
Aset Prasarana -					Operating Rights -
Konsesi	638.691.032	249.894.472	--	888.585.504	Concession
Non-konsesi	789.814.350	46.917.267	--	836.731.617	Non-concession
Jumlah	1.428.505.382	296.811.739	--	1.725.317.121	Total
Nilai Tercatat	30.697.675.664			30.617.492.459	Carrying Amount

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana
(Lanjutan)**

**18. Infrastructure Assets Operating Rights
(Continued)**

	31 Desember 2023/December 31, 2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Hak Pengoperasian					Infrastructure Assets
Aset Prasarana -					Operating Rights -
Konsesi	2.414.560.954	--	25.920.800.081	28.335.361.035	Concession
Non-Konsesi	2.061.358.529	--	295.588.024	2.356.946.553	Non-Concession
Pekerjaan dalam					Construction in
Proses Konstruksi -					Progress -
Konsesi	19.041.688.791	7.342.248.533	(26.001.940.119)	381.997.205	Concession
Non-Konsesi	1.287.455.656	412.580.234	(648.159.637)	1.051.876.253	Non-Concession
Jumlah	24.805.063.930	7.754.828.767	(433.711.651)	32.126.181.046	Total
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan					Depreciation
Hak Pengoperasian					Infrastructure Assets
Aset Prasarana -					Operating Rights -
Konsesi	384.554.965	254.136.067	--	638.691.032	Concession
Non-konsesi	683.564.949	106.249.401	--	789.814.350	Non-concession
Jumlah	1.068.119.914	360.385.468	--	1.428.505.382	Total
Nilai Tercatat	23.736.944.016			30.697.675.664	Carrying Amount
	31 Desember 2022/December 31, 2022				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Hak Pengoperasian					Infrastructure Assets
Aset Prasarana -					Operating Rights -
Konsesi	2.414.560.954	--	--	2.414.560.954	Concession
Non-Konsesi	2.061.358.529	--	--	2.061.358.529	Non-Concession
Pekerjaan dalam					Construction in
Proses Konstruksi -					Progress -
Konsesi	16.366.186.678	2.610.567.346	64.934.767	19.041.688.791	Concession
Non-Konsesi	543.712.862	391.171.181	352.571.613	1.287.455.656	Non-Concession
Jumlah	21.385.819.023	3.001.738.527	417.506.380	24.805.063.930	Total
Akumulasi					Accumulated
Penyusutan					Depreciation
Hak Pengoperasian					Infrastructure Assets
Aset Prasarana -					Operating Rights -
Konsesi	303.224.232	81.330.733	--	384.554.965	Concession
Non-konsesi	579.444.389	104.120.560	--	683.564.949	Non-concession
Jumlah	882.668.621	185.451.293	--	1.068.119.914	Total
Nilai Tercatat	20.503.150.402			23.736.944.016	Carrying Amount

Amortisasi sebesar Rp296.811.379 dan Rp283.114.095 untuk periode-periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023, Rp360.385.468 dan Rp185.451.293 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dibebankan pada akun beban operasi tidak langsung.

Amortization amounted Rp296,811,379 and Rp283,114,095 for five-month periods ended on May 31, 2024 and 2023, Rp360,385,468 and Rp185,451,293 for the years ended December 31, 2023 and 2022, charged as indirect operating expenses.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana (Lanjutan)

18. Infrastructure Assets Operating Rights (Continued)

Perusahaan mempunyai 5 (lima) hak pengoperasian aset prasarana yaitu:

The Company has 5 (five) infrastructure assets operating rights, as follow:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Nilai Tercatat Hak Pengoperasian Aset Prasarana				Carrying Amount of Infrastructure Assets Operating Rights
Hak Pengoperasian Aset Prasarana - Konsesi				Infrastructure Assets Operating Rights - Service Concession
Proyek LRT Jabodebek	25.696.826.043	25.777.420.339	19.041.688.791	LRT Jabodebek Project
Kereta Api Bandara Soekarno Hatta	1.914.787.451	1.948.675.256	2.030.005.989	Airport Railway Soekarno Hatta
Proyek Reaktivasi Cibatugar	352.571.613	352.571.613	--	Reactivation Cibatugar Project
Subjumlah	27.964.185.107	28.078.667.208	21.071.694.780	Subtotal
Hak Pengoperasian Aset Prasarana - Non-Konsesi				Infrastructure Assets Operating Rights - Non-Service Concession
Jalur Ganda Sumatra Selatan	2.640.292.331	2.605.375.913	2.297.563.031	Double Track South Sumatra
Proyek Reaktivasi Cibatugar	--	--	352.571.613	Reactivation Cibatugar Project
Jalur KA Araskabu-Bandar Udara Kualanamu	13.015.021	13.632.543	15.114.592	Araskabu-Bandar Udara Kualanamu's Track
Subjumlah	2.653.307.352	2.619.008.456	2.665.249.236	Subtotal
Jumlah	30.617.492.459	30.697.675.664	23.736.944.016	Total

KA Bandara Soekarno-Hatta

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2011, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana perkeretaapian Bandar Udara Soekarno-Hatta via Tangerang serta prasarana dan sarana perkeretaapian Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek). Perusahaan memiliki hak konsesi atas penyelenggaraan prasarana perkeretaapian Bandar Udara Soekarno-Hatta selama 30 tahun terhitung sejak tanggal pengoperasian yaitu tanggal 14 Desember 2017.

Soekarno-Hatta Airport Train

Based on Presidential Regulation of Republic of Indonesia No. 83 in 2011, the Government assigned the Company to operate the rolling stock and railway infrastructure of Soekarno-Hatta Airport via Tangerang and also the rolling stock and railway infrastructure of Jakarta – Bogor – Depok – Tangerang – Bekasi (Jabodetabek) Circular Line. The Company has concession right to operate the railway infrastructure of Soekarno-Hatta Airport for 30 years since the date of operation date on December 14, 2017.

Pada tanggal 10 Juli 2014, Perusahaan selaku pemegang hak penyelenggara prasarana perkeretaapian umum Bandara Soekarno Hatta melalui kota Tangerang, telah menandatangani Perjanjian dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) dengan Nomor HK.201/A.263/DJKA/7/14 dan HK.222/VII/2/KA-2014 dengan masa penyelenggaraan konsesi selama 30 tahun, masa konsesi sebagaimana dimaksud akan ditinjau kembali oleh instansi yang berwenang setelah ditetapkan tarif dan telah diketahui biaya pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian bandara.

On July 10, 2014, the Company as the right holder of infrastructure operating for Soekarno-Hatta Airport railways via Tangerang, had signed an agreement with Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) referred to Agreement No. HK.201/A.263/DJKA/7/14 and HK.222/VII/2/KA-2014 with period of concession operating for 30 years, which will be reviewed by related institution after ticket fare and operating and maintenance cost of rolling stock and infrastructure have been determined.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana (Lanjutan)

Tarif tiket ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan pedoman perhitungan dan penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan berlaku untuk penyelenggaraan KA Bandara.

Kereta Api Ringan (LRT) Jabodebek

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada tanggal 3 Mei 2017, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2017. Dalam Peraturan yang terakhir ini, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk melakukan pengadaan sarana, penyelenggaraan pengoperasian sarana dan prasarana, perawatan sarana dan prasarana, serta pengusahaan sarana dan prasarana termasuk pendanaan pembangunan prasarana kereta api ringan terintegrasi.

Pada tanggal 19 Desember 2017, Perusahaan selaku pemegang hak penyelenggara prasarana kereta api ringan atau *Light Rail Transit* (LRT), telah menandatangani perjanjian dengan DJKA untuk menyediakan jasa pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur Lintas Rel Terpadu Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dengan Nomor HK.201/A.566/DJKA/12/17 dan KL.705/XII/10/KA-2017 dengan masa penyelenggaraan konsesi selama 50 tahun berlaku efektif sejak diterimanya berita acara tanggal operasi (BATO) pada 28 Agustus 2023.

Terdapat empat jenis yang wajib dibangun, dioperasikan dan dipelihara Perusahaan terkait dengan proyek LRT Jabodebek yaitu prasarana, fasilitas perawatan prasarana, sarana dan fasilitas perawatan sarana. Pembangunan prasarana dan Dipo oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor yang ditugaskan berdasarkan Perpres LRT.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. Infrastructure Assets Operating Rights (Continued)

Ticket fare is determined by the company according to guidance of calculation and determination of passenger transportation fare which is regulated by Minister of Transportation and applicable for Airport Railways project.

Light Rail Transit (LRT) Jabodebek

Based on Presidential Regulation No. 98 of 2015 regarding Acceleration of Integrated Light Rail Transit Operation in Jakarta, Bogor, Depok, and Bekasi Areas that has been amended several times, most recently on May 3, 2017, by Presidential Regulation No. 49 of 2017. In this amendment, the Government assigned the Company to perform procurement, operation of facilities and infrastructure, maintenance of rolling stock facilities and infrastructure, and commercialization of facilities and infrastructure including to raise funding of the construction of infrastructure for the integrated light rail transit.

On December 19, 2017, the Company as the right holder of light rail transit infrastructure management, had signed an agreement with DJKA to provide services of development, operating and maintenance of light rail transit infrastructure Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) route referred to Agreement No. HK.201/A.566/DJKA/12/17 and KL.705/XII/10/KA-2017 with a concession period of 50 years effective from the receipt of the minutes of operation date (BATO) on August 28, 2023.

Four components related to the project of LRT Jabodebek which were required to be developed, operated, and maintained by the Company are infrastructure, infrastructure maintenance facility, rolling stock, and rolling stock maintenance facility. Development of infrastructure and depot is conducted by PT Adhi Karya (Persero) Tbk as the assigned contractor according to Presidential Regulation regarding LRT.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana (Lanjutan)

Tarif tiket ditetapkan oleh perusahaan berdasarkan pedoman perhitungan dan penetapan tarif angkutan orang dengan kereta api yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan dan berlaku untuk penyelenggaraan KA.

Berdasarkan Berita Acara Tanggal Operasi No. BA-DJKA 6 Tahun 2023 tanggal 28 Agustus 2023, tanggal operasi LRT Jabodebek dimulai sejak tanggal 28 Agustus 2023.

Reaktivasi Cibu-Garut

Berdasarkan perjanjian konsesi dengan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Nomor HK.201/1/25/DJKA/2023 dan Nomor KL.705/IX/27/KA-2023 tanggal 29 September 2023 tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum pada Lintas Pelayanan Stasiun Cibu sampai dengan Stasiun Garut bahwa Perusahaan mendapatkan hak penyelenggaraan melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 tahun 2020 yang memberikan penugasan kepada Perusahaan untuk melaksanakan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum pada lintas pelayanan Stasiun Cibu sampai dengan Stasiun Garut.

Hak penyelenggaraan meliputi pembangunan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan prasarana perkeretaapian umum. Masa penyelenggaraan diberikan untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal operasi yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Tanggal Operasi (BATO). Setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian, aset prasarana akan diserahkan kepada Pemerintah. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, BATO dari Kementerian Perhubungan belum terbit.

Sumatera Selatan dan Kualanamu

Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. HK.601/SK.29/DJKA/9/2012 Tahun 2012, bahwa Perusahaan diberi kewenangan untuk membangun prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatera Selatan, dan sesuai Surat Pernyataan dari Direktur Utama Perusahaan No. 001/VII/11/KA-2012 tanggal 31 Juli 2012 bahwa setelah pembangunan, aset prasarana

18. Infrastructure Assets Operating Rights (Continued)

Ticket fare is determined by the company according to guidance of calculation and determination of passenger transportation fare which is regulated by Minister of Transportation and applicable for Railways project.

Based on the Minutes of Operation Date No. BA-DJKA 6 Year 2023 dated August 28, 2023, the Jabodebek LRT operation date starts from August 28, 2023.

Reactivity Cibu-Garut

Based on the concession agreement with the Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Number HK.201/1/25/DJKA/2023 and Number KL.705/IX/27/KA-2023 dated September 29, 2023 concerning the Implementation of Public Railway Infrastructure on the Cibu Station to Garut Station Service Line, the Company obtained the right of operation through the Decree of the Minister of Transportation Number KM 50 of 2020, which assigns the Company to carry out the implementation of public railway infrastructure on the Cibu Station to Garut Station service line.

Implementation rights include the construction, operation, maintenance, and exploitation of public railroad infrastructure. The organizing period is given for a period of 45 (forty-five) years from the date of operation, as evidenced by the signing of Minutes of Operation Date (BATO). After the expiration of the agreement period, the infrastructure assets will be handed over to the government. Until this report is published, BATO from the Ministry of Transportation have not yet been published.

South Sumatera and Kualanamu

According to Decree of Minister of Transportations No. HK.601/SK.29/DJKA/9/2012 Year 2012, the Company is authorized to build railway infrastructure in South Sumatera, and according to Statement of the Company's President Directors No. 001/VII/11/KA-2012 dated July 31, 2012 that after the construction, the infrastructure assets will be transferred or

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana (Lanjutan)

tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah sehingga menjadi Barang Milik Negara (BMN). Selain itu sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.123 Tahun 2013, bahwa Perusahaan diberi kewenangan untuk membangun prasarana perkeretaapian umum untuk jalur kereta api umum dari Stasiun Araskabu ke Bandar Udara Internasional Kualanamu Sumatra Utara dan sesuai Surat Pernyataan dari Direktur Utama Perusahaan No. HK.237/VII/5/KA-2013 tanggal 10 Juli 2013 bahwa setelah pembangunan tersebut selesai, aset prasarana akan diserahkan kepada Pemerintah.

Berdasarkan UU No. 23/2007 tentang Perkeretaapian, Perusahaan diberi kewenangan (hak) untuk mengoperasikan aset prasarana, maka atas pengeluaran untuk pembangunan prasarana perkeretaapian di wilayah Sumatra bagian utara dan selatan, telah dicatat oleh Perusahaan sebagai hak pengoperasian aset prasarana.

Hak pengoperasian aset prasarana di wilayah Sumatra bagian utara dan selatan diamortisasi selama 20 tahun setelah Berita Acara Serah Terima (BAST) diterima atau sesuai dengan kontrak yang berlaku. Masa umur hak pengoperasian ini ditentukan berdasarkan asumsi manajemen merujuk pada ketentuan perpajakan. Jalur Sumatra bagian utara dan selatan tersebut telah beroperasi masing-masing pada tanggal 23 Juli 2013 dan 28 Januari 2015.

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022, pekerjaan dalam proses konstruksi terdiri dari:

18. Infrastructure Assets Operating Rights (Continued)

assigned to the Government as the State Property (BMN). In addition, according to Decree of Minister of Transportations No. KP.123 Year 2013, the Company is authorized to build railway infrastructure for public railway from Araskabu Station to Kualanamu International Airport in North Sumatra, and according to Statement of the Company's President Directors No. HK.237/VII/5/KA-2013 dated July 10, 2013 that after the construction, the infrastructure assets will be transferred or assigned.

Based on Law No. 23/2007 regarding Railways, the Company is given authorization (right) to operate infrastructure assets, therefore the expenditure for the construction of railway infrastructure in north and south of Sumatra regions, have been recorded by the Company as infrastructure assets operating rights.

Infrastructure assets operating rights in north and south of Sumatra regions are amortized within 20 years since the receipt of minutes of Hand Over (BAST) or in accordance with the prevailing contract. The period of the right to operate is determined based on management assumptions referred to tax provisions. The northern and southern Sumatra tracks were operate on July 23, 2013 and January 28, 2015, respectively.

As of May 31, 2024, December 31, 2023 and 2022, construction in progress consists of:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024				
	Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp	Nilai Kontrak/ Contracts Amount Rp	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion	
Hak Pengoperasian Aset Prasarana					Infrastructure Assets Operating Rights
Proyek LRT Jabodebek	164.837.962	28.378.514.132	99,62%	2024-2025	LRT Jabodebek Project
Pembangunan Jalur Ganda - Sumatra Selatan	1.133.092.418	1.572.772.839	70,28%	2024-2025	Double Track Construction South Sumatra
Reaktivasi Cibatug-Garut	352.571.612	352.628.113	99,98%	2024-2025	Reactivation Cibatug Garut
Jumlah	1.650.501.992	30.303.915.084			Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. Hak Pengoperasian Aset Prasarana (Lanjutan) 18. Infrastructure Assets Operating Rights (Continued)

31 Desember 2023/ December 31, 2023					
Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp	Nilai Kontrak/ Contracts Amount Rp	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion		
Hak Pengoperasian Aset Prasarana				Infrastructure Assets	
Proyek LRT Jabodebek	29.425.590	28.378.514.132	99,62%	2024	Operating Rights
Pembangunan Jalur Ganda - Sumatra Selatan	1.051.876.255	1.572.772.839	66,88%	2024	LRT Jabodebek Project
Reaktivasi Cibatugarut	352.571.613	352.628.113	99,98%	2024	Double Track Construction South Sumatra
Jumlah	1.433.873.458	30.303.915.084			Reactivation Cibatugarut
					Total
31 Desember 2022/ December 31, 2022					
Nilai Tercatat/ Carrying Amount Rp	Nilai Kontrak/ Contracts Amount Rp	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion	Estimasi Penyelesaian/ Estimated Completion		
Hak Pengoperasian Aset Prasarana					Infrastructure Assets
Proyek LRT Jabodebek	19.041.688.791	28.245.111.967	88,07%	2022 - 2023	Operating Rights
Pembangunan Jalur Ganda - Sumatra Selatan	934.884.043	1.903.770.937	49,11%	2022 - 2023	LRT Jabodebek Project
Reaktivasi Cibatugarut	352.571.613	374.842.092	94,06%	2022 - 2023	Double Track Construction South Sumatra
Jumlah	20.329.144.447	30.523.724.996			Reactivation Cibatugarut
					Total

Nilai beban pinjaman yang dikapitalisasi masing-masing sebesar nihil dan Rp313.583.764 untuk periode-periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023, Rp216.399.470 dan Rp273.625.589 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Capitalized interest expense amounted to null and Rp313,583,764 for five-month periods ended on May 31, 2024 and 2023, Rp216,399,470 and Rp273,625,589 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

19. Aset Takberwujud

19. Intangible Assets

31 Mei 2024/May 31, 2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Sertifikat Tanah	527.129.548	--	31.623.821	558.753.369	Land Certificate
Piranti Lunak	313.206.795	--	32.827.496	346.034.291	Software
Aset dalam Penyelesaian	100.969.676	197.890.033	(64.451.317)	234.408.392	Construction in Progress
Jumlah	941.306.019	197.890.033	--	1.139.196.052	Total
Akumulasi penyusutan					Accumulated Depreciation
Sertifikat tanah	103.509.865	9.890.636	--	113.400.501	Land Certificate
Piranti lunak	261.564.743	11.678.398	--	273.243.141	Software
Jumlah	365.074.608	21.569.034	--	386.643.642	Total
Nilai Tercatat	576.231.411			752.552.410	Carrying Amount

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

19. Aset Takberwujud (Lanjutan)

19. Intangible Assets (Continued)

		31 Desember 2023/December 31, 2023					
		<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Penambahan/ Addition</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>		
Biaya Perolehan						Acquisition Cost	
Sertifikat Tanah	402.149.859	--	124.979.689	527.129.548			Land Certificate
Piranti Lunak	264.330.197	--	48.876.598	313.206.795			Software
Aset dalam Penyelesaian	76.845.930	195.655.994	(171.532.248)	100.969.676			Construction in Progress
Jumlah	743.325.986	195.655.994	2.324.039	941.306.019			Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation	
Sertifikat tanah	81.059.598	22.450.267	--	103.509.865			Land Certificate
Piranti lunak	239.505.486	22.059.257	--	261.564.743			Software
Jumlah	320.565.084	44.509.524	--	365.074.608			Total
Nilai Tercatat	422.760.902			576.231.411			Carrying Amount
		31 Desember 2022/December 31, 2022					
		<u>Saldo Awal/ Beginning Balance</u>	<u>Penambahan/ Addition</u>	<u>Reklasifikasi/ Reclassification</u>	<u>Saldo Akhir/ Ending Balance</u>		
Biaya Perolehan						Acquisition Cost	
Sertifikat Tanah	331.136.238	442.243	70.571.378	402.149.859			Land Certificate
Piranti Lunak	251.878.751	5.621.446	6.830.000	264.330.197			Software
Aset dalam Penyelesaian	64.393.646	89.853.662	(77.401.378)	76.845.930			Construction in Progress
Jumlah	647.408.635	95.917.351	--	743.325.986			Total
Akumulasi penyusutan						Accumulated Depreciation	
Sertifikat tanah	64.273.786	16.785.812	--	81.059.598			Land Certificate
Piranti lunak	216.361.572	23.143.914	--	239.505.486			Software
Jumlah	280.635.358	39.929.726	--	320.565.084			Total
Nilai Tercatat	366.773.277			422.760.902			Carrying Amount

Sertifikat tanah merupakan biaya atas pengurusan peningkatan status hak atas tanah yang sebelumnya berbentuk *Grondkaart* ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan.

Land certificate represents the maintenance costs to improve the status of land rights that are previously in form of Grondkaart to be Building Use Rights Certificate.

Piranti lunak merupakan biaya atas pengembangan atau pembelian piranti lunak yang bersifat spesifik berdasarkan bisnis proses Grup.

Software represents the procurement or development costs for specific softwares according to the Group's business process.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

19. Aset Takberwujud (Lanjutan)

19. Intangible Assets (Continued)

Pada 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022, Perusahaan melakukan reklasifikasi beberapa aset ke dalam aset takberwujud.

As of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022, the Company reclassifies few assets into intangible assets.

Amortisasi sebesar Rp21.569.034 dan Rp14.287.444 untuk periode-periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023, Rp44.509.524 dan Rp39.929.726 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dibebankan pada akun beban operasi tidak langsung.

Amortization amounted Rp21,569,034 and Rp14,287,444 for the five-month periods ended on May 31, 2024 and 2023, Rp44,509,524 and Rp39,929,726 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively, are charged as indirect operating expenses.

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022, aset dalam penyelesaian terdiri dari:

As of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022, the construction in progress consists of:

31 Mei 2024/May 31, 2024					
Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	Nilai Kontrak/ <i>Total Contracts</i>	Persentase Penyelesaian/ <i>Percentage of Completion</i>	Estimasi Penyelesaian/ <i>Estimated Completion</i>		
Rp	Rp	(%)			
Aset Takberwujud					<i>Intangible Assets</i>
- Piranti Lunak	42.187.437	92.165.437	45,77	2024-2025	<i>Software</i>
- Sertifikat Tanah	192.220.955	212.774.624	90,34	2024-2025	<i>Land Certificate</i>
Jumlah	234.408.392	304.940.061			Total
31 Desember 2023/December 31, 2023					
Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	Nilai Kontrak/ <i>Total Contracts</i>	Persentase Penyelesaian/ <i>Percentage of Completion</i>	Estimasi Penyelesaian/ <i>Estimated Completion</i>		
Rp	Rp	(%)			
Aset Takberwujud					<i>Intangible Assets</i>
- Piranti Lunak	72.280.893	122.258.893	59,12	2024	<i>Software</i>
- Sertifikat Tanah	28.688.783	41.776.636	68,67	2024	<i>Land Certificate</i>
Jumlah	100.969.676	164.035.529			Total
31 Desember 2022/December 31, 2022					
Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	Nilai Kontrak/ <i>Total Contracts</i>	Persentase Penyelesaian/ <i>Percentage of Completion</i>	Estimasi Penyelesaian/ <i>Estimated Completion</i>		
Rp	Rp	(%)			
Aset Takberwujud					<i>Intangible Assets</i>
- Piranti Lunak	40.256.307	100.609.307	40,01	2023	<i>Software</i>
- Sertifikat Tanah	36.589.623	44.017.945	83,12	2023	<i>Land Certificate</i>
Jumlah	76.845.930	144.627.252			Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

20. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa

20. Right-of-Use Assets and Lease Liabilities

Rekonsiliasi kelompok-kelompok utama aset hak guna dan liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The reconciliation of right-of-use assets and lease liabilities by major classifications was as follows:

31 Mei 2024/May 31, 2024					
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Biaya Perolehan				Acquisition Cost	
Prasarana:				Infrastructures:	
Tanah	20.503.811	--	20.503.811	Land	
Bangunan	6.656.638	(297.275)	6.359.363	Buildings	
Instalasi Bergerak	35.048.185	--	35.048.185	Equipments	
Fasilitas:				Facilities:	
Kendaraan	34.135.122	5.441.349	--	Vehicles	
Inventaris	89.175.993	--	--	Supplies	
Jumlah	185.519.749	5.441.349	(297.275)	190.663.823	Total
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation	
Prasarana:				Infrastructures:	
Tanah	8.172.538	1.862.187	--	10.034.725	Land
Bangunan	4.796.342	370.797	(297.275)	4.869.864	Buildings
Instalasi Bergerak	35.048.184	--	--	35.048.184	Equipments
Fasilitas:				Facilities:	
Kendaraan	12.421.281	5.056.649	--	17.477.930	Vehicles
Inventaris	32.929.084	5.404.614	--	38.333.698	Supplies
Jumlah	93.367.429	12.694.247	(297.275)	105.764.401	Total
Nilai Tercatat	92.152.320			84.899.422	Carrying Amount
31 Desember 2023/December 31, 2023					
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Addition	Pengurangan/ Deduction	Saldo Akhir/ Ending Balance		
Biaya Perolehan				Acquisition Cost	
Prasarana:				Infrastructures:	
Tanah	6.198.766	17.422.234	(3.117.189)	20.503.811	Land
Bangunan	18.787.043	409.161	(12.539.566)	6.656.638	Buildings
Instalasi Bergerak	35.048.185	--	--	35.048.185	Equipments
Fasilitas:				Facilities:	
Kendaraan	4.378.159	29.756.963	--	34.135.122	Vehicles
Inventaris	63.467.867	25.741.507	(33.381)	89.175.993	Supplies
Jumlah	127.880.020	73.329.865	(15.690.136)	185.519.749	Total
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation	
Prasarana:				Infrastructures:	
Tanah	4.401.179	6.888.548	(3.117.189)	8.172.538	Land
Bangunan	16.250.902	1.085.006	(12.539.566)	4.796.342	Buildings
Instalasi Bergerak	29.753.619	5.294.565	--	35.048.184	Equipments
Fasilitas:				Facilities:	
Kendaraan	4.362.987	8.058.294	--	12.421.281	Vehicles
Inventaris	19.995.259	12.967.206	(33.381)	32.929.084	Supplies
Jumlah	74.763.946	34.293.619	(15.690.136)	93.367.429	Total
Nilai Tercatat	53.116.074			92.152.320	Carrying Amount

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

**20. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa
(Lanjutan)**

**20. Right-of-Use Assets and Lease Liabilities
(Continued)**

31 Desember 2022/December 31, 2022					
	Saldo Awal/ <i>Beginning Balance</i>	Penambahan/ <i>Addition</i>	Pengurangan/ <i>Deduction</i>	Saldo Akhir/ <i>Ending Balance</i>	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Prasarana:					<i>Infrastructures:</i>
Tanah	6.115.014	3.081.577	(2.997.825)	6.198.766	<i>Land</i>
Bangunan	17.700.543	1.086.500	--	18.787.043	<i>Buildings</i>
Instalasi Bergerak	25.183.819	9.864.366	--	35.048.185	<i>Equipments</i>
Fasilitas:					<i>Facilities:</i>
Kendaraan	14.408.147	1.350.591	(11.380.579)	4.378.159	<i>Vehicles</i>
Inventaris	63.467.867	--	--	63.467.867	<i>Supplies</i>
Jumlah	126.875.390	15.383.034	(14.378.404)	127.880.020	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Prasarana:					<i>Infrastructures:</i>
Tanah	4.994.457	2.404.547	(2.997.825)	4.401.179	<i>Land</i>
Bangunan	12.093.889	4.157.013	--	16.250.902	<i>Buildings</i>
Instalasi Bergerak	18.078.398	11.675.221	--	29.753.619	<i>Equipments</i>
Fasilitas:					<i>Facilities:</i>
Kendaraan	11.463.429	4.135.350	(11.235.792)	4.362.987	<i>Vehicles</i>
Inventaris	12.825.863	7.169.396	--	19.995.259	<i>Supplies</i>
Jumlah	59.456.036	29.541.527	(14.233.617)	74.763.946	Total
Nilai Tercatat	67.419.354			53.116.074	Carrying Amount

Beberapa transaksi sewa gudang dan kantor dan kendaraan mengandung opsi perpanjangan yang dapat diambil oleh Grup sebelum masa berakhirnya kontrak yang tidak dapat dibatalkan. Opsi perpanjangan yang dimiliki hanya dapat diambil oleh Grup. Grup mengevaluasi pada awal dimulainya masa sewa apakah besar kemungkinan akan diambilnya opsi perpanjangan. Grup mengevaluasi kembali penentuan ini apabila ada peristiwa signifikan atau ada perubahan keadaan signifikan di dalam kendali Grup.

Beban penyusutan masing-masing sebesar Rp12.694.247 dan Rp14.289.008 untuk periode-periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023, Rp34.293.619 dan Rp29.514.527 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dibebankan pada beban operasi tidak langsung (Catatan 40).

Some leases of warehouses and offices and vehicles contain extension options exercisable by the Group before the end of the non-cancellable contract period. The extension options held are exercisable only by the Group. The Group assesses at lease commencement whether it is reasonably certain to exercise the extension options. The Group reassesses this assessment if there is a significant event or significant change in circumstances within the control of the Group.

Depreciation expense amounted Rp12,694,247 and Rp14,289,008 for the five-month periods ended on May 31, 2024 and 2023, Rp34,293,619 and Rp29,514,527 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively, are charged as indirect operating expenses (Note 40).

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

20. Aset Hak Guna dan Liabilitas Sewa (Lanjutan)

20. Right-of-Use Assets and Lease Liabilities (Continued)

Berikut ringkasan komponen liabilitas sewa berdasarkan jangka waktu:

The following summarizes the component of lease liabilities based in period:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Liabilitas Sewa				Lease liabilities
Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	36.508.215	44.237.193	20.566.599	Due Within One Year
Jatuh Tempo Lebih dari Satu Tahun	85.005.526	92.691.568	60.353.914	Due Beyond One Year
Jumlah	121.513.741	136.928.761	80.920.513	Total
Dikurangi: Bagian Bunga	(27.750.820)	(26.257.872)	(19.757.613)	Less: Interest Portion
Nilai kini Pembayaran Sewa	93.762.921	110.670.889	61.162.900	Present value of Lease Payments
Dikurangi: Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun	(33.231.048)	(36.504.861)	(16.563.637)	Less: Current Portion
Bagian Jangka Panjang	60.531.873	74.166.028	44.599.263	Non-current Portion

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

The following summarizes the component of changes in the liabilities arising from leases:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Saldo Awal	110.670.889	61.162.900	82.145.435	Beginning Balance
Arus Kas	(25.626.485)	(31.554.208)	(37.190.355)	Cash Flow
Perubahan Non-kas				Non-cash Movement
Penambahan	5.441.349	73.329.865	12.204.858	Addition
Beban Bunga	3.277.168	7.732.332	4.002.962	Interest Expenses
Saldo Akhir	93.762.921	110.670.889	61.162.900	Ending Balance

Grup mencatat beban bunga masing-masing sebesar Rp3.305.994 dan Rp1.788.782 untuk periode-periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024 dan 2023, Rp8.576.995 dan Rp8.101.140 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 44).

The Group charged as finance cost amounted Rp3,305,994 and Rp1,788,782 for the five-month periods ended on May 31, 2024 and 2023, Rp8,576,995 and Rp8,101,140 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 44).

21. Aset Tidak Lancar Lainnya

21. Other Non-Current Assets

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Aset Non-Keuangan				Non-Financial Assets
Aset Diberhentikan Operasi	120.935.985	120.935.985	268.605.543	Assets Discontinued from Operations
Persediaan Scrap	31.443.812	31.443.812	31.443.812	Scrap Inventories
Dikurangi:				Less:
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(152.379.791)	(152.379.791)	(300.049.355)	Allowance for Impairment Losses
Aset Non-Keuangan - Neto	6	6	--	Non-Financial Assets - Net
Aset Keuangan				Financial Assets
Pihak Berelasi (Catatan 42)				Related Parties (Note 42)
Dana Pensiun Pegawai	101.702.775	91.258.933	76.394.632	Pension Funds
Dana Kesehatan Pegawai	61.354.623	60.679.342	53.402.087	Employee Healthy Fund
Dana Cadangan Tantiem	7.640.255	7.592.201	--	Tantiem's Reserve Fund
Pihak Ketiga				Third Parties
Aset Keuangan Lainnya	54.803.195	52.526.621	56.928.847	Other Financial Assets
Aset Keuangan - Neto	225.500.848	212.057.097	186.725.566	Financial Assets - Net
Neto	225.500.854	212.057.103	186.725.566	Net

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

21. Aset Tidak Lancar Lainnya (Lanjutan)

21. Other Non-Current Assets (Continued)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai:

Change in allowance for impairment losses:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Saldo Awal	(152.379.791)	(300.049.355)	(329.919.637)	Beginning Balance
Penghapusan Cadangan				Write-offs of
Aset Non-keuangan	--	147.669.564	29.293.118	Non-financial Assets
Pemulihan Cadangan Aset Keuangan	--	--	577.164	Recovery Allowance of Financial Assets
Saldo Akhir	<u>(152.379.791)</u>	<u>(152.379.791)</u>	<u>(300.049.355)</u>	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa cadangan penurunan nilai cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari estimasi nilai wajar aset tidak lancar lainnya.

Management believes that the allowance for impairment is adequate to cover possible losses on fair value estimated of other Non-current assets.

Pada 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022, Perusahaan melakukan reklasifikasi atas aset tetap yang diberhentikan operasi ke dalam aset tidak lancar lainnya (Catatan 16).

As of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022, the Company reclassified the assets discontinued from operations into other non-current assets (Note 16).

Aset diberhentikan operasi merupakan aset tetap Sarana Grup yang tidak dapat dioperasikan lagi baik dari sisi teknis maupun ekonomi (Catatan 16). Nilai atas aset diberhentikan operasi pada tanggal 31 Mei 2024 telah dicadangkan seluruhnya.

Assets discontinued represent operations Group's assets which cannot be technically and economically utilized (Note 16). Amount of assets discontinued form operations as of May 31, 2024 have been fully impaired.

Pada tanggal 12 September 2023, Perusahaan melakukan penjualan atas sebidang tanah di Kota Padang seluas 15.510m² dengan nilai tercatat sebesar Rp1.263.485 (nilai penuh) dan harga jual sebesar Rp31.299.180.

On September 12, 2023, the Company sold a plot of land in Padang City covering an area of 15,510sqm with a carrying value of Rp1,263,485 (full amount) and selling price amounted to Rp31,299,180.

Pada tanggal 27 September 2023, Perusahaan melakukan penjualan aset sarana yang sudah dicadangkan secara penuh berupa Lokomotif, Gerbong, Kereta, KRd, dan KRL dengan harga jual sebesar Rp78.446.395.

On September 27, 2023, the Company sold facility assets in the form of Locomotives, Wagons, Trains, KRd, and KRL with selling price amounted to Rp78,446,395.

Pada bulan Mei 2024, Perusahaan melakukan penghapusbukuan atas sebidang tanah di Kota Bandung seluas 9.708m² dengan nilai tercatat sebesar Rp46.172.

In May 2024, the Company write-off a plot of land in Bandung City covering an area of 9,708sqm with a carrying value of Rp46,172.

Dana pensiun pegawai merupakan dana yang dibentuk untuk menampung dana pensiun karyawan. Jumlah dana yang dikumpulkan sebesar 17,25% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dengan komposisi sebesar 4,75% dipotong dari penghasilan karyawan dan sebesar 12,5% dari kontribusi Perusahaan. Dana tersebut digunakan untuk pesangon pegawai Perusahaan yang diangkat sebelum tanggal 1 Agustus 2009 sebanyak 9.821 karyawan sebelum disetorkan ke pengelola program asuransi *saving plan* dengan pola pendanaan sistem *pooled fund*.

Pension funds represent funds raised to accommodate employees' pension funds. The amount collected is 17.25% of employee basic pension salary represented by 4.75% deducted from employee's salary and 12.5% of the Company's contribution. The funds are used for employee severance payment for those who were hired on the period started before August 1, 2009 amounted to 9,821 employees before it is deposited to insurance saving plan management by pooled fund systems.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

22. Utang Usaha

22. Trade Payables

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Utang Usaha				Trade Payables
Pihak Berelasi (Catatan 42)	965.653.310	4.976.299.233	880.714.681	Related Parties (Note 42)
Pihak Ketiga	961.841.412	2.394.977.405	1.578.171.487	Third Parties
Jumlah	1.927.494.722	7.371.276.638	2.458.886.168	Total

Berdasarkan mata uang:

By currencies:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Rupiah	1.821.983.878	7.340.256.012	2.361.525.615	Rupiah
Yen Jepang	58.386.763	14.516.151	86.831.596	Japan Yen
Euro	47.124.081	5.273.635	10.528.957	Euro
Dolar Amerika Serikat	--	11.230.840	--	United States Dollar
Jumlah	1.927.494.722	7.371.276.638	2.458.886.168	Total

Pada tanggal 9 Juli 2024 telah terbit Surat Direktorat Jenderal Perkeretaapian No. KU.102/7/13/K2/DJKA/2024 tentang Persetujuan atas Permohonan Keringanan PNBP TAC Perusahaan Tahun 2023. Berdasarkan surat tersebut, Kementerian Keuangan memberikan persetujuan kewajiban yang harus dibayarkan oleh Perusahaan sebesar Rp639.092.119 yang terdiri dari utang pokok sebesar Rp401.470.990 dan denda TAC sebesar Rp237.621.129. Perusahaan mencatat denda TAC sebagai bagian dari utang usaha kepada Kementerian Perhubungan (Catatan 42). Pada tanggal 16 Juli 2024, Perusahaan telah melakukan pembayaran atas seluruh kewajiban TAC tahun 2023.

On July 9, 2024, a letter from the Directorate General of Railways was issued Number: KU.102/7/13/K2/DJKA/2024 concerning Approval of the Company's PNBP TAC Waiver Application for 2023. Based on the letter, the Ministry of Finance approved the obligations to be paid by the Company amounting to Rp639,092,119 consisting of principal debt of Rp401,470,990 and TAC penalty of Rp237,621,129. The Company recorded the TAC penalty as a part of trade payable to the Ministry of Transportation (Note 42). On July 16, 2024, the Company has settled all of its 2023 TAC obligations.

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha.

There is no collateral pledged on trade payables.

23. Beban Akrua

23. Accruals

	31 Mei/May 31 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Biaya Operasi Langsung	945.600.544	846.030.286	672.586.876	Direct Operating Expenses
Biaya Umum dan Administrasi	857.445.477	587.226.416	579.407.094	General and Administratives Expenses
Biaya Operasi Tidak Langsung	691.437.168	770.061.237	320.967.956	Indirect Operating Expenses
Jumlah	2.494.483.189	2.203.317.939	1.572.961.926	Total

Biaya operasi langsung yang masih harus dibayar merupakan biaya pemeliharaan sarana di lintas dan balai yasa, biaya pendukung operasi dan biaya pendukung angkutan dan lainnya.

Accrued direct operating expenses represents the costs of maintenance of rolling stocks in railroad and workshop, costs of operation supports and costs of transportation supports and others.

Biaya operasi tidak langsung yang masih harus dibayar diantaranya merupakan biaya pemeliharaan prasarana pokok Grup, biaya penggunaan prasarana milik Pemerintah (TAC), dan biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

Accrued indirect operating expenses consist represent the costs of maintenance of the Group's, fees for the use of Government-owned infrastructures (TAC), and costs for safety and healthy work environment.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

23. Beban Akrual (Lanjutan)

Biaya umum dan administrasi yang masih harus dibayar merupakan biaya pemasaran, biaya perlengkapan dan operasional kantor, dan biaya administrasi.

23. Accruals (Continued)

Accrued general and administrative expenses represent marketing expenses, office supplies and operating expenses, and administrative expenses.

24. Pendapatan Diterima di Muka

Jatuh Tempo dalam Satu Tahun
Non Angkutan
Angkutan Penumpang
Angkutan Barang
Jumlah

Jangka Panjang Lebih dari Satu Tahun
Non Angkutan

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31	
		2023	2022
Non Angkutan	874.189.504	700.443.816	653.712.500
Angkutan Penumpang	403.965.936	547.600.796	445.814.913
Angkutan Barang	32.425.572	33.593.086	45.112.038
Jumlah	1.310.581.012	1.281.637.698	1.144.639.451
Non Angkutan	808.675.891	834.563.297	837.174.293

Current Maturities
Non-Transportation
Passenger Transportation
Freight Transportation
Total

Long-term Maturity
Non-Transportation

Pendapatan diterima di muka atas pendapatan non angkutan merupakan penerimaan sewa properti di dalam dan di luar stasiun.

Unearned revenue of non-transportation represents revenue generated from property lease inside and outside of station area.

Pendapatan diterima di muka angkutan penumpang merupakan pendapatan atas jasa angkutan penumpang pengguna kereta api yang realisasi kedatangan pada periode berikutnya.

Unearned revenue of passenger transportation represents revenue generated from passenger transport railway services of which the arrive is realized in the following period.

Pendapatan diterima di muka angkutan barang merupakan pendapatan atas jasa angkutan barang yang terdiri dari angkutan peti kemas, batu bara, parcel, barang curah dan barang jenis lain yang realisasi keberangkatannya pada periode berikutnya.

Unearned revenue of freight transportation represents revenue generated from freight transport railway services consist of freight of containers, coal, parcel, bulk cargo and other types of goods of which the departure is realized in the following period.

25. Pinjaman Bank Jangka Pendek

Pihak Berelasi (Catatan 42)
Pihak Ketiga
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Permata
Subjumlah
Jumlah

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31	
		2023	2022
	1.718.972.781	988.523.138	760.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	96.727.039	400.000.000	--
PT Bank HSBC Indonesia	96.727.039	--	1.000.000.000
PT Bank Permata	30.000.000	--	--
Subjumlah	223.454.078	400.000.000	1.000.000.000
Jumlah	1.942.426.859	1.388.523.138	1.760.000.000

Related Parties (Note 42)
Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank Permata
Subtotal
Total

25. Short-term Bank Loans

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

25. Pinjaman Bank Jangka Pendek (Lanjutan)

25. Short-term Bank Loans (Continued)

Informasi lain mengenai Pinjaman Bank Jangka Pendek pada 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Other Information about Short-term Bank Loans as of May 31, 2024 as follow:

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Type	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest Rate per Annum	Agunan/ Collateral	Pemenuhan Batasan yang Dijanjikan/ Financial Covenant
Perusahaan/ The Company					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	14 Juni 2025/ June 14, 2025	6,55%	-	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	24 Februari 2025/ February 24, 2025	6,70%	-	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
Perjanjian Transaksi Khusus Light Rail Transit (LRT)/ Light Rail Transit (LRT) Special Transaction Loans					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	31 Agustus 2024/ August 31, 2024	5,29%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	31 Agustus 2024/ August 31, 2024	5,29%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Berulang/ Revolving	31 Agustus 2024/ August 31, 2024	5,29%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Central Asia Tbk	Berulang/ Revolving	31 Agustus 2024/ August 31, 2024	5,29%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
Entitas Anak/Subsidiaries - PT Reska Multi Usaha					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	8 September 2024/ September 8, 2024	7,75%	-	Debt to Equity Ratio Max 200% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	29 Agustus 2024/ August 29, 2024	7,00%	-	Debt to Equity Ratio Max 300%
PT Bank Permata Tbk	Berulang/ Revolving	20 April 2025/ April 20, 2025	8,90%	-	Debt to Equity Ratio Max 250% Current Ratio min 110% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berulang/ Revolving	6 Februari 2025/ February 6, 2025	7,00%	-	Debt to Equity Ratio Max 200% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen					
PT Bank Permata Tbk	Berulang/ Revolving	20 April 2023/ April 20, 2023	8,25%	-	Debt to Equity Ratio Max 300%

Berdasarkan perhitungan interim, Grup memenuhi kepatuhan *financial covenant*.

Based on the interim calculation, the Group met the *financial covenant compliance*.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

25. Pinjaman Bank Jangka Pendek (Lanjutan)

25. Short-term Bank Loans (Continued)

Mutasi atas saldo fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Movement of the balance of these facilities are as follow:

31 Mei 2024/May 31, 2024					
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Saldo Akhir/ Ending Balance	Pembayaran Bunga/ Interest Payment
Perusahaan/ The Company					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	950.000.000	1.343.507.932	(1.150.000.000)	1.143.507.932	9.267.035
PT Bank Central Asia Tbk	400.000.000	696.727.039	(1.000.000.000)	96.727.039	11.429.181
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	296.727.039	--	296.727.039	63.625
PT Bank CIMB Niaga Tbk	--	96.727.039	--	96.727.039	63.625
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	86.737.810	--	86.737.810	57.054
Subjumlah/ Subtotal	1.350.000.000	2.520.426.859	(2.150.000.000)	1.720.426.859	20.880.520
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Reska Multi Usaha					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	38.523.138	133.251.573	(171.774.711)	--	709.189
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	85.000.000	(30.000.000)	55.000.000	650.139
PT Bank Permata Tbk	--	80.000.000	(50.000.000)	30.000.000	117.914
Subjumlah/ Subtotal	38.523.138	298.251.573	(251.774.711)	85.000.000	1.477.242
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia					
PT Bank Mandiri (Persero)	--	283.000.000	(146.000.000)	137.000.000	--
Subjumlah/ Subtotal	--	283.000.000	(146.000.000)	137.000.000	--
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen					
PT Bank Permata Tbk	--	25.000.000	(25.000.000)	--	82.639
Subjumlah/ Subtotal	--	25.000.000	(25.000.000)	--	82.639
Jumlah/ Total	1.388.523.138	3.126.678.432	(2.572.774.711)	1.942.426.859	22.440.401

31 Desember 2023/December 31, 2023					
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Saldo Akhir/ Ending Balance	Pembayaran Bunga/ Interest Payment
Perusahaan/ The Company					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	500.000.000	850.000.000	(1.350.000.000)	--	13.706.458
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	2.400.000.000	(1.450.000.000)	950.000.000	34.531.736
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	200.000.000	575.000.000	(775.000.000)	--	6.032.222
PT Bank HSBC Indonesia	1.000.000.000	575.000.000	(1.575.000.000)	--	24.995.694
PT Bank Central Asia Tbk	--	400.000.000	--	400.000.000	--
Subjumlah/ Subtotal	1.700.000.000	4.800.000.000	(5.150.000.000)	1.350.000.000	79.266.110
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Reska Multi Usaha					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60.000.000	355.000.000	(415.000.000)	--	1.053.332
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	251.300.935	(212.777.797)	38.523.138	336.246
PT Bank Permata Tbk	--	230.000.000	(230.000.000)	--	435.563
Subjumlah/ Subtotal	60.000.000	836.300.935	(857.777.797)	38.523.138	1.825.141
Jumlah/ Total	1.760.000.000	5.636.300.935	(6.007.777.797)	1.388.523.138	81.091.251

31 Desember 2022/December 31, 2022					
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Saldo Akhir/ Ending Balance	Pembayaran Bunga/ Interest Payment
Perusahaan/ The Company					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	600.000.000	8.600.000.000	(8.700.000.000)	500.000.000	29.622.542
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	500.000.000	(500.000.000)	--	4.880.556
PT Bank HSBC Indonesia	1.000.000.000	3.350.000.000	(3.350.000.000)	1.000.000.000	38.612.667
PT Bank Central Asia Tbk	950.000.000	550.000.000	(1.500.000.000)	--	23.092.944
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	200.000.000	--	200.000.000	2.392.793
Subjumlah/ Subtotal	2.550.000.000	13.200.000.000	(14.050.000.000)	1.700.000.000	98.601.502
Entitas Anak/ Subsidiaries -PT Reska Multi Usaha					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	80.000.000	250.000.000	(270.000.000)	60.000.000	4.196.319
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	29.962.173	29.660.506	(59.622.679)	--	1.173.238
PT Bank Permata Tbk	--	204.900.000	(204.900.000)	--	2.162.953
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Logistik					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	1.949.849	(1.949.849)	--	--
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen					
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	--	15.000.000	(15.000.000)	--	46.667
PT Bank Permata Tbk	--	5.000.000	(5.000.000)	--	4.931
Subjumlah/ Subtotal	109.962.173	506.510.355	(556.472.528)	60.000.000	7.584.108
Jumlah/ Total	2.659.962.173	13.706.510.355	(14.606.472.528)	1.760.000.000	106.185.610

26. Liabilitas Jangka Pendek Lainnya

26. Other Current Liabilities

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Titipan Pegawai	59.628.023	60.909.704	56.416.887	Employee Deposits
Uang Jaminan	5.488.000	5.960.655	5.538.030	Security Deposits
Lain-lain	31.963.675	24.931.641	36.583.373	Others
Jumlah	97.079.698	91.802.000	98.538.290	Total

Titipan pegawai merupakan potongan gaji karyawan yang belum disetorkan sesuai dengan tujuannya.

Uang jaminan terdiri dari penerimaan uang jaminan yang berasal dari pelanggan atas jaminan pemasangan iklan di kereta dan jaminan tiket harian dari penumpang *commuter line*.

Utang lain-lain diantaranya merupakan utang atas penerimaan uang jaminan optimalisasi aset dari pelanggan sebagai jaminan atas aset yang disewa.

Employee deposits represent deductions of employee salaries that have not been deposited according to their intended purpose.

Security deposits consist of deposit received from customers for advertising in the train and daily ticket deposit from the commuter line passengers.

Others consist of deposit received from customers regarding optimization assets as warranty for rental assets.

27. Liabilitas Imbalan Kerja

27. Employee Benefits Liabilities

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program.

Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif lebih banyak pada instrumen properti dibandingkan dengan instrumen lainnya.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai aset program dapat terpulihkan.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program tersebut.

The defined benefit pension plan exposes the Group to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk and salary risk.

Investment Risk

The present value of the defined benefit plan obligation is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit.

Currently the plan relatively has a more investment in property instrument compared to other instrument.

Management has believe the recoverable amount of plan assets.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

Salary Risk

The present value of the defined benefit obligation is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam menghitung beban dan liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Mei 2024, Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

The assumptions used to calculate employee benefits expenses and liabilities on May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Tingkat Diskonto	5,89% - 7,01%	6,25% - 7,10%	5,52% - 7,44%	Discount Rate
Tingkat Kenaikan Gaji per Tahun	6,00% - 9,00%	6,00% - 9,00%	7,00% - 9,00%	Salary Increase Rate per Year
Usia Pensiun Normal	56 tahun/ years	56 tahun/ years	56 tahun/ years	Normal Retirement Age
Tingkat Mortalitas	TMI IV/2019	TMI IV/2019	TMI IV/2019	Mortality Rate
Tingkat Cacat per Tahun	1% - 10% dari Tingkat Kematian/ of Mortality Rate			Disability Rate per Year
Tingkat Pengunduran Diri:				Resignations Rate:
Umur Dibawah 20 - 29 Tahun	5,00% - 6,00%	5,00% - 6,00%	5,00% - 6,00%	Age Under 20 - 29 Years Old
Umur Diatas 30 Tahun	Menurun secara linear hingga mencapai 0% saat usia pensiun normal/ Decreases linearly until reaches 0% when the normal retirement			Age Above 30 Years Old

a) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek

a) Short-term Employee Benefits Liabilities

Liabilitas imbalan kerja karyawan yang jatuh tempo dalam satu tahun sebagai berikut:

Employee benefits liabilities which are due within one year as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Program Pensiun Eks PNS	156.195.973	156.195.973	154.922.880	Pension Plan Ex-PNS
Tantiem dan Bonus	1.553.984.439	1.139.345.997	807.820.177	Bonus and Tantiem
Jumlah	1.710.180.412	1.295.541.970	962.743.057	Total

b) Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang

b) Long-term Employee Benefits Liabilities

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo satu tahun sebagai berikut:

Long-term employee benefit liabilities after deducting the portion due in one year are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Program Pensiun Eks PNS	1.298.956.937	1.138.251.753	1.098.808.740	Pension Plan Ex-PNS
Program Pensiun Eks Perum & Persero	4.386.036.353	4.401.673.427	4.037.598.131	Pension Plan Ex-Perum & Persero
Imbalan Kerja Lain	83.805.478	78.591.696	60.745.103	Other Employment Benefits
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	5.768.798.768	5.618.516.876	5.197.151.974	Total Employee Benefit Liabilities

Total liabilitas imbalan kerja yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian yang timbul dari program pensiun imbalan pasti, jaminan kesehatan pensiun, pesangon dan imbalan kerja jangka panjang lainnya sebagai berikut:

The amounts of employee benefits liabilities recorded in the consolidated statement of financial position arising from defined benefit pension plan, retirement healthcare, severance pay, and other Long-term employee benefits are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Program Pensiun Eks PNS	1.455.152.910	1.294.447.726	1.253.731.620	Pension Plan Ex-PNS
Program Pensiun Eks Perum & Persero	4.386.036.353	4.401.673.427	4.037.598.131	Pension Plan Ex-Perum & Persero
Tantiem dan Bonus	1.553.984.439	1.139.345.997	807.820.177	Bonuses and Tantiem
Imbalan Kerja Lain	83.805.478	78.591.696	60.745.103	Other Employment Benefits
Jumlah	7.478.979.180	6.914.058.846	6.159.895.031	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Program Pensiun Imbalan Pasti

Defined Benefits Pension Plans

Karyawan Eks Pegawai Negeri Sipil (Eks-PNS)

The Ex-Civil Service Employee (Ex-PNS)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Penyesuaian Pensiun Eks-PNS Departemen Perhubungan pada Perusahaan No. 64 tanggal 29 November 2007, Eks-PNS tersebut berhak memperoleh pensiun pokok yang besarnya disesuaikan sama dengan pensiun pokok yang diterima oleh penerima pensiun PNS.

In accordance with Government Regulation regarding the Adjustment of retirement of Ex-PNS of Department of Transportation at the Company No. 64 dated November 29, 2007, The Ex-Civil Service Employee (PNS) of Department of Transportation who work is entitled to receive the principle amount of pension of the PNS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.02.2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Penyediaan Dana Program Penyesuaian Pensiun Eks-PNS Departemen Perhubungan Perusahaan pada Pasal 3, sumber pendanaan pembayaran pensiun pegawai berasal dari: iuran pegawai, Perusahaan untuk kontribusi pendanaan bersama, *past service liability* yang dibayarkan oleh Perusahaan, hasil investasi dari akumulasi dana pensiun pegawai Perusahaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Based on the Regulation of Minister of Finance No. 105/PMK.02.2010 dated May 19, 2010 regarding Provision of Retirement Program Fund Adjustment for ex PNS Department of Transportation of the Company, in Article 3 stated that sources of financing for employee pension fund payment consists of employee contribution, the Company contribution, past service liability paid by the Company, results of investment and accumulation of employee pension funds of the Company, and Indonesian Government Budget (APBN).

Perusahaan diharuskan membayar *past service liability* sebesar Rp79.500.000 setiap tahun sampai dengan tahun 2024 kepada PT Taspen (Persero) yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan pembayaran pensiun pegawai sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyelenggaraan pembayaran pension karyawan Eks-PNS.

The Company is required to pay past service liability amounted to Rp79,500,000 for every year until 2024 to PT Taspen (Persero) whom is responsible for the payment of employee pension funds in accordance with the mechanism and law regulation for the implementation of ex PNS pension funds payment.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan No. S-927/MK.02/2012 tanggal 26 Desember 2012 perihal Penetapan Pendanaan Bersama Pembayaran Manfaat Pensiun antara APBN dan Perusahaan menetapkan bahwa kontribusi pendanaan Perusahaan dan Pemerintah dalam Pendanaan Bersama masing-masing sebesar 22% dan 78%. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan tidak terdapat perubahan persentase Penetapan Pendanaan Bersama Pembayaran Manfaat Pensiun.

Based on Letter of the Minister of Finance No. S-927/MK.02/2012 dated December 26, 2012 concerning the Establishment of the Joint Funding Retirement Benefit Payments between the APBN and the Company states that the contribution is provided by joint funding the Company and Government of 22% and 78% respectively. The percentage has not change until the issuance of financial statement report.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Detail beban pensiun Eks-PNS yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebagai berikut:

The details of benefit pension plan ex-PNS expense in the consolidated profit or loss are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Biaya Jasa Kini	557.493	1.719.627	4.282.372	Current Service Cost
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti	155.186.631	390.366.436	450.315.024	Net Interest on the Defined Benefit Obligation
Jumlah	155.744.124	392.086.063	454.597.396	Total
Bagian Pemerintah	(121.480.417)	(305.827.129)	(354.585.969)	Government Portion
Bagian Perusahaan	34.263.707	86.258.934	100.011.427	The Company Portion

Liabilitas sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti sebagai berikut:

Liability in respect of the defined benefits pension plan are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Nilai Kini Kewajiban	7.739.035.032	6.991.946.498	6.808.303.387	Present Value of Obligation
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun	(1.124.703.623)	(1.108.093.198)	(1.109.523.297)	Fair Value of Pension Fund Plan Assets
Jumlah Liabilitas Bersih	6.614.331.409	5.883.853.300	5.698.780.090	Net Liability
Bagian Pemerintah	(5.159.178.499)	(4.589.405.574)	(4.445.048.470)	Government Portion
Bagian Perusahaan	1.455.152.910	1.294.447.726	1.253.731.620	The Company Portion
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	156.195.973	156.195.973	154.922.880	Less of Short-term Portion
Bagian Jangka Panjang	1.298.956.937	1.138.251.753	1.098.808.740	Long-term Portion

Mutasi liabilitas sebagai berikut:

Movements in liabilities are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Awal Periode/Tahun	5.883.853.300	5.698.780.090	6.052.961.791	Beginning of the Period/Year
Beban Laba Rugi	155.744.124	392.086.063	454.597.396	Profit Loss Expenses
Pembayaran Manfaat	(378.323.136)	(811.896.940)	(839.796.321)	Benefits Payments
Penghasilan Komprehensif Lain	953.057.121	604.884.087	31.017.224	Other Comprehensive Income
Akhir Periode/Tahun	6.614.331.409	5.883.853.300	5.698.780.090	End of Period/Year
Bagian Pemerintah	(5.159.178.499)	(4.589.405.574)	(4.445.048.470)	The Government Portion
Bagian Perusahaan	1.455.152.910	1.294.447.726	1.253.731.620	The Company Portion
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	156.195.973	156.195.973	154.922.880	Less of Short-term Portion
Bagian Jangka Panjang	1.298.956.937	1.138.251.753	1.098.808.740	Long-term Portion

Mutasi nilai wajar aset program dana pensiun sebagai berikut:

The movements in the fair value of pension plan assets are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun Awal Periode/Tahun	1.108.093.198	1.109.523.297	1.206.242.595	Fair Value of Pension Plan Assets at Beginning of the Period/Year
Pengembalian Aset Dana yang Diharapkan	29.225.958	76.002.346	91.071.316	Expected Return on Plan Assets
Imbal Hasil Aset Program Non Bunga-Neto	(12.615.533)	(77.432.445)	(187.790.614)	Return on Plan Assets Non Interest-Net
Akhir Periode/Tahun	1.124.703.623	1.108.093.198	1.109.523.297	End of Period/Year
Bagian Pemerintah	(877.268.826)	(864.312.694)	(865.428.172)	The Government Portion
Bagian Perusahaan	247.434.797	243.780.504	244.095.125	The Company Portion

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The movements of other comprehensive income are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Saldo Awal	1.208.354.060	603.469.973	572.452.750	Beginning Balance
Periode/Tahun Berjalan	953.057.121	604.884.087	31.017.224	Current Period/Year
Saldo Akhir	2.161.411.181	1.208.354.060	603.469.974	Ending Balance
Bagian Pemerintah	(1.685.900.721)	(942.516.167)	(470.706.580)	The Government Portion
Bagian Perusahaan	475.510.460	265.837.893	132.763.394	The Company Portion

Komposisi penempatan investasi yang dilakukan atas aset program adalah sebagai berikut:

The composition of investment placement on plan asset are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
	%	2023	2022	
Deposito	38,33	38,35	39,91	Time Deposits
Surat Utang Negara	39,37	39,66	38,21	Government Securities
Sukuk	22,30	21,99	21,88	Sukuk
Jumlah	100,00	100,00	100,00	Total

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of May 31, December 31, 2023, and 2022 as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Analisa Sensitivitas				Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban				Present Value of Defined
Imbalan Pasti				Benefit Obligation
Akhir Tahun				End of Year
Tingkat Diskonto + 1%	1.702.538.287	1.538.141.904	1.804.026.574	Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	1.702.638.437	1.538.316.807	1.836.093.002	Rate - 1%
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	1.702.623.778	1.538.295.732	1.829.053.197	Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	1.702.551.774	1.538.161.005	1.810.697.372	Salary Increase - 1%

Program Pensiun Eks Perum dan Persero

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan Eks-Perum yang direkrut sebelum Agustus 2009. Manfaat pensiun dihitung berdasarkan TDPIP tahun 2012 dengan ketentuan perhitungan tanpa kenaikan Gaji Dasar Program yang dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) berdasarkan Perjanjian No. 161/HK/UM/2003 dan 099.SJ.U.0903 serta perjanjian No. 162/HK/UM/2003 dan No. 100.SJ.U.0903 tanggal 28 September 2003 tentang Pengelolaan program Anuitas Pensiun Bagi Pensiunan dan Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua Bagi Pegawai Perusahaan. Sedangkan untuk karyawan Persero yang direkrut setelah Agustus 2009 diberikan pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang. Pada 2 Juni 2021 terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2026 Perusahaan mengalihkan polis asuransi kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Pension Plan of Ex-Perum and Persero

The Company organize defined benefit pension plan for employees of ex-Perum which hired before August 2009. The pension benefits are calculated based TDPIP in 2012 with the provisions of zero increment of Basic Salary Program managed by PT Asuransi Jiwasraya (Persero) based on Agreement Nos. 161/HK/UM/2003, and 099.SJ.U.0903 and 162/HK/UM/2003, and 100.SJ.U.0903 dated September 28, 2003 on the program management of the Annuity Pension Plan for Retirement and old Age Protection Program for Employees of Company. Persero's employees hired after August 2009 is granted severance pay in accordance with Indonesian's Rules. On June 2, 2021 starting from May 1, 2021 to April 30, 2026 the Company transferred its insurance policy to PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Rincian beban pensiun karyawan Eks-Perum dan Persero yang diakui pada laba rugi konsolidasian sebagai berikut:

The details of the benefit pension ex-Perum and Persero employees expenses in the consolidated profit or loss are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Biaya Jasa Kini	169.331.087	407.654.900	279.369.254	Current Service Cost
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti	133.505.059	276.575.472	299.946.436	Net Interest on the Net Defined Benefit Liability
Biaya Jasa Lalu	--	376.818.322	581.699.330	Past Service Cost
Jumlah	302.836.146	1.061.048.694	1.161.015.020	Total

Liabilitas sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti sebagai berikut:

Liability in respect of the defined benefits pension plan are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Nilai Kini Kewajiban	6.841.942.133	6.972.524.360	6.332.375.492	Present Value of Obligation
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun	(2.455.905.780)	(2.570.850.933)	(2.294.777.361)	Fair Value of Pension Fund Plan Assets
Jumlah Liabilitas Bersih	4.386.036.353	4.401.673.427	4.037.598.131	Net Liabilities

Mutasi liabilitas sebagai berikut:

Movements in liabilities are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Awal Periode/Tahun	4.401.673.427	4.037.598.131	4.337.122.922	Beginning of the Period/Year
Beban Laba Rugi	302.836.146	1.061.048.694	1.161.015.020	Profit Loss Expenses
Penghasilan Komprehensif Lain	(295.329.812)	(87.896.683)	(774.472.696)	Other Comprehensive Income
Iuran Dibayar Perusahaan	(23.143.408)	(609.076.715)	(686.067.115)	Contribution Paid by the Company
Akhir Periode/Tahun	4.386.036.353	4.401.673.427	4.037.598.131	End of Period/Year
Dikurangi Bagian Jangka Pendek	--	--	--	Less of Short-term Portion
Bagian Jangka Panjang	4.386.036.353	4.401.673.427	4.037.598.131	The Long-term Portion

Mutasi nilai wajar aset program dana pensiun sebagai berikut:

The movements in the fair value of pension plan assets are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun				Fair Value of Pension Plan Assets at
Awal Periode/Tahun	2.570.850.933	2.294.777.361	1.369.231.011	Beginning of the Period/Year
Iuran Dibayar Perusahaan	23.143.408	609.076.715	686.067.114	Contribution Paid by the Company
Manfaat Dibayar Pihak Ketiga	(228.814.083)	(628.405.828)	(378.799.695)	Benefit Paid by Third Party
Pendapatan Bunga	70.441.278	157.192.249	51.777.401	Interest Income
Imbal Hasil Aset Program Non Bunga-Neto	20.284.244	138.210.436	566.501.530	Return on Plan Assets Non Interest-Net
Akhir Periode/Tahun	2.455.905.780	2.570.850.933	2.294.777.361	End of Period/Year

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The movements of other comprehensive income are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Saldo Awal Periode/Tahun Berjalan	1.067.380.849	1.155.277.532	1.929.750.228	Beginning Balance Current Period/Year
Saldo Akhir	772.051.037	1.067.380.849	1.155.277.532	Ending Balance

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Komposisi penempatan investasi yang dilakukan atas aset program adalah sebagai berikut:

The composition of investment placement on plan asset program are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
	%	2023	2022	
Saham	73,37	73,37	83,07	Shares
Properti	11,26	11,26	7,30	Property
Obligasi	0,87	0,87	5,22	Bonds
Deposito	12,40	12,40	4,39	Time Deposits
Lain-lain	2,10	2,10	0,02	Others
Jumlah	100,00	100,00	100,00	Total

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of May 31 2024, December 31, 2023, and 2022 as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Analisa Sensitivitas				Sensitivity Analysis
Nilai Kini Kewajiban				Present Value of Defined
Imbalan Pasti				Benefit Obligation
Akhir Tahun				End of Year
Tingkat Diskonto + 1%	6.419.539.643	6.450.671.207	5.426.003.218	Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	7.318.615.403	7.370.945.107	7.468.412.583	Rate - 1%
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	7.318.272.806	7.369.357.057	6.801.813.768	Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	6.412.303.422	6.444.295.205	5.910.921.140	Salary Increase - 1%

Imbalan Kerja Lainnya

Grup juga memberikan imbalan kerja lainnya berupa uang pesangon, penghargaan masa bakti, tunjangan masa persiapan pensiun dan tunjangan cuti besar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Grup. Imbalan program ini tidak didanai dan ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan.

Other Employment Benefits

The Group also provides other defined employment benefit plans such as severance pay, long-service award, pension preparation year and long leave allowance for their eligible employees based on the Group's policies. These other post employment benefits are unfunded and computed based on the salaries and service years of the employees.

Detail beban imbalan kerja lainnya yang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebagai berikut:

The details of the other employment benefits expenses recognized to the consolidated statement of profit or loss are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Biaya Jasa Kini	7.242.337	15.445.707	(15.800.366)	Current Service Cost
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti	1.790.132	3.062.352	3.072.270	Net Interest on the Defined Benefit Liabilities
Biaya Jasa Lalu	--	8.460.348	(4.094.228)	Past Service Cost
Jumlah	9.032.469	26.968.407	(16.822.324)	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. Liabilitas Imbalan Kerja (Lanjutan)

27. Employee Benefits Liabilities (Continued)

Liabilitas sehubungan dengan imbalan kerja lain sebagai berikut:

Liabilities in respect of other employment benefits are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Nilai Kini Kewajiban	142.133.750	131.902.649	101.117.886	Present Value of Obligation
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun	(91.886.453)	(82.396.323)	(62.234.485)	Fair Value of Pension Fund Plan Assets
Surplus	50.247.297	49.506.326	38.883.401	Surplus
Pembatasan Aset	33.558.181	29.085.370	21.861.702	Restricted Assets
Jumlah Liabilitas Bersih	83.805.478	78.591.696	60.745.103	Net Liabilities

Mutasi liabilitas sebagai berikut:

Movements in liabilities are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Awal Periode/Tahun	78.591.696	60.745.103	76.900.516	Beginning of the Period/Year
Beban Laba Rugi	9.032.469	26.968.407	(16.822.324)	Profit Loss Expenses
Pembayaran Manfaat	(199.759)	(3.576.542)	(3.883.812)	Benefits Payments
Penghasilan Komprehensif Lain	3.555.093	11.672.377	20.435.429	Other Comprehensive Income
Iuran Dibayar Perusahaan	(7.174.021)	(17.217.649)	(15.884.706)	Contribution Paid by the Company
Akhir Periode/Tahun	83.805.478	78.591.696	60.745.103	End of Period/Year

Mutasi nilai wajar aset program liabilitas imbalan kerja lainnya sebagai berikut:

The movements in the fair value of other employment benefits plan assets are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Nilai Wajar Aset Program Dana Pensiun				Fair Value of Pension Plan Assets at
Awal Periode/Tahun	82.396.323	62.234.485	45.609.101	Beginning of the Period/Year
Pengembalian Aset Dana yang Diharapkan	2.684.820	5.025.727	2.484.660	Expected Return on Plan Assets
Imbalan Hasil atas Aset Program yang tidak Termasuk dalam Bunga Neto	--	(1.271.731)	(1.338.719)	Return on Plan Assets Plan Assets, which are not Included in Net Interest
Iuran Dibayar Perusahaan	7.174.023	17.217.649	15.884.706	Contribution Paid by the Company
Iuran Dibayar Pihak Ketiga	(368.713)	(809.807)	(405.263)	Contribution Paid by Third Party
Akhir Periode/Tahun	91.886.453	82.396.323	62.234.485	End of Period/Year

Mutasi penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The movements of other comprehensive income are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Saldo Awal	35.710.816	24.038.439	3.603.010	Beginning Balance
Periode/Tahun Berjalan	3.555.093	11.672.377	20.435.429	Current Period/Year
Saldo Akhir	39.265.909	35.710.816	24.038.439	Ending Balance

Analisa sensitivitas kuantitatif untuk asumsi yang signifikan pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 sebagai berikut:

A quantitative sensitivity analysis for significant assumptions as of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Analisa Sensitivitas Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Akhir Tahun				Sensitivity Analysis Present Value of Defined Benefit Obligation End of Year
Tingkat Diskonto + 1%	127.977.577	118.765.469	89.675.423	Rate + 1%
Tingkat Diskonto - 1%	157.324.073	145.999.539	111.500.045	Rate - 1%
Tingkat Kenaikan Gaji + 1%	157.047.489	145.742.865	111.059.962	Salary Increase + 1%
Tingkat Kenaikan Gaji - 1%	127.967.201	118.755.840	89.856.188	Salary Increase - 1%

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

28. Pinjaman Program PEN

28. PEN Program Loan

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Pokok Pinjaman (Catatan 42)	2.843.750.000	3.062.500.000	3.500.000.000	Principal of Loan (Note 42)
Penyesuaian Nilai Wajar	(421.067.944)	(463.343.632)	(572.443.093)	Fair Value Adjustment
Nilai Wajar Pinjaman	2.422.682.056	2.599.156.368	2.927.556.907	Fair Value of Loan
Pendapatan Hibah Ditangguhkan	421.067.944	463.343.632	572.443.093	Deferred Grant Income
Jumlah	2.843.750.000	3.062.500.000	3.500.000.000	Total
Jumlah Bagian Pinjaman Program PEN yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	437.500.000	437.500.000	437.500.000	Total Portion of PEN Program Maturing within One Year
Bagian Jangka Panjang	2.406.250.000	2.625.000.000	3.062.500.000	Long-term Loans Portion

Perusahaan menandatangani perjanjian pemberian dana investasi Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam bentuk pinjaman dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional dengan Akta No.17 tanggal 30 November 2020 yang di hadapan Pratiwi Handayani, Notaris di Jakarta. Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 531/KMK.06/2020 tanggal 20 November 2020 tentang Penugasan kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur sebagai Pelaksana Investasi Untuk Melaksanakan Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor.118/PMK.06/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Investasi Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN.

The Company entered into an agreement with PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) by Deed No.17 dated November 30, 2020 by Notary in Jakarta regarding Providing Investment Fund of the Government of Republic Indonesia in the form of loan for the National Economic Recovery Program. Minister of Finance Decree Number.531/KMK.06/2020 dated November 20, 2020 concerning the Assignment to the Limited Liability Company (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur as an Investment executor to Implement Government Investment in the order of the National Economic Recovery Program and Regulation of the Minister of Finance Number.118/PMK.06/2020 dated September 2, 2020, concerning Investment in the order of the National Economic Recovery Program, hereinafter referred to as the PEN Program.

Informasi lain mengenai Program PEN pada 31 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

Other Information about PEN Program as of May 31, 2024 as follow:

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Name	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest Rate per Annum	Agunan/ Collateral	Pemenuhan Batasan yang Diwajibkan/ Financial Covenant
Perusahaan/The Company					
Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)/ Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Program Loan					
Pemerintah Republik Indonesia	Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	Sampai dengan 31 Desember 2027 Repo rate - 100 BPS 1 Januari 2028 sampai dengan lunas SUN tenor 3 tahun - 100 BPS/ Until 31 December 2027 Repo rate - 100 BPS January 1, 2028 until the 3 year SUN tenor is paid off - 100 BPS	-	Indikator pembayaran bunga: Interest Coverage Ratio (ICR) >1,0 kali Indikator Pembayaran pokok: Debt to CFO >0 kali dan <10 kali/ Interest payment indicators: Interest Coverage Ratio (ICR) >1.0 times Principal Payment Indicators: Debt to CFO >0 times and <10 times

Mutasi atas saldo fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

Movement of the balance of these facilities are as follow:

Kreditur/ Creditor	31 Mei/May 31, 2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non-kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Beban Bunga/ Interest Expense
Perusahaan/The Company						
Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)/ Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Program Loan						
Pemerintah Republik Indonesia	3.062.500.000	--	(218.750.000)	--	2.843.750.000	81.283.854

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

28. Pinjaman Program PEN (Lanjutan)

28. PEN Program Loan (Continued)

31 Desember/December 31, 2023						
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non-kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Beban Bunga/ Interest Expense
Perusahaan/The Company						
Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)/ Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Program Loan						
Pemerintah Republik Indonesia	3.500.000.000	--	(437.500.000)	--	3.062.500.000	145.651.042

31 Desember/December 31, 2022						
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non-kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Beban Bunga/ Interest Expense
Perusahaan/The Company						
Pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)/ Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Program Loan						
Pemerintah Republik Indonesia	3.500.000.000	--	--	--	3.500.000.000	88.715.278

29. Pinjaman Jangka Panjang

29. Long-term Loans

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Pihak Berelasi (Catatan 42)	15.471.147.857	12.829.344.797	11.855.551.877	Related Parties (Note 42)
Pihak Ketiga				Third Parties
China Development Bank	7.214.834.232	--	--	China Development Bank
PT Bank Central Asia Tbk	3.395.290.643	3.419.813.820	3.187.005.145	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.500.469.973	2.470.630.404	2.020.370.749	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT BPD Sumatera Utara	583.259.211	279.663.084	225.399.833	PT BPD Sumatera Utara
PT Bank KEB Hana Indonesia	575.555.748	568.687.305	465.046.975	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank DKI	575.555.748	568.687.305	465.046.975	PT Bank DKI
PT Bank Mega Tbk	575.555.748	568.687.305	465.046.975	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Permata Tbk	500.000.000	--	--	PT Bank Permata Tbk
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	349.852.113	345.892.954	286.151.843	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT BPD Papua	300.000.000	--	--	PT BPD Papua
PT Bank Shinhan Indonesia	287.777.875	284.343.654	232.523.488	PT Bank Shinhan Indonesia
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	200.000.000	--	--	PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk
Export-Import Bank of United States	61.296.873	100.890.342	277.446.558	Export-Import Bank of United States
Subjumlah	17.119.448.164	8.607.296.173	7.624.038.541	Subtotal
Jumlah	32.590.596.021	21.436.640.970	19.479.590.418	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-term Loans (Continued)

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				Portion of Long-term Due within One Year
Pihak Berelasi (Catatan 42)	1.007.145.098	929.940.459	805.012.927	Related Parties (Note 42)
Pihak Ketiga				Third Parties
PT Bank Central Asia Tbk Export-Import Bank of United States	255.101.087	235.672.613	217.450.982	PT Bank Central Asia Tbk Export-Import Bank of United States
PT Bank CIMB Niaga Tbk	61.296.873	91.485.309	174.494.692	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia	37.650.106	18.221.633	--	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank DKI	8.666.265	4.194.238	--	PT Bank DKI
PT Bank Mega Tbk	8.666.265	4.194.238	--	PT Bank Mega Tbk
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	5.283.183	2.556.918	--	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT Bank Shinhan Indonesia	4.333.132	2.097.119	--	PT Bank Shinhan Indonesia
PT BPD Sumatera Utara	4.249.709	2.056.743	--	PT BPD Sumatera Utara
Subjumlah	393.912.885	364.673.049	391.945.674	Subtotal
Jumlah Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.401.057.983	1.294.613.508	1.196.958.601	Total Portion of Long-term Due within One Year
Bagian Jangka Panjang	31.189.538.038	20.142.027.462	18.282.631.817	Long-term Loans Portion

Berdasarkan mata uang:

Based on currencies:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Berdasarkan Mata Uang:				By Currencies:
Rupiah	25.314.464.916	21.335.750.628	19.202.143.860	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	3.815.658.608	100.890.342	277.446.558	United States Dollar
Yuan Tiongkok	3.460.472.497	--	--	Chinese Yuan
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang	32.590.596.021	21.436.640.970	19.479.590.418	Total Long-term Loans Portion
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				Total Portion of Long-term Due within One Year
Rupiah	1.339.761.110	1.203.128.199	1.022.463.909	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	61.296.873	91.485.309	174.494.692	United States Dollar
Jumlah Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.401.057.983	1.294.613.508	1.196.958.601	Total Portion of Long-term Due within One Year
Rupiah	23.974.703.806	20.132.622.429	18.179.679.951	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	3.754.361.735	9.405.033	102.951.866	United States Dollar
Yuan Tiongkok	3.460.472.497	--	--	Chinese Yuan
Bagian Jangka Panjang	31.189.538.038	20.142.027.462	18.282.631.817	Long-term Loans Portion

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-term Loans (Continued)

Informasi lain mengenai Pinjaman Bank
Jangka Panjang pada 31 Mei 2024 adalah
sebagai berikut:

Other Information about Long-term Bank Loans
as of May 31, 2024 as follow:

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Name	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest Rate per Annum	Agunan/ Collateral	Pemenuhan Batasan yang Dijanjikan/ Financial Covenant
Perusahaan/The Company					
Pinjaman Sindikasi Proyek Pengadaan 144 unit lokomotif, 1.200 unit gerbong (KKBW) dan 1.200 unit gerbong (PPCW)/ Syndicated Loan Project Procurement of 144 units of locomotives, 1,200 units of carriages (KKBW) and 1,200 units of carriages (PPCW)					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 25 Juli 2025/ July 25, 2025 Tahap II : 8 Agustus 2026/ August 8, 2026	6,05% - 11,12%	Asset sarana yang dibiayai/ Funded facility assets	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 25 Juli 2025/ July 25, 2025 Tahap II : 8 Agustus 2026/ August 8, 2026	6,05% - 11,12%	Asset sarana yang dibiayai/ Funded facility assets	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
Proyek Pengadaan 10 Set KRL Komuter Jabodetabek/ Procurement Project for 10 Sets of Jabodetabek Commuter KRL					
Kementerian Keuangan	Term Loan II Berulang/ Revolving	01 Desember 2047/ December 01, 2047	7,50% - 8,38%	--	--
Proyek Pengadaan 600 KKBW, 600 PPCW dan 1.213 KKBW/ Procurement Project of 600 KKBW, 600 PPCW and 1,213 KKBW					
PT Bank Central Asia Tbk	Term Loan II Berulang/ Revolving	Tahap I & II : 25 November 2026/ November 25, 2026 Tahap III : 4 Maret 2028/ March 4, 2028	6,00% - 10,26%	Asset sarana yang dibiayai/ Funded facility assets	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x
Pinjaman Sindikasi Commuterline (Jabodetabek)/ Commuterline Syndicated Loan (Jabodetabek)					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 10 Mei 2028/ May 10, 2028 Tahap II : 25 Juni 2029/ June 25, 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan/ Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 10 Mei 2028/ May 10, 2028 Tahap II : 25 Juni 2029/ June 25, 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan/ Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 10 Mei 2028/ May 10, 2028 Tahap II : 25 Juni 2029/ June 25, 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan/ Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	Tahap I : 10 Mei 2028/ May 10, 2028 Tahap II : 25 Juni 2029/ June 25, 2029	3,00% - 11,66%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan/ Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-term Loans (Continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Name	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest Rate per Annum	Agunan/ Collateral	Pemenuhan Batasan yang Diwajibkan/ Financial Covenant
Proyek Pengadaan 50 Lokomotif General Electric / Procurement Project for 50 General Electric Locomotives					
Export-Import Bank of United States	Term Loan II Berulang/ Revolving	Tarikan I : 15 Maret 2024/ May 15, 2024 Tarikan II : 15 Juni 2024/ Juny 15, 2024 Tarikan II : 15 Maret 2025/ May 15, 2025	2,54%	Asset sarana yang dibiayai/ Funded facility assets	--
Perjanjian Sindikasi Bandara Soekarno Hatta (Basoetta)/ Soekarno Hatta Airport (Basoetta) Syndication Agreement					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan/ Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan/ Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan/ Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	31 Oktober 2030/ October 31, 2030	6,75% - 11,69%	Gadai Rekening dan Fidusia atas Tagihan/ Pawn account and fiduciary on bills	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Cash Flow Operation positif
Pinjaman Transaksi Khusus/ Special Transaction Loans					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	26 Desember 2026/ December 26, 2026	7,25% - 10,15%	Negative Pledge	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Current Ratio min 100%
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	Sindikasi/ Syndicated	26 Desember 2026/ December 26, 2026	7,25% - 10,15%	Negative Pledge	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Current Ratio min 100%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Sindikasi/ Syndicated	26 Desember 2026/ December 26, 2026	7,25% - 10,15%	Negative Pledge	Debt to Equity Ratio Max 300% Debt Service Coverage Ratio min 1.25 x Current Ratio min 100%
Perjanjian Pinjaman Sindikasi Proyek Light Rail Transit (LRT) Light Rail Transit (LRT) Project Syndicated Loan Agreement					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-term Loans (Continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Name	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest Rate per Annum	Agunan/ Collateral	Pemenuhan Batasan yang Diwajibkan/ Financial Covenant
Perjanjian Pinjaman Sindikasi Proyek Light Rail Transit (LRT) / Light Rail Transit (LRT) Project Syndicated Loan Agreement					
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Shinhan Indonesia	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank KEB Hana Indonesia	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank DKI	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Mega Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT BPD Sumatera Utara	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Pembangunan Daerah Papua	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
PT Bank Permata Tbk	Sindikasi/ Syndicated	15 tahun sejak terpenuhinya seluruh syarat efektif pemberian kredit / 15 years as from the fulfillment of all effective conditions for granting credit	7,49% - 9,25%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 500%
Perjanjian Pinjaman CDB/ CDB Syndicated Loan Agreement					
China Development Bank	Fasilitas A/ Facility A	25 April 2069/ April 25, 2069	3,20%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Total Liabilities to Asset Ratio Max 85%
China Development Bank	Fasilitas B/ Facility B	25 April 2069/ April 25, 2069	3,10%	Jaminan Pemerintah/ Government Guarantee	Total Liabilities to Asset Ratio Max 85%
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia					
Proyek Pengembangan Commuterline Jabodetabek/ Jabodetabek Commuterline Development Project					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	25 Desember 2027/ December 25, 2027	9,38-9,77%	-Fiduciary of movable assets - Fiduciary on bills - Fiduciary over bank accounts - Company Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	25 Desember 2027/ December 25, 2027	9,38-9,77%	-Fiduciary of movable assets - Fiduciary on bills - Fiduciary over bank accounts - Company Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-term Loans (Continued)

Kreditur/ Creditor	Nama Fasilitas/ Facility Name	Tanggal Jatuh Tempo Perjanjian Kredit/ Maturity Date Of Credit Agreement	Suku Bunga Per Tahun/ Interest Rate per Annum	Agunan/ Collateral	Pemenuhan Batasan yang Diwajibkan/ Financial Covenant
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia					
Proyek Pengembangan Commuterline Jabodetabek/ Jabodetabek Commuterline Development Project					
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	25 Desember 2027/ December 25, 2027	9,38-9,77%	-Fiduciary of movable assets - Fiduciary on bills - Fiduciary over bank accounts - Company Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	25 Desember 2027/ December 25, 2027	9,38-9,77%	-Fiduciary of movable assets - Fiduciary on bills - Fiduciary over bank accounts - Company Guarantee	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia					
Proyek Pengadaan 10 Unit Rangkaian Kereta/ Procurement Project for 10 Train Series Units					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	19 Januari 2031/ January 19, 2031	9,38-9,77%	Sarana KRL/ rolling stock KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	19 Januari 2031/ January 19, 2031	9,38-9,77%	Sarana KRL/ rolling stock KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Sindikasi/ Syndicated	19 Januari 2031/ January 19, 2031	9,38-9,77%	Sarana KRL/ rolling stock KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x
PT Bank Central Asia Tbk	Sindikasi/ Syndicated	19 Januari 2031/ January 19, 2031	9,38-9,77%	Sarana KRL/ rolling stock KRL	Debt to Equity Ratio Max 300% Current Ratio min 100% Debt Service Coverage Ratio min 1.50 x

Berdasarkan perhitungan interim, Grup memenuhi kepatuhan *financial covenant*.

Based on the interim calculation, the Group met the *financial covenant compliance*.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-term Loans (Continued)

Mutasi atas saldo fasilitas tersebut adalah
sebagai berikut:

*Movement of the balance of these facilities are
as follow:*

31 Mei 2024/ May 31, 2024						
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non Kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Pembayaran Bunga/ Interest Payment
Perusahaan/The Company						
Pinjaman Sindikasi Proyek Pengadaan 144 unit lokomotif, 1.200 unit gerbong (KKBW) dan 1.200 unit gerbong (PPCW)/ Procurement of 144 units of locomotive, 1,200 units of the wagon (KKBW) and 1,200 units of wagon (PPCW)						
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	396.127.481	--	(94.700.000)	--	301.427.481	8.653.304
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	396.127.481	--	(94.700.000)	--	301.427.481	8.653.304
Proyek Pengadaan 10 Set KRL Commuter Jabodetabek/ Procurement of 10 set KRL Jabodetabek Commuter Railways Project						
Kementerian Keuangan	23.425.649	--	(509.253)	--	22.916.396	848.448
Proyek Pengadaan 600 KKBW, 600 PPCW dan 1.213 KKBW/ Procurement of 600 KKBW, 600 PPCW and 1,213 PPCW Project						
PT Bank Central Asia Tbk	464.159.139	--	(33.477.562)	--	430.681.577	10.618.285
Pinjaman Sindikasi Commuterline (Jabodetabek)/ Syndicated Loan Agreement of Commuterline (Jabodetabek)						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	98.089.205	--	(4.997.293)	--	93.091.912	2.467.080
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	98.089.206	--	(4.997.293)	--	93.091.913	2.467.080
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	97.584.843	--	(4.971.597)	--	92.613.246	2.454.394
PT Bank Central Asia Tbk	98.089.206	--	(4.997.293)	--	93.091.913	2.467.080
Proyek Pengadaan 50 Lokomotif General Electric/ Procurement of 50 General Electric Locomotives Piroject						
Export-Import Bank of United States	100.890.342	--	(43.526.614)	3.933.145	61.296.873	578.772
Perjanjian Sindikasi Bandara Soekarno Hatta (Basoetta)/ Syndicated Loan Agreement os Soekarno Hatta Aripot (Basoetta)						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	243.711.626	--	(8.703.986)	--	235.007.640	6.129.686
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	243.711.626	--	(8.703.986)	--	235.007.640	6.129.686
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	243.711.626	--	(8.703.986)	--	235.007.640	6.129.686
PT Bank Central Asia Tbk	243.711.626	--	(8.703.986)	--	235.007.640	6.129.686
Pinjaman Transaksi Khusus/ Special Transaction Loan (PTK)						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	254.640.000	--	(35.425.000)	--	219.215.000	8.531.976
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	198.044.000	--	(27.555.000)	--	170.489.000	6.635.619
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	226.363.000	--	(31.485.000)	--	194.878.000	7.584.612
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ Unamortized transaction cost						
	(2.472.898)	--	--	320.093	(2.152.805)	--
Perjanjian Pinjaman Sindikasi Proyek Light Rail Transit (LRT)/ Light Rail Transit (LRT) Syndicated Loan Agreement						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.088.288.005	1.205.087.992	(4.628.206)	--	4.288.747.791	46.398.586
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.470.630.404	1.119.158.435	(3.702.565)	--	3.586.086.274	37.118.870
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.470.630.404	653.894.306	(3.702.565)	--	3.120.822.145	37.118.870
PT Bank Central Asia Tbk	2.470.630.404	33.542.133	(3.702.565)	--	2.500.469.972	37.118.870
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.470.630.404	33.542.134	(3.702.565)	--	2.500.469.973	37.118.870
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.852.972.804	25.156.599	(2.776.923)	--	1.875.352.480	27.839.153
PT Bank Shinhan Indonesia	284.343.654	3.860.348	(426.127)	--	287.777.875	4.271.993
PT Bank KEB Hana Indonesia	568.687.305	7.720.696	(852.253)	--	575.555.748	8.543.985
PT Bank DKI	568.687.305	7.720.696	(852.253)	--	575.555.748	8.543.985
PT Bank Mega Tbk	568.687.305	7.720.696	(852.253)	--	575.555.748	8.543.985
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	345.892.954	4.450.420	(491.261)	--	349.852.113	4.473.398
PT BPD Sumatera Utara	279.663.084	304.042.346	(446.219)	--	583.259.211	4.924.986
PT Bank Permata Tbk	--	500.000.000	--	--	500.000.000	--
PT BPD Papua	--	300.000.000	--	--	300.000.000	--
PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	--	200.000.000	--	--	200.000.000	--
Perjanjian Pinjaman CDB/ CDB Syndicated Loan Agreement						
China Development Bank (USD)	--	3.634.475.330	--	119.886.405	3.754.361.735	25.882.897
China Development Bank (RMB)	--	3.374.909.499	--	85.562.998	3.460.472.497	23.112.378
Subjumlah/Subtotal	20.863.747.190	11.415.281.630	(442.293.604)	209.702.641	32.046.437.857	397.489.524

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-term Loans (Continued)

31 Mei 2024/ May 31, 2024						
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non Kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Pembayaran Bunga/ Interest Payment
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia						
Proyek Pengembangan Commuterline Jabodetabek/ Jabodetabek Commuterline Development Project						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	42.629.695	--	(3.715.154)	--	38.914.541	1.072.196
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	42.629.695	--	(3.715.154)	--	38.914.541	1.072.196
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	42.629.695	--	(3.715.154)	--	38.914.541	1.072.196
PT Bank Central Asia Tbk	42.629.695	--	(3.715.154)	--	38.914.541	1.072.196
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia						
Proyek Pengadaan 10 Unit Rangkaian Kereta/						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100.593.750	--	(3.468.750)	--	97.125.000	2.530.073
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100.593.750	--	(3.468.750)	--	97.125.000	2.530.073
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100.593.750	--	(3.468.750)	--	97.125.000	2.530.073
PT Bank Central Asia Tbk	100.593.750	--	(3.468.750)	--	97.125.000	2.530.073
Subjumlah/Subtotal	572.893.780	--	(28.735.616)	--	544.158.164	14.409.076
Jumlah/Total	21.436.640.970	11.415.281.630	(471.029.220)	209.702.641	32.590.596.021	411.898.600
31 Desember 2023/ December 31, 2023						
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non-kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Pembayaran Bunga/ Interest Payment
Perusahaan/The Company						
Pinjaman Sindikasi Proyek Pengadaan 144 unit lokomotif, 1.200 unit gerbong (KKBW) dan 1.200 unit gerbong (PPCW)/ Procurement of 144 units of locomotive, 1,200 units of the wagon (KKBW) and 1,200 units of wagon (PPCW)						
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	585.527.481	--	(189.400.000)	--	396.127.481	43.412.224
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	585.527.481	--	(189.400.000)	--	396.127.481	43.412.224
Proyek Pengadaan 10 Set KRL Commuter Jabodetabek/ Procurement of 10 set KRL Jabodetabek Commuter Railways Project						
Kementerian Keuangan	24.444.156	--	(1.018.507)	--	23.425.649	1.747.391
Proyek Pengadaan 600 KKBW, 600 PPCW dan 1.213 KKBW/ Procurement of 600 KKBW, 600 PPCW and 1,213 PPCW Project						
PT Bank Central Asia Tbk	598.069.386	--	(133.910.247)	--	464.159.139	48.599.946
Pinjaman Sindikasi Commuterline (Jabodetabek)/ Syndicated Loan Agreement of Commuterline (Jabodetabek)						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	118.078.376	--	(19.989.171)	--	98.089.205	10.821.765
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	118.078.376	--	(19.989.170)	--	98.089.206	10.821.765
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	117.471.231	--	(19.886.388)	--	97.584.843	10.766.121
PT Bank Central Asia Tbk	118.078.376	--	(19.989.170)	--	98.089.206	10.821.765
Proyek Pengadaan 50 Lokomotif General Electric/ Procurement of 50 General Electric Locomotives Piroject						
Export-Import Bank of United States	277.446.558	--	(168.926.302)	(7.629.914)	100.890.342	4.735.673
Perjanjian Sindikasi Bandara Soekarno Hatta (Basoetta)/ Syndicated Loan Agreement os Soekarno Hatta Aripport (Basoetta)						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	278.527.572	--	(34.815.946)	--	243.711.626	25.985.092
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	278.527.572	--	(34.815.946)	--	243.711.626	25.985.092
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	278.527.572	--	(34.815.946)	--	243.711.626	25.985.092
PT Bank Central Asia Tbk	278.527.572	--	(34.815.946)	--	243.711.626	25.985.092
Pinjaman Transaksi Khusus/ Special Transaction Loan (PTK)						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	317.520.000	--	(62.880.000)	--	254.640.000	24.584.560
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	246.956.000	--	(48.912.000)	--	198.044.000	19.120.775
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	282.247.000	--	(55.884.000)	--	226.363.000	21.853.876
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ Unamortized transaction cost	(3.241.123)	--	--	768.225	(2.472.898)	--
Subjumlah/ Subtotal	4.500.313.586	--	(1.069.448.739)	(6.861.689)	3.424.003.158	354.638.453

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-term Loans (Continued)

31 Desember 2023/ December 31, 2023						
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non-kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Pembayaran Bunga/ Interest Payment
Perjanjian Pinjaman Sindikasi Proyek Light Rail Transit (LRT)/ Light Rail Transit (LRT) Syndicated Loan Agreement						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.525.463.436	562.824.569	--	--	3.088.288.005	56.245.833
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.020.370.748	450.259.656	--	--	2.470.630.404	44.996.667
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.020.370.748	450.259.656	--	--	2.470.630.404	44.996.667
PT Bank Central Asia Tbk	2.020.370.748	450.259.656	--	--	2.470.630.404	44.996.667
PT Bank CIMB Niaga Tbk	2.020.370.749	450.259.655	--	--	2.470.630.404	44.996.667
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.515.278.062	337.694.742	--	--	1.852.972.804	33.747.500
PT Bank Shinhan Indonesia	232.523.488	51.820.166	--	--	284.343.654	5.178.645
PT Bank KEB Hana Indonesia	465.046.975	103.640.330	--	--	568.687.305	10.357.289
PT Bank DKI	465.046.975	103.640.330	--	--	568.687.305	10.357.289
PT Bank Mega Tbk	465.046.975	103.640.330	--	--	568.687.305	10.357.289
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	286.151.843	59.741.111	--	--	345.892.954	5.970.224
PT BPD Sumatera Utara	225.399.833	54.263.251	--	--	279.663.084	5.422.794
Proyek Pengembangan Commuterline Jabodetabek/ Jabodetabek Commuterline Development Project						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	57.490.313	--	(14.860.618)	--	42.629.695	5.078.389
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	57.490.313	--	(14.860.618)	--	42.629.695	5.078.389
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	57.490.313	--	(14.860.618)	--	42.629.695	5.078.389
PT Bank Central Asia Tbk	57.490.313	--	(14.860.618)	--	42.629.695	5.078.389
Proyek Pengadaan 10 Unit Rangkaian Kereta/ Procurement of 10 trainset units						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	114.468.750	--	(13.875.000)	--	100.593.750	10.456.828
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	114.468.750	--	(13.875.000)	--	100.593.750	10.456.828
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	114.468.750	--	(13.875.000)	--	100.593.750	10.456.828
PT Bank Central Asia Tbk	114.468.750	--	(13.875.000)	--	100.593.750	10.456.828
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen						
Pengadaan Managed Service Automatic Fare Collection (AFC) LRT Jabodetabek/ Procurement Managed Service Automatic Fare Collection (AFC) LRT Jabodetabek						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.000.000	22.000.000	(52.000.000)	--	--	881.343
Subjumlah/ Subtotal	14.979.276.832	3.200.303.452	(166.942.472)	--	18.012.637.812	380.645.742
Jumlah/ Total	19.479.590.418	3.200.303.452	(1.236.391.211)	(6.861.689)	21.436.640.970	735.284.195

31 Desember 2022/ December 31, 2022						
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non Kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Pembayaran Bunga/ Interest Payment
Perusahaan/The Company						
Pinjaman Sindikasi Proyek Pengadaan 144 unit lokomotif, 1.200 unit gerbong (KKBW) dan 1.200 unit gerbong (PPCW)/ Procurement of 144 units of locomotive, 1,200 units of the wagon (KKBW) and 1,200 units of wagon (PPCW)						
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	727.577.481	--	(142.050.000)	--	585.527.481	42.173.103
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	727.577.481	--	(142.050.000)	--	585.527.481	42.173.103
Proyek Pengadaan 10 Set KRL Commuter Jabodetabek/ Kementerian Keuangan						
	25.462.663	--	(1.018.507)	--	24.444.156	1.828.925
Proyek Pengadaan 600 KKBW, 600 PPCW dan 1.213 KKBW/ PT Bank Central Asia Tbk						
	698.502.071	--	(100.432.685)	--	598.069.386	41.798.323
Pinjaman Sindikasi Commuterline (Jabodetabek)/ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						
	133.070.254	--	(14.991.878)	--	118.078.376	9.059.480
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	133.070.254	--	(14.991.878)	--	118.078.376	9.059.480
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	132.386.023	--	(14.914.792)	--	117.471.231	9.012.897
PT Bank Central Asia Tbk	133.070.254	--	(14.991.878)	--	118.078.376	9.059.480
Proyek Pengadaan 50 Lokomotif General Electric/ Export-Import Bank of United States						
	409.939.099	--	(164.791.662)	32.299.121	277.446.558	8.498.874
Perjanjian Sindikasi Bandara Soekarno Hatta (Basoetta)/ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						
	304.639.532	--	(26.111.960)	--	278.527.572	20.889.874
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	304.639.532	--	(26.111.960)	--	278.527.572	20.889.874
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	304.639.532	--	(26.111.960)	--	278.527.572	20.889.874
PT Bank Central Asia Tbk	304.639.532	--	(26.111.960)	--	278.527.572	20.889.874
Pinjaman Transaksi Khusus/ PT Bank Mandiri (Persero) Tbk						
	364.680.000	--	(47.160.000)	--	317.520.000	28.667.637
Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor	283.640.000	--	(36.684.000)	--	246.956.000	22.296.937
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	324.160.000	--	(41.913.000)	--	282.247.000	25.482.543
Biaya Transaksi yang Belum Diamortisasi/ Unamortized transaction cost						
	(4.009.348)	--	--	768.225	(3.241.123)	--
Subjumlah/ Subtotal	5.307.684.360	--	(840.438.120)	33.067.346	4.500.313.586	332.670.278

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

29. Pinjaman Jangka Panjang (Lanjutan)

29. Long-term Loans (Continued)

	31 Desember 2022/ December 31, 2022					
Kreditur/ Creditor	Saldo Awal/ Beginning Balance	Pencairan/ Drawdown	Pembayaran/ Payment	Non Kas/ Non-Cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	Pembayaran Bunga/ Interest Payment
Perjanjian Pinjaman Sindikasi Proyek Light Rail Transit (LRT)/ Light Rail Transit (LRT) Syndicated Loan Agreement						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.008.151.563	464.783.500	--	52.528.373	2.525.463.436	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.606.521.250	371.826.798	--	42.022.700	2.020.370.748	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.606.521.250	371.826.798	--	42.022.700	2.020.370.748	--
PT Bank Central Asia Tbk	1.606.521.250	371.826.798	--	42.022.700	2.020.370.748	--
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.606.521.251	371.826.798	--	42.022.700	2.020.370.749	--
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	1.204.890.938	278.870.100	--	31.517.024	1.515.278.062	--
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd	369.787.500	76.174.596	--	(445.962.096)	--	--
PT Bank Shinhan Indonesia	184.893.750	42.793.365	--	4.836.373	232.523.488	--
PT Bank KEB Hana Indonesia	369.787.500	85.586.730	--	9.672.745	465.046.975	--
PT Bank DKI	369.787.500	85.586.730	--	9.672.745	465.046.975	--
PT Bank Mega Tbk	369.787.500	85.586.730	--	9.672.745	465.046.975	--
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	--	5.425.339	--	280.726.504	286.151.843	--
PT BPD Sumatera Utara	36.978.750	12.545.471	--	175.875.612	225.399.833	--
Proyek Pengembangan Commuterline Jabodetabek/ Jabodetabek Commuterline Development Project						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	72.350.930	--	(14.860.617)	--	57.490.313	4.803.680
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	72.350.930	--	(14.860.617)	--	57.490.313	4.803.680
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	72.350.930	--	(14.860.617)	--	57.490.313	4.803.680
PT Bank Central Asia Tbk	72.350.930	--	(14.860.617)	--	57.490.313	4.803.680
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Kereta Commuter Indonesia						
Proyek Pengadaan 10 Unit Rangkaian Kereta/ Procurement of 10 trainset units						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--	--	114.468.750	114.468.750	--
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	--	--	--	114.468.750	114.468.750	--
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	--	--	--	114.468.750	114.468.750	--
PT Bank Central Asia Tbk	--	--	--	114.468.750	114.468.750	--
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT Railink						
Proyek Pengadaan 10 Unit Rangkaian Kereta/ Procurement of 10 trainset units						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	124.875.000	--	(10.406.250)	(114.468.750)	--	8.571.663
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	124.875.000	--	(10.406.250)	(114.468.750)	--	8.571.663
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	124.875.000	--	(10.406.250)	(114.468.750)	--	8.571.663
PT Bank Central Asia Tbk	124.875.000	--	(10.406.250)	(114.468.750)	--	8.571.663
Entitas Anak/ Subsidiaries - PT KA Properti Manajemen						
Pengadaan Managed Service Automatic Fare Collection (AFC) LRT Jabodetabek/ Procurement Managed Service Automatic Fare Collection (AFC) LRT Jabodetabek						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	30.000.000	--	--	30.000.000	1.434.513
Subtotal	12.129.053.722	2.654.659.753	(101.067.468)	296.630.825	14.979.276.832	54.935.885
Total	17.436.738.082	2.654.659.753	(941.505.588)	329.698.171	19.479.590.418	387.606.163

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

30. Utang Obligasi

30. Bonds Payable

Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut:

The details of bonds payable are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024		31 Desember/December 31		
			2023	2022	
Obligasi I Kereta Api Indonesia:					Kereta Api Indonesia Bond I:
Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Seri B
Subjumlah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Subtotal
Obligasi II Kereta Api Indonesia:					Kereta Api Indonesia Bond II:
Seri A	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000	Seri A
Seri B	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	Seri B
Subjumlah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	Subtotal
Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022:					Kereta Api Indonesia Continuing Bond I Year 2022:
Seri A	634.000.000	634.000.000	634.000.000	634.000.000	Seri A
Seri B	866.000.000	866.000.000	866.000.000	866.000.000	Seri B
Subjumlah	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	Subtotal
Jumlah	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	Total
Biaya Penerbitan Obligasi yang belum Diamortisasi	(5.609.887)	(6.677.456)	(9.239.619)	(9.239.619)	Unamortized Bond Issuance Cost
Jumlah Utang Obligasi	4.494.390.113	4.493.322.544	4.490.760.381	4.490.760.381	Total Bonds Payable
Bagian Utang Obligasi yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun					Portion of Obligation Maturing within One Year
Obligasi I Kereta Api Indonesia:					Kereta Api Indonesia Bond I:
Seri B	1.000.000.000	1.000.000.000	--	--	Seri B
Obligasi II Kereta Api Indonesia:					Kereta Api Indonesia Bond II:
Seri A	900.000.000	900.000.000	--	--	Seri A
Biaya Penerbitan Obligasi yang Belum Diamortisasi	(654.169)	(1.147.075)	--	--	Unamortized Bond Issuance Cost
Jumlah Bagian Obligasi yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.899.345.831	1.898.852.925	--	--	Total Portion of Obligation Maturing within One Year
Bagian Jangka Panjang	2.595.044.282	2.594.469.619	4.490.760.381	4.490.760.381	Long-term Portion

Jumlah pembayaran kembali untuk utang obligasi menurut tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

The amounts of repayments of bond payable by years of maturity are as follow:

Tahun Jatuh Tempo/ Year of Maturity	Jumlah/ Total (Rp)
2024	1.900.000.000
2026	1.100.000.000
2027	634.000.000
2029	866.000.000
Total	4.500.000.000

- a. **Obligasi I Kereta Api Indonesia Tahun 2017**
Pada tanggal 13 November 2017, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I Kereta Api Indonesia tahun 2017 dengan 2 (dua) seri yaitu:
- a. Seri A senilai Rp1.000.000.000 dengan suku bunga 7,75% per tahun. Pada tanggal 18 November 2022, Perusahaan telah melunasi Obligasi I seri A Kereta Api Indonesia Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000 sesuai jadwal.

- a. **Kereta Api Indonesia Bonds I year 2017**
On November 13, 2017, the Company has received an effective statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) for the issuance of Kereta Api Indonesia Bonds I year 2017 with 2 (two) series which are as follows:
- a. A Series amounting to Rp1,000,000,000 with a fixed interest rate of 7.75% per annum. On November 18, 2022, The Company has paid off Kereta Api Indonesia 2017 Bond I series A year 2017 of Rp1,000,000,000 on schedule.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

- b. Seri B senilai Rp1.000.000.000 dengan suku bunga 8,25% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 21 November 2024.

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 21 November 2017, dari hasil penerbitan perdana Obligasi I tahun 2017 adalah sebesar Rp2.000.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Grup, sekitar 55% dari dana yang diperoleh akan digunakan untuk penyelesaian proyek KA Bandara Soekarno-Hatta (Basoetta) dan sekitar 45% akan digunakan untuk pembelian kereta.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi I Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat "AAA" untuk penerbitan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1.
- Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1.

Pada 3 April 2024, Obligasi I Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat "AAA" dari PEFINDO untuk periode 2 April 2024 hingga 1 April 2025.

b. Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019

Pada tanggal 6 Desember 2019, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi II Kereta Api Indonesia tahun 2019 dengan 2 (dua) seri yaitu:

- Seri A senilai Rp900.000.000 dengan suku bunga 7,75% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 16 Desember 2024.

30. Bonds Payable (Continued)

- b. B Series amounting to Rp1,000,000,000 with annual interest rate of 8.25%. The bonds payable will mature on November 21, 2024.

Total funds received by the Company on November 21, 2017, from the first issuance of Bonds I year 2017 was Rp2,000,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and the Group's prospectus for bonds payable, approximately 55% of funds received will be used for Soekarno-Hatta (Basoetta) Airport Train project and approximately 45% for purchasing trains.

The bonds were offered at 100% of the principal amount. Bond interest is paid quarterly.

Kereta Api Indonesia Bonds I is rated "AAA" for the issuance of bonds by PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and interest.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable period as follows:

- Ratio of Total Debt to Total Equity is not more than 5:1.
- Ratio of Earning Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses is not less than 1:1.

On of April 3, 2024, Kereta Api Indonesia Bonds I is rated "AAA" by PEFINDO for the period April 2, 2024 until April 1, 2025.

b. Kereta Api Indonesia Bonds II year 2019

On December 6, 2019, the Company has received an effective statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) for the issuance of Kereta Api Indonesia Bonds II year 2019 with 2 (two) series which are as follows:

- A Series amounting to Rp900,000,000 with a fixed interest rate of 7.75% per annum. The bonds payable will mature on December 16, 2024.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

- b. Seri B senilai Rp1.100.000.000 dengan suku bunga 8,20% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 16 Desember 2026.

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 13 Desember 2019, dari hasil penerbitan perdana Obligasi II tahun 2019 adalah sebesar Rp2.000.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Grup, sekitar Rp1.200.000.000 akan digunakan untuk *refinancing* fasilitas pada PT Bank HSBC Indonesia dan sisanya akan digunakan untuk pengadaan/perbaikan sarana.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi II Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat "AAA" untuk penerbitan obligasi dari PEFINDO. Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1.
- Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1.

Pada 3 April 2024, Obligasi II Grup mendapatkan peringkat "AAA" dari PEFINDO untuk periode 2 April 2024 hingga 1 April 2025.

c. Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia tahun 2022 dengan 2 (dua) seri yaitu:

- Seri A senilai Rp634.000.000 dengan suku bunga 7,10% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2027.
- Seri B senilai Rp866.000.000 dengan suku bunga 8,00% per tahun, akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2029.

30. Bonds Payable (Continued)

- b. B Series amounting to Rp1,100,000,000 with annual interest rate of 8.20% per annum. The bonds payable will mature on December 16, 2026.

Total funds received by the Company on December 13, 2019, from the first issuance of Bonds II year 2019 was Rp2,000,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and the Group's prospectus for bonds payable, around Rp1,200,000,000 that will be allocate for facility refinancing by PT Bank HSBC Indonesia and the rest will be used for procurement/maintenance.

The bonds were offered at 100% of the principal amount. Bond interest is paid quarterly.

Kereta Api Indonesia Bonds II is rated "AAA" for the issuance of bonds by PEFINDO. The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and interest.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable period as follows:

- Ratio of Total Debt to Total Equity is not more than 5:1.
- Ratio of Earning Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses is not less than 1:1.

As of April 3, 2024, Group Bonds II is rated "AAA" by PEFINDO for the period April 2, 2024 until April 1, 2025.

c. Kereta Api Indonesia Continuing Bonds I year 2022

On July 29, 2022, the Company has received an effective statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) for the issuance of Kereta Api Indonesia Continuing Bonds I year 2022 with 2 (two) series which are as follows:

- A Series amounting to Rp634,000,000 with a fixed interest rate of 7.10% per annum. The bonds payable will mature on August 5, 2027.
- B Series amounting to Rp866,000,000 with annual interest rate of 8.00% per annum. The bonds payable will mature on August 5, 2029.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

30. Utang Obligasi (Lanjutan)

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 5 Agustus 2022, dari hasil penerbitan perdana Obligasi Berkelanjutan I tahun 2022 adalah sebesar Rp1.500.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi Grup, sekitar Rp1.000.000.000 digunakan untuk pembayaran utang pokok Kereta Api Indonesia tahun 2017 Seri A sisanya akan digunakan untuk pengembangan angkutan perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan yang berupa prasarana perkeretaapian.

Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan.

Obligasi Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AA+" untuk penerbitan obligasi dari PEFINDO. Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan bunga.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu selama periode utang obligasi sebagai berikut:

- Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1.
- Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1.

Berdasarkan perhitungan interim, Grup memenuhi kepatuhan *financial covenant*.

Pada 3 April 2024, Obligasi Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AAA" dari PEFINDO untuk periode 2 April 2024 hingga 1 April 2025.

30. Bonds Payable (Continued)

Total funds received by the Company on August 5, 2022, from the first issuance of Bonds I year 2022 was Rp1,500,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and the Group's prospectus for bonds payable, around Rp1,000,000,000 that allocated for for payment of Kereta Api Indonesia Bonds I year 2017 Series A and the rest will be used for developing railway transport in Southern Sumatera in form of railway infrastructure.

The bonds were offered at 100% of the principal amount. Bond interest is paid quarterly.

The Company Continuing Bonds I is rated "AA+" for the issuance of bonds by PEFINDO. The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and interest.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the bonds payable period as follows:

- Ratio of Total Debt to Total Equity is not more than 5:1.
- Ratio of Earning Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses is not less than 1:1.

Based on the interim calculation, the Group met the financial covenant compliance.

As of April 3, 2024, The Company Continuing Bonds I is rated "AAA" by PEFINDO for the period April 2, 2024 until April 1, 2025.

31. Sukuk Ijarah

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31	
		2023	2022
Sukuk Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahun 2022:			
Seri A	117.350.000	117.350.000	117.350.000
Seri B	382.650.000	382.650.000	382.650.000
Jumlah	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Biaya Penerbitan Sukuk yang belum Diamortisasi	(1.297.522)	(1.413.806)	(1.692.889)
Jumlah Sukuk	498.702.478	498.586.194	498.307.111

Jumlah pembayaran kembali untuk sukuk ijarah menurut tahun jatuh tempo adalah sebagai berikut:

31. Sukuk Ijarah

Kereta Api Indonesia Continuing Sukuk I Year 2022:
Seri A
Seri B
Total
Unamortized Sukuk Issuance Cost
Total Sukuk

The amounts of repayments of sukuk ijarah by years of manurity are as follow:

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. Sukuk Ijarah (Lanjutan)

31. Sukuk Ijarah (Continued)

Tahun Jatuh Tempo/ Year of Maturity	Jumlah/ Total
2027	117.350.000
2029	382.650.000
Total	500.000.000

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perusahaan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 dengan 2 (dua) seri yaitu:

- a. Seri A senilai Rp117.350.000 dengan dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp8.331.850 per tahun, akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2027.
- b. Seri B senilai Rp382.650.000 dengan dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp30.612.000 per tahun, akan jatuh tempo tanggal 5 Agustus 2029.

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 5 Agustus 2022, dari hasil penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022 adalah sebesar Rp500.000.000. Sesuai perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus obligasi berkelanjutan I dan sukuk ijarah berkelanjutan I Kereta Api Indonesia, sekitar 78% akan digunakan untuk pengembangan angkutan perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan yang berupa prasarana perkeretaapian dan sisanya akan digunakan untuk pengadaan sarana KA Bandara International Adi Soemarmo yang berupa sarana trainset KRDE.

Sukuk ijarah ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok.

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia mendapatkan peringkat "AA+" atas Sukuk dari PEFINDO. Peringkat tersebut menunjukkan kemungkinan pembayaran tepat waktu atas jumlah pokok dan cicilan imbalan ijarah setiap triwulan.

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio keuangan tertentu selama periode sukuk ijarah sebagai berikut:

- a. Perbandingan Total Pinjaman terhadap Total Ekuitas tidak lebih dari 5:1.
- b. Perbandingan Profit sebelum Beban Pajak Penghasilan dan Penyusutan dan Amortisasi terhadap Beban Bunga Pinjaman tidak kurang dari 1:1.

On July 29, 2022, the Company has received an effective statement from Chairman of the Financial Services Authority (OJK) for the issuance of Kereta Api Indonesia Continuing Sukuk Ijarah I Phase I year 2022 with 2 (two) series which are as follows:

- a. A Series amounting to Rp117,350,000 with ijarah's installment benefit of Rp8,331,850 per annum. Sukuk will mature on August 5, 2027.
- b. B Series amounting to Rp382,650,000 with ijarah's installment benefit of Rp30,612,000 per annum. Sukuk will mature on August 5, 2029.

Total funds received by the Company on August 5, 2022, from the first issuance of Continuing Sukuk Ijarah I year 2022 was Rp500,000,000. Based on the agreement with PT Bank Mega Tbk as Trustee and prospectus for continuing bonds I and continuing sukuk ijarah I Kereta Api Indonesia, around 78% that will be allocate for developing railway transport in Southern Sumatera in form of railway infrastucture and the rest will be used for procurement of Adi Soemarmo International Airport Train facilities in form of KRDE trainset.

Sukuk ijarah were offered at 100% of the principal amount.

Kereta Api Indonesia Continuing Sukuk Ijarah I is rated "AA+" for the issuance of Sukuk by PEFINDO. The rating indicates the likelihood of timely payment of principal and ijarah benefit paid quarterly.

The Company is also required to maintain certain financial ratios during the Sukuk Ijarah period as follows:

- a. Ratio of Total Debt to Total Equity is not more than 5:1.
- b. Ratio of Earning Before Income Tax and Depreciation and Amortization to Interest Expenses is not less than 1:1.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

31. Sukuk Ijarah (Lanjutan)

Berdasarkan perhitungan interim, Perusahaan memenuhi kepatuhan *financial covenant*.

Pada 3 April 2024, Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Perusahaan mendapatkan peringkat "AAA" dari PEFINDO untuk periode 2 April 2024 hingga 1 April 2025.

31. Sukuk Ijarah (Continued)

Based on the interim calculation, the Company met the financial covenant compliance.

As of April 3, 2024, the Company Continuing Sukuk Ijarah I rated "AAA" by PEFINDO for the period April 2, 2024 until April 1, 2025.

32. Liabilitas Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka panjang lainnya merupakan dana titipan dari iuran pensiun dana tambahan dari Pemerintah Republik Indonesia dan PT Taspen (Persero) sebagai pembayaran manfaat masa lalu para karyawan eks-Pegawai Negeri Sipil. Dana titipan ini termasuk titipan dana kesehatan pegawai akan dibayarkan sesuai perjanjian dengan pihak pengelola dana. Dana titipan disimpan dalam bentuk rekening bank dan deposito. Rincian liabilitas jangka panjang lainnya sebagai berikut:

32. Other Long-term Liabilities

Other Long-term liabilities represent deposit funds from pension contribution and additional funds from the Government of Republic of Indonesia and PT Taspen (Persero) for payment of past benefits of ex-Civil Servant employee. This funds include employee's healthy deposit which will be paid to the fund management party based on agreement. Deposit funds are kept in the form of bank accounts and time deposits. Details of other long-term liabilities are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Titipan Dana Iuran Pensiun				Pension Fund Deposits
Saldo Awal	91.258.933	76.394.632	88.598.426	Beginning Balance
Penerimaan:				Receipts:
Penerimaan Dana Iuran Pensiun	202.933.958	429.685.768	434.190.756	Pension Fund Receipts
Pengembangan Dana	889.515	29.636.734	2.104.723	Fund Development
Subjumlah	203.823.473	459.322.502	436.295.479	Subtotal
Pembayaran				Payments
BPJS Ketenagakerjaan	83.262.963	195.515.713	163.884.982	BPJS Ketenagakerjaan
PT Taspen (Persero)	56.777.203	139.073.346	113.195.726	PT Taspen (Persero)
PT Asuransi Jiwa IFG (Life)	53.339.465	109.869.142	171.418.565	PT Asuransi Jiwa IFG (Life)
Subjumlah	193.379.631	444.458.201	448.499.273	Subtotal
Saldo Akhir	101.702.775	91.258.933	76.394.632	Ending Balance
Titipan Dana Kesehatan Pegawai	61.354.623	60.679.342	53.402.087	Employee Healthy Deposits
Tantiem Direksi	7.640.255	7.592.201	--	Director's Tantiem
Jumlah	170.697.653	159.530.476	129.796.719	Total

Kisaran suku bunga per tahun dan jangka waktu deposito berjangka adalah sebagai berikut:

Interest rates per annum and maturity period of time deposits are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Rupiah	6,00% - 12,00%	6,00% - 12,00%	6,00% - 12,00%	Rupiah
Jangka Waktu	1 Bulan/ Month (ARO)	1 Bulan/ Month (ARO)	1 Bulan/ Month (ARO)	Maturity Year

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

33. Modal Saham

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 62 tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022, Akta No. 122 tanggal 11 Januari 2023 dari Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., Notaris di Bandung dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-01.03-0008225 tanggal 17 Januari 2023 tentang penambahan modal yang ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp19.168.743.000 menjadi sebesar Rp22.368.743.000.

33. Share Capital

Based on Government Regulation of Republic of Indonesia No. 62 Year 2022 dated December 31, 2022, Deed No. 122 dated January 11, 2023 Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H., and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia No. AHU-AH-01.03-0008225 dated January 17, 2023 regarding the additional of issued and paid-in capital from Rp19,169,743,000 to Rp22,368,743,000.

Pemegang Saham/ Shareholder	Jumlah Lembar Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Issued and Fully Paid Shares	Persentase Kepemilikan Saham/ Percentage of Ownership	Jumlah Nilai Saham/ Total Share Value	Tahun/ Year
Pemerintah Republik Indonesia/ The Government of Republic of Indonesia	22.368.743 19.168.743	100%	22.368.743.000 19.168.743.000	31 Mei 2024 dan 31 Desember 2023/ May 31, 2024 and December 31, 2023 31 Desember 2022/ December 31, 2022

Mutasi saldo modal disetor sebagai berikut:

Movement on the balance of paid-in capital is as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Saldo Awal	22.368.743.000	19.168.743.000	19.168.743.000	Beginning Balance
Penambahan Modal Disetor (Catatan 34)	--	3.200.000.000	--	Additional on Paid in Capital (Notes 34)
Jumlah	22.368.743.000	22.368.743.000	19.168.743.000	Total

34. Tambahan Penyertaan Modal Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 62 tahun 2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia, disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia telah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp3.200.000.000.

34. Addition Of Government's Capital Investment

Based on Government Regulation of Republic of Indonesia No. 62 Year 2022 dated December 31, 2022 regarding Additional of Republic Indonesia's Capital into Share Capital of (Persero) PT Kereta Api Indonesia, it was stated that the State of republic Indonesia had added up its capital investment to the Company's amounting to Rp3,200,000,000.

Penambahan modal yang ditempatkan dan disetor Perusahaan sebesar Rp3.200.000.000 tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 yang dipergunakan untuk penyelesaian proyek Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

The additional of issued and paid-in capital of the Company amounting Rp3,200,000,000 came from State's Budget Years 2022 used for the completion of the fast train project between Jakarta and Bandung.

Pada 31 Desember 2023, seluruh Penambahan Penyertaan Modal Negara tersebut telah disetujui sebagai tambahan modal saham Perusahaan (Catatan 33).

On December 31, 2023, All Additional of Republic Indonesia's Capital has been approved as additional share capital of the Company (Note 33).

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

35. Selisih Perubahan Ekuitas Entitas Anak

Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas anak senilai Rp24.069.720 merupakan dampak transaksi peralihan bisnis Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta (KA Basoetta) dari Railink ke KCI.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. 10 antara PT Railink dengan PT Kereta Commuter Indonesia tanggal 30 Desember 2022, telah dilakukan jual beli bisnis KA Basoetta, harga jual beli yang disepakati adalah Rp329.800.000 dengan obyek jual beli:

1. 10 unit *train set* Kereta Rel Listrik (*Electrical Multiple Unit*);
2. 2 (dua) unit *double crane hoist*;
3. 2 (dua) unit kendaraan bermotor;
4. Peralatan kantor yang berada di kantor Railink yang berlokasi di gedung Kereta Bandara, Jl. Tanjung Karang No.1, RT.011/RW.020, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;
5. *Gateway* penjualan tiket dengan *e-ticketing system* yang berada di Stasiun Manggarai, Stasiun Sudirman BNI City, Stasiun Batu Ceper, Stasiun Duri, dan Stasiun Bandara Soekarno-Hatta; dan
6. *Interior City Railway Station* yang berada di Stasiun Sudirman BNI City.

Selain aset tetap, beberapa Perjanjian Material juga dialihkan seperti:

1. Perjanjian Induk No. RL/DIR/PKS/028/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Perkeretaapian Bandara Soekarno-Hatta antara Perusahaan, PT AP II dan Railink;
2. Perjanjian antara Perusahaan dan Railink tentang Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian di *City Railways Station* (CRS) dan Stasiun Perhentian KA Bandara Soekarno-Hatta No. RL/DIR/PKS/022/IV/2018 tanggal 18 April 2018;
3. Perjanjian Kredit Sindikasi No. 05 tanggal 20 April 2015 yang telah diperbaharui dengan Akta Adendum Perjanjian Kredit Sindikasi No. 16 tanggal 20 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris Julius Purnawan, S.H., M.Si, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dari PT Bank

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. Difference of changes in equity of subsidiaries

The difference in transactions for changes in equity in subsidiaries worth Rp24,069,720 is the impact of the transaction of transferring the Soekarno-Hatta Airport Railway (KA Basoetta) business from Railink to KCI.

Based on the Deed of Sale and Purchase No.10 between PT Railink and PT Kereta Commuter Indonesia dated December 30, 2022, a sale and purchase of the Soekarno-Hatta Airport Railway business was carried out, the agreed sales price was Rp329,800,000 with the object of sales:

1. 10 units of electric train sets (*Electrical Multiple Units*);
2. 2 (two) units of double crane hoists;
3. 2 (two) units of vehicles;
4. Office equipment located at the Railink office located at the Airport Train building, Jl. Tanjung Karang No.1, RT.011/RW.020, Kebon Melati Village, Tanah Abang District, Central Jakarta City, DKI Jakarta Province;
5. Ticket sales gateway with *e-ticketing system* which are located at Manggarai Station, Sudirman BNI City Station, Batu Ceper Station, Duri Station, and Soekarno-Hatta Airport Station; and
6. Interior of the City Railway Station located at the Station Sudirman BNI City.

Besides fixed assets, certain Material Agreements are also transferred such as:

1. Agreement No. RL/DIR/PKS/028/VII/2015 dated July 7, 2015 concerning Cooperation in the Implementation of Soekarno-Hatta Airport Railways between the Company, PT AP II and Railink;
2. The agreement between the Company and Railink regarding the Operational of Railway Infrastructure in City Railways Station (CRS) and the Stop Station of Soekarno-Hatta Airport Railway No. RL/DIR/PKS/022/IV/2018 dated April 18, 2018;
3. Deed of Syndicated Credit Agreement No. 05 dated April 20, 2015 which has been amended with Deed of Addendum for Syndicated Credit Agreement No. 16 dated October 20, 2015 made by Notary Julius Purnawan, S.H., M.Si, the Company obtained syndicated loan facility from

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

35. Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Anak (Lanjutan)

- Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Agen Fasilitas), PT Bank Central Asia Tbk (Agen Jaminan), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Peserta dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Peserta); dan
4. Perjanjian-perjanjian lain yang dimiliki oleh Perusahaan dan dibutuhkan oleh KCI untuk atau terkait operasional KA Bandara Soekarno-Hatta.

Persetujuan penambahan pengoperasian pada lintas pelayanan Manggarai-Bandara Udara Soekarno-Hatta oleh KCI sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perkeretaapian No. KA.005/1/4/DJKA/2022, pada tanggal 29 Juli 2022.

36. Penggunaan Laba Bersih dan Saldo Laba

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2023, Grup membukukan laba yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp1.873.921.301 yang dialokasikan penggunaannya sebagai berikut:

- a. Rp866.000.000 sebagai cadangan umum.
b. Rp1.007.921.301 sebagai cadangan lainnya.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022, Grup membukukan laba yang diatribusikan kepada entitas induk sebesar Rp1.782.040.477 yang dialokasikan penggunaannya sebagai berikut:

- a. Rp900.000.000 sebagai cadangan umum.
b. Rp882.040.477 sebagai cadangan lainnya.

37. Selisih Likuidasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1998, Perusahaan berubah status dari Perusahaan Umum menjadi Persero terhitung mulai tanggal 1 Juni 1999.

Berdasarkan Laporan Auditor Independen atas Laporan Posisi Keuangan Likuidasi Perusahaan Umum Kereta Api per 31 Mei 1999 yang diaudit oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan No. LAP-02.02.05-12720/PW.10.5/99

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

35. Difference in Transactions of Changes in Equity of Subsidiaries (Continued)

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Facility Agent), PT Bank Central Asia Tbk (Fiducia Agent), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Member) and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Member); and
4. Other agreement owned by the Company and needed by KCI for or related to operational of Soekarno-Hatta Airport Railway.

Approval of additional operations on the Manggarai-Soekarno-Hatta Airport service route by KCI in accordance with the Decree of the Ministry of Transportation through the Director General of Railways No. KA.005/1/4/DJKA/2022, on July 29, 2022.

36. Distribution of Net Profit and Retained Earnings

Based on General Meeting of Shareholders 2023, the Group booked income attributed to owner of the parent entity amounted to Rp1,873,921,301 which was allocated for use as follows:

- a. Rp866,000,000 as general reserve.
b. Rp1,007,921,301 as other reserves.

Based on General Meeting of Shareholders 2022, the Group booked income attributed to owner of the parent entity amounted to Rp1,782,040,477 which was allocated for use as follows:

- a. Rp900,000,000 as general reserve.
b. Rp882,040,477 as other reserves.

37. Difference of Liquidation

Based on Government Regulation No. 19 of 1998, the Company changed its status from a Public Company to a Limited Company starting June 1, 1999.

Based on the Independent Auditors' Report on Perusahaan Umum Kereta Api Financial Position of Liquidation as of May 31, 1999 which was audited by Representative Office of BPKP of West Java Province, based on Report No. LAP-02.02.05-12720/PW.10.5/99 dated

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

37. Selisih Likuidasi (Lanjutan)

tertanggal 9 November 1999, tercatat modal dan cadangan berupa sisa likuidasi sebesar Rp2.208.251.318.

Berdasarkan laporan posisi keuangan pembukaan Perusahaan per 1 Juni 1999 yang diaudit oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Laporan No. LAP-02.02.05-13026/PW.10.5/1999 tertanggal 18 November 1999, sisa likuidasi sebesar Rp2.208.251.318 diperhitungkan sebagai modal yang disetor sebesar Rp2.200.000.000, sisanya sebesar Rp8.251.318 menjadi cadangan modal.

Atas cadangan modal sebesar Rp8.251.318 telah dipindahbukukan sebagai berikut:

Saldo per 1 Juni 1999	8.251.318
Dipindahkan ke saldo laba	(832.180)
Saldo per 31 Desember 1999	7.419.138
Dipindahkan ke Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)	(187.293)
Saldo per 31 Desember 2000	7.231.845
Dipindahkan ke BPYBDS	(6.263.710)
Jumlah	968.135

37. Difference of Liquidation (Continued)

November 9, 1999, it was recorded that capital and its reserves in the form of remaining balance upon liquidation amounted to Rp2,208,251,318.

Based on the Company's opening balance report as of June 1, 1999 which was audited by Representative Office of BPKP of West Java Province, based on Report No. LAP-02.02.05-13026/PW.10.5/1999 dated November 18, 1999, the remaining of liquidation value amounted to Rp2,208,251,318 was taken into account as paid up capital of Rp2,200,000,000, where the remaining of Rp8,251,318 into capital reserves.

The capital reserves amounted to Rp8,251,318 has been transferred as follows:

Balance as of June 1, 1999	
Moved to Retained Earning	
Balance as of December 31, 1999	
Transferred to Government Equity Participation (BPYBDS)	
Balance as of December 31, 2000	
Transferred to BPYBDS	
Total	

38. Kepentingan Non-Pengendali

38. Non-Controlling Interest

Kepentingan non-pengendali atas aset bersih:

Non-controlling interests in net assets:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024		31 Desember/December 31 2023		
	2024	2023	2023	2022	
PT Angkasa Pura II (Persero)	87.771.513	80.591.675	84.717.926		PT Angkasa Pura II (Persero)
Yayasan Pusaka	9.299.047	8.869.637	7.735.980		Yayasan Pusaka
Jumlah	97.070.560	89.461.312	92.453.906		Total

Kepentingan non-pengendali atas laba (rugi) bersih:

Net income (loss) attributable to non-controlling interests:

	31 Mei/May 31 2024		31 Desember/December 31 2023		
	2024	2023	2023	2022	
Yayasan Pusaka	431.739	811.434	1.620.948	1.532.835	Yayasan Pusaka
PT Angkasa Pura II (Persero)	7.180.233	(860.810)	(3.994.112)	(97.584.092)	PT Angkasa Pura II (Persero)
Jumlah	7.611.972	(49.376)	(2.373.164)	(96.051.257)	Total

Kepentingan non-pengendali atas jumlah laba (rugi) komprehensif:

Total comprehensive income (loss) attributable to non-controlling interests:

	31 Mei/May 31 2024		31 Desember/December 31 2023		
	2024	2023	2023	2022	
Yayasan Pusaka	429.411	811.434	1.582.123	1.469.296	Yayasan Pusaka
PT Angkasa Pura II (Persero)	7.179.837	(860.810)	(4.126.252)	(97.554.053)	PT Angkasa Pura II (Persero)
Jumlah	7.609.248	(49.376)	(2.544.129)	(96.084.757)	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

38. Kepentingan Non-pengendali (Lanjutan)

Kepentingan non-pengendali PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan kepentingan non-pengendali atas penyertaan saham pada Railink pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022.

Sedangkan untuk Yayasan Pusaka merupakan kepentingan non-pengendali atas penyertaan saham pada:

- 1) PT Reska Multi Usaha
- 2) PT Kereta Commuter Indonesia
- 3) PT KA Pariwisata
- 4) PT KA Logistik
- 5) PT KA Properti Manajemen

38. Non-controlling Interest (Continued)

Non-controlling interest of PT Angkasa Pura II (Persero) is a non-controlling interest of investment in Railink as of May 31, 2024, December 31, 2023 and 2022, respectively.

Meanwhile, Yayasan Pusaka is a non-controlling interest in this following ownership:

- 1) PT Reska Multi Usaha
- 2) PT Kereta Commuter Indonesia
- 3) PT KA Pariwisata
- 4) PT KA Logistik
- 5) PT KA Properti Manajemen

39. Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya

39. Transportation and Other Operating Revenues

	31 Mei/May 31		31 Desember/December 31		
	2024 (5 Bulan/Months)	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited) (5 Bulan/Months)	2023 (12 Bulan/Months)	2022 (12 Bulan/Months)	
Angkutan Penumpang					Passenger Transportation Services
Kelas Eksekutif (Kelas 1)	2.015.763.953	1.653.635.958	4.505.495.626	3.327.981.793	Executive Class (First Class)
Kelas Bisnis (Kelas 2)	145.643.899	114.054.962	293.899.485	190.215.545	Business Class (Second Class)
Kelas Ekonomi (Kelas 3)	2.519.151.225	1.920.417.663	5.142.430.514	3.446.297.950	Economy Class (Third Class)
Subjumlah	4.680.559.077	3.688.108.583	9.941.825.625	6.964.495.288	Subtotal
Angkutan Barang					Goods Transportation Services
Batu Bara	4.549.701.625	3.794.363.388	10.190.706.710	8.404.397.301	Coal
Peti Kemas	158.744.991	171.026.430	414.804.866	422.235.968	Container
BBM	158.236.583	152.249.190	385.496.853	372.226.102	Fuel
Parcel/ Hantaran	96.877.276	77.547.479	230.744.572	213.228.156	Parcel/ Delivery
Semen	87.266.298	97.663.685	272.245.319	270.912.109	Cement
Perkebunan	55.548.229	59.497.731	132.624.248	128.083.622	Plantation
Lainnya	11.880.220	3.631.329	19.439.801	21.949.007	Other
Subjumlah	5.118.255.222	4.355.979.232	11.646.062.369	9.833.032.265	Subtotal
Pendukung Angkutan KA					Transportation Support
Prapurna dan Bongkar-Muat	178.626.498	170.492.807	481.252.379	414.245.336	Dooring and Loading-Unloading
Angkutan KA Lainnya	162.982.613	105.946.403	212.247.737	154.951.124	Others Railway Transportation
Service on Train dan Restorasi KA	83.400.108	86.768.608	176.275.711	144.414.578	Service and Restaurant on Train
Subjumlah	425.009.219	363.207.818	869.775.827	713.611.038	Subtotal
Non-Angkutan					Non-Transportation
Pendapatan					Assets Optimization
Optimalisasi Aset (Catatan 17)	272.064.819	219.714.061	649.662.475	630.197.305	Income (Note 17)
Pekerjaan Pihak Ketiga	263.509.774	174.810.619	606.411.499	541.324.100	Third Party Services
Lainnya	254.528.464	113.403.127	524.079.321	404.166.635	Others
Subjumlah	790.103.057	507.927.807	1.780.153.295	1.575.688.040	Subtotal
Kompensasi Pemerintah					Government Compensation
Pendapatan Pelayanan Publik (PSO)	2.254.207.922	1.462.022.415	2.919.969.049	3.242.766.866	Public Service Obligation (PSO)
Pemeliharaan					Infrastructure Maintenance
Infrastruktur (IMO)	589.059.464	185.808.235	468.710.820	461.331.527	Operation (IMO)
Angkutan Perintis	35.932.756	49.504.325	137.790.056	176.146.640	Pioneer Transportation
Subjumlah	2.879.200.142	1.697.334.975	3.526.469.925	3.880.245.033	Subtotal
Jumlah	13.893.126.717	10.612.558.415	27.764.287.041	22.967.071.664	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

39. Pendapatan Angkutan dan Usaha Lainnya (Lanjutan)

Pendapatan jasa angkutan penumpang merupakan pendapatan dari hasil penjualan tiket perjalanan kereta api jarak jauh dan jarak dekat.

Pendapatan jasa angkutan barang merupakan pendapatan atas jasa angkutan barang dengan menggunakan gerbong dan peti kemas.

Pendapatan pendukung angkutan merupakan pendapatan yang diperoleh selain jasa angkutan barang dan penumpang namun masih berhubungan dengan aktivitas pengangkutan, meliputi: suplesi, bagasi, angkutan KA lainnya serta pendapatan penunjang operasional, pendapatan jasa pengangkutan lanjutan (antara stasiun kereta api dengan gudang barang), jasa terminal peti kemas dan jasa pengawalan.

Pendapatan optimalisasi aset merupakan pendapatan sewa menyewa properti di dalam dan di luar stasiun.

Pendapatan kompensasi Pemerintah merupakan pendapatan kompensasi yang diperoleh atas pelaksanaan penugasan dari Pemerintah untuk pelayanan umum, pemeliharaan infrastruktur, serta pengembangan jalur kereta perintis.

39. Transportation and Other Operating Revenues (Continued)

Passenger transportation services revenue represents revenue generated from ticket sales of long and short distance trains.

Freight transportation services revenue represents revenue generated from freight transportation by carriages and containers.

Revenue of transportation supports represents revenue generated from transportation activities beside of freight and passenger transportation services, such as: suplesi, baggage, operational supports, extended transportation service (connecting between railway station and warehouse), container terminal service and safeguard service.

Assets optimization income represents income generated from property leases inside and outside of the station.

Government compensation income represents compensation income obtained for implementation of assignments from the Government for public services, infrastructures maintenance, and pioneer railways track development.

40. Beban Angkutan dan Usaha Lainnya

40. Transportation and Other Operating Cost

	31 Mei/May 31		31 Desember/December 31		
	2024 (5 Bulan/Months)	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited) (5 Bulan/Months)	2023 (12 Bulan/Months)	2022 (12 Bulan/Months)	
Beban Operasi Langsung					Direct Operating Expenses
BBM dan Listrik Aliran Atas Pegawai	1.674.144.101	1.695.643.574	3.999.527.028	3.039.591.426	Fuel and Flux Over Electricity Employees
Perawatan Sarana	1.220.709.478	1.012.323.617	2.980.866.341	2.358.031.804	Rolling Stock Maintenance
Pendukung Operasional dan Angkutan	588.241.045	449.945.130	1.350.236.730	976.944.133	Operational and Railway Support
Penyusutan Sarana	394.260.265	317.173.263	826.075.525	798.624.008	Rolling Stock Depreciation
Penyusutan Fasilitas Dipo dan Balai Yasa	68.041.725	52.067.056	134.839.964	119.015.433	Dipo and Balai Yasa Facilities Depreciation
Asuransi	54.238.407	33.047.162	81.715.184	68.799.082	Insurance
Bongkar Muat	28.834.090	21.545.538	65.045.600	55.896.598	Loading-Unloading
Subjumlah	5.348.801.055	4.785.047.186	12.601.840.622	10.085.760.315	Subtotal
Beban Operasi Tidak Langsung					Indirect Operating Expenses
Pegawai	984.745.915	982.736.170	2.474.453.496	2.103.473.439	Employees
Perawatan dan Operasi Prasarana	639.322.943	571.982.523	1.756.622.456	1.313.457.894	Infrastructure Operation and Maintenance
Beban Penggunaan Prasarana (TAC)	574.572.453	185.808.235	611.380.123	470.828.098	Track Access Charge (TAC)
Penyusutan Prasarana dan Amortisasi	433.127.750	175.057.533	661.816.789	434.188.506	Infrastructure Depreciation and Amortization
Beban Keamanan dan Kebersihan	288.732.691	281.494.366	790.930.267	704.827.257	Security and Cleaning Expense
Beban Optimalisasi Aset (Catatan 17)	213.768.765	131.754.772	511.938.878	648.309.642	Asset Optimization Expense (Note 17)
Beban Stasiun	91.293.300	77.246.532	197.380.905	104.459.793	Railway Station Expense
Perawatan Prasarana Pendukung Angkutan KA	29.153.394	7.351.580	69.908.171	64.988.731	Transportation Supporting Facility Maintenance
Subjumlah	3.254.717.211	2.413.431.711	7.074.431.085	5.844.533.360	Subtotal
Jumlah	8.603.518.266	7.198.478.897	19.676.271.707	15.930.293.675	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

41. Beban Usaha

41. Operating Expenses

	31 Mei/May 31		31 Desember/December 31		
	2024 (5 Bulan/Months)	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited) (5 Bulan/Months)	2023 (12 Bulan/Months)	2022 (12 Bulan/Months)	
Pegawai	996.908.034	985.268.118	2.870.874.456	2.466.173.859	Employee
Perlengkapan dan Operasional Kantor	192.050.104	109.305.739	214.509.157	181.311.576	Office Equipment and Operations
Pemasaran	55.328.080	38.392.554	238.721.485	177.515.152	Marketing
Penurunan Nilai Aset Keuangan	48.563.497	82.472.579	34.265.549	50.772.847	Impairment Financial Assets
Teknologi dan Sistem Informasi	43.816.779	41.645.243	191.216.621	144.107.282	Technology and Information System
Penyusutan Fasilitas	42.999.791	59.527.030	99.798.926	129.430.614	Facilities Depreciation
Administrasi	39.308.928	37.666.732	124.309.044	113.740.157	Administration
Rapat/ Akomodasi	32.196.951	20.591.757	135.391.442	118.755.270	Meeting/ Accommodation
Pendidikan dan Pelatihan	28.812.156	40.656.056	149.609.220	142.533.291	Education and Training
Pajak Bumi dan Bangunan	14.435.812	5.926.964	87.764.692	78.113.981	Land and Building Tax
Konsultansi, Penelitian dan Pengembangan	16.105.897	13.404.871	80.752.194	62.078.041	Consultant, Research and Development
Jumlah	1.510.526.028	1.434.857.643	4.227.212.786	3.664.532.070	Total

42. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi

42. Balance and Nature of Transaction with Related Parties

Perusahaan merupakan bagian dari suatu kelompok usaha sebagaimana dijelaskan di bawah, dalam menjalankan operasinya berhubungan dan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Mengenai hubungan tersebut, tidak terdapat perbedaan syarat dan kondisi atas transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga.

The Company is a part of a business group as described below in performing its operations and transactions with related parties. Regarding this relationship, there are no differences in terms and conditions of transactions made with third parties.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi sebagai berikut:

Nature of relationship with a related parties are as follows:

- Pemerintahan Republik Indonesia diwakili oleh Menteri BUMN merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN lain memiliki hubungan afiliasi melalui penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia.
- Perusahaan menempatkan dan meminjam dana pada bank-bank yang dimiliki Pemerintah dengan persyaratan dan tingkat bunga normal sebagaimana yang berlaku untuk nasabah pihak ketiga.
- Perusahaan yang menandatangani perjanjian dalam rangka usaha, dengan BUMN-BUMN lain merupakan entitas anak BUMN serta badan-badan lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang.
- Memiliki anggota pengurus yang sama dengan entitas anak, yaitu Direksi Perusahaan yang juga merupakan Komisaris pada entitas anak.
- Dewan Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Grup.

- The Government of Republic of Indonesia represented by the Minister of State-Owned Enterprises is the Company's shareholder and other state affiliates through a capital investment of the Government of Republic of Indonesia.
- The Company places and borrows funds from banks owned by the Government with the terms and interest rates normally applicable to third parties.
- The Company entered into business agreement with other state-owned enterprises or its subsidiaries or other authorized government's agencies.
- Has the same management member in subsidiary, as the Company's Board of Directors who are also subsidiary's Commissioners.
- The Board of Commissioners and Directors are member of the key management of the Group.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

42. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

Berikut adalah transaksi dengan pihak berelasi yang material:

Below are the material transactions with related parties:

Pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Nature of Relationship	Jenis Transaksi/ Nature of Transaction
Pemerintah Republik Indonesia	Pemegang Saham melalui Kementerian BUMN/ Shareholders through the Ministry of SOEs	Hak Konsesi atas Prasarana Kereta Api, Pemberian Pinjaman Jangka Panjang PEN, dan Perpajakan/ Railway Infrastructure of Concession Rights, provide long term loans PEN and Taxation
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan Dana atas Penyelenggaraan angkutan PSO, Perintis, dan Perawatan IMO, Pembayaran Bunga, dan Pembayaran TAC/ Receipts compensation for Public Service Liabilities, Pioneer Compensation and IMO, Interest Payment and TAC Payment
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi/ Placement Current Account, Time Deposit, Restricted Funds, Syndicated Loans Facility, Finance cost, Finance income and Pension Fund
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi, Persewaan Lahan, Biaya Keuangan, Pendapatan Bunga, Pendapatan Sewa, Dana Pensiun, dan Dana Kesehatan Pegawai/ Placement Current Account, Time Deposit, Restricted Funds, Working Capital Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Land lease, Property lease, Finance cost, Interest income, Lease income, Pension Fund and Employee Healthy Fund
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Fasilitas Kredit Modal Kerja, Fasilitas Kredit Sindikasi, Persewaan Lahan, Biaya Keuangan, Asuransi Pegawai, Pendapatan Bunga, Pendapatan Sewa dan Dana Pensiun/ Placement Current Account, Time Deposit, Restricted Funds, Working Capital Credit Facility, Syndicated Loans Facility, Land lease, Finance cost, Employee Insurance, Interest income, Lease income and Pension Fund
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan Giro, Deposito Berjangka, Hak Konsesi atas Prasarana Kereta Api, Pemberian Pinjaman Jangka Panjang PEN, dan Perpajakan/ Railway Infrastructure of Concession Rights, provide long term loans PEN and Taxation
PT BPRS Baiturridha Pusaka	Entitas Asosiasi/ Associate	Penempatan Giro dan Deposito Berjangka/ Placement Current Account and Time Deposit
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ Receipts from Transportation Services and Supporting Services
PT Pertamina (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pembelian Bahan Bakar Minyak dan Jasa Pendukungnya, Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Sewa Lahan/ Purchase of fuel and lubricants for infrastructure operations at maintenance stations and railway facilities
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ Receipts from Transportation Services and Supporting Services
PT Industri Kereta Api (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pembelian Aset Sarana, Pembelian Suku Cadang, Jasa Perawatan Sarana, Penerimaan Jasa Teknis Sarana, dan Jasa Angkutan/ Purchase of Rolling Stock Assets, Spare Parts, Rolling Stock Maintenance Services, Receipts Rolling Stock Technical Services, and Transportation Services
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Persewaan Lahan/ Land Lease
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ Receipts from Transportation Services and Supporting Services
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ Receipts from Transportation Services and Supporting Services
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Persewaan Lahan/ Land Lease
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Persewaan Lahan, Pembayaran Listrik Operasional dan Listrik Aliran Atas/ Land lease, Payment of Operation Electricity and Flux Over Electricity
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Jasa Angkutan dan Jasa Pendukung/ Receipts from Transportation Services and Supporting Services
PT Biofarma (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Persewaan Lahan/ Receipts from Land Lease
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Kontraktor dalam Pembangunan Proyek LRT Jabodebek/ Contractor for construction of Jabodebek Light Rail Transit infrastructure
PT Aviastri Pariwisata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pembayaran Persewaan Lahan dan Utilitas Bandara/ Payment of Land Lease and Airport Utility
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pembayaran Jasa Konsultasi/ Payment of Consultation Service
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pembelian Suku Cadang Sarana/ Purchase of Spare Parts of Rolling Stock
PT LEN Industri (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pembelian Suku Cadang Prasarana/ Purchase of Infrastructure spare parts
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pembayaran Tiket Pesawat/ Airline Ticket Payment
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Fasilitas Kredit Sindikasi dan Biaya Keuangan/ Syndicated Credit Facility and Finance Cost
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Fasilitas Kredit Sindikasi dan Biaya Keuangan/ Syndicated Credit Facility and Finance Cost
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Fasilitas Pinjaman Subordinasi dan Biaya Keuangan/ Subordination Loans Facility and Finance Cost
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Penerimaan dari Pekerjaan Alih Daya/ Receipts from Outsourcing Employee
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Asuransi Pegawai/ Employee Insurance
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Ventura Bersama/ Joint Venture
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Piutang Lain-lain/ Other Receivables
Perum PPD	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by Central Government of the Republic of Indonesia	Pembayaran Jasa Telekomunikasi/ Payment for Telecommunication Services
		Penerimaan Jasa Angkutan/ Receipts from Transportation Services

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

42. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31	
		2023	2022
Bank (Catatan 5)			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.347.110.734	1.376.602.397	1.805.804.641
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	714.368.955	693.678.680	1.552.301.430
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	577.298.752	1.346.496.081	1.468.404.783
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	38.863.813	33.198.909	66.976.823
PT BPRS Baiturridha Pusaka	416.795	6.911.327	1.143.975
Jumlah Bank (Rupiah)	3.678.059.049	3.456.887.394	4.894.631.652
% Terhadap Jumlah Aset	4,11%	4,25%	6,84%
Deposito (Catatan 5)			
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	311.167.070	50.000.000	55.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	120.000.000	305.000.000	50.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	90.000.000	150.000.000	207.310.000
PT BPRS Baiturridha Pusaka	14.000.000	6.000.000	6.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.718.144	875.615.360	80.200.000
Jumlah Deposito	537.885.214	1.386.615.360	398.510.000
% Terhadap Jumlah Aset	0,60%	1,70%	0,56%
Dana Dibatasi			
Penggunaannya (Catatan 6)			
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.240.101.182	1.012.638.903	3.219.724.534
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	830.325.757	845.707.566	2.173.167.815
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	622.852.823	702.533.689	198.001.969
Jumlah Dana Dibatasi Penggunaannya	2.693.279.762	2.560.880.158	5.590.894.318
% Terhadap Jumlah Aset	3,01%	3,15%	7,81%
Piutang Usaha (Catatan 7)			
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk	1.083.747.989	968.595.805	832.018.463
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	300.576.730	187.421.191	416.680
PT Pertamina (Persero)	41.425.164	42.561.456	44.583.938
PT Kereta Cepat Indonesia China	40.312.560	2.901.356	--
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	22.303.192	38.589.904	27.574.218
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)	15.219.874	8.727.229	9.521.422
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	6.578.337	2.724.885	372.089
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.714.603	2.606.264	1.549.691
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	4.176.078	4.100.904	3.069.913
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	3.653.808	827.433	13.382.380
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.505.013	1.706.446	1.885.589
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.201.463	753.896	738.022
PT Biofarma (Persero)	1.427.810	1.427.810	1.782.455
PT Industri Kereta Api (Persero)	--	460.829	16.011.636
PT Pupuk Indonesia (Persero)	--	3.413	1.541.046
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	--	--	1.507.915
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000.000)	5.739.987	3.557.124	7.325.187
Jumlah Piutang Usaha	1.535.582.608	1.266.965.945	963.280.644
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(13.276.843)	(13.851.143)	(28.650.899)
Jumlah - Bersih	1.522.305.765	1.253.114.802	934.629.745
% Terhadap Jumlah Aset	1,70%	1,54%	1,31%

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31	
		2023	2022
Piutang Lain-lain (Catatan 8)			
Lancar			
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek	8.183.000	8.183.000	--
Tidak Lancar			
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia	7.214.834.232	--	--
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk	103.700.228	103.700.228	103.700.228
PT Pertamina (Persero)	3.808.156	3.808.156	3.808.156
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	1.917.139	1.917.139	1.917.139
Perum PPD	500.000	500.000	500.000
Jumlah Piutang Lain-lain	7.332.942.755	118.108.523	109.925.523
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(109.925.523)	(109.925.523)	(109.925.523)
Jumlah Bersih	7.223.017.232	8.183.000	--
% Terhadap Jumlah Aset	8,07%	0,01%	0,00%

Bank (Note 5)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT BPRS Baiturridha Pusaka
Total Bank (IDR)
% to Total Assets

Time Deposits (Note 5)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT BPRS Baiturridha Pusaka
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Total Time Deposits
% to Total Assets

Restricted Fund (Note 6)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Total Restricted Fund
% to Total Assets

Trade Receivables (Note 7)
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Ministry of Transportation Republic Indonesia
PT Pertamina (Persero)
PT Kereta Cepat Indonesia China
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Biofarma (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Others (Each Under Rp1,000,000)
Total Trade Receivables
Allowance for Impairment Losses
Total - Net
% to Total Assets

Other Receivable (Note 8)
Current
PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek
Non-current
PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
Perum PPD
Total Other Receivables
Allowance for Impairment Losses
Total Net
% to Total Assets

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

42. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan piutang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan utama Grup.

Other receivables to related parties represent receivables that are not directly related to Group's operational activities.

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Pendapatan Masih Akan Diterima (Catatan 10)				Accrued Income (Note 10)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	2.818.795.055	616.070.541	164.662.291	Ministry of Transportation of Republic Indonesia
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk	--	--	719.566.683	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Subjumlah	2.818.795.055	616.070.541	884.228.974	Subtotal
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(194.519.848)	(177.034.197)	(164.662.291)	Allowance for Impairment Losses
Jumlah-Bersih	2.624.275.207	439.036.344	719.566.683	Total-Net
% Terhadap Jumlah Aset	2,93%	0,54%	1,01%	% to Total Assets

Pada tanggal 31 Mei 2024, pendapatan masih akan diterima dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia merupakan subsidi yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka memberikan layanan angkutan kereta api kepada masyarakat, kompensasi atas *Infrastructure Maintenance Operation (IMO)*, dan kompensasi kewajiban pelayanan publik (PSO) yang merupakan tagihan kepada Pemerintah atas kompensasi PSO.

As of May 31, 2024, accrued income from Ministry of Transportation of Republic Indonesia consist of subsidies provided by the Government in order to provide rail transportation services to the public, compensation for *Infrastructure Maintenance Operation (IMO)* compensation for public service obligations (PSO).

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Aset Tidak Lancar - Lainnya Aset Keuangan (Catatan 21)				Other Non - Current Asset Financial Assets (Note 21)
Dana Pensiun Pegawai				Pension Funds
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	48.917.753	48.674.704	53.367.617	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	44.902.704	34.348.005	13.708.174	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	7.882.318	8.236.224	9.318.841	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Subjumlah	101.702.775	91.258.933	76.394.632	Subtotal
Dana Kesehatan Pegawai				Employee Healthy Fund
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	61.354.623	60.679.342	53.402.087	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Cadangan Tantiem				Tantiem's Reserve Fund
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7.640.255	7.592.201	--	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	170.697.653	159.530.476	129.796.719	Total
% Terhadap Jumlah Aset	0,19%	0,20%	0,18%	% to Total Assets

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Utang Usaha (Catatan 22)				Trade Payables (Note 22)
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	641.647.762	118.601.658	432.514.749	Ministry of Transportation of Republic Indonesia
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	112.994.199	4.190.116.201	15.603.669	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)	72.099.452	139.791.441	138.011.384	PT Pertamina (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	54.438.803	80.688.636	106.089.280	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT LEN Industri (Persero)	25.446.382	89.732.279	55.985.708	PT LEN Industri (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)	24.092.696	303.857.994	48.897.338	PT Industri Kereta Api (Persero)
Perum Damri	14.685.686	24.236	--	Perum Damri
PT Taspen (Persero)	5.140.197	--	--	PT Taspen (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	4.935.612	13.755.064	4.781.184	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	4.666.265	13.523.811	9.178.664	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Virama Karya (Persero)	1.898.643	684.936	--	PT Virama Karya (Persero)
PT Barata Indonesia (Persero)	519.686	3.045.507	10.602.695	PT Barata Indonesia (Persero)
PT Bio Farma (Persero)	2.391	1.434.941	753.959	PT Bio Farma (Persero)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	--	13.309.743	--	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	--	2.887.642	51.335	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Yodya Karya (Persero)	--	1.202.548	--	PT Yodya Karya (Persero)
PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)	--	--	53.128.122	PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	3.085.536	3.642.596	5.116.594	Others (Each Under Rp1 Billion)
Jumlah Utang Usaha	965.653.310	4.976.299.233	880.714.681	Total Trade Payables
% Terhadap Jumlah Liabilitas	1,68%	9,86%	1,05%	% to Total Liabilities

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

42. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Pinjaman Jangka Pendek (Catatan 25)				Short-term Loans (Note 25)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.335.507.933	950.000.000	60.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	296.727.039	--	200.000.000	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	86.737.809	38.523.138	500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Jumlah Pinjaman Jangka Pendek	1.718.972.781	988.523.138	760.000.000	Total Short-term Loans
% Terhadap Jumlah Liabilitas	3,00%	1,96%	1,79%	% to Total Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang (Catatan 29)				Long-term Loans (Note 29)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4.972.101.884	3.827.952.281	3.441.548.447	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.351.174.182	3.351.277.799	3.173.856.095	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.886.388.720	3.351.782.162	3.174.463.240	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	2.070.230.480	2.079.335.804	1.797.525.062	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	170.489.000	198.044.000	246.956.000	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	22.916.396	23.425.649	24.444.156	Ministry of Finance Republic Indonesia
Biaya Transaksi yang belum Diamortisasi	(2.152.805)	(2.472.898)	(3.241.123)	Unamortized Cost of Transaction
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang	15.471.147.857	12.829.344.797	11.855.551.877	Total Long-term Loans
% Terhadap Jumlah Liabilitas	26,96%	25,42%	27,89%	% to Total Liabilities
Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun (Catatan 29)				Portion of Long-term Loans Maturing within One Year (Note 29)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	310.590.840	291.162.367	272.940.734	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	310.488.058	291.059.585	272.837.952	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	215.623.367	191.337.775	153.419.734	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	103.801.580	89.230.225	55.884.000	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	66.132.000	66.132.000	48.912.000	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	509.253	1.018.507	1.018.507	Ministry of Finance Republic Indonesia
Jumlah Bagian Pinjaman Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1.007.145.098	929.940.459	805.012.927	Total Current Maturities of Long-term Loan
% Terhadap Jumlah Liabilitas	1,76%	1,84%	1,89%	% to Total Liabilities
Pinjaman Program PEN (Catatan 28)				PEN Program Loan (Note 28)
Pemerintah Republik Indonesia	2.843.750.000	3.062.500.000	3.500.000.000	Government of the Republic Indonesia
% Terhadap Jumlah Liabilitas	4,96%	6,07%	8,24%	% to Total Liabilities

Rincian pendapatan dari pihak berelasi sebagai berikut:

The details of revenues from related parties are as follows:

	31 Mei/ May 31		31 Desember/ December 31		
	2024 (5 Bulan/Months)	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited) (5 Bulan/Months)	2023 (12 Bulan/Months)	2022 (12 Bulan/Months)	
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk	3.254.251.755	2.817.442.780	7.508.411.901	6.671.067.104	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) - PT Bukit Asam (Persero) Tbk
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	2.879.200.142	1.697.334.975	3.526.469.925	3.880.245.033	Ministry of Transportation of Republic Indonesia
PT Pertamina (Persero)	158.236.583	152.249.190	385.496.853	372.226.102	PT Pertamina (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	56.173.594	40.432.676	77.635.245	27.255.523	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	37.463.682	36.892.293	45.405.301	53.262.744	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	35.409.260	42.982.060	83.083.338	79.527.257	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	33.719.765	29.194.443	82.221.857	95.786.983	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Perkebunan Nusantara IV	16.748.880	13.377.121	36.333.590	33.732.089	PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - PT Perkebunan Nusantara IV
PT Kereta Cepat Indonesia China	15.260.635	--	--	--	PT Kereta Cepat Indonesia China
PT Pupuk Indonesia (Persero)	9.375.470	8.992.366	11.827.728	6.873.776	PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Industri Kereta Api (Persero)	6.648.262	1.041.689	2.104.726	21.918.326	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	4.876.585	621.430	13.371.646	23.491.554	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	3.832.802	623	2.080.983	720.140	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	3.418.243	3.208.180	6.399.991	959.874	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Biofarma (Persero)	1.928.920	871.906	1.932.594	8.087.537	PT Biofarma (Persero)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar)	3.682.460	2.739.588	4.835.123	20.679.272	Others (Each Under Rp1 Billion)
Jumlah Pendapatan	6.520.227.038	4.847.381.320	11.787.610.801	11.295.833.314	Total Revenues
% Terhadap Jumlah Pendapatan	46,31%	45,11%	42,00%	48,89%	% to Total Revenues

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

42. Saldo dan Sifat Transaksi dengan Pihak Berelasi (Lanjutan)

Rincian beban dari pihak berelasi sebagai berikut:

	31 Mei/ May 31		31 Desember/ December 31	
	2024 (5 Bulan/Months)	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited) (5 Bulan/Months)	2023 (12 Bulan/Months)	2022 (12 Bulan/Months)
PT Pertamina (Persero)	1.553.648.501	1.610.534.728	3.755.518.455	2.872.860.277
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia	574.572.453	185.808.235	611.380.123	470.828.098
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	190.667.393	156.991.407	406.574.040	372.698.607
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	90.872.663	53.844.922	184.414.530	120.196.959
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	87.919.473	77.481.254	121.590.960	114.197.821
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	59.483.530	64.460.240	156.105.647	120.279.637
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	58.672.783	53.842.719	148.451.127	90.029.723
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	41.482.163	77.634.516	173.777.924	123.091.259
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	35.423.765	10.054.663	19.120.775	22.296.937
PT Industri Kereta Api (Persero)	28.319.036	21.479.735	54.186.270	60.831.293
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	3.928.841	4.246.159	11.965.185	46.349.527
PT Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero)	1.317.555	1.605.162	4.113.742	44.084.270
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	--	--	11.993.241	4.321.147
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	--	--	3.448.352	1.512.705
PT Semen Indonesia (Persero)	--	--	1.497.209	--
Lain-lain (Masing-masing dibawah Rp1 Milyar)	1.078.668	2.839.149	3.979.115	18.874.707
Jumlah Beban	2.727.386.824	2.320.822.889	5.668.116.695	4.482.452.967
% Terhadap Beban	24,22%	24,49%	17,31%	19,33%

42. Balance and Nature of Transaction with Related Parties (Continued)

The details of expenses from related parties are as follows:

PT Pertamina (Persero)	PT Pertamina (Persero)
Ministry of Transportation of Republic Indonesia	Ministry of Transportation of Republic Indonesia
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Industri Kereta Api (Persero)	PT Industri Kereta Api (Persero)
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
PT Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero)	PT Aviawi Pariwisata Indonesia (Persero)
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Indonesia (Persero)	PT Semen Indonesia (Persero)
Others	Others
Under Rp1 Billion	Under Rp1 Billion
Total Expenses	Total Expenses
% to Cost of Revenues	% to Cost of Revenues

Kompensasi manajemen kunci:

	31 Mei/ May 31		31 Desember/ December 31	
	2024 (5 Bulan/Months)	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited) (5 Bulan/Months)	2023 (12 Bulan/Months)	2022 (12 Bulan/Months)
Direksi				
Imbalan Kerja Jangka Pendek	21.701.082	18.108.709	62.893.465	70.758.141
Imbalan Pascakerja	529.959	539.765	4.360.002	4.973.657
Jumlah	22.231.041	18.648.474	67.253.467	75.731.798
Dewan Komisaris				
Imbalan Kerja Jangka Pendek	10.578.219	9.376.903	33.031.914	28.614.604
Imbalan Pascakerja	1.334.198	1.580.919	2.027.048	2.369.877
Jumlah	11.912.417	10.957.822	35.058.962	30.984.481

Key management compensation:

Directors	Directors
Short-term Benefits	Short-term Benefits
Post-employment Benefits	Post-employment Benefits
Total	Total
Board of Commissioners	Board of Commissioners
Short-term Benefits	Short-term Benefits
Post-employment Benefits	Post-employment Benefits
Total	Total

43. Penghasilan Keuangan

	31 Mei/May 31		31 Desember/December 31	
	2024 (5 Bulan/Months)	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited) (5 Bulan/Months)	2023 (12 Bulan/Months)	2022 (12 Bulan/Months)
Pendapatan Bunga atas Pinjaman Jangka Panjang	73.980.226	--	--	--
Jasa Giro	51.994.693	72.641.058	150.723.754	106.536.898
Penyesuaian Nilai Kini PEN	42.275.688	45.458.108	109.099.460	17.662.552
Deposito Berjangka	18.039.869	15.276.379	41.899.695	15.315.494
Jumlah	186.290.476	133.375.545	301.722.909	139.514.944

Interest Income of Long-term Loans	Interest Income of Long-term Loans
Interest on Current Accounts	Interest on Current Accounts
PEN Present Value Adjustment	PEN Present Value Adjustment
Time Deposits	Time Deposits
Total	Total

44. Beban Keuangan

	31 Mei/May 31		31 Desember/December 31	
	2024 (5 Bulan/Months)	2023 (Tidak Diaudit/ Unaudited) (5 Bulan/Months)	2023 (12 Bulan/Months)	2022 (12 Bulan/Months)
Pinjaman Jangka Panjang	688.837.485	188.515.454	755.168.080	385.003.065
Obligasi	148.610.000	148.610.000	356.744.000	361.122.500
PEN	68.277.344	62.404.514	157.621.528	88.715.278
Pinjaman Jangka Pendek	45.128.338	39.410.187	81.285.053	103.741.014
Penyesuaian Nilai Kini PEN	42.275.688	45.458.108	109.099.460	17.662.552
Sukuk	16.226.604	16.226.604	38.943.850	16.226.604
Liabilitas Sewa (Catatan 20)	3.305.994	1.788.782	8.576.995	8.101.140
Jumlah	1.012.661.453	502.413.649	1.507.438.966	980.572.153

Finance Cost	Finance Cost
Long-term Loans	Long-term Loans
Bonds	Bonds
PEN	PEN
Short-term Loans	Short-term Loans
PEN Present Value Adjustment	PEN Present Value Adjustment
Sukuk	Sukuk
Lease Liability (Note 20)	Lease Liability (Note 20)
Total	Total

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

45. Laba per Saham Dasar

45. Basic Earning per Share

	31 Mei/May 31		31 Desember/December 31		
	2024	2023	2023	2022	
	(5 Bulan/Months)	(Tidak Diaudit/ Unaudited) (5 Bulan/Months)	(12 Bulan/Months)	(12 Bulan/Months)	
Labanya Periode/Tahun Berjalan yang Dapat Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk	1.190.242.766	1.098.423.405	1.873.921.301	1.782.040.477	Profit for the Period/Year Attributable to Owners of the Parent Entity
Rata-rata Tertimbang Saham Beredar	22.368.743	22.219.702	22.219.702	19.168.743	Weighted average number of shares
Labanya per Saham Dasar	53	49	84	93	Basic Earning per share

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi
dilusi saham, sehingga labanya per saham dasar
sama dengan labanya per saham dilusi.

The Company did not have potential dilutive
ordinary shares, thus basic earnings per share
are the same as the dilutive earnings per
share.

46. Segmen Operasi

46. Operating Segment

Informasi menurut segmen usaha adalah
sebagai berikut:

Information by business segments as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024						
	Jasa Angkutan/ Transportation	Jasa Non Angkutan/ Non transportation	Konstruksi/ Construction	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminated	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan Usaha	13.103.023.661	790.103.056	135.412.371	14.028.539.088	--	14.028.539.088	Revenues
Antar Segmen	450.963.950	1.149.731.875	--	1.600.695.825	(1.600.695.825)	--	Inter Segment
Jumlah pendapatan	13.553.987.611	1.939.834.931	135.412.371	15.629.234.913	(1.600.695.825)	14.028.539.088	Total Revenues
Beban Operasi	(9.048.673.535)	(1.065.370.759)	(135.412.371)	(10.249.456.665)	--	(10.249.456.665)	Operating Expenses
Antar Segmen	(1.067.756.619)	(532.939.206)	--	(1.600.695.825)	1.600.695.825	--	Inter Segment
Jumlah Beban	(10.116.430.154)	(1.598.309.965)	(135.412.371)	(11.850.152.490)	1.600.695.825	(10.249.456.665)	Total Expenses
Hasil Segmen	3.437.557.457	341.524.966	--	3.779.082.423	--	3.779.082.423	Segment Result
Pendapatan (Beban) yang tidak dapat Dialokasikan							Revenues (Expenses) are not Allocated
Pendapatan Keuangan						186.290.476	Finance Incomes
Beban Keuangan						(1.012.661.453)	Finance Cost
Bagian Rugi Bersih Ventura						(1.505.375.882)	Joint Venture
Selisih Kurs						170.527.630	Foreign Exchanges
Lain-lain - Neto Manfaat (Beban)						(163.258.557)	Other - Net
Pajak - Neto						(256.749.899)	Tax Benefit (Expenses) - Net
Labanya setelah Pajak Penghasilan						1.197.854.738	Income after Income Taxes
Kepentingan Nonpengendali						(7.611.972)	Non-Controlling Interest
Labanya Diatribusikan Pemilik Induk						1.190.242.766	Income Attributable to Parent Entity
Labanya Komprehensif Distribusikan Pemilik Induk						1.258.418.379	Comprehensive Income Attributable to Parent Entity
Laporan Posisi Keuangan							Financial Position
Aset Segmen	59.713.798.219	926.635.473	32.574.027.370	93.214.461.062	(3.665.255.089)	89.549.205.973	Segmented Assets
Liabilitas Segmen	36.564.747.865	374.811.940	23.021.390.930	59.960.950.735	(2.583.909.630)	57.377.041.105	Segmented Liabilities

	31 Mei 2023/ May 31, 2023						
	Jasa Angkutan/ Transportation	Jasa Non Angkutan/ Non transportation	Konstruksi/ Construction	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminated	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan Usaha	10.104.630.610	507.927.805	339.021.316	10.951.579.731	--	10.951.579.731	Revenues
Antar Segmen	359.873.035	1.241.562.178	--	1.601.435.213	(1.601.435.213)	--	Inter Segment
Jumlah pendapatan	10.464.503.645	1.749.489.983	339.021.316	12.553.014.944	(1.601.435.213)	10.951.579.731	Total Revenues
Beban Operasi	(7.854.924.421)	(778.412.119)	(339.021.316)	(8.972.357.856)	--	(8.972.357.856)	Operating Expenses
Antar Segmen	(828.127.465)	(773.307.748)	--	(1.601.435.213)	1.601.435.213	--	Inter Segment
Jumlah Beban	(8.683.051.886)	(1.551.719.867)	(339.021.316)	(10.573.793.069)	1.601.435.213	(8.972.357.856)	Total Expenses
Hasil Segmen	1.781.451.759	197.770.116	--	1.979.221.875	--	1.979.221.875	Segment Result
Pendapatan (Beban) yang tidak dapat Dialokasikan							Revenues (Expenses) are not Allocated
Pendapatan Keuangan						133.375.545	Finance Incomes
Beban Keuangan						(502.413.649)	Finance Cost
Bagian Rugi Bersih Ventura						(141.716.712)	Joint Venture
Selisih Kurs						(90.088.052)	Foreign Exchanges
Lain-lain - Neto Manfaat (Beban)						19.336.152	Other - Net
Pajak - Neto						(299.341.130)	Tax Benefit (Expenses) - Net
Labanya setelah Pajak Penghasilan						1.098.374.029	Income after Income Taxes
Kepentingan Nonpengendali						49.376	Non-Controlling Interest
Labanya Diatribusikan Pemilik Induk						1.098.423.405	Income Attributable to Parent Entity
Labanya Komprehensif Distribusikan Pemilik Induk						1.055.116.460	Comprehensive Income Attributable to Parent Entity
Laporan Posisi Keuangan							Financial Position
Aset Segmen	47.433.896.898	1.122.575.066	26.377.124.294	75.293.596.258	(3.007.733.134)	72.285.863.124	Segmented Assets
Liabilitas Segmen	28.293.189.748	598.624.141	14.626.849.813	43.518.663.702	(1.797.641.080)	41.721.022.622	Segmented Liabilities

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

46. Segmen Operasi (Lanjutan)

46. Operating Segment (Continued)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023						
	Jasa Angkutan/ Transportation	Jasa Non Angkutan/ Non transportation	Konstruksi/ Construction	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminated	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan Usaha	25.984.133.746	1.780.153.295	7.342.248.533	35.106.535.574	--	35.106.535.574	Revenues
Antar Segmen	1.030.285.369	2.812.106.480	--	3.842.391.849	(3.842.391.849)	--	Inter Segment
Jumlah pendapatan	27.014.419.115	4.592.259.775	7.342.248.533	38.948.927.423	(3.842.391.849)	35.106.535.574	Total Revenues
Beban Operasi	(21.625.791.586)	(2.277.692.907)	(7.342.248.533)	(31.245.733.026)	--	(31.245.733.026)	Operating Expenses
Antar Segmen	(2.301.672.581)	(1.540.719.258)	--	(3.842.391.849)	3.842.391.849	--	Inter Segment
Jumlah Beban	(23.927.464.177)	(3.818.412.165)	(7.342.248.533)	(35.088.124.875)	3.842.391.849	(31.245.733.026)	Total Expenses
Hasil Segmen	3.086.954.938	773.847.610	--	3.860.802.548	--	3.860.802.548	Segment Result
Pendapatan (Beban) yang tidak dapat Dialokasikan							Revenues (Expenses) are not Allocated
Pendapatan Keuangan						301.722.909	Finance Incomes
Beban Keuangan						(1.507.438.966)	Finance Cost
Bagian Rugi							Net Loss of
Bersih Ventura						(507.073.954)	Joint Venture
Selisih Kurs						(57.275.927)	Foreign Exchanges
Lain-lain - Neto						156.750.557	Other - Net
Manfaat (Beban)							Tax Benefit
Pajak - Neto						(375.939.030)	(Expenses) - Net
Laba setelah Pajak Penghasilan						1.871.548.137	Income after Income Taxes
Kepentingan							Non-Controlling
Non-pengendali						2.373.164	Interest
Laba Diatribusikan						1.873.921.301	Income Attributable to Parent Entity
Pemilik Induk							Comprehensive
Laba Komprehensif							Income Attributable
Diatribusikan							to Parent Entity
Pemilik Induk						1.828.945.530	Statement of
Laporan Posisi Keuangan							Financial Position
Asst Segmen	49.202.600.655	825.751.525	34.101.417.118	84.129.769.298	(2.755.455.925)	81.374.313.373	Segmented Assets
Liabilitas Segmen	29.800.674.714	285.906.504	22.017.002.379	52.103.583.597	(1.635.407.465)	50.468.176.132	Segmented Liabilities

	31 Desember 2022/ December 31, 2022						
	Jasa Angkutan/ Transportation	Jasa Non Angkutan/ Non transportation	Konstruksi/ Construction	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Eliminated	Konsolidasi/ Consolidated	
Pendapatan Usaha	21.391.383.626	1.575.688.038	2.610.567.346	25.577.639.010	--	25.577.639.010	Revenues
Antar Segmen	881.656.106	2.006.026.431	--	2.887.682.537	(2.887.682.537)	--	Inter Segment
Jumlah pendapatan	22.273.039.732	3.581.714.469	2.610.567.346	28.465.321.547	(2.887.682.537)	25.577.639.010	Total Revenues
Beban Operasi	(17.523.648.358)	(2.071.177.387)	(2.610.567.346)	(22.205.393.091)	--	(22.205.393.091)	Operating Expenses
Antar Segmen	(1.832.875.857)	(1.054.806.680)	--	(2.887.682.537)	2.887.682.537	--	Inter Segment
Jumlah Beban	(19.356.524.215)	(3.125.984.067)	(2.610.567.346)	(25.093.075.628)	2.887.682.537	(22.205.393.091)	Total Expenses
Hasil Segmen	2.916.515.517	455.730.402	--	3.372.245.919	--	3.372.245.919	Segment Result
Pendapatan (Beban) yang tidak dapat Dialokasikan							Revenues (Expenses) are not Allocated
Pendapatan Keuangan						139.514.944	Finance Incomes
Beban Keuangan						(980.572.153)	Finance Cost
Bagian Rugi							Net Loss of
Bersih Ventura						(267.504.227)	Joint Venture
Selisih Kurs						42.673.710	Foreign Exchanges
Lain-lain - Neto						(95.769.893)	Other - Net
Manfaat (Beban)							Tax Benefit
Pajak - Neto						(524.599.080)	(Expenses) - Net
Rugi setelah Pajak Penghasilan						1.685.989.220	Loss after Income Taxes
Kepentingan							Non-Controlling
Non-pengendali						96.051.257	Interest
Rugi Diatribusikan						1.782.040.477	Loss Attributable to Parent Entity
Rugi Komprehensif							Comprehensive
Diatribusikan							Loss Attributable
Pemilik Induk						2.362.914.534	to Parent Entity
Laporan Posisi Keuangan							Statement of Financial Position
Asst Segmen	46.416.809.741	905.134.224	26.875.623.658	74.197.567.623	(2.616.337.900)	71.581.229.723	Segmented Assets
Liabilitas Segmen	29.258.185.381	418.522.863	14.342.928.979	44.019.637.223	(1.518.591.805)	42.501.045.418	Segmented Liabilities

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

47. Aset dan Liabilitas dalam Mata Uang Asing

47. Assets and Liabilities in Foreign Currencies

Aset dan liabilitas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 adalah sebagai berikut:

Assets and liabilities in foreign currencies as of May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024				31 Desember 2023/ December 31, 2023				31 Desember 2022/ December 31, 2022				
	Mata Uang Asing (Nilai Penuh)/ Foreign Currency (Full Amount)		Rp		Mata Uang Asing (Nilai Penuh)/ Foreign Currency (Full Amount)		Rp		Mata Uang Asing (Nilai Penuh)/ Foreign Currency (Full Amount)		Rp		
Aset													Assets
Kas dan Setara Kas	USD	158.074.715	2.569.188.347	USD	126.102.542	1.943.996.787	USD	90.024.486	1.416.175.187				Cash and Cash Equivalents
	EUR	2.862.826	50.298.453	EUR	488.464	8.372.273	EUR	1.031.762	17.243.459				
	JPY	6.320.568	654.382	JPY	6.321.907	692.546	JPY	6.352.102	743.621				
Dana Dibatasi Penggunaannya	USD	55.568.035	903.147.288	USD	58.388.871	900.122.842	USD	10	157				Restricted Funds
	CNY	2.764	6.199	CNY	--	--	CNY	--	--				
Piutang Usaha	USD	9.129.940	148.388.910	USD	8.568.014	132.084.504	USD	10.036.624	157.886.132				Trade Receivables
Piutang Lain-lain	USD	230.995.000	3.754.361.735	USD	--	--	USD	--	--				Other Receivables
	CNY	1.542.787.560	3.460.472.497	CNY	--	--	CNY	--	--				
Jumlah Aset			10.886.517.791			2.985.268.952			1.592.048.556				Total Asset
Liabilitas													Liabilities
Utang usaha	EUR	2.682.151	47.124.081	EUR	307.680	5.273.635	EUR	630.000	10.528.957				Trade Payables
	JPY	563.947.864	58.386.763	JPY	132.510.650	14.516.151	JPY	738.573.364	86.831.596				
	USD	--	--	USD	728.518	11.230.840	USD	--	--				
Utang Jangka Panjang Jatuh Tempo 1 Tahun	USD	3.771.419	61.296.873	USD	5.934.439	91.485.309	USD	11.092.409	174.494.692				Current Maturities of Long-term Loans
Utang Jangka Panjang Setelah Dikurangi Jatuh Tempo 1 Tahun	USD	230.995.000	3.754.361.735	USD	--	--	USD	--	--				Net Of Maturities
	CNY	1.542.787.560	3.460.472.497	CNY	610.083	9.405.033	CNY	6.544.521	102.951.866				
Jumlah Liabilitas			7.381.641.949			131.910.968			374.807.111				Total Liabilities
Jumlah Bersih			3.504.875.842			2.853.357.984			1.217.241.445				Total Net

48. Kebijakan Manajemen Risiko

48. Risk Management Policies

Kebijakan manajemen risiko keuangan Grup adalah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang memadai tersedia untuk operasi dan pengembangan bisnis, serta untuk mengelola risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga), risiko kredit dan risiko likuiditas. Grup beroperasi dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh Dewan Direksi.

The financial risk management policies of the Group and its subsidiaries are made to ensure that adequate financial resources are available for operation and development of their business, and managing their exposure to market risks (including foreign currency risk and interest rate risk), credit risk and liquidity risk. The Group operate within defined policies which approved by the Board of Directors.

Dalam pengelolaan risiko, Grup membentuk Divisi Manajemen Risiko yang bertanggung jawab terhadap penyusunan kebijakan, kerangka kerja, pedoman penerapan manajemen risiko dan infrastruktur pengelolaan risiko, serta memastikan implementasi manajemen risiko tersebut di lingkungan Grup. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

In managing those risks, the Group established a Risk Management Division which is responsible for the preparation of the policies, the relevant frameworks, implementation guideline and the necessary risk management infrastructure to ensure the implementation of risk management in the Group's environment. The Risk Management Division is responsible to the Director of Finance and Risk Management.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

48. Risk Management Policies (Continued)

a. Risiko Pasar

1. Risiko mata uang asing

Risiko mata uang adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing. Eksposur Grup terhadap fluktuasi nilai tukar terutama berasal dari pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang piutang usaha dari penjualan dalam mata uang asing dan utang usaha dari pembelian dalam mata uang asing.

Grup menanggung risiko nilai tukar mata uang asing atas transaksi dan saldo yang didenominasi dalam mata uang selain Rupiah. Mata uang yang menimbulkan risiko ini adalah terutama Dolar AS. Risiko nilai tukar mata uang asing dikelola sebaik mungkin dengan lindung nilai alami yaitu menyeimbangkan nilai kekayaan dan kewajiban masing-masing mata uang.

Untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko fluktuasi kurs terhadap Dolar AS, Grup mengusahakan, untuk memastikan bahwa sebagian besar pembelian dan penjualan dilakukan dalam mata uang yang sama serta dilakukan pada saat yang hampir bersamaan dan mengimplementasikan kebijakan dimana hutang dalam mata uang asing yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dilakukan dalam mata uang yang sama (lindung nilai alami). Manajemen juga memantau untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan semaksimal mungkin.

Grup memantau secara ketat fluktuasi dari nilai tukar mata uang asing, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan Grup pada waktu yang tepat.

a. Market Risk

1. Foreign currency risk

Foreign currency risk is the risk where the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates. The Group's exposure to exchange rate fluctuations results primarily from Short-term loans, Long-term loans, trade receivable from sales in foreign currencies and trade payables from purchases in foreign currencies.

The Group incurs foreign currency risk on the transactions dan balances that are denominated in currencies other than Indonesian Rupiah. The currency giving rise to this risk is US Dollar. Foreign currency risks are managed as far as possible by natural hedges of matching assets and liabilities in foreign currency.

In order to anticipate and mitigate the risk of exchange rate fluctuation against the US Dollar, the Group seeks, to ensure that significant portion of purchases and sales are carried out in the same currency as well as matching the timing of transactions and to implement a policy whereby debts in foreign currency used to finance business activities are made in the same currency (natural hedging). The management also ensures those policies are implemented to the maximum condition.

The Group closely monitors the foreign exchange rate fluctuation, so it can take useful actions to the Group in proper time.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

Analisis Sensitivitas untuk Risiko Mata Uang Asing

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022, jika mata uang asing melemah/menguat sebesar 5% terhadap Rupiah dengan asumsi semua variabel konstan, laba sebelum pajak dalam tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp175.243.792, Rp155.859.003, dan Rp98.342.783 terutama disebabkan oleh penjabaran keuntungan/ kerugian translasi kas setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha dan utang bank.

2. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Eksposur Perusahaan terhadap risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang dan utang obligasinya. Fluktuasi suku bunga memengaruhi biaya atas pinjaman baru dan bunga atas saldo pinjaman Perusahaan yang dikenakan suku bunga mengambang.

Kebijakan Grup terkait dengan risiko suku bunga adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola biaya bunga melalui kombinasi utang dengan suku bunga tetap dan variabel. Grup mengevaluasi rasio suku bunga tetap terhadap suku bunga mengambang dari utang pinjaman dan utang obligasi sejalan dengan perubahan suku bunga yang relevan di pasar keuangan. Berdasarkan penilaian manajemen, pembiayaan baru akan ditentukan berdasarkan suku bunga tetap atau mengambang.
- 2) Mengelola eksposur atas tingkat suku bunga yang berasal dari utang pinjaman dan utang obligasi dengan menandatangani kontrak *swap*, tingkat suku bunga tersebut ditujukan untuk lindung nilai atas suku bunga mengambang dalam pinjaman mata uang Dolar AS.

48. Risk Management Policies (Continued)

Sensitivity Analysis for Foreign Currency Risk

As of May 31, 2024, December 31, 2023 and 2022, if the foreign currency has weakened/strengthened by 5% against Rupiah with all other variables are constant, the profit before tax for the current year will lower/higher by Rp175,243,792, Rp155,859,003, and Rp98,342,783, mainly as a result of foreign exchange gain/losses on translation of cash and cash equivalent, trade receivables, other receivables, trade payables and bank loans.

2. Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in the market interest rates. The Company's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to its Short-term loans, Long-term loans and bonds payable. Interest rate fluctuations influence the cost of new loans and the interest on the outstanding floating rate loans of the Company.

The Group's policies related to interest rate risk are as follows:

- 1) Managing interest cost through a mix of fixed and variable rate debts. The Group evaluates the fixed to floating rate ratio of its loans and bonds payable in line with movements of relevant interest rates in the financial markets. Based on management's assessment, new financing will be priced either on a fixed or floating rate basis.
- 2) Managing the interest rate exposure from loans and bonds payable by signing the interest rate swap contracts. The contract is aimed to hedge the floating interest in US Dollar currency.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing lebih dari 11,78%, 16,17%, dan 16,78% dari utang berbunga/ pinjaman berbunga Grup adalah utang dengan suku bunga tetap.

Grup menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga, dimana semua variabel lainnya dianggap tetap, terhadap laba Grup untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022 (melalui dampak atas suku bunga suku bunga JIBOR untuk pinjaman dalam Rupiah).

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk non derivatif pada akhir tahun pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir tahun pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan sebesar 0,5% digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada manajemen kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 jika tingkat suku bunga atas utang bank 0,5% lebih tinggi/lebih rendah dengan asumsi semua variabel konstan, maka:

- Pada 31 Mei 2024, laba setelah pajak pada tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp182.440.048.
- Pada 31 Desember 2023, laba setelah pajak pada tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp41.382.380.
- Pada 31 Desember 2022, laba setelah pajak pada tahun berjalan akan menjadi lebih rendah/tinggi sebesar Rp44.895.553.

48. Risk Management Policies (Continued)

As of May 31, 2024, December 31, 2023 and 2022, more than 11.78%, 16.17% and 16.78% respectively, of the Group's interest debts/ interest loans are loans with fixed rate.

The Group demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates, with all other variables are constant, of the Group's profit for the years ended May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022 (through the impact on the floating rate borrowings which is based on JIBOR for Rupiah borrowings).

The sensitivity analysis below has been determined based on the exposure to interest rates for non-derivative instruments at the end of the reporting year. For floating rate liabilities, the analysis is prepared by assuming the amount of the liability outstanding for the whole year. A 0.5% increase or decrease is used when report the interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonable possible changes in interest rates.

As of May 31, 2024, December 31, 2023 and 2022, if interest rates on bank loans is 0.5% higher/lower with all other variables are constant, then:

- As of May 31, 2024 profit after tax for the current year would be Rp182,440,048 lower/higher.
- As of December 31, 2023 profit after tax for the current year would be Rp41,382,380 lower/higher.
- As of December 31, 2022 profit after tax for the current year would be Rp44,895,553 lower/higher.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Grup akan mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh rekanan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual.

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023 dan 2022 jumlah maksimum eksposur terhadap risiko kredit adalah Rp19.652.714.712, Rp10.457.053.729, and Rp13.766.240.270. Risiko kredit terutama berasal dari kas dan setara kas dan dana yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, pendapatan yang masih harus diterima, piutang lain-lain dan investasi jangka panjang.

Semua kas di bank dan deposito berjangka ditempatkan di bank yang memiliki kualitas kredit yang baik.

Pada tanggal 31 Mei 2024 piutang usaha Grup tidak terkonsentrasi pada pelanggan tertentu.

Manajemen yakin akan kemampuannya untuk terus mengendalikan dan mempertahankan eksposur yang minimal terhadap risiko kredit mengingat Grup memiliki kebijakan yang jelas dalam pemilihan pelanggan, perjanjian yang mengikat secara hukum untuk transaksi serta jasa lainnya yang telah dilakukan dan secara historis mempunyai tingkat yang rendah untuk piutang yang bermasalah.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas (juga dikenal risiko pendanaan) adalah risiko dimana Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Grup untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Risiko likuiditas muncul dalam situasi Grup kesulitan memperoleh pendanaan. Kebijakan manajemen risiko likuiditas yang berhati-hati dilakukan dengan menjaga kecukupan kas dan setara kas. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan memonitor perkiraan arus kas dan arus kas aktual serta menyesuaikan profil jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

48. Risk Management Policies (Continued)

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that the Group will suffer loss that come from other parties that failed to fulfill the contractual responsibility

As of May 31, 2024, December 31, 2023 and 2022 the total of maximum exposure from credit risk was Rp19,652,714,712, Rp10,457,053,729, and Rp13,766,240,270. Credit risk arises from cash and cash equivalents and restricted cash, trade receivables, accrue revenue, other receivables and long-term investment.

All the cash in banks and time deposits are placed in bank with good credit rating.

On May 31, 2024 Group's accounts receivable is not concentrated on certain customer.

Management is confident in its ability to continue to control and maintain the minimal exposure of credit risk, considering the Group has clear policies on the selection of customers, legally binding agreements in place for sales transactions and other services rendered and historically low levels of bad debts.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk (also known as funding risk) is a risk where the Company would be having a difficulty in obtaining funds to fulfill its commitments associated with financial instruments. Liquidity risk may rise from the incapability of the Group to sell assets immediately at prices close to its fair value.

Liquidity risk arises in situations where Group struggles to obtain their financing. Risk management policy on liquidity was conducted carefully to maintain sufficient cash and cash equivalents. The Company manages liquidity risk by monitoring cash flow forecasts and actual cash flows and adjusts the maturity profile of financial assets and liabilities.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

48. Risk Management Policies (Continued)

Tabel berikut ini memberikan rincian tanggal jatuh tempo kontraktual untuk liabilitas keuangan dengan pembayaran yang telah disepakati sebagai berikut:

The following table details the Company and its subsidiaries remaining contractual maturity for its financial liabilities with agreed repayment as follow:

		31 Mei 2024/ May 31, 2024						
		Kurang dari 1 tahun/ less than 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ over 1 year up to 3 years	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun/ over 3 years up to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ over 5 years	Jumlah/ Total		
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities	
Utang Usaha	1.927.494.722	--	--	--	--	1.927.494.722	Trade Payables	
Beban Akrual	2.494.483.189	--	--	--	--	2.494.483.189	Accrued Expenses	
Pinjaman Jangka Pendek	1.942.426.859	--	--	--	--	1.942.426.859	Short-term Loans	
Obligasi	1.899.345.831	1.098.612.024	632.615.046	863.817.212	4.494.390.113	Bonds		
Sukuk	--	--	117.077.549	381.624.929	498.702.478	Sukuk		
Pinjaman Program PEN	437.500.000	875.000.000	875.000.000	656.250.000	2.843.750.000	PEN Program Loan		
Pinjaman Jangka Panjang	1.401.057.983	3.028.947.926	2.785.304.786	25.375.285.326	32.590.596.021	Long-term Loans		
Liabilitas Sewa	33.231.048	60.531.873	--	--	93.762.921	Lease Liabilities		
Jumlah	10.135.539.632	5.063.091.823	4.409.997.381	27.276.977.467	46.885.606.303	Total		
		31 Desember 2023/ December 31, 2023						
		Kurang dari 1 tahun/ less than 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ over 1 year up to 3 years	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun/ over 3 years up to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ over 5 years	Jumlah/ Total		
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities	
Utang Usaha	7.371.276.638	--	--	--	--	7.371.276.638	Trade Payables	
Beban Akrual	2.203.317.939	--	--	--	--	2.203.317.939	Accrued Expenses	
Pinjaman Jangka Pendek	1.388.523.138	--	--	--	--	1.388.523.138	Short-term Loans	
Obligasi	1.898.852.925	1.098.388.157	632.437.488	863.643.974	4.493.322.544	Bonds		
Sukuk	--	--	117.042.620	381.543.574	498.586.194	Sukuk		
Pinjaman Program PEN	437.500.000	875.000.000	875.000.000	875.000.000	3.062.500.000	PEN Program Loan		
Pinjaman Jangka Panjang	1.294.613.508	3.368.446.810	2.812.805.015	13.960.775.637	21.436.640.970	Long-term Loans		
Liabilitas Sewa	36.504.861	74.166.028	--	--	110.670.889	Lease Liabilities		
Jumlah	14.630.589.009	5.416.000.995	4.437.285.123	16.080.963.185	40.564.838.312	Total		
		31 Desember 2022/ December 31, 2022						
		Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun/ Over 1 year up to 3 years	Lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun/ Over 3 years up to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ Over 5 years	Jumlah/ Total		
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities	
Utang Usaha	2.458.886.168	--	--	--	--	2.458.886.168	Trade Payables	
Beban Akrual	1.572.961.926	--	--	--	--	1.572.961.926	Accrued Expenses	
Pinjaman Jangka Pendek	1.760.000.000	--	--	--	--	1.760.000.000	Short-term Loans	
Obligasi	--	1.897.669.952	1.729.862.225	863.228.204	4.490.760.381	Bonds		
Sukuk	--	--	116.958.789	381.348.322	498.307.111	Sukuk		
Pinjaman Program PEN	437.500.000	875.000.000	875.000.000	1.312.500.000	3.500.000.000	PEN Program Loan		
Pinjaman Jangka Panjang	1.196.958.601	2.555.130.071	940.665.213	14.786.836.533	19.479.590.418	Long-term Loans		
Liabilitas Sewa	16.563.637	44.599.263	--	--	61.162.900	Lease Liabilities		
Jumlah	7.442.870.332	5.372.399.286	3.662.486.227	17.343.913.059	33.821.668.904	Total		

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

48. Kebijakan Manajemen Risiko (Lanjutan)

48. Risk Management Policies (Continued)

d. Pengelolaan Modal

Dalam mengelola permodalannya, Grup senantiasa mempertahankan kelangsungan usaha serta memaksimalkan manfaat bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, dan untuk memberikan imbal hasil yang memadai kepada pemegang saham dengan menentukan harga produk dan jasa yang sepadan dengan tingkat risiko.

Grup menetapkan sejumlah rasio modal sesuai proporsi terhadap risiko. Grup mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Konsisten dengan perusahaan lain dalam industri, Grup memonitor modal dengan dasar rasio pinjaman terhadap modal yang disesuaikan.

d. Capital Management

In managing its equity, the Group always maintains its going concern as well as maximizes the benefits for shareholders and other stakeholders, and to provide adequate returns to shareholders by considering the price of products and services that are commensurate with the level of risk.

The Group set a number of capital ratios proportion to the risk. The Group manages its capital structure and makes adjustments by considering changes in economic conditions and risk characteristic of the underlying assets. Consistently with the other companies in the industries, the Group monitors the ratio of adjusted debt to equity.

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31 2023 2022		
Pinjaman				Debt
Pinjaman Jangka Pendek	1.942.426.859	1.388.523.138	1.760.000.000	Short-term Loans
Liabilitas Jangka Panjang yang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				Current Maturities of Long-term Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang	1.401.057.983	1.294.613.508	1.196.958.601	Long-term Loans
Pinjaman Program PEN	437.500.000	437.500.000	437.500.000	PEN Program Loan
Utang Obligasi	1.899.345.831	1.898.852.925	--	Bonds Payable
Liabilitas Sewa	33.231.048	36.504.861	16.563.637	Lease Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				Long-term Liabilities - Net of Current Maturities
Pinjaman Jangka Panjang	31.189.538.038	20.142.027.462	18.282.631.817	Long-term Loans
Pinjaman Program PEN	2.406.250.000	2.625.000.000	3.062.500.000	PEN Program Loans
Obligasi	2.595.044.282	2.594.469.619	4.490.760.381	Bonds
Sukuk	498.702.478	498.586.194	498.307.111	Sukuk
Liabilitas Sewa	60.531.873	74.166.028	44.599.263	Lease Liabilities
Jumlah Pinjaman	42.463.628.392	30.990.243.735	29.789.820.810	Total Debt
Jumlah Ekuitas	32.172.164.868	30.906.137.241	29.080.184.305	Total Equity
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	131,99%	100,27%	102,44%	Total Debt to Equity

Grup secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal, serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

The Group actively and regularly examines and manages its capital structure to ensure optimum capital returns to shareholders, by consider the efficient usage of capital by operating cash flow and capital expenditures, and consideration of capital needs in the future.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

49. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

49. Fair Value of Financial Instrument

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan, beserta nilai tercatatnya, adalah sebagai berikut:

The fair values of financial assets and liabilities, together with the carrying amounts, are as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024		31 Desember 2023/ December 31, 2023		31 Desember 2022/ December 31, 2022		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan:							Financial assets:
Kas dan Setara Kas	4.549.819.332	4.549.819.332	5.138.571.482	5.138.571.482	5.695.720.193	5.695.720.193	Cash and Cash Equivalents
Dana Dibatasi Penggunaannya	2.720.219.288	2.720.219.288	2.587.812.673	2.587.812.673	5.610.385.976	5.610.385.976	Restricted Fund
Piutang Usaha	1.989.138.453	1.989.138.453	1.869.594.775	1.869.594.775	1.406.338.067	1.406.338.067	Trade Receivables
Piutang Lain-lain	7.214.834.232	7.214.834.232	61.586.990	61.586.990	90.003.063	90.003.063	Other Receivables
Pendapatan Masih Akan Diterima	--	--	763.740.041	763.740.041	939.616.971	939.616.971	Accrued Income
Investasi Jangka Panjang	35.747.769	35.747.769	35.747.769	35.747.769	24.176.000	24.176.000	Long-term Investment
Jumlah	16.509.759.074	16.509.759.074	10.457.053.730	10.457.053.730	13.766.240.270	13.766.240.270	Total
Liabilitas keuangan:							Financial liabilities:
Utang Usaha	1.927.494.722	1.927.494.722	7.371.276.638	7.371.276.638	2.458.886.168	2.458.886.168	Trade Payables
Beban Akrua	2.494.483.189	2.494.483.189	2.203.317.939	2.203.317.939	1.572.961.926	1.572.961.926	Accrued Expenses
Pinjaman Jangka Pendek	1.942.426.859	1.942.426.859	1.388.523.138	1.388.523.138	1.760.000.000	1.760.000.000	Short-term Borrowings
Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:							Current Maturities of Long-term Investment
Pinjaman Jangka Panjang	1.401.057.983	1.399.377.965	1.294.613.508	1.290.943.357	1.196.958.601	1.196.958.601	Long-term Loans
Pinjaman Program PEN	437.500.000	437.500.000	437.500.000	437.500.000	437.500.000	437.500.000	PEN Program Loan
Utang Obligasi	1.899.345.831	1.986.458.333	1.898.852.925	1.898.852.925	--	--	Bonds Payable
Liabilitas Sewa	33.231.048	33.231.048	36.504.861	36.504.861	16.563.637	16.563.637	Lease Liabilities
Pinjaman Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:							Long-term Loans Net-off Current Maturity
Pinjaman Jangka Panjang	31.189.538.038	31.189.538.038	20.142.027.462	20.141.120.495	18.282.631.817	18.271.820.560	Long-term Loans
Pinjaman Program PEN	2.406.250.000	2.093.615.303	2.625.000.000	2.737.698.696	3.062.500.000	2.653.951.168	PEN Program Loan
Utang Obligasi	2.595.044.282	2.692.268.915	2.594.469.619	2.710.565.827	4.490.760.381	4.633.482.471	Bonds Payable
Sukuk Ijarah	498.702.478	516.640.870	498.586.194	499.927.345	498.307.111	516.209.186	Sukuk Ijarah
Liabilitas Sewa	60.531.873	60.531.873	74.166.028	74.166.028	44.599.263	44.599.263	Lease Liabilities
Jumlah	46.885.606.303	46.773.567.115	40.564.838.312	40.790.397.249	33.821.668.904	33.562.932.980	Total

Pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022, nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan mendekati nilai wajarnya sebagai berikut:

As of May 31, 2024, Desember 31, 2023, and 2022 the carrying amounts of financial assets and liabilities approximate their fair value as follows:

1. Kas dan setara kas, investasi jangka pendek, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain. Aset keuangan tersebut merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
2. Utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan pinjaman jangka pendek. Liabilitas keuangan tersebut merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.
3. Pinjaman bank jangka panjang, termasuk bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas keuangan tersebut merupakan pinjaman yang memiliki suku bunga variabel dan tetap yang disesuaikan dengan pergerakan suku bunga pasar sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut telah mendekati nilai wajar.
4. Nilai wajar obligasi sebesar nilai kini dari arus kas di masa datang, yang didiskontokan dengan tingkat suku bunga pasar.
5. Nilai wajar investasi jangka panjang diukur pada nilai wajar menggunakan pengukuran level III.

1. Cash and cash equivalents, Short-term investments, restricted cash, trade receivables and other receivables. That financial assets are due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values.
2. Trade payables, other liabilities, accrued expenses and Short-term loan. Those financial liabilities are due within 12 months, thus the carrying values of the financial liabilities approximately represent their fair values.
3. Long-term bank loans, including their current maturities. Those financial liabilities are liabilities with floating and fixed interest rates which are adjusted with the movements of market interest rates, so that the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.
4. The fair values of the bond payable are estimated at the present value of future cash flows, discounted at market interest rate.
5. The fair values of the long term investment are measured at fair value using level III measurements.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting

a. Perjanjian Penyerahan Jasa Angkutan Barang

Perusahaan menandatangani perjanjian penyerahan jasa angkutan barang dengan beberapa perusahaan lain dengan ikhtisar sebagai berikut:

1. PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) – PT Bukit Asam (Persero) Tbk

a. Pengangkutan batu bara rute Tanjungenim Baru - Tarahan dan Tanjung Enim Baru - Kertapati, diatur dalam Perjanjian No. 027/PJJ/EKS-0100/HK.03/2017 dan No. KL.701/VI/19/KA-2017 tertanggal 9 Juni 2017. hal penting yang diatur adalah sebagai berikut:

- Perjanjian berlaku mulai 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2021.
- Para pihak sepakat rencana angkutan untuk masing-masing relasi pada tahun 2022 adalah Tanjungenim Baru (TMB) – Tarahan (THN) sebesar 24.000 dan Tanjungenim Baru (TMB) – Kertapati (KPT) sebesar 6.600.
- Para pihak menyusun target volume angkutan bulanan paling lambat 3 bulan sebelum tahun berjalan mengacu pada Rencana Angkutan Tahunan.
- Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan No. KL.707/II/9/KA-2023 tanggal 8 Februari 2023 antara Perusahaan dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk (Para Pihak) menyatakan bahwa Para Pihak sepakat pelaksanaan angkutan batu bara untuk tahun 2023 sampai 2027 dengan penyesuaian kenaikan tarif dan *dynamic pricing*.

50. Significant Agreements

a. Freight Service Delivery Agreements

The Company has entered into an agreement for cargo delivery services with several other companies with a summary as follows:

1. PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) – PT Bukit Asam (Persero) Tbk

a. Coal transportation for Tanjungenim Baru - Tarahan and Tanjung Enim Baru - Kertapati routes, as set in the Agreement No. 027/PJJ/EKS-0100/HK.03/2017 and No. KL.701/VI/19/KA-2017 dated June 9, 2017. Some important matters that were agreed are as follows:

- The Agreement is started from January 1, 2017 until December 31, 2021.
- The parties agreed that transportation plan for each relation in 2022 is Tanjungenim Baru (TMB) - Tarahan (THN) amounting to 24,000 and Tanjungenim Baru (TMB) - Kertapati (KPT) amounting to 6,600.
- Both parties prepare transportation volume target at least 3 months before next calendar year according to the Annual Transportation Plan.
- Based on the Minutes of Agreement No. KL.707/II/9/KA-2023 dated Februari 8, 2023 between the Company and PT Bukit Asam (Persero) Tbk (the Parties) stated that the Parties agreed that the implementation of coal transportation would continue for period 2023 until 2027 with adjustment increase price and dynamic pricing.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

- b. Pada tanggal 12 Oktober 2023, Perusahaan dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk – Entitas anak dari PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) menandatangani Perjanjian No. 011/T/PJJ/0100/HK.03/X/2023 dan No. KL.701/X/13/KA-2023 tentang angkutan batu bara dengan kereta api relasi Tanjung Enim baru – Tarahan dan Tanjung Enim baru – Kertapati. Perjanjian berlaku mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2027.
- 2. PT Pertamina (Persero) – PT Pertamina Patra Niaga**
Perjanjian ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2021 dengan No. KTR-008/PNA000000/2021-S0, No. KTR-185/PNE000000/2021-S0 dan No. KL.705/XI/4/KA-2021 yang merupakan Perjanjian Novasi atas perjanjian No. SP-003/R00000/2020-S0 dan No. KL.701/IV/1/KA-2020 tanggal 1 April 2020 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- Perjanjian berlaku surut mulai 1 Oktober 2015 sampai dengan 1 April 2025. Terhitung sejak tanggal 1 September 2021, PT Pertamina melakukan pengalihan hak dan kewajiban kepada PT Pertamina Patra Niaga.
 - Jasa yang diperjanjikan adalah pengangkutan bahan bakar minyak (meliputi premium, minyak tanah, solar, minyak diesel dan minyak bakar) dan bahan bakar minyak khusus (meliputi avtur, avgas, super TT, premix, dan bensin biru) dengan menggunakan gerbong ketel.
 - Jumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) yang diangkut ditetapkan dalam rencana tahunan yang dikemudian dijabarkan secara definitif dalam rencana bulanan dan disetujui oleh kedua belah pihak.
- b. On October 12 2023, the Company and PT Bukit Asam (Persero) Tbk – a subsidiary of PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) signed Agreement No. 011/T/PJJ/0100/HK.03/X/2023 and No. KL.701/X/13/KA-2023 concerning coal transportation by train on the relation of Tanjung Enim baru – Tarahan and Tanjung Enim baru – Kertapati. The agreement is valid from January 1, 2023 to December 31, 2027.
- 2. PT Pertamina (Persero) – PT Pertamina Patra Niaga**
The agreement was signed on December 28, 2021 with agreement No. KTR-008/PNA000000/2021-S0, No. KTR-185/PNE000000/2021-S0 and No. KL.705/XI/4/KA-2021 which is Novation Agreement on No SP-003/R00000/2020-S0 and No.KL.701/IV/1/KA-2020 agreement dated April 1, 2020 with the terms and conditions as follows:
- The agreement is valid retrospectively from October 1, 2015 until April 1, 2025. Since September 1, 2021, PT Pertamina transfer rights and obligation to PT Pertamina Patra Niaga.
 - Services included transportation for fuels (such as premium, kerosene, diesel fuel, diesel oil and fuel oil) and special fuels (such as aviation fuel, avgas, Super TT, premix and petrol blue) by using a kettle train.
 - The amount of transported fuel oils and special fuel oils is determined in a yearly plan which subsequently detailed a monthly definitive plan and approved by both parties.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

- Tarif keseluruhan ditetapkan sebesar Rp694.40 KL/KM untuk semua jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan bahan Bakar khusus (BBK) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Apabila terdapat klaim atas susut atau kerusakan mutu BBM/BBK yang diangkut akan diterbitkan, nota debet tagihan dan tagihan selanjutnya akan diperhitungkan serta dipotong dari tarif keseluruhan.

3. PT Bara Alam Utama

Perjanjian kerja sama tentang angkutan batu bara dari Sukacinta ke Kertapati No. HK.221/XII/19/KA-2012 dan No. 001/BAU-KAI/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012 dan diadendum V dengan Perjanjian No. KL.701/VII/9/KA-2023 tanggal 18 Juli 2023.

Beberapa hal penting yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah:

- Perjanjian berlaku mulai 14 Desember 2012 sampai dengan 13 Desember 2032.
- Tarif angkutan batu bara tanpa MIP domestik rute Sukacinta - Kertapati sebesar Rp736,5 (Rupiah penuh)/ ton km dan tarif angkutan batu bara tanpa MIP domestik rute Sukacinta-Simpang sebesar Rp736,5 (Rupiah penuh)/ton km.
- Tarif angkutan batu bara tanpa MIP ekspor rute Sukacinta - Kertapati sebesar Rp709 (Rupiah penuh)/ ton km dan tarif angkutan batu bara tanpa MIP ekspor rute Sukacinta-Simpang sebesar Rp709 (Rupiah penuh)/ton km.
- Tarif angkutan batu bara dengan MIP ekspor rute Sukacinta - Kertapati sebesar Rp709 (Rupiah penuh)/ ton km dan tarif angkutan batu bara dengan MIP ekspor rute Sukacinta-Simpang sebesar Rp709 (Rupiah penuh)/ton km.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Significant Agreements (Continued)

- The rate is determined at Rp694.40 KL/KM for all types of fuel oils and special fuel oils, excluding value-added tax (VAT).
- If there is a claim for loss or damage of the quality of fuel, the invoice will be issued, debit bill and further bill will be calculate and deducted all in rate.

3. PT Bara Alam Utama

The Agreement of Coal Transportation for Sukacinta – Kertapati relation No. HK.221/XII/19/KA-2012 and No. 001/BAU-KAI/XII/2012 dated December 14, 2012 and amendment V with the Agreement No. KL.701/VII/9/KA-2023 dated July 18, 2023.

Some important matters that were agreed were as follow:

- The agreement is started from December 14, 2012 untill December 13, 2032.
- The coal transportation rate without MIP for domestic on the Sukacinta - Kertapati route is Rp736.5 (full Rupiah)/ton km and the coal transportation rate without MIP for domestic on the Sukacinta-Simpang route is RP 736.5 (full Rupiah)/ton km.
- The coal transportation rate without MIP for export on the Sukacinta - Kertapati route is Rp709 (full Rupiah)/ton km and the coal transportation rate without MIP for export on the Sukacinta-Simpang route is RP 709 (full Rupiah)/ton km.
- The coal transportation rate with MIP for domestic on the Sukacinta - Kertapati route is Rp709 (full Rupiah)/ton km and the coal transportation rate without MIP for domestic on the Sukacinta-Simpang route is Rp709 (full Rupiah)/ton km.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

- Tarif angkutan batu bara dengan MIP ekspor rute Sukacinta - Kertapati sebesar Rp709 (Rupiah penuh)/ ton km dan tarif angkutan batu bara dengan MIP ekspor rute Sukacinta-Simpang sebesar Rp709 (Rupiah penuh)/ton km.

4. PT Baramulti Sugih Sentosa

Perjanjian kerja sama angkutan batu bara dari Sukacinta - Kertapati dengan Addendum VI dengan perjanjian No. KL.701/XI/1/KA-2021 tertanggal 5 November 2021. Perjanjian ini diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2037.

Beberapa hal penting yang diatur dalam perjanjian tersebut adalah:

- PT Baramulti Sugih Sentosa harus menyerahkan Jaminan dalam bentuk bank garansi sebesar Rp38.333.969 untuk periode 1 November 2021 – 31 Juli 2023.
- Tarif angkutan batu bara untuk periode 5 November 2021 s.d 31 Juli 2023 untuk relasi Sukacinta-Kertapati sebesar Rp667,50 (Rupiah penuh)/ton km, relasi Merapi-Kertapati sebesar Rp667,50 (Rupiah penuh)/ton km, relasi Sukacinta-Simpang sebesar Rp672,50 (Rupiah penuh)/ton km dan relasi Merapi-Simpang sebesar Rp672,50 (Rupiah penuh)/ton km berdasarkan harga dasar BBM sebesar Rp5.941 (Rupiah penuh)/liter, dan telah diperpanjang melalui addendum No.KL.701/VIII/7/KA-2023 tarif ini berubah menjadi Rp736,50 (Rupiah penuh)/ton km berdasarkan harga dasar BBM sebesar Rp7.238 (Rupiah penuh)/liter yang berlaku sejak 1 Agustus 2023 s.d 31 Desember 2037.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Significant Agreements (Continued)

- The coal transportation rate with MIP for export on the Sukacinta - Kertapati route is Rp709 (full Rupiah)/ton km and the coal transportation rate without MIP for export on the Sukacinta-Simpang route is Rp709 (full Rupiah)/ton km.

4. PT Baramulti Sugih Sentosa

The agreement of coal transportation from Sukacinta - Kertapati with amendment VI with agreement No. KL.701/XI/1/KA-2021 and dated November 5, 2021. The agreement is extended until December 31, 2037.

Some important matters that were agreed were as follow:

- PT Baramulti Sugih Sentosa must give bank guarantee amounted to Rp38,333,969 for period November 1, 2021 – July 31,2023.
- Coal transportation rate for period November 5, 2021 until July 31, 2023 for relation Sukacinta-Kertapati amounted Rp667.50 (full amount)/ton kilometer, relation Merapi-Kertapati amounted Rp667.50 (full amount)/ton kilometer, relation Sukacinta-Simpang amounted Rp672.50 (full amount)/ton kilometer, and relation Merapi-Simpang amounted Rp672.50 (full amount)/ton kilometer based on fuel price at Rp5,941 (full amount)/litre and has been extended based on amendment No. KL.701/VIII/7/KA-2023 this rate was changed amounted to Rp736.50 (full amount)/ton kilometer based on fuel price at Rp7,238 (full amount)/litre which has been applicable from August 1, 2023 until December 31, 2037.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

5. PT Bintang Cemerlang Sentosa

Perjanjian kerja sama tentang angkutan Batu Bara dengan menggunakan gerbong datar dari Banjarsari ke Simpang ditandatangani pada tanggal 01 Agustus 2019 dengan No. KL.701/VIII/20/KA-2019 dan No. 047/DIR-BCS/VIII/2019 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian berlaku sejak tanggal efektif pelaksanaan perjanjian dengan jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang.
- Tarif angkutan batu bara rute Banjarsari - Simpang sebesar Rp662 (Rupiah penuh)/ ton km berdasarkan harga dasar BBM sebesar Rp5.650 (Rupiah penuh)/ liter.
- PT Bintang Cemerlang Sentosa akan memberikan uang jaminan atas biaya angkutan berupa bank garansi sebesar Rp9.830.700.

6. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk – PT Semen Padang

Perjanjian kerja sama tentang angkutan barang semen curah dan terak semen (*clinker*) dari Indarung ke Teluk Bayur ditandatangani pada tanggal 2 Januari 2023 dengan No. KL.701/I/26/KA-2023 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian berlaku mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2026.
- PT Semen Padang wajib memenuhi target minimal pengangkutan tahunan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun/ Years	Target per Tahun/ Goals per Year
1	2023	75.000 Gerbong/ Wagons
2	2024-2026	Akan disepakati Para Pihak, dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian/ Will be agreed by the Parties, and set forth in the Addendum

- Tarif angkutan Barang rute dari Indarung ke Teluk Bayur sebesar Rp551.359 (Rupiah penuh)/ Gerbong km berdasarkan harga dasar BBM sebesar Rp6.800 (Rupiah penuh)/ liter.

5. PT Bintang Cemerlang Sentosa

The agreement of transport with coal use flat wagon from Banjarsari – Simpang was signed on August 01, 2019 with No. KL.701/VIII/20/KA-2019 and No. 047/DIR-BCS/VIII/2019 with the terms and conditions as follows:

- The agreement is started from the effective date of the implement the agreement for a period of 10 years can be extended.
- Coal transportation rate for routes Banjarsari - Simpang amounted to Rp662 (full amount)/ ton kilometer based on fuel price at Rp5,650 (full amount)/ litre.
- PT Bintang Cemerlang Sentosa will provide a security deposit for transportation cost in the form of a bank guarantee amounted to Rp9,830,700.

6. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk – PT Semen Padang

The agreement of Freight Transport bulk cement and clinker from Indarung – Teluk Bayur was signed on January 2, 2023 with No. KL.701/I/26/KA-2023 with the terms and conditions as follows:

- The agreement is started from January 1, 2023 untill December 31, 2026.
- PT Semen Padang is required to meet the minimum annual transportation target, with the following details:

- Freight transportation rate for routes Indarung - Teluk Bayur amounted to Rp551,359 (full amount)/ Wagon km based on fuel price at Rp6,800 (full amount)/ litre.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

b. Perjanjian Asuransi

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jasa Raharja Putera

a. Perusahaan menandatangani perjanjian dengan PT Asuransi Jasa Raharja Putera tentang Pengadaan Asuransi Tanggung Jawab Pengangkut terhadap Penumpang dan Awak Sarana Kereta Api untuk periode 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2026 dengan Perjanjian No. KL.702/IV/10/KA-2024 tanggal 3 April 2024. Lingkup Jaminan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah penumpang KA dan awak sarana kereta api.

	<u>Rp</u>
a. Penumpang KA	
1) Meninggal dunia	40.000
2) Cacat tetap (maksimum)	30.000
3) Biaya perawatan (maksimum)	30.000
4) Biaya pemakaman	2.500
b. Awak sarana Perkeretaapian	
I. Untuk masinis dan asisten masinis	
1) Meninggal dunia	85.000
2) Cacat tetap (maksimum)	95.000
3) Biaya perawatan (maksimum)	35.000
4) Biaya pemakaman	5.000
II. Kondektur, kondektur pembantu dan manajer KA	
1) Meninggal dunia	75.000
2) Cacat tetap (maksimum)	85.000
3) Biaya perawatan (maksimum)	35.000
4) Biaya pemakaman	5.000
III. Teknisi KA, petugas restorasi, petugas keamanan, dan lainnya	
1) Meninggal dunia	65.000
2) Cacat tetap (maksimum)	75.000
3) Biaya perawatan (maksimum)	35.000
4) Biaya pemakaman	5.000

50. Significant Agreements (Continued)

b. Insurance Agreement

1. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jasa Raharja Putera

a. The Company signed an agreement with PT Asuransi Jasa Raharja Putera regarding the Procurement of Carrier Liability Insurance for Passengers and Railway Facilities Crew for the period January 1, 2024 to December 31, 2026 with Agreement No. KL.702/IV/10/KA-2024 dated April 3, 2024. The scope of insurance coverage as intended in this agreement is train passengers and train facility crew.

a. Train Passenger	
1) Death	
2) Permanent disability (Maximum)	
3) Recovery costs (maximum)	
4) Funeral cost	
b. Officer on Train	
I. Machinist and machinist assistant	
1) Death	
2) Permanent disability (maximum)	
3) Recovery costs (maximum)	
4) Funeral cost	
II. Conductor, conductor assistant and train manager	
1) Death	
2) Permanent disability (maximum)	
3) Recovery costs (maximum)	
4) Funeral cost	
III. Train technicians, train restaurant officers, security officers, and others	
1) Death	
2) Permanent disability (maximum)	
3) Recovery costs (maximum)	
4) Funeral cost	

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

c. Biaya evakuasi jenazah (meninggal dunia bukan karena kecelakaan)

1) Penumpang KA	:	5.000	:
2) Awak Sarana KA	:	10.000	:

Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi asuransi kepada PT Jasa Raharja Putera melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bandung.

Jumlah iuran wajib yang harus dibayar Perusahaan kepada PT Jasa Raharja Putera untuk premi penumpang KA sebesar Rp10.383.697 dan premi awak sarana KA sebesar Rp149.271.

b. Perusahaan telah menandatangani perpanjangan perjanjian No. KL.702/II/13/KA-2023 dan P/1.1/KS/II/2023 tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengadaan Asuransi Angkutan Barang Periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

c. Transport fee for Train victims from the accident place

1) Train Passenger	:
2) Officer on Train	:

The Company's obligation to pay insurance premium PT Jasa Raharja Putera through PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Bandung Branch.

Total mandatory contribution to be paid by the Company to PT Jasa Raharja Putera for train passenger amounted to Rp10,383,697 and officer on train amounted to Rp149,271, respectively.

b. The Company has signed addendum of agreement No. KL.702/II/13/KA-2023 and P/1.1/KS/II/2023 on February 14, 2022 regarding Procurement of Insurance for Freight Transportation for Period January 1, 2023 until December 31, 2025.

	<u>Rp</u>	
1) Angkutan batu bara		1) Coal freight
Setiap Kejadian	: 650.000	: Per accident
Peti kemas per kejadian	: 150.000	: Container per accident
Jumlah ganti rugi periode pertanggung	: 7.500.000	: Amount of the compensation for the period cover
2) Angkutan Non Peti kemas untuk setiap kejadian	: 500.000	: 2) Non - Container Goods
Jumlah ganti rugi periode pertanggung	: 6.000.000	: Per accident
		: Amount of the compensation for the period cover
3) Angkutan Bahan Bakar Minyak dan CPO		3) Fuel and Crude Palm Oil Freight
Setiap kejadian	: 600.000	: Per Accident
Jumlah ganti rugi periode pertanggung	: 6.000.000	: Amount of the compensation for the period cover
4) Angkutan Barang menggunakan kereta api dengan peti kemas dan multi komoditas:		4) Freight transportation by trains using containers and multi commodities:
Setiap kejadian	: 500.000	: Per accident
Peti kemas per kejadian	: 150.000	: Container per accident
Jumlah ganti rugi periode pertanggung	: 6.000.000	: Amount of the compensation for the period cover

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

2. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Jasa Raharja (Persero)

Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan PT Jasa Raharja (Persero) tentang Asuransi Wajib Kecelakaan Penumpang Kereta Api untuk Periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026 No. KL.702/II/18/KA-2022 tanggal 28 Januari 2022 yang diaddendum dengan perjanjian No. KL.702/II/9/KA-2023 tanggal 9 Januari 2023. Lingkup jaminan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah penumpang sah kereta api.

Perhitungan manfaat asuransi dengan rincian sebagai berikut:
Penumpang KA

	<u>Rp</u>	
Meninggal Dunia	50.000	: Death
1) Cacat tetap (maksimum)	50.000	: 1) Permanent disability (maximum)
2) Biaya perawatan (maksimum)	20.000	: 2) Recovery costs (maximum)
3) Biaya P3K (maksimum)	1.000	: 3) First aid kit cost (maximum)
4) Biaya ambulans	500	: 4) Ambulance cost
5) Biaya pemakaman	4.000	: 5) Funeral cost

Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi kepada PT Jasa Raharja (Persero) serta menyetorkan ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bandung.

Jumlah iuran wajib yang harus dipungut oleh Perusahaan adalah sebesar Rp120 (Rupiah penuh) per penumpang untuk setiap kali perjalanan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia tentang Pengadaan Asuransi Kesehatan Dewan Komisaris Beserta Keluarga, Direksi beserta Keluarga dan Organ Pendukung Dewan Komisaris periode 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2025 No. KL.702/II/1/KA-2024 tanggal 29 Februari 2024.

2. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Jasa Raharja (Persero)

The Company has entered into the agreement with PT Jasa Raharja (Persero) regarding to Statutory Insurance Accident for Train Passenger for period January 1, 2022 until December 31, 2026 No. KL.702/II/18/KA-2022 dated January 28, 2022 which was amended with agreement No. KL.702/II/9/KA-2023 dated January 9, 2023. Scope of train passenger insurance coverage as set forth in this agreement is legal passenger train.

The insurance benefits calculations are follows:
Passenger Train

The Company was obligated to pay premium to PT Jasa Raharja (Persero) and deposit it to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung Branch.

Total obligated of contributions that collected by Company from passenger in amount of Rp120 (full amount) for each Passenger in one trip, for period from January 1, 2022 until December 31, 2026.

3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia

The Company signed an agreement with PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia regarding Procurement for Insurance of Healthcare for Board of Commissioners and Board of Directors and Family, and Board of Commissioners Support Organization for period from March 1, 2024 through February 28, 2025 No. KL.702/II/1/KA-2024 dated February 29, 2024.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

Lingkup Jaminan Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah Dewan Komisaris Beserta Keluarga, Direksi Beserta Keluarga dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.

Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi kepada PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia serta menyetorkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Ahmad Yani.

Jumlah total biaya premi yang dibayarkan sebesar Rp1.711.103 termasuk biaya polis dan premi.

4. PT Asuransi Wahana Tata

- a. Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Asuransi Wahana Tata tentang Pengadaan Asuransi Aset Sarana PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.702/XII/6/KA-2022 dan No. 692/DIR/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan 31 Oktober 2025. Lingkup Jaminan Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah Aset Sarana Perusahaan dengan kondisi semua risiko properti, gempa bumi, dan terorisme dan sabotase. Premi yang telah disepakati sebesar Rp157.587.705 dengan nilai premi per periode pertanggungan adalah sebesar Rp52.529.235.

Besaran klaim atas risiko sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Polis Semua Risiko Properti Kerusakan Aset Sarana:
 - i. Pada saat operasi adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD35,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
 - ii. Pada saat Dipo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD350,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.

50. Significant Agreements (Continued)

The Scope of Insurance Coverage as set in this agreement was Board of Commissioners and Family, Board of Directors and Family, and Board of Commissioners Support Organization.

The Company was obliged to pay insurance premium to PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia and deposit them to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Ahmad Yani Branch.

The insurance premium paid amounted to Rp1,711,103 including policy fee and premium.

4. PT Asuransi Wahana Tata

- a. *The Company signed an agreement with PT Asuransi Wahana Tata regarding Procurement for Insurance on Means of Transportation Assets of PT Kereta Api Indonesia (Persero) No. KL.702/XII/6/KA-2022 and No. 692/DIR/XII/2022 dated December 5, 2022 with the term of the agreement was effective from October 31, 2022 through October 31, 2025. The Scope of Insurance Coverage as set forth in this agreement was means of Transportation Assets of The Company for property all risks, earthquake, terrorism and sabotage. Premiums agreed amounted to Rp157,587,705 with premium value per coverage period amounting to Rp52,529,235.*

The amount of claims as follows:

- 1) *Property All Risks Policy Transportation Assets Damage:*
 - i. *When operating is 10% of loss, or USD35,000 (full amount) in minimum for each loss occurred.*
 - ii. *When in depot or Workshop is 10% of loss, or USD350,000 (full amount) in minimum for each loss occurred.*

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

- 2) Polis Gempa Bumi
Kerusakan Aset Sarana
- i. Pada saat operasi adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD35,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian
 - ii. Pada saat Dipo atau Balai Yasa adalah 10% dari kerugian, atau minimal USD350,000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
- 3) Polis terorisme dan sabotase
Kerusakan aset sarana sebesar USD250.000 (nilai penuh) setiap mengalami kerugian.
- Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi kepada PT Asuransi Wahana Tata (Persero) serta menyetorkan ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Wisma Tugu.
- b. Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Asuransi Wahana Tata tentang Pengadaan Asuransi Aset Sarana, Prasarana dan Fasilitas LRT Jabodetabek No. KL.702/IV/15/KA-2024 tanggal 5 April 2024 dengan jangka waktu perjanjian selama 3 tahun berlaku surut terhitung sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan 30 November 2026.
- Lingkup Jaminan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah Aset Sarana, Prasarana dan Fasilitas LRT Jabodetabek dengan kondisi semua risiko properti, gempa bumi, dan terorisme dan sabotase. Premi yang telah disepakati sebesar Rp130.170.431 dengan nilai premi per periode pertanggung jawaban adalah sebesar Rp43.390.143.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Significant Agreements (Continued)

- 2) *Earthquake Policy*
Transportation Assets Damage
- i. When operating is 10% of loss, or USD35,000 (full amount) in minimum for each loss occurred.*
 - ii. While in depot or Workshop is 10% of loss, or USD350,000 (full amount) in minimum for each loss occurred.*
- 3) *Terrorism and sabotage policy*
Transportation Assets Damage of USD250,000 (full amount) for each loss occurred.
- The Company is obliged to pay insurance premiums to PT Asuransi Wahana Tata (Persero) and deposit them to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Jakarta Wisma Tugu Branch.*
- b. *The Company signed an agreement with PT Asuransi Wahana Tata regarding Procurement for Insurance on Means of Transportation Assets, Infrastructure and Facility of LRT Jabodetabek No. KL.702/IV/15/KA 2024 dated April 5, 2024 with the 3 years term of the agreement retroactive from November 30, 2023 through November 30, 2026.*
- The Scope of Insurance Coverage as set forth in this agreement was means of Transportation Assets, Infrastructure and Facility of LRT Jabodetabek for property all risks, earthquake, terrorism and sabotage. Premiums agreed amounted to Rp130,170,431 with premium value per coverage period amounting to Rp43,390,143.*

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

5. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jiwa IFG (Life)

Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) tentang Pengelolaan Program Asuransi JS Pendanaan Hari Tua Bagi Pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero). Berdasarkan perjanjian No. KL.705/VI/10/KA-2021 dan No. 00056/SJ/T/HKM/0621 tanggal 2 Juni 2021 terhitung sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan 30 April 2026, PT Asuransi Jiwasraya melakukan pengalihan polis asuransi kepada PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Premi asuransi untuk program JHT dikelola secara *Individual Account* dan *Pooled Fund Account* ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dana awal pada saat awal mulai berlakunya asuransi sebesar Rp1.578.127.345 dan
- b. Dana lanjutan berupa premi berkala bulanan sebesar 17,25% dari gaji dasar asuransi tiap bulan berjalan yang terdiri dari:
 - luran tertanggung/peserta sebesar 4,75% dari gaji dasar asuransi tiap bulan berjalan; dan
 - luran perusahaan sebesar 12,5% dari gaji dasar asuransi tiap bulan berjalan.

Premi asuransi untuk program pasca kerja dikelola secara *Pooled Fund Account* ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dana awal pada saat awal mulai berlakunya asuransi sebesar Rp223.601.602; dan
- b. Dana lanjutan berupa premi berkala tahunan yang bersumber dari iuran perusahaan berdasarkan valuasi premi yang akan dilakukan setiap bulan Oktober, sebesar 5% dari gaji dasar asuransi tahun sebelumnya.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Significant Agreements (Continued)

5. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jiwa IFG (Life)

The Company signed an agreement with PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) regarding management of the JS Insurance program for old age funding for employee PT Kereta Api Indonesia (Persero). Based on Agreement No. KL.705/VI/10/KA-2021 and No. 00056/SJ/T/HKM/0621 dated June 2, 2021 as of May 1, 2021 through April 30, 2026, PT Asuransi Jiwasraya transferred the insurance policy to PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

Insurance premium for JHT program managed with Individual Account and Pooled Fund Account set as follows:

- a. The initial fund at the start of the insurance is Rp1,578,127,345 and
- b. Continuation funds in the form of monthly periodic premiums is 17.25% from insurance basic salary each current month consist of:
 - The contribution of the insured/participant is 4.75% of the basic insurance salary each month; and
 - The company contribution is 12.5% of the basic insurance salary each month.

Insurance premiums for post-employment programs managed by a Pooled Fund Account are determined as follows:

- a. The initial fund at the start of the insurance is Rp223,601,602; and
- b. Continuation funds in the form of annual periodic premiums sourced from company contributions based on premium valuations which will be carried out every October, amounting to 5% of the previous year's basic insurance salary.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

50. Significant Agreements (Continued)

6. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jasa Indonesia

Perusahaan melakukan Perjanjian dengan PT Asuransi Jasa Indonesia tentang Pengadaan Jasa Asuransi *Directors and Officers Liability* No. KL.702/IV/9/KA-2024 tanggal 3 April 2024. Lingkup jaminan pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah risiko *liability* para *Directors and Officers Liability* termasuk Dewan Komisaris.

Kewajiban Perusahaan adalah membayar premi asuransi kepada PT Asuransi Jasa Indonesia melalui Bank Mandiri Cabang MT Haryono.

Perjanjian ini berlaku surut dengan jangka waktu satu tahun sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2025.

Jumlah total biaya premi yang dibayarkan sebesar Rp1.700.000 termasuk biaya polis dan premi.

c. Perjanjian Pengadaan BBM PT Pertamina (Persero) - PT Pertamina Patra Niaga

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian dengan PT Pertamina Patra Niaga tentang Pengadaan BBM No. KL.702/III/2/KA-2024 tanggal 1 Maret 2024. Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- Perjanjian ini berlaku sejak 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2025.
- Harga BBM bersubsidi mengacu kepada Peraturan Presiden No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Untuk harga BBM non-subsidi PT Pertamina Patra Niaga memberikan potongan harga sebesar 5% (lima persen).
- Biaya Jasa *Handling/Vendor Held Stock* sebesar Rp438/liter yang dibebankan kepada Perusahaan.

6. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - PT Asuransi Jasa Indonesia

The Company has entered into an agreement with PT Asuransi Jasa Indonesia regarding Procurement for Insurance Service of Directors and Employee Obligation No. KL.702/IV/9/KA-2024 dated April, 3 2024. The scope of insurance coverage as set forth in this agreement is directors and officers liabilities.

The Company's obligation to pay insurance premium to PT Asuransi Jasa Indonesia through Bank Mandiri, MT Haryono Branch.

This agreement is retroactive with a period of one year from March 1, 2024 to February 28, 2025.

Total premium paid amounting to Rp1,700,000 including policy fee and premium.

c. Procurement of BBM Agreement PT Pertamina (Persero) - PT Pertamina Patra Niaga

The Company has entered into agreement with PT Pertamina Patra Niaga regarding the Procurement of BBM No. KL.702/III/2/KA-2024 on March 1, 2024 with the terms and conditions as follows:

- This agreement is valid from 1 January 2024 to 31 December 2025.
- The subsidized fuel price refers to Presidential Regulation No. 191/2014 concerning the Provision, Distribution and Selling Price of Retail Fuel Oil. For fuel prices non-subsidies PT Pertamina Patra Niaga provides a discount of 5% (five percent).
- Handling/Vendor Held Stock Service Fee of Rp438/litre which is charged to The Company

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

d. Perjanjian Fasilitas Pinjaman antara Perusahaan, China Development Bank sebagai Pemberi Pinjaman Awal, China Development Bank sebagai Agen Pinjaman dan Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch sebagai Agen

Pada tanggal 29 Desember 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak dengan No. 3520202401100001645. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 25 April 2069. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas:

- a. Fasilitas Pinjaman berjangka USD dalam keseluruhan jumlah yang sama dengan Total Komitmen Fasilitas A sebesar USD325.620.000; dan
- b. Fasilitas Pinjaman berjangka RMB dalam keseluruhan jumlah yang sama dengan Total Komitmen Fasilitas B untuk digunakan dalam RMB atau setara dengan USD217.080.000.

Suku bunga yang digunakan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas A 3,20% per tahun; dan
- b. Fasilitas B 3,10% per tahun.

Fasilitas Pinjaman tersebut seluruhnya akan digunakan untuk memberikan pendanaan kepada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui kontribusi modal sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, untuk mendanai jumlah kenaikan biaya proyek.

Pinjaman antara Perusahaan dan Pemberi Fasilitas dijamin oleh Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) berdasarkan peraturan pemerintah No. 239/KM.8/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penugasan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) untuk Melakukan Penjaminan Pemerintah secara Bersama atas Pinjaman Perusahaan dalam Rangka Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta Bandung.

50. Significant Agreements (Continued)

d. Loan Facility Agreement between the Company, China Development Bank as Initial Lender, China Development Bank as Loan Agent and Bank of China (Hong Kong) Limited Jakarta Branch as Agent

On 29 December 2023, the Company entered into a Loan Facility Agreement with the following parties with No. 3520202401100001645. This agreement is valid until 25 April 2069. The loan facility consists of two facilities:

- a. USD Term Loan Facility in an aggregate amount equal to the Total Commitment of Facility A amounted to USD325,620,000; and
- b. RMB Term Loan Facility in an aggregate amount equal to the Total Commitment of Facility B to be used in RMB or equivalent to USD217,080,000.

The interest rates used in this agreement are as follows:

- a. Facility A 3.20% per year; and
- b. Facility B 3.10% per year.

The entire Loan Facility will be used to provide funding to the Jakarta-Bandung High Speed Train project through capital contributions in accordance with all applicable laws and regulations, to fund the total project cost increase.

Loans between the Company and the Facility Provider are guaranteed by the Government through PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) based on government regulation No. 239/KM.8/2023 dated December 28, 2023 concerning Assignment to PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) to Provide Government Guarantees Jointly for the Company's Loans in the Context of Accelerating the Implementation of Fast Train Infrastructure and Facilities between Jakarta Bandung.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

e. Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dalam Rangka Pembiayaan Kelebihan Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung

Pada tanggal 31 Januari 2024, Perusahaan menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 25 April 2069. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas:

- a. Fasilitas Pinjaman berjangka USD dalam keseluruhan jumlah yang sama dengan Total Komitmen Fasilitas A sebesar USD325.620.000; dan
- b. Fasilitas Pinjaman berjangka RMB dalam keseluruhan jumlah yang sama dengan Total Komitmen Fasilitas B sebesar USD217.080.000.

Suku bunga yang digunakan dalam perjanjian ini adalah sebagai berikut:

- a. Fasilitas A 3,30% per tahun; dan
- b. Fasilitas B 3,20% per tahun.

Fasilitas Pinjaman tersebut seluruhnya akan digunakan untuk memberikan pendanaan kepada KCIC melalui Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PSBI dengan cara yang sesuai dengan dokumen-dokumen pembiayaan dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangka mendanai jumlah kelebihan biaya.

f. Perjanjian Kerjasama Integrasi Aksesibilitas Light Rail Transit (LRT) Jakarta Bogor Depok Bekasi

Pada tanggal 4 Maret 2024 Perusahaan menandatangani perjanjian Kerjasama dengan para pihak No. 031-2/2024/018. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal efektif perjanjian ini, sampai dengan 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai dengan diserahkan aksesibilitas terkait kepada pemerintah daerah terkait.

Nilai Kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Tahap Pertama sebesar Rp50.000.000 yang dilakukan setelah penandatanganan berita acara kesepakatan mediasi oleh kedua belah pihak.

50. Significant Agreements (Continued)

e. Shareholder Loan Agreement for the Financing of Cost Overruns of the Jakarta Bandung High Speed Rail Project

On 31 January 2024, the Company signed a Loan Facility Agreement with the parties. No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. This agreement is valid until 25 April 2069. The loan facility consists of two facilities:

- a. USD Term Loan Facility in an aggregate amount equal to the Total Commitment of Facility A amounted to USD325,620,000; and
- b. RMB Term Loan Facility in an aggregate amount equal to the Total Commitment of Facility B to be used in RMB or equivalent to USD217,080,000.

The interest rates used in this agreement are as follows:

- a. Facility A 3.30% per year; and
- b. Facility B 3.20% per year.

The Loan Facility will be utilised entirely to provide funding to KCIC through the PSBI Shareholder Loan Agreement in a manner consistent with the financing documents and all applicable laws and regulations, in order to fund the cost overrun amount.

f. Cooperation Agreement for Light Rail Transit (LRT) Accessibility Integration Jakarta Bogor Depok Bekasi

On March 4, 2024 the Company signed a Cooperation agreement with the parties No. 031-2/2024/018. This agreement is valid from the effective date of this agreement, up to 5 years and can be extended until the handover of related accessibility to the relevant local government.

The Cooperation Value agreed by both parties is as follows:

1. The first phase amounted to Rp50,000,000 which was carried out after the signing of the minutes of the mediation agreement by both parties.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

50. Perjanjian-Perjanjian Penting (Lanjutan)

2. Tahap Kedua sebesar Rp50.000.000 yang dilakukan setelah pencairan fasilitas kredit sindikasi sebesar Rp4.169.128.801 dari KAI diterima oleh Adhi.

50. Significant Agreements (Continued)

2. The second phase amounted to Rp50,000,000 which was carried out after the disbursement of syndicated credit facilities amounting to Rp4,169,128,801 from KAI was received by Adhi.

51. Kontinjensi

Perusahaan merupakan tergugat 1 (satu) dalam gugatan yang diajukan oleh Tengku Hamdy Osman Delikhan melalui Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam perkara 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn pada tanggal 5 Februari 2021. Inti dari gugatan tersebut adalah Tengku Hamdy Osman Delikhan menggugat KAI karena tahun 1868 terjadi perjanjian konsesi antara Sultan Deli dan DSM selama 90 tahun yang seharusnya berakhir tahun 2002 dan aset tersebut dikembalikan ke Tengku Hamdy Osman Delikhan. Penggugat mengklaim bahwa Perusahaan merugikan penggugat dan menuntut pembayaran ganti rugi sebesar Rp707.340.000.

Pada tanggal 23 November 2021, Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan putusan atas perkara No. 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn yang pada menyatakan menolak tuntutan penggugat.

Pada tanggal 14 Desember 2022, Tengku Hamdy Osman Delikhan Al Haj gelar Tengku Raja Muda Deli mengajukan banding dengan nomor perkara 381/Pdt/2023/PT MDN. Pada tanggal 25 Juli 2023, putusan banding adalah menguatkan putusan PN Medan Nomor 48/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 23 November 2021.

Pada tanggal 29 Agustus 2023, Tengku Hamdy Osman Delikhan al-Haj gelar Tengku Raja Muda Deli mengajukan Kasasi. Sampai dengan laporan ini diterbitkan, perkara ini masih dalam proses pengajuan Kasasi.

Sehubungan pelaksanaan upaya eksekusi kepada Tengku Hamdy Osman Delikhan, sampai dengan diterbitkan laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan berupaya untuk memperoleh informasi atau penelusuran terhadap aset/harta kekayaan yang tercatat atau terdaftar sebagai milik/atas nama Tengku Hamdy Osman Delikhan yang nantinya akan dijadikan sebagai objek eksekusi.

51. Contingencies

The company constitute as the 1 (one) defendant in the act against the law lawsuit as submitted by Tengku Hamdy Osman Delikhan through Medan District Court submitted as the case 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn on February 5, 2021. The point of lawsuit is the Company get sued about in 1868 There was a concession agreement between Sultan Deli and DSM for 90 years which should have ended in 2002 and the assets were returned to Tengku Hamdy Osman Delikhan. The plaintiff claimed the Company for harm and sued compensation of Rp707,340,000.

On November 23, 2021, Medan District Court had been issued case verdict No. 48/Pdt.G/2021/PN.Mdn which substantially stated rejected the plaintiff's claim.

On December 14, 2022, Tengku Hamdy Osman Delikhan Al Haj with the title Tengku Raja Muda Deli filed an appeal as the case 381/Pdt/2023/PT MDN. On July 25, 2023, the appeal decision upheld the decision of Medan District Court Number 48/Pdt.G/2021/PN Mdn dated November 23, 2021.

On August 29, 2023, Tengku Hamdy Osman Delikhan al-Haj, with the title Tengku Raja Muda Deli, filed a Cassation. As of the issuance of this report, the case is still in the process of Cassation.

In connection with the execution of execution efforts against Tengku Hamdy Osman Delikhan, until the issuance of the consolidated financial statements, the Company seeks to obtain information or search for assets / assets recorded or registered as belonging to / in the name of Tengku Hamdy Osman Delikhan which will be used as an object of execution.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK**
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**
Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada
Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk
Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES**
**NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**
For the Five-Month Periods Ended
May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for
the Years Ended
December 31, 2023 and 2022
(In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

51. Kontijensi (Lanjutan)

Pada tanggal 6 Juni 2024, keputusan tingkat Kasasi menolak permohonan Kasasi dari Tengku Hamdy Osman Delikhan.

51. Contingencies (Continued)

On 6 June 2024, the decision of the Cassation level rejected the appeal of Tengku Hamdy Osman Delikhan.

52. Informasi Tambahan Terkait Arus Kas

Tabel di bawah ini menunjukkan transaksi investasi yang tidak menggunakan kas:

52. Additional Information Related to Cash Flows

The table below represents non-cash investment transactions:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024	31 Desember/December 31		
		2023	2022	
Penambahan Aset melalui Utang Usaha:				Addition of Assets through Trade Payables:
Aset Tetap	235.261.418	674.922.979	78.231.822	Fixed Assets
Aset Takberwujud	3.754.990	29.263.728	16.195.823	Intangible Assets
Hak Pengoperasian Aset Prasarana	25.780.769	4.171.680.096	54.746.697	Infrastructure Assets Operating Rights
Uang Muka:				Advances:
Aset Tetap	53.392.456	20.640.000	133.044.938	Fixed Assets
Hibah:				Grant:
Aset Tetap	--	--	256.775	Fixed Assets
Pinjaman Bank:				Bank Loan:
Aset Tetap	--	--	58.055.044	Fixed Assets
Hak Pengoperasian Aset Prasarana	--	--	238.575.780	Infrastructure Assets Operating Rights
Penambahan Investasi pada Ventura Bersama melalui Reklasifikasi dari Uang Muka Setoran Modal	--	--	7.230.581.343	Addition of Investment in Joint Venture through Reclassification of Paid in Capital Advance
Penerimaan Bunga Pinjaman dari Ventura Bersama melalui Piutang Lain-lain PSBI	--	--	138.896.858	Receipt of Loan Interest from Joint Venture through Other Receivables of PSBI
Penjualan Aset melalui Piutang	--	31.299.180	--	Asset Sales through Receivables
Jumlah	318.189.633	4.927.805.983	7.948.585.080	Total

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2024, 31 Desember 2023, dan 2022, sebagai berikut:

The table below represents a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the years ended May 31, 2024, December 31, 2023, and 2022, as follows:

	31 Mei 2024/May 31, 2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas/ Cash Flow		Non-kas/ Non-cash		Saldo Akhir/ Ending Balance
		Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment			
Pinjaman Jangka Pendek	1.388.523.138	3.126.678.432	(2.572.774.711)	--	1.942.426.859	Short-term Loan
Pinjaman Jangka Panjang	21.436.640.970	11.415.281.630	(471.029.220)	209.702.641	32.590.596.021	Long-term Loan
Utang Obligasi Jangka Pendek	1.898.852.925	--	--	492.906	1.899.345.831	Short-term Bonds Payable
Utang Obligasi Jangka Panjang	2.594.469.619	--	--	574.663	2.595.044.282	Long-term Bonds Payable
Sukuk	498.586.194	--	--	116.284	498.702.478	Sukuk
Liabilitas Sewa	110.670.889	--	(25.626.485)	8.718.517	93.762.921	Lease Liabilities
Pinjaman Program PEN	3.062.500.000	--	(218.750.000)	--	2.843.750.000	PEN Program Loan
	31 Desember 2023/December 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas/ Cash Flow		Non-kas/ Non-cash		Saldo Akhir/ Ending Balance
		Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment			
Pinjaman Jangka Pendek	1.760.000.000	5.636.300.935	(6.007.777.797)	--	1.388.523.138	Short-term Loan
Pinjaman Jangka Panjang	19.479.590.418	3.200.303.452	(1.236.391.211)	(6.861.689)	21.436.640.970	Long-term Loan
Utang Obligasi Jangka Pendek	--	--	--	1.898.852.925	1.898.852.925	Short-term Bonds Payable
Utang Obligasi Jangka Panjang	4.490.760.381	--	--	(1.896.290.762)	2.594.469.619	Long-term Bonds Payable
Sukuk	498.307.111	--	--	279.083	498.586.194	Sukuk
Liabilitas Sewa	61.162.900	--	(31.554.208)	81.062.197	110.670.889	Lease Liabilities
Pinjaman Program PEN	3.500.000.000	--	(437.500.000)	--	3.062.500.000	PEN Program Loan

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

52. Informasi Tambahan Terkait Arus Kas

52. Additional Information Related to Cash Flows

	31 Desember 2022/December 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Arus Kas/ Cash Flow		Non-kas/ Non-cash	Saldo Akhir/ Ending Balance	
		Penerimaan/ Receipt	Pembayaran/ Payment			
Pinjaman Jangka Pendek	2.659.962.173	13.706.510.355	(14.606.472.528)	--	1.760.000.000	Short-term Loan
Pinjaman Jangka Panjang	17.436.738.082	2.654.659.753	(941.505.588)	329.698.171	19.479.590.418	Long-term Loan
Utang Obligasi Jangka Pendek	999.447.166	--	(1.000.000.000)	552.834	--	Short-term Bonds Payable
Utang Obligasi Jangka Panjang	2.993.800.573	1.500.000.000	(5.041.083)	2.000.891	4.490.760.381	Long-term Bonds Payable
Sukuk	--	500.000.000	(1.785.917)	93.028	498.307.111	Sukuk
Liabilitas Sewa	82.145.435	--	(37.190.355)	16.207.820	61.162.900	Lease Liabilities
Pinjaman Program PEN	3.500.000.000	--	--	--	3.500.000.000	PEN Program Loan

53. Informasi Penting Lainnya

53. Other Important Information

a. Track Charge Access (TAC)

Pada tanggal 28 Maret 2024, telah terbit Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan peraturan tersebut, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam hal ini TAC, ditetapkan dalam kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal penentuan tarif, Kementerian Perhubungan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Hingga laporan ini diterbitkan, belum terbit kontrak Kerjasama antara Grup dengan Kementerian Perhubungan dan Persetujuan dari Menteri Keuangan atas tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pada 31 Mei 2024, Grup membukukan Beban TAC dalam akun Biaya Masih Harus Dibayar berdasarkan *self assessment* yang didasari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

a. Track Charge Access (TAC)

On March 28, 2024, Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 20 of 2024 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Finance Number 138/PMK.02/2021 concerning Types and Rate on Types of Non-Tax State Revenue that are Volatile and Urgent Needs that Apply to the Ministry of Transportation was issued.

Based on the regulation, the rate on the type of non-tax state revenue, in this case TAC, is determined in the cooperation contract in accordance with the provisions of laws and regulations. In terms of rate determination, the Ministry of Transportation must first obtain approval from the Minister of Finance.

Up to the issuance of this report, the cooperation contract between the Group and the Ministry of Transportation and the approval from the Minister of Finance on the Non-Tax State Revenue Rate have not been issued. As of May 31, 2024, the Group recorded TAC Expenses in Accrued Expenses account based on *self-assessment* based on the Company's Work Plan and Budget.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

53. Informasi Penting Lainnya (Lanjutan)

53. Other Important Information (Continued)

b. Backlog Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO)

Perusahaan saat ini sedang melakukan upaya untuk melakukan penagihan atas *Backlog* Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Tahun Anggaran 2015-2022 melalui Review oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). *Backlog* Biaya IMO muncul dikarenakan realisasi Biaya IMO yang dikeluarkan oleh Perusahaan berdasarkan kebutuhan biaya yang mutlak harus dikeluarkan untuk melakukan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dalam rangka menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api, sementara penggantian biaya IMO yang dilakukan oleh Pemerintah sebesar nilai kontrak dimana nilai tersebut dibatasi oleh alokasi anggaran dalam APBN sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) No. 53/2012.

Perusahaan mendapat dukungan dari Kementerian BUMN sebagai pemegang saham utama Perusahaan melalui surat tanggal 29 Desember 2023 kepada BPKP untuk melakukan *review* atas *Backlog* IMO.

Pada tanggal 22 Februari 2024, telah terbit Peraturan Presiden No. 33/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No. 53/2012. Berdasarkan peraturan tersebut, Perusahaan dapat mengajukan usulan kurang bayar atas IMO tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya setelah melalui evaluasi Kementerian Perhubungan dan *review* BPKP.

Pada tanggal 26 Februari 2024, Perusahaan telah mengirimkan surat Permohonan Pembayaran Selisih Kurang Biaya Pengoperasian dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) Tahun 2023 sebesar Rp3.294.304.356 yang saat ini masih dalam proses *review* BPKP dan diharapkan dapat selesai pada tahun 2024.

b. Backlog of Infrastructure and Maintenance Operation (IMO)

The Company is currently making efforts to collect the Backlog of Infrastructure and Maintenance Operation (IMO) of State-owned Railway Infrastructure for the 2015-2022 Fiscal Year through a Review by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The IMO Cost Backlog arises due to the realization of IMO Costs incurred by the Company based on the absolute costs that must be incurred to carry out maintenance and operation of railway infrastructure in order to ensure the security and safety of train travel, while reimbursement of IMO costs carried out by the Government is equal to the contract value where this value limited by budget allocations in the APBN as per Presidential per Presidential Regulation (Perpres) No. 53/2012.

The Company received support from the Ministry of Stated-own Enterprise as the Company's main shareholder through a letter dated December 29, 2023 to BPKP to conduct a review of the IMO Backlog.

On February 22, 2024, Presidential Decree No. 33/2024 on the Third Amendment to Presidential Regulation No. 53/2012 was issued. Based on the regulation, the Company can submit a proposal for underpayment of IMO for 2023 and subsequent years after going through the Ministry of Transportation's evaluation and BPKP's review.

On February 26, 2024, the Company has sent a letter requesting payment of the difference in the cost of operation and maintenance of state-owned railway infrastructure (IMO) in 2023 amounting to Rp3,294,304,356 which is currently still in the BPKP review process and is expected to be completed in 2024.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

54. Standar Akuntansi yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 104: Kontrak Asuransi;
- Amendemen PSAK 104: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 104 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif; dan
- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 104: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan
- PSAK107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK109: Instrumen Keuangan
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan
- PSAK 207: Laporan Arus Kas
- PSAK 216: Aset Tetap
- PSAK 219: Imbalan Kerja
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 232: Instrumen Keuangan Penyajian
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi
- PSAK 238: Aset Takberwujud
- PSAK 240: Properti Investasi

Hingga tanggal laporan keuangan konsolidasian interim ini diotorisasi, Grup masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen atas standar tersebut.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

54. Accounting Standard has been Issued not Yet Effective

New Standard and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- PSAK 104: Insurance Contract;
- Amendments PSAK 104: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 104 and PSAK 109 – Comparative Information; and
- Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding Lack of Exchangeability.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 104: Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 103: Business Combinations
- PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
- PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures
- PSAK 109: Financial Instruments
- PSAK 115: Income from Contracts with Customers
- PSAK 201; Presentation of Financial Statements
- PSAK 207: Statement of Cash Flows
- PSAK 216: Fixed Assets
- PSAK 219: Employee Benefits
- PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures
- PSAK 232: Financial Instruments: Presentation.
- PSAK 236 Impairment of Asset
- PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
- PSAK 238: Intangible Assets
- PSAK 240: Investment Property

Until the date of the interim consolidated financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the implementation those new standard and amendments to standards.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

55. Peristiwa-Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

55. Events After the Reporting Date

a. Pergantian Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 47 tanggal 16 Agustus 2024 dibuat di hadapan Notaris Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H. Notaris di Bandung yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0241626 tanggal 20 Agustus 2024, tentang Perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

Memberhentikan dengan hormat dan mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai anggota Direksi Perusahaan:

- a. Awan Hermawan Purwadinata sebagai Direktur Operasi; dan
- b. John Robertho sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Pengelolaan Sarana.

Memberhentikan dengan hormat Elen Setiadi sebagai Komisaris Perusahaan.

b. Pergantian Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 10/CH/DEKOM/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan yaitu mengangkat Satia Indrarini sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

c. Peringkat Perusahaan

Pada 30 Agustus 2024, Perusahaan mendapatkan peringkat "AAA" dari PEFINDO untuk periode 30 Agustus 2024 hingga 1 Agustus 2025.

d. Pencairan Obligasi dan Sukuk Berkelanjutan

Pada tanggal 9 Agustus 2024, Perusahaan menerima pencairan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II sebesar Rp700.000.000 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II sebesar Rp300.000.000.

a. Changes in the Composition of the Company's Board of Commissioners and Director

Based on the Deed No. 47 dated August 16, 2024 made in presence of Nining Puspitaningtyas, S.H., Sp.1., M.H. in Notary Bandung that have approved by the Ministry of Law and Human Rights with Decision Letter No. AHU-AH.01.09-0241626 dated August 20, 2024, regarding the Termination and Appointment of Members of the Board of Directors and Commissioner of the Company.

Honorable discharge and appointment the names below as members of the Company's Board of Directors:

- a. Awan Hermawan Purwadinata as Director of Operations; and
- b. John Robertho as Director of Strategic Planning and Rolling Stock Management.

Honorable discharge Elen Setiadi of the Company's Commissioner.

b. Changes in the Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Based on the Decree of the Board of Commissioner No. 10/CH/DEKOM/VI/2024 dated June 28, 2024, regarding the Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee of the Company namely appointing Satia Indrarini as a member of the the Nomination and Remuneration Committee.

c. The Company's Rating

As of August 30, 2024, the Company is rated "AAA" by PEFINDO for the period August 30, 2024 until August 1, 2025.

d. Continuous Bond and Sukuk Disbursement

On 9 August 2024, the Company received disbursement of Shelf-Registered Bonds I Phase II amounting to Rp700,000,000 and Shelf-Registered Sukuk Ijarah I Phase II amounting to Rp300,000,000.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

56. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

56. Reissuance of the Interim Consolidated Financial Statement

Sebelumnya Manajemen telah menerbitkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 31 Mei 2024 pada tanggal 2 Agustus 2024, dan memutuskan untuk menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian dengan perubahan dan tambahan pengungkapan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim dan Catatan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim sebagai berikut:

Previously, Management had issued the Interim Consolidated Financial Statements as of May 31, 2024, on August 2, 2024, and decided to reissue the consolidated financial statements with changes and additional disclosures on the Interim Interim Consolidated Financial Statements and Notes to the Interim Consolidated Financial Statements as follows:

	31 Mei 2024/ May 31, 2024		
	Sebelum Penerbitan Kembali/ Before Reissued	Setelah Penerbitan Kembali/ After Reissued	
	<u>Perubahan Penyajian</u>		
Piutang Lain-lain	48.006.498	--	Other Receivables
Pihak Berelasi	--	8.183.000	Related Parties
Pihak Ketiga	--	39.823.498	Third Parties
Pendapatan Masih akan Diterima	3.046.942.642	--	Accrued Income
Pihak Berelasi	--	2.624.275.207	Related Parties
Pihak Ketiga	--	422.667.435	Third Parties
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	316.888.544	--	Advances and Prepaid Expenses
Uang Muka	--	64.240.770	Advances
Biaya Dibayar di Muka	--	252.647.774	Prepaid Expenses
	31 Desember 2023/ December 31, 2023		
	Sebelum Penerbitan Kembali/ Before Reissued	Setelah Penerbitan Kembali/ After Reissued	
	<u>Perubahan Penyajian</u>		
Piutang Lain-lain	61.586.990	--	Other Receivables
Pihak Berelasi	--	8.183.000	Related Parties
Pihak Ketiga	--	53.403.990	Third Parties
Pendapatan Masih akan Diterima	763.740.040	--	Accrued Income
Pihak Berelasi	--	439.036.344	Related Parties
Pihak Ketiga	--	324.703.696	Third Parties
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	260.184.522	--	Advances and Prepaid Expenses
Uang Muka	--	92.819.225	Advances
Biaya Dibayar di Muka	--	167.365.297	Prepaid Expenses
	31 Desember 2022/ December 31, 2022		
	Sebelum Penerbitan Kembali/ Before Reissued	Setelah Penerbitan Kembali/ After Reissued	
	<u>Perubahan Penyajian</u>		
Piutang Lain-lain	90.003.063	--	Other Receivables
Pihak Berelasi	--	--	Related Parties
Pihak Ketiga	--	90.003.063	Third Parties
Pendapatan Masih akan Diterima	939.616.971	--	Accrued Income
Pihak Berelasi	--	719.566.683	Related Parties
Pihak Ketiga	--	220.050.288	Third Parties
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	120.303.174	--	Advances and Prepaid Expenses
Uang Muka	--	57.650.571	Advances
Biaya Dibayar di Muka	--	62.652.603	Prepaid Expenses

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM (Lanjutan)**

Untuk Periode-Periode Lima Bulan yang Berakhir pada Tanggal 31 Mei 2024 dan 2023 (Tidak Diaudit), dan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

56. Penerbitan Kembali Laporan Keuangan Konsolidasian Interim (Lanjutan)

Terdapat tambahan dan perubahan pengungkapan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim dan Catatan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim sebagai berikut:

- Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Interim - Komponen Ekuitas Lainnya
- Catatan 1.d Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Beserta Karyawan
- Catatan 2.a Pernyataan Kepatuhan
- Catatan 8 Piutang Lain-lain
- Catatan 11 Uang Muka
- Catatan 12 Biaya Dibayar di Muka
- Catatan 50 Perjanjian-Perjanjian Penting
- Catatan 51 Kontijensi
- Catatan 55 Peristiwa-Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

57. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Interim

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian interim merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 19 September, 2024.

**PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (Continued)**

For the Five-Month Periods Ended May 31, 2024 and 2023 (Unaudited), and for the Years Ended December 31, 2023 and 2022 (In Thousand of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

56. Reissuance of the Interim Consolidated Financial Statement (Continued)

There are additional and revision disclosures in the Interim Interim Consolidated Financial Statements and Notes to the Interim Consolidated Financial Statements as follows:

- *Interim Consolidated Statements of Financial Position – Other Component of Equity*
- *Note 1.d Board of Commissioners and Directors and Employees*
- *Note 2.a Statement of Compliance*
- *Note 8 Other Receivables*
- *Note 11 Advances*
- *Note 12 Prepaid Expenses*
- *Note 50 Significant Agreements*
- *Note 51 Contingencies*
- *Note 55 Events After the Reporting Date*
- *Note 2.a Statement of Compliance*

57. Management's Responsibility and Approval of the Interim Consolidated Financial Statements

The preparation and fair presentation of the interim consolidated financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors for issuance on September 19, 2024.

Halaman ini sengaja dikosongkan